RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 - 2026



BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Veteran No. 2 Kebumen 54311

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Kebumen adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Rencana Stategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari:
   a. Visi, Misi dan Program Bupati terpilih Tahun 2021; dan
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen dan RPJMN serta memperhatikan:
   a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
   b. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
   c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:
a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
b. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	:	PENUTUP

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
    b. pelaksanaan RPJMD.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan perencanaan RPJMD;
    b. pelaksanaan RPJMD; dan
    c. hasil RPJMD.
(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa penilaian hasil pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan target pencapaian kinerja akhir pembangunan jangka menengah.

(6) Penilaian hasil pelaksanaan RPJMD sebagaiman dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir.
(7) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
   d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-172/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KEBUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KEBUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, yang disusun dalam periodisasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana-rencana kegiatan yang bersifat indikatif serta penetapan indikator kinerja daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 1

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xv

LAMPIRAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 ..... I-1
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-7
1.4. Maksud dan Tujuan I-15
1.5. Pengarusutamaan Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... I-16
1.6. Sistematika Penulisan I-17

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-1
2.1.2. Topografi dan Kemiringan II-3
2.1.3. Geologi dan Tanah II-4
2.1.4. Hidrologi II-10
2.1.5. Klimatologi II-12
2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah II-13
2.1.7. Wilayah Rawan Bencana II-40
2.1.8. Kondisi Demografi II-45
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-49
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-49
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-57
2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga II-71
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-72
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-73
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-118
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan II-153
2.3.4. Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-170
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-177
2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah) II-183
2.3.7. Unsur Kewilayahan (Kecamatan) II-184
2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) II-185
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-186
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-186
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur II-187
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II-189

2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia II-191
2.5. Evaluasi capaian RPJMD Periode Sebelumnya (RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021) sampai dengan Tahun 2020 ..... II-193
2.6. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen II-202

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional III-1
3.2. Kondisi Perekonomian Daerah III-2
3.3. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-3
3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-4
3.3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah III-4
3.3.1.2. Kinerja Belanja Daerah III-8
3.3.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah III-12
3.3.2. Neraca Daerah III-14
3.3.2.1. Perkembangan Neraca Daerah III-14
3.3.2.2. Rasio Likuiditas III-19
3.3.2.3. Rasio Solvabilitas III-20
3.3.2.4. Rasio Aktivitas III-21
3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-22
3.4.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-22
3.4.1.1. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung III-22
3.4.1.2. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur III-23
3.4.1.3. Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama III-25
3.4.2. Analisis Pembiayaan Daerah III-27
3.4.2.1. Analisis Sumber Penutup Defisit III-27
3.4.2.2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran III-31
3.4.2.3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan III-33
3.5. Kerangka Pendanaan III-33
3.5.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan III-33
3.5.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah III-33
3.5.1.2. Proyeksi Belanja Daerah III-40
3.5.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah III-47
3.5.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan III-50

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah IV-1
4.1.1. Pembangunan Sumberdaya Manusia IV-3
4.1.2. Pembangunan Ekonomi IV-12
4.1.3. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup IV-18
4.1.4. Tata Kelola Pemerintahan IV-23
4.2. Lingkungan Strategis IV-31
4.2.1. Lingkungan Internal IV-32
4.2.2. Lingkungan Eksternal IV-40
4.3. Isu Strategis IV-48

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1. Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... V-1
5.2. Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026..... V-4
5.3. Tujuan dan Sasaran..... V-7

BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1. Strategi Pembangunan Daerah..... VI-2
6.1.1. Analisis Strategi Berdasarkan Isu Strategis Daerah VI-2
6.1.2. Analisis Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .. VI-28
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan..... VI-29
6.3. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 ..... VI-30
6.4. Program Pembangunan Daerah..... VI-31
6.5. Pelaksanaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal VI-47
6.6. Penjabaran Implementasi Program Unggulan VI-57
6.7. Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ..... VI-74
6.7.1. Penyelarasan Target Indikator Makro..... VI-74
6.7.2. Penyelarasan Program Prioritas VI-76

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah VII-3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan..... IX-2
9.2. Pedoman Transisi IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	I-9
Tabel 1.2	Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJMN Tahun 2020-2024	I-9
Tabel 1.3	Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD	I-10
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan	II-2
Tabel 2.2	Ketinggian Tanah dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Kebumen	II-3
Tabel 2.3	Persebaran Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Kebumen	II-10
Tabel 2.4	Mata Air di Kabupaten Kebumen	II-12
Tabel 2.5	Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen	II-12
Tabel 2.6	Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	II-13
Tabel 2.7	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Pola Ruang Kabupaten Kebumen	II-15
Tabel 2.8	Ringkasan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kebumen	II-16
Tabel 2.9	Ringkasan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen	II-27
Tabel 2.10	Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2020	II-40
Tabel 2.11	Persebaran Rawan Bencana Kabupaten Kebumen	II-41
Tabel 2.12	Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020	II-42
Tabel 2.13	Kinerja Penanganan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	II-42
Tabel 2.14	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.15	Daftar Desa Tangguh Bencana Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.16	Penduduk yang Bekerja (Usia 15 Tahun ke atas)	II-46
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2020	II-47
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020	II-47
Tabel 2.19	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).	II-49
Tabel 2.20	Peranan Sektoral dalam PDRB Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.21	Nilai Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung dari Keterkaitan Ke Belakang (Backward Linkages)	II-51
Tabel 2.22	Nilai Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung dari Keterkaitan Ke Depan (Forward Linkages)	II-52
Tabel 2.23	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 beserta Rata-Rata Pertumbuhannya	II-63
Tabel 2.24	Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.25	Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	II-65

Tabel 2.26 Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2019 ..... II-66
Tabel 2.27 Persentase Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2020 ..... II-67
Tabel 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-68
Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020 ..... II-69
Tabel 2.30 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda Kabupaten Kebumen 2016-2020 ..... II-70
Tabel 2.31 Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Kegiatan Olahraga di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-72
Tabel 2.32 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-72
Tabel 2.33 Rata-Rata Nilai per Unsur Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ..... II-73
Tabel 2.34 Tabel Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel 2.35 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2.36 Rasio Jumlah Lembaga PAUD Per Siswa Jenjang PAUD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2.37 Perkembangan Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-76
Tabel 2.38 Jumlah Siswa SD/MI Melanjutkan ke SLTP/MTs Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-81
Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-81
Tabel 2.40 Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-82
Tabel 2.41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016-2020 Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen II-82
Tabel 2.42 Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-83
Tabel 2.43 Rasio Guru Per Kelas Rata-Rata Terhadap Murid Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2.44 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020 Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen II-84
Tabel 2.45 Rasio Guru Per Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 .. II-85
Tabel 2.46 Persentase Kelulusan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-86
Tabel 2.47 Kondisi Sekolah Terakreditasi jenjang SD/MI Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-86
Table 2.48 Kondisi Sekolah Terakreditasi Jenjang SLTP/MTs Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-87
Tabel 2.49 Kondisi Ruang Kelas Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-87
Tabel 2.50 Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-88
Tabel 2.51 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-89

Tabel 2.52 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-92
Tabel 2.53 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-93
Tabel 2.54 Perkembangan Angka Kesakitan Tahun 2016-2020 ..... II-95
Tabel 2.55 Perkembangan Kasus Penyakit Menular Tahun 2016-2020 ..... II-96
Tabel 2.56 Perkembangan Kasus Penyakit Menular (TB dan DBD) per Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-96
Tabel 2.57 Penyakit Tidak Menular Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 .. II-97
Tabel 2.58 Data Akses Air Minum Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-98
Tabel 2.59 Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen Sampai dengan Tahun 2020 ..... II-98
Tabel 2.60 Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-99
Tabel 2.61 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-100
Tabel 2.62 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-100
Tabel 2.63 Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-101
Tabel 2.64 Jaminan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-101
Tabel 2.65 Panjang dan Proporsi Jalan Provinsi di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020 ..... II-101
Tabel 2.66 Panjang dan Proporsi Jalan Nasional di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020 ..... II-102
Tabel 2.67 Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020 ..... II-103
Tabel 2.68 Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020..... II-103
Tabel 2.69 Kondisi Jembatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-103
Tabel 2.70 Data Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen II-104
Tabel 2.71 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-105
Tabel 2.72 Jumlah Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 II-105
Tabel 2.73 Daftar Saluran Drainase yang Menjadi Kewenangan Kabupaten... II-106
Tabel 2.74 Kondisi Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2020 . II-108
Tabel 2.75 Peruntukan Ruang di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-108
Tabel 2.76 Status Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-109
Tabel 2.77 Kondisi Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-109
Tabel 2.78 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-110
Tabel 2.79 Jumlah Tindak Kriminalitas Tercatat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-111
Tabel 2.80 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-112

Tabel 2.81 Perhitungan Jumlah Kebutuhan Tenaga Satpol PP Berdasar Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 ..... II-113
Tabel 2.82 SPM Bidang Trantibum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ... II-113
Tabel 2.83 SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel 2.84 Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel 2.85 Jumlah Disabilitas Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ..... II-115
Tabel 2.86 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Pekerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ..... II-115
Tabel 2.87 Rekap Disabilitas Berdasarkan Produktivitas Per Kecamatan Tahun 2020..... II-116
Tabel 2.88 Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-117
Tabel 2.89 Data Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Produktivitas Tahun 2016-2020 ..... II-117
Tabel 2.90 Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Pengangguran Tahun 2017-2020 ..... II-119
Tabel 2.91 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2017-2020..... II-119
Tabel 2.92 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020..... II-120
Tabel 2.93 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020..... II-120
Tabel 2.94 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020 ..... II-121
Tabel 2.95 Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase TPAK Tahun 2017-2020 .. II-121
Tabel 2.96 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-122
Tabel 2.97 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-122
Tabel 2.98 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-123
Tabel 2.99 Rasio Upah Minimum disbanding KHL Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-124
Tabel 2.100 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-124
Tabel 2.101 IPM dan IPG Tahun 2016-2020..... II-125
Tabel 2.102 Tabel IPM Pilah Gender Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 .. II-125
Tabel 2.103 Komposit Pembentuk IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020 ..... II-127
Tabel 2.104 Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-127
Tabel 2.105 Pegawai Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-128
Tabel 2.106 Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-128

Tabel 2.107 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-129
Tabel 2.108 Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan (Beras) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-129
Tabel 2.109 Data Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2016-2020..... II-130
Tabel 2.110 Harga Rata-Rata Pangan Strategis Tahun 2017-2020..... II-130
Tabel 2.111 Data Kelompok yang Telah Dibina dan Memperoleh Bantuan Stimulan Pemanfaatan Pekarangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-131
Tabel 2.112 Data Hasil Rapid Tes PSAT (Positif Pestisida) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-132
Tabel 2.113 Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-132
Tabel 2.114 Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2.115 Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-134
Tabel 2.116 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-135
Tabel 2.117 Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-136
Tabel 2.118 Persentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-137
Tabel 2.119 Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-138
Tabel 2.120 Pencanangan Kampung KB Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-138
Tabel 2.121 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-139
Tabel 2.122 Data Kelengkapan Keselamatan Jalan 2020 ..... II-139
Tabel 2.123 Jumlah Angkutan Umum dan Izin Trayek di Kabupaten Kebumen Tahun 2020..... II-140
Tabel 2.124 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-140
Tabel 2.125 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-140
Tabel 2.126 Jumlah Terminal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-141
Tabel 2.127 Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-141
Tabel 2.128 Kondisi Infrastruktur Digital Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2020..... II-143
Tabel 2.129 Persebaran ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen II-144
Tabel 2.130 Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020 ... II-145
Tabel 2.131 Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-146
Tabel 2.132 Nilai Investasi Sektor Tersier Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-148

Tabel 2.133 Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-148
Tabel 2.134 Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 .. II-149
Tabel 2.135 Penggunaan Digital Signature di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen..... II-150
Tabel 2.136 Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-151
Tabel 2.137 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-151
Tabel 2.138 Kinerja Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-152
Tabel 2.139 Kinerja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-153
Tabel 2.140 Produksi dan Kebutuhan Ikan Olahan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-157
Tabel 2.141 Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-157
Tabel 2.142 Destinasi Wisata di Kabupaten Kebumen yang dikelola bersama Perhutani II-159
Tabel 2.143 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Kebumen..... II-160
Tabel 2.144 PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ... II-161
Tabel 2.145 Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-163
Tabel 2.146 Luas Panen dan Produksi Padi Ladang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-163
Tabel 2.147 Luas Panen dan Produksi Palawija Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-163
Tabel 2.148 Luas Lahan Panen Perkebunan Dibanding Luas Lahan Pertanian (Ha) Tahun 2016-2020..... II-164
Tabel 2.149 Luas Lahan Panen Hortikultura Dibanding Luas Lahan Pertanian (Ha) Tahun 2016-2020..... II-164
Tabel 2.150 Produksi Buah-Buahan Kabupaten Kebumen (Ton) Tahun 2016-2020 ..... II-164
Tabel 2.151 Produksi Sayur-Sayuran Kabupaten Kebumen (Ton) Tahun 2016-2020 ..... II-165
Tabel 2.152 Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-166
Tabel 2.153 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-168
Tabel 2.154 Jumlah Industri di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-168
Tabel 2.155 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-170
Tabel 2.156 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020..... II-171
Tabel 2.157 Penilaian SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-173
Tabel 2.158 Indeks Integritas Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019..... II-175
Tabel 2.159 Survey Eksternal Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020..... II-175

Tabel 2.160 Nilai EKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-176
Tabel 2.161 Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-177
Tabel 2.162 Kesesuaian Program antara RPJMD dan RKPD serta RKPD dengan APBD Tahun 2016 sampai dengan 2020 ..... II-178
Tabel 2.163 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-179
Tabel 2.164 Jumlah ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-180
Tabel 2.165 Pejabat Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ..... II-181
Tabel 2.166 Pejabat Fungsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ..... II-181
Tabel 2.167 Pejabat Fungsional Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ..... II-181
Tabel 2.168 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-182
Tabel 2.169 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020 ..... II-182
Tabel 2.170 Perkembangan Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-183
Tabel 2.171 Hasil Penilaian SPIP Kabupaten Kebumen Tahun 2019 ..... II-184
Tabel 2.172 Capaian Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-184
Tabel 2.173 Jumlah Ormas Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-185
Tabel 2.174 Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik..... II-186
Tabel 2.175 Angka Konsumsi RT Perkapita Sebulan Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020..... II-186
Tabel 2.176 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020..... II-187
Tabel 2.177 Rata-rata Konsumsi RT Non-Pangan Perkapita Sebulan Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020..... II-187
Tabel 2.178 Persentase Luas Wilayah Produktif (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ..... II-188
Tabel 2.179 Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020 ..... II-189
Tabel 2.180 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ... II-189
Tabel 2.181 Rata-rata Lama Perijinan di Kabupaten Kebumen II-190
Tabel 2.182 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.. II-192
Tabel 2.183 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-192
Tabel 2.184 Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah sampai dengan Tahun 2020 ..... II-193
Tabel 2.185 Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020 ..... II-195
Tabel 2.186 Integrasi SPM Dalam Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021..... II-203
Tabel 2.187 Realisasi Capaian SPM Pendidikan Tahun 2020 ..... II-205

Tabel 2.188 Realisasi Capaian SPM Kesehatan Tahun 2020 ..... II-206
Tabel 2.189 Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020 ..... II-208
Tabel 2.190 Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020 ..... II-209
Tabel 2.191 Realisasi Capaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2020 ..... II-210
Tabel 2.192 Realisasi Capaian SPM Sosial Tahun 2020 ..... II-211

Tabel 3.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-5
Tabel 3.2 Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-6
Tabel 3.3 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-7
Tabel 3.4 Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-9
Tabel 3.5 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-10
Tabel 3.6 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 . III-11
Tabel 3.7 Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-13
Tabel 3.8 Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-13
Tabel 3.9 Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-15
Tabel 3.10 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-17
Tabel 3.11 Rasio Lancar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-19
Tabel 3.12 Rasio *Quick* Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-20
Tabel 3.13 Rasio Total Hutang terhadap Aset Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-20
Tabel 3.14 Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-21
Tabel 3.15 Rata-rata Umur Piutang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 .. III-21
Tabel 3.16 Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-22
Tabel 3.17 Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016-2020 ..... III-23
Tabel 3.18 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-24
Tabel 3.19 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... III-25
Tabel 3.20 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2016-2020 ..... III-26
Tabel 3.21 Penutup Devisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 ..... III-28
Tabel 3.22 Komposisi Penutup Devisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 ..... III-30
Tabel 3.23 Realisasi SILPA Tahun 2016-2020 ..... III-32
Tabel 3.24 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Tahun 2016-2020 ..... III-33
Tabel 3.25 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... III-36
Tabel 3.26 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... III-38
Tabel 3.27 Proyeksi Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... III-40

Tabel 3.28 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. III-42
Tabel 3.29 Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... III-45
Tabel 3.30 Proyeksi Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... III-46
Tabel 3.31 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... III-49
Tabel 3.32 Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... III-50
Tabel 3.33 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.... III-52
Tabel 3.34 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2016 ..... III-53

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen..... IV-11
Tabel 4.2 Permasalahan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kebumen IV-17
Tabel 4.3 Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen IV-22
Tabel 4.4 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kebumen IV-30
Tabel 4.5 Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024..... IV-53

Tabel 5.1 Perumusan Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... V-1
Tabel 5.2 Penyusunan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... V-2
Tabel 5.3 Perumusan Penjelasan Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2016 ..... V-4
Tabel 5.4 Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... V-9
Tabel 5.5 Cascading Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026..... V-11
Tabel 5.6 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... V-13

Tabel 6.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri Kebumen VI-15
Tabel 6.2 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... VI-28
Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... VI-29
Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... VI-32
Tabel 6.5 Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Pendidikan..... VI-48
Tabel 6.6 Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Kesehatan VI-50
Tabel 6.7 Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum VI-51

Tabel 6.8 Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat VI-52
Tabel 6.9 Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat VI-53
Tabel 6.10 Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Sosial VI-55
Tabel 6.11 Rencana Implementasi Program Unggulan Tahun 2021-2026 ..... VI-58
Tabel 6.12 Indikator dan Target Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 ..... VI-70
Tabel 6.13 Penyelarasan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024..... VI-75
Tabel 6.14 Penyelarasan Program Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 -2024 ..... VI-77

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... VII-2
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... VII-34

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... VIII-2
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ..... VIII-2
Tabel 8.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026..... VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD I-3
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen I-8

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen II-3
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Kebumen II-4
Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Kebumen II-8
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Kebumen II-9
Gambar 2.5 Peta Hidrogeologi Kabupaten Kebumen II-11
Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kebumen II-11
Gambar 2.7 Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen II-13
Gambar 2.8 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kebumen II-15
Gambar 2.9 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen II-26
Gambar 2.10 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen II-35
Gambar 2.11 Peta Delineasi Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong . II-38
Gambar 2.12 Peta Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Klirong II-39
Gambar 2.13 Foto Drone Eksisting Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Klirong II-39
Gambar 2.14 Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen II-41
Gambar 2.15 Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio* Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-45
Gambar 2.16 Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Berdasarkan Usia Tahun 2020 ..... II-46
Gambar 2.17 Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020 ..... II-48
Gambar 2.18 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-54
Gambar 2.19 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) II-55
Gambar 2.20 Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-56
Gambar 2.21 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk 40% penduduk dengan pendapatan terendah Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-57
Gambar 2.22 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-58
Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-58
Gambar 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2016-2020 ..... II-59
Gambar 2.25 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-60
Gambar 2.26 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-61

Gambar 2.27 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-62
Gambar 2.28 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)..... II-63
Gambar 2.29 Target dan Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-65
Gambar 2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota II-69
Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 ..... II-70
Gambar 2.32 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat PAUD Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-75
Gambar 2.33 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-77
Gambar 2.34 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-78
Gambar 2.35 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-79
Gambar 2.36 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-79
Gambar 2.37 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-80
Gambar 2.38 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-80
Gambar 2.39 Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SD/MI Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-86
Gambar 2.40 Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SLTP/MTs Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-87
Gambar 2.41 Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-89
Gambar 2.42 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 .... II-90
Gambar 2.43 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020..... II-91
Gambar 2.44 Persentase Ibu Hamil KEK Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-92
Gambar 2.45 Persentase Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang Tahun 2016-2020 ..... II-94
Gambar 2.46 Angka Stunting Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2020..... II-95
Gambar 2.47 Sebaran Kasus HIV/AIDS per Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-96
Gambar 2.48 IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020..... II-126
Gambar 2.49 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-127
Gambar 2.50 Diagram Rantai Distribusi Pangan II-131

Gambar 2.51 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ..... II-142
Gambar 2.52 Peta Rencana Jaringan Fiber Optik Kabupaten Kebumen II-144
Gambar 2.53 Perkembangan Nilai Investasi Per Sektor Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-147
Gambar 2.54 Luas Perairan Umum Daratan Kabupaten Kebumen (Ha)..... II-155
Gambar 2.55 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (kg per kapita) II-156
Gambar 2.56 Volatilitas dan Disparitas Harga Beberapa Komoditas di Kabupaten Kebumen II-167
Gambar 2.57 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen dan 5 Kabupaten tetangga Tahun 2020 ..... II-173
Gambar 2.58 Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020..... II-174
Gambar 2.59 Hasil Survei Integritas Jabatan II-174
Gambar 2.60 Persentase Tingkat Pendidikan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..... II-180

Gambar 4.1 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen..... IV-5
Gambar 4.2 Permasalahan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kebumen IV-12
Gambar 4.3 Permasalahan Pembangunan Insfrastruktur dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen IV-19
Gambar 4.4 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kebumen IV-25
Gambar 4.5 Perkembangan Total Anggaran Desa (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) Kabupaten Kebumen Tahun 2015 – 2021..... IV-39
Gambar 4.6 Komponen Pembentuk Rumusan Isu Strategis Kabupaten Kebumen IV-49

Gambar 5.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah V-8

Gambar 6.1 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kebumen dan Sekitarnya Tahun 2014..... VI-19
Gambar 6.2 Rencana Penataan Koridor Perkotaan Kebumen..... VI-20
Gambar 6.3 Peta Delineasi Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong. VI-22
Gambar 6.4 Pengembangan Geopark sebagai destinasi Pariwisata Berkelanjutan VI-22

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berada pada bagian selatan. Kebumen awalnya merupakan salah satu kabupaten dari Kerajaan Mataram Islam dengan nama Kabupaten Panjer. Pada zaman Kerajaan Mataram Islam, Kabupaten Kebumen (Panjer) mempunyai peran penting dalam melawan kolonialisme Belanda dengan membantu penyediaan dan perbekalan pasukan Sultan Agung Raja Mataram Islam dalam menyerang Batavia. Nama Kebumen berasal dari kata *Ki-Bumi-An* yang merupakan tempat padepokan/pondok yang dibangun oleh Kiai Pangeran Bumidirjo. Kiai Pangeran Bumidirjo adalah adik Sultan Agung Hanyokro Kusumo yang melarikan diri ke Kebumen karena bersitegang dengan Raja Mataram Islam kala itu yaitu Sunan Amangkurat I.

Kabupaten Kebumen secara yuridis formal, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kebumen, telah ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Kebumen pada hari Selasa Wage tanggal 1 Suro atau 21 Agustus 1629. Hal ini didasarkan pada peristiwa sejarah pada saat Kiai Bodronolo membantu penyediaan dan perbekalan pasukan Sultan Agung dalam menyerang Batavia. Hari Jadi tersebut merupakan momentum sejarah yang memiliki makna mendalam dan mendasar sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreativitas dan atraktivitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, secara resmi Kabupaten Kebumen terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini Kabupaten Kebumen telah dijabat 38 kepala daerah sejak masa pemerintahan Negara Indonesia, baik kepala daerah yang definitif, pelaksana tugas (Plt) maupun pejabat sementara (Pjs). Saat ini Kabupaten Kebumen dipimpin oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati H. Arif Sugiyanto, SH dan Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, MM. Pasangan tersebut merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pasangan ini dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah.

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Kebumen didasarkan pada perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD) maupun menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah

yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas-perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selain itu, pembangunan Kabupaten Kebumen juga memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 didapatkan 98 indikator yang sudah mencapai target dengan rincian 70 indikator sudah dilaksanakan dan 28 indikator belum dilaksanakan. Sementara itu, terdapat 37 indikator TPB yang belum mencapai target yang terdiri dari 30 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional dan 7 indikator yang belum dilaksanakan serta belum mencapai target nasional. Indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, meliputi: 5 indikator kemiskinan (TPB 01), 4 indikator hidup sehat dan sejahtera (TPB 03), 5 indikator pendidikan (TPB 04), 2 indikator kesetaraan gender (TPB 05), 5 indikator air bersih dan sanitasi (TPB 06), 4 indikator pertumbuhan ekonomi inklusif (TPB 08), 1 indikator infrastruktur (TPB 09), 1 indikator kesenjangan (TPB 10), 1 indikator permukiman (TPB 11), 1 indikator masyarakat inklusif dan damai (TPB 16), dan 1 indikator kemitraan global (TPB 17). Adapun indikator yang belum dilaksanakan serta belum mencapai target nasional, yaitu: 1 indikator ketahanan pangan (TPB 02), 1 indikator hidup sehat dan sejahtera (TPB 03), 1 indikator pendidikan (TPB 04), 1 indikator kesetaraan gender (TPB 05), 1 indikator air bersih dan sanitasi (TPB 06), 1 indikator pertumbuhan ekonomi inklusif (TPB 08), dan 1 indikator pola produksi dan konsumsi (TPB 12).

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahun sebagai wujud penjabaran Visi Misi Bupati Arif Sugiyanto, SH dan Wakil Bupati Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, MM dan merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 adalah "Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis". Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu: 1) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; 2) mengurangi tingkat kemiskinan penduduk; 3) meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis; 4) mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan; dan 5) menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik *(good governance)* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.

Dokumen RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, lintas-perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Penyusunan dokumen RPJMD melewati beberapa tahapan sampai pada akhir tahapan yaitu penetapan RPJMD. Tahapan pertama dari proses penyusunan dokumen RPJMD adalah penyusunan dokumen Rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD disusun sebelum ditetapkannya kepala daerah terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.1.

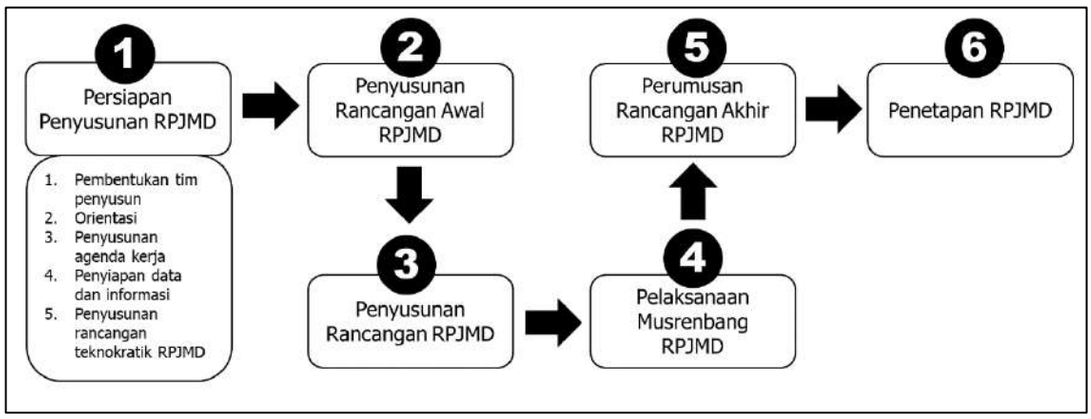

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

32. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
33. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
34. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan daerah lima tahunan, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan dokumen lain yang relevan di antaranya RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten lain yang berbatasan, RPJPD, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Rencana Pembangunan Sektoral lainnya.

Selanjutnya, dokumen RPJMD yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

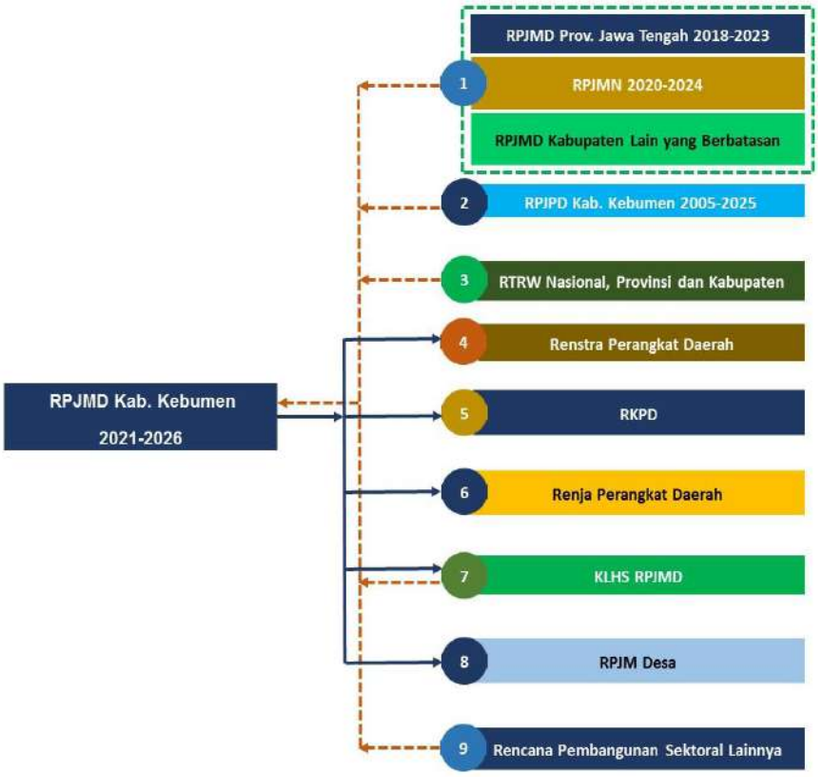

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen

1. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Daerah lain yang berbatasan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 yang dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, serta pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Selain itu dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMD kabupaten lain yang berbatasan dengan menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya.

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten kebumen Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

No	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
	VISI	
	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*
	MISI	
1	Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI	Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat
2	Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Misi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi
3	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan Misi 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4	Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Sumber: RPJMD Prov. Jawa Tengah Tahun 2021-2026

Sedangkan untuk keselarasan antara RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2
Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No	RPJM Nasional Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
	VISI	
	Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*
	MISI	
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi

No	RPJM Nasional Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
		sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan Misi 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat
6	Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Misi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Misi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

2. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJPD Kabupaten Kebumen

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.3
Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD

No	RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
VISI		
	Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis	*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*

No	RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
MISI		
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;	Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
2	Mengurangi tingkat kemiskinan penduduk;	Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis;	Misi 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4	Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan; dan	Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
5	Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.	Misi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Sumber: RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2005-2025

3. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RTRW

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 secara perencanaan kewilayahan dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, Provinsi maupun Kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah; Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan RPPLH yang memuat rencana program-program Pemerintah Daerah dengan RPPL yang ditetapkan dalam indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Dalam penyusunan RPJMD memuat program/ kegiatan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW, program struktur ruang dan program perwujudan pola ruang.

4. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target

kinerja dalam RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

5. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RKPD

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam pelaksanaannya tahunan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

6. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan Renja Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

7. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan KLHS RPJMD

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan daerah dan nasional.

Pengintegrasian KLHS RPJMD ke dalam RPJMD Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

a. Pada Bab I telah terintegrasi KLHS RPJMD pada:

a.1. Pada latar belakang menunjukkan permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian penting dalam dokumen RPJMD. Hal ini tercantum pada kalimat yang terdapat pada latar belakang dokumen RPJMD dengan pernyataan "selain dikarenakan perubahan iklim, kerusakan lingkungan juga mulai terjadi dengan semakin sedikitnya tanaman vegetasi penyimpan air, sedimentasi sungai dan menumpuknya sampah dan limbah terutama yang sulit didaur ulang seperti plastik."

a.2. Pada landasan hukum terdapat 11 dari 25 dasar hukum dalam dokumen RPJMD yang berkaitan dengan dasar hukum dari penyusunan KLHS RPJMD yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16

Tahun 2019, Perda Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004, Perda Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010, Perda Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012, dan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012.

a.3. Pada hubungan antardokumen menunjukkan KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen RPJMD. Dalam hal bahwa penyusunan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan daerah dan nasional.

b. Pada Bab II menunjukkan keselarasan KLHS RPJMD dengan dokumen RPJMD sebagai berikut:

b.1. Pada aspek geografi dan demografi menunjukkan data profil wilayah, demografi, topografi, hidrologi, klimatologi, geologi dalam dokumen RPJMD telah selaras dengan dokumen KLHS RPJMD. Potensi atau keunggulan geografi yaitu memiliki topografi yang beragam yaitu pantai, dataran rendah dan perbukitan, tersusun dari beberapa formasi batuan serta memiliki banyak sumber air yang akan mendukung pengembangan ekonomi daerah sedangkan potensi demografi yaitu jumlah kelahiran dan kematian seimbang sehingga pertumbuhan penduduk relatif stabil yang diharapkan akan semakin menurunkan beban ekonomi perkapita. Permasalahan atau kelemahan muncul dimana Kabupaten Kebumen termasuk daerah tropis dengan curah hujan cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.

b.2. Pada aspek kesejahteraan masyarakat menunjukkan data pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dalam dokumen RPJMD telah selaras dengan dokumen KLHS RPJMD. Potensi atau keunggulan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat muncul yaitu dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang peranan terbesar dalam PDRB yang dapat terus dikembangkan sebagai sektor ekonomi unggulan yang diharapkan dapat memberikan efek multiplier pada sektor-sektor ekonomi lainnya serta kinerja Angka Harapan Hidup semakin membaik menunjukkan kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatan semakin membaik. Permasalahan atau kelemahan muncul yaitu dimana pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih berada di bawah level provinsi yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat masih rendah serta rata-rata lama sekolah masih cukup rendah yang menunjukkan kualitas pendidikan masih harus terus ditingkatkan.

b.3. Pada aspek pelayanan umum menunjukkan data industri kecil dan menengah, analisis kondisi urusan pelayanan dasar, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perhubungan, urusan perindustrian, dalam dokumen RPJMD telah selaras dengan dokumen KLHS RPJMD. Potensi atau keunggulan yang muncul yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kebumen masih cukup tinggi. Pada pelayanan infrastruktur dasar menunjukkan proporsi jaringan irigasi kondisi baik meningkat dan proporsi jaringan irigasi kondisi rusak berat menurun yang diharapkan akan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, sektor industri

menyumbang kontribusi yang cukup besar menunjukkan semakin meningkatnya sektor sekunder yang melakukan peningkatan nilai tambah yang diharapkan dapat memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Permasalahan muncul yang menunjukkan masih rendahnya kualitas akses dan pelayanan dasar pendidikkan dan kesehatan dengan terjadinya penurunan Angka Partisipasi Murni (APM), tingginya Angka Putus Sekolah (APS), jumlah fasilitas pelayanan kesehatan masih jauh dari ideal serta rasio dokter dan rasio perawat dalam kondisi menuju ideal. Sedangkan terkait pelayanan umum infrastruktur dasar menunjukkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan belum memenuhi persyaratan ideal.

b.4. Pada aspek daya saing daerah menunjukkan munculnya potensi daerah yaitu investasi PMDN semakin meningkat terutama sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 yang menunjukkan Kabupaten Kebumen masih potensial untuk menjadi tempat tujuan penanaman investasi yang diharapkan nantinya akan sangat mendukung pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Sementara itu, sektor perdagangan dan reparasi menujukkan nilai investasi paling tinggi yang diharapkan sektor tersier juga semakin meningkatkan efek multiplier pada perekonomian daerah. Permasalahan masih harus menghadapi pertumbuhan investasi yang masih fluktuatif sehingga kedepan perlu dimunculkan kebijakan yang mampu meningkatkan iklim investasi yang lebih baik.

c. Pada Bab IV. menunjukkan permasalahan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah selaras dengan permasalahan KLHS RPJMD. Hal ini ditunjukkan dengan isu-isu yang muncul dalam RPJMD terkait dengan isu KLHS RPJMD yaitu:

c.1. Isu peningkatan pembangunan SDM yang berkualitas mengakomodasi isu KLHS RPJMD yaitu tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk dan ketenagakerjaan.

c.2. Isu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mengakomodasi isu KLHS RPJMD yaitu kemiskinan dan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi daerah, perindustrian dan pengembangan ekonomi lokal.

c.3. Isu peningkatan kualitas infrastruktur mengakomodasi isu KLHS RPJMD yaitu infrastruktur air bersih dan air minum dan infrastruktur dasar limbah dan sanitasi.

c.4. Isu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal mengakomodasi isu KLHS RPJMD yaitu pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

c.5. Isu strategis berkenaan dengan lingkungan hidup, masuk ke dalam isu ke-3 yaitu peningkatan kualitas infrastruktur yang di dalamnya mengandung unsur infrastruktur berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

d. Pada Bab V. menunjukkan Visi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Semua misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 juga telah selaras dengan KLHS RPJMD. Hasil penelaahan sasaran strategis KLHS RPJMD dan arah kebijakan dalam RPJMD memiliki keterkaitan secara konteks. Secara umum, sasaran strategis dalam KLHS RPJMD pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi, pertanian dan tata kelola pemerintah memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Sedangkan secara spesifik terdapat 26 program pembangunan daerah pada RPJMD yang telah selaras dengan rekomendasi program dalam KLHS RPJMD. Program perangkat daerah pada dokumen RPJMD selaras dengan rekomendasi program KLHS RPJMD yang disesuaikan pada 4 pilar utama. Rekomendasi program di dalam dokumen KLHS RPJMD berjumlah 74 program dimana sebanyak 43 (58%) telah diintegrasikan ke dalam dokumen Ranwal RPJMD Kab. Kebumen. Rekomendasi program pilar sosial memiliki persentase tertinggi di dalam proses integrasi, yaitu 17 program (100 %) telah masuk di dalam program perangkat daerah, diikuti program hukum dan tata kelola (3 program) dan program ekonomi (19 program). Hal tersebut telah merefleksikan visi misi dan sasaran program pembangunan yang difokuskan pada pilar sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

8. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJM Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan strategis desa selama lima tahun yang proses penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dengan disusunnya RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, maka kepala desa dapat melakukan perubahan RPJM Desa berdasarkan kewenangan desa melalui proses dan tahapan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar prioritas perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Kebumen dapat selaras dengan prioritas perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen.

9. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, juga harus memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, antara lain:

a. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
b. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG);
c. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM);
d. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
e. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kebumen;
f. Grand Design Reformasi Birokrasi;
g. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah;
h. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah,
i. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana;
j. Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
k. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun ke depan sesuai Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka peningkatan dan

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah berdasarkan capaian pembangunan, analisis permasalahan, isu strategis, kemampuan keuangan daerah melalui pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, antara lain :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Memberikan arahan dan pedoman terhadap prioritas perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan sesuai dengan gambaran kapasitas kemampuan keuangan daerah;
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Kebumen selama periode Tahun 2021-2026;
4. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
5. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah lainnya;
7. Mewujudkan penggunaan sumber daya pembangunan daerah secara lebih efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
8. Sebagai pedoman dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
9. Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

1.5. Pengarusutamaan Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

1. Gender dan Inklusi Sosial

Pengarustamaan gender dan inklusi sosial merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender dan inklusi sosial ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi, sehingga terwujud pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Kebumen baik laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas dan atau masyarakat marjinal lainnya. Kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas dan/atau masyarakat rentan lainnya dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

2. Keberlanjutan lingkungan

Pengarustamaan keberlanjutan lingkungan merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Peristiwa hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan, merupakan kejadian bencana di Indonesia yang banyak terjadi saat ini, dan

diproyeksikan meningkat dengan perubahan iklim. Dalam jangka panjang, Indonesia juga mengantisipasi dampak dari peristiwa awal yang lambat laun sudah mulai terjadi yaitu kenaikan permukaan laut (*Sea Level Rise* / SLR), peningkatan suhu, dan pergeseran pola curah hujan. Karenanya mengintegrasikan pengarusutamaan keberlanjutan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan daerah bertujuan mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim melalui berbagai sisi, termasuk meningkatnya kerusakan akibat bencana pada infrastruktur, kekurangan air, berkurangnya hasil pertanian, peningkatan kerawanan pangan, dan munculnya lebih banyak penyakit yang sensitif terhadap iklim dikarenakan konsentrasi penduduk.

3. Kearifan Lokal

Pengarusutamaan kearifan lokal merupakan upaya mengoptimalkan budaya/tradisi yang selama ini menjadi modal sosial masyarakat Kebumen sebagai pendukung seluruh proses pembangunan daerah. Pranata sosial di masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Tujuan pengarusutamaan ini adalah untuk menempatkan dan memberikan penghargaan atas kekayaan budaya masyarakat Kebumen sekaligus upaya pelestarian dan memajukan budaya lokal Kebumen.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah. Strategi pengarusutamaan ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantapan data.

1.6. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, pengarusutamaan dalam RPJMD, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama 5 (lima) tahun ke

depan berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk intergrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan program prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Secara umum Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terus berkembang secara dinamis di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mendorong perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Kabupaten Kebumen memiliki beragam potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai keunggulan daerah. Kompleksitas struktur geologi yang menjadi warisan geologi bernilai dunia, topografi lengkap terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah, dan perbukitan serta memiliki jenis tanah yang cocok ditanami berbagai jenis tumbuhan.

Populasi Kabupaten Kebumen cukup besar dimana berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.399.976 jiwa dengan mayoritas didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,77% dari total penduduk. Hal ini merupakan potensi yang besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berdasarkan letak dan sejarahnya, Kabupaten Kebumen berada di perbatasan wilayah Mataram (Kedu) dan Banyumas yang menciptakan corak keragaman budaya baik bahasa, adat istiadat maupun tradisi. Dengan keadaan alam, manusia, dan budayanya maka Kabupaten Kebumen potensial untuk dikembangkan secara ekonomi pada sektor pertanian, UMKM, industri, pariwisata, dan sektor jasa lainnya. Pelayanan publik masih belum optimal walaupun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapatkan nilai tinggi yaitu sebesar 81,87 pada tahun 2020 namun masih lebih rendah dibandingkan nilai yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi yang dicapai Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 58,40 atau masih pada kategori CC.

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, dan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen terletak antara 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo
Sebelah Selatan: Samudera Hindia
Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa, dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Ayah	76,37	18	-	81	396
2	Buayan	68,42	20	-	90	341
3	Puring	61,97	23	-	98	318
4	Petanahan	44,84	21	-	81	258
5	Klirong	43,25	24	-	107	318
6	Buluspesantren	48,77	21	-	82	386
7	Ambal	62,41	32	-	113	313
8	Mirit	52,35	22	-	70	265
9	Bonorowo	20,91	11	-	42	139
10	Prembun	22,96	13	-	40	130
11	Padureso	28,95	9	-	23	86
12	Kutowinangun	33,73	19	-	80	241
13	Alian	57,75	16	-	73	254
14	Poncowarno	27,37	11	-	34	100
15	Kebumen	42,04	24	5	138	554
16	Pejagoan	34,58	13	-	64	257
17	Sruweng	43,68	21	-	97	332
18	Adimulyo	43,43	23	-	81	227
19	Kuwarasan	33,84	22	-	86	247
20	Rowokele	53,80	11	-	61	294
21	Sempor	100,15	16	-	74	368
22	Gombong	19,48	12	2	81	288
23	Karanganyar	31,40	7	4	61	242
24	Karanggayam	109,29	19	-	76	390
25	Sadang	54,23	7	-	35	131
26	Karangsambung	65,15	14	-	62	252
	Jumlah	1281,11	449	11	1930	7127

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2017

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan luas 109,29 km^2 atau 8,53 persen dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km^2 atau 7,82 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km^2 atau setara dengan 1,52 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

2.1.2 Topografi dan Kemiringan

Topografi Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah, dan kawasan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d. 997,5 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Ketinggian Tanah dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Kebumen

No	Ketinggian	Luas (ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2017

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 ha atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 ha atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 ha atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 ha atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

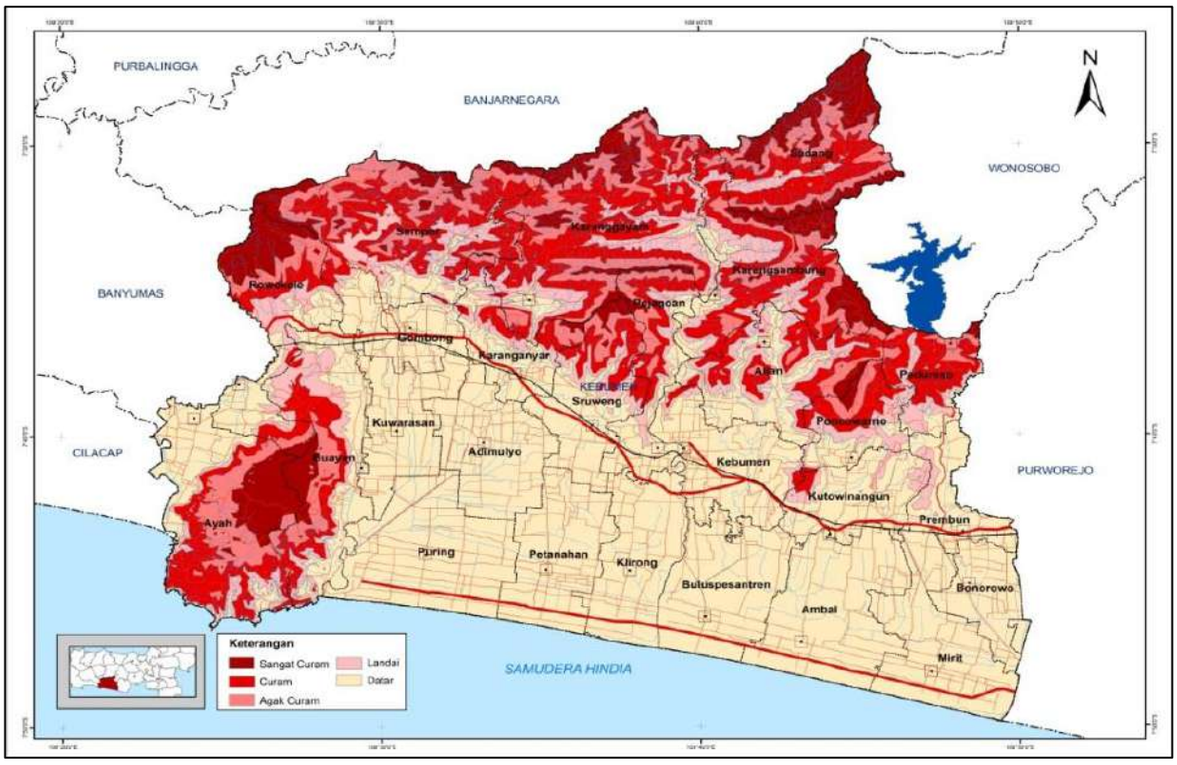

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Kebumen

2.1.3 Geologi dan Tanah

1) Geologi

a. Struktur Geologi

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang tersusun oleh batuan Pra-Tersier (batuan tertua di Jawa berumur lebih dari 60 juta tahun yang lalu) dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (*Paleosen*) hingga termuda (*Pliosen*) terdiri dari:

1. *Kompleks Melange Luk Ulo* yang berupa bongkah-bongkah batuan Pra Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas);
2. *Formasi Karangsambung* yang tersusun oleh batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur *Eosen*). Dalam formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa *olistolit*;
3. *Formasi Totogan* yang tersusun oleh breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur *Oligo-Miosen*);
4. *Formasi Waturanda* yang tersusun oleh batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf. Dalam formasi ini terdapat anggota tuf yang tersusun oleh perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan dan napal tufaan (berumur *Miosen* Awal);
5. *Formasi Penosogan* yang terdiri dari perselingan batu pasir gampingan, batu lempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur *Miosen* Tengah);
6. *Diabas* ialah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (*Miosen* Tengah);
7. *Formasi Halang* yang tersusun oleh perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan tuf dengan sisipan breksi (berumur *Pliosen*);
8. *Formasi Peniron* yang terdiri dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf;
9. *Endapan Pantai* yang berupa pasir lepas; dan

10. *Alluvium* yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal.

b. Kondisi Stratigrafi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen (1992), Lembar Banyumas (1992), Lembar Banjarnegara dan Pekalongan (1996) urutan stratigrafi Kabupaten Kebumen terdiri dari (tua ke muda):

1. Melange (Batuan-batuan Pra tersier atau PTm)

Formasi ini merupakan batuan tertua yang tersingkap di Pulau Jawa dengan umur Kapur Tengah - *Pleosen*. Kelompok batuan ini disimpulkan sebagai komplek melange (bancuh) yang terdiri dari *graywacke* (Kts), marmer, sekis dan filit (Km), serpentinit (kose), lava basalt berstruktur bantal, gabro, batu gamping merah, rijang (kobe), lempung hitam yang bersifat serpihan. Semuanya merupakan campuran yang bersifat tektonik. Komplek batuan ini tersebar di wilayah utara Kebumen, di sekitar Karangsambung – Sadang – Karanggayam.

a. Basalt dan Rijang, terdiri dari basal dan rijang coklat, berselingan dengan batu gamping merah, mengandung fosil radiolarian. *Basalt* merupakan *toleid* rinjang terdapat berselingan dengan batu gamping merah, beberapa tempat berupa struktur bantal berbentuk memanjang searah pelapisan;
b. Gabro, berwarna hijau muda berbutir kasar;
c. Serpentin, merupakan ubahan dari batuan ultramafik berwarna hijau, sebagai sisipan dalam kelompok gabro dan basalt. Serpentin ini terdapat pada zona besar;
d. Sekis dan Filit, terdiri dari sekis kwarsa serisit sekis amfibol dan filis; dan
e. Greywake, merupakan batu pasir berwarna abu-abu tua, bila telah mengalami pelapukan berwarna hijau kelabu, berbutir kasar, perlapisan bersusun.

Kelompok tersebut di atas diduga berumur antara kapur abas hingga eosin. Satuan batuan pada unit ini dicirikan oleh struktur yang kacau, adanya percampuran bongkah batuan sedimen, beku dan metamorf dengan masa dasar lempung bersisik. Bongkah-bongkah batuan dalam unit ini berupa *exotic* dan *native block* berukuran centi meter hingga ratusan meter, mengambang di dalam matrik halus yang tersusun dari lempung hitam atau abu-abu dengan bidang gores garis di atasnya.

2. Formasi Karangsambung (Teoka)

Di atas komplek melange Luk Ulo, secara tidak selaras diendapkan batuan sedimen hasil pelongsoran gaya berat. Kontak antara komplek melange Luk Ulo dengan komplek Olistostrome Karangsambung sulit didapatkan. Komplek Olistostrome Karangsambung tersusun oleh batuan dengan ukuran dan jenis fragmen sangat bervariasi berupa fragmen konglomerat, batu gamping berfosil, sekis, filit, basal, diabas dan batu pasir di dalam masa dasar lempung abu-abu bersisik. Ukuran fragmen di bagian bawah tengah lebih besar dengan variasi yang lebih heterogen. Pada bagian-bagian tertentu perlapisan batuan dapat dijumpai, namun dengan pola perlapisan yang tidak begitu ideal. Komplek Olistostrome Karangsambung terdiri dari Formasi Karangsambung dan Formasi Totogan yang hubungan stratigrafinya saling menjemari, terkadang dijumpai bongkah fosil kayu. Formasi Karangsambung terdiri dari batu lempung bersisik dengan bongkahan batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu lempung dan basalt. Singkapan batuan ini terdapat di daerah Karangsambung, terutama sepanjang sungai Weleran dan sungai Luk Ulo ke arah barat yang membentuk antiklin. Satuan ini membentuk daerah perbukitan bergelombang rendah. Umur formasi ini adalah Eosen Tengah-Oligosen. Lingkungan pengendapannya adalah laut dalam – batial, hal ini ditunjang oleh adanya fosil bentos *Uvegirena sp* dan *Gyroidina soldanii* (*d'orbigny*).

3. Formasi Totogan (Tomt)

Formasi ini terdiri dari breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basalt. Secara setempat didapatkan sekis masa dasar adalah batu lempung bersisik. Secara umum formasi Totogan terdiri atas:

a. Bagian bawah: Campuran perulangan tak teratur antara breksi, batu lempung tufaan dan napal;
b. Bagian tengah: Merupakan breksi, konglomerat dengan komponen basalt;
c. Bagian atas: Merupakan perselingan batu lempung, batu pasir, tufa, berlapis baik.

Satuan ini tersingkap di daerah utara Kebumen, di sekitar komplek Luk Ulo. Tebalnya melebihi 150 meter dan menipis ke arah selatan. Formasi ini selaras di atas Formasi Karangsambung, batas antara komplek Luk Ulo berupa sesar. Umur formasi ini Oligosen Akhir-Miosen Awal. Formasi Totogan dapat dibandingkan dengan batuan sedimen berumur Eosen-Miosen di daerah Banjarnegara dan Pekalongan.

4. Formasi Gabon (Tomg)

Formasi ini tersusun oleh breksi gunung api, tufa lapili, lava, breksi lahar dengan sisipan konglomerat dan batu pasir. Breksi berwarna abu-abu kehijauan, fragmen terdiri dari andesit dengan masa dasar batu pasir tufa. Tufa lapili abu-abu kehijauan berlapis. Lava dengan komposisi andesit, memperlihatkan struktur "*sheeting*". Batu tersebut pada umumnya telah mengalami serifikasi dan propilitisasi, diduga berumur oligosen akhir miosen awal, mempunyai hubungan tidak selaras dengan formasi Kali Pucang.

5. Formasi Waturada (Tmw) dan Anggota Tuf (Tnwt)

Formasi ini tersusun oleh breksi volkanik dengan fragmen batuan beku dan lava andesitik sedangkan matriknya berukuran pasir. Pada bagian bawah tersusun oleh batu pasir graywacke, bagian tengah oleh breksi dengan ukuran fragmen sekitar 30 cm dan berstruktur *geaded* bending, ke arah atas ukuran fragmen meningkat mencapai lebih dari 50 cm. Formasi ini diendapkan sebagai endapan fluxoturbidite dari kipas bawah laut pada cekungan berarah timur-barat yang turun secara aktif pada bagian depan *fore arc basin* Tersier. Terdapat Anggota Tuf (Tmwt) yang terletak di bagian bawah formasi. Tersebar di bagian utara dengan membentuk morfologi tinggi dengan beberapa puncak gunung seperti Gunung Prahu, Gunung Paras, Gunung Tugel, dan Gunung Watutumpang. Anggota tuf Formasi Waturanda yang terletak di bagian bawah formasi dapat dibandingkan dengan Formasi Andesit Tua yang berumur Oligosen Akhir hingga Miosen Awal di Yogyakarta. Berdasarkan kedudukan stratigrafi satuan batu pasir terhadap satuan lainnya maka ditafsirkan umur formasi ini adalah Miosen Awal, Karena Formasi Penosogan yang menindihnya berumur Miosen Tengah dengan lingkungan laut dalam.

6. Formasi Penosongan (Tmp)

Formasi ini terdiri dari perselingan antara batu pasir, batu lempung, tufa, napal, kalkarenit. Bagian bawah dari batu pasir jenis *greywacke*, berwarna abu-abu kecokelatan, secara stratigrafis ke atas berubah menjadi batu lanau hingga batu lempung. Pada bagian atas dari formasi ini terdiri dari tufa kaca berselingan dengan napal tufaan, berstruktur lapisan sejajar, konvolut, dan flute cast. Formasi ini berumur Miosen Tengah, bagian bawah terletak tidak selaras di atas Formasi Waturanda. Satuan ini tersingkap antara lain di sekitar Alian dan Penosogan. Ketebalan terukur di daerah Alian adalah 1146 meter dan di daerah Penosogan 950,5 meter.

7. Formasi Kalipucang (Tmk)

Satuan ini tersusun sebagian besar oleh batu gamping terumbu, setempat dapat dijumpai batug amping klastik, serta batu lempung bitumen pada bagian bawah. Formasi Kalipucang tersebar di bagian barat daya Kabupaten Kebumen yang membentuk morfologi kars Gombong selatan. Batu gamping formasi ini sebagian besar telah mengalami karstifikasi membentuk endapan caliche (batu keprus).

8. Formasi Halang (Tmph)

Penyebaran formasi tersebar di bagian tengah lembar, membentang dari barathingga timur menempati daerah perbukitan. Tebalnya sekitar 400-700 meter. Litologipenyusunan terdiri dari batu pasir gampingan, batu pasir kerikilan, batu pasir tufaan, napal, napal tufaan, batu lempung, batu lempung napalan dan sisipan kalkarenit. Nama formasi ini didasarkan pada lokasi tipe di daerah Geger Halang, Kuningan, Jawa Barat. Sedangkan di Sub Cekungan Kebumen terdapat beberapa kelompok batuan dengan ciri mirip dengan Geger Halang. Umur formasi adalah Miosen TengahPliosen Awal, Berdasarkan temuan formasi bentos seperti *Gyroida sp* dan *Epinodes sp*.

9. Formasi Peniron (Tpp)

Formasi ini menindih selaras di atas Formasi Halang dan merupakan sedimen turbidit termuda yang diendapkan di zone Pegunungan Serayu Selatan. Litologi terdiri dari breksi aneka bahan (polimik) dengan komponen andesit, batu lempung, batu pasir, dengan massa dasar batu pasir sisipan tufa.

10. Batuan Terobosan (Tma dan Tmd)

Batuan terobosan banyak dijumpai di bagian barat daya serta utara wilayah Kabupaten Kebumen. Di wilayah selatan yang berasosiasi dengan breksi volkanik Formasi Gabon, semuanya berkomposisi andesitik (Tma). Sedangkan di bagian utara, terutama sekitar Karangsambung dijumpai Diabas (Tmd). Batuan diabas umumnya lebih gelap dan kaya mineral piroksen.

11. Endapan Aluvium (Qa)

Satuan batuan ini tersusun oleh sediment yang belum terkonsolidasi, berukuranlempung hingga gravel, sebagai hasil endapan yang terdapat di sekitar sungai maupun sepanjang pantai. Endapan alluvial ini melampar cukup luas di bagian selatan Kebumen. Endapan alluvial sungai (fluvial) yang paling luas dan tebal endapannya adalah sepanjang Sungai Luk Ulo.

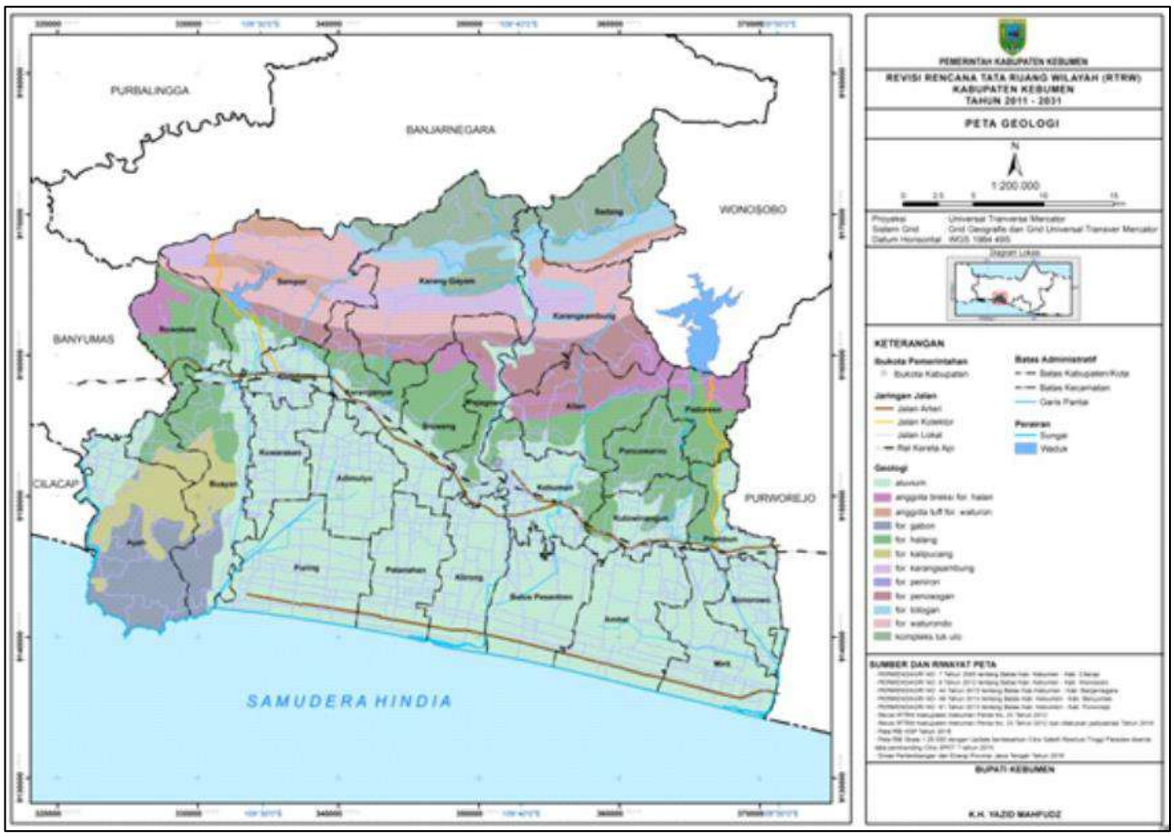

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Kebumen

2) Tanah

a. Jenis Tanah

Potensi tanah yang dimiliki Kabupaten Kebumen menunjukkan sebagian besar wilayahnya tergolong cukup subur, sehingga dapat difungsikan sebagai lahan pertanian. Hanya beberapa bagian wilayah yang kurang mampu untuk ditanami, seperti di sebagian Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang, dan Alian. Adapun beberapa jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. *Alluvial*. Merupakan tanah yang beraneka ragam sifatnya dengan warna kelabu dan cokelat hitam, tidak peka terhadap erosi, serta mempunyai produktivitas yang rendah sampai tinggi. Biasanya digunakan untuk lahan tanah pertanian dan permukiman. Tanah Aluvial berada di sebagian besar Kecamatan Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Bulus Pesantren, Ambal, dan Mirit.
2. *Latosol* atau *Inceptisol*. Merupakan jenis tanah mineral, cukup cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh di tanah latosol atau inceptisol antara lain yaitu tebu, tembakau, coklat, pala, vanili. Tanah latosol berada di sebagian Kecamatan Rowokele, Sadang, Karangsambung, Poncowarno, dan Pejagoan.
3. *Podsolik*. Tanah yang terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan suhu udara rendah. Umumnya, tanah ini berada di daerah pegunungan yang memiliki iklim basah dengan curah hujan lebih dari 2500 mm per tahun. Tanah Padsolik berada di sebagian Kecamatan Sempor, Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karanganyar, Kutowinangun, dan Padureso.
4. *Regosol*. Merupakan tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, cokelat kekuning-kuningan, dan cokelat kelabu. Tanah ini sangat peka terhadap erosi. Digunakan terutama untuk lahan perkebunan. Tanah regosol berada di sebagian besar terdapat di Kecamatan Puring, Petanahan, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit.

5. *Glei*. Tanah yang mempunyai ciri adanya lapisan glei berwarna kelabu, terbentuk karena pengaruh genangan air atau drainase yang buruk. Tanah Glei terdapat pada sebagian besar Kecamatan Bonorowo, Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Sruweng, Karanganyar, Gombong, Kuwarasan, dan Adimulyo.
6. *Litosol*. Merupakan jenis tanah berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Penampangnya besar dan berbentuk kerikil, pasir atau batu-batuan kecil, karena sedikit sekali mengalami perubahan struktur atau profil dari batuan asal. Tanah litosol miskin unsur hara. Terdapat pada Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan.

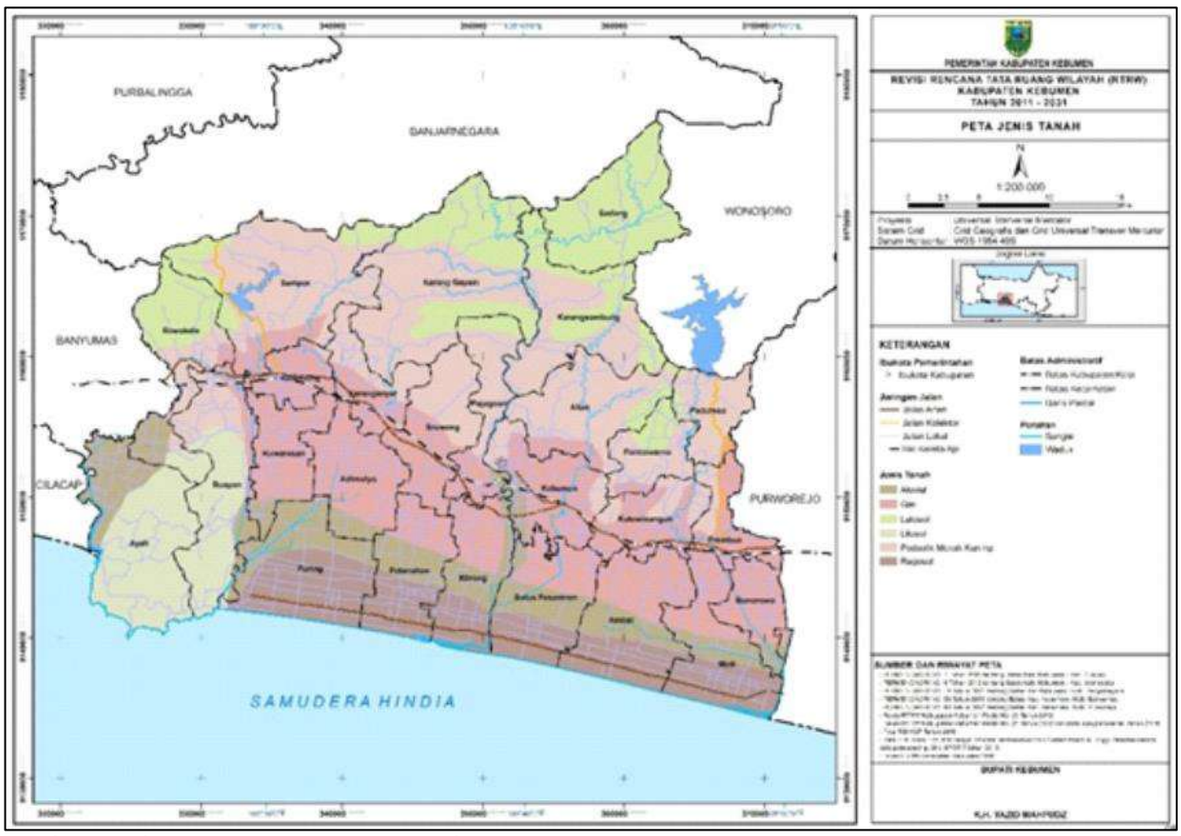

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Kabupaten Kebumen

b. Kualitas Tanah

Keadaan tanah di daerah pesisir Kabupaten Kebumen, secara umum dibedakan dalam 2 satuan lahan yang meliputi hamparan pasir (gumuk pasir) dan dataran aluvial. Hamparan dataran pasir alluvial merupakan daerah yang terletak pada kawasan pantai, yang pemanfaatannya oleh masyarakat lebih banyak digunakan untuk daerah pertanian. Sedangkan hamparan gumuk pasir pasif, terdapat tumbuhan liar (perdu dan semak-semak) dan sebagian juga digunakan untuk areal pertanian. Tanah pasiran tersebut mudah meloloskan air dan kurang subur. Tanah tersebut kurang baik dimanfaatkan untuk areal tambak secara langsung, sebab sulit untuk membangun tanggul dan kurang baik untuk petak penampungan air karena sifat porositas tanah yang besar.

Tanah pada area dataran aluvial yang diteliti umumnya mempunyai tekstur lempung (*clay*), sebagian bertekstur lempung lanauan (*silty clay*) atau lempung pasiran (*sandy clay*). Tanah tersebut mempunyai pH agak asam-netral (5,4-7,2). Tanah tipe seperti itu mampu mengikat kandungan garam atau hara yang lebih banyak dan tidak mudah tercuci air hujan. Tanah lempungan sangat sesuai untuk dibuat pematang dan baik untuk tambak atau kolam penampung air.

2.1.4 Hidrologi

Secara hidrogeologis, sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sementara itu air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah terdiri dari dua kategori yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam, air tanah dangkal adalah air tanah yang berada pada kedalaman maksimal 15 m di bawah permukaan tanah sedangkan air tanah dalam adalah air tanah yang berada minimal 15 meter di bawah permukaan tanah (Surbakti, 1986 dalam Saparudin, 2010). Potensi air tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m3/tahun.

Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Sementara itu salah satu jenis air tanah dalam adalah cekungan air tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Persebaran Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumundal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber: PermenESDM No 2 tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah, data diolah 2018

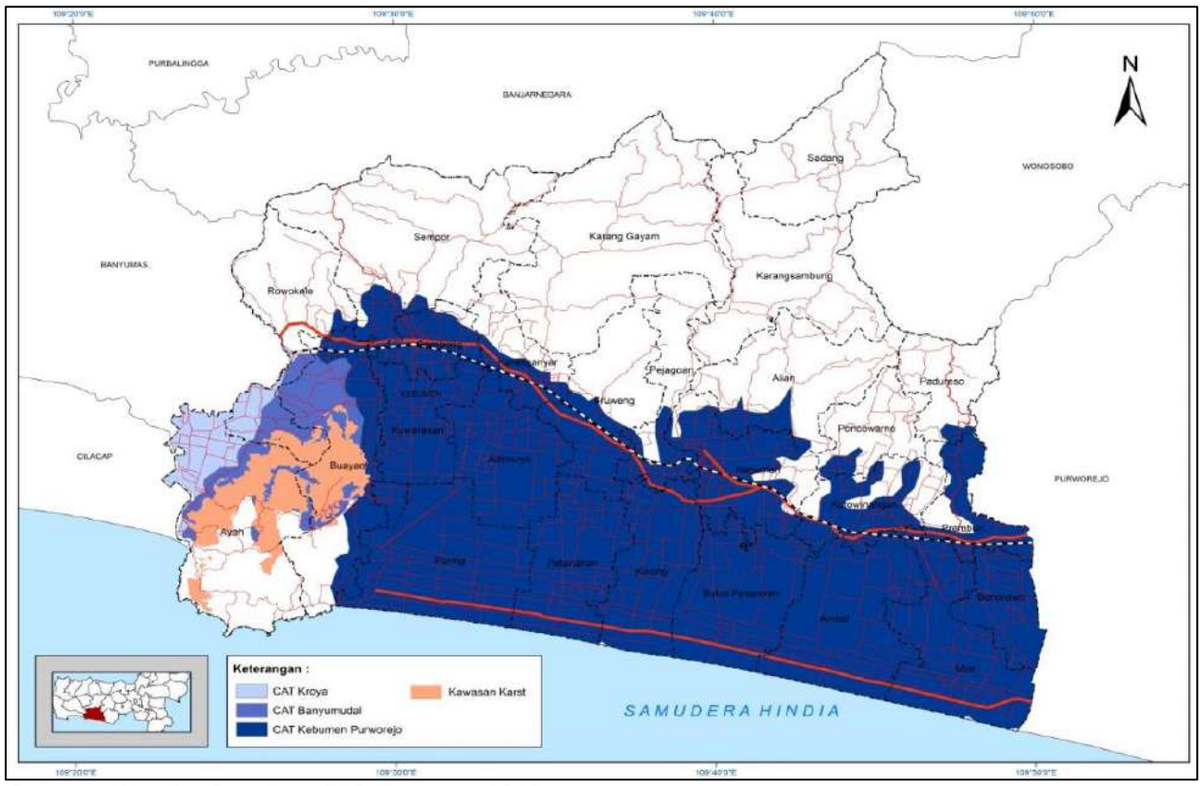

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.5
Peta Hidrogeologi Kabupaten Kebumen

Wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh beberapa sungai/kali yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain Ijo, Luk Ulo, Telomoyo, dan Wawar. Sebaran DAS tersebut tersaji pada gambar berikut:

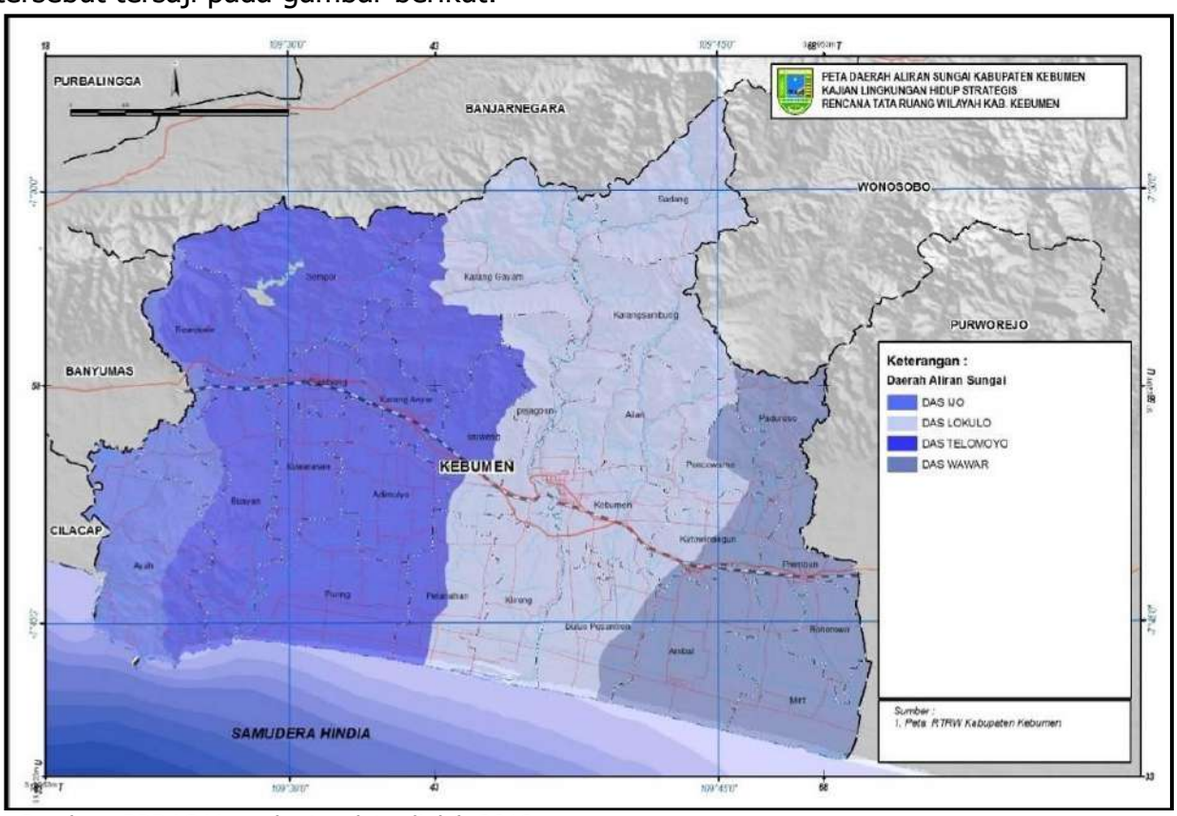

Sumber: BPDAS Yogyakarta, data diolah 2018

Gambar 2.6
Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kebumen

Selain sungai, Kabupaten Kebumen memiliki banyak mata air yang mengalir sepanjang tahun, sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Mata Air di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Debit Air (liter/detik)
1	Buayan	37	0,1 s.d. 222
2	Pejagoan	19	0,1 s.d. 6,5
3	Sruweng	25	0,1 s.d. 6,3
4	Ayah	18	0,1 s.d. 3,5
5	Rowokele	27	0,1 s.d. 100
6	Kutowinangun	3	0,1 s.d. 0,5
7	Poncowarno	12	0,1 s.d. 0,9
	Jumlah	141	

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2019

Potensi mata air terbesar berada di Kecamatan Buayan dengan jumlah 37 mata air. Selain itu mata air dengan debit terbesar juga berada di Kecamatan Buayan yaitu mata air Desa Sikayu dengan besaran 222 liter/detik.

Potensi air yang berasal dari sungai, air tanah, dan mata air dapat menjadi sumber air baku yang berguna untuk memenuhi kebutuhan air minum. Potensi air baku Kabupaten Kebumen tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 2.5
Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen

No	Sumber Air Baku	Potensi Air Baku
1	DAS Wawar	11.097,38 liter/detik
2	DAS Luk Ulo	31.126,08 liter/detik
3	DAS Telomoyo	25.941,66 liter/detik
4	DAS Ijo	13.018,01 liter/detik
5	Mata Air	± 720 liter/detik

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2019

2.1.5 Klimatologi

Secara klimatologis, Kabupaten Kebumen adalah daerah tropis dengan curah hujan cukup tinggi. Curah Hujan di Kabupaten Kebumen terbagi menjadi empat tingkatan yaitu 0-1000 mm/tahun (rendah), 1001-2000 mm/tahun (sedang), 2000-3000 mm/tahun (tinggi), >3000 mm/tahun (sangat tinggi). Jika dilihat dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) rata-rata curah hujan di Kabupaten Kebumen masih tergolong kategori sangat tinggi dengan rata-rata 3.555,2 mm. Pada tahun 2020, curah hujan di Kabupaten Kebumen sebesar 2.817 mm dan hari hujan sebanyak 136 hari. Hal ini menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti dapat dilihat pada tabel 2.6, baik jumlah curah hujan maupun jumlah hari hujan sama-sama mengalami tren penurunan. Selain itu berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kabupaten Kebumen tahun 2020 berkisar antara 23,62°C sampai dengan 25,48°C. Untuk kelembaban udara rata-rata berkisar antara 81,23% sampai dengan 86,62%.

Tabel 2.6
Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)					Jumlah Hari Hujan (hari)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	264	534	465	465	196	16	27	26	26	8
Februari	515	421	407	407	136	23	22	22	22	8
Maret	300	403	513	513	458	20	20	18	18	19
April	382	374	433	433	331	23	22	15	15	14
Mei	454	89	105	105	234	23	8	4	4	12
Juni	407	432	18	18	41	18	10	3	3	5
Juli	141	36	5	5	32	13	8	1	1	7
Agustus	159	14	10	10	12	11	4	3	3	6
September	399	203	35	35	37	24	9	7	7	8
Oktober	663	451	23	23	448	25	24	8	8	16
November	774	329	667	667	269	27	27	20	20	12
Desember	640	331	441	441	623	22	20	22	22	21
	5098	3617	3122	3122	2817	245	201	149	149	136

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2020

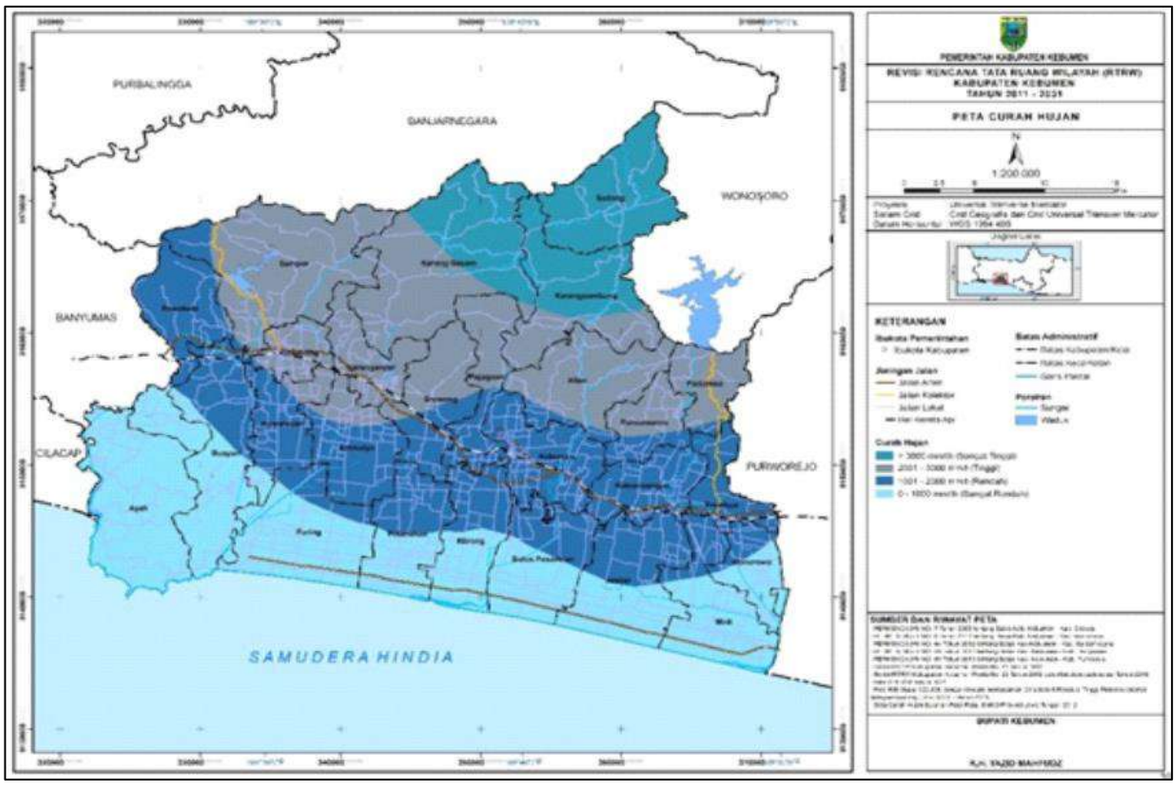

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.7
Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kebumen termasuk daerah dataran rendah dengan kondisi wilayah yang beraneka ragam, yaitu dominasi daerah pantai di sebelah selatan dan perbukitan di sebelah utara dan barat. Kebumen adalah daerah agraris dengan sektor utama diantaranya pertanian, peternakan dan usaha agrobisnis lainnya. Sektor potensial lain yang dapat dikembangkan diantaranya pariwisata dan jasa. Posisi Kebumen berada di jalur utama nasional tepatnya Pulau Jawa bagian selatan, dilalui Jalan Nasional, Jalur Pantai Selatan/JJLS, dan jalur ganda kereta api. Selain itu dekat dengan Bandara YIA di Kulonprogo, Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga dan Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap. Kebumen perlu membuat konsep pengembangan wilayahnya untuk

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial yang memiliki *multiplier effect* tinggi dengan didukung infrastruktur yang memadai. Beberapa konsep potensial akan dikembangkan di wilayah Kebumen yaitu:

1) Potensi wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen termuat pada Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Kabupaten Kebumen tengah dalam proses revisi RTRW dalam rangka mewadahi perkembangan yang ada. Proses revisi RTRW Kabupaten Kebumen saat ini telah mendapatkan Validasi KLHS RTRW dari Gubernur Jawa Tengah dan Berita Acara Pembahasan Revisi RTRW Kabupaten Kebumen oleh TKPRD Provinsi Jawa Tengah, serta telah memiliki Rekomendasi dari Badan Informasi dan Geospasial Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka tahap berikutnya yaitu akan mengajukan permohonan substansi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Data peta dan luasan wilayah yang ada Perda 23/2012 adalah data tahun 2009 yang sudah tidak relevan dengan dinamika perkembangan wilayah dan pembangunan Kabupaten Kebumen. Data peta dan luasan wilayah yang ada di Dokumen Revisi RTRW berasal dari situs satu peta Badan Informasi Geospasial yang diolah Bappeda Tahun 2019, serta telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala BIG Nomor RTRW-70/BIG/IGT/PTRA/11/2019, tanggal 28 November 2019 tentang Penyusunan Peta RTRW Kabupaten Kebumen Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2031. *Layout*/album peta memenuhi kesesuaian dan kelengkapan peta RTRW Kabupaten Kebumen dengan kaidah kartografis sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PP No 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri dari rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem perkotaan, meliputi Pusat Kegiatan Wilayah di Kawasan Perkotaan Kebumen; Pusat Kegiatan Lingkungan di Kawasan Perkotaan Gombong, Karanganyar dan Prembun; Pusat Kegiatan Kecamatan di setiap ibukota kecamatan; serta Pusat Pelayanan Lingkungan di 19 desa. Adapun rencana sistem jaringan prasarana, meliputi:

a. rencana sistem jaringan transportasi;
b. rencana sistem jaringan energi;
c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
d. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

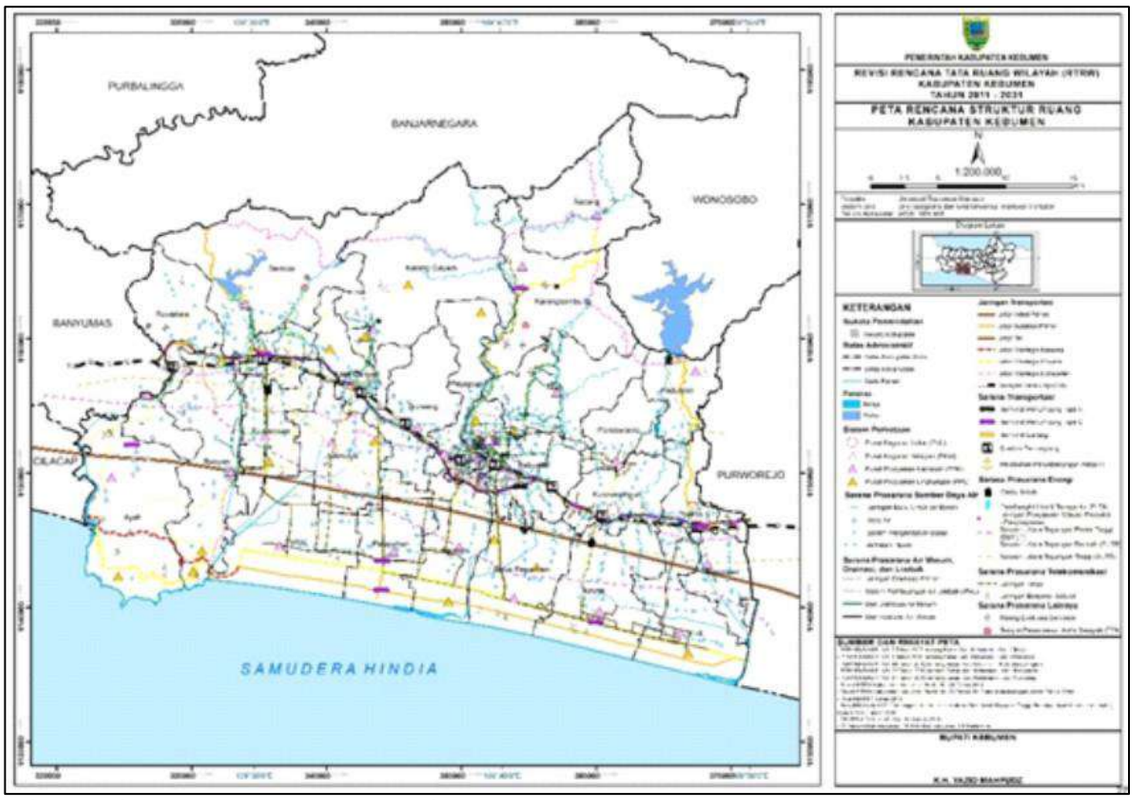

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.8
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kebumen

Struktur ruang Kabupaten Kebumen terdiri dari rencana sistem perkotaan yang membentang di tengah dari Prembun sampai dengan Gombong; serta rencana sistem jaringan prasarana seperti jaringan jalan, prasarana sumber daya air, prasarana utilitas umum lainnya. Ringkasan rencana struktur ruang sebagaimana sebagaimana tabel berikut.

Kesesuaian Tata Ruang dalam Pemanfaatan Ruang kaitannya dengan Perda RTRW dilakukan berdasarkan hasil perhitungan GIS terhadap simpangan penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen, dengan mengo*verlay* kan peta citra tahun 2015 dengan peta rencana pola ruang RTRW Kabuapten Kebumen.

Tabel 2.7
Rekapitulasi Ketidaksesuaian Pola Ruang Kabupaten Kebumen

PENGGUNAAN	LUAS (HA)				TOTAL LUAS (HA)	%
	KAWASAN BUDIDAYA	%	KAWASAN LINDUNG	%		
Belum Sesuai (BS) dan Sesuai (S)	114.740,973	91,668	26.829,506	88,002	141.570,478	90,950
Tidak Sesuai	10.429,128	8,332	3.657,755	11,998	14.086,883	9,050
Total Luas	**125.170,101**	**100,00**	**30.487,260**	**100,00**	**155.657,361**	**100,00**

Sumber : Dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kebumen, 2018

Berdasarkan Dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen yang disusun pada tahun 2018 untuk Perda No.23 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen tahun 2011-2031, didapatkan angka perhitungan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 9,05% sehingga persentase kesesuaian penataan ruang adalah sebesar 90,95%.

Perhitungan kajian evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang di lapangan dilakukan dengan membandingkan antara pemanfaatan lahan tertentu pada masing-masing kecamatan dengan pemanfaatan lahan tersebut di dalam RTRW Kabupaten Kebumen, baik untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Tabel 2.8
Ringkasan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kebumen

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
Rencana Sistem Perkotaan			
A	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kawasan Perkotaan Kebumen	Aglomerasi perkotaan pada sebagian Kecamatan Kebumen, Pejagoan bagian selatan, dan Klirong bagian utara; yang berada di utara jalan nasional
B	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Kawasan Perkotaan Gombong 2. Kawasan Perkotaan Karanganyar 3. Kawasan Perkotaan Prembun	Kawasan sepanjang jalan nasional
C	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Di setiap ibukota kecamatan meliputi: 1. Kawasan Perkotaan Kutowinangun; 2. Kawasan Perkotaan Petanahan; 3. Kawasan Perkotaan Ayah; 4. Kawasan Perkotaan Puring; 5. Kawasan Perkotaan Sruweng; 6. Kawasan Perkotaan Ambal; 7. Kawasan Perkotaan Karangsambung; 8. Kawasan Perkotaan Padureso; 9. Kawasan Perkotaan Rowokele; 10. Kawasan Perkotaan Buayan 11. Kawasan Perkotaan Klirong; 12. Kawasan Perkotaan Buluspesantren; 13. Kawasan Perkotaan Mirit; 14. Kawasan Perkotaan Bonorowo; 15. Kawasan Perkotaan Pejagoan; 16. Kawasan Perkotaan Alian; 17. Kawasan Perkotaan Poncowarno; 18. Kawasan Perkotaan Adimulyo; 19. Kawasan Perkotaan Kuwarasan; 20. Kawasan Perkotaan Sempor; 21. Kawasan Perkotaan Karanggayam; dan 22. Kawasan Perkotaan Sadang.	Setiap ibukota kecamatan yang bukan PKW dan PKL

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
D	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Desa Purbowangi Kecamatan Buayan; 2. Desa Jladri Kecamatan Buayan; 3. Desa Karangbolong Kecamatan Buayan; 4. Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong; 5. Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren; 6. Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren; 7. Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit; 8. Desa Peniron Kecamatan Pejagoan; 9. Desa Jemur Kecamatan Pejagoan; 10. Desa Jatimulyo Kecamatan Alian; 11. Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo; 12. Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan; 13. Desa Pagebangan Kecamatan Karanggayam; 14. Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam; 15. Desa Karangduwur Kecamatan Ayah; 16. Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar; 17. Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen; dan 18. Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele;	
Rencana Sistem Jaringan Prasarana			
A	Rencana Sistem Jaringan Transportasi		
A1	Sistem Jaringan Jalan		
1	Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten	c. pengoptimalan jalan arteri primer (AP1) yang merupakan jalan nasional, meliputi: 1. Ruas Jalan Batas Banyumas Tengah – Kebumen 2. Ruas Jalan Lingkar Selatan Kebumen; 3. Ruas Jalan Batas Kota Kebumen-Prembun; 4. Ruas Jalan Prembun-Kutoarjo	Jalan nasional sesuai SK Menteri PUPR
		d. Pengembangan jalan, meliputi 1. pengembangan jalan tol berupa pengembangan ruas jalan tol Cilacap – Yogyakarta 2. pengembangan jaringan jalan lintas selatan (JJLS)	1. Melalui wilayah di selatan jalan nasional (trase menunggu pusat) 2. Penyelesaian ruas dari Wawar – Tambakmulyo – Jladri – Ayah – Bodo

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
		e. Jalan strategis nasional yaitu pengembangan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS)	Jalan Pantai Selatan Jawa yang melalui wilayah di a. Kecamatan Mirit, b. Kecamatan Ambal, c. Kecamatan Bulupesantren, d. Kecamatan Klirong, e. Kecamatan Petanahan, f. Kecamatan Puring (JJLS Ruas Jladri - Ayah dan JJLS Ruas Jladri - Tambakmulyo)
2	Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten	a. Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota, meliputi: 1. ruas jalan Gombong – Sempor – Ketileng 2. ruas Jalan Prembun – Wadaslintang	1. Simpang tiga Jalan Sempor Lama s.d. batas Kabupaten Banjarnegara 2. Simpang tiga Bekas Terminal Prembun s.d. batas Kabupaten Wonosobo Jalan Provinsi ditetapkan dengan SK Gubernur
		b. Jalan strategis Provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi, meliputi: 1. Jalan Daendels 2. Rencana Jalan Lintas Kabupaten Banjarnegara (Banjarnegara-Kebumen-Batang-Pekalongan) yang melintasi Kabupaten Kebumen	1) Jalan non status dari Desa Wiromartan Kecamatan Mirit (Batas Kabupaten Purworejo) s.d. Desa Ayah Kecamatan Ayah (Batas Kabupaten Cilacap); 2) Status jalan kabupaten yang direncanakan menjadi jalan provinsi melalui: • ruas Jalan Giritirto (batas Banjarnegara) – Karangsambung-Mertokondo; • ruas Jalan Sadang Kulon (batas Banjarnegara) – Srisip – Karangsambung –Mertokondo;
3	Jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten	Jalan strategis Kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan Kabupaten, meliputi:	
		1. Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar;	Melalui wilayah Kecamatan Rowokele, Buayan, Kuwarasan, dan Gombong
		2. Jalan Lingkar Utara Gombong;	Melalui wilayah Kecamatan Karanganyar, Sruweng, dan Pejagoan
		3. Rencana Jalan Altenatif koridor tengah selatan	Melalui wilayah Kecamatan Buayan, Kuwarasan, Adimulyo, dan Sruweng

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
4.	Rencana Jalan Alternatif koridor tengah utara	Melalui wilayah Kecamatan Kebumen, Kutowinangun, dan Prembun	Kecamatan Kebumen: 1. Desa Wonosari 2. Desa Argopeni Kecamatan Kutowinangun: 1. Desa Tunjungseto 2. Desa Pesalakan 3. Desa Karangsari 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Lumbu 6. Desa Triwarno Kecamatan Prembun: 1. Desa Sidogede 2. Desa Kedungbulus 3. Desa Sembirkadipaten 4. Desa Kedugwaru Desa Kabekelan
5.	Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung wisata Geopark Nasional Karangsampung – Karangbolong	Ruas jalan Mertokondo – Karangsambung dan Ayah – Rowokele	
6.	Rencana Pengembangan Jalur Pesisir Ayah	Pada wilayah Kecamatan Buayan dan Ayah	Kecamatan Buayan: 1. Desa Jladri 2. Desa Karangbolong Kecamatan Ayah: 1. Desa Pasir 2. Desa Jintung 3. Desa Srati 4. Desa Karangduwur 5. Desa Argopeni 6. Desa Kalipoh 7. Desa Ayah

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
7.	Rencana jalan menuju kawasan industri	1. Pada wilayah Kecamatan Petanahan	Kecamatan Petanahan: 1. Desa Munggu 2. Desa Karanggadung
8.	Pengembangan jalan desa	a. peningkatan kualitas jalan usaha tani; dan b. rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten yang kewenangannya ditetapkan melalui peraturan perundang undangan	
9	Terminal penumpang	a. Terminal Tipe A yang merupakan kewenangan pemerintah pusat	Terminal Bus Adikarso di Kecamatan Kebumen
		b. Terminal Tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi	Rencana di Kecamatan Petanahan sepanjang JJLS
		c. Terminal Tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten	Meliputi terminal di wilayah: 1. Kecamatan Ayah; 2. Kecamatan Puring; 3. Kecamatan Ambal; 4. Kecamatan Karanggayam; 5. Kecamatan Prembun; 6. Kecamatan Kebumen; 7. Kecamatan Karangsambung; dan 8. Kecamatan Gombong yang juga dikembangkan untuk terminal aglomerasi di Kawasan Barlingmascakeb
10	Terminal barang		Meliputi terminal di wilayah: a. Kecamatan Rowokele; b. Kecamatan Gombong; dan c. Kecamatan Prembun
A2	Sistem Jaringan Kereta Api		
1	jaringan jalur kereta api	a. jalur Selatan b. pengembangan jalan layang (flyover) atau jalan bawah tanah (underpass)	a. *double track* KA Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya; b. di perlintasan rel Karanganyar dan Kutowinangun
2	Stasiun kereta api		Meliputi: a. Stasiun Prembun; b. Stasiun Kutowinangun; c. Stasiun Kebumen; d. Stasiun Sruweng; e. Stasiun Gombong;

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
			f. Stasiun Soka; g. Stasiun Ijo; h. Stasiun Karanganyar; i. Stasiun Wonosari.
			Catatan: Stasiun Prembun dan Stasiun Gombong dikembangkan sebagai stasiun terpadu yang melayani angkutan penumpang dan barang
A3	Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan		
		berupa pengembangan armada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi: a. Waduk Sempor di Kecamatan Sempor; dan b. Waduk Wadaslitang Kecamatan Padureso.	
B	Rencana Sistem Jaringan Energi		
B1	jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;	a. rencana jaringan pipa BBM Rewulu – Teras – Pengapon, Cepu – Rembang – Pengapon Semarang, Cilacap – DIY	melalui Kecamatan Prembun – Kecamatan Buayan – Kecamatan Kutowinangun – Kecamatan Kebumen – Kecamatan Pejagoan – Kecamatan Sruweng – Kecamatan Karanganyar – Kecamatan Gombong – Kecamatan Rowokele;
		b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	di seluruh kecamatan.
B2	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi: 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), 3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 4. Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif Gas (PLTG) Rawa 5. pengembangan pembangkit listrik lainnya	1. Kecamatan Padureso; dan Kecamatan Sempor 2. Kecamatan Padureso; Kecamatan Karanggayam; Kecamatan Sadang Kecamatan Sempor; Kecamatan Buayan; dan Kecamatan Rowokele 3. Kecamatan Rowokele; Kecamatan Buayan; Kecamatan Sadang; Kecamatan Karanggayam; Kecamatan Sempor; Kecamatan Poncowarno; Kecamatan Buluspesantren; Kecamatan Kutawinangun; Kecamatan Ambal; dan Kecamatan Gombong. 4. Kecamatan Prembun; Kecamatan Kutowinangun; dan Kecamatan Buluspesantren
		b. Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi: 1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;	1a. Kecamatan Bonorowo; Kecamatan Mirit; Kecamatan Ambal; Kecamatan Buluspesantren; Kecamatan Klirong; Kecamatan Petanahan; Kecamatan Adimulyo; Kecamatan Kuwarasan; Kecamatan Buayan; dan Kecamatan Rowokele 1b. Kecamatan Bonorowo; Kecamatan Mirit; Kecamatan Ambal; Kecamatan Buluspesantren; Kecamatan Kutowinangun; Kecamatan

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
		a. rencana pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 (lima ratus) kVA, b. rencana pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas paling banyak 150 (seratus lima puluh) kVA 2. jaringan distribusi tenaga listrik; berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan kapasitas 1 (satu) kVA yang ada di wilayah Kecamatan. 3. gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik, meliputi: a. Gardu Induk 150 (seratus lima puluh) KV, b. Gardu Induk 150 (seratus lima puluh) KV	Kebumen; Kecamatan Klirong; Kecamatan Petanahan; Kecamatan Sruweng; Kecamatan Gombong; Kecamatan Adimulyo; Kecamatan Kuwarasan; Kecamatan Buayan; dan Kecamatan Rowokele. 3a. di Kecamatan Gombong 3b. di Kecamatan Ambal
C	Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi		
C1	Jaringan tetap	berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik yang melayani seluruh wilayah Kabupaten.	
C2	Jaringan bergerak	berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama untuk beberapa operator telepon seluler di seluruh wilayah Kabupaten dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
D	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air		
D1	sumber air	a. air permukaan, meliputi: 1. Wilayah Sungai lintas kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten, 2. Wilayah Sungai (WS) di dalam Kabupaten Kebumen yaitu WS Serayu – Bogowonto	1. Meliputi Daerah Irigasi (DI) Waduk Wadaslintang dan DI Waduk Sempor 2. Meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ijo; DAS Telomoyo; DAS Luk Ulo; dan DAS Wawar
		b. Air tanah, meliputi: 1. Cekungan Air Tanah (CAT) Banyumudal di bagian barat, 2. CAT Kebumen – Purworejo 3. CAT Kroya	1. Meliputi Kecamatan Buayan; dan sebagian Kecamatan Ayah 2. membentang dari barat ke timur di bagian selatan wilayah Kabupaten hingga ke wilayah pesisir; 3. di Kecamatan Ayah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Cilacap.
D2	Prasarana sumber air	a. Sistem jaringan irigasi, meliputi:	1. DI Wadaslintang dan DI Sempor (Pusat) dengan luas lebih dari 1000 Ha

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
		1. status daerah irigasi primer yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat; meliputi: a. DI lintas Kabupaten/Kota b. DI utuh pada DI Sempor 2. status daerah irigasi sekunder yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi; berupa DI lintas Kabupaten/Kota pada DI Buniayu. 3. status daerah irigasi tersier yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) DI.	2. DI Serayu (Provinsi) yang berbatasan dengan Kabupaten Banyumas 3. DI Kabupaten dengan luas dibawah 1000 Ha yang dominan tersebar di Kebumen Utara dan Barat
		b. Sistem pengendalian banjir, meliputi: 1. pengurangan risiko besaran banjir dilakukan dengan membangun prasarana pengendali banjir dan prasarana pengendali aliran permukaan; 2. pembangunan prasarana pengendali banjir, meliputi: a. peningkatan kapasitas sungai, tanggul, pelimpah banjir dan/atau pompa, bendungan; dan b. perbaikan drainase perkotaan 3. pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan dilakukan dengan membuat resapan air.	
		c. Jaringan air baku untuk air bersih berupa waduk, sungai, mata air, dan jaringan air bawah tanah yang dialirkan ke pengolahan air	
		d. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna, meliputi: 1. kelompok pengguna sosial; 2. kelompok pengguna rumah tangga; 3. kelompok pengguna instansi pemerintah; 4. kelompok pengguna niaga; dan 5. kelompok pengguna industri.	
E	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya		
E1	sistem penyediaan air minum (SPAM);	a. jaringan perpipaan, meliputi: 1. unit air baku meliputi sungai, mata air, bendung, saluran irigasi, dan air bawah tanah di setiap kecamatan	SPAM regional Keburejo dan jaringan PDAM dan SPAM Perdesaan (DAK/pamsimas)

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
		2. unit produksi berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta perangkat operasionalnya 3. unit distribusi meliputi pemompaan dan penyaluran 4. unit pelayanan meliputi peningkatan pelayanan SPAM tingkat regional antar kabupaten dan layanan tingkat kabupaten	
		b. bukan jaringan perpipaan, meliputi: 1. sumber air bersih non perpipaan berasal dari air tanah dan air permukaan dengan pembuatan sumur 2. jaringan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan	
E2	Rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL)	a. saluran pembuangan air limbah rumah tangga; 1. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal tersebar di seluruh wilayah perkotaan; 2. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) on site atau individu tersebar di masing-masing perumahan dan kawasan permukiman; 3. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) minimal 100 (seratus) meter dari tepi pantai dan harus terus berfungsi agar buangan yang dilepas ke perairan pantai tidak merusak lingkungan	1. Diantaranya IPAL komunal Kutosari 2. IPAL individu di tersebar di perdesaan 3. IPLT meliputi wilayah Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung; Desa Semali Kecamatan Sempor; Kecamatan Ayah; dan Kecamatan Mirit
		b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri dan fasilitas kesehatan meliputi : 1. setiap penanggung jawab industri wajib menyediakan IPAL pada masing-masing kegiatan industri; dan 2. pengembangan IPAL komunal pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI).	
E3	Rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	berupa pengembangan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	
E4	Rencana sistem jaringan persampahan	a. pengelolaan sampah skala rumah tangga; dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R yakni reduce, reuse, dan recycle.	

No	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
		b. Tempat Penampungan Sampah Sementara 3R (TPS3R) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); berupa peningkatan kapasitas dan kuantitas TPS3R/ TPST yang tersebar pada setiap kecamatan	b. tersebar di seluruh wilayah, diantaranya TPS3R kelurahan Kebumen dan Desa Kembaran
		c. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), meliputi: 1. peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPA 2. pembangunan, pengembangan, dan peningkatan TPA	1. meliputi: TPA Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung; dan TPA Desa Semali Kecamatan Sempor; 2. meliputi: Kecamatan Prembun; dan Kecamatan Petanahan
E5	Rencana sistem jaringan evakuasi bencana	a. Jalur evakuasi bencana, meliputi: 1. jalur evakuasi bencana tsunami melalui ruas jalan Kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana tsunami 2. jalur evakuasi bencana banjir melalui ruas jalan Kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana banjir 3. jalur evakuasi bencana longsor	1. meliputi wilayah Kecamatan Buayan; Puring; Petanahan; Buluspesantren; Ambal; Mirit; Ayah; dan Klirong. 2. meliputi wilayah Kecamatan Puring; Bonorowo; Alian; Kebumen; Sruweng; Adimulyo; Kuwarasan; Rowokele; Sempor; Gombong; Karanganyar; Karanggayam; Karangsambung; sebagian Buayan dan Ayah. 3. Meliputi sebagian wilayah Kecamatan Ayah; Buayan; Alian; Poncowarno; Kebumen; Pejagoan; Sruweng; Rowokele; Sempor; Karanganyar; Karanggyam; Padureso; Sadang; dan Karangsambung.
		b. Ruang evakuasi bencana, meliputi: 1. mempertimbangkan kawasan permukiman, potensi penyelamatan korban, optimalisasi jarak tempuh ke ruang evakuasi dan pemasangan rambu-rambu penanda petunjuk rute jalur evakuasi 2. dalam bentuk ruang terbuka berupa lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung evakuasi.	
E6	Rencana sistem jaringan drainase	a. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase primer pada sungai utama	
		b. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase sekunder dan tersier	
		c. pengembangan embung di masing-masing wilayah kecamatan	

Sumber: Bappeda, data diolah 2021

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari rencana Kawasan peruntukan lindung dan rencana kawasan peruntukan budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan konservasi; kawasan lindung geologi; kawasan rawan bencana; kawasan cagar budaya; dan kawasan ekosistem *mangrove*. Adapun rencana kawasan peruntukan budidaya meliputi:

a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan pertanian;
d. kawasan perikanan;
e. kawasan pertambangan dan energi;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan pariwisata;
h. kawasan permukiman; dan
i. kawasan pertahanan dan keamanan.

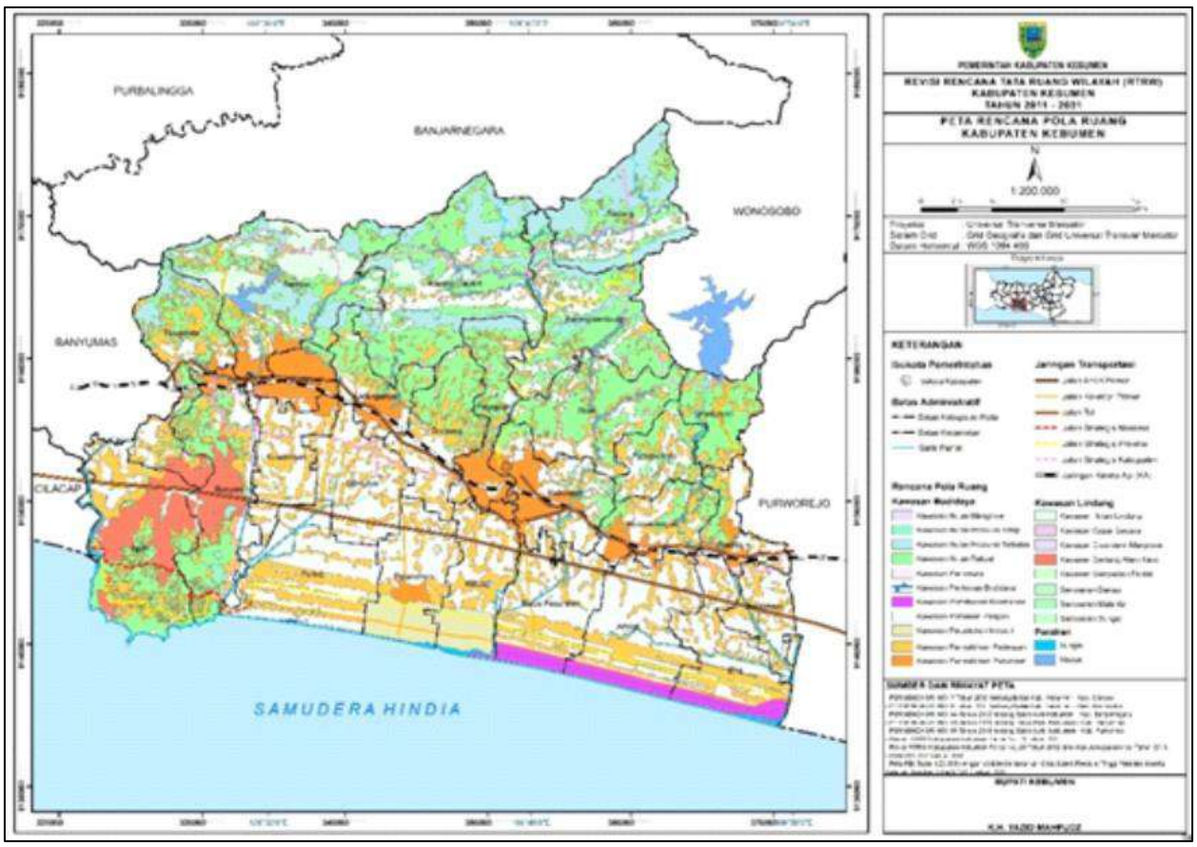

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.9
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen

Ringkasan rencana pola ruang Kabupaten Kebumen ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Ringkasan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen

No	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
A	Kawasan peruntukan lindung		
A1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	a. Kawasan hutan lindung	Mengacu Peta Hutan Lindung Kementerian LHK, meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Ayah; Sruweng; Pejagoan; Rowokele; Karanggayam; Sempor; dan Karangsambung
		b. Kawasan resapan air	meliputi sebagian wilayah di: Kecamatan Sadang; Rowokele; Sempor; Ayah; Karangsambung; Padureso; Buayan; Poncowarno; Alian; Gombong; Karanganyar; Kebumen; Pejagoan; Puring; dan Sruweng.
A2	Kawasan Perlindungan Setempat	a. Sempadan pantai, berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat	
		b. Sempadan sungai, dibagi dengan aturan: 1. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.	

No	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
		2. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) km2 di mana garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km2 di mana garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. 3. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. 4. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.	
		c. Kawasan sekitar danau atau waduk berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi dan/atau daratan sepanjang tepian waduk yang lebar proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk	Meliputi 1. kawasan sabuk hijau sepanjang perairan di Waduk Wadaslintang Kecamatan Padureso; dan 2. kawasan sabuk hijau sepanjang perairan di Waduk Sempor Kecamatan Sempor.
		d. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal	meliputi: a. Situs Makam Mbah Lancing di Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit b. Situs Makam Syeh Alkahfi Somalangu di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen; c. Situs Makam Mbah Untung Suropati di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam; d. Situs Makam Mbah Agung di Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam; e. Situs Makam Mbah Pako di Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam;

No	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
			f. Situs Makam Mbah Pagerjawa di Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam; g. Pesanggrahan Bulupitu di Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun; h. Pesanggrahan Pandan Kuning di Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan; dan i. Pesanggrahan Karangbolong di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan.
A3	Kawasan Konservasi	berupa kawasan konservasi perairan	meliputi: a. sekitar muara Sungai Ijo; b. sekitar muara Sungai Telomoyo; c. sekitar muara Sungai Luk Ulo; d. sekitar muara Sungai Wawar; dan e. gumuk pasir di sekitar Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, dan Puring
A4	Kawasan Lindung Geologi	a. Kawasan cagar alam geologi, meliputi: 1. Kawasan keunikan batuan dan fosil, berupa Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) Karangsambung 2. Kawasan keunikan bentang alam, berupa Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)Gombong	Mengacu Peta Geologi dan Karst dari Kementerian ESDM 1. meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Karangsambung; Karanggayam; Sadang; Pejagoan; dan Alian. 2. Meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Ayah; Buayan; dan Rowokele.
		b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah 1. Kawasan imbuhan air tanah, meliputi: a. Cekungan Air Tanah (CAT) Kebumen – Purworejo b. CAT Banyumudal; dan c. CAT Kroya 2. Sempadan mata air, diukur mengelilingi mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air	1a. meliputi wilayah di sebagian Kecamatan Padureso, sebagian Prembun, Bonorowo, sebagian Kutowinangun, sebagian Poncowarno, Ambal, sebagian Kebumen, sebagian Alian, Buluspesantren, Klirong, sebagian Pejagoan, sebagian Sruweng, Petanahan, sebagian Karanganyar, Adimulyo, Puring, sebagian Gombong, sebagian Sempor, sebagian Rowokele, Kuwarasan, dan sebagian Buayan 1b. meliputi sebagian Kecamatan Buayan, sebagian Rowokele, dan sebagian Ayah 1c. meliputi sebagian Kecamatan Rowokele dan sebagian Ayah

No	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
A5	Kawasan Rawan Bencana	a. Kawasan rawan tsunami	Meliputi sebagian wilayah selatan dari Kecamatan Buayan; Puring; Petanahan; Buluspesantren; Ambal; Mirit; Ayah; dan Klirong.
		b. Kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor	Meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Rowokele; Sempor; Karanggayam; Karangsambung; Pejagoan; Sruweng; Sadang; Alian; Padureso; Karanganyar; Buayan; Ayah; Poncowarno; dan Kebumen.
		c. Kawasan sempadan patahan aktif pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Sadang; Karanggayam; Rowokele; Sempor; Buayan; dan Ayah.
A6	Kawasan Cagar Budaya	meliputi: a. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong; b. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah; c. Masjid Soko Tunggal di Desa PekuncenKecamatan Sempor; d. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen; dan e. Goa Menganti di Desa Karangduwur Kecamatan Ayah.	
A7	Kawasan Ekosistem Mangrove	meliputi: a. pengembangan pantai berhutan mangrove di kawasan pesisir b. pengembangan ekosistem mangrove di muara Sungai Wawar c. pengembangan ekosistem mangrove di muara Sungai Luk Ulo d. pelestarian mangrove di kawasan laguna	a. meliputi kawasan pesisir selatan di Kecamatan Ayah; Puring; Klirong; dan Petanahan b. di kawasan pesisir selatan Kecamatan Mirit c. di kawasan pesisir Kecamatan Klirong d. di kawasan pesisir Kecamatan Puring
B	Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya		
B1	Kawasan Hutan Produksi	a. Kawasan hutan produksi tetap	Meliputi sebagian wilayah di: a. Kecamatan Buayan b. Karanggayam; c. Padureso; d. Sempor; e. Alian; f. Karangsambung; dan g. Sadang.
		b. Kawasan hutan produksi terbatas	meliputi sebagian wilayah di: a. Kecamatan Ayah; b. Buayan; c. Pejagoan;

No	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
			d. Karanganyar; e. Rowokele; f. Karanggayam; g. Padureso; h. Sempor; i. Karangsambung; j. Sadang; dan k. Karanggayam.
B2	Kawasan Hutan Rakyat		Tersebar di seluruh kecamatan, berupa tanah hak milik yang ditanami tanaman keras dan buah-buahan
B3	Kawasan Pertanian	a. Kawasan tanaman pangan, berupa lahan pertanian lahan basah dan lahan kering yang lokasinya tersebar di masing-masing wilayah seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen	Terutama pada lahan sawah yang terlayani waduk wadaslintang dan sempor serta irigasi teknis kabupaten yang baik
		b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, berupa kawasan tanaman pangan	Diprioritaskan pada lahan sawah produktivitas tinggi, terlayani irigasi teknis dengan baik dan disepakati oleh pemilik lahan
B4	Kawasan Perikanan	a. Kawasan perikanan tangkap, meliputi: 1. Kawasan perikanan tangkap di laut meliputi seluruh wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia. 2. Kawasan perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan meliputi Seluruh Perairan Umum Daratan di Kabupaten Kebumen.	
		b. Kawasan perikanan budidaya, meliputi: 1. kawasan perikanan budidaya air laut; 2. kawasan perikanan budidaya air payau; dan 3. kawasan perikanan budidaya air tawar.	1. meliputi seluruh wilayah laut Kabupaten Kebumen 2. meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Ayah; Buayan; Puring; Petanahan; Klirong; Buluspesantren; Ambal; dan Mirit. 3. meliputi sebagian wilayah pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen
		c. Pelabuhan perikanan, meliputi: 1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 2. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Non Kelas (PPI Non Kelas)	1. PPP Lohgending di Kecamatan Ayah. 2. Meliputi a. PPI Karangduwur di Kecamatan Ayah; b. PPI Pasir di Kecamatan Ayah; c. PPI Tanggulangin di Kecamatan Klirong. d. Meliputi: a. PPI Argopeni di Kecamatan Ayah; b. PPI Rowo di Kecamatan Mirit;

No	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
			c. PPI Tegalretno di Kecamatan Petanahan; d. PPI Tambakmulyo di Kecamatan Puring; e. PPI Surorejan di Kecamatan Puring; f. PPI Lembupurwo di Kecamatan Mirit; g. PPI Sidoharjo di Kecamatan Puring.
		d. Kawasan perikanan lainnya	meliputi: a. Kawasan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR); dan b. Industri Pengolahan dan Pemasaran Ikan.
B5	Kawasan Pertambangan dan Energi	a. Kawasan pertambangan mineral, meliputi: 1. mineral logam; 2. mineral bukan logam; 3. batuan;	Mengacu Peta Potensi Tambang Jawa Bali Kementerian ESDM, meliputi sebagian wilayah di: a. Kecamatan Ayah; b. Alian; c. Buayan; d. Karanggayam; e. Karangsambung; f. Klirong; g. Padureso; h. Pejagoan; i. Poncowarno; j. Rowokele; k. Sadang; l. Sempor; dan m. Sruweng.
		b. Kawasan pertambangan batubara	Meliputi sebagian wilayah di: a. Kecamatan Ayah; dan b. Kecamatan Buayan.
		c. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi	Dengan potensi berada di seluruh wilayah Kabupaten.
B6	Kawasan Peruntukan Industri	a. Kawasan peruntukan industri	Meliputi sebagian wilayah di: a. Kecamatan Ambal; b. Kecamatan Buluspesantren; c. Kecamatan Gombong; d. Kecamatan Karanganyar; e. Kecamatan Kebumen; f. Kecamatan Klirong;

No	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
			g. Kecamatan Kuwarasan; h. Kecamatan Pejagoan; i. Kecamatan Petanahan; j. Kecamatan Puring; k. Kecamatan Sempor
		b. Kawasan industri	berada di dalam kawasan peruntukan industri;
		c. Sentra industri kecil dan menengah	berupa pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dikembangkan di seluruh kecamatan.
B7	Kawasan Pariwisata	a. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), meliputi: 1. DPK Karst Gombong dan sekitarnya a. KSPK Karst Gombong dan sekitarnya, b. KSPK Gombong – Sempor dan sekitarnya 2. DPK Geologi Karangsambung dan sekitarnya, meliputi: a. KSPK Karangsambung dan sekitarnya, b. KSPK Kebumen – Prembun dan sekitarnya 3. DPK Pantai Selatan dan sekitarnya, meliputi: a. KSPK Puring – Petanahan dan sekitarnya b. KPPK Klirong – Mirit dan sekitarnya,	Mengacu Perda Rencana Induk Kepariwisataan 1a. meliputi Gua Jatijajar, Gua Petruk, Gua Barat; dan 1b. meliputi Waduk Sempor dan Benteng Van Der Wijck. 2a. meliputi sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam, Karanganyar,Karangsambung, Pejagoan, Sruweng, dan Sadang; dan 2b. meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kebumen, Kutowinangun, Prembun, Alian, Padureso, dan Poncowarno 3a. meliputi sebagian wilayah Kecamatan Puring, Petanahan, dan Adimulyo; 3b. meliputi sebagian wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren, Ambal, Mirit, dan Bonorowo.
		b. Pembangunan daya tarik wisata	meliputi: a. daya tarik wisata alam; b. daya tarik wisata budaya; c. daya tarik wisata hasil buatan manusia
B8	Kawasan Permukiman	a. Permukiman perkotaan, berada di masing-masing kawasan perkotaan	Meliputi: 1. Kawasan Perkotaan Kebumen di sebagian besar wilayah tengah-barat Kecamatan Kebumen, sebagian kecil selatan Kecamatan Alian, sebagian selatan Kecamatan Pejagoan, sebagian kecil utara Kecamatan Klirong dan Buluspesantren, sebagian kecil timur Kecamatan Sruweng

No	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Kawasan	Keterangan
			2. Kawasan perkotaan Gombong di sebagian besar wilayah tengah Kecamatan Gombong, sebagian utara Kecamatan Kuwarasan dan Buayan, sebagain selatan Kecamatan Sempor dan Rowokele 3. Kawasan Perkotaan Karanganyar di sebagian wilayah tengah sekitar pusat Kecamatan Karanganyar 4. Kawasan Perkotaan Kutowinangun di sebagian wilayah selatan sekitar pusat Kecamatan Kutowinangun dan sebagian kecil utara Kecamatan Ambal 5. Kawasan Perkotaan Prembun di sebagian wilayah sekitar pusat Kecamatan Prembun 6. Kawasan Perkotaan Petanahan di sebagian wilayah sekitar pusat Kecamatan Petanahan
		b. Permukiman perdesaan, tersebar di luar kawasan permukiman perkotaan	
B9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	meliputi: a. Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen b. Komando Rayon Militer; c. Polisi Resor; d. Polisi Sektor; e. Sekolah Calon Tamtama; f. Detasemen Kesehatan TNI; g. Daerah latihan dan uji coba TNI; h. Pos TNI Angkatan Laut.	Sesuai Perda 23/2012 tentang RTRW dan ketentuan dari Pusat g. Meliputi sebagian wilayah selatan di Kecamatan Mirit; Kecamatan Ambal; dan Kecamatan Bulupesantren

Sumber: Bappeda, data diolah 2021

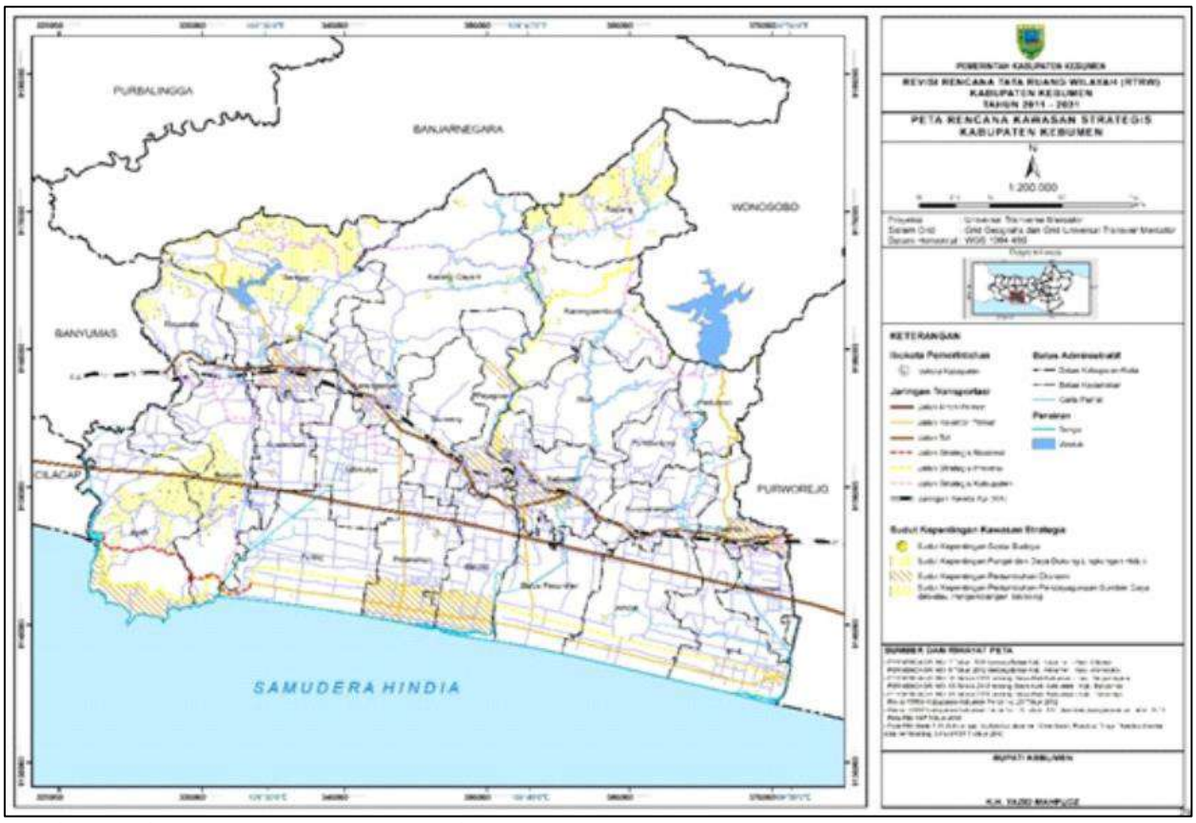

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.10
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen

Kawasan Strategis adalah bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan. Kawasan strategis di wilayah kabupaten meliputi: Kawasan Strategis Nasional; Kawasan Strategis Provinsi; dan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Nasional di wilayah kabupaten meliputi: Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan; Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan Strategis Provinsi meliputi: Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi: Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

a. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun – Kutowinangun – Kebumen –Sruweng – Karanganyar – Gombong; yaitu kawasan perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan kawasan lainnya
b. Kawasan pesisir Ayah; yaitu kawasan yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di sektor perikanan dan pariwisata

c. Kawasan Petanahan dan Kawasan Peruntukan Industri; yaitu kawasan yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di sektor perindustrian, perdagangan dan jasa
d. Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di seluruh kecamatan; yaitu kawasan pertanian yang produktivitas padinya tinggi dan saluran irigasi teknisnya baik
e. Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit; yaitu kawasan yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di sektor pertanian/agrobisnis
f. Kawasan industri genteng Pejagoan; yaitu kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di sektor industri genteng
g. Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan: yaitu kawasan pusat pelestarian ekosistem burung lawet

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya, yaitu Kawasan yang memiliki situs warisan peninggalan sosial dan budaya bernilai sejarah tinggi, meliputi:
a. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong;
b. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
c. Masjid Soko Tunggal di Desa Pekuncen Kecamatan Sempor; dan
d. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu kawasan yang berfungsi untuk melindungi lingkungan hidup dan kawasan lain disekitarnya, meliputi:
a. Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo;
b. Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang;

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi, yaitu kawasan yang ditata kelola dengan teknologi yang berfungsi untuk melayani sumber daya alam (air, tanah dan udara) mendukung perekonomian/pertanian, meliputi:
a. Kawasan Waduk Sempor; dan
b. Kawasan Waduk Wadaslintang.

2) Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong

Pada tahun 2018, Geopark Karangsambung-Karangbolong telah ditetapkan menjadi Geopark Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 070/179 Tahun 2018 tanggal 3 April 2018 tentang Delineasi Kawasan Geopark di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya diperkuat dengan Berita Acara Hasil Penilaian Kenaikan Status Geopark Nasional 2018 tanggal 29 November 2018. Penetapan Kawasan Geopark bertujuan untuk mewujudkan pelestarian warisan geologi (*geo-heritage*), keanekaragaman hayati (*bio-diversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui tiga pilar melalui konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan ditetapkan menjadi Geopark Nasional, maka keberadaan kekayaan geologi yang didukung keragaman hayati dan budaya di Kebumen diakui di taraf nasional. Hal ini juga sebagai wujud komitmen Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Penetapan ini sangat strategis, sebagai lokomotif perekonomian Kabupaten Kebumen yang berbasiskan potensi lokal. Untuk itu perlu dukungan kebijakan anggaran untuk fokus pada pengembangan kawasan Geopark dari berbagai aspek.

Di wilayah utara, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan yang telah menjadi rujukan bagi para geolog yaitu Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Sementara di wilayah selatan, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan karst Gombong selatan dengan topografi pegunungan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Keindahan alam yang ada di kawasan karst ini sudah tidak perlu diragukan lagi, sehingga kawasan ini lekat dengan wisata alam goa, bukit, dan pantai.

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung memiliki 30 lokasi bentukan geologi (geodiversity) yang terdiri dari 28 situs batuan dan 2 situs mata air panas. Kawasan ini merupakan laboratorium alam dan monumen geologi karena menghadirkan variasi struktur dan jenis batuan di kawasan yang relatif tidak luas. Nilai ilmiahnya bertambah penting setelah lahir teori tektonik lempeng, karena menurut para ahli geologi daerah ini pernah menjadi batas lempeng konvergen berupa jalur subduksi pada Jaman Kapur yang berlanjut hingga Pegunungan Meratus, Kalimantan. Batuan-batuan hasil tumbukan tersebut kini terangkat ke permukaan dan dapat diamati dalam kondisi yang relatif segar. Oleh karena penting untuk terus melindungi batuan-batuan langka yang terdapat di Karangsambung dari kerusakan akibat aktivitas penambangan.

Sementara itu, Kawasan Bentang Alam Karst Gombong merupakan sebuah rangkaian pegunungan atau perbukitan karst yang berada di barat daya Kebumen yang mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ayah, Buayan, dan Rowokele. Kawasan ini memiliki luas 4.894 hektar dengan panjang perbukitan kapur 8 km dan lebar 3 km serta memiliki 182 gua, 2 telaga karst, sungai bawah tanah, ponor, air terjun, dan mata air.

Salah satu tujuan pokok membangun dan mengembangkan geopark adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut. Konsep geopark mengupayakan suatu perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari eksploitasi menjadi konservasi dengan diambil manfaatnya. Dengan terwujudnya Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbong penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka.

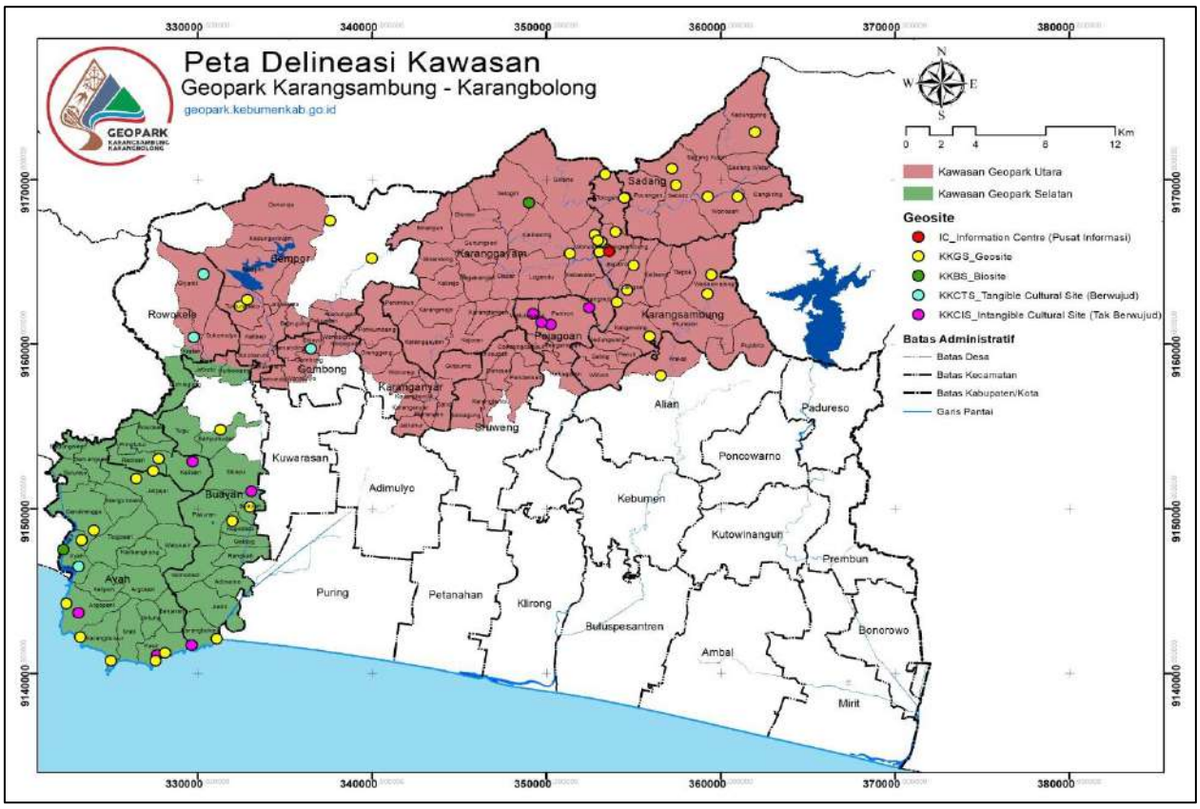

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.11
Peta Delineasi Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong

3) Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan Industri Kebumen (KIK) termasuk program prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang. KIK diproyeksikan sebagai pendukung Kawasan Super Prioritas Nasional Kawasan Industri Brebes, dengan visi: Kawasan Industri Kabupaten Kebumen sebagai Kawasan Industri Berbasis *Eco-Industrial Park* yang Didukung Unit Bisnis Strategis, Berkesinambungan dan Berwawasan Lingkungan. Lahan awal untuk pengembangan Kawasan Industri Kebumen berupa tanah yang telah dimiliki Pemkab seluas 105 hektar, dengan tutupan lahan pertanian lahan kering (tegalan) yang kurang produktif. Lahan berada dekat laut, sehingga memerlukan rencana mitigasi bencana, jalur evakuasi bencana, alat *early warning system*, tempat evakuasi bencana dan daerah penyangga hijau. Hal ini didukung oleh Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

KIK direncanakan didalam Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kebumen yang terdapat di Kecamatan Petanahan dan Klirong, dengan pertimbangan:

a. Terletak di Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa (jalur prioritas dengan fasilitas lengkap), sehingga memudahkan akses dan mobilitas barang dan jasa; dan
b. Tidak jauh dari pusat Kota Kebumen (15-20 km).

Diharapkan kawasan peruntukan industri ini mampu menarik investor sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menampung lebih banyak tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam rangka mewujudkan Kawasan Industri, Pemkab perlu membangun fasilitas infrastruktur dasar dan sarana penunjang, serta penguatan kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Industri melalui BUMD atau KPBU

atau skema kerjasama bisnis lainnya. Adanya KIK diharapkan dapat mendukung pertumbuhan Kawasan perdesaan yang ada di sekitarnya.

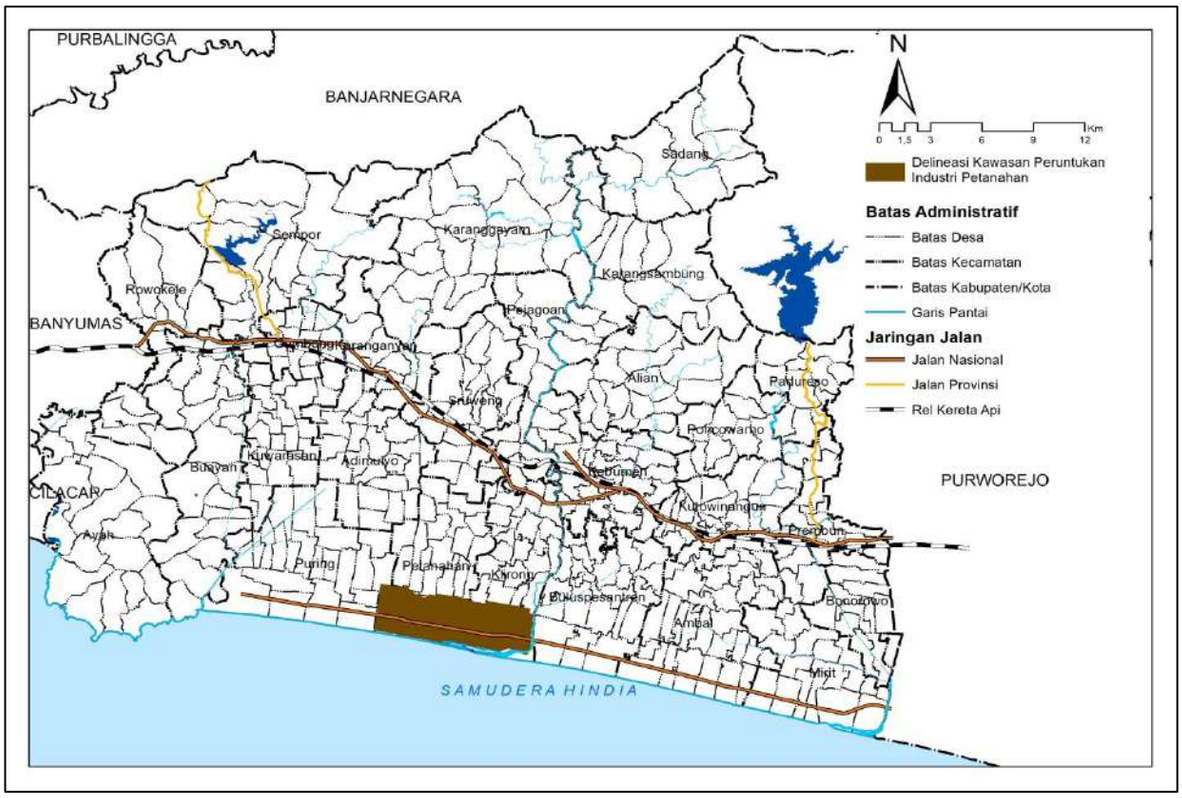

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.12
Peta Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Klirong



Sumber: BED KIK Kemenperin, 2018

Gambar 2.13
Foto Drone Eksisting Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Klirong

2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Kebumen menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi mengalami peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Tabel 2.10
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2020

No	Jenis Bencana	Jumlah kejadian	Kerusakan (Rp)	Kerugian (Rp)	Meninggal (orang)	Luka Berat (orang)	Luka Ringan (orang)	Pengungsi (orang)
TAHUN 2018								
1	Tanah Longsor	211	1.200.250.000	220.200.000	0	0	0	0
2	Gempa Bumi	1	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0
3	Banjir	53	32.100.000	26.100.000	0	0	0	0
4	Angin	248	299.390.000	173.987.500	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	57	1.819.600.000	212.400.000	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	64	0	0	0	0	0	0
8	Dropping air bersih (tangki)	1698	0	0	0	0	0	0
TAHUN 2019								
1	Tanah Longsor	96	1.430.440.000	0	0	0	0	0
2	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0
3	Banjir	2	0	4.626.200.000	0	0	0	3311
4	Angin	73	0	175.900.000	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	4	117.000.000	2.000.000	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	2391	0	0	0	0	0	0
8	Dropping air bersih (tangki)	2391	0	0	0	0	0	0
TAHUN 2020								
1	Tanah Longsor	144	4.686.850.000	3.890.125.000	0	1	0	114
2	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0
3	Banjir	37	2.569.200.000	3.100.750.000	0	0	0	2353
4	Angin	96	234.100.000	108.030.000	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	376	0	0	0	0	0	0
8	Dropping air bersih (tangki)	2360	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2021

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kebumen selama tahun 2018-2020 mengakibatkan kerugian. Pada musim hujan bencana yang sering terjadi adalah banjir di daerah cekungan dan tanah longsor di daerah pegunungan. Namun demikian jumlah titik kekeringan cukup tinggi pada saat musim kemarau. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan adalah dengan droping air bersih pada titik-titik kekeringan.

Tabel 2.11
Persebaran Rawan Bencana Kabupaten Kebumen

No	Rawan Bencana	Lokasi
1	Rawan Angin Ribut	Sebagian wilayah Kecamatan Ambal, Kebumen, Kutowinangun, Buluspesantren, Petanahan, Adimulyo, Pejagoan dan sebagian kecil Kecamatan Gombong.
2	Rawan Banjir	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Gombong, Karanganyar, Puring, Kuwarasan, Buayan, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno, dan Padureso
3	Rawan Gempa	Sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung, Alian, Sadang, Karanggayam, Sempor, dan Rowokele.
4	Rawan Kekeringan	Sebagian wilayah Kecamatan Padureso, Poncowarno, Alian, Pejagoan dan Karanggayam
5	Rawan Tsunami	Sebagian wilayah Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, dan Ayah.
6	Rawan Tanah Longsor	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karangsambung, Sadang, Padureso dan Poncowarno.

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2019

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Kebumen tersebar di daerah dataran rendah di wilayah selatan, dari Kecamatan Ayah sampai dengan Mirit. Sungai besar di Kebumen timur yang rawan banjir adalah Sungai Telomoyo di daerah Adimulyo, Kuwarasan dan Puring. Di daerah Kebumen tengah, sungai yang rawan banjir adalah Sungai Kedungbener yang melintasi Kecamatan Kebumen dan Buluspesantren. Adapun di daerah Kebumen timur sungai yang rawan banjir adalah Sungai Gentan di daerah Kecamatan Prembun, Mirit, dan Bonorowo.

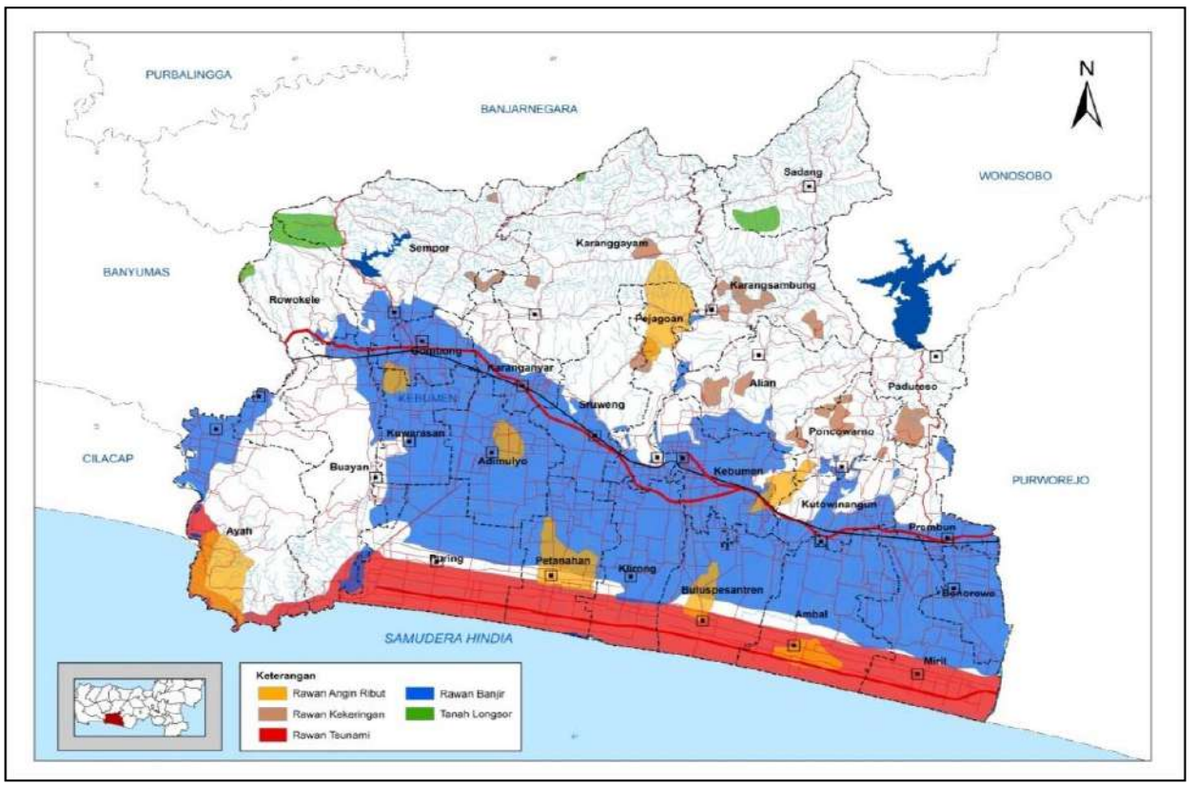

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019

Gambar 2.14
Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen

Kawasan rawan bencana angin ribut, tersebar di Sebagian wilayah Kecamatan Ambal, Kebumen, Kutowinangun, Buluspesantren, Petanahan, Adimulyo, Pejagoan dan sebagian kecil Kecamatan Gombong. Angin ribut dapat mengakibatkan pohon tumbang, gangguan lalu-lintas dan aktivitas nelayan. Kejadian angin ribut disertai ombak besar di pesisir pantai selatan pernah terjadi tahun 2017, 2018 dan 2019 berakibat rusaknya objek wisata pantai dan ditutupnya pelabuhan pendaratan nelayan.

Kawasan rawan bencana kekeringan tersebar merata terutama di daerah pegunungan. Kawasan rawan bencana longsor banyak terdapat di wilayah Kebumen utara terutama di daerah pegunungan dengan kemiringan tinggi, yaitu Sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karangsambung, Sadang, Padureso dan Poncowarno. Kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Kebumen membentang sepanjang pesisir pantai selatan, dengan jarak 3 km dari garis pantai. Antisipasi yang dilakukan salah satunya dengan pembangunan alat deteksi dini sepanjang pantai dan pembentukan Desa Tangguh Bencana tsunami.

Kekeringan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti iklim (pemanasan global), kerusakan lahan, tutupan vegetasi ataupun faktor perilaku manusia. Faktor iklim menjadi variabel yang sangat berpengaruh pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan semakin menurun. Hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi dan produktivitas pertanian. Adanya perubahan dan anomali iklim yang tidak menentu tentu saja akan memengaruhi turunnya produksi pertanian.

Tabel 2.12
Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Kabupaten Kebumen
Tahun 2020

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1	EWS Tsunami	17	titik
2	EWS Longsor	4	titik
3	EWS Banjir	3	titik
4	Detektor Gempa BMKG	1	Unit

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.13
Kinerja Penanganan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Dropping Air Bersih (tangki)	Evakuasi Bencana (kejadian)	Rehab Rekon Jalan/Jembatan Pasca Bencana	Rehab Tebing Sungai Pasca Bencana
1	2016	9	0	139	7 Paket	7 Paket
2	2017	4	1060	537	1 Paket	1 Paket
3	2018	8	1698	475	2 Paket	2 Paket
4	2019	24	2452	337	1 Paket	2 Paket
5	2020	10	34	744	1 Paket	5 Paket

Sumber : BPBD 2020

Kejadian bencana kekeringan paling banyak terjadi di tahun 2018 dan 2019, salah satunya ditangani dengan bantuan droping air bersih. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi bencana non alam pandemi covid-19. Hingga 31 Desember 2020, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kebumen tercatat 4.247 orang. Dari sejumlah kasus terkonfirmasi tersebut, dirawat 200, dirujuk 8, isolasi 427, meninggal dunia 141 dan sembuh 3463. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Satuan Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Kebumen diantaranya:

1) Melanjutkan penerapan kebijakan dan tata laksana penanganan Covid-19 Kabupaten Kebumen hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
2) Berbagai pendekatan sosialisasi ke masyarakat termasuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI dan Polri.
3) Menyusun berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dan menangani perkembangan kasus covid-19 di Kabupaten Kebumen.
4) Pelaksanaan bantuan masker, penyemprotan disenfektan, tes rapid massal, vaksin massal, pembangunan RS Darurat Kebumen, pembangunan laboratorium uji swab di Labkesda
5) Penerimaan dan penyaluran bantuan logistik dan sembako oleh tim satuan tugas dan organisasi kemasyarakatan.
6) Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam hal penerapan protokol pencegahan Covid-19 dilakukan Operasi Yustisi Penegakan Perbup No. 68 tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Kebumen. Personil terdiri dari unsur Satpol PP, TNI, Polri, Linmas.

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Indikator kunci Desa Tangguh Bencana yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Perkembangan pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

Tabel 2.14
Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Tema Desa Tangguh
1	2016	9	Banjir, tsunami, longsor
2	2017	4	Tsunami
3	2018	8	Tsunami, longsor, banjir
4	2019	24	Tsunami, longsor, banjir, air bersih
5	2020	10	Longsor, Banjir

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.15
Daftar Desa Tangguh Bencana Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Desa	Tahun Pembentukan Dan Sumber Dana		Tema Desa Tangguh Bencana
			APBD Kab.	APBD Prov.	
1	Kec. Sempor	Ds. Kenteng	0	2016	Longsor
2	Kec. Sempor	Ds. Sampang	0	2016	Longsor
3	Kec. Sempor	Ds. Donorojo	0	2016	Longsor
4	Kec. Ambal	Ds. Kaibon Petangkuran	2016	0	Tsunami

No	Kecamatan	Desa	Tahun Pembentukan Dan Sumber Dana		Tema Desa Tangguh Bencana
			APBD Kab.	APBD Prov.	
5	Kec. Mirit	Ds. Lembupurwo	2016	0	Tsunami
6	Kec. Bonorowo	Ds. Pujodadi	2016	0	Banjir
7	Kec. Adimulyo	Ds. Adimulyo	2016	0	Banjir
8	Kec. Karanggayam	Ds. Karanggayam	2016	0	Longsor
9	Kec. Sempor	Ds. Kenteng	2016	0	Longsor
10	Kec. Petanahan	Ds. Karangrejo	2017	0	Tsunami
11	Kec. Petanahan	Ds. Tegalretno	2017	0	Tsunami
12	Kec. Klirong	Ds. Jogosimo	2017	0	Tsunami
13	Kec. Ambal	Ds. Kenoyojayan	2017	0	Tsunami
14	Kec. Ayah	Ds. Karangduwur	2018	0	Tsunami
15	Kec. Ayah	Ds. Pasir	2018	0	Tsunami
16	Kec. Ambal	Ds. Entak	2018	0	Tsunami
17	Kec. Mirit	Ds. Tlogodepaok	2018	0	Tsunami
18	Kec. Poncowarno	Ds. Blater	2018	0	Longsor
19	Kec. Karanggayam	Ds. Kalirejo	2018	0	Longsor
20	Kec. Sadang	Ds. Seboro	2018	0	Longsor
21	Kec. Karangsambung	Ds. Karangsambung	2018	0	Banjir
22	Kec. Ayah	Ds. Argopeni	2019	0	Banjir
23	Kec. Ayah	Ds. Candirenggo	2019	0	Banjir
24	Kec. Buayan	Ds. Karangbolong	2019	0	Tsunami
25	Kec. Buayan	Ds. Jladri	2019	0	Tsunami
26	Kec. Puring	Ds. Surorejan	2019	0	Tsunami
27	Kec. Puring	Ds. Waluyorejo	2019	0	Tsunami
28	Kec. Puring	Ds. Sidoharjo	2019	0	Tsunami
29	Kec. Puring	Ds. Bumirejo	2019	0	Banjir
30	Kec. Puring	Ds. Tambakmulyo	2019	0	Tsunami
31	Kec. Buluspesantren	Ds. Ayam Putih	2019	0	Tsunami
32	Kec. Buluspesantren	Ds. Brecong	2019	0	Tsunami
33	Kec. Ambal	Ds. Sumberjati	2019	0	Tsunami
34	Kec. Ambal	Ds. Ambalresmi	2019	0	Tsunami
35	Kec. Mirit	Ds. Mirit	2019	0	Tsunami
36	Kec. Mirit	Ds. Mirit Petikusan	2019	0	Tsunami
37	Kec. Mirit	Ds. Wiromartan	2019	0	Tsunami
38	Kec. Pejagoan	Ds. Karangpoh	2019	0	Longsor
39	Kec. Sruweng	Ds. Sidoagung	2019	0	Banjir
40	Kec. Sadang	Ds. Kedunggong	2019	0	Longsor
41	Kec. Poncowarno	Ds. Soka	2019	0	Longsor
42	Kec. Padureso	Ds. Rahayu	2019	0	Longsor
43	Kec. Padureso	Ds. Merden	2019	0	Longsor
44	Kec. Alian	Ds. Wonokromo	2019	0	Longsor
45	Kec. Alian	Ds. Krakal	2019	0	Longsor
46	Kec. Ayah	Ds. Kedungweru	2020	0	Longsor
47	Kec. Ayah	Ds. Bulurejo	2020	0	Longsor
48	Kec. Buayan	Ds. Pakuran	2020	0	Longsor
49	Kec. Sruweng	Ds. Pakuran	2020	0	Longsor

No	Kecamatan	Desa	Tahun Pembentukan Dan Sumber Dana		Tema Desa Tangguh Bencana
			APBD Kab.	APBD Prov.	
50	Kec. Adimulyo	Ds. Sugihwaras	2020	0	Banjir
51	Kec. Rowokele	Ds. Rowokele	2020	0	Banjir
52	Kec. Karanganyar	Ds. Giripurno	2020	0	Longsor
53	Kec. Karanggayam	Ds. Kajoran	2020	0	Longsor
54	Kec. Karangsambung	Ds. Wadasmalang	2020	0	Longsor
55	Kec. Alian	Ds. Kalirancang	2020	0	Longsor

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2021

2.1.8 Kondisi Demografi

Keadaan kependudukan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Tren jumlah penduduk Kabupaten Kebumen setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

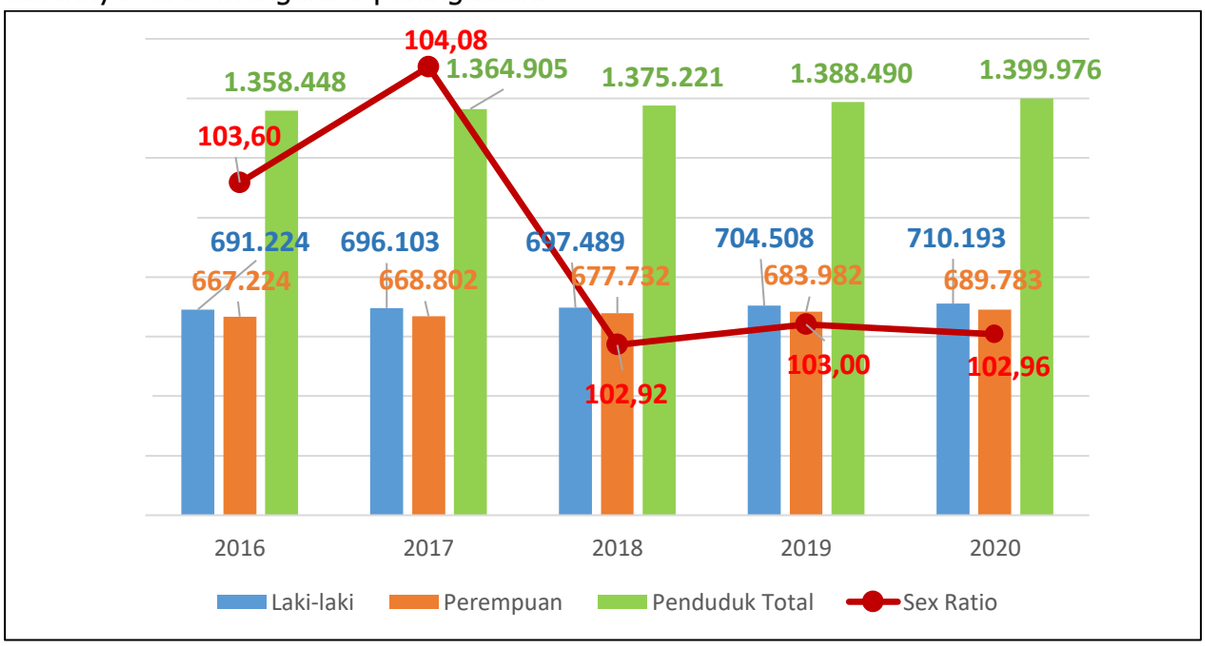

Sumber: Disdukcapil Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.15
Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio* Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Secara keseluruhan, jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2020, *sex ratio* sebesar 102,96 artinya komposisi penduduk perempuan 2,96% lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki (Gambar 2.16). Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.399.976 jiwa terdiri dari 710.193 penduduk laki-laki dan 689.783 perempuan.

Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 962.794 jiwa atau 68,77 persen, sedangkan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 437.182 jiwa atau 31,23 persen. Dari data tersebut maka rasio ketergantungannya adalah sebesar 45,41 persen. Angka ini menunjukan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45 orang yang tidak produktif.

Kabupaten Kebumen tidak mendapatkan peluang bonus demografi dikarenakan kondisi kependudukan di Kabupaten Kebumen memasuki *ageing population* dimaknai sebagai kondisi yang terjadi apabila proporsi penduduk usia tidak produktif disuatu daerah mengalami peningkatan secara progresif.

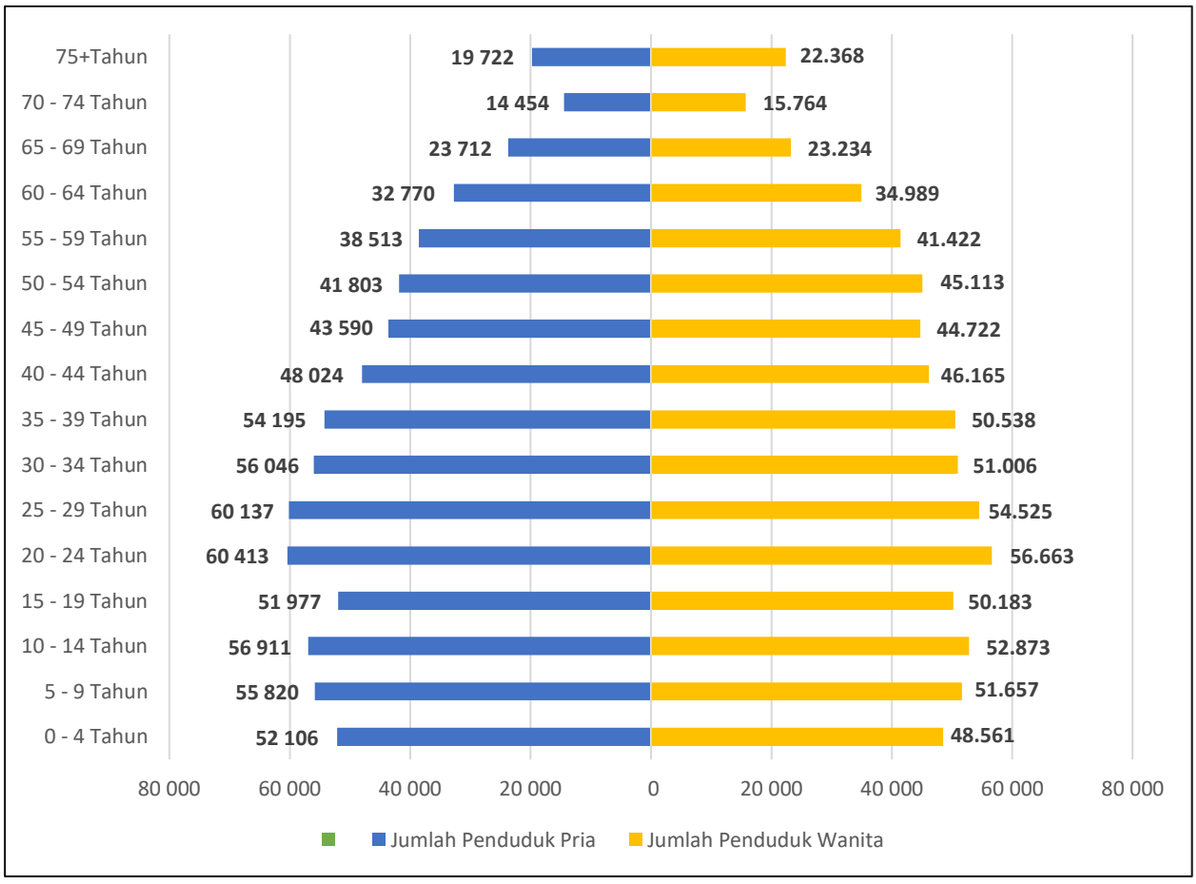

Sumber: Disdukcapil Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.16
Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Berdasarkan Usia Tahun 2020

Berdasarkan jenis pekerjaan utama, penduduk yang bekerja di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 didominasi oleh Buruh/karyawan/pegawai sebanyak 162.234 orang (sebesar 27,25%), diikuti oleh Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar sebanyak 141.473 orang (sebesar 23,76%). Dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, jenis pekerjaan yang digeluti penduduk Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif.

Tabel 2.16
Penduduk yang Bekerja (Usia 15 Tahun ke atas)

Status Pekerjaan Utama	2016	2017	2018	2019	2020
Berusaha sendiri	Na	105.406	112.773	112.181	116.005
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	Na	99.756	114.477	125.051	141.473
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh dibayar	Na	23.642	24.142	20.384	17.589
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	Na	170.281	140.823	146.613	162.234
Pekerja Bebas	Na	88.349	87.203	85.604	67.596
Bekerja keluarga tidak dibayar	Na	73.114	74.259	97.337	90.306
Jumlah	Na	560.548	553.677	587.170	595.203

Sumber : BPS, Data diolah, 2021

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020 didominasi oleh lulusan SD sebanyak 306.057 orang, diikuti oleh lulusan SMA sebanyak 168.522 orang. Dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, struktur pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Kebumen cenderung stagnan didominasi lulusan pendidikan dasar.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2020

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	2016	2017	2018	2019	2020
SD	217.203	204.232	271.858	440.585	306.057
SLTP	119.946	119.722	110.556	210.643	119.495
SLTA	133.647	137.286	124.806	204.914	168.522
Perguruan Tinggi	31.667	49.262	46.457	44.098	39.613
Jumlah	502.463	510.502	553.677	900.240	633.687

Sumber : BPS, Data diolah, 2021

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayah	63.158	62.763	64.079	65.016	66.015
2	Buayan	63.235	64.010	65.506	66.212	67.377
3	Puring	62.571	62.787	64.021	64.620	64.869
4	Petanahan	59.954	59.485	60.352	60.644	61.322
5	Klirong	63.472	62.753	64.369	64.967	65.152
6	Buluspesantren	57.361	57.659	58.971	59.444	60.356
7	Ambal	62.233	62.592	63.275	63.779	64.448
8	Mirit	51.322	52.506	53.455	54.236	54.599
9	Bonorowo	21.838	22.016	22.051	22.249	22.217
10	Prembun	28.876	28.961	29.210	29.368	29.530
11	Padureso	16.202	16.449	16.768	16.969	17.026
12	Kutowinangun	48.351	48.240	48.598	48.972	49.511
13	Alian	67.356	67.897	66.945	67.863	68.652
14	Poncowarno	18.409	18.424	18.428	18.668	18.991
15	Kebumen	131.277	132.118	132.556	134.083	134.132
16	Pejagoan	54.416	54.584	54.696	55.318	56.001
17	Sruweng	61.529	62.012	62.269	62.975	63.030
18	Adimulyo	37.748	37.636	38.036	38.277	38.503
19	Kuwarasan	50.268	50.330	51.154	51.700	52.197
20	Rowokele	51.232	51.677	51.890	52.297	52.669
21	Sempor	69.755	70.433	69.928	70.498	71.428
22	Gombong	50.993	50.881	51.071	51.332	50.676
23	Karanganyar	37.844	37.900	38.365	38.392	38.202
24	Karanggayam	59.375	60.246	59.402	60.072	60.901
25	Sadang	22.190	22.684	22.667	22.909	23.411
26	Karangsambung	47.483	47.862	47.159	47.630	48.761
Jumlah		1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.388.490	1.399.976

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Persebaran penduduk antar kecamatan tidak merata. Kecamatan Kebumen memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 134.132 jiwa pada tahun 2020. Kebumen sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan wilayah perkotaan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk tinggal di Kecamatan Kebumen. Konsentrasi penduduk yang tinggi juga terlihat di wilayah penyangga yaitu Pejagoan, Alian, dan Buluspesantren. Kemudian, pada daerah terluar Kabupaten Kebumen seperti Kecamatan Ayah dan Karanggayam.

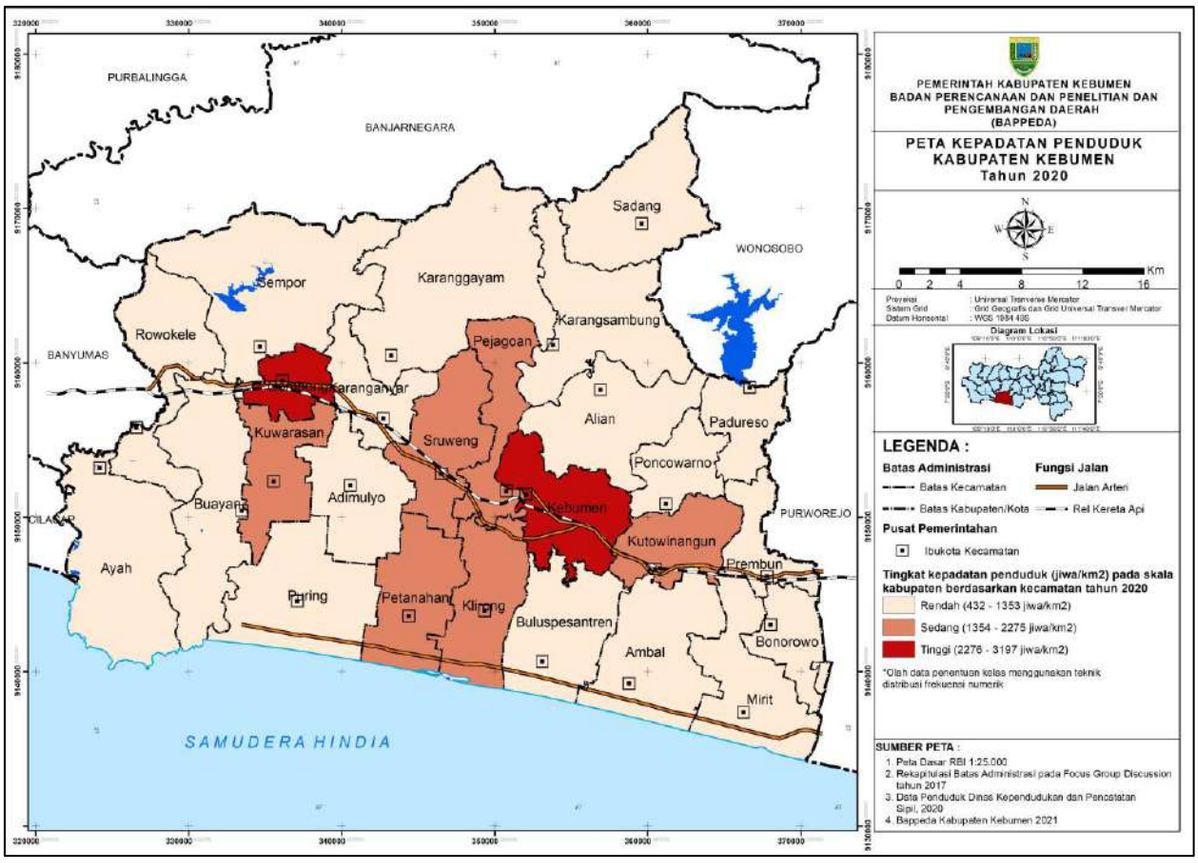

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2.17
Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Kebumen merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2020 berfluktuasi. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 1.399.976 jiwa sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 412.294 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 3 jiwa dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.082 jiwa/km². Wilayah dengan kondisi penduduk yang paling padat ditempati Kecamatan Kebumen dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 134.132 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 0,27% pertahun. Jumlah penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Padureso dengan jumlah penduduk 17.026 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,33%.

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan di suatu daerah. Arah kebijakan pembangunan manusia berorientasi pada penyiapan SDM unggul selaras dengan kebijakan nasional

menuju Indonesia Maju. SDM unggul yaitu SDM yang memiliki kompetensi, *soft skill*, dan berkarakter.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, aspek seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Secara nominal PDRB ADHB Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 terus meningkat dari Rp.22.434.987.760.000,- pada Tahun 2016 menjadi Rp.28.010.813.000.000,- pada Tahun 2020. Secara lengkap PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.19
PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)

No	Sektor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,328,488.90	5,595,423.24	5,891,457.93	5,954,901.58	6,102,633.94
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,135,529.24	1,223,063.59	1,299,758.75	1,362,202.83	1,424,906.39
3.	Industri Pengolahan	4,453,977.85	4,739,299.59	5,285,119.95	5,788,203.84	5,957,235.34
4.	Pengadaan Listrik, dan Gas	13,769.93	15,872.83	17,456.32	18,734.45	18,912.40
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,661.44	10,772.28	11,326.06	12,058.72	12,911.21
6.	Konstruksi	1,612,221.57	1,726,478.47	1,875,163.76	2,028,839.12	1,975,139.60
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	3,269,443.63	3,580,561.25	3,907,499.01	4,288,353.41	4,157,585.07
8.	Transportasi dan Pergudangan	889,227.92	972,646.80	1,058,888.39	1,161,122.50	925,584.84
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	455,263.63	500,588.88	980,915.89	606,538.07	570,542.17
10.	Informasi dan Komunikasi	376,301.51	454,160.94	532,807.14	623,994.52	714,059.50
11.	Jasa Keuangan, dan Asuransi	655,486.71	718,870.26	755,284.17	788,299.40	806,819.75
12.	Real Estate	282,312.60	300,676.45	313,946.81	340,990.76	341,523.26
13.	Jasa Perusahaan	72.871.22	84,209.95	93,706.67	106,050.99	100,255.97
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	782,467.62	826,667.23	856,928.86	904,304.56	905,062.04
15.	Jasa Pendidikan	2,115,856.39	2,360,950.69	2,625,309.06	2,907,297.36	2,918,317.40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	247,638.35	273,746.74	305,072.16	340,268.68	387,883.94
17.	Jasa Lainnya	528,114.51	595,418.86	659,761.94	736,268.86	691,440.18
	PDRB	22,434,987.76	24,068,998.49	26,037,016.66	27,967,929.65	28,010,813.00

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Selanjutnya secara lebih detail akan diuraikan lebih lanjut mengenai struktur perekonomian Kabupaten Kebumen beserta perkembangannya.

1) Struktur Ekonomi

Dari sisi peranan sektoral pada PDRB, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun sebagaimana tren perekonomian secara umum, terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier. Pergeseran ini dapat dilihat dari peranan sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor ekonomi primer yang terus menurun dimana pada Tahun 2016 berkontribusi sebesar 24,67% terhadap PDRB menjadi sebesar 21,79% pada Tahun 2020. Sementara itu, sektor industri pengolahan sebagai sektor ekonomi sekunder terus meningkat peranannya terhadap PDRB dari 19,85% pada Tahun 2016 menjadi 21,27% pada Tahun 2020. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi tersier juga terus mengalami peningkatan peranannya terhadap PDRB dari 14,57% pada Tahun 2016 menjadi 15,33% pada Tahun 2019 sedangkan pada Tahun 2020 sempat menurun menjadi 14,84% sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19 dimana terjadi banyak pembatasan aktivitas ekonomi maupun sosial. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran adalah 3 sektor yang memiliki peranan sektoral terbesar bagi PDRB Kabupaten Kebumen. Secara lengkap peranan sektoral dalam PDRB ADHB Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Peranan Sektoral dalam PDRB Kabupaten Kebumen
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

No	Sektor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,67%	23,25%	22,63%	21,29%	21,79%
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,06%	5,08%	4,99%	4,87%	5,09%
3.	Industri Pengolahan	19,85%	20,06%	20,30%	20,70%	21,27%
4.	Pengadaan Listrik, dan Gas	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
6.	Konstruksi	7,19%	7,17%	7,20%	7,25%	7,05%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	14,57%	14,48%	15,01%	15,33%	14,84%
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,96%	4,04%	4,07%	4,15%	3,30%
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,03%	2,08%	3,77%	2,17%	2,04%
10.	Informasi dan Komunikasi	1,68%	1,89%	2,05%	2,23%	2,55%
11.	Jasa Keuangan, dan Asuransi	2,92%	2,99%	2,90%	2,82%	2,88%
12.	Real Estate	1,26%	1,25%	1,21%	1,22%	1,22%
13.	Jasa Perusahaan	0,32%	0,35%	0,36%	0,38%	0,36%
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,38%	3,29%	3,19%	3,14%	3,23%
15.	Jasa Pendidikan	9,43%	9,81%	10,08%	10,40%	10,42%
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10%	1,14%	1,17%	1,22%	1,38%
17.	Jasa Lainnya	2,58%	2,72%	2,82%	2,96%	2,78%
	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Untuk melihat struktur ekonomi Kabupaten Kebumen secara empirik telah dilakukan kajian analisis input-output pada Tahun 2018. Analisis ini dilakukan untuk melihat keterkaitan antara sektor produksi hilir terhadap sektor produksi hulunya dan sebaliknya. Analisis keterkaitan terbagi menjadi dua yaitu, keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan, baik langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan ke belakang

merupakan keterkaitan sektor produksi hilir terhadap sektor produksi hulunya, sedangkan keterkaitan ke depan menunjukkan keterkaitan sektor produksi hulu terhadap sektor produksi hilirnya. Nilai keterkaitan ke belakang menjelaskan seberapa besar nilai input yang dibutuhkan suatu sektor untuk setiap unit kenaikan permintaan total, baik dari sektor lain maupun sektor itu sendiri. Sedangkan nilai keterkaitan ke depan menjelaskan jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar satu satuan, maka output suatu sektor yang dialokasikan ke sektor tersebut dan juga sektor-sektor lainnya akan meningkatkan sebesar nilai keterkaitannya.

Nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung dari keterkaitan ke belakang menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor primer memiliki nilai *backward linkages* tertinggi yaitu sebesar 3,14. Angka ini menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada permintaan akhir sebesar Rp.1 juta, maka sektor pertambangan dan penggalian akan meningkatkan permintaan input sebesar Rp.3,14 juta. Walaupun demikian terdapat 4 sektor sekunder yaitu industri pengolahan padi, kopi bubuk dan penggilingan kopi, aneka kerajinan, listrik dan gas serta 2 sektor tersier yaitu transportasi dan pergudangan serta jasa kesehatan swasta yang memiliki nilai *backward linkages* lebih dari 3 hal ini menunjukkan bahwa sektor sekunder dan tersier semakin memiliki peranan atau pengaruh yang lebih besar di perekonomian daerah dibandingkan sektor tersier.

Tabel 2.21
Nilai Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung dari Keterkaitan Ke Belakang (*Backward Linkages*)

Kode	Sektor	Langsung	Tidak Langsung	Nilai
1	Padi	0.81	1.56	2.37
2	Jagung	0.87	1.60	2.47
3	Ubi Kayu dan Umbi Lainnya	0.83	1.56	2.38
4	Bawang	0.78	1.71	2.49
5	Cabe	0.68	1.48	2.16
6	Sayur Lainnya	0.81	1.56	2.37
7	Pisang	0.89	1.61	2.50
8	Buah-Buahan Lainnya	0.46	1.31	1.77
9	Kopi Robusta	0.78	1.55	2.33
10	Kopi Arabica	0.85	1.63	2.48
11	Tembakau	0.78	1.55	2.33
12	Ikan dan Benihnya	0.15	1.07	1.22
13	Sapi dan Hasil-Hasilnya	0.68	1.51	2.18
14	Domba, Kambing dan Hasil-Hasilnya	0.70	1.48	2.18
15	Unggas, Telur dan Hasil Ternak Lainnya	0.52	1.40	1.92
16	Hasil Perkebunan dan Pertanian Lainnya	0.50	1.55	2.05
17	Pertambangan dan Penggalian	0.96	2.18	3.14
18	Industri Pengolahan Padi	0.93	2.14	3.06
19	Roti dan Kue Kering Sejenisnya	0.90	2.06	2.95
20	Kopi Bubuk dan Penggilingan Kopi	0.95	2.15	3.10
21	Tahu, Tempe dan Olahan Kedelai Lainnya	0.84	2.03	2.88
22	Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	0.75	1.91	2.67
23	Industri Pengolahan Kayu	0.68	1.81	2.49

Kode	Sektor	Langsung	Tidak Langsung	Nilai
24	Aneka Kerajinan	0.94	2.14	3.08
25	Aneka Industri	0.29	1.35	1.64
26	Industri Makanan Olahan dan Minuman Lainnya	0.76	1.84	2.59
27	Batu bata, Genting, Gerabah dan Tanah Liat Lainnya	0.88	1.99	2.87
28	Listrik dan Gas	0.95	2.11	3.06
29	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.92	2.05	2.98
30	Konstruksi	0.85	2.03	2.88
31	PB, PE, Reparasi Mobil dan Motor	0.91	2.08	2.99
32	Transportasi dan Pergudangan	0.94	2.08	3.02
33	Penyediaan Jasa Akomodasi	0.51	1.62	2.13
34	Restauran/Jasa Makan Minum	0.49	1.58	2.07
35	Informasi dan Komunikasi	0.90	1.97	2.88
36	Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya	0.31	1.35	1.66
37	Real Estate	0.36	1.44	1.80
38	Jasa Perusahaan	0.34	1.46	1.80
39	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos Wajib	0.25	1.24	1.48
40	Jasa Pendidikan Swasta	0.54	1.63	2.17
41	Jasa Kesehatan Swasta	0.95	2.15	3.09
42	Jasa Lainnya	0.88	2.07	2.95
43	Kegiatan yang Tidak Jelas Batasannya	0.87	2.27	3.14

Sumber: Tabel Input-Output Kabupaten Kebumen 2018, diolah

Sedangkan nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung dari keterkaitan ke depan menunjukkan bahwa sektor penyediaan jasa akomodasi sebagai sektor tersier memiliki nilai *forward linkages* tertinggi yaitu 25,80 yang berarti apabila terjadi peningkatan pada permintaan akhir sebesar Rp.1 juta, maka sektor penyediaan jasa akomodasi akan meningkatkan output sebesar Rp.25,8 juta. Selain sektor penyediaan jasa akomodasi, sektor tersier lainnya juga memiliki nilai *forward linkages* tertinggi berikutnya yaitu sektor konstruksi, restauran/jasa makan minum, serta perbankan dan jasa keuangan lainnya dengan nilai masing-masing lebih dari 4. Hal ini menunjukkan sektor tersier semakin memberikan peranan/pengaruh yang lebih kuat terhadap perekonomian daerah Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.22
Nilai Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung dari Keterkaitan Ke Depan (*Forward Linkages*)

Kode	Sektor	Langsung	Tidak Langsung	Nilai
1	Padi	0.05	1.02	1.07
2	Jagung	0.04	1.02	1.06
3	Ubi Kayu dan Umbi Lainnya	0.01	1.01	1.02
4	Bawang	0.30	1.19	1.49
5	Cabe	0.07	1.03	1.10
6	Sayur Lainnya	0.04	1.01	1.05

Kode	Sektor	Langsung	Tidak Langsung	Nilai
7	Pisang	0.02	1.01	1.03
8	Buah-Buahan Lainnya	0.11	1.03	1.14
9	Kopi Robusta	0.05	1.02	1.07
10	Kopi Arabica	0.10	1.04	1.14
11	Tembakau	0.06	1.03	1.09
12	Ikan dan Benihnya	0.17	0.94	1.11
13	Sapi dan Hasil-Hasilnya	0.14	1.05	1.18
14	Domba, Kambing dan Hasil-Hasilnya	0.05	1.01	1.06
15	Unggas, Telur dan Hasil Ternak Lainnya	0.28	1.10	1.37
16	Hasil Perkebunan dan Pertanian Lainnya	0.10	0.97	1.06
17	Pertambangan dan Penggalian	0.24	2.26	2.49
18	Industri Pengolahan Padi	0.07	1.01	1.08
19	Roti dan Kue Kering Sejenisnya	0.02	1.09	1.11
20	Kopi Bubuk dan Penggilingan Kopi	0.05	1.00	1.05
21	Tahu, Tempe dan Olahan Kedelai Lainnya	0.06	1.01	1.08
22	Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	0.04	1.03	1.07
23	Industri Pengolahan Kayu	0.35	1.19	1.54
24	Aneka Kerajinan	0.05	1.17	1.22
25	Aneka Industri	1.91	2.03	3.94
26	Industri Makanan Olahan dan Minuman Lainnya	0.03	1.07	1.10
27	Batu bata, Genting, Gerabah dan Tanah Liat Lainnya	0.16	1.14	1.30
28	Listrik dan Gas	0.25	1.39	1.64
29	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.46	1.96	2.42
30	Konstruksi	1.90	4.80	6.69
31	PB, PE, Reparasi Mobil dan Motor	0.08	1.35	1.43
32	Transportasi dan Pergudangan	0.14	1.19	1.33
33	Penyediaan Jasa Akomodasi	10.54	15.26	25.80
34	Restauran/Jasa Makan Minum	1.07	3.81	4.88
35	Informasi dan Komunikasi	0.16	1.46	1.63
36	Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya	11.13	-6.57	4.56
37	Real Estate	0.00	1.00	1.00
38	Jasa Perusahaan	0.32	1.99	2.31
39	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	0.06	1.00	1.07
40	Jasa Pendidikan Swasta	0.02	1.00	1.02
41	Jasa Kesehatan Swasta	0.02	1.00	1.02
42	Jasa Lainnya	0.14	1.59	1.73
43	Kegiatan yang Tidak Jelas Batasannya	0.05	1.00	1.06

Sumber: Tabel Input-Output Kabupaten Kebumen 2018, diolah

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi riil keberhasilan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Secara umum selama periode Tahun 2016-2020 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen mengalami tren peningkatan selama periode Tahun 2016-2019 dari 5,01% pada Tahun 2016 menjadi 5,52% pada Tahun 2019. Namun pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,46%. Kondisi perekonomian yang meningkat pada periode 2016-2019 dan mengalami kontraksi pada 2020 ini juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pandemi *Covid-19* ke depan akan menjadi tantangan utama sekaligus peluang dalam upaya pemulihan ekonomi lokal, regional maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

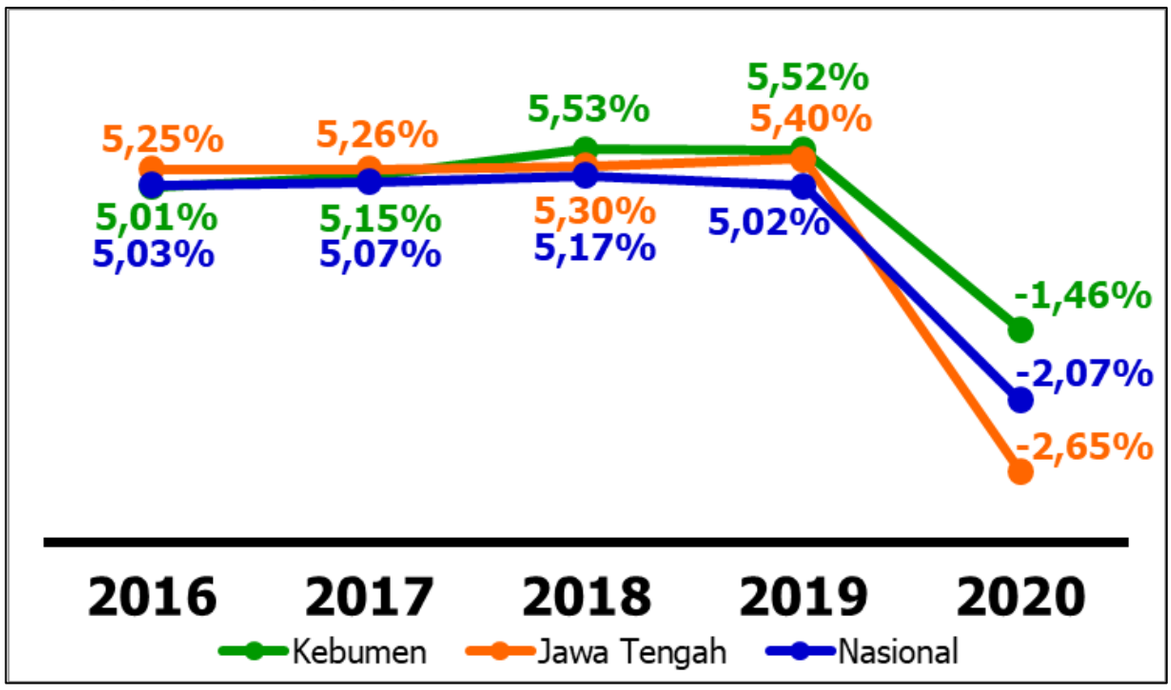

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.18
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

3) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah yang menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin tingginya pendapatan per kapita suatu daerah menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat. Pendapatan per kapita diperoleh dari nilai agregat PDRB dibagi jumlah penduduk sehingga capaiannya sangat dipengaruhi oleh dua variabel tersebut. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar minimal dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk sebagai faktor pembagi. Tren pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen mengikuti tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2016-2019 dan menurun di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Tren pendapatan per kapita tersebut juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pada tahun 2020 pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 11,98

juta rupiah atau hanya 45,31% dari pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional, pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen lebih rendah sebesar 25,31 juta rupiah atau hanya 36,36% dari pendapatan per kapita nasional. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

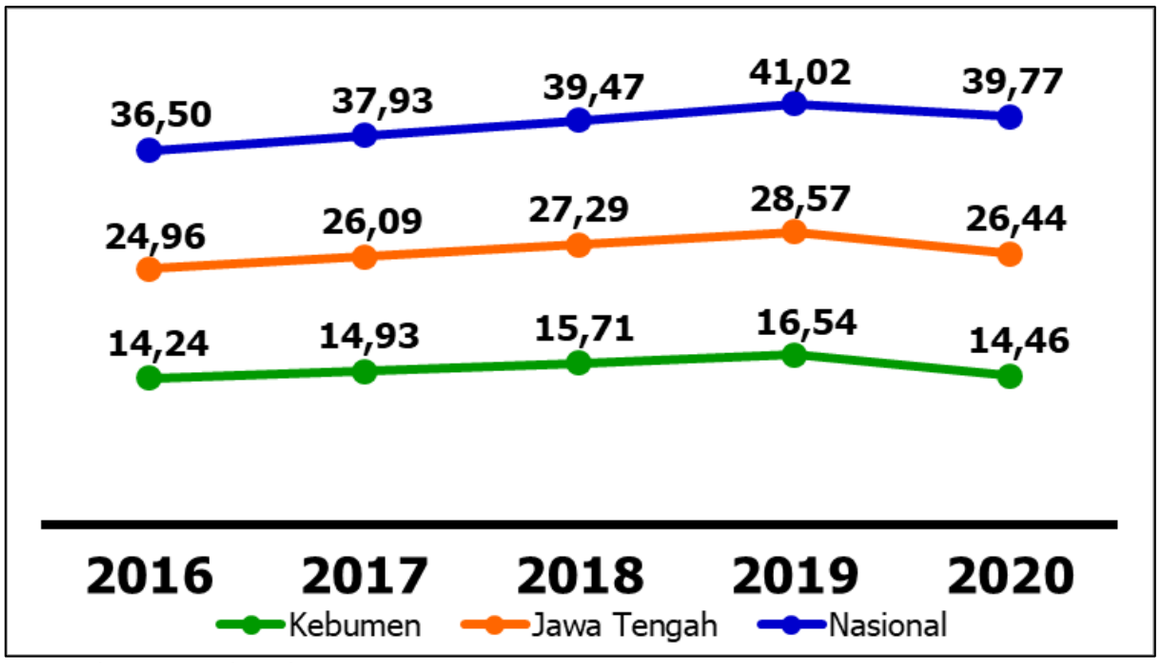

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.19
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

4) Inflasi

Inflasi adalah pergerakan tingkat harga secara umum yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas rantai distribusi, logistik dan transportasi di Kabupaten Kebumen yang diharapkan harga barang dan jasa yang diperoleh oleh konsumen akan sesuai dengan kemampuan daya belinya. Fluktuasinya inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019 terlihat memiliki tren pergerakan yang sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Untuk tahun 2020, BPS tidak menghitung lagi inflasi di setiap kabupaten/kota sehingga inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dihitung menggunakan PDRB deflator Tahun 2020

Tren inflasi Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2020 sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, dengan nilai tertinggi pada tahun 2017 yang diikuti penurunan sampai tahun 2019. Nilai inflasi Kabupaten Kebumen semakin menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 1,43 karena penurunan permintaan akibat pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas perekonomian masyarakat. Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 secara lebih lengkap disajikan pada gambar berikut.

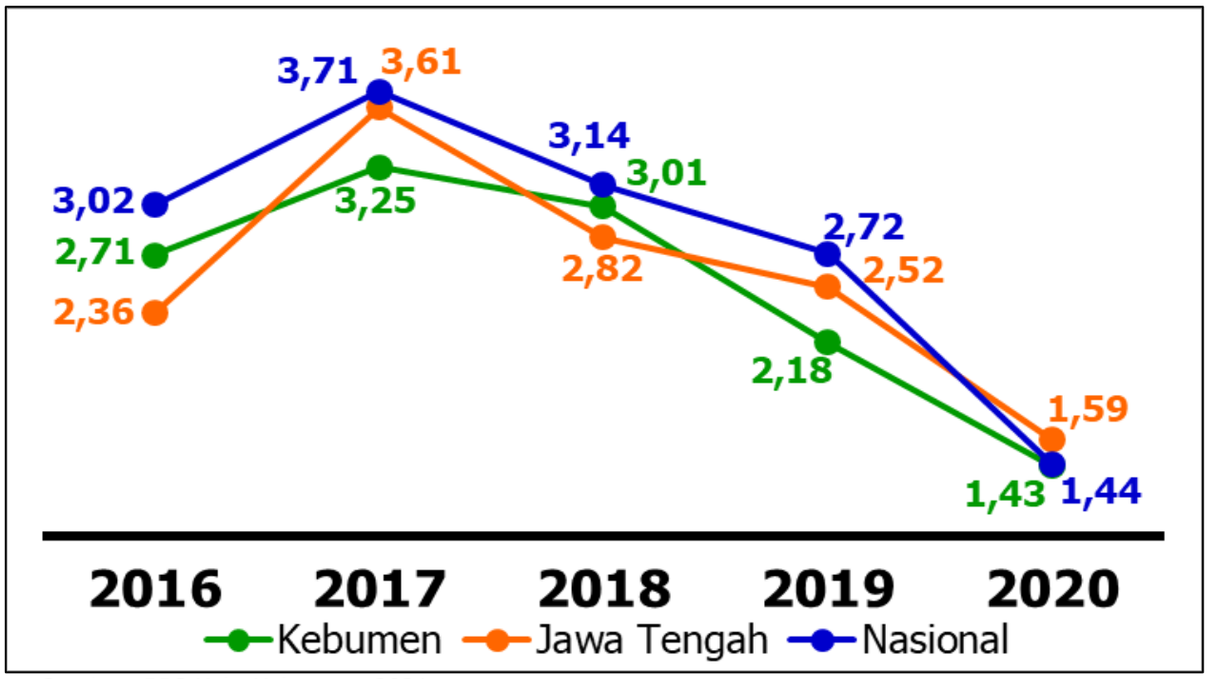

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021
Keterangan: Inflasi Kab. Kebumen 2020 dihitung menggunakan perhitungan PDRB deflator 2020

Gambar 2.20
Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,
dan Nasional Tahun 2016-2020

5) Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan digunakan untuk mengukur pemerataan pendapatan antar individu penduduk. Ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan yaitu 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) BPS menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah

Dari data yang diperoleh dari BPS sebagai hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2016-2020 menunjukkan distribusi pengeluaran untuk 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2016-2020 relatif bergerak secara fluktuatif namun demikian setiap tahun angkanya selalu lebih tinggi jika dibandingkan Jawa Tengah. Sesuai dengan kriteria Bank Dunia menunjukkan 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Kebumen telah memiliki proporsi pendapatan selalu di atas 17% yang menunjukkan Kabupaten Kebumen memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Selengkapnya distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia untuk 40% penduduk dengan pendapatan terendah

Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut.

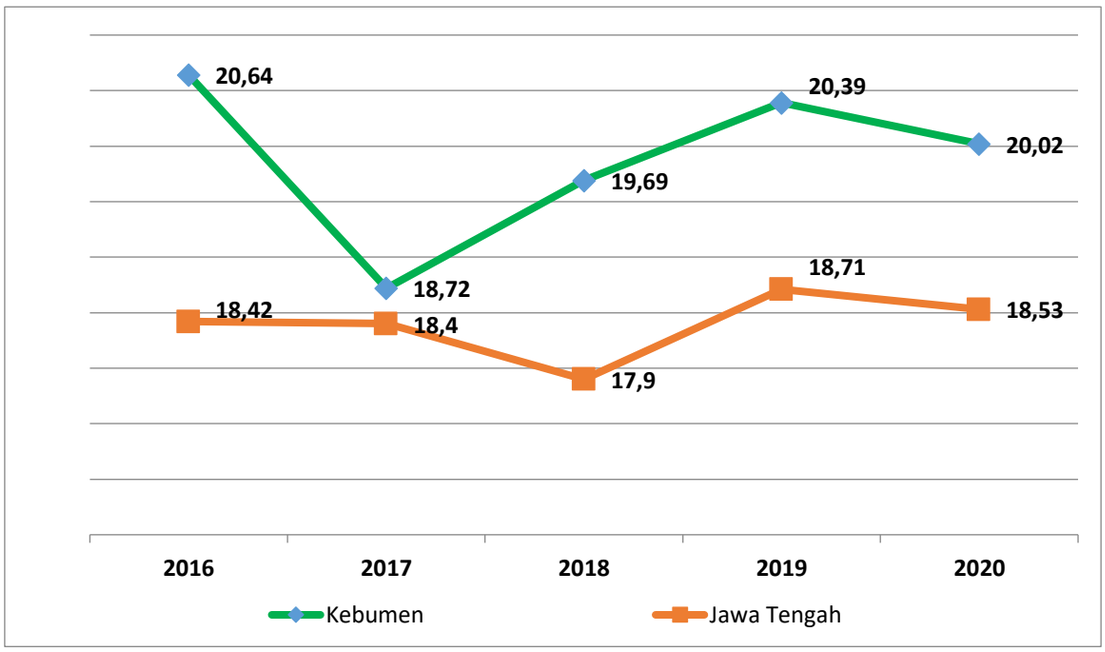

Sumber: BPS Kab. Kebumen, data diolah, 2021

Gambar 2.21
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk 40% penduduk dengan pendapatan terendah Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada ketersediaan dan penggalian potensi sumberdaya alam, tetapi juga sumberdaya manusia sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan daerah. Kualitas sumberdaya manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun atas tiga komposit utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. Pembangunan manusia dinilai berhasil jika penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu mencukupi standar hidup yang layak.

Berdasarkan kinerja IPM Kabupaten Kebumen 2016-2020, pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen terus mengalami perbaikan. IPM Kabupaten Kebumen meningkat sebesar 2,4 poin dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari 67,41 pada Tahun 2016 menjadi 69,81 pada Tahun 2020. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semakin membaik. Namun demikian berdasarkan skala internasional dari *United Nations Development Program* (UNDP), IPM Kabupaten Kebumen masih berada pada level sedang yaitu antara 60 sampai dengan 70. Jika dibandingkan dengan Nilai IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2016-2020 menunjukkan nilai IPM Kebumen masih cukup tertinggal. IPM Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

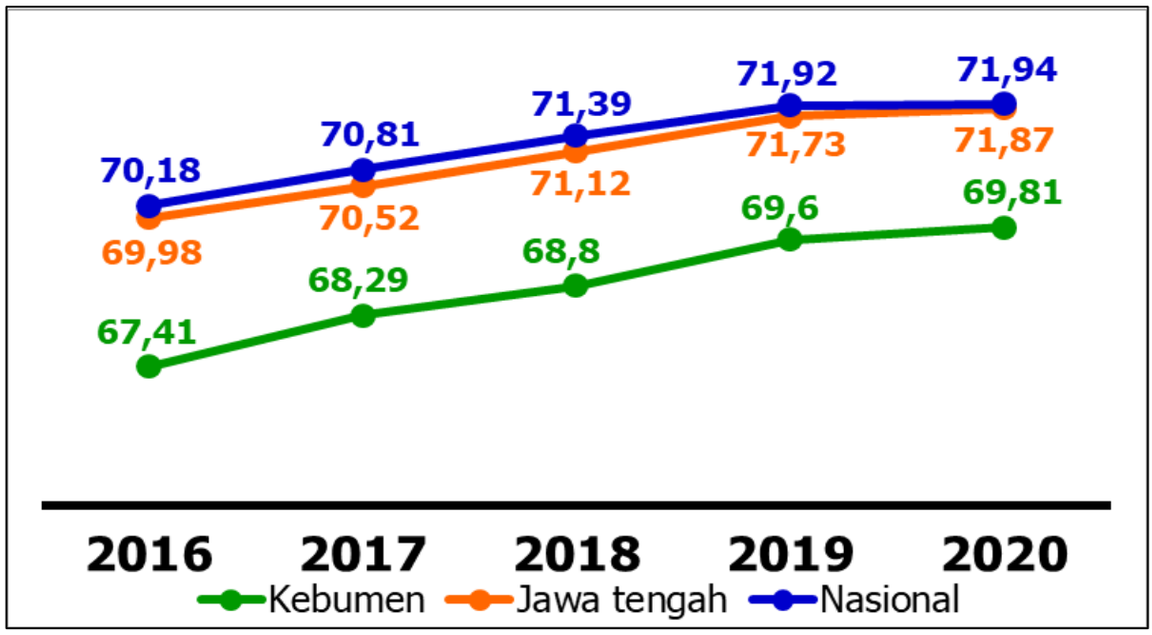

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.22
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, nilai IPM Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 berada di peringkat ke-25. Selengkapnya posisi IPM Kabupaten Kebumen dibandingkan seluruh kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah tersaji pada gambar berikut.

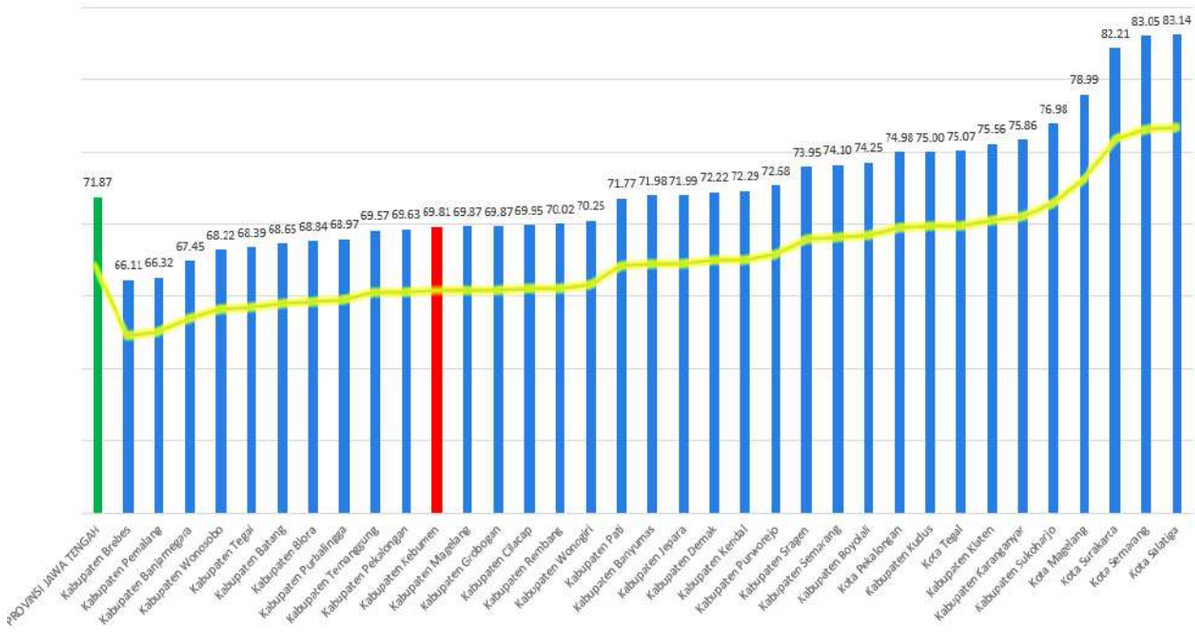

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.23
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga, IPM Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 cenderung berada di bawah Kabupaten Purworejo dan Kota Magelang. Selengkapnya posisi IPM Kabupaten Kebumen dibandingkan kabupaten/kota sekitar tersaji pada gambar berikut.

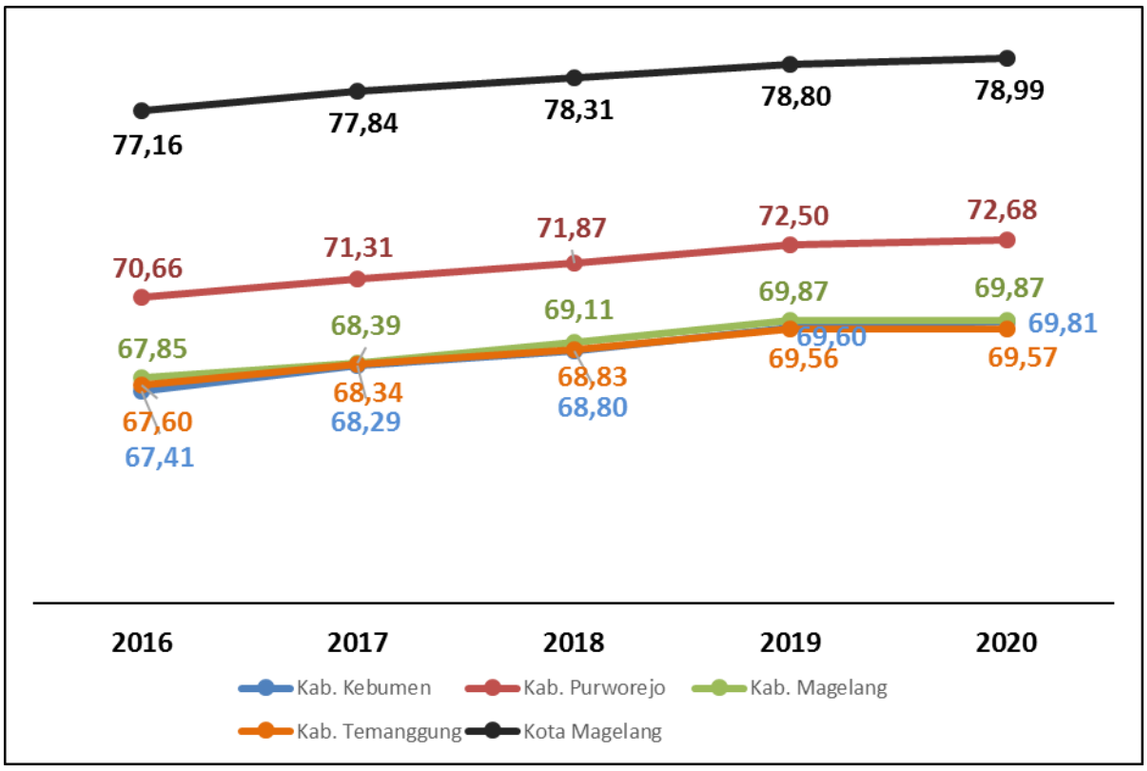

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.24
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2016-2020

IPM Kabupaten Kebumen diharapkan terus meningkat yang menunjukkan bahwa masyarakat mampu memenuhi kondisi peluang hidup yang panjang dan sehat, memiliki pengetahuan yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang baik, dan memiliki ketrampilan sehingga peluang bekerjanya tinggi untuk mendapatkan penghasilan untuk memiliki daya beli dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Secara rinci, komponen pembentuk IPM akan dijelaskan sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur Harapan Hidup merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Umur Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah 73,40 tahun, rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,18% per tahun. Hal ini mengindikasikan jika kualitas hidup masyarakat dari sisi derajat kesehatan semakin baik, meskipun jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, AHH Kabupaten Kebumen masih lebih rendah, dimana AHH Jawa Tengah adalah sebesar 74,37 tahun. Sedangkan jika disandingkan dengan nasional, AHH Kabupaten Kebumen lebih tinggi, dimana AHH Nasional hanya sebesar 71,47 tahun. Perbandingan lengkap AHH Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2016-2020 tersaji dalam gambar berikut.

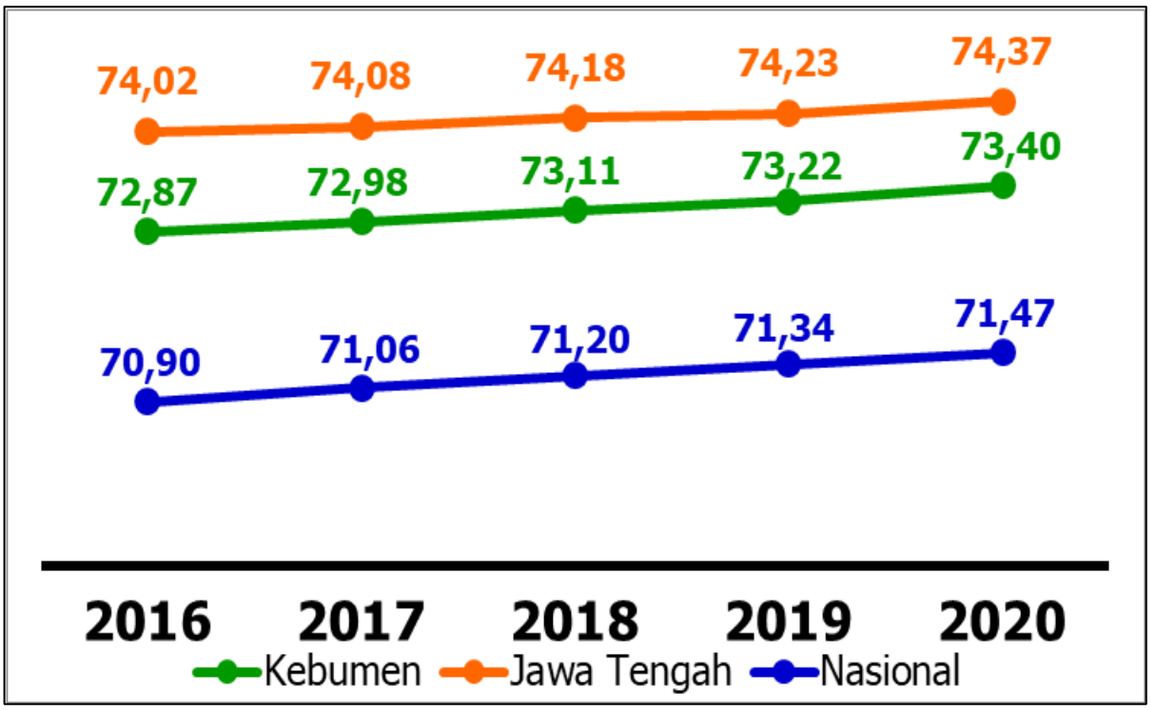

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.25
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Di sisi yang lain, semakin besar Angka Harapan Hidup suatu daerah berarti memiliki peluang jumlah penduduk lanjut usia semakin tinggi, hal ini selaras dengan struktur penduduk Kebumen yang memasuki *ageing population* yang ditandai dengan proporsi penduduk usia tua di atas 7 persen dari total penduduk Kabupaten Kebumen. Pemerintah harus menyikapi kondisi ini dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemanfaatan penduduk lanjut usia yang potensial agar tetap produktif, karena kesehatan penduduk akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Angka Harapan Hidup didukung dengan ketersediaan tenaga medis dan sarana kesehatan yang ada pada layanan kesehatan dasar maupun rujukan, dan aksesibilitas pada layanan kesehatan. Selain itu upaya preventif promotif menjadi penting mengingat meningkatnya kasus penyakit degeneratif yang disebabkan oleh pola hidup masyarakat seperti rendahnya kesadaran berolahraga, kebiasaan merokok, dan pola hidup tidak sehat yang dapat menyebabkan meningkatnya penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, stroke, jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya. Pentingnya promosi Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), serta penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup untuk mendukung penyiapan SDM yang berkualitas.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Cakupan dalam menghitung Harapan Lama Sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah menggambarkan keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 13,34 tahun. Kinerja peningkatan HLS di Kabupaten Kebumen mengindikasikan kondisi pembangunan sistem pendidikan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak di Kabupaten Kebumen selama 13,34 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari HLS di

Jawa Tengah maupun nasional. Kinerja HLS tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana HLS Kebumen sempat lebih rendah dibanding Nasional. Perkembangan HLS menjadi indikasi positif dalam sektor pendidikan, sebab semakin lama seseorang mengenyam sekolah, artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilaluinya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

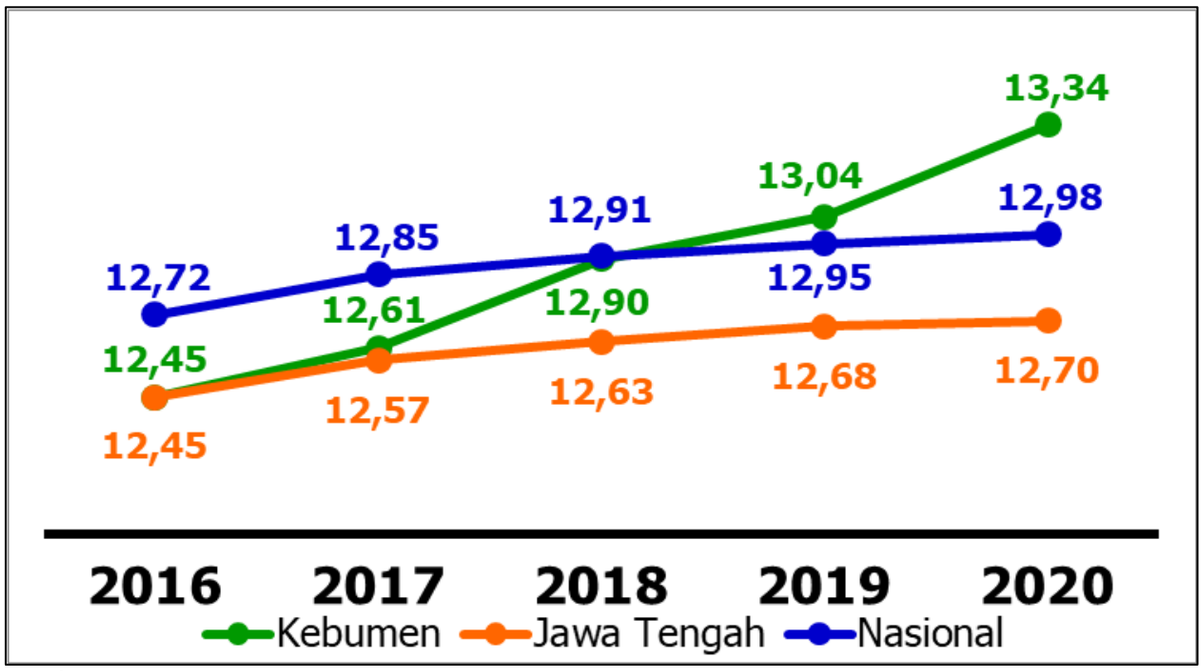

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.26
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (**RLS**)/ *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan indikator *output* pembangunan jangka panjang. RLS Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 7,54 tahun. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan RLS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, masih lebih rendah dimana RLS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mencapai angka masing-masing 7,69 tahun dan 8,48 tahun. Artinya penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,54 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP).

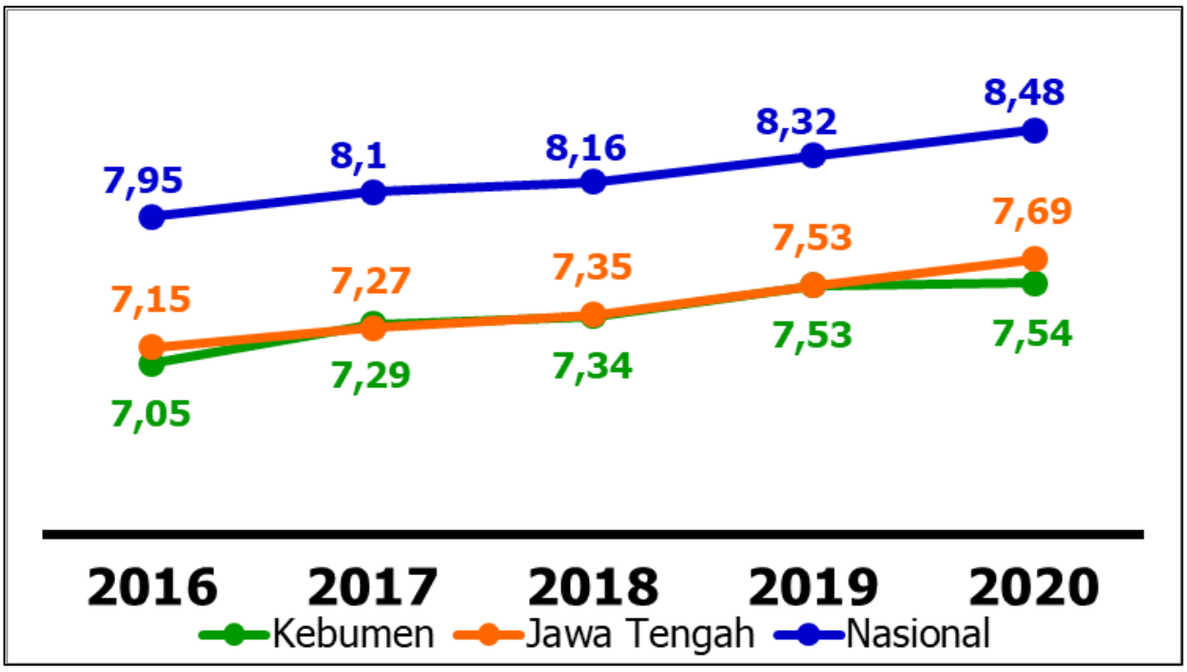

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.27
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumberdaya manusia berkualitas di suatu wilayah. Kedua indikator ini dikomposisikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM. Dari dua komponen pembetuk IPM dari sektor pendidikan menunjukkan tren positif peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen.

Pengeluaran Per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pada aspek standar hidup layak, pengeluaran perkapita Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah 8,90 juta rupiah atau turun sebesar Rp 170.000,- dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan tersebut mengikuti penurunan pendapatan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Jika dibandingkan dengan pengeluaran perkapita Jawa Tengah dan Nasional, angka tersebut masih sangat rendah karena pengeluaran perkapita Jawa Tengah telah mencapai angka 10,93 juta rupiah dan Nasional sebesar 11,01 juta rupiah.

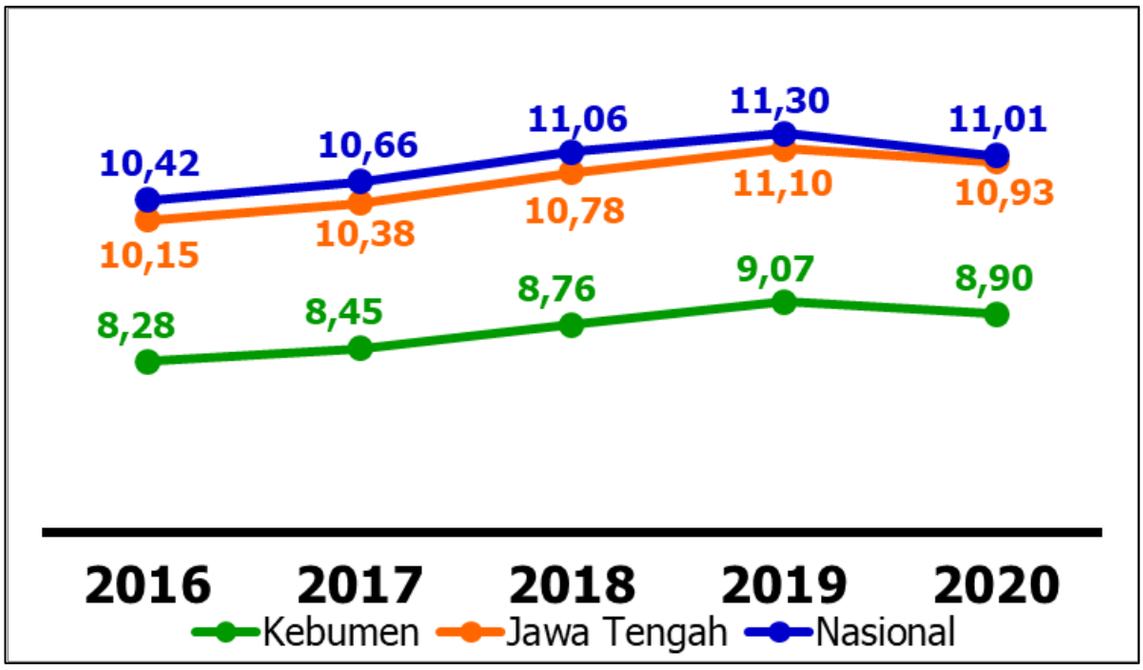

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.28
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

Dilihat dari 4 (empat) komponen/indikator pembentuk IPM di atas, Kabupaten Kebumen masih harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan IPM agar dapat setara dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah maupun Nasional, terutama dalam meningkatkan pengeluaran per kapita. Secara rinci capaian komponen Pembentuk IPM di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.23
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 beserta Rata-Rata Pertumbuhannya

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
1	Angka Harapan Hidup	72,87	72,98	73,11	73,22	73,40	0,73
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,61	12,90	12,91	13,04	13,34	1,33
3	Rata-Rata Lama Sekolah	7,05	7,29	7,34	7,53	7,54	1,39
4	Pengeluaran Per Kapita (juta rupiah)	8.276	8.446	8.757	9.066	8.901	0,73
5	IPM	67,41	68,29	68,8	69,6	69,81	0,86

Sumber: BPS, 2021 (data diolah)

Berdasar tabel 2.16. IPM di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata 0,86%. Pertumbuhan ini menunjukan kinerja yang baik dari Pemerintah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dilihat dari komposit pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan menunjukkan tren positif dengan peningkatan rata-rata 0,73% per tahun. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan pertumbuhan rata-rata 1,33% per tahun, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan rata-rata 1,39% per tahun dan pengeluaran

perkapita dengan pertumbuhan rata-rata 0,86% per tahun. Bila dilihat dari 4 (empat) komposit pembentuk IPM selama 5 tahun mengalami tren pertumbuhan positif.

Komponen pembentuk IPM yang mengalami penurunan yaitu pengeluaran perkapita, dimana pada tahun 2020 pengeluaran perkapita masyarakat Kebumen mengalami penurunan dari Rp. 9.066.000,- pada tahun 2019 menurun menjadi Rp. 8.901.000,- ditahun 2020. Menurunnya pengeluaran perkapita salah satunya disebabkan adanya pandemi *Covid-19*. Menurunnya pengeluaran per kapita dipengaruhi menurunnya pendapatan masyarakat akibat pandemi *Covid-19* yang berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat cukup signifikan.

2) Kemiskinan

Terdapat dua konsep pokok dalam memaknai kemiskinan yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai kemiskinan makro yaitu suatu kondisi kehidupan yang dialami seseorang dengan pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum yang digambarkan dengan garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Data kemiskinan makro yang di susun BPS berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas). Selain itu juga dipergunakan Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) sebagai informasi tambahan yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing masing komoditi makanan dan non makanan. Data kemiskinan makro merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme survei (sampel) , bersifat kuantitatif, memberikan gambaran umum dan profil suatu daerah, sebagai bahan pengambilan kebijakan makro dan tidak dapat menampilkan *by name by address.*

Sementara konsep kemiskinan mikro memahami kemiskinan melalui data kemiskinan yang diperoleh melalui mekanisme sensus yang bersifat menyeluruh, bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai intervensi program/kegiatan *secara by name by address.* Untuk melihat kemiskinan mikro di Kabupaten Kebumen, data yang dipergunakan yaitu dengan menggunakan data DTKS. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Data DTKS tahun 2020 merupakan data hasil pemutahiran Data Terpadu (BDT) oleh BPS tahun 2015. Data ini membagi kemiskinan dengan pemeringkatan menggunakan model *proxy mean test* yang hasilnya dikelompokan menjadi desil 1 sampai desil 4 yang mana merupakan 40% dari penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah yaitu hampir miskin (desil 4), rentan miskin (desil 3), miskin (desil 2) dan sangat miskin (desil 1).

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2019 sempat mengalami mengalami penurunan dari 19,86% pada Tahun 2016 menjadi 16,82% pada Tahun 2019. Selama kurun waktu 2016-2019 kinerja penurunan persentase penduduk miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Capaian penurunan kemiskinan pada tahun 2018 dan 2019 telah melampaui target kinerja pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Jika dilihat dari penurunan penduduk miskin selama kurun waktu 2016-2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 34.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 11.520 jiwa per tahun. Akan tetapi akibat terjadinya Pandemi Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17,59%.

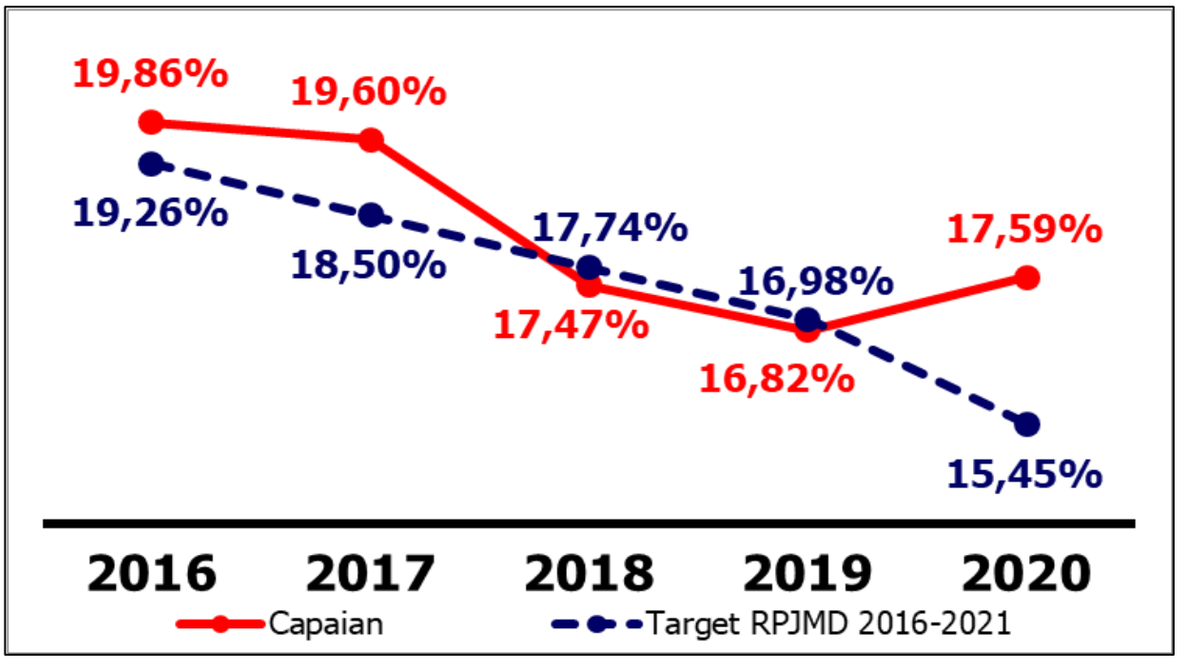

Sumber: BPS, 2021 dan RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2016-2021

Gambar 2.29
Target dan Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan. Berikut secara rinci kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020

Uraian	% Penduduk Miskin					% Penurunan 2016-2020	Rata-rata Penurunan 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Kebumen	19,86	19,60	17,47	16,82	17,59	2,83	0,57
Jawa Tengah	13,27	13,01	11,32	10,80	11,41	2,85	0,38
Nasional	10,70	10,12	9,82	9,41	9,78	2,50	0,27

Sumber: BPS, Maret 2021 (data diolah)

Berdasarkan perkembangan profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2018 sempat menurun yang artinya jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin kecil, dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kebumen juga semakin dekat atau ketimpangan antar penduduk miskin cukup baik. Namun pada tahun 2019 P1 dan P2 di Kabupaten Kebumen meningkat. P1 pada tahun 2019 sebesar 2,58 dan kembali meningkat menjadi 2,62 pada tahun 2020, sedangkan P2 pada tahun 2019 sebesar 0,65 dan kembali menurun menjadi 0,55 pada tahun 2020. Artinya jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan dan jarak rata-rata pengeluaran antar-penduduk miskin merenggang atau semakin jauh.

Tabel 2.25
Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Profil Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	235.900	233.500	208.700	201.340	211.090
Persentase Penduduk Miskin	19,86%	19,60%	17,47%	16,82%	17,59%
Garis Kemiskinan	313,881	352,819	342,437	362,847	380.557
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) %	3,78%	3,62%	2,48%	2,58%	2,62%
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)%	1,11%	0,99%	0,55%	0,65%	0,55%

Sumber: BPS, 2021

Kondisi ini mencerminkan bahwa kenaikan Garis Kemiskinan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin secara linier yang menyebabkan jarak antara pengeluaran masyarakat miskin semakin jauh dengan Garis Kemiskinan. Kenaikan Garis Kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan Garis Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan ke depan tidak hanya berfokus pada penanggulangan kemiskinan dari sisi mikro pada intervensi program seputar perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses kebutuhan dasar, namun perlu optimalisasi intervensi penanggulangan kemiskinan dari sisi makro yaitu penciptaan lapangan kerja, menjaga tingkat inflasi, maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Adapun komoditas penyumbang Garis Kemiskinan tertinggi pada tahun 2019 berdasarkan data BPS November 2019 yaitu sandang, bahan makanan, dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Jika diteliti lebih dalam dari komoditas makanan jenis komoditas yang berkontribusi besar yaitu sayur-sayuran, lemak dan minyak serta buah-buahan sebagai sumber utama kebutuhan kalori sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Jenis Komoditi	Persentase
Bahan Makanan	3,23
1. Sayur-Sayuran	16,38
2. Lemak dan Minyak	13,80
3. Buah-Buahan	6,70
4. Padi, Ubi, dll.	3,23
5. Ikan Diawetkan	0,69
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	3,27
Non-Makanan	
1. Perumahan, Air, gas, listrik dan bahan bakar rumah tangga	0,26
2. Sandang	5,96
3. Kesehatan	1,71
4. Pendidikan, rekreasi dan Olahraga	1,66
5. Transportasi, Komunikasi, jasa Keuangan	-0,42

Sumber: BPS, November 2019

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021, peningkatan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan sampai dengan tahun 2019 mengalami akselerasi yang cukup baik, namun tahun 2020 capaian mengalami penurunan yang disebabkan pandemi *Covid*-19 sehingga angka kemiskinan tahun 2020 sebesar 17,59% atau lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 16,82%. Angka Kemiskinan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 15,45%. Sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* yang

menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian masyarakat sebagai dampak pembatasan mobilitas masyarakat. Pelemahan dan pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target kemiskinan dengan meningkatnya PHK dan pembatasan kegiatan yang memengaruhi sektor informal yang banyak melibatkan penduduk rentan miskin dan hampir miskin.

Berdasarkan potret kemiskinan secara mikro Kabupaten Kebumen diketahui bahwa wilayah utara Kabupaten Kebumen merupakan kantong kemiskinan terdiri dari Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, dan Alian. Persebaran penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester 2 Tahun 2020 di kecamatan se-Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Karangsambung, Alian, Sempor, Bonorowo, Rowokele, Klirong, Pejagoan, Sruweng, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Ambal, Puring, dan Buluspesantren.
2. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin di bawah rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Padureso, Karanggayam, Sadang, Petanahan, Adimulyo, Poncowarno, Prembun, Buayan, Karanganyar, Kebumen, Gombong, dan Ayah.

Tabel 2.27
Persentase Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	% Penduduk Miskin
1	Ayah	21,80
2	Padureso	24,62
3	Poncowarno	31,63
4	Karanganyar	32,49
5	Adimulyo	35,10
6	Gombong	35,52
7	Sadang	37,21
8	Petanahan	38,10
9	Buayan	38,14
10	Prembun	38,46
11	Karanggayam	39,83
12	Kebumen	40,03
13	Kuwarasan	40,57
14	Klirong	40,66
15	Buluspesantren	41,16
16	Rowokele	41,22
17	Ambal	41,75
18	Mirit	42,46
19	Pejagoan	42,93
20	Alian	43,58
21	Sruweng	43,75
22	Sempor	44,15
23	Kutowinangun	45,36
24	Puring	48,05
25	Karangsambung	48,36
26	Bonorowo	49,74
Rata-Rata Kabupaten		40,57

Sumber: DTKS, 2020

3) Tingkat Pengangguran

Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran sebagai masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh kesenjangan jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada di daerah. Besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat tidak diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja atau lapangan kerja baru. Adanya transisi demografi menyebabkan penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 6,07% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4,76%. Jika dibandingkan dengan TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Kebumen berada pada posisi 18 dari 35 kabupaten/kota dan lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016, karena dilaksanakan sensus ekonomi, maka Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilakukan untuk level kabupaten/kota. Survei hanya untuk level estimasi provinsi.

Tabel 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020

Jenis Kelamin	2016		2017		2018		2019		2020	
	Kbm	Prov	Kbm	Prov	Kbm	Prov	Kbm	Prov	Kbm	Prov
Laki-laki	Na	Na	6,00	4,97	6,21	4,82	4,05	4,81	6,78	7,13
Perempuan	Na	Na	4,95	4,02	4,51	4,08	5,75	4,03	5,09	5,57
Total	Na	Na	**5,58**	**4,57**	**5,52**	**4,51**	**4,76**	**4,49**	**6,07**	**6,48**

Sumber : BPS, 2021

Bila dilihat dari angka pengangguran 6,07% di tahun 2020, angka tersebut masuk dalam kriteria pengangguran cukup tinggi. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 salah satunya disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya produktivitas ekonomi dikarenakan pembatasan aktivitas ekonomi. Selain itu belum adanya industri manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja menjadi salah satu penyebab tingginya TPT di Kabupaten Kebumen, artinya adanya keterbatasan lapangan kerja yang mampu menyerap jumlah angkatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen diperparah dengan kondisi sebagian besar masyarakat Kabupaten Kebumen bekerja pada sektor informal.

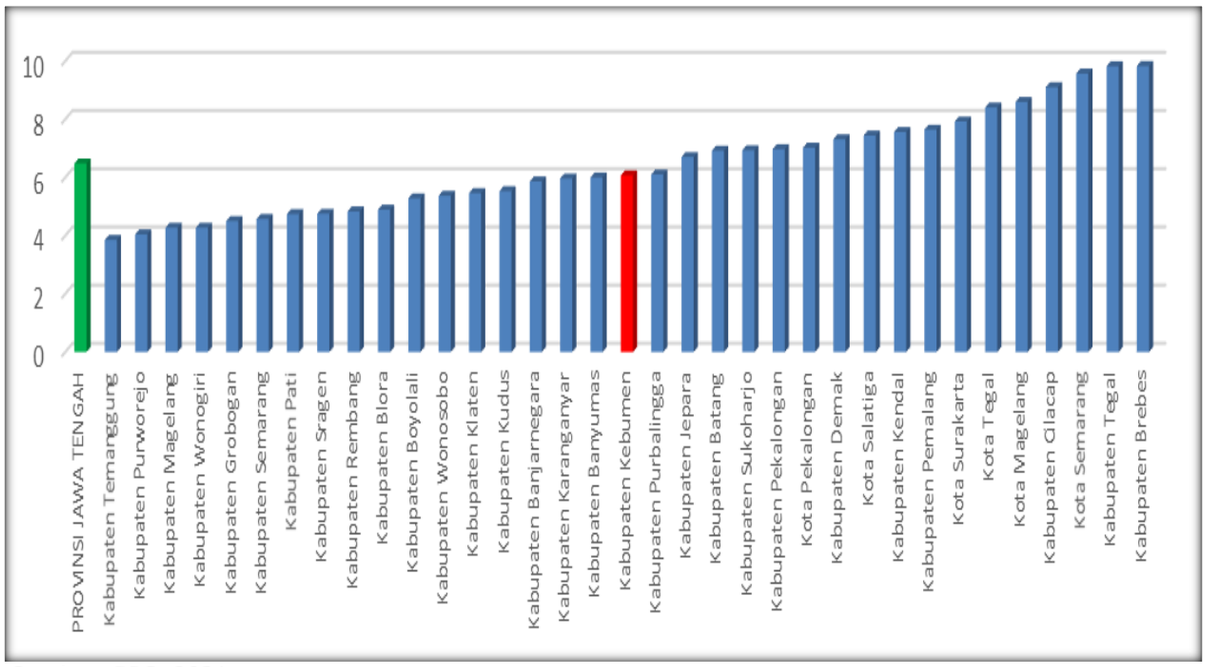

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 62,79 persen dari total pengangguran terbuka atau 24.163 penduduk. Jika dipilah jumlah pengangguran SMA sebanyak 10,20 persen atau sejumlah 3.926 orang, SMK sebanyak 52,59 persen atau 20.237 orang. Data tahun 2016 tidak tersedia karena BPS tidak melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional tingkat Kabupaten Kebumen. Banyaknya lulusan SMK yang belum terserap pasar kerja perlu menjadi evaluasi salah satunya dalam penyusunan kurikulum pendidikan termasuk sekolah vokasi agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi, ketrampilan termasuk *soft skill* yang baik agar dapat terserap pada pasar kerja.

Tabel 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak/belum sekolah atau tamat SD	Na	8,73%	4,54%	1,54%	3,10%
2	SD	Na	11,72%	18,14%	5,16%	14,50%
3	SMP	Na	10,93%	10,62%	14,97%	11,78%
4	SMA	Na	12,18%	9,86%	7,38%	10,20%
5	SMK	Na	45,16%	50,91%	60,03%	52,59%
6	Diploma	Na	2,51%	3,81%	3,38%	1,15%
7	Sarjana	Na	8,76%	2,12%	7,54%	6,67%

Sumber: BPS, 2021

Jika dilihat pada komposisi Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kelompok usia dapat dilihat selama kurun waktu 2017-2020 rata-rata pengangguran didominasi pada rentang usia 20-24 tahun, 25-29 tahun, dan 15-19 tahun atau usia sekolah. Dari 38.484 penduduk yang menganggur terdapat 81,99 persen atau sekitar 31.555 di antaranya adalah pemuda. Tingkat Pengangguran Terbuka pada usia 20-24 tahun dapat mengindikasikan penduduk usia tersebut menganggur karena tidak terserap oleh

lapangan pekerjaan dikarenakan ketrampilan dan tingkat pendidikan yang dimiliki ketika berhenti pada jenjang SMA/SMK mengakibatkan tidak terserap dalam pasar kerja. Namun pada tahun 2020 persentase penduduk menganggur pada usia 25-29 tahun menurun drastis. Hal ini dimungkinkan karena pemuda pada usia tersebut tidak lagi terlalu memilih-milih pekerjaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tingginya angka pengangguran terbuka didominasi oleh kelompok usia muda dengan latar belakang tingkat pendidikan tertentu seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah.

Tabel 2.30
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda
Kabupaten Kebumen 2016-2020

No	Kelompok Usia	2016	2017	2018	2019	2020
1	15 – 19	Na	25,2%	24,03%	23,36%	23,41%
2	20 – 24	Na	29,11%	35,08%	42,92%	30,47%
3	25 – 29	Na	3,99%	19,28%	16,28%	6,44%
4	30 – 34	Na	11,23%	2,49%	4,56%	4,02%
5	35 – 39	Na	5,01%	3,14%	1,04%	2,20%
6	40 – 44	Na	6,4%	2,69%	4,81%	1,12%

Sumber: BPS, 2021



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020

Pada Tahun 2019 angka pengangguran Kabupaten Kebumen mencapai 4,76 persen. Kinerja penurunan tingkat pengangguran selama kurun waktu 2017-2019 cukup baik. Namun pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini memperparah kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen menjadi 6,07 persen. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen meningkat karena berhenti bekerjanya buruh tidak tetap di Kabupaten Kebumen akibat sektor ekonomi yang mempekerjakannya berhenti beroperasi akibat pandemi COVID-19. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen juga meningkat akibat pulangnya penduduk asli Kebumen yang merantau bekerja di kota besar (pekerja migran). Mereka berhenti bekerja karena diterapkannya kebijakan *lockdown* di tempat bekerjanya akibat pandemi COVID-19 dan memilih pulang ke Kebumen untuk mengurangi beban ekonomi kehidupannya. Untuk itu diperlukan suatu program padat karya untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran yang berasal dari buruh tidak tetap dan pekerja migran di Kabupaten Kebumen agar dapat membantu memperbaiki kondisi ekonominya.

2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya, pengembangan dan pelestarian kesenian serta olahraga sangat dibutukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang utuh. Kebudayaan merupakan penanda jatidiri yang menjadi kekhasan dan karakter suatu daerah. Kekayaan budaya seharusnya dikelola dengan baik agar menjadi penggerak dan modal pembangunan manusia.

Benda cagar budaya juga merupakan aset Kebumen yang harus dilestarikan, usaha pemerintah untuk melestarikan benda cagar budaya mengalami beberapa hambatan, kepemilikan cagar budaya oleh masyarakat dan keterbatasan anggaran menjadi permasalahan dalam pelestarian cagar budaya sehingga tahun 2017 dan 2018 cagar budaya yang dilestarikan mengalami penurunan. Tahun 2016 jumlah cagar budaya yang dilestarikan berjumlah 129 buah dan tahun 2020 berjumlah 130. Ini berarti ada penambahan cagar budaya yang dilestarikan yang ada di Kebumen. Bila dilihat dari tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan pelestarian cagar budaya sebanyak 5 buah, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran karena adanya pandemi covid-19.

Pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Kebumen dilakukan dengan pelestarian kesenian sesuai dengan budaya lokal yang masih eksis di masyarakat seperti wayang kulit, jamjaneng, kuda lumping dan kesenian lainnya. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi terhadap grup kesenian dengan pemberian bantuan perlengkapan, maupun fasilitasi pada even-even seni budaya dalam daerah maupun di tingkat nasional. Tahun 2016 Sampai tahun 2020 jumlah grup kesenian selalu meningkat, pada tahun 2020 jumlah grup kesenian yang aktif sebanyak 442 grup. Kegiatan festival di tahun 2020 tidak dapat dilakukan karena kebijakan pembatasan sosial pencegahan Covid-19.

Pembangunan kepemudaan dan olahraga menjadi hal yang penting dilakukan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pembinaan kepemudaan melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan, pengembangan prestasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan kepada pemuda dan kegiatan lain yang dapat mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengembangan prestasi olahraga dilakukan dengan pembinaan klub olahraga yang ada pada tahun 2016-2018 terdapat 86 klub olahraga, dan meningkat signifikan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 255. Peningkatan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat mendorong tumbuhnya klub-klub olahraga baru di Kabupaten Kebumen. Keberadaan klub ini dapat menjadi cikal bakal tumbuhnya prestasi olahraga secara lokal maupun nasional.

Pengembangan prestasi olahraga didukung oleh pemerintah dengan penyediaan sarana dan prasarana dan pembinaan terhadap klub olahraga salah satu sarpras yang dibangun adalah gedung olahraga di beberapa kecamatan yang dapat digunakan oleh masyarakat dan klub olahraga dalam latihan rutin untuk mendukung tumbuhnya bibit-bibit atlet daerah. Gedung olahraga milik pemerintah daerah terdapat 5 unit yaitu GOR Gembira, GOR Prembun, GOR Karanganyar, GOR Gombong, dan GOR Petanahan, serta 1 unit Stadion Chandradimuka. Selain itu 31 gedung olahraga didirikan oleh lembaga pendidikan, pemerintah desa dan masyarakat guna menyediakan fasilitas yang mendukung pengembangan atlet dan prestasi olahraga daerah. Kondisi ini memicu meningkatnya inisiasi masyarakat dalam penyelenggaraan even-even olahraga berbasis komunitas.

Tabel 2.31
Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Kegiatan Olahraga di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan	129	85	117	135	130
2.	Jumlah Grup Kesenian	340	348	348	350	442
3.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	11	9	15	0
4.	Kegiatan Olahraga	7	7	7	10	10
5.	Jumlah Klub Olahraga	86	86	86	255	255
6.	Jumlah Gedung Olahraga	31	31	32	37	37

Sumber: Disdik dan Disporawisata Kab. Kebumen, 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa faktor strategis pendukung perwujudan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan. Faktor-faktor tersebut menjadi hal penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dituntut untuk terus dapat ditingkatkan sehingga dapat dirasakan dan memenuhi harapan masyarakat. Berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui media massa dan jejaring sosial dapat segera diproses, ditindaklanjuti dan diselesaikan. Pada era sekarang, tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dalam penanganan keluhan dan pengaduan sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Secara umum kondisi pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai IKM Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 81,97 yang masuk dalam kategori nilai IKM yang Baik. Perkembangan pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen juga semakin baik. Hal tersebut terlihat dari nilai IKM Kabupaten Kebumen yang terus meningkat pada kurun waktu tahun 2016-2020 dari angka 71,37 menjadi 81,97. Hal ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Kebumen semakin mengapresiasi pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. IKM Kabupaten Kebumen selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai IKM	71,37	75,15	79,28	80,61	81,97
2	Keterangan	tinggi	tinggi	Baik	Baik	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2021
Keterangan: laporan IKM tahun 2016-2017 mendasari PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2014 sedangkan tahun 2018-2020 mendasari PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017

Tabel 2.33
Rata-Rata Nilai per Unsur Survei Kepuasan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Unsur SKM	Rata-Rata Nilai Interval	Rata-Rata Nilai Interval Konversi	Kinerja UPP
1	Persyaratan	3,22	80,49	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,20	80,06	Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,12	77,96	Baik
4	Biaya/Tarif	3,56	79,87	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,19	79,87	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,25	81,13	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,28	82,05	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,16	78,96	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,56	88,98	Baik
Rata-Rata		3,28	81,97	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan Keputusan Bupati kebumen Nomor 503/168 tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kebumen, pelayanan pada masyarakat mempunyai SOP dan dengan durasi waktu tertentu. Nilai IKM Kabupaten Kebumen tahun 2020 merupakan akumulatif dari pelayanan baik pelayanan di Kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP) serta pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di Kebumen.

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Waktu penyelesaian merupakan suatu unsur yang menjadi tolak ukur dari konsep pelayanan prima yang memprioritaskan kepuasan dalam pelayanan. Semakin pendek waktu yang diperlukan dalam pelayanan merupakan indikator utama dalam kepuasan masyarakat atas pelayanan. Secara akumulasi nilai IKM pelayanan di Kabupaten Kebumen unsur waktu penyelesaian masuk kriteria baik dengan nilai rata-rata interval 3,12 atau 77,96, namun bila dibandingkan dengan 9 (sembilan) unsur pelayanan IKM, kompenen ini perlu mendapatkan peningkatan.

Beberapa penyebab terkait rendahnya nilai unsur waktu penyelesaian pelayanan, di antaranya:

1. Terdapat beberapa Penyelenggara Pelayanan Publik dalam pelayanan belum mengacu kepada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Sistem pelayanan di antaranya masih bersifat manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama; dan
3. Aktivitas pejabat yang sedang tidak di tempat, dinas luar, dinas dalam, rapat serta memiliki kepentingan lain sehingga berkas administrasi pelayanan tidak segera tercukupi sesuai standar waktu yang ditetapkan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Secara umum kondisi layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Kinerja bidang pendidikan dapat diukur dari beberapa indikator bidang pendidikan diantaranya angka melek huruf, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan prosentase PAUD formal yang terakreditasi. Dari ke 4 (empat) indikator tahun 2020 mengalami peningkatan, ini berarti ada perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Untuk melihat kedalaman perkembangan layanan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Tabel Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf	%	96,29	96,58	95,15	94,51	99,57
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,61	12,90	12,91	13,04	13,34
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,05	7,29	7,34	7,53	7,54
Persentase PAUD Formal Berakreditasi	%	Na	4,19	4,25	39,24	39,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kebumen dan BPS, 2021

Angka Melek Huruf di Kabupaten Kebumen tahun 2016 sebesar 96,29%, tahun 2020 naik menjadi 99,57%. Hal ini berarti bahwa sampai dengan Tahun 2020, 99,57% penduduk di Kabupaten Kebumen yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya dan 0,43% penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2020 masih buta huruf. Penduduk ini didominasi penduduk tidak produktif dan yang mempunyai kebutuhan khusus.

Pencapaian HLS di Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 13,34 mengalami peningkatan sebesar 0,73 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut dapat diartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 di Kabupaten Kebumen memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,34 tahun atau setara Diploma I. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 7,54 tahun atau meningkat sebesar 0,49 tahun dari tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 sebesar 7,54 tahun atau setara kelas dua SMP.

Persentase PAUD Formal Berakreditasi meningkat dari 4,19% di tahun 2016 menjadi 39,24 di tahun 2020. Ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen. Hal ini disebabkan mulai Tahun 2019 Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD PNF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dikategorikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dimana Sebagian besar TK telah terakreditasi. Pada tahun 2020 terdapat moratorium akreditasi guna memperbaiki komponen penilaian akreditasi. Akreditasi dimulai kembali pada tahun 2021. Pembangunan urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja program, di antaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasar. Untuk melihat indikator pendidikan tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

a) Pendidikan Anak Usia Dini

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, APK PAUD 1-6 tahun. Kabupaten Kebumen sejak lima tahun terakhir cukup fluktuatif dari 2016 sebesar 47,06 sampai dengan 2018 menjadi 50,98% atau naik sebesar 3,92%. Sedangkan APK PAUD 3-6 tahun di tahun 2019 sebesar 37,20% dan di tahun 2020 naik menjadi 41,38%. Perubahan capaian APK PAUD terjadi karena perubahan rentang anak usia dini yang sebelumnya dihitung

berdasarkan usia 0-6 tahun menjadi 3-6 tahun. Perhitungan ini berlaku nasional dari tahun 2018.

Tabel 2.35
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APK PAUD	47,06	47,01	50,98	37,20	41,38

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Kebumen tahun 2020 meningkat dari 1.132 unit di tahun 2016 menjadi 1.152 unit di tahun 2020. Dengan jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang meningkat pada tahun 2020 menjadi 134.132 anak, menyebabkan rasio lembaga PAUD pada tahun 2020 turun menjadi 1:116. Rasio Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.36
Rasio Jumlah Lembaga PAUD Per Siswa Jenjang PAUD
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Σ Lembaga PAUD	1.132	1.145	1.128	1.240	1.152
Σ Penduduk Usia 0-6 Tahun	137.288	135.290	133.550	134.132	134.132
Rasio	1 : 119	1 : 116	1 : 118	1 : 108	1 : 116

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021
Keterangan : data dihitung berdasarkan rumus perhitungan (Tahun 2016-2018 untuk penduduk usia 0-6 tahun) dan rumus perhitungan SPM (Tahun 2019-2020 untuk penduduk usia 3-6 tahun)

Berdasarkan gambar di bawah, posisi APK PAUD Kebumen tahun 2020 sebesar 44,86% nilai ini lebih tinggi dari APK PAUD Nasional sebesar 37,52% dan lebih rendah dari APK PAUD Provinsi Jawa Tengah sebesar 50,24%.

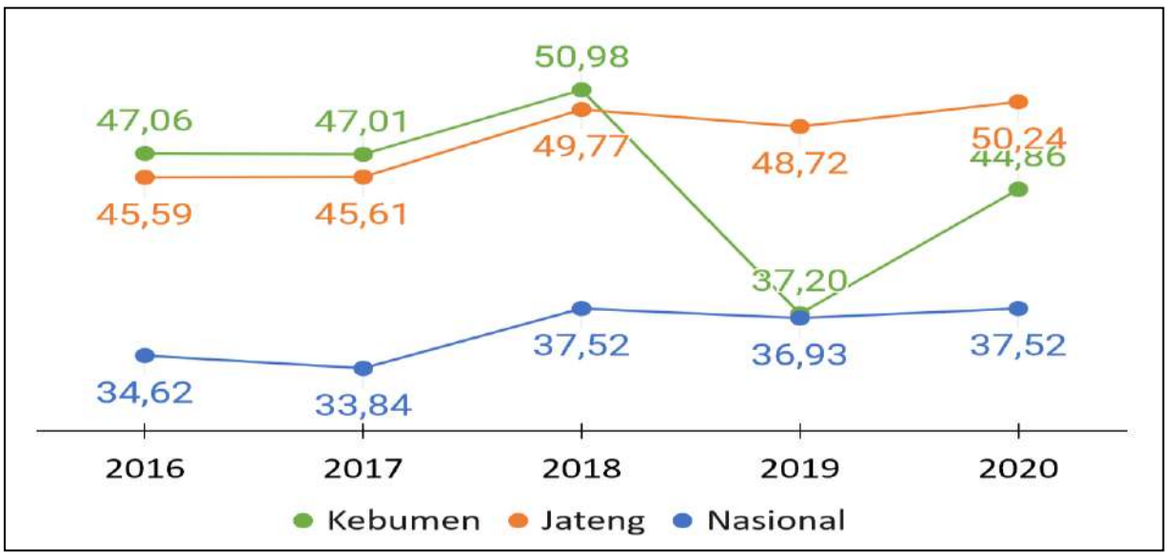

Sumber: Disdik, BPS Susenas, 2020

Gambar 2.32
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat PAUD Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

b) Pendidikan Dasar

Indikator Kinerja Pendidikan Dasar di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan baik dari sarana, prasarana maupun mutu pendidikan. Gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persentase Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Putus Sekolah (APTS), Rasio Guru/Murid, Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata, Rasio Sekolah dengan penduduk usia sekolah, Persentase Ruang Kelas yang Berkondisi Baik, Persentase Kelulusan sekolah dan Persentase Kualifikasi Guru Berpendidikan Minimal S1 untuk setiap jenjang pendidikan. Secara rinci beberapa indikator kinerja pokok pada pendidikan dasar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**					
	SD/MI (%)	109,57	107,74	107,72	110,42	108,87
	SMP/MTs (%)	98,72	90,06	89,97	90,04	90,69
2	**Angka Partisipasi Murni (APM)**					
	SD/MI (%)	95,44	97,41	99,49	98,98	99,20
	SMP/MTs (%)	73,61	76,01	80,90	80,36	81,00
3	**Angka Siswa Putus Sekolah**					
	SD/MI (%)	0,06%	0,07%	0,09%	0,09%	0,06%
	SMP/MTs (%)	0,35%	0,26%	0,29%	0,29%	0,16%
4	**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**					
	SD/MI	1:140	1:139	1:140	1:145	1:145
	SMP/MTs	1:319	1:317	1:311	1:314	1:314
5	**Rasio Guru/Murid**					
	SD/MI	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 17	1:18
	SMP/MTs	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 16	1:18
6	**Rasio Kelas/Murid**					
	SD/MI	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1:26
	SMP/MTs	1 : 29	1 : 28	1 : 28	1 : 27	1:27
7	**Rasio Kelas/Guru**					
	SD/MI	1: 1,49	1 : 1,50	1 : 1,51	1 : 1,51	1:1,47
	SMP/MTs	1 : 1,53	1 : 1,51	1 : 1,51	1 : 1,48	1:1,48
8	**Rasio Guru Per Sekolah**					
	SD/MI	1 : 9,88	1 : 9,84	1 : 9,83	1 : 9,77	1 : 6,61
	SMP/MTs	1 : 22,64	1 : 22,68	1 : 21,10	1 : 20,69	1 : 16,01
9	**Angka Kelulusan**					
	SD/MI (%)	98,56	98,38	98,38	99,97	100,00
	SMP/MTs (%)	95,75	96,91	96,91	99,97	100,00
10	**Jumlah Sekolah yang Telah Terakreditasi**					
	Jumlah Sekolah Tingkat SD yang telah terakdreditasi (%)	98,63	98,50	97,63	98,00	99,74
	Jumlah Sekolah Tingkat SMP yang telah terakdreditasi (%)	91,96	91,96	89,47	95,69	96,58
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV					
	SD/MI (%)	89,14	91,37	91,37	93,70	93,78
	SMP/MTs (%)	84,94	88,58	88,58	94,26	94,30
11	**Persentase Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi baik**					
	SD/MI (%)	70,08	72,67	72,67	72,71	87,87
	SMP/MTs (%)	81,98	83,06	83,06	83,03	90,67
12	**Prersentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Ringan (%RKrr)**					
	SD/MI (%)	57,6	60	61,6	61,3	61,05
	SMP/MTs (%)	59,8	56,9	58,2	57,1	53,69
13	**Prersentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Sedang (%RKrs)**					
	SD/MI (%)	7,7	7,6	7,4	7,9	7,27

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	SMP/MTs (%)	5	4,6	3	5,1	7,56
14	**Prersentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Berat (%RKrb)**					
	SD/MI (%)	10,60	7,20	8,90	10,80	2,24
	SMP/MTs (%)	1,90	4,00	3,00	3,70	2,78

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan BPS, 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Selama tahun 2016-2018, APK jenjang SD/Sederajat menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahunnya dengan angka 107,72% pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 108,57% di tahun 2020. Sementara itu, APK SMP/Sederajat meningkat pada tahun 2020 menjadi 90,69%. APK lebih dari 100% menunjukkan pelayanan Pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen telah mampu menjangkau seluruh penduduk usia sekolah dasar.

Data pilah gender untuk bidang pendidikan dari BPS tidak tersedia data series dari 2016 samapai dengan 2019, dan pada tahun 2020 BPS merilis data APK berdasarkan jenis kelamin. Pada Tahun 2020 APK SD untuk anak laki-laki sebesar 108,54% dan untuk anak perempuan sebesar 108,59%. Hal ini menunjukan kesetaraan gender dibidang pendidikan untuk jenjang SD sudah bagus dimana kesempatan bersekolah untuk anak perempuan sudah seimbang dengan anak laki-laki bahkan jumlahnya lebih banyak perempuan yang bersekolah di jenjang SD.

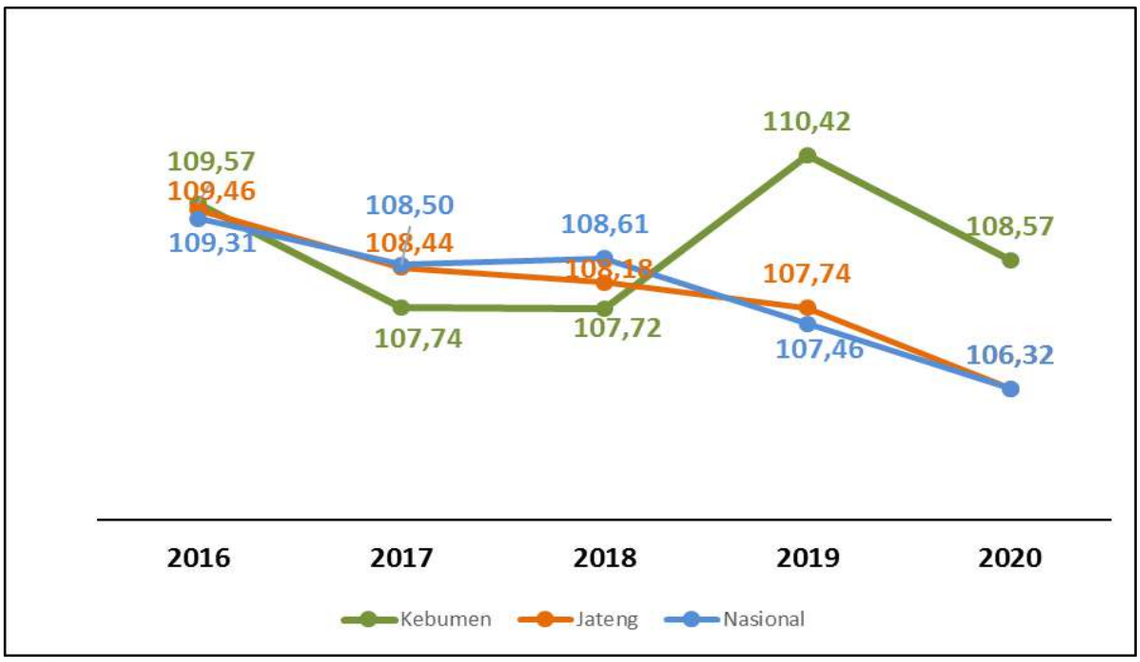

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.33
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Sementara APK SMP sederajat masih menunjukkan angka dibawah 100, artinya adanya penurunan pada jumlah murid yang berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya atau anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Kebumen. APK SD/Sederajat Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 berada di atas APK Jawa Tengah maupun nasional. namun pada jenjang SMP/sederajat, APK Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 berada di bawah APK Jawa Tengah dan nasional.

Untuk Jenjang SMP pada Tahun 2020 APK untuk anak laki-laki sebesar 94,13% dan untuk anak perempuan sebesar 86,88%. Hal ini menunjukan masih ada kesenjangan kesetaraan gender dibidang pendidikan untuk jenjang SMP dimana kesempatan sekolah untuk anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan.

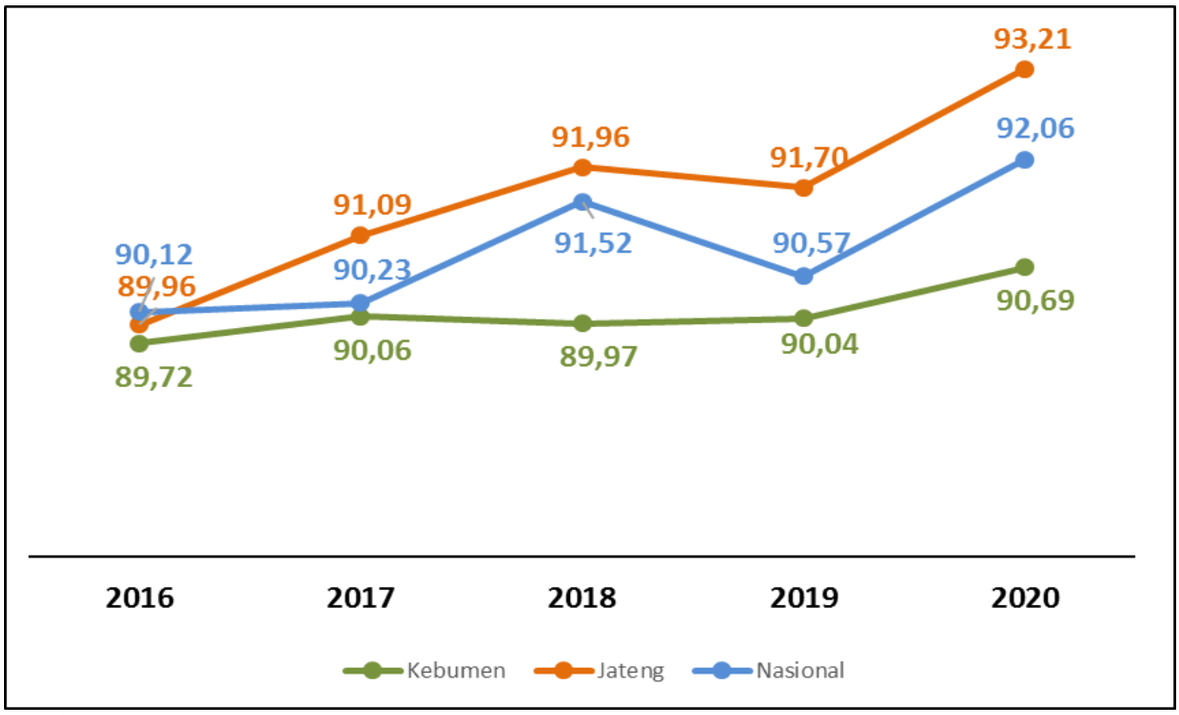

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.34
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM pada jenjang SD/Sederajat Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2016-2018 secara umum terus mengalami tren kenaikan, namun pada tahun 2019 dan 2020 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. APM pada jenjang SMP/Sederajat selama periode tahun 2016-2020 juga mengalami tren kenaikan dengan APM pada tahun 2020 sebesar 81,00%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, pada tahun 2020 baik nilai APM SD/Sederajat dan SPM/Sederajat Kabupaten Kebumen berada di atas APM Jawa Tengah dan nasional.

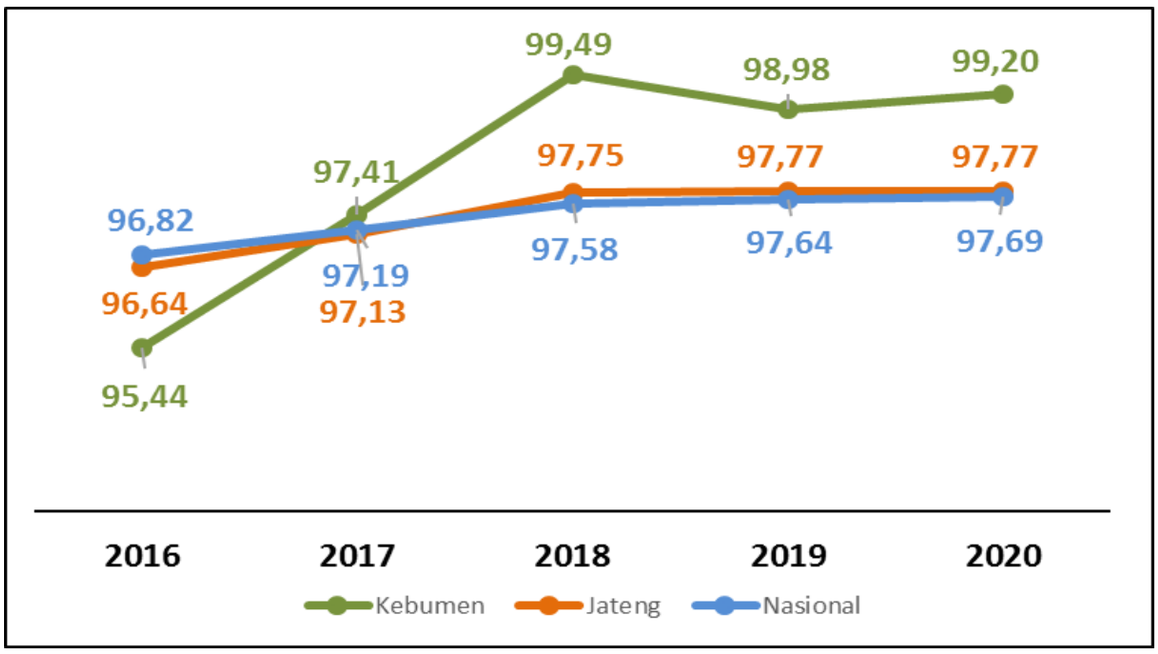

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.35
Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

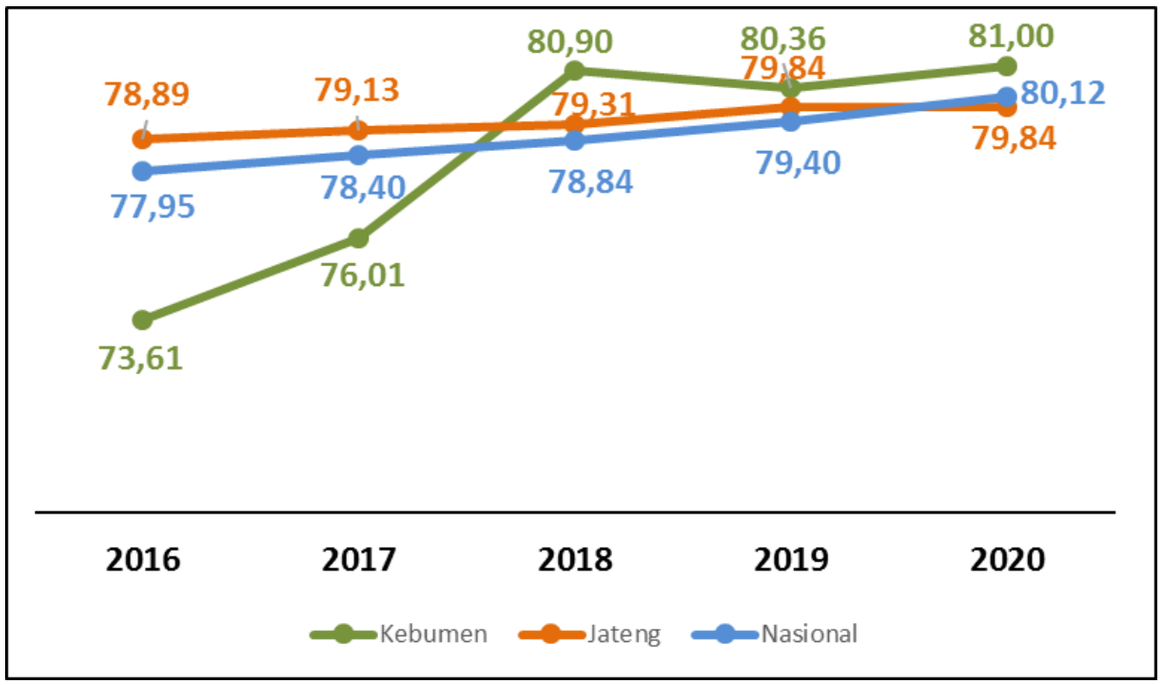

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.36
Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kinerja APS jenjang usia 7-12 tahun pada tahun 2020 sebesar 99,58% menunjukkan penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 99,75%. Pada tahun 2020 APS jenjang usia 7-12 tahun Kabupaten Kebumen berada di bawah angka APS Jawa Tengah dan lebih tinggi dibanding capaian Nasional. Capaian angka partisipasi sekolah jenjang usia 7-12 tahun selama tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat dalam gambar berikut.

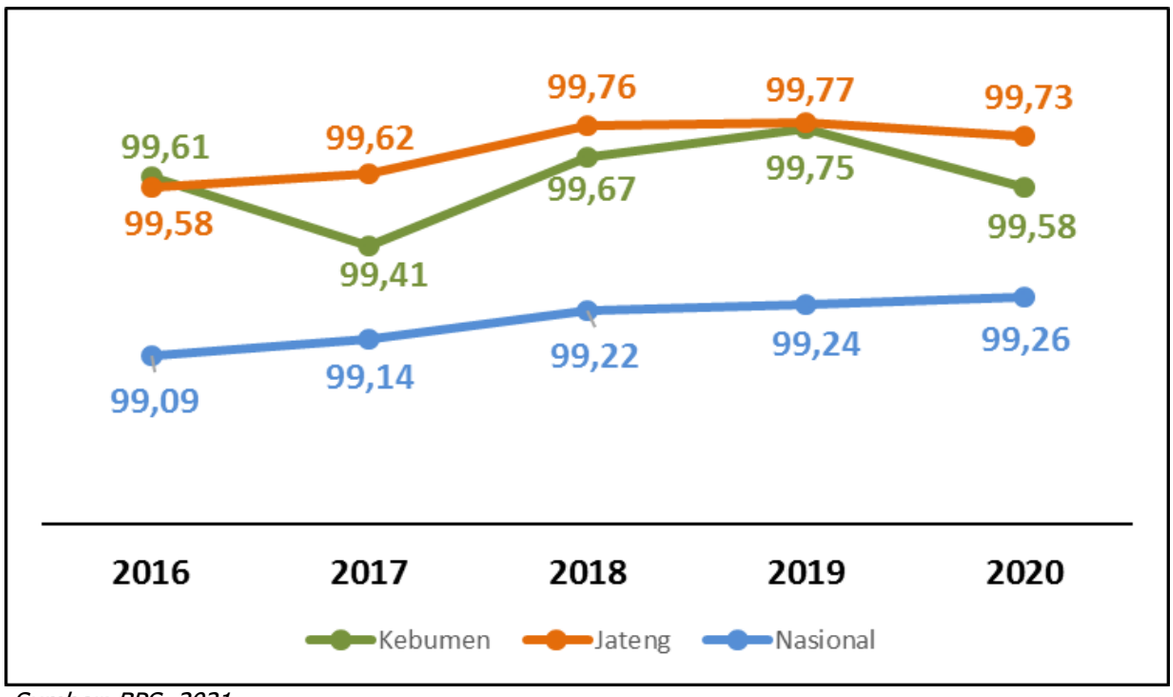

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.37
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Jenjang usia 13-15 tahun mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 99,03% dari tahun 2019 sebesar 98,32%. Jika dibandingkan Kabupaten Kebumen berada di atas APS Jawa Tengah dan Nasional.

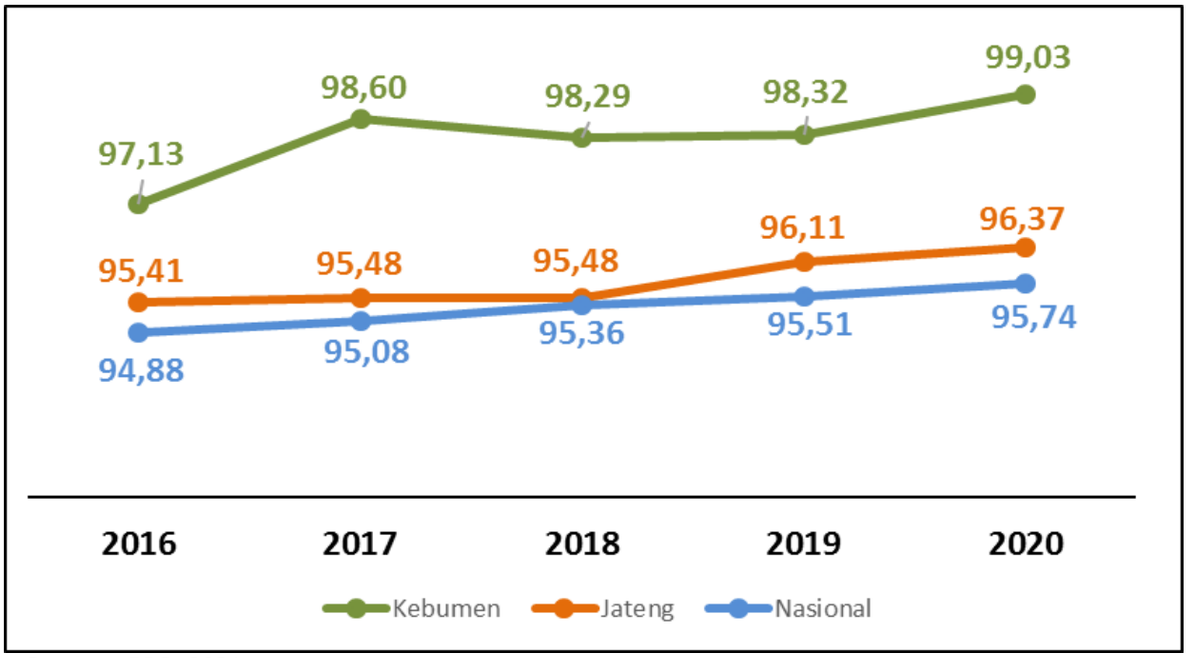

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.38
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Dari penjelasan kedua gambar di atas, artinya masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pemerintah daerah perlu mendorong pencapaian SPM bidang pendidikan dimana seluruh penduduk usia 7-15 tahun harus terlayani pendidikan dasarnya. Pola pelayanan sekolah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menyebabkan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, anak terlantar, anak jalanan tidak mengenyam pendidikan sesuai dengan usianya. Di sisi lain,

keengganan untuk kembali bersekolah bagi mereka yang putus sekolah maupun untuk menempuh pendidikan kesetaraan merupakan tugas berat dari Pemerintah Daerah. Kecenderungan orangtua menyekolahkan anak mereka pada sekolah madrasah dan sekolah non-formal di luar Kebumen menjadi penyumbang angka partisipasi sekolah cenderung menurun.

Angka Melanjutkan Sekolah

Rata-rata selama kurun waktu 2016-2020 anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs sebanyak 20 anak atau 0,09%. Faktor akses, ekonomi maupun sosial menjadi penyebab anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya. Di sisi lain anak memilih melanjutkan ke jenjang pendidikan madrasah dan/atau pendidikan non-formal daripada melanjutkan pendidikan di sekolah formal. Jenjang pendidikan dasar 9 tahun merupakan pondasi dasar pembangunan manusia. Perlu upaya untuk mewujudkan akses pelayanan pendidikan dasar kepada seluruh masyarakat.

Tabel 2.38
Jumlah Siswa SD/MI Melanjutkan ke SLTP/MTs Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Siswa SD lulus	21.279	20.640	20.640	21.250	21,285
Siswa Melanjutkan	21.257	20.619	20.619	21.227	21,265
Tidak Melanjutkan	22	21	21	23	20
Persentase (%)	99,90	99,90	99,90	99,89	99,91

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mengalami peningkatan selama tahun 2016-2019 di jenjang SD/MI. Namun angka tersebut menurun pada 2020 menjadi 73 anak. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs angka putus sekolah pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 220 anak di tahun 2016 menjadi 99 anak di tahun 2020. Angka Putus Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
Σ Siswa Putus Sekolah	82	93	112	112	73
Σ Seluruh Siswa	131.337	130.002	130.002	129.091	125,585
% Anak Putus Sekolah	0,06%	0,07%	0,09%	0,09%	0,06%
SMP/MTs					
Σ Siswa Putus Sekolah	220	164	183	183	99
Σ Seluruh Siswa	63.192	62.293	62.293	61.061	61,109
% Anak Putus Sekolah	0,35%	0,26%	0,29%	0,29%	0,16%

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen. Faktor ekonomi dan non-ekonomi diindikasikan memengaruhi tingginya Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kebumen.

Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI terus mengalami perbaikan sejak tahun 2016 dari 1:139 menjadi 1:153 di tahun 2020. Namun demikian pada jenjang SMP/MTs justru mengalami penurunan rasio dari 1:319 pada

tahun 2016 menjadi 1:297 pada tahun 2020. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
Jumlah Sekolah	912	911	916	885	873
Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	126.782	127.980	127.980	127.980	133,302
Rasio ketersediaan sekolah	1:139	1:140	1:140	1:145	1:153
SMP/MTs					
Jumlah Sekolah	200	202	206	204	211
Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	63.793	64.115	64.115	64.115	64.115
Rasio ketersediaan sekolah	1:319	1:317	1:311	1:314	1:297

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Tabel 2.41
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016-2020
Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI					Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTS				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayah	1:112	1:115	1:115	1:152	1:122	1:166	1:180	1:180	1:209	1:195
2	Buayan	1:148	1:149	1:149	1:170	1:171	1:609	1:608	1:608	1:542	1:482
3	Puring	1:126	1:127	1:130	1:154	1:153	1:419	1:420	1:420	1:513	1:466
4	Petanahan	1:142	1:146	1:145	1:163	1:168	1:328	1:334	1:334	1:377	1:342
5	Klirong	1:155	1:156	1:156	1:155	1:166	1:289	1:291	1:291	1:311	1:285
6	Buluspesantren	1:139	1:141	1:141	1:137	1:141	1:424	1:429	1:429	1:390	1:354
7	Ambal	1:152	1:152	1:152	1:156	1:155	1:415	1:415	1:415	1:430	1:400
8	Mirit	1:133	1:133	1:133	1:139	1:147	1:396	1:393	1:393	1:406	1:379
9	Prembun	1:112	1:113	1:113	1:108	1:108	1:168	1:167	1:167	1:175	1:156
10	Kutowinangun	1:139	1:139	1:136	1:128	1:133	1:287	1:286	1:286	1:297	1:273
11	Alian	1:160	1:159	1:159	1:142	1:162	1:277	1:276	1:276	1:291	1:281
12	Kebumen	1:197	1:203	1:202	1:164	1:174	1:321	1:315	1:315	1:232	1:213
13	Pejagoan	1:151	1:157	1:156	1:143	1:163	1:495	1:511	1:511	1:491	1:446
14	Sruweng	1:144	1:144	1:144	1:147	1:150	1:381	1:381	1:381	1:400	1:365
15	Adimulyo	1:116	1:117	1:117	1:123	1:129	1:314	1:315	1:315	1:363	1:324
16	Kuwarasan	1:133	1:137	1:133	1:135	1:138	1:389	1:398	1:398	1:385	1:351
17	Rowokele	1:121	1:122	1:122	1:146	1:156	1:294	1:292	1:292	1:328	1:312
18	Sempor	1:140	1:140	1:140	1:151	1:163	1:454	1:452	1:452	1:509	1:461
19	Gombong	1:149	1:149	1:149	1:147	1:153	1:330	1:329	1:329	1:326	1:333
20	Karanganyar	1:130	1:131	1:131	1:128	1:134	1:262	1:263	1:263	1:286	1:252
21	Karanggayam	1:127	1:127	1:127	1:144	1:148	1:320	1:248	1:248	1:332	1:295
22	Sadang	1:106	1:108	1:108	1:141	1:143	1:274	1:273	1:273	1:393	1:352

No	Kecamatan	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI					Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTS				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
23	Bonorowo	1:99	1:100	1:100	1:94	1:111	1:334	1:334	1:334	1:350	1:306
24	Padureso	1:91	1:93	1:93	1:116	1:114	1:187	1:186	1:186	1:287	1:251
25	Poncowarno	1:108	1:110	1:110	1:119	1:129	1:203	1:203	1:203	1:315	1:303
26	Karangsambung	1:115	1:116	1:116	1:139	1:159	1:198	1:197	1:197	1:300	1:284

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data ketersediaan sekolah, diperoleh gambaran jika rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen secara rata-rata maupun per kecamatan didapatkan rasio yang masih memadai atau cukup ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas fasilitas pelayanan pendidikan dasar pada setiap kecamatan telah memadai.

Rasio Guru/Murid

Rasio Guru/Murid pada jenjang SD/MI tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 1:18. Sedangkan rasio guru/murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 1:18. Jika dilihat dari rasio ideal guru per murid yaitu satu guru untuk 32 siswa, maka jumlah guru di Kabupaten Kebumen secara agregat telah tercukupi. Kondisi rasio guru terhadap murid Kabupaten Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.42
Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
Jumlah Guru	8.975	8.957	8.957	7.997	6,855
Jumlah Murid	131.337	130.002	130.002	129.091	125,585
Rasio Guru/Murid	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 17	1:18
SMP/MTs					
Jumlah Guru	4.536	4.263	4.263	4.147	3.362
Jumlah Murid	63.192	62.293	62.293	61.061	61,109
Rasio Guru/Murid	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 16	1:18

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Rasio Guru Per Murid Per Kelas Rata-Rata

Rasio Kelas/Guru pada jenjang SD/MI tahun 2020 adalah 1:1,47, sedangkan pada jenjang SMP/MTs tahun 2020 adalah 1:1,48. Rasio Kelas/Murid pada jenjang SD/MI tahun 2020 adalah 1:26, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas/Murid yaitu 32 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SD/MI telah mencukupi. Adapun rasio Kelas/Murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2020 adalah 1:27, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas/Murid yaitu 36 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SMP/MTs telah mencukupi. Kondisi rasio guru dan murid terhadap kelas di Kabupaten Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.43
Rasio Guru Per Kelas Rata-Rata Terhadap Murid
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
Jumlah Guru	8.975	8.957	8.957	7.997	6.855
Jumlah kelas	5.997	5.932	5.932	5.867	4.659
Rasio Kelas/Guru	1: 1,49	1 : 1,50	1 : 1,51	1 : 1,51	1:1,47
Jumlah Murid	131.337	130.002	130.002	129.091	125,585
Rasio Kelas/Murid	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1:26
SMP/MTs					
Jumlah Guru	3.366	3.364	3.363	3.361	3.362
Jumlah Kelas	2.192	2.227	2.227	2.259	2.259
Rasio Kelas/ Guru	1 : 1,53	1 : 1,51	1 : 1,51	1 : 1,48	1:1,48
Jumlah Murid	63.192	62.293	62.293	61.061	61.109
Rasio Kelas/Murid	1 : 29	1 : 28	1 : 28	1 : 27	1:27

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Tabel 2.44
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020 Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Rasio Guru dan Murid SD/MI					Rasio Guru dan Murid SMP/MTs				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayah	1:17	1:17	1:17	1:19	1:19	1:11	1:11	1:11	1:17	1:13
2	Buayan	1:17	1:17	1:17	1:20	1:20	1:20	1:21	1:21	1:24	1:20
3	Puring	1:18	1:18	1:17	1:19	1:20	1:16	1:16	1:16	1:21	1:17
4	Petanahan	1:15	1:15	1:15	1:17	1:17	1:11	1:13	1:13	1:16	1:16
5	Klirong	1:17	1:16	1:17	1:19	1:19	1:13	1:15	1:15	1:16	1:13
6	Buluspesantren	1:16	1:16	1:16	1:17	1:17	1:13	1:14	1:14	1:18	1:15
7	Ambal	1:18	1:17	1:17	1:20	1:20	1:15	1:15	1:15	1:18	1:15
8	Mirit	1:13	1:13	1:13	1:15	1:15	1:12	1:13	1:13	1:23	1:14
9	Prembun	1:13	1:13	1:13	1:16	1:16	1:13	1:15	1:15	1:17	1:15
10	Kutowinangun	1:14	1:14	1:14	1:16	1:16	1:14	1:15	1:15	1:19	1:15
11	Alian	1:17	1:17	1:16	1:18	1:18	1:14	1:14	1:14	1:19	1:14
12	Kebumen	1:18	1:17	1:17	1:19	1:19	1:16	1:16	1:15	1:18	1:17
13	Pejagoan	1:17	1:16	1:16	1:20	1:20	1:15	1:15	1:15	1:21	1:15
14	Sruweng	1:16	1:16	1:16	1:17	1:17	1:14	1:15	1:15	1:20	1:15
15	Adimulyo	1:14	1:14	1:14	1:15	1:15	1:14	1:15	1:15	1:18	1:19
16	Kuwarasan	1:17	1:17	1:17	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:22	1:19
17	Rowokele	1:19	1:19	1:19	1:19	1:19	1:18	1:20	1:20	1:23	1:16
18	Sempor	1:17	1:17	1:16	1:18	1:18	1:17	1:19	1:19	1:19	1:19
19	Gombong	1:17	1:17	1:17	1:20	1:20	1:17	1:17	1:17	1:18	1:17
20	Karanganyar	1:16	1:15	1:15	1:17	1:17	1:18	1:19	1:19	1:19	1:18
21	Karanggayam	1:18	1:18	1:17	1:18	1:18	1:14	1:12	1:12	1:19	1:15
22	Sadang	1:17	1:16	1:16	1:17	1:17	1:13	1:13	1:13	1:18	1:13
23	Bonorowo	1:11	1:11	1:11	1:14	1:14	1:11	1:16	1:16	1:18	1:14
24	Padureso	1:13	1:13	1:13	1:16	1:16	1:09	1:10	1:10	1:18	1:10

No	Kecamatan	Rasio Guru dan Murid SD/MI					Rasio Guru dan Murid SMP/MTs				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
25	Poncowarno	1:14	1:13	1:13	1:15	1:15	1:14	1:13	1:13	1:14	1:12
26	Karangsambung	1:17	1:17	1:17	1:19	1:19	1:14	1:15	1:15	1:17	1:16

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data rasio jumlah guru per murid pada jenjang pendidikan dasar, didapatkan gambaran rasio guru dengan murid di Kebumen tahun 2020 jenjang SD/MI dan SMP/MTs telah di atas rasio ideal. Standar ideal rasio guru/murid untuk jenjang SD/MI adalah 1:29 sementara untuk jenjang SMP/MTs adalah 1:24, sedangkan kondisi di Kabupaten Kebumen menunjukkan rasionya termasuk kategori ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan dasar pada setiap kecamatan telah memadai. Capaian di atas rasio ideal tersebut di dukung dengan banyaknya guru tidak tetap yang bekerja di SD/MI dan SMP/MTs sekolah negeri.

Rasio Guru Per Sekolah

Rasio Guru terhadap sekolah di Kebumen tahun 2016 sebesar 1:9,84 dan tahun 2020 sebesar 1:7,85. Rasio guru per sekolah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir rata-rata dalam satu sekolah dasar memiliki 9 orang guru, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 7-8 orang guru. Sedangkan rasio pendidikan SMP/MTs tahun 2016 sebesar 1:22,68 dan tahun 2020 sebesar 1:15,93 Rasio guru per sekolah dalam kurun 3 waktu terakhir rata-rata memiliki guru sebanyak 20-22 orang dan menurun pada tahun 2020 sebesar 1:16. Salah satu penyebab menurunnya rasio guru disebabkan karena banyaknya guru yang pensiun dan belum ada penambahan guru PNS baru. Secara rinci rasio guru per sekolah dapat dilihat dalam tabel berikut .

Tabel 2.45
Rasio Guru Per Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
Jumlah Guru	8.975	8.957	8.957	7.997	6,855
Jumlah Sekolah	912	911	916	885	873
Rasio	1:9,84	1:9,83	1:9,77	1:9,03	1:7,85
SMP/MTs					
Jumlah Guru	4.536	4.263	4.263	4.174	3.362
Jumlah Sekolah	200	202	202	204	211
Rasio	1:22,68	1:21,10	1:20,69	1:20,46	1:15,93

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Persentase Kelulusan Siswa

Persentase kelulusan di Kebumen pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan angka yang cukup baik, pada tahun 2020 seluruh siswa jenjang pendidikan dasar lulus sekolah. Artinya kualitas pembelajaran di Kabupaten Kebumen untuk jenjang pendidikan dasar dalam kondisi baik.

Tabel 2.46
Persentase Kelulusan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
Jumlah Siswa Lulus Sekolah	21.279	20.640	20.640	21.250	21,285
Jumlah Seluruh Siswa Kelas VI	21.589	20.979	20.979	21.257	21,285
Persentase Kelulusan Siswa (%)	98,56	98,38	98,38	99,97	100,00
SMP/MTs					
Jumlah Siswa Lulus Sekolah	20.718	20.328	20.328	20.366	19,753
Jumlah Seluruh Siswa Kelas IX	21.638	20.976	20.976	20.373	19,753
Persentase Kelulusan Siswa (%)	95,75	96,91	96,91	99,97	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan SIPD semester 1, 2021

Akreditasi Sekolah

Jumlah sekolah SD/MI yang terakreditasi di Kebumen tahun 2016 sebanyak 790 sekolah dan tahun 2020 sebanyak 770 sekolah. Berkurangnya jumlah sekolah karena dilakukan *regrouping* pada jenjang SD untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Di tahun 2020 masih ada 2 sekolah yang belum terakreditasi menunggu penjadwalan. Persentase SD terakreditasi selama kurun waktu lima tahun terakhir cukup baik.

Tabel 2.47
Kondisi Sekolah Terakreditasi jenjang SD/MI Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Akreditasi	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Total Sekolah	802	801	801	771	772
Jumlah Sekolah Terakreditasi	790	782	785	737	770
Persentase Sekolah Terakreditasi	98,50%	97,63%	98,00%	95,59%	99,66%

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

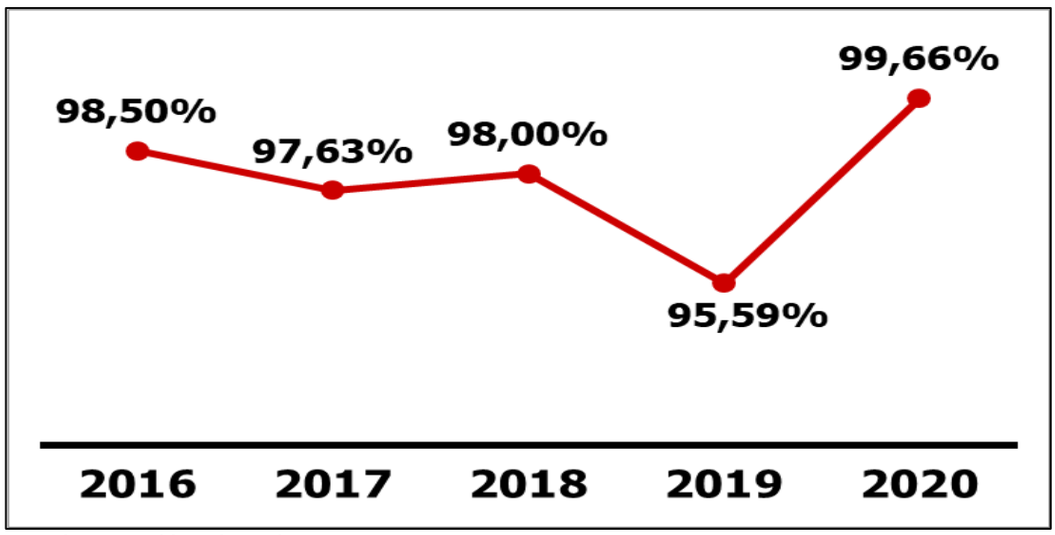

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.39
Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SD/MI Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Akreditasi sekolah jenjang SLTP/MTs di Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebanyak 113 sekolah telah terakreditasi. Jumlah akreditasi A sebanyak 53 sekolah, yang terakreditasi B sejumlah 35 sekolah, sejumlah 25 sekolah berakreditasi C dan terdapat 1 sekolah tidak terakreditasi, dan 6 sekolah belum terakreditasi.

Tabel 2.48
Kondisi Sekolah Terakreditasi Jenjang SLTP/MTs Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Akreditasi	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Terakreditasi	103	102	111	108	113
Jumlah Sekolah	112	114	116	116	119
Persentase Sekolah Terakreditasi	91,96%	89,47%	95,69%	93,10%	94,96%

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020

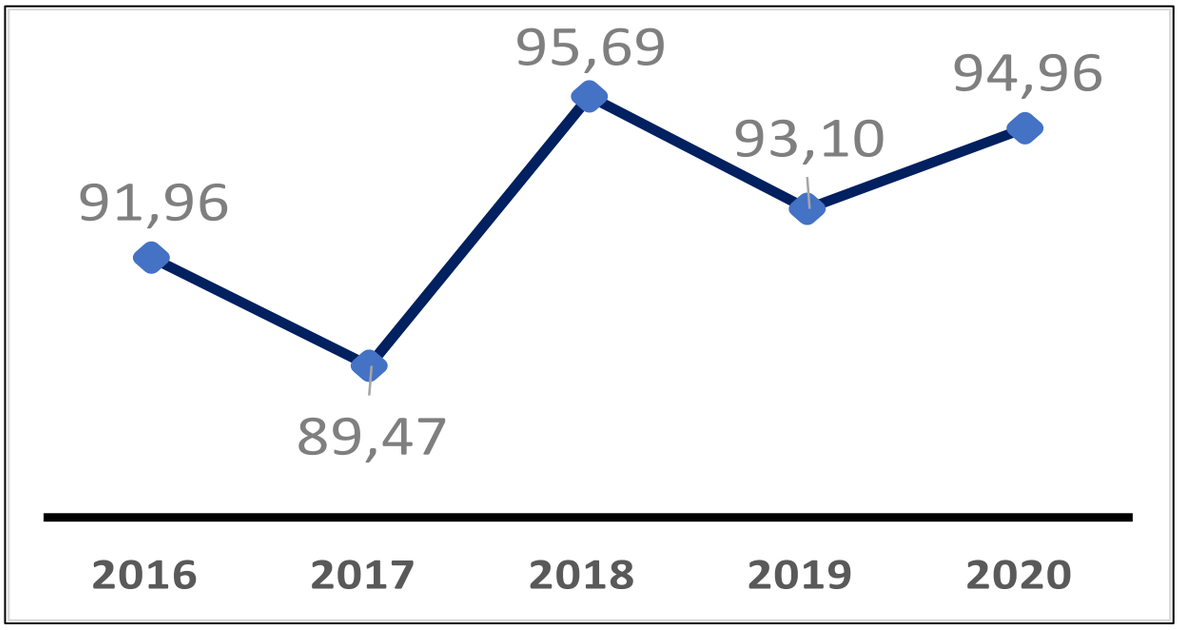

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.40
Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SLTP/MTs
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik

Persentase ruang kelas kondisi baik tahun 2020 untuk jenjang SD/MI sebesar 1.223 buah, ruang kelas dalam kondisi rusak berat 605 buah dan kondisi rusak ringan 3.523 buah. Sedangkan untuk SMP/MTs jumlah kondisi baik sebanyak 795 buah, ruang kelas dalam kondisi rusak berat sebanyak 80 buah dan rusak ringan sebanyak 1.213 buah. Kondisi ruang kelas jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen mayoritas dalam kondisi rusak ringan untuk SD/MI 61,05% dan SMP/MTs sebesar 53,69% . Kondisi ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Kondisi Ruang Kelas Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD / MI					
Jumlah seluruh ruang kelas	5.863	6.026	6.026	5.867	5.771
Jumlah ruang kondisi baik	1.407	1.507	1.326	1.173	1.223
Jumlah ruang kondisi rusak ringan	3.342	3.616	3.676	3.579	3.523
Ruang rusak sedang	410	458	446	463	420
Jumlah ruang kelas rusak berat	704	446	578	651	605
% kondisi baik	24,00	25,01	22,00	19,99	21,19
% rusak ringan	57,00	60,01	61,00	61,00	61,05
% rusak sedang	6,99	7,60	7,40	7,89	7,27

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
% rusak berat	12,01	7,40	9,59	11,10	10,48
SMP/MTs					
Jumlah seluruh ruang kelas	2.281	2.296	2.296	2.259	2.259
Jumlah ruang kondisi baik	760	792	822	770	795
Jumlah ruang kondisi rusak ringan	1.364	1.306	1.336	1.290	1.213
Ruang rusak sedang	43	106	69	115	171
Jumlah ruang kelas rusak berat	77	92	69	84	80
% kondisi baik	34,19	35,63	36,98	34,64	35,19
% rusak ringan	61,36	58,75	60,10	58,03	53,69
% rusak sedang	1,93	4,77	3,10	5,17	7,56
% rusak berat	3,46	4,14	3,10	3,78	3,54

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat penting. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum, derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus Balita Gizi Buruk (BGB), Balita Kurang Gizi (BKG), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Oleh karena itu, AHH memiliki korelasi yang sangat erat dengan Angka Kematian Bayi atau *infant mortality rate* (AKB/IMR). Kemudian angka kematian bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonatal dan status gizi bayi (0-11 bulan). Secara umum capaian kinerja bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	% Balita Gizi Kurang	0,31%	0,28 %	0,29%	0,80%	0,50%
2	% Balita Gizi Buruk	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
3	Ibu hamil KEK	0,63%	0,63%	0,67%	8,97%	8,26%
4	Angka Melahirkan Ibu Hamil		19.583	19.812	19.629	19.526
5	AKI (per 100.000 kelahiran hidup)	80,01	61,38	50,52	45,85	76,73
6	Angka Kelahiran Bayi		19.697	19.952	19.774	19.690
7	AKB (per 1.000 kelahiran hidup)	8,95	7,21	6,76	6,92	6,95
8	AHH	72,87	72,98	73,11	73,22	73,40
9	Cakupan Ibu hamil K1	100,00	100,00%	100,00%	100,00	100,00
10	Cakupan Ibu hamil K4	94,19	95,50%	96,15%	99,89%	99,93%
11	Cakupan persalinan oleh Nakes	99,74	99,77%	99,86%	99,91%	99,95%
12	Jumlah penderita Stunting	-	-	5019	14.057	10.484
13	Jumlah Desa ODF	36	67	109	422	460

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu yang merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi di Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2018 cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan sebelum kelahiran, status gizi ibu hamil yang semakin baik, kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial

masyarakat. Namun AKB pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari 6,92% menjadi 6,95% pada tahun 2020 meskipun jumlah kasus kematian yang sama (136 kasus), persentasenya lebih tinggi karena jumlah kelahiran hidup yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penyebab kematian bayi salah satunya disebabkan pandemi Covid-19 yang memicu keadaan kesehatan ibu hamil dan bayi tidak maksimal mendapatkan pelayanan kesehatan karena pembatasan melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan dan persalinan serta sosial ekonomi masyarakat sehingga status gizinya menurun. Selain itu penyebab kematian bayi pada tahun 2020 yaitu berat badan lahir rendah, asfiksia atau gagal nafas, infeksi, cacat bawaan, dan penyakit penyerta lainnya. Angka kematian bayi Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

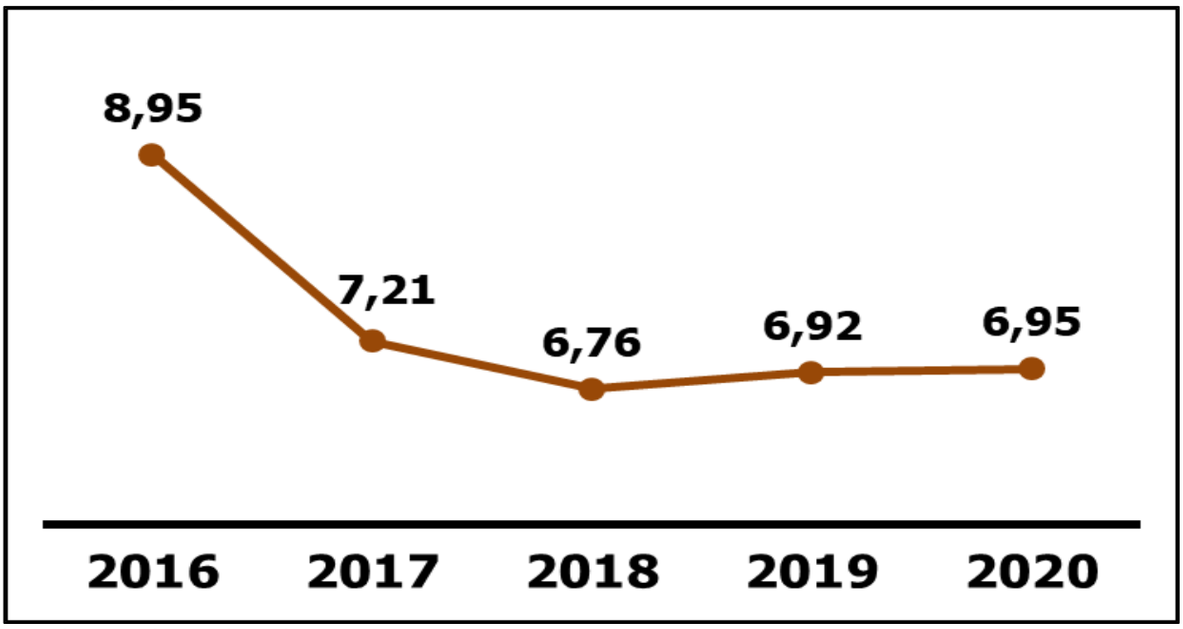

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.41
Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tabel 2.51
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayah	5	5	5	10	4
2	Buayan	8	5	2	2	3
3	Puring	8	14	6	6	3
4	Petanahan	11	14	6	4	4
5	Klirong	7	9	12	8	9
6	Buluspesantren	13	5	5	9	3
7	Ambal	13	10	11	10	11
8	Mirit	9	7	7	6	7
9	Bonorowo	1	3	3	4	3
10	Prembun	6	4	8	4	5
11	Kutowinanangun	1	4	7	2	7
12	Alian	9	5	6	6	3
13	Padureso	4	2	4	3	2
14	Poncowarno	5	2	0	6	2
15	Kebumen	11	10	5	10	14
16	Pejagoan	1	3	0	1	1
17	Sruweng	7	5	4	7	10
18	Adimulyo	8	2	2	0	3
19	Kuwarasan	7	2	4	5	7

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
20	Rowokele	6	6	6	4	4
21	Sempor	10	8	4	6	6
22	Gombong	3	3	2	4	4
23	Karanganyar	2	0	0	1	5
24	Karanggayam	11	6	14	9	6
25	Sadang	4	5	4	2	2
26	Karangsambung	9	2	7	7	8
Total		179	141	134	136	136

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data per kecamatan didapatkan gambaran kecenderungan angka kematian bayi tinggi selama kurun waktu 2016-2020 antara lain Kecamatan Kebumen, Ambal, dan Karanggayam. Ketiga kecamatan tersebut hampir selalu menempati jumlah kasus kematian bayi tertinggi selama 2016-2020. Faktor penyebab kematian bayi secara umum disebabkan oleh keterlambatan penanganan, penyakit penyerta, kondisi kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta status gizi ibu dan bayi. Upaya penurunan AKB antara lain melalui peningkatan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mengetahui adanya kelainan, penyakit, pemeliharaan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas bayi. Selain itu pendampingan kelas ibu dan balita, optimalisasi peran Posyandu, intervensi gizi terhadap bayi, termasuk penanganan kasus gizi buruk.

Angka Harapan Hidup (AHH)

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari Angka Harapan Hidup masyarakat. AHH tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, artinya derajat kesehatan masyarakat semakin baik. Masyarakat memiliki peluang hidup yang lebih panjang dan sehat. Meskipun peningkatan AHH berkontribusi pada peningkatan proporsi penduduk usia lanjut karena kondisi kesehatan yang semakin baik. Pemerintah seharusnya menyusun kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat usia lanjut agar tetap produktif.

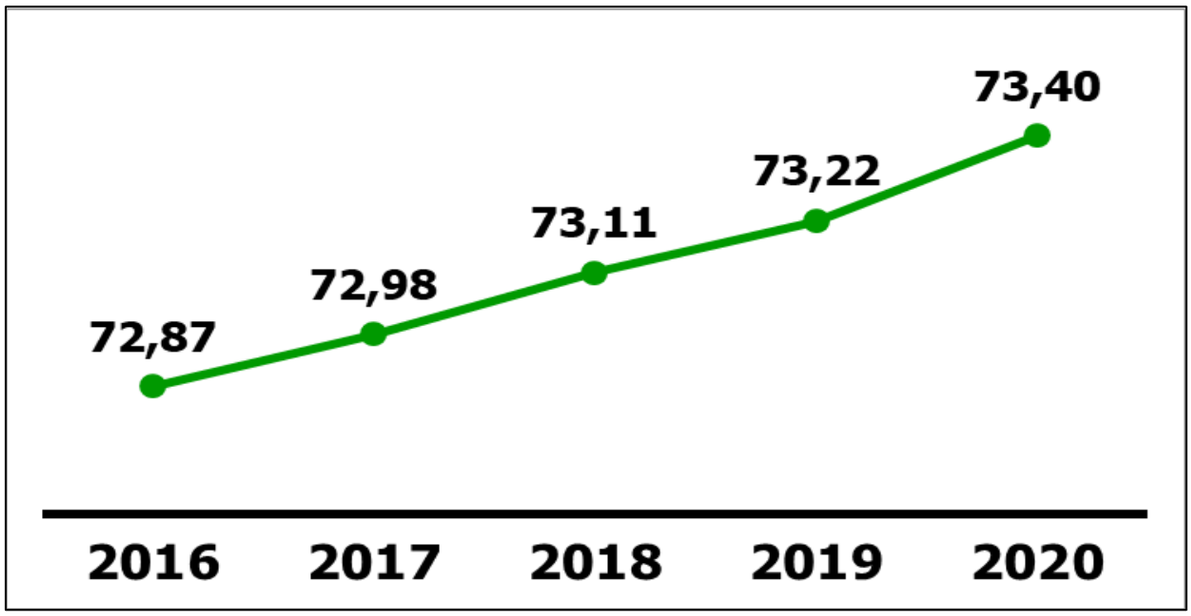

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.42
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, Kabupaten Kebumen telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup sebesar 0,53 tahun. Pada tahun 2016 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kebumen 72,87 tahun dan pada tahun 2020 Angka Harap Hidup 73,40 tahun.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan dari 80,10 di 2016 menjadi 45,85 pada 2019. Namun pada 2020 AKI Kabupaten meningkat tajam menjadi 76,73. Kematian ibu menunjukkan jumlah wanita yang meninggal dikarenakan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas. Peningkatan kematian ibu pada tahun 2020 disebabkan perdarahan, eklamsia, *covid*-19 dan penyakit lainnya. Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

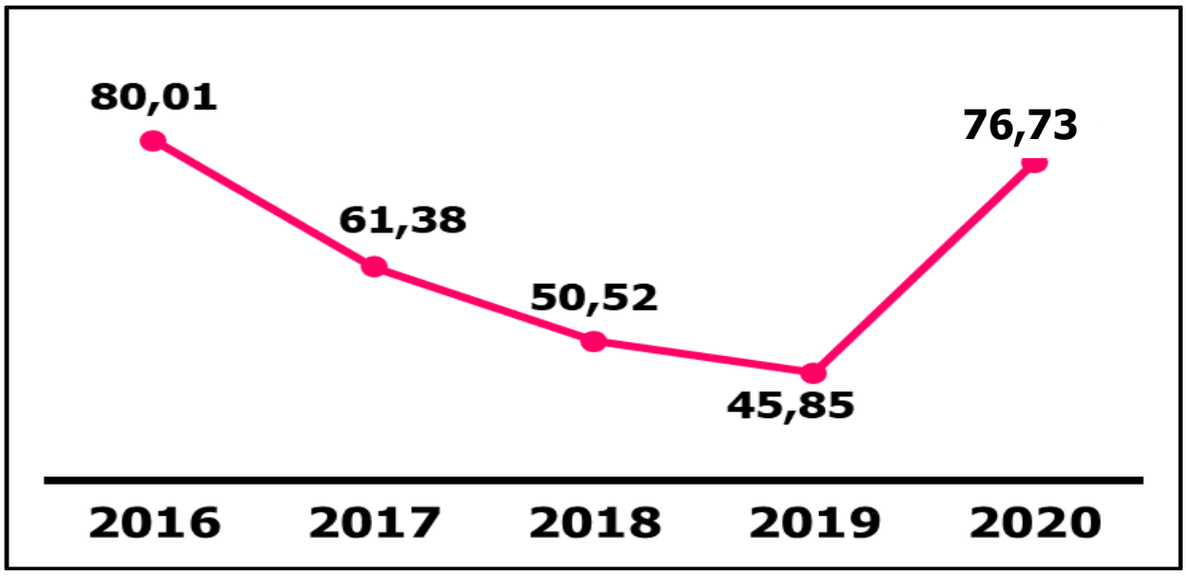

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.43
Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Salah satu upaya dalam menurunkan angka kematian ibu adalah dengan menurunkan prevalensi ibu hamil KEK, untuk mengurangi resiko komplikasi pada saat kehamilan. Persentase ibu hamil KEK pada tahun 2019 sebesar 8,97% menjadi 8,26% pada tahun 2020. Penururun ibu hamil KEK terkait dengan pemberian PMT ibu hamil, bimbingan bagi calon pengantin dan adanya kelas ibu hamil. Persentase ibu hamil KEK Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

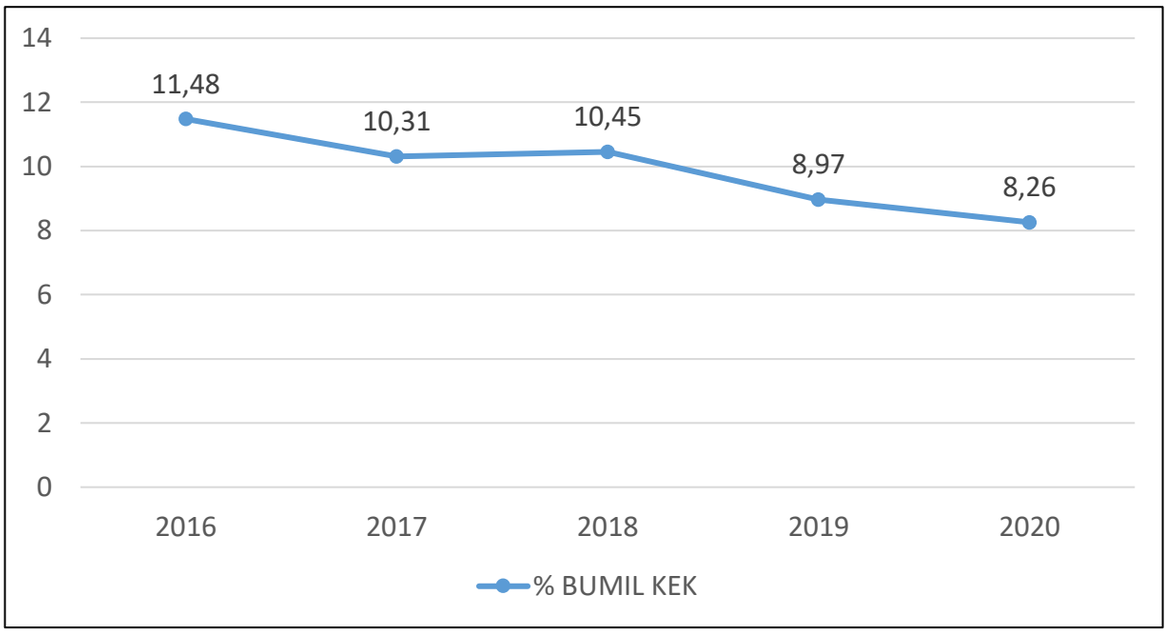

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.44
Persentase Ibu Hamil KEK Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tabel 2.52
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayah	1	0	1	0	2
2	Buayan	0	0	1	0	0
3	Puring	0	1	1	0	0
4	Petanahan	1	1	0	1	1
5	Klirong	0	1	1	1	0
6	Buluspesantren	2	1	0	0	0
7	Ambal	3	1	1	1	0
8	Mirit	0	0	0	0	0
9	Bonorowo	0	0	0	0	0
10	Prembun	1	1	0	1	0
11	Kutowinanangun	0	0	0	0	1
12	Alian	1	1	0	1	2
13	Padureso	0	0	0	0	0
14	Poncowarno	0	0	0	0	0
15	Kebumen	3	1	2	1	0
16	Pejagoan	1	2	0	1	1
17	Sruweng	0	2	0	1	1
18	Adimulyo	0	0	0	0	0
19	Kuwarasan	1	0	0	0	2
20	Rowokele	0	0	0	0	1
21	Sempor	1	0	1	0	1
22	Gombong	0	0	0	0	1
23	Karanganyar	0	0	0	0	0
24	Karanggayam	0	0	2	0	1
25	Sadang	1	0	0	0	1
26	Karangsambung	0	0	0	1	0
Total		16	12	10	9	15

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data per kecamatan didapatkan gambaran kecenderungan terjadi kasus angka kematian ibu selama 2016-2019 antara lain Kecamatan Kebumen, Ambal, Pejagoan, dan Prembun. Namun pada tahun 2020 kasus kematian ibu terjadi pada 12 Kecamatan. Faktor penyebab kematian ibu antara lain disebabkan oleh penyakit penyerta, keterlambatan penanganan, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Penyebab kematian ibu melahirkan dan nifas lainnya adalah pendarahan, hipertensi, infeksi, dan pengetahuan ibu hamil mengenai jaga jarak kelahiran, maupun usia ideal hamil dan melahirkan. Ketersediaan layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial/ Emergensi Komprehensif) dalam rangka penyelamatan ibu dan anak baru lahir melalui program rujukan berencana dalam satu wilayah masih terbatas. Kabupaten Kebumen baru memiliki 2 fasilitas layanan PONEK yaitu RSU dr. Soedirman dan RSU PKU Gombong.

Angka Kematian Ibu salah satunya dapat ditekan dengan pertolongan ibu bersalin oleh tenaga kesehatan. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 99,74 persen meningkat menjadi 99,95 persen di tahun 2020. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	19.968	19.538	19.784	19.610	19.518
Jumlah total Ibu Bersalin	20.020	19.583	18.812	19.626	19.526
Persentase (%)	99,74	99,77	99,86	99,91	99,95

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Status Gizi

Selain AKI dan AKB, status gizi masih menjadi permasalahan. Hal ini ditandai masih ditemukannya kasus gizi kurang, gizi buruk dan tingginya angka stunting. Kecukupan gizi menjadi salah satu hal yang penting guna mempersiapkan generasi sumberdaya manusia yang gemilang di masa yang akan datang. Pemenuhan gizi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemberian makanan tambahan dan vitamin, namun perlu upaya edukasi dalam pola asuh anak mulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Optimalisasi peran Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Posyandu sebagai wadah edukasi pada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan, selain itu kader kesehatan menjadi *agent screening* awal kejadian kasus di sekitarnya.

Persentase balita gizi kurang pada tahun 2016 mencapai 0,31% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,80%, dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 0,50%. Kasus balita gizi kurang disebabkan karena faktor ekonomi yang mengakibatkan asupan nutrisi yang diberikan kepada bayi kurang, penyakit penyerta pada bayi. Faktor lain yang paling penting adalah pola asuh. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah 0,01%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,02%. Kasus balita gizi buruk terjadi karena adanya penyakit penyerta pada bayi seperti penyakit jantung bawaan, cacat bawaan terkait alat pencernaan, TBC, HIV, Hidrocepalus.

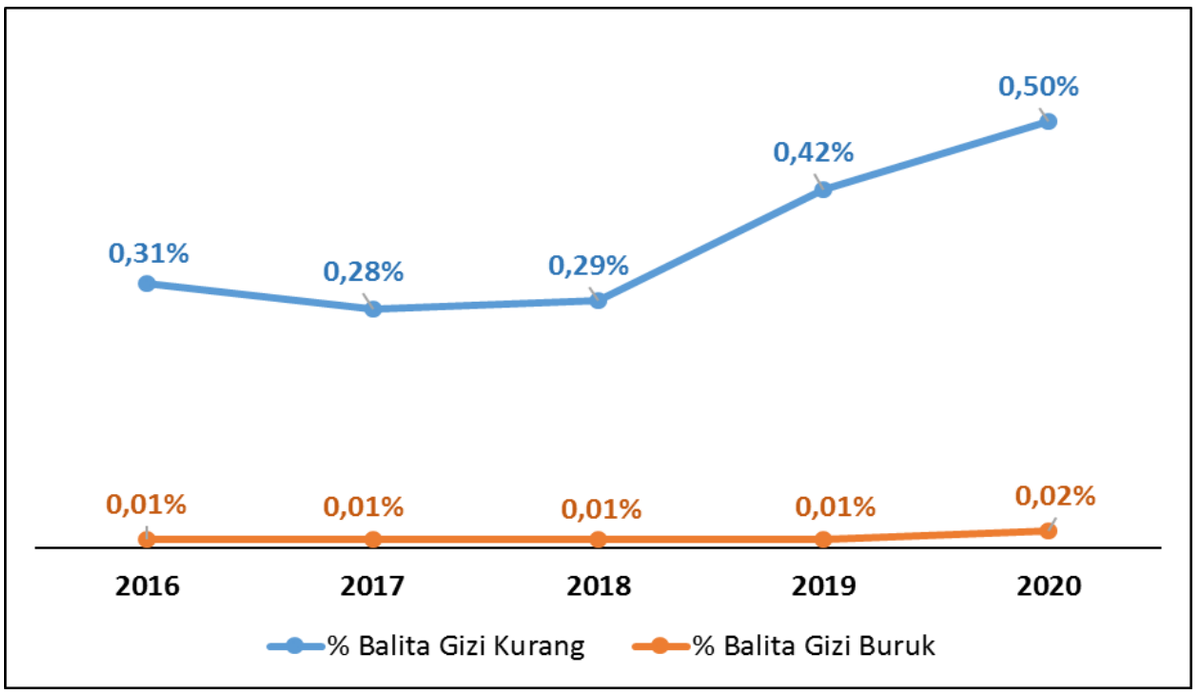

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.45
Persentase Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang Tahun 2016-2020

Isu stunting adalah isu strategis bidang kesehatan yang juga harus menjadi perhatian seluruh pihak karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Stunting disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang terkait dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2020 berdasarkan data ePPGBM tercatat 15,34 persen anak termasuk dalam kriteria stunting di Kabupaten Kebumen. Penanganan stunting telah melibatkan seluruh *stakeholder* mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Besarnya prevalensi stunting menjadikan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten prioritas nasional dalam penanganan stunting. Pada tahun 2017 prevalensi stunting sebesar 28,5% dan setelah dilakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif jumlahnya berangsur menurun hingga prevalensinya pada tahun 2020 sebesar 15,34%. Penanganan stunting telah melibatkan seluruh *stakeholder* mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Besarnya prevalensi stunting pada tahun 2017 menjadikan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten prioritas nasional dalam penanganan stunting dan dalam kurun waktu 3 tahun mampu menurunkan prevalensi stunting sebanyak 13,16%.

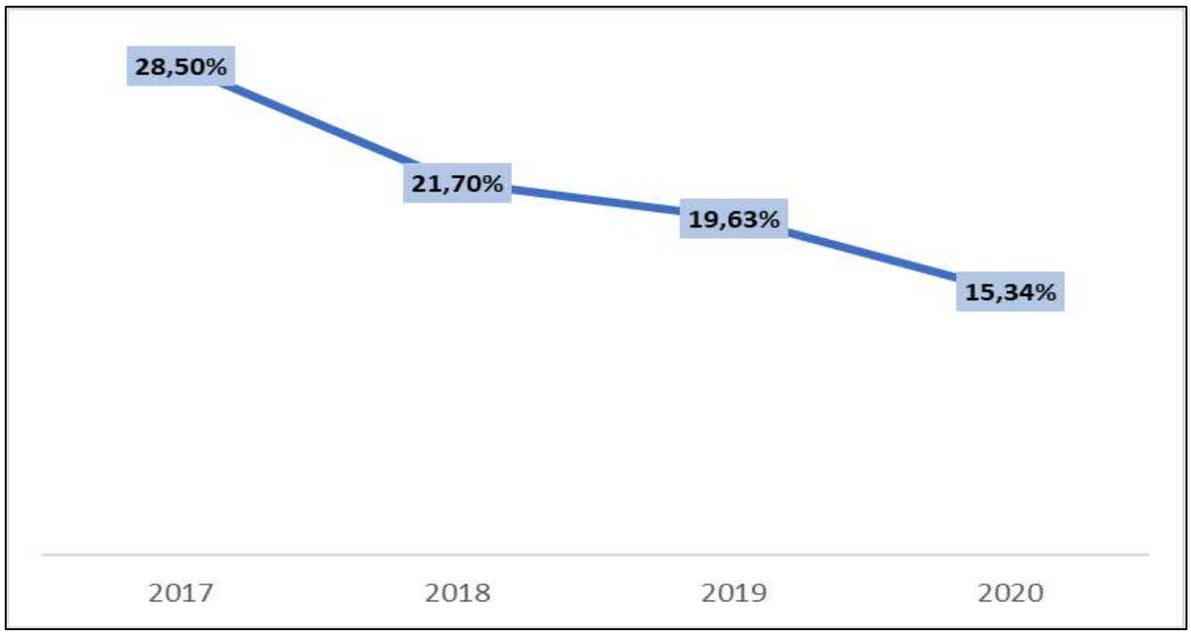

Gambar 2.46
Angka Stunting Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Angka Kesakitan

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya). Pada tahun 2016, angka kesakitan belum tersedia data pilah gender. Angka kesakitan Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 cukup fluktuatif. Hasil Susenas 2020 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 21,52, dengan angka kesakitan laki-laki sebesar 19,85 dan angka kesakitan perempuan 23,17 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 20,19. Jika melihat pada perkembangan angka kesakitan Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2017-2020. Angka Kesakitan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Semakin tinggi Angka Kesakitan menunjukkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.54
Perkembangan Angka Kesakitan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Angka Kesakitan	46,04	12,91	13,16	20,19	21,52
laki-laki	Na	13,57	13,07	19,5	19,85
perempuan	Na	12,25	13,24	20,86	23,17

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, 2021

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pengendalian penyakit baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Prevalensi penyakit menular utama di Kebumen adalah kasus HIV/AIDS, TB, dan Demam Berdarah di Kebumen masih tinggi. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran akan kesehatan reproduksi, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan yang tidak sehat.

Tabel 2.55
Perkembangan Kasus Penyakit Menular Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Case Notification Rate semua kasus TB per 100.000 penduduk	135	156	145	180	99
Kasus baru HIV AIDS	178	267	219	184	227
Angka Kesakitan DBD	52,7	4,26	3,0	17,8	12

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Perkembangan penemuan HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah kasus terbesar ada di Kecamatan Gombong, Kebumen, Alian, dan Buayan. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kebumen termasuk yang terbesar di wilayah Jawa Tengah. Sebaran kasus HIV/AIDS per kecamatan adalah sebagai berikut:

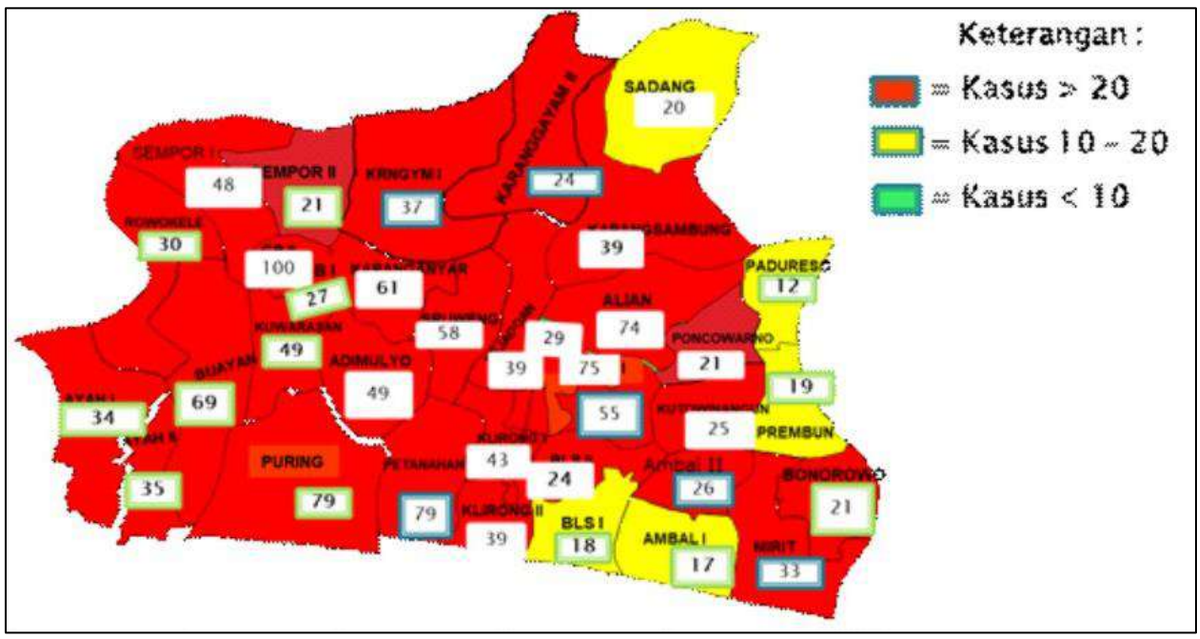

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.47
Sebaran Kasus HIV/AIDS per Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Kasus persebaran penyakit TB yang terdaftar dan diobati serta angka kesakitan DBD berdasarkan kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Perkembangan Kasus Penyakit Menular (TB dan DBD) per Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD
1	Ayah	24	19	16	4	28	6	36	2	53	7
2	Buayan	20	118	16	2	27	4	53	9	59	11
3	Puring	34	44	14	0	27	0	48	5	62	1
4	Petanahan	22	3	29	2	37	0	26	2	69	7
5	Klirong	10	20	11	3	22	1	16	6	78	8
6	Buluspesantren	6	5	7	14	11	1	28	0	92	4
7	Ambal	13	14	30	0	30	0	39	2	67	5
8	Mirit	16	4	32	0	14	0	17	26	57	4
9	Bonorowo	23	21	19	0	22	0	20	7	24	2
10	Prembun	8	0	7	0	8	0	12	14	37	7
11	Kutowinanangun	28	5	12	1	14	1	21	3	45	0
12	Alian	15	16	20	1	41	1	28	10	86	7
13	Padureso	1	2	8	1	9	1	4	14	15	9

No	Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD
14	Poncowarno	7	1	8	0	9	0	9	1	12	3
15	Kebumen	1276	34	1417	6	1476	6	1950	26	222	10
16	Pejagoan	19	5	19	5	14	5	23	10	82	2
17	Sruweng	7	16	17	0	18	0	9	13	67	3
18	Adimulyo	10	7	10	3	11	3	27	6	67	3
19	Kuwarasan	11	0	16	2	30	2	26	12	64	18
20	Rowokele	17	11	18	0	13	1	9	4	56	2
21	Sempor	32	88	27	5	31	7	39	21	100	12
22	Gombong	16	124	29	15	17	6	18	12	81	26
23	Karanganyar	18	27	21	1	18	1	17	14	39	2
24	Karanggayam	25	3	35	4	33	0	36	14	59	0
25	Sadang	8	0	1	1	8	0	19	2	28	0
26	Karangsambung	11	13	8	1	17	0	20	8	57	4
	Total	1.677	588	1.847	58	1985	41	2550	247	1678	157

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Upaya yang telah dilakukan untuk menekan Angka Kesakitan penyakit menular adalah dengan menggiatkan konseling dan penyuluhan, screening calon pengantin, pemeriksaan VCT di Puskesmas dan rumah sakit, serta bekerjasama dengan NGO dalam pengawasan minum obat dan penemuan kasus baru untuk TB. Deteksi dini menjadi hal yang penting dalam penanganan HIV/AIDS dan TB yang seperti fenomena gunung es penyakit yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari estimasi kasus yang ada di masyarakat.

Pola hidup masyarakat yang kurang sehat dan rendahnya kesadaran untuk menjaga kebugaran dengan berolahraga meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, stroke, jantung, kanker dan diabetes. Selain itu kebiasaan merokok menjadi salah satu pemicu penyakit tidak menular seperti gangguan pernafasan, kanker, penyakit paru dan jantung. Peningkatan kasus penyakit tidak menular menimbulkan dampak ekonomi dan produktivitas karena kasus PTM ditemukan pada penduduk usia produktif. Cakupan pemeriksaan PTM oleh tenaga kesehatan baru dilakukan ketika sudah dalam kondisi lanjut, upaya preventif untuk PTM masih kurang.

Optimalisasi Posbindu di desa, Puskesmas, maupun di lingkungan kerja menjadi salah satu upaya yang telah dilaksanakan. Jumlah Posbindu PTM di Kabupaten Kebumen sebanyak 500 pos tersebar di seluruh kecamatan. *Screening* PTM menjadi hal yang terus digalakkan melalui pendekatan keluarga. Peningkatan kasus PTM mengakibatkan penurunan produktivitas penduduk dan berdampak pada kondisi ekonomi daerah. Selain itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi salah satu gerakan promotif preventif yang seyogyanya menjadi budaya bagi masyarakat demi generasi yang sehat dan unggul. Data penyakit tidak menular tersaji dalam tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 2.57
Penyakit Tidak Menular Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ca servik	6	45	444	34	138
2	Ca Mamae	40	243	380	245	356
3	Ca Hepar	4	12	9	Na	Na
4	Ca Paru	2	11	11	Na	Na
5	ID DM	210	273	915	500	782
6	ND DM	1.586	7.001	48.824	10221	11902
7	AMI	14	148	168	129	258
8	Dekom Kordis	190	871	1.019	993	1118
9	Hemoragik	40	552	297	2431	1776

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
10	Non-Hemoragik	132	1.496	1.322		
11	PPOK	175	1.877	1.755	1700	1356
12	Asma Bronkial	1.101	3.214	3.274	2500	1614
13	Psikosis	589	406	904	Na	Na
14	Hipertensi	Na	Na	Na	90706	75469
15	Diabetes	Na	Na	Na	10721	12684
16	Tumor Benjolan	Na	Na	Na	35	38
17	ODGJ	Na	Na	Na	3970	3465
18	Iva positif	Na	Na	Na	88	48

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Kesehatan Lingkungan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu strategi dalam menjaga kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan mempengaruhi tingginya kasus stunting di Kebumen. Akses air minum perpipaan dan sanitasi yang baik meminimalisir infeksi yang mungkin terjadi pada masyarakat termasuk Ibu dan anak. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memfasilitasi akses air minum baik melalui Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pedesaan maupun air minum yang disediakan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada Tahun 2020 jumlah rumah tangga mengakses SPAM Pedesaan sebanyak 20.764 rumah tangga dan jumlah rumah tangga yang mengakses air minum dari PDAM sebanyak 2.681 rumah tangga sehingga akses air minum perpipaan sebesar 15,36 % dari jumlah rumah tangga 347.988 rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mencapai target *Open Defecation Free* (ODF). Jumlah desa ODF di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 adalah 45 desa dan untuk tahun 2020 adalah 460 desa/kelurahan (100%). Angka ODF 100% menggambarkan akses sanitasi yang baik. Meskipun demikian, Kabupaten Kebumen masih perlu meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

Tabel 2.58
Data akses Air Minum Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga mengakses SPAM Perdesaan	7.777	11.531	13.813	16.972	20.764
Jumlah rumah tangga mengakses PDAM	23.539	25.563	29.033	30.678	2.681
Jumlah rumah tangga	344.667	345.494	346.323	347.155	347.988
Akses Air Minum Perpipaan	9,09%	10,74%	12,37%	13,73%	15,36%

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, data diolah,2021

Tabel 2.59
Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen Sampai dengan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa				
		s/d 2016	2017	2018	2019	s/d 2020
1	Ayah	0	0	5	13	18
2	Buayan	0	5	4	5	20
3	Puring	1	2	5	15	23
4	Petanahan	1	3	4	13	21
5	Klirong	4	3	7	11	24
6	Buluspesantren	5	2	8	7	21
7	Ambal	4	4	8	16	32
8	Mirit	2	2	0	18	22

No	Kecamatan	Jumlah Desa				
		s/d 2016	2017	2018	2019	s/d 2020
9	Bonorowo	1	0	2	8	11
10	Prembun	0	5	5	3	13
11	Padureso	3	1	2	3	9
12	Poncowarno	4	1	1	4	11
13	Kutowinangun	1	1	7	10	19
14	Alian	1	1	3	11	16
15	Kebumen	1	8	11	9	29
16	Adimulyo	3	4	0	16	23
17	Pejagoan	1	4	4	4	13
18	Sruweng	3	2	5	11	21
19	Kuwarasan	4	9	3	6	22
20	Rowokele	2	0	3	6	11
21	Sempor	0	0	8	2	16
22	Gombong	1	7	6	0	14
23	Karanganyar	2	3	3	3	11
24	Karanggayam	0	0	2	5	19
25	Karangsambung	1	0	1	0	13
26	Sadang	0	0	1	0	7
	Total	45	67	108	199	460

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Pelayanan Kesehatan yang prima perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Pandemi COVID-19 menyadarkan bahwa sistem kesehatan pemerintah daerah belum optimal. Dari sisi sarana kesehatan jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan, rasio dokter dan perawat dalam kondisi jauh dari ideal. Pemerintah Daerah perlu segera menyusun kebijakan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan kesehatan termasuk pendukungnya. Rasio Posyandu dan balita di Kabupaten Kebumen cukup baik yaitu 1 : 25 per 1000 balita tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	2.114	2.119	2112	2.123	2.116
Jumlah Balita	87.636	85.612	85.239	84.924	83.924
Rasio Posyandu per 1000 balita	1 : 24	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1:25

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen dan SIPD, 2021
**) data sementara*

Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen cenderung menurun pada kurun waktu 2016-2020. Rasio Puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk relatif stagnan. Pada tahun 2016 sebesar 1 : 38.813 penduduk atau 1 Puskesmas melayani 38.813 penduduk menurun menjadi 1 Puskesmas melayani 39.999 penduduk di tahun 2020. Nilai rasio tersebut masih belum dalam kondisi ideal rasio Puskesmas per satuan penduduk, yaitu 1 : 30.000. Meskipun demikian, keberadaan Pustu dan Poliklinik yang tersebar secara merata dapat membantu masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Rasio Puskesmas dan klinik per satuan penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	35	35	35	35	35
2	Jumlah Puskesmas Keliling	91	35	35	35	35
3	Jumlah Poliklinik/PKD/ Polindes	347	385	385	385	387
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	76	76	76	76	77
5	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	549	531	531	531	534
6	Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.385.577	1.399.976
7	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:38.813	1:38.997	1:39.292	1:39.587	1:39.999

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Jika dilihat dari sebarannya, terutama pada wilayah terluar perlu dikembangkan Puskesmas rawat inap untuk mendekatkan pelayanan rujukan pada masyarakat. Selain itu dalam mendukung pelaksanaan sistem rujukan berjenjang perlu peningkatan pelayanan Puskesmas dan pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen stabil selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 1 rumah sakit melayani lebih dari 120.000 penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah RSUD	2	2	2	2	2
Jumlah RS Swasta	11	9	9	9	9
Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh RS	13	11	11	11	11
Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.385.577	1.399.976
Rasio	1 : 104.496	1 : 124.082	1 : 125.020	1 : 125.020	1 : 127.270

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Kondisi ideal rasio dokter dan penduduk yaitu 1 : 2.500. Rasio dokter dan penduduk tahun 2020 sebesar 1 : 3.341 atau sekitar 1 dokter melayani 3.341 penduduk. Hal ini menunjukkan pertumbuhan rasio dokter dan penduduk selama kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan positif. Rasio dokter dan penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter	277	222	211	409	419
Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.385.577	1.399.976
Rasio Dokter/Penduduk	1 : 4.904	1 : 6148	1 : 6517	1 : 3387	1: 3341

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Jaminan Kesehatan

Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan bantuan pembayaran premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) maupun penyediaan jaminan kesehatan daerah. Adanya peningkatan penerima PBI dari tahun 2016-2020 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.61. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan sudah cukup optimal, namun usaha ini masih perlu ditingkatkan. Adapun persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan tahun 2016 sebesar 58,66% dan tahun 2020 meningkat menjadi 82,62% atau meningkat 23,96% dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 2.64
Jaminan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PBI	644.386	719.233	764.783	803.523	802.532
PPU	86.051	71.635	77.681	80.739	205.551
PBPU/Mandiri	36.368	74.407	93.339	120.733	124.789
Bukan Pekerja	30.000	29.689	29.216	29.301	23.846
Total	796.805	894.964	965.019	1.034.296	1.156.718
Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.385.577	1.399.976
Persentase (%)	58,66	65,57	70,17	74,65	82,62

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Jalan dan Jembatan

Untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera dibutuhkan penyediaan infrastruktur jalan yang baik. Infrastruktur jalan di Kabupaten Kebumen terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 60,72 km, Jalan Provinsi sepanjang 30,09 km, Jalan Kabupaten sepanjang 960,358 km (berdasarkan SK. Bupati No 050/889 tahun 2017 tentnag Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten) dan jalan non-status sepanjang 60 km.

Tabel 2.65
Panjang dan Proporsi Jalan Provinsi di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Panjang Jalan (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	7,85	29,67	28,84	29,67	28,57
2	Kondisi Sedang	21,82	0,00	0,83	0,00	0,50
3	Kondisi Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
4	Kondisi Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jalan secara keseluruhan	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	26,46	100,00	97,20	100,00	96,29
7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	73,54	0,00	2,80	0,00	1,69
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas PUBMCK Prov. Jawa Tengah, 2021

Tabel 2.66
Panjang dan Proporsi Jalan Nasional di Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Panjang Jalan (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	31,70	35,50	27,80	41,40	32,20
2	Kondisi Sedang	17,60	15,70	18,90	9,50	19,70
3	Kondisi Rusak Ringan	4,70	2,80	7,30	3,10	2,10
4	Kondisi Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jalan secara keseluruhan	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	58,70	65,74	51,48	76,67	59,63
7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	32,60	29,07	35,00	17,59	36,48
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	8,70	5,19	13,52	5,74	3,89
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Satker PJN Wilayah I Prov. Jawa Tengah, 2021

Sementara itu, kondisi Jalan Kabupaten cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Hal itu dapat dilihat proporsi jalan kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 60,56 persen menurun menjadi 10,64 persen di tahun 2020. Penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 tersebut disebabkan oleh perubahan standar kondisi jalan dan adanya pembaharuan data melalui survey langsung menggunakan alat ukur SNI PARVID (*Positioning Accurated Roughness with Video*). Penggunaan alat ukur tersebut juga berakibat pada penambahan panjang jalan menjadi 974,377 km. Selain adanya perubahan standar dan pembaruan data, penurunan kualitas jalan juga disebabkan oleh kerusakan jalan akibat kualitas konstruksi, kondisi iklim dan curah hujan tinggi, tersumbatnya drainase jalan oleh sampah yang menyebabkan genangan pada jalan (merupakan salah satu penyebab kerusakan konstruksi), dan *over dimension over loading* (ODOL) kendaraan logistik yang melewati ruas-ruas jalan kabupaten. Jalan kewenangan kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung JJLS dan jalan nasional mengalami kerusakan parah yaitu ruas Purwodeso-Petanahan dan ruas Tamanwinangun-Bocor. Panjang dan proporsi jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.67
Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Panjang Jalan (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	590,56	508,71	523,36	525,233	103,665
2	Kondisi Sedang	89,720	177,45	160,11	187,625	417,494
3	Kondisi Rusak Ringan	126,57	121,13	114,24	121,138	169,279
4	Kondisi Rusak Berat	168,30	153,07	162,65	126,362	283,939
5	Jalan secara keseluruhan	975,15	960,36	960,36	960,358	974,377
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	60,56	52,97	54,50	54,69	10,64
7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	9,20	18,48	16,67	19,54	42,85
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	12,97	12,61	11,90	12,61	17,35
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	17,25	15,94	16,94	13,16	29,14

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2021

Jenis permukaan jalan kabupaten sebagian besar sudah berupa aspal (82,40%), diikuti kerikil (11,64%), beton (2,95%), tanah (2,54%) dan belum dirinci (0,47%). Permenpu No 19/Prt/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan

Teknis Jalan, mengatur bahwa jalan Arteri (Kelas I, II, III, Khusus) dan Kolektor (Kelas I, II, III) serta Lokal (Kelas II, III) wajib berpenutup aspal/beton. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat jalan kerikil (111,81 km) dan tanah (24,37 km) yang memerlukan pengerjaan jalan.

Tabel 2.68
Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Uraian	Aspal	Beton	Kerikil	Tanah	Tidak Dirinci	Jumlah
1	Panjang (km)	805,35	28,37	111,81	24,37	4,48	974,377
2	Persentase	82,40%	2,95%	11,64%	2,54%	0,47%	100%

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2021

Kondisi jembatan kabupaten cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Adapun kondisi jembatan tahun 2020 dalam kondisi baik 49,21 persen, kondisi sedang 41,99 persen, kondisi rusak ringan 2,23 persen dan kondisi rusak berat 6,56 persen. Penurunan kualitas jembatan disebabkan karena usia konstruksi yang terus bertambah atau tergerus aliran sungai yang debit airnya tinggi. Adapun perkembangan kinerja penanganan jalan dan jembatan nasional kewenangan pusat serta jalan provinsi pada tahun 2016-2020 tidak tersedia data secara rinci.

Tabel 2.69
Kondisi Jembatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	306	462	454	484	375
2	Kondisi Sedang	23	20	21	21	320
3	Kondisi Rusak Ringan	6	13	13	10	17
4	Kondisi Rusak Berat	0	3	3	2	50
5	Jembatan secara keseluruhan	432	719	719	719	762
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	70,83	64,26	63,14	67,32	49,21
7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	22,69	20,31	20,58	20,86	41,99
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	6,25	12,66	13,21	9,46	2,23
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	0,23	2,78	3,06	2,36	6,56

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2021

Pada Tahun 2015-2019, KEMENPUPR telah selesai membangun jaringan jalan lintas selatan (JJLS) ruas Tambakmulyo-Wawar. Proyek JJLS tersebut di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V melalui Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional 1 Jateng. Pekerjaan fisik konstruksi jalan dimulai dari Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring ke timur melewati enam kecamatan dan 24 desa sampai dengan batas Sungai Wawar (Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit). Pada tahun 2017 sudah dimulai pembangunan jembatan sungai Luk Ulo, panjang 170 meter dan lebar 24 meter dan diresmikan pada tahun 2018. Pekerjaan konstruksi JJLS ruas Tambakmulyo-Wawar dengan panjang 55,8 km telah selesai tahun 2019.

Pada tahun 2020 dilakukan pembangunan JJLS ruas Jladri – Tambakmulyo dengan panjang 4,5 km, oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Jawa Tengah. Pekerjaan ini 60% merupakan jalan eksisting dan sisanya merupakan jalan baru. Jalan eksisting sebelumnya hanya selebar 4,5 meter dilebarkan agar standar dengan lebar 7,5 meter. Di tengah lokasi ruas ini juga terdapat 1 jembatan eksisting yaitu Jembatan Karangbolong yang lebarnya lalu lintasnya 7 meter. Pada jembatan ini dilakukan penyesuaian berupa marka pengarah, coldmilling dan pengaspalan ulang.

Tahun 2021-2024, Kementerian PUPR merencanakan pekerjaan berupa pembebasan lahan dan konstruksi fisik jalan ruas Jladri – Ayah (Logending). Tahapan yang sudah dilakukan Kemenpupr adalah survei geologi, pemetaan trace, dan penyusunan pra DED dengan spesifikasi panjang 14,5 km, lebar as jalan 5,5 m, dan estimasi kebutuhan luas lahan 57,25 Ha. Ruas ini sangat menantang dari segi teknis konstruksi karena melewati pegunungan dengan kemiringan lahan yang curam dari Desa Jladri Buayan, Desa Banjararjo Ayah, Desa Argosari Ayah, Desa Kalipoh Ayah dan Desa Ayah tembus jembatan Ayah-Jetis Cilacap. Tahap selanjutnya adalah pekerjaan pengadaan lahan (Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)) yang membutuhkan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

b) Jaringan Irigasi

Kabupaten Kebumen memiliki Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten seluas 8.621 ha dengan jumlah 172 buah DI (PermenPUPR 14/PRT/ M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi). Selain itu Kabupaten Kebumen juga memiliki DI kewenangan pusat yaitu DI Sempor (6.478 ha), DI Serayu (380 ha) dan DI Waduk Wadaslintang (21.422 ha). Terdapat juga DI kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Buniayu (180 Ha). Daerah irigasi pada Kabupaten Kebumen didominasi oleh daerah irigasi kewenangan pusat, hal ini mempengaruhi kewenangan kabupaten dalam intervensi kebijakan, rehabilitasi dan operasional pemeliharaan yang hanya dapat dilakukan pada 23,2% DI kewenangan kabupaten. Data DI Kabupaten Kebumen secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Data Daerah Irigasi Kabupaten Kebumen

No	Daerah Irigasi	Luas (ha)	Persentase
1	172 DI Kabupaten	8621	23,2%
2	Sempor (Pusat)	6478	17,5%
3	Wadaslintang (Pusat)	21422	57,8%
4	Serayu (Pusat)	380	1,0%
5	Buniayu (Prov)	180	0,5%
		37081	100,0%

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2021

Jika dilihat kondisi jaringan irigasi Kabupaten Kebumen, pada tahun 2020 kondisi jaringan irigasi lebih baik dari lima tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik yang meningkat dari 60,0 persen di tahun 2017 menjadi 73,70 persen pada tahun 2020. Pengelolaan irigasi di Kabupaten Kebumen berkolaborasi dengan masyarakat untuk menjaga jaringan irigasi dan pengelolaan air. Sejak tahun 2018, terdapat program hibah dari pemerintah pusat untuk pengelolaan irigasi di daerah yaitu Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). Program IPDMIP berfokus pada pemberdayaan organisasi petani sampai dengan operasi dan pemeliharaan irigasi.

Pada tingkat desa, terdapat juga organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). P3A adalah semua petani yang mendapat manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, pemilik kolam dan pemakai air irigasi lainnya. Faktor yang menyebabkan peningkatan kualitas jaringan irigasi selain karena adanya alokasi APBD, hibah IPDMIP dan DAK untuk irigasi, juga didukung dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melaporkan kondisi jaringan irigasi rusak sehingga penanganan dapat segera dilaksanakan dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Data kondisi saluran

irigasi Kabupaten Kebumen tahun 2018-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Irigasi Teknis Sekunder (m)	184.418	184.418	184.418	184.418	184.418
2	Irigasi Teknis Tersier (m)	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
3	Irigasi Kondisi Baik (%)	60,0	61,94	67,09	68,18	73,30
4	Irigasi Kondisi Sedang (%)	3,79	2,76	3,34	3,20	1,73
5	Irigasi Kondisi Rusak Ringan (%)	1,05	1,12	1,06	0,97	1,28
6	Irigasi Kondisi Rusak Berat (%)	35,16	34,18	28,51	27,65	23,69

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2020

c) Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem penyediaan air minum merupakan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembangunan infrastruktur air minum Kabupaten Kebumen memiliki prioritas antara lain:

1. Pembangunan jaringan perpipaan PDAM pada daerah perkotaan
2. Peningkatan layanan PDAM pendukung SPAM Keburejo di Kecamatan Poncowarno, Kebumen, Kutowinangun, Prembun, Buluspesantren, Ambal, Mirit, dan Bonorowo.
3. Peningkatan PDAM IPA Banyumudal di kecamatan Puring, Petanahan, dan Klirong.

Rumah tangga yang membutuhkan pelayanan air minum terus bertambah setiap tahun, harus diiringi dengan penambahan pelayanan SPAM Perdesaan (Pamsimas) atau SPAM Perkotaan (PDAM). Pertumbuhan jumlah rumah tangga yang dilayani sistem perpipaan air terus meningkat selama lima tahun terakhir. Jumlah rumah tangga yang dilayani SPAM perdesaan pada tahun 2016 sebesar 7.777 meningkat menjadi 20.764 rumah tangga di tahun 2020, sedangkan jumlah rumah tangga yang dilayani PDAM meningkat dari 23.539 menjadi 32.671 di tahun 2020. Peningkatan terbanyak terjadi pada tahun 2017 dan 2018, dikarenakan Kabupaten Kebumen mendapat Hibah Air Minum Perdesaan (AUSAID) ke PDAM, pengembangan SPAM Regional Keburejo, penambahan desa penerima bantuan Pamsimas serta DAK Air Minum. Capaian akses air minum perpipaan masih belum mencapai target nasional akses air minum perpipaan sebesar 30% di tahun 2019.

Tabel 2.72
Jumlah Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah rumah tangga mengakses SPAM Perdesaan	Jumlah rumah tangga mengakses PDAM	estimasi jumlah rumah tangga	Akses Air Minum Perpipaan
2016	7.777	23.539	344.667	9,09%
2017	11.531	25.563	345.494	10,74%

Tahun	Jumlah rumah tangga mengakses SPAM Perdesaan	Jumlah rumah tangga mengakses PDAM	estimasi jumlah rumah tangga	Akses Air Minum Perpipaan
2018	13.813	29.033	346.323	12,37%
2019	16.972	30.678	347.155	13,73%
2020	20.764	32.681	347.988	15,36%

Sumber : Bappeda, dokumen RAD AMPL, data diolah 2020

d) Drainase

Drainase yang ditangani oleh kabupaten terdiri dari drainase jalan kabupaten dan drainase buangan irigasi. Panjang drainase jalan kabupaten adalah 974,377 Km dan drainase buangan irigasi adalah 72,272 Km. Pada tahun 2020, kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik adalah 15%. Selain itu, ada saluran drainase permukiman yang ditangani oleh Pemerintah Desa dan saluran drainase sungai yang ditangani oleh BBWS Serayu Opak.

Tabel 2.73
Daftar Saluran Drainase yang Menjadi Kewenangan Kabupaten

No	Nama Saluran Drainase	Desa	Kecamatan	Panjang Saluran (Km)
1	Aren	Jagasima-Pandanlor	Klirong	5,5
2	Bedogol	Bumiharjo-Banjarwinangun	Petanahan	2,2
3	Bengkelung	Redisari	Rowokele	0,5
4	Binangun	Bumiharjo-Trikarso	Sruweng	1,6
5	Bojongsari	Bojongsari	Alian	1,5
6	Badongan	Podoluhur-Kebadongan	Klirong	4
7	Buatan	Demangsari	Ayah	2
8	Era	Redisari	Rowokele	2
9	Garung	Jlegiwinangun	Kutowinangun	2
10	Jomboran	Purwosari-Tukinggedong	Puring	4,536
11	Jogomulyo	Jogomulyo-Purbowangi	Buayan	2,7
12	Kaligending	Krandegan	Puring	0,65
13	Kaliori	Rowokele	Rowokele	2,74
14	Kebantengan	Tambakagung-Karangglonggong	Klirong	2,5
15	Kedungkeji	Kretek	Rowokele	1,5
16	Kenteng	Kenteng	Sempor	2
17	Klepupayung	Sugihwaras	Adimulyo	2
18	Krandegan	Krandegan	Puring	0,665
19	Krasak	Jatimalang	Klirong	2
20	Lumpang	Bumiagung	Rowokele	1,5
21	Munggu	Munggu-Tambakmulyo	Petanahan, Puring	10
22	Pacor	Jemur Clowok	Kebumen	2
23	Rangga Ula	Pringtutul	Rowokele	2,5
24	Siwarak	Jatiroto	Buayan	2,5
25	Semali	Semali	Sempor	1
26	Sosogan	Seling	Karangsambung	2,5
27	Sokadana	Kajoran	Karanggayam	2
28	Tanjungrejo	Tanjungrejo-Sangubanyu	Buluspesantren	2,75
29	Tembelang	Mangunweni	Ayah	1,6

No	Nama Saluran Drainase	Desa	Kecamatan	Panjang Saluran (Km)
30	Widakan	Purwoharjo	Puring	0,95
31	Kalibeji	Karangsari	Buayan	0,381
			Total	72,272

Sumber : Sk Bupati Kebumen Nomor 611/216/Kep/2016, Tentang Daerah Irigasi Dan Saluran Drainase Yang Menjadi Kewenangan Pemkab Kebumen

Secara umum ada beberapa masalah drainase yang ada di Kabupaten Kebumen:

1. Sedimentasi lumpur dan sumbatan sampah menyebabkan kapasitas tampungan saluran menjadi kecil sehingga air drainase dapat limpas atau menggenangi sekitarnya
2. *Run off* yang semakin besar dengan semakin sedikitnya daerah resapan tidak diimbangi dengan makin besarnya dimensi saluran drainase
3. Saluran irigasi ada yang dimanfaatkan untuk saluran drainase, sehingga saat air irigasi penuh, air yang akan dibuang dari lingkungan tidak bisa dibuang, yang berakibat menggenangi lingkungan di sekitarnya
4. Saluran drainase alami yang bertebing tanah sehingga saluran gampang tertutup (tebing saluran longsor) dan juga sedimentasi menyebabkan kecepatan aliran air relatif kecil sehingga sering terjadi penumpukan air di hulu saluran.
5. Jalan kabupaten sebagian besar belum memiliki saluran yang berfungsi sebagai penatusan (pembuangan air hujan) sehingga jalan mudah rusak karena air yang menggenang.

e) Penataan Ruang

Dalam rangka mengikuti dinamika pembangunan dan amanat UU Tata Ruang, Kabupaten Kebumen melakukan Proses Penyusunan Revisi RTRW. Pada tahun 2019, Dokumen Revisi RTRW sudah memperoleh rekomendasi peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, kemudian pada tahun 2020 sudah memperoleh Persetujuan Substansi Gubernur. Dalam Dokumen Revisi RTRW, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen bertujuan mewujudkan wilayah kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan, aman, nyaman, dan produktif, kemudian dijabarkan menjadi rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan rencana kawasan strategis wilayah. Dokumen tata ruang secara lebih detail kemudian dijabarkan dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), atau Rencana Kawasan Strategis ataupun dokumen kajian strategis tata ruang. Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan menerapkan *Online Single Submission* (OSS). Pengaturan RDTR oleh suatu daerah menjadi sangat krusial karena dapat berdampak pada upaya peningkatan investasi sesuai dengan program pemerintah saat ini. Melalui RDTR investor dapat mengetahui dan memiliki kepastian bahwa lokasi yang akan dipilihnya telah sesuai dengan rencana pengembangan yang tertuang di Perda RDTR termasuk ketentuan perizinannya. Berikut merupakan data kondisi dokumen tata ruang Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.74
Kondisi Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Uraian	Dokumen Evaluasi	Peninjauan Kembali	Materi Teknis	Rekomendasi Peta BIG	Proses Rekom Gub	Proses Persub ATR	Proses Evaluasi Gub	Perda Baru
1	Revisi RTRW Kebumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	RDTR Perkotaan Kebumen	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	RDTR Perkotaan Gombong	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	RDTR Perkotaan Karanganyar	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Kajian Strategis Tata Ruang - Kota Pusaka - Geopark - Kawasan Industri	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan amanat UU No. 26/2007, Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang harus dicukupi pada kawasan perkotaan sebesar 20%, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Kebumen baru dapat mencukupi RTH sebesar 17,18% pada tahun 2020. Ruang terbuka hijau perkotaan memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi ekologi (menghijaukan kota, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, memberikan keteduhan, menjadi area resapan air, dan meredam kebisingan), sebagai sarana olahraga dan rekreasi, fungsi estetika, atau dimanfaatkan secara ekonomi sebagai lokasi wisata alam dan ekowisata.

Tabel 2.75
Peruntukan Ruang di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Data HGB (ha)	40,46	4.876	6.439	29,02	48.913
2	Satuan luas wilayah per HGB	18,05	150,12	113,68	25,22	14,97
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)	17,14	17,18	17,18	17,18	17,18

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Salah satu target kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dengan indikator proporsi pemenuhan rumah tangga yang menempati hunian layak. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, rumah tangga yang menempati hunian layak pada tahun 2018 sebesar 54,1% dan ditargetkan menjadi 70% pada tahun 2024.

a) Kepemilikan Rumah

Kepemilikan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap rumah tangga. Namun, ketersediaan lahan yang terbatas maupun kemampuan finansial setiap rumah tangga yang berbeda memunculkan isu *backlog* perumahan. *Backlog* dalam perumahan adalah selisih antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan rumah yang dihitung dari banyaknya rumah tangga. Status *backlog* kepemilikan rumah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 angka *backlog* sebesar 63.272 meningkat menjadi 64.093 di tahun 2020. Status *backlog* kepemilikan rumah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Status Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah	316.469	326.053	331.638	349.022	354.807
Jumlah Rumah Tangga	339.924	359.668	379.412	412.294	418.900
Backlog	23.455	33.615	47.774	63.272	64.093

Sumber: Susenas, 2018 dan Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data *backlog* tahun 2016-2020 diatas, jumlah backlog (ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah) di Kabupaten Kebumen semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan KK akibat terbentuknya keluarga-keluarga baru. Oleh karena itu, perlu kebijakan holistik dan komprehensif untuk mengurangi ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen yang cenderung semakin tinggi, terutama pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *Backlog* yang besar di tahun 2020 tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Selama ini kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah membantu fasilitasi FLPP yaitu dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (KPR Bersubsidi).

b) Permukiman dan Kawasan Kumuh Perkotaan

Penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir berjalan semakin baik. Hal ini terlihat dari persentase wilayah kumuh perkotaan dari 7,65% di tahun 2016 menurun menjadi 5,04% pada tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2020 masih terdapat 290,92 Ha kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen yang memerlukan penanganan. Capaian kinerja penanganan kawasan kumuh perkotaan secara lebih lengkap tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Kondisi Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian Luas (ha)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Area Permukiman	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.217.82
	a. Permukiman Perkotaan	5.776,96	5.776,96	5.776,96	5.776,96	5.776,96
	b. Permukiman Perdesaan	26.440,85	26.440,85	26.440,85	26.440,85	26.440,85
2	Luas Permukiman Kumuh perkotaan	442,072	442,072	420,606	372,601	343,27
3	Luas Permukiman kumuh perkotaan yang tertangani	0	21,466	48,005	50,245	52,35
4	Luas permukiman kumuh perkotaaan yang belum tertangani	442,072	420,626	372,601	322	290,92
5	Persentase wilayah kumuh perkotaan	7,65%	7,28%	6,45%	5,58%	5,04%

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

c) Persentase Rumah Layak Huni

Penanganan rumah tidak layak huni selama kurun waktu 2016-2020 di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari persentase rumah tidak layak huni yang berkurang dari 7,95 persen di tahun 2016 berkurang menjadi 1,96 persen pada tahun 2020. Pada Tahun 2020 terdapat 1,96% atau sebesar 5.412 RTLH. Berdasarkan pemutakhiran database perumahan terdapat penambahan kebutuhan penanganan RTLH sebesar 39.680 rumah atau sekitar 11,2%. Penanganan kebutuhan rumah layak huni perlu diprioritaskan dalam rangka pemenuhan SPM bidang perumahan.

Tabel 2.78
Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah (sesuai SK 2014)	306.885	306.885	306.885	306.885	306.885
2	Jumlah rumah layak huni	288.009	293.614	299.720	300.873	306.285
3	Jumlah rumah tidak layak huni	24.390	18.876	13.271	7.165	6.012
4	Persentase rumah tidak layak huni	7,95%	6,15%	4,32%	2,33%	1,96%
5	Penanganan RTLH	5.514	5.605	6.106	1.153	5.412
6	Sisa	18.876	13.271	7.165	6.012	600
7	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
8	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	100,00%	100,00%	0,00%

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 20201

Kebutuhan penyediaan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena faktor bencana dan teknis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kesinambungan dan kesuksesan pembangunan daerah membutuhkan prasyarat terjaganya kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi ketenteraman di Kabupaten Kebumen selama periode 2016-2020 cukup kondusif. Hal ini terlihat dari jumlah tindak kriminal yang secara umum terus menurun. Pada tahun 2016, jumlah tindak kriminal di Kabupaten Kebumen adalah 229 kasus, dan menurun menjadi 66 kasus pada tahun 2020. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kebumen masih perlu melakukan usaha yang keras untuk menurunkan kasus narkoba yang angkanya cenderung meningkat dari 20 kasus pada tahun 2016 menjadi 28 kasus pada tahun 2020.

Berdasarkan rilis BNN pada tahun 2020, pada kasus penyalahgunaan narkoba, usia muda (remaja) merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena dalam tahap pencarian jatidiri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir kaum muda kadangkala hanya bersifat instan, dan mencari yang termudah manakala menghadapi sesuatu yang sulit. Ada beberapa faktor sebagai penyebab atau yang mempengaruhi perilaku seorang remaja, diantaranya faktor pertemanan, perkembangan teknologi informasi, pengaruh budaya, dan gaya hidup hedonisme.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya krisis di berbagai aspek kehidupan, diantaranya penurunan aktivitas perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran ini akan berdampak pada aspek sosial, khususnya meningkatnya angka kriminalitas yang perlu diantisipasi. Angka kriminalitas di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.79
Jumlah Tindak Kriminalitas Tercatat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tindak Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Narkoba	20	18	23	35	28
2	Pembunuhan	1	2	2	1	0
3	Kekerasan Seksual	40	28	21	27	28
4	Penganiayaan	3	7	7	9	6
5	Pencurian	121	177	99	74	46
6	Penipuan	44	32	17	6	16
7	Pemalsuan Uang	0	0	1	0	0
	Jumlah Total	**229**	**264**	**170**	**152**	**66**

Sumber: Polres Kebumen, 2021

Sepanjang tahun 2016-2020, terdapat kasus gangguan ketertiban umum yang cukup menyita perhatian publik, di antaranya:

1. Bentrok antara warga dan TNI di wilayah Urut Sewu. Konflik perebutan tanah antara TNI dan warga pun terus berlanjut dan belum menemui titik temu meski sudah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak.
2. Konflik penolakan kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di wilayah Kecamatan Adimulyo. Hal ini dipicu perbedaan ajaran, perbedaan ideologi, dan budaya menjadi salah satu masalah dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an karena dianggap tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Upaya pencegahan konflik antar umat beragama di Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi kepada para pemeluk agama di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen yang dilakukan untuk mengajak seluruh komponen umat beragama yang ada di Kebumen supaya bersama-sama menjaga iklim sejuk dalam kehidupan beragama, baik sesama pemeluk agama maupun dengan pemeluk agama lain, termasuk meningkatkan keshalehan sosial dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah.

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) dari 480 kasus di 2016 menurun menjadi 21 kasus pada 2020. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan sarana prasarana keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penanganan kasus pelanggaran K3 dan cakupan penyelesaian kasus pelanggaran perda di Kabupaten Kebumen berjalan optimal karena realisasinya mencapai 100%. Perkembangan capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Kebumen di tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.80
Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)	903	1.022	1.022	852	814
Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	8	7	7	7	7
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja Kabupaten	132	69	58	65	50
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja Non ASN	99	99	98	98	98
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	1,11	0,58	0,49	0,47	0,45
Jumlah Pos Siskamling	4.044	4.045	4.045	4045	4028
Jumlah Desa/Kelurahan	460	460	460	460	460
Rasio Pos Kamling per desa/kelurahan	9	9	9	9	9
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	20	36	48	54	49
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	9.636	8.832	8.832	10.033	10,033
Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	81	74	73	72,4	72,4
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	480	750	720	88	21
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	480	750	720	88	21
Presentase Penyelesaian Penegakkan K3	100	100	100	100	100
Jumlah Pelanggaran Perda	800	750	529	634	72
Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda	800	750	529	634	72
Persentase Penyelesaian Penegakkan Perda	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kab. Kebumen, 2021

Pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk perlindungan masyarakat cenderung menurun pada tahun 2016-2020. Hal ini terlihat dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja per jumlah 10.000 penduduk yang menurun selama kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, rasio jumlah Polisi Pamong Praja sebesar 1,11. Nilai tersebut menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,45. Penurunan rasio ini disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan kenaikan jumlah aparatur Polisi Pamong Praja. Sebaliknya, jumlah Polisi Pamong Praja semakin menurun karena pensiun. Sampai dengan tahun 2020, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) Satpol PP berjumlah 148 orang yang terdiri dari 50 ASN di Satpol PP dan 98 Satpol-PP Non ASN. Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah ideal Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kebumen serendah-rendahnya 251 orang dan setinggi-tingginya 350 orang. Angka ini didapatkan dari perhitungan total skor Kabupaten Kebumen sebesar 736 (masuk kategori interval 500-750). Untuk menutup kekurangan jumlah tenaga Satpol PP tersebut, diadakan tenaga Banpol PP sejumlah 91 orang, sehingga total ketersediaan tenaga Satpol PP sejumlah 172 orang. Meskipun demikian, masih terdapat selisih kurang ketersediaan ideal tenaga Satpol PP sejumlah 79 orang (minimal) sampai dengan 178 orang (maksimal).

Tabel 2.81
Perhitungan Jumlah Kebutuhan Tenaga Satpol PP
Berdasar Permendagri Nomor 60 Tahun 2012

No	Kriteria	Jumlah	Interval	Skala	Bobot	Nilai
A		**Kriteria Umum**		**116**		
1	Jumlah Penduduk	1.385.577	< 10 juta	400	6	24
2	Luas Wilayah	1.281,115 km2	< 50.000 km2	400	6	24
3	Jumlah APBD	Rp 2,8 Trilyun	> Rp 800 Milyar	1000	4	40
4	Rasio Belanja Aparatur	40%	30 – 50%	700	4	28
B		**Kriteria Teknis**		**620**		
1	Klasifikasi Besaran OPD	28	< 40	400	15	60
2	Jumlah Perda	> 100	> 100	1000	15	150
3	Jumlah Perbup	> 100	> 100	1000	15	150
4	Jumlah Desa/Kelurahan	460	> 100	1000	10	100

Sumber: Permendagri 60 Tahun 2012, data diolah, 2021

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Trantibum, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama *respond time* kebakaran selama 15 menit pada tahun 2018-2020 khususnya untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun meskipun di tengah keterbatasan SDM aparatur. Nilai *respond time* kebakaran selama 15 menit tersebut merupakan nilai minimal waktu tanggap sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian, terdapat wilayah lain yaitu Ayah dan Sadang yang belum dapat memenuhi SPM *respond time* karena belum adanya Pos Damkar. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di dua tempat tersebut untuk memenuhi SPM *respond time* kebakaran 15 menit. Capaian SPM Bidang Trantibum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
SPM Bidang Trantibum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kegiatan	Nilai	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase warga negara terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Na	Na	Na	100%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap (*respon time*) kebakaran	Na	Na	Na	15 menit	15 menit	15 menit

Sumber: Satpol PP Kab. Kebumen, 2021

Sementara untuk capaian SPM sub urusan bencana tahun 2018-2020 terkait pelayanan informasi rawan bencana masih perlu didorong untuk peningkatan kinerja pelayanan informasi rawan bencana terkait komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana terkait gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.

Tabel 2.83
SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	% CAPAIAN SPM				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Na	Na	16,67%	32%	32%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Na	Na	7,69%	7,79%	8%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Na	Na	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2021

6) Sosial

Penanganan bidang sosial di Kabupaten Kebumen berfokus pada Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diselenggarakan melalui penanganan yang menjadi kewenangan kabupaten Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 yang membagi kewenangan penanganan PMKS, sesuai peraturan tersebut kewenangan Kabupaten Kebumen menangani PMKS hanya yang ada di luar panti. Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non-produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan pasca kejadian bencana di Kebumen. Sedangkan program rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS.

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kebumen semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase penanganan PMKS sebesar 17,69% meningkat menjadi 96,12% pada tahun 2020. Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.84
Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS	198.651	191.430	195.564	638.092	640.654
PMKS Yang Tertangani	35.151	51.970	119.282	450.840	615.792
Persentase Penanganan PMKS	17.69%	27.14%	60.99%	70,60%	96,12%

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021

Tabel 2. 85
Jumlah Disabilitas Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Jenis Disabilitas	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tuna daksa/cacat tubuh	1368	926	2294
2	Cacat mental retardasi	1479	1244	2723
3	Mantan penderita gangguan jiwa	738	486	1224
4	Cacat fisik & mental	463	354	817
5	Tuna netra/buta	516	548	1064
6	Tuna rungu	583	581	1164
7	Tuna wicara	317	275	592
8	Tuna rungu & wicara	267	240	507
9	Tuna netra & cacat tubuh	74	71	145
10	Tuna netra, rungu & wicara	37	38	75
11	Tuna rungu, wicara & cacat tubuh	78	67	145
12	Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh	53	39	92
	Total	**5973**	**4869**	**10842**

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021

Tabel 2.86
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kecacatan
dan Jenis Pekerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Jenis Disabilitas	Jenis pekerjaan									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	Null	
Tuna daksa/cacat tubuh	268	130	11	145		65	124	78	1473	2294
Cacat mental retardasi	63	15	7	45		51	50	66	2426	2723
Mantan penderita gangguan jiwa	92	34	6	38		47	65	42	900	1224
Cacat fisik & mental	30	7	3	24	1	13	25	15	699	817
Tuna netra/buta	85	29	5	24		25	36	26	834	1064
Tuna rungu	161	71	7	49		79	39	38	720	1164
Tuna wicara	36	15	1	44		25	29	33	409	592
Tuna rungu & wicara	40	23	2	39		18	40	34	311	507
Tuna netra & cacat tubuh	5	4	2	5		4	4	3	118	145
Tuna netra, rungu & wicara	1	5				3	3	2	61	75
Tuna rungu, wicara & cacat tubuh	8	1		10		4	2	2	118	145
Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh	4	1		4		6	7	2	68	92
Jumlah	**793**	**335**	**44**	**427**	**1**	**340**	**424**	**341**	**8137**	**10842**

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021

Keterangan jensi pekerjaan :

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
3. Berusaha dibantu butuh tetap / dibayar;
4. Buruh /karyawan/pegawai swasta;
5. PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Angggota legislatif;
6. Pekerja bebas pertanian;
7. Pekerja bebas non pertanian;
8. Pekerja bebas non pertanianpekerja keluarga / tidak dibayar;
9. Null : disabilitas tidak bekerja.

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen yang masuk di DTKS adalah sebanyak 10.842 orang. Dari jumlah tersebut dibedakan jenis kelamin terdiri dari 5.973 laki-laki dan 4.869 perempuan. Adapun disabilitas yang produktif atau bekerja sebanyak 2.705 orang dan tidak produktif sebanyak 8.137 orang. Dari segi analis demografi struktur umur penduduk dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. Kelompok umur muda yaitu dibawah 15 tahun;
b. kelompok umur produktif usia 15-64 tahun;
c. kelompok umur tua usia 65 tahun keatas.

Tabel 2.87

Rekap Disabilitas Berdasarkan Produktifitas Per Kecamatan Tahun 2020

KECAMATAN	Non Produktif			Produktif		Jumlah
	< 15 thn	15-64 thn	≥ 65 thn	15-64 thn	≥ 65 thn	
ADIMULYO	24	226	54	44	18	366
ALIAN	24	239	61	61	19	404
AMBAL	18	242	83	108	33	484
AYAH	17	209	55	95	17	393
BONOROWO	5	113	43	52	16	229
BUAYAN	30	230	95	95	26	476
BULUSPESANTREN	20	276	88	88	27	499
GOMBONG	14	201	72	49	12	348
KARANGANYAR	18	183	47	46	7	301
KARANGGAYAM	25	206	65	99	24	419
KARANGSAMBUNG	20	177	57	81	29	364
KEBUMEN	36	488	102	118	17	761
KLIRONG	24	364	166	132	76	762
KUTOWINANGUN	7	201	50	67	13	338
KUWARASAN	17	242	119	107	16	501
MIRIT	18	205	127	76	37	463
PADURESO	5	78	31	30	12	156
PEJAGOAN	16	218	99	116	25	474
PETANAHAN	13	243	90	143	48	537
PONCOWARNO	12	64	12	35	17	140
PREMBUN	13	174	62	61	10	320
PURING	19	254	58	84	18	433
ROWOKELE	18	181	72	88	20	379
SADANG	19	116	58	55	17	265
SEMPOR	18	275	96	96	26	511
SRUWENG	20	276	124	76	23	519
Jumlah	**470**	**5.681**	**1.986**	**2.102**	**603**	**10.842**

Sumber: DTKS Finalisasi Oktober 2020 Status Kesejahteraan 1 sd 5 Disabilitas

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah Tagana menjadi 50 orang, jumlah pendamping PKH menjadi 257 orang, dan jumlah PSM menjadi 93 orang. PSKS yang ada di Kabupaten Kebumen untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana telah memiliki sertifikat pelatihan dasar. Keberadaan PSKS diharapkan dapat membantu menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen lebih baik. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang dimiliki masih belum cukup untuk menangani keseluruhan masalah sosial yang ada di Kabupaten kebumen. Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain status Tagana yang merupakan relawan, status pendamping PKH yang merupakan tenaga bantuan dari Kementrian Sosial sehingga kinerjanya tidak sepenuhnya dapat dikendalian oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, sinergitas semua stakeholder tersebut, dan aksi kolaboratif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan masalah sosial. Profil PSKS di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.88
Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	98	98	98	71	93
2	Jumlah Tagana	11	11	11	45	50
3	Jumlah Pendamping PKH	162	146	239	245	257

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen yang masuk di DTKS pada tahun 2018 sebanyak 11.515 orang mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 10.842 orang. Pada Tahun 2020 jumlah disabilitas dibedakan menurut jenis kelamin terdiri dari 5.973 laki-laki dan 4.869 perempuan. Adapun disabilitas yang produktif atau bekerja sebanyak 2.705 orang dan tidak produktif sebanyak 8.137 orang.

Tabel 2.89
Data Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Status Produktifitas
Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Produktifitas		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan		Produtif	Tidak Produktif	
2016	na	na	na	Na	na	na
2017	na	na	na	Na	na	na
2018	6,374	5,141	11,515	2,781	8,734	11,515
2019	6,079	4,964	11,043	2,719	8,324	11,043
2020	5,973	4,869	10,842	2,705	8,137	10,842

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa standar pelayanan pada SPM Sosial di Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

SPM tersebut juga mengamanatkan adanya pusat kesejahteraan sosial yang memiliki paling sedikit satu orang relawan sosial yang tersertifikasi. Memiliki tempat sebagai pusat kegiatan bersama, tenaga pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan. SPM bidang sosial juga mengatur mengenai pengumpulan dan pengelolaan data sosial. Perlu adanya semacam sistem layanan rujukan terpadu sebagai pusat data, informasi dan pelayanan dalam upaya pemenuhan SPM sosial. Jika melihat ketersediaan PSKS masih belum mencukupi layanan pemenuhan SPM sosial dengan optimal. Selain itu PSKS seringkali bertugas ganda sebagai pengumpul dan pengelola data. Keterbatasan ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan SPM bidang Sosial.

Salah satu amanat SPM bidang sosial adalah layanan data. Data sosial merupakan aspek penting dalam penanganan masalah sosial dan kemiskinan. Pengelolaan data sosial telah diupayakan secara terpadu menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) yang dimutakhirkan secara periodik dan berkelanjutan. Data sosial ini yang kemudian digunakan sebagai dasar penanganan PMKS, penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan, maupun program dan kegiatan lain dari Perangkat Daerah.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan suatu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan telah teratasi atau belum. Banyak faktor yang mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah, diantaranya seberapa banyak penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi dan kualitas dari tenaga kerja akan mempengaruhi output produksi.

Angkatan Kerja

Menurut BPS, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen terdapat 633.687 penduduk termasuk dalam angkatan kerja dari 910.114 penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, 595.203 penduduk bekerja (yang terdiri dari 343.127 laki-laki dan 252.076 perempuan) atau sebesar 65,40% serta 38.484 penduduk (yang terdiri dari dari 24.965 laki-laki dan 13.519 perempuan) atau 4,23% adalah pengangguran. Secara rinci data mengenai angkatan kerja, penduduk bekerja dan pengangguran dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2.90
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Pengangguran Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja		Persentase	Pengangguran		Persentase
			Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
2017	888.138	593.658	332.558	227.990	63,11	21.242	11.868	3,73
2018	894.326	586.034	327.163	226.514	61,91	21.658	10.699	3,62
2019	900.240	616.494	345.666	241.504	65,22	14.594	14.730	3,26
2020	910.114	633.687	343.127	252.076	65,40	24.965	13.519	4,23

Sumber: BPS, 2021

Tingkat Kesempatan Kerja

Persentase penduduk bekerja (persentase jumlah penduduk usia kerja yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja) menggambarkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Tingkat Kesempatan Kerja menunjukkan peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin baik kesempatan kerja di suatu wilayah menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah semakin baik.

Tabel 2.91
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2017-2020

Tahun	Angkatan Kerja			Penduduk Bekerja			Tingkat Kesempatan Kerja (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2017	353.800	239.858	593.658	332.558	227.990	560.548	94,42
2018	348.821	237.213	586.034	327.163	226.514	553.677	94,48
2019	360.260	256.234	616.494	345.666	241.504	587.170	95,24
2020	368.092	265.595	633.687	343.127	252.076	595.203	93,93

Sumber: BPS, 2021
Keterangan : data tahun 2016 tidak tersedia karena BPS tidak melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional tingkat Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data pada tabel di atas, TKK di Kabupaten Kebumen menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, namun kesempatan kerja menurun pada tahun 2020 yang salah satunya disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, tingkat kesempatan kerja yang rendah di Kabupaten Kebumen mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja yang pada akhirnya mendorong tingginya angka migrasi dari desa ke kota besar dan Angka Pengangguran Terbuka.

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, kemudian disusul oleh sektor perdagangan restoran dan perhotelan, serta sektor manufaktur. Sektor-sektor tersebut berkarakter padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, namun kelemahannya sektor-sektor tersebut tidak memberikan upah yang layak. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan sektor utama dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.92
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

No	Sektor	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan (%)	23,3	23,83	33,71	32,4
2	Pertambangan dan Penggalian (%)	1,05	0,98	0,37	1,03
3	Manufaktur (%)	20,09	22,69	21	20,1
4	Listrik Gas dan Air (%)	0	0,21	0,54	0,15
5	Konstruksi (%)	8,78	9,86	6,3	6,4
6	Perdagangan Restoran dan Perhotelan (%)	24,08	23,94	24,37	25,32
7	Transportasi Pergudangan dan Komunikasi (%)	2,56	2,13	2,51	2,5
8	Keuangan dan Asuransi (%)	2,4	1,65	1,59	0,63
9	Jasa Masyarakat Sosial dan Personal (%)	17,75	14,73	9,63	11,96

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Penduduk bekerja menurut status pekerjaan selama kurun waktu 2017-2020 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha sendiri, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Status pekerjaan ini memengaruhi besaran pendapatan yang akan diterima oleh pekerja. Status pekerjaan sebagai buruh dan pekerja keluarga/tidak dibayar memiliki upah yang kurang layak atau di bawah UMK, selain itu pekerjaan tersebut seperti pekerjaan paruh waktu atau musiman seperti di sektor pertanian. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.93
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

No	Status Pekerjaan	2017	2018	2019	2020
1	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar (%)	4,22	4,36	3,47	2,96
2	Buruh/karyawan/pegawai (%)	30,38	25,43	24,97	27,26
3	Berusaha sendiri (%)	18,8	20,37	19,11	19,49
4	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar (%)	17,8	20,68	21,3	23,77
5	Pekerja keluarga/tidak dibayar (%)	13,04	13,41	16,58	15,17
6	Pekerja Bebas (%)	15,76	15,75	14,58	11,36

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi didominasi oleh pekerja tidak sekolah/tidak tamat SD, SD, dan SMP sebesar 69,59 persen. Sedangkan 24,25 persen memiliki kualifikasi pendidikan menengah dan 6,14 persen memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Artinya tenaga kerja yang terserap bukan pada level manajerial dengan tingkat pendapatan yang rendah. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan pendidikan tertinggi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.94
Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

No	Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019	2020
1	Tidak/belum sekolah atau tamat SD (%)	14,32	16,26	17,89	9,58
2	SD (%)	35,74	32,84	32,69	40,70
3	SMP (%)	20,71	19,97	20,27	19,31
4	SMA (%)	7,99	8,00	8,64	8,39
5	SMK (%)	13,11	14,54	14,85	15,86
6	Diploma (%)	2,36	1,87	1,76	1,54
7	Sarjana (%)	5,76	6,51	3,92	6,67

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK menurut BPS adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja dan mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian semakin meningkat. Pada tahun 2017 sampai tahun 2020 TPAK di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Secara lebih rinci perkembangan persentase TPAK dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.95
Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase TPAK Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Persentase TPAK
1	2017	593.658	66,84
2	2018	586.034	65,53
3	2019	616.494	68,48
4	2020	633.687	69,63

Sumber: BPS, 2021
Keterangan : data tahun 2016 tidak tersedia karena BPS tidak melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional tingkat Kabupaten Kebumen

Persentase TPAK tahun 2017 sebesar 66,84% kemudian turun menjadi 65,53% pada tahun 2018, dan kembali naik pada tahun 2019 dan 2020, berturut-turut sebesar 68,48% dan 69,63%. Kenaikan TPAK dari tahun 2019 ke tahun 2020, atau naik sebesar 1,15 poin menunjukkan rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) mengalami kenaikan.

Pencari Kerja Terdaftar

Pencari kerja terdaftar, diperoleh berdasarkan data pemohon kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu AK1. Pemilik kartu AK1 secara otomatis akan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sehingga bila sewaktu-waktu ada informasi lowongan kerja, maka pihak dinas akan memprioritaskan pemilik kartu AK1 untuk mendapatkan informasi. Disnaker KUKM juga akan mempromosikan pemilik kartu AK1 kepada perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan baru melalui Disnaker KUKM. Adapun data jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten KebumenTahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pencari Kerja Terdaftar		Jumlah
		L	P	
1	2016	7.707	8.338	16.045
2	2017	8.730	8.518	17.248
3	2018	8.493	9.447	17.940
4	2019	8.169	8.303	16.472
5	2020	6.866	6.716	13.582

Sumber : Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2021

Pelayanan kartu AK-1 merupakan bentuk pelayanan publik sebagai salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan di perusahaan/ instansi baik negeri maupun swasta. Pembuatan kartu AK-1 mendasari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Sampai dengan saat ini, kesadaran perusahaan masih relatif rendah untuk melaporkan data penempatan tenaga kerja di perusahaannya kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, hal ini sejalan dengan pentingnya Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Dalam hal pengawasan ketenagakerjaan perusahaan menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja di tingkat Provinsi. Menurunnya lowongan perkerjaan sebagai dampak adanya Covid -19 sehingga banyak perusahaan merumahkan tenaga kerja bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada tenaga kerja yang ada. Kondisi itulah yang menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kebumen dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sebesar 16.472 orang dan tahun 2020 menjadi sebesar 13.582 orang. Adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020, menjadi penyebab lain menurunnya jumlah pencari kerja terdaftar.

Pencari Kerja yang Ditempatkan

Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Kebumen pada kurun waktu tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami penurunan. Meskipun pada tahun 2017, jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan mengalami kenaikan menjadi sebanyak 4.359 orang dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.894 orang. Secara lebih rini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2020

NO	Tahun	Jumlah pencari kerja terdaftar	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (persen)
1	2016	16.045	3.894	24,27
2	2017	17.248	4.359	25,27
3	2018	17.940	3.840	21,40
4	2019	16.472	2.291	13,91
5	2020	13.582	2.137	15,73

Sumber : Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2021

Berdasarkan data jumlah pencari kerja terdaftar dan data pencari kerja yang ditempatkan, maka dapat dikatakan bahwa persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan paling besar baru mencapai 25,27% yaitu sebanyak 4.359 orang dari 17.248 pencari kerja terdaftar, yang terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2020, persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan mencapai 15,73% yaitu sebanyak 2.137 orang dari 13.582 pencari kerja terdaftar. Pada tahun 2017 persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan cukup tinggi karena banyaknya kesempatan bekerja dan upaya untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan *(job canvasing)* dapat terwujud serta memperluas informasi lowongan pekerjaan dengan kegiatan *Job Fair*.

Tahun 2020 persentase pencari kerja yang ditempatkan naik dibandingkan tahun 2019, walaupun adanya pandemi Covid 19 banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan bahkan mem-PHK. Kenaikan persentase tersebut naik dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan karena jumlah pencari kerja yang terdaftar berkurang sebagai angka pembagi jumlah penempatan kerja. Walaupun dalam kondisi Covid 19 Dinas Tenaga Kerja dan KUKM tetap berupaya untuk mencari lowongan pekerjaan di perusahaan dengan Job Canvasing. Upaya seleksi calon pekerja tetap dilaksanakan di Kabupaten Kebumen dengan tetap sesuai standar protokol kesehatan Covid 19 sehingga penempatan tahun 2020 sebanyak 2.137 orang atau sebesar 15,73%.

Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) yang menunjukkan jumlah perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, buruh, tenaga kerja selama tahun 2016 - 2020 cenderung fluktuatif meskipun kasus yang terjadi relatif sedikit. Namun demikian, semua kasus di setiap tahun semuanya dapat diselesaikan 100 persen, yang antara lain disebabkan adanya peningkatan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Kasus HI yang relatif sedikit, menunjukkan penyelesaian pekerja dengan pengusaha dan antarburuh dapat diselesaikan secara internal di perusahaan. Demikian juga terkait dengan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak pernah terjadi, mengindikasikan kerjasama tripartit antara pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja berjalan dengan

Tabel 2.98
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial
di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2016	7	100% terselesaikan
2	2017	7	100% terselesaikan
3	2018	6	100% terselesaikan
4	2019	10	100% terselesaikan
5	2020	10	100% terselesaikan

Sumber: Disnaker-KUKM Kab. Kebumen, 2021

Rasio Upah Minimum (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun arau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2016 - 2019 relatif mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu ke depan perlu dilakukan upaya-upaya agar rasio antara UMK dengan KHL semakin mendekati 100 persen.

Tabel 2.99
Rasio Upah Minimum dibanding KHL Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2020

Tahun	UMK (Rp/Bln/Org)	KHL (Rp/Bln/Org)	Rasio (%)
2016	1.324.600	1.324.566	100,00
2017	1.433.900	1.445.000	99,23
2018	1.560.000	1.573.000	99,17
2019	1.686.000	1.700.000	99,18
2020	1.835.000	-	-

Sumber: BPS, Kab. Kebumen, 2020

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul seharusnya memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Adapun cakupan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2.100
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	129	85	117	135	112
2	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	65	62	66	71	60
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	24	9	24	35	26
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	27	9	24	36	26
5	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2	2	2	4	0

Sumber: Dispermades P3A, 2021

Dalam mengukur kesetaraan gender, terdapat beberapa indeks yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Sedangkan IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan

perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Pencapaian pembangunan gender antara lain terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Di samping itu persamaan status dan adil dalam pembangunan. Di samping itu persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi dalam juga dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.101
IPM dan IPG Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67.41	68.29	68,8	69.60	69.81
	Laki-Laki	*n/a*	72	72,49	73,15	73,39
	Perempuan	*n/a*	66,73	67,48	68,28	68,29
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	*n/a*	92,68	93,09	93,34	93,05

Sumber: BPS, 2021

Kebijakan yang diterbitkan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Kebumen dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender. Capaian IPG Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 93,05 kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 93,34. Untuk mengejar ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kebijakan yang mendukung antara lain dengan membuat Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun tanpa membedakan status gender. Perempuan di Kabupaten Kebumen telah mendapat kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang, yang tercermin dari persentase yang menerima ijazah akhir, rasio APMnya, serta angka harapan lama sekolah. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan.

Selain itu terdapat beberapa kebijakan antara lain Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang ASI Eksklusif, Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perbup Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Pencegahan Stunting. Termasuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait Penggunaan APBD Kab. Kebumen termasuk Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan pendidikan dan kesehatan.

Jika diperhatikan dalam data pilah gender menunjukkan bahwa IPM laki-laki jauh lebih tinggi dibanding IPM perempuan, artinya masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Secara rinci data pilah gender terhadap IPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.102
Tabel IPM Pilah Gender Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Manusia	67.41	68.29	68,8	69.60	69.81
	Laki-Laki	*n/a*	72	72,49	73,15	73,39
	Perempuan	*n/a*	66,73	67,48	68,28	68,29
2.	Harapan Lama Sekolah	12,61	12,90	12,91	13,04	13,34

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Laki-Laki	*n/a*	12,87	12,88	13,01	13,33
	Perempuan	*n/a*	12,94	13,35	13,48	13,53
3.	Rata-Rata Lama Sekolah	7,05	7,29	7,34	7,53	7,54
	Laki-Laki	*n/a*	7,90	7,94	7,97	7,98
	Perempuan	*n/a*	6,82	6,87	7,09	7,10
4.	Angka Harapan Hidup	72,87	72,98	73,11	73,22	73,40
	Laki-Laki	*n/a*	71,02	71,15	71,26	71,50
	Perempuan	*n/a*	74,83	74,96	75,06	75,24
5.	Pengeluaran Perkapita	8.276	8.446	8.757	9.066	8.901
	Laki-Laki	*n/a*	10.988	11.396	11.904	11,636
	Perempuan	*n/a*	7.895	8.037	8.305	8.205

Sumber: BPS, 2021

Hampir seluruh komposit pembentuk IPM menunjukkan bahwa nilai capaian IPM Laki-Laki lebih baik jika dibandingkan dengan perempuan. Hanya pada komposit Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki terdapat selisih 3,26 tahun, sedangkan 2 komposit pembentuk IPM lainnya menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Namun meskipun Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, Rata-rata Lama Sekolah perempuan jauh berada di bawah laki-laki. Artinya kesempatan perempuan mengenyam pendidikan tidak sama besarnya dibandingkan dengan laki-laki. Dari analisis kesetaraan gender dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Kebumen masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi. IDG Kabupaten Kebumen mengalami penurunan pada periode 2017-2020 dari 70,13 di 2017 menjadi 66,89 pada 2020. Hal tersebut mengindikasikan ketimpangan gender di Kabupaten Kebumen semakin membesar.

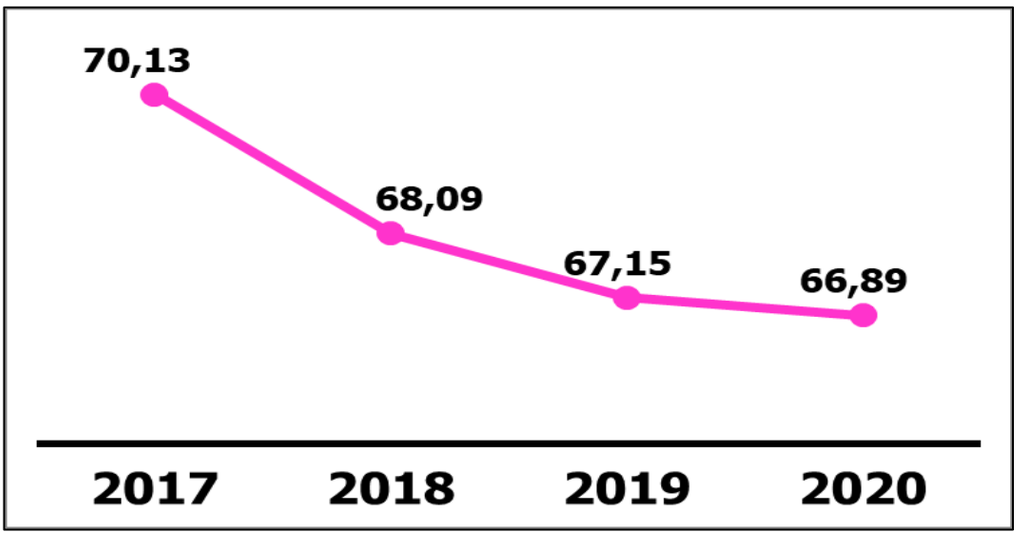

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.48
IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

IDG terdiri dari tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non-pertanian disesuaikan antara

laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berdasarkan data perkembangan komposit IDG, ketimpangan gender terlihat menonjol pada kontribusi pendapatan perempuan, dan keterlibatan perempuan pada pengambilan kebijakan.

Tabel 2.103
Komposit Pembentuk IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
1.	Keterlibatan Perempuan di parlemen (%)	28,00	24,00	22,00	22,00
2.	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	46,71	45,53	49,12	54,20
3.	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	25,20	25,59	25,67	25,79

Sumber: BPS, 2021, Dispermades P3A, data diolah

Di Kabupaten Kebumen upaya *affirmative action* dapat dilihat pada data keterwakilan perempuan dalam parlemen, dimana pada tahun 2017 keterwakilan perempuan dalam lembaga politik baru mencapai 28% dari keterwakilan perempuan dan parlemen dan menurun menjadi 26% pada 2018, serta pada tahun 2019 dan tahun 2020 menurun menjadi 22%.

Tabel 2.104
Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki	36	36	34	34	39
2	Perempuan	14	14	13	12	11
Total		50	50	50	47	50

Sumber: Dispermades P3A 2021

Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan dari tahun 2016 – 2020 meningkat dari 48,44% menjadi 53,54%.

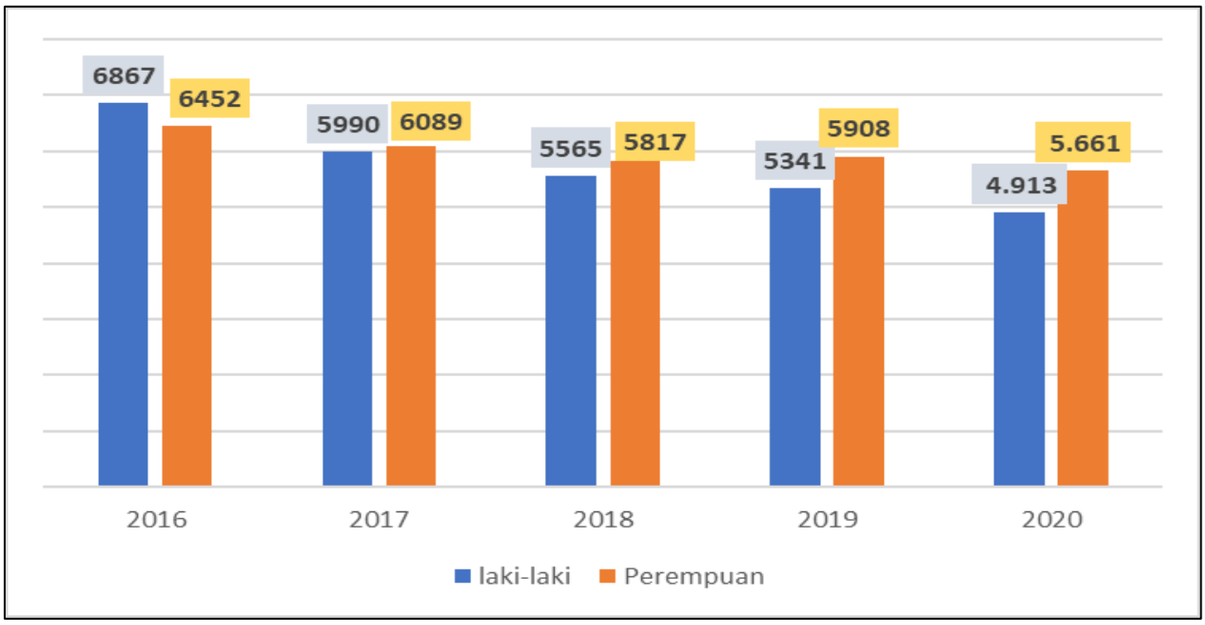

Sumber: Data profil gender, Dispermas P3A dan BKPPD, 2021

Gambar 2.49
Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Partisipasi perempuan yang dapat berperan dalam pengambilan kebijakan di lembaga pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah perempuan yang menempati posisi Eselon II-IV. Berdasarkan data perkembangan partisipasi perempuan pada posisi strategis di pemerintahan menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki jabatan Eselon II mengalami peningkatan mulai tahun 2017. Sementara untuk pejabat Eselon III, jumlah perempuan yang menduduki jabatan mengalami peningkatan yang signifikan dari 15 orang menjadi 48 orang. Pada jabatan Eselon IV, partisipasi perempuan juga meningkat dari 132 orang dan menjadi 220.

Tabel 2.105
Pegawai Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan Eselon II	2	5	5	5	5
Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan Eselon III	15	42	45	49	48
Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan Eselon IV	132	227	223	212	220

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2021

Tingginya angka kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kebumen baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak menjadi keprihatinan tersendiri. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, tetapi kasus kekerasan berbasis gender dan anak masih terjadi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan daerah tersebut juga dibentuk unit pelayanan terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 72 Tahun 2013 tentang Monitoring dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Kasus Kekerasan terhadap Anak. Di dalam penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kebumen ditangani oleh P2TP2A KARTIKA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan) yang terdiri dari Tim Koordinator dan Tim Pelaksana Harian yang terdiri dari lintas sektor termasuk di dalamnya pelibatan instansi vertikal (TNI, POLRI) dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.106
Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Lokasi Lembaga	Jumlah Korban / TKP	2016		2017		2018		2019		2020	
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
P2TP2A KARTIKA	Jumlah Korban	81	40	60	20	61	43	68	60	70	32
	Rumah Tangga	41	36	37	16	23	35	43	42	45	24
	Tempat Kerja	0	0	0	0	1	0	3	10	0	2
	Sekolah	16	0	0	0	15	0	8	0	8	1

Lokasi Lembaga	Jumlah Korban / TKP	2016		2017		2018		2019		2020	
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
	Fasilitas Umum	15	4	0	0	22	7	11	6	14	5
	Lainnya	17	0	14	1	0	1	3	2	3	0

Sumber: P2TP2A "KARTIKA" (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "Kebumen Adil Gender anti Kekerasan"), 2021

Dalam lima tahun terakhir jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 121 kasus di tahun 2016 menjadi 102 kasus di tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim P2TP2A Kartika.

Tabel 2.107
Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Jenis Kasus AKH	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
Fisik	6	3	8	0	3	Perkelahian, Pengeroyokan
Psikis	0	0	1	2	3	Perundungan, Pengancaman melalui HP
Pencurian	3	2	4	4	4	Pencurian Sepeda motor, Bensin, HP, Rokok
Pembunuhan	0	0	0	1	0	Pembunuhan bayi baru lahir (di luar nikah)
Jumlah	9	5	13	7	10	

Sumber: P2TP2A KARTIKA, Dispermades, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum cukup memprihatinkan. Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2016 – 2020 meningkat 9 kasus menjadi 10 kasus. Kasus tersebut bervariasi mulai dari perkelahian dan perundungan sampai pencurian. Diperlukan komitmen pelaksanaan kebijakan yang benar-benar memperhatikan kepentingan dan kondisi masyarakat, khususya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan spesifik, pelayanan kesehatan jiwa, penanganan dan pendampingan bagi korban kekerasan serta peningkatan ekonomi pemberdayaan perempuan.

3) Pangan

Dilihat dari jumlah produksi dibandingkan kebutuhan, ketersediaan pangan utama Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 hingga tahun 2020 relatif aman meskipun terjadi fluktuasi dengan tren yang meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan utama (beras) yang selalu dapat memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.108
Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan (Beras)
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Jiwa	Kebutuhan Pangan (ton)	Produksi (ton)	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (ton)	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (ton)	Ketersediaan Pangan (ton)
2016	1.346.606	108.671,10	273.761,33	273.761,33	-	273.761,33
2017	1.358.448	109.626,75	273.650,62	273.650,62	-	273.650,62
2018	1.375.221	110.980,33	282.199,89	282.199,89	-	282.199,89
2019	1.385.377	111.816,06	290.693,39	290.693,39	-	290.693,39
2020	1.394.038	112.498,87	265.101,09	265.101,09	-	265.101,09

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, terlihat bahwa terjadi fluktuasi jumlah desa rawan pangan se-Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 sampai 2020. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kerawanan pangan sangat mudah berubah dikarenakan pengaruh faktor internal maupun eksternal sehingga sangat penting untuk diintervensi. Tingkat kerawanan pangan melibatkan banyak variabel dari ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan serta variabel pada sektor lainnya (kemiskinan, tenaga kesehatan, air bersih, sarana pangan, tenaga kesehatan).

Tabel 2.109
Data Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Rawan Pangan Prioritas 1, 2 dan 3	249	170	293	131	131

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Terkait dengan cadangan pangan daerah, sampai dengan tahun 2020 cadangan pangan daerah berjumlah 2,4 ton dari jumlah ideal 521 ton. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya kondisi sarana prasarana penyimpanan cadangan pangan serta banyaknya prioritas daerah yang harus diselesaikan sehingga membatasi kemampuan pengadaan cadangan gabah. Langkah yang sudah ditempuh adalah melalui perbaikan sarana prasarana penyimpanan meskipun masih terbatas pada kegiatan pemeliharaan, bukan pembangunan baru sesuai standar. Selain itu, pengadaan gabah tahunan juga sudah mengalami peningkatan pada tahun 2020 meskipun belum mampu mencapai angka ideal. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat se-Kabupaten Kebumen sudah mencapai 697 Unit. Namun dari 460 desa/ kelurahan, baru ada 266 desa/ kelurahan (57,82%) yang memiliki lumbung pangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 194 desa/ kelurahan (42,17%) yang belum memiliki lumbung pangan.

Stabilitas harga pangan bisa dilihat berdasarkan koefisien variasi (CV) dari data harga secara runtun waktu. Semakin kecil nilai koefisien variasi dapat diinterpretasikan bahwa harga relatif stabil atau memiliki fluktuasi yang rendah. Secara umum, harga komoditas pangan di Kabupaten Kebumen berada pada posisi stabil, namun masih terjadi fluktuasi pada komoditas cabai merah.

Tabel 2.110
Harga Rata-Rata Pangan Strategis Tahun 2017-2020

No	Komoditas	2017		2018		2019		2020	
		Koefisien Variasi	Keterangan	Koefisien Variasi	Ket-erangan	Koefisien Variasi	Keterangan	Koefisien Variasi	Keterangan
1	Beras	3,2	Stabil	3,3	Stabil	6,34	Tidak Stabil	2,77	Stabil
2	Jagung	17,9	Stabil	5,0	Stabil	3,22	Stabil	6,29	Stabil
3	Kedelai	0,0	Stabil	0,8	Stabil	0,99	Stabil	8,99	Stabil
4	Cabe Merah Keriting	33,9	Tidak stabil	32,0	Tidak stabil	48,71	Tidak Stabil	43,22	Tidak Stabil
5	Bawang Merah	26,5	Tidak stabil	15,1	Stabil	20,41	Stabil	16,77	Stabil
6	Telur Ayam Ras	7,4	Stabil	8,1	Stabil	5,78	Stabil	10,13	Stabil
7	Daging Ayam Ras	5,3	Stabil	8,9	Stabil	4,35	Stabil	8,06	Stabil
8	Daging Sapi	1,3	Stabil	2,3	Stabil	2,58	Stabil	6,5	Stabil
9	Gula Pasir	4,8	Stabil	2,8	Stabil	4,86	Stabil	13,15	Stabil

No	Komoditas	2017		2018		2019		2020	
		Koefisien Variasi	Keterangan	Koefisien Variasi	Ketе-rangan	Koefisien Variasi	Keterangan	Koefisien Variasi	Keterangan
10	Minyak Goreng	4,5	Stabil	3,8	Stabil	1,01	Stabil	5,35	Stabil
11	Tepung Terigu	0,6	Stabil	3,6	Stabil	0	Stabil	0	Stabil

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Salah satu penyebab tingginya harga pangan adalah rantai pasok yang terlalu panjang dimana pihak yang menikmati keuntungan besar adalah para pedagang perantara. Untuk sampai ke konsumen akhir, komoditas melewati beberapa tahapan dari mulai petani, pengepul/ tengkulak, pedagang besar/ penggilingan, grosir, pedagang eceran dan konsumen akhir. Lemahnya kelembagaan pemasaran khususnya gabungan kelompok tani/ kelompok tani menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar dalam penentuan harga jual sehingga petani menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi tersebut menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi tinggi sedangkan harga yang diterima petani relatif rendah. Dalam rangka mempersingkat rantai distribusi, intervensi yang telah dilakukan pemerintah daerah antara lain melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), kegiatan pasar tani maupun beberapa pameran yang memberikan akses kepada petani untuk langsung menjual produknya kepada konsumen.

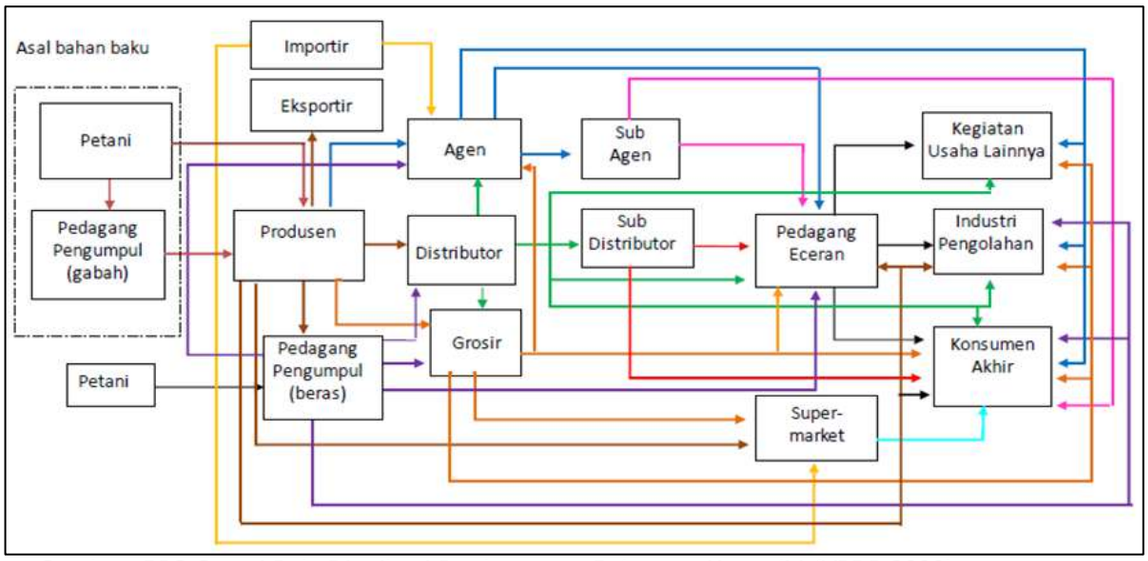

Sumber: BPS-Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi (VPDP 2009)

Gambar 2.50
Diagram Rantai Distribusi Pangan

Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penguatan ketahanan pangan mandiri. Data memperlihatkan bahwa jumlah kelompok yang telah dibina dan diberi stimulan pemanfaatan pekarangan masih sangat kecil yaitu 36,3 persen dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.111
Data Kelompok yang Telah Dibina dan Memperoleh Bantuan Stimulan Pemanfaatan Pekarangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok	46	40	41	40	30

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Terkait dengan keamanan pangan, di Kabupaten Kebumen masih ditemukan adanya bahan pangan segar yang mengandung bahan berbahaya (pestisida). Oleh karena itu, perlu dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan terus-menerus kepada pelaku usaha pertanian.

Tabel 2.112
Data Hasil Rapid Tes PSAT (Positif Pestisida) Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Temuan pada Sampel	6	4	7	2	6

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

4) Pertanahan

Kinerja pertanahan dapat dilihat dari permohonan sertifikat di Kabupaten Kebumen yang cenderung meningkat selama kurun waktu 2016-2020. Peningkatan tersebut meliputi permohonan hak milik, hak pakai, dan hak tanggungan. Sementara itu, *trend* penyelesaian permohonan sertifikat juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Peningkatan penyelesaian meliputi permohonan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak tanggungan. Persentase luas lahan bersertifikat masih rendah meskipun terdapat peningkatan yang disebabkan kesadaran masyarakat dalam mengurus legalitas tanah masih cukup rendah.

Jumlah permohonan dan penyelesaian sertifikat di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara detail disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.113
Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat
di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Jenis Sertifikat	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Permohonan					
	a. Hak milik	1.667	1.507	1.423	2.405	34.063
	b. Hak guna bangunan	279	205	282	361	271
	c. Hak pakai	71	71	285	40	857
	d. Hak tanggungan	3.615	3.615	3.582	4.085	3.640
	e. Roya	2.010	2.010	2.160	2.263	2.139
2	Penyelesaian					
	a. Hak milik	1.398	1.398	1.166	2.375	33.244
	b. Hak guna bangunan	168	168	306	350	255
	c. Hak pakai	85	85	292	35	864
	d. Hak tanggungan	3.642	3.642	3.538	4.134	3.627
	e. Roya	2.034	2.034	2.130	2.157	2.100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2021

Kinerja penanganan dan kebijakan pertanahan Kabupaten Kebumen selama 2016-2020 diantaranya koordinasi dan fasilitasi Program Nasional Agraria (Prona) bagi usaha kecil menengah (UKM); program sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); program sertifikasi tanah bagi nelayan melalui Program Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS); serta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); serta fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah di wilayah Urut Sewu. Program PTSL merupakan satu program strategis nasional dalam rangka legalisasi aset hak-hak atas tanah masyarakat, dengan target nasional pada 2025 mencapai seluruh bidang-bidang tanah di Indonesia harus sudah terdaftar dan bersertifikat.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat penyelesaian masih lebih rendah dengan permohonannya, hal ini disebabkan karena perhitungan permohonan yang masuk berdasarkan tahun berjalan sesuai dengan jumlah berkas yang masuk di tahun tersebut,

sedangkan untuk permohonan yang masuk memerlukan waktu penyelesaian yang berbeda-beda, contohnya permohonan hak milik terdiri dari:

a) Permohonan penerbitan sertifikat dari Letter C, membutuhkan waktu kurang lebih 98 hari, selama waktu tersebut proses yang berjalan adalah pengukuran, pengumuman, dan penerbitan sertifikat. Jangka waktu tersebut belum termasuk apabila terdapat kendala dan permasalahan di lapangan.
b) Pemecahan dan penggabungan sertifikat, membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari, termasuk proses pengukuran dan penerbitan sertifikatnya.
c) Peralihan hak (meliputi jual beli, hibah, waris, APHB, lelang) memerlukan waktu kurang lebih 5 hari.

5) Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dibangun dari komponen kualitas air, udara, tanah, dan penanganan sampah. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.114
Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,56	68,67	72,25	75,89	73,92
2	Indeks Kualitas Air	51,25	56,67	56,67	63,33	57,69
3	Indeks Kualitas Udara	75	93,3	87,83	88,44	90,72
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,21	59,21	70,66	70,66	70,66

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen semakin meningkat lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, nilai IKLH Kabupaten Kebumen sebesar 61,56 meningkat menjadi 73,92 di tahun 2020. Peningkatan IKLH dicapai seiring peningkatan indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan yang menandakan kualitas lingkungan hidup yang semakin membaik di Kabupaten Kebumen.

a) Pencemaran

Berdasarkan analisis kualitas air sungai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, 50% sungai yang dipantau di wilayah Kabupaten Kebumen masuk kategori memenuhi syarat, 33% cemar ringan dan 17% cemar sedang.

Beberapa parameter pemantauan yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, yakni:

1. Pada Sungai Kedung Bener, Sungai Ketek, dan Sungai Gombong melebihi baku mutu Parameter BOD.
2. Pada bagian hilir Sungai Wawar, hilir Sungai Luk Ulo dan Sungai Pucang melebihi baku mutu Parameter TSS.
3. Pada Sungai Mawar Bagian Tengah, Hilir Sungai Wawar melebihi baku mutu Parameter Fosfat.
4. Pada Sungai Wawar bagian tengah melebihi baku mutu Parameter Fecal Coli.
5. Pada Sungai Luk Ulo (hilir), Sungai Wawar (tengah dan hilir) melebihi baku mutu Parameter Total Coliform.

Kinerja pengendalian pencemaran air/sungai Kabupaten Kebumen selama 2016-2020 diantaranya penetapan kelas air dan baku mutu sumber air; penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air; penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah (IPAL) baik industri maupun limbah rumah tangga (bagi masyarakat berpenghasilan rendah); pemantauan kualitas air paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat; penghentian sumber pencemaran air; pembersihan air dan pemulihan kualitas air.

b) Persentase Penanganan Sampah

Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal itu dapat dilihat dari persentase sampah terangkut yang meningkat dari 37,80% di tahun 2016 menjadi 58,73% pada tahun 2020. Peningkatan persentase sampah terangkut tersebut diikuti pula dengan penambahan jumlah TPS dan peningkatan rasio daya tampung dalam lima tahun terakhir, dari 1,25 menjadi 1,59. Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.115
Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase sampah terangkut (%)	37,80	45,97	51,92	51,51	58,73
2	Jumlah TPSS (unit)	155	156	190	195	196
3	Daya Tampung TPS (ton)	426,25	429	522,5	536,25	539,00
4	Jumlah volume sampah yang terangkut (m3)	222	270	312	314,65	372
5	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3)	587,28	587,28	601	610,84	633,42
6	Jumlah penduduk perkotaan (jiwa)	271.963	272.521	278.880	299.629	320.378
7	Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk	1,25	1,26	1,54	1,58	1,59

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan dokumen kependudukan sebagai pendataan diri dan status warga masyarakat.

Kinerja disdukcapil Kabupaten Kebumen pada RPJMD 2016-2021 adanya Fokus Pemerintah terhadap Perbaikan dan Inovasi layanan terhadap KTP elektronik berbasis NIK (Mencakup layanan Biodata Penduduk dan KK). Penerbitan Akte Kelahiran merupakan awal pencatatan Kependudukan untuk menindaklanjuti dokumen layanan Kependudukan dan Pencatatan sipil lainnya.

Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, walaupun terjadi fluktuasi pada indikator rasio bayi berakta kelahiran dan cakupan penerbitan akta kelahiran. Kepemilikan Akta Kematian menunjukan data yang sama selama periode 2016-2020. Kepemilikan Kartu identitas Anak baru dilaksanakan pada tahun 2018 sampai 2020. Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lebih lengkap disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.116
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP	90%	92,52%	96,05%	99,88%	100%
2	Rasio bayi berakta kelahiran	92,39%	97,76%	98,33%	96,80%	100%
3	Cakupan penerbitan KTP	45,44%	93,86%	98,61%	99,88%	99,07%
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	90%	89,66%	90,07%	93,19%	90,36%
5	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	NA	NA	14,43%	27,30%	31,21%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen, 2021

Peningkatan kinerja ini juga didukung beberapa inovasi yang dilakukan di antaranya program KeTaPel-17 dan Baladewa Lahir. KeTaPel-17 merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen yang diperuntukan bagi wajib KTP pemula atau usia 17 tahun, dimana pada saat usia 17 tahun, langsung menerima KTP-el sebagai hadiah ulang tahun dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sedangkan Baladewa Lahir merupakan inovasi penerbitan akta kelahiran cepat bagi bayi yang lahir di bangsal, rumah sakit atau Puskesmas bekerjasama dengan 40 rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Kebumen.

Permasalahan penting lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan serta sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan untuk penanganan masalah-masalah pembangunan daerah. Contohnya adalah sinkronisasi data kependudukan/NIK dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan ini juga sangat penting dalam rangka optimalisasi upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 serta antisipasi ancaman pandemi lain di masa yang akan datang.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di desa melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Pemberdayaan masyarakat, penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, serta kemasyarakatan menjadi penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membangun sinergitas pembangunan desa dan pembangunan daerah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Kinerja pemberdayaan masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satunya keaktifan dalam berorganisasi.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena masyarakat adalah salah satu unsur pembentuk dan pendukung desa. Sesuai Tupoksi Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, bahwa untuk Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial

ekonomi masyarakat di desa melalui kelembagaan yang ada di desa, antara lain PKK, Posyandu serta BUM Desa.

Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan selama lima tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.117
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Pemberdayaan Masyarakat	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pemberdayaan masyarakat (LPM)	200	200	354	Na	Na
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	48	50	50	50	Na
3.	Jumlah Organisasi Masyarakat	216	202	234	240	240
5.	PKK aktif	487	487	487	487	487
6.	Posyandu aktif	2.105	1.945	1.914	1.909	2.122
7.	Penilaian BUM Desa tingkat dasar	Na	Na	179	186	124
8	Penilaian BUM Desa Tingkat Tumbuh	Na	Na	123	115	246
9	Penilaian BUM Desa Tingkat Berkembang dan Maju	Na	Na	9	9	19
10	IDM Kategori Sangat Tertinggal dan Tertinggal	Na	176	66	22	10
11	IDM Kategori Berkembang	Na	253	327	357	348
12	IDM Kategori Maju	Na	19	53	69	90
13	IDM Kategori Mandiri	Na	1	3	1	1

Sumber: Dispermades P3A dan Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Undang-Undang Desa memberikan dorongan yang luar biasa terhadap perkembangan desa. Selain dalam pembangunan infrastruktur dasar, desa juga dapat membangun ekonomi desa salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penilaian kategori BUM Desa baru dimulai pada tahun 2019 karena BUM Desa secara massif baru mulai berdiri di desa pasca lahirnya Undang-Undang Desa. Pada tahun 2019 seluruh desa di Kabupaten Kebumen telah mendirikan BUM Desa dengan jenis usaha yang sangat bervariasi. Dalam perkembangannya pertumbuhan BUM Desa telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa meskipun belum optimal karena BUM Desa yang ada masih dalam tahap awal pembentukan, masih lemahnya perencanaan bisnis, dan belum sepenuhnya mampu menggali potensi yang dimiliki oleh desa. Dari 449 desa, Berdasarkan hasil klasifikasi BUM Desa tahun 2020 dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu: kategori maju sebanyak 5 desa, kategori berkembang sebanyak 44 desa, kategori tumbuh sebanyak 275 desa, dan kategori tidak aktif sebanyak 47 desa.

Dari sudut pandang Indeks Desa Membangun (IDM) kemandirian desa didasarkan pada konsepsi bahwa desa maju mandiri mengedepankan pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan saling mengisi dalam menjaga potensi desa untuk mensejahterakan kehidupan desa (DitjenKemendes PDTT, 2020). Pada Tahun 2020, sebagian besar desa di Kabupaten Kebumen dalam tahapan desa berkembang, terdapat 10 desa dengan kategori tertinggal, 90 desa dengan kategori maju dan baru 1 desa dengan kategori mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Adapun penyajian data IDM di Kabupaten

Kebumen sudah di update sesuai SOP Pengukuran IDM Tahun 2020 (sesuai lampiran surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT RI nomor 3/PR.01.02/II/2020 tanggal 27 Pebruari 2020, perihal : Update Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020). Berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan untuk mendapatkan data desa yang akurat sesuai fakta yang ada di desa. Adapun hasil update Status klasifikasi desa di Kabupaten Kebumen sesuai dengan data IDM pada tahun 2020 adalah : Desa Mandiri sebanyak 1 desa, Desa Maju sebanyak 90 desa , Desa Berkembang sebanyak 348 desa, Desa Tertinggal sebanyak 10 desa, dan untuk desa sangat tertinggal sudah tidak ada.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Selama 5 tahun terakhir tingkat kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dari 13,41% di tahun 2016 menjadi 13,37% di tahun 2020. Artinya Keluarga Pra Sejahtera mengalami peningkatan status menjadi Keluarga Sejahtera I yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera I dalam kurun waktu 2016-2020. Namun disisi lain pada tahun 2020 terdapat penurunan Keluarga Sejahtera II yang beralih menjadi Keluarga Sejahtera I yang disebabkan Pandemi Covid-19.

Tabel 2.118
Persentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Keluarga Pra Sejahtera	13,41	13,48	13,35	13,35	13,37
2.	Keluarga Sejahtera I	59,90	59,91	59,92	59,92	60,07
3.	Keluarga Sejahtera II	26,69	26,71	26,73	26,73	26,56

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2021

b) Keluarga Berencana

Kinerja Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Kebumen mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2016-2020. Hal ini dapat dilihat dari rasio akseptor KB dari 74,28 pada 2016 menurun menjadi 70,60 di tahun 2020. Perlu peningkatan pelaksanaan program KB agar pengendalian penduduk lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kinerja Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi selama kurun waktu tahun 2016-2020. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jumlah anak per keluarga mencapai 2,4 pada tahun 2020, yang artinya rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan (*Total Fertility Rate*/TFR) Kebumen 2,4 anak selama hidupnya dan diharapkan dapat menekan angka TFR hingga 2,1 secara bertahap sebagaimana target nasional. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 208.841 pada tahun 2016 menjadi 194.309 pada tahun 2020, sedangkan pada jumlah PUS ber-KB mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu 155.134 pada tahun 2016 menjadi 137.183 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas anak bukan lagi pada kuantitas anak yang berpengaruh pada turunnya angka TFR di Kabupaten Kebumen. Jumlah PUS tidak ber-KB mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya keluarga yang tidak mengijinkan ber-KB oleh Kepala Keluarga dan adanya beberapa kegagalan yang disebabkan pemasangan alat kontrasepsi. Rasio akseptor KB dari 74,28 pada tahun 2016 menurun menjadi 70,60 di tahun 2020. Perlu langkah konkrit dalam upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Kebumen. Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.119
Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	2,7	3	2,08	2,4
Jumlah Pasangan Usia Subur	208.841	206.543	199.509	198.315	194.309
Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	155.134	154.502	142.389	141.441	137.183
Jumlah Pasangan Usia Subur tidak ber-KB	53.707	52.041	51.360	56.874	57.126
Rasio Akseptor KB	74,28	74,80	71,37	71,00	70,60

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2021

c) Pengendalian Penduduk

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kebumen telah mencanangkan 77 Kampung KB dan 1 Kampung KB percontohan (*Centre of Excellent*) yang tersebar di 26 kecamatan. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Tujuan dibentuknya kampung Keluarga Berencana adalah untuk menentukan kualitas hidup masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan melihat aspek pengendalian penduduk agar masyarakat berperan nyata dalam pembangunan berbasis keluarga yang berupa pelayanan KB, Pembangunan Keluarga dan kegiatan lintas sektor lainnya.

Tabel 2.120
Pencanangan Kampung KB Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kampung KB	7	26	35	69	77

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2021

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk memiliki kecenderungan meningkat. Capaian rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2016 sampai tahun 2018 cenderung tinggi, terlihat bahwa rata-rata setiap keluarga mempunyai anak 3 orang dan pada tahun 2020 rata-rata keluarga memiliki 2 anak. Kondisi rata-rata jumlah anak per keluarga sudah sesuai dengan target pemerintah dan konsep Keluarga Berencana 2 Anak Lebih Baik. Rasio sebagai akseptor KB dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan, meskipun bila dilihat dari *Total Fertility Rate* (TFR) angka kelahiran cenderung menurun rata-rata perempuan usia 15-49 tahun selama masa suburnya rata-rata memiliki 2 orang anak.

Peran Kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk diantaranya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menekan angka kelahiran, meningkatkan angka kepesertaan ber-KB, memenuhi kebutuhan angka ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*), memenuhi target *Total Fertility Rate* sebesar 2,1, pencegahan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.121
Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,31	0,29	0,26	0,24	1,48
2.	*Total Fertility Rate* (TFR)	2,65	2,60	2,55	2,45	2,40
3.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	2,70	2,70	2,70	2,65	2,40
4.	Rasio Akseptor KB	74,86%	72,21%	71,75%	71,42%	70,60%

Sumber: Dinsos PPKB, 2021

9) Perhubungan

Pada urusan perhubungan, terdapat beberapa aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah antara lain penyediaan rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan keselamatan jalan, pengaturan arus penumpang angkutan umum, kelayakan kendaraan umum dan penyediaan fasilitas terminal.

a) Rambu-rambu Lalu Lintas

Adanya kompleksitas pada lalu lintas menyebabkan pengelolaan lalu lintas harus dijalankan dengan baik, salah satunya yaitu dengan menyediakan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan. Fasilitas kelengkapan keselamatan jalan merupakan fasilitas yang harus dicukupi oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang keselamatan masyarakat dalam melakukan mobilitas ketika berkendara di jalan raya. Berdasarkan data kelengkapan keselamatan jalan dapat diketahui kondisi kelengkapan keselamatan jalan tahun 2020. Dari fasilitas yang terpasang, belum mencukupi kebutuhan ideal sehingga masih memerlukan kebijakan terkait hal tersebut untuk memberikan pelayanan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Tabel 2.122
Data Kelengkapan Keselamatan Jalan 2020

No	Sarana Lalu Lintas	realisasi	Kebutuhan	Cakupan (%)
1.	Sarana Kelengkapan Jalan			
1.1.	Jumlah Rambu Rambu yang terpasang (unit)	2.406	8.000	30,08%
1.2.	Jumlah APILL yang dipelihara (unit)	54	60	90,00%
1.3.	Jumlah LPJU terpasang (unit)	4.904	14.000	35,03%
2.	Sarana Prasarana Jalan			
2.1.	Pagar Pengaman Jalan (meter)	1.204	2.000	60,20%
2.2.	Jumlah Deliniator (unit)	195	400	48,75%
2.3.	Jumlah Paku Jalan (unit)	231	400	57,75%
2.4.	Jumlah barikade (unit)	455	600	75,83%
2.5.	Jumlah Waterbarier (unit)	42	150	28,00%

Sumber : Dishub Kab. Kebumen, 2021

b) Angkutan umum

Angkutan umum merupakan alternatif kendaraan pribadi dalam rangka mendukung keterjangkauan transportasi dan peningkatan mobilitas bagi masyarakat. Akses transportasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Secara lebih jauh, angkutan umum memberikan manfaat dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup karena merupakan moda kendaraan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak.

Kendaraan angkutan umum di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 didominasi oleh angkutan perdesaan 50,2%, sedangkan bus (AKDP, AKAP) sebesar 32,3%. Jalur trayek bus melalui jalan nasional di tengah kabupaten, sedangkan jalur angkutan perdesaan menghubungkan antar-kecamatan dalam kabupaten.

Tabel 2.123
Jumlah Angkutan Umum dan Izin Trayek di Kabupaten Kebumen
Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah angkutan umum	1.016
	• Angkutan perdesaan *seat* 12	291
	• Angkutan perdesaan *seat* 16	241
	• Angkutan kota dalam provinsi	173
	• Angkutan kota antarprovinsi	155
	• Angkutan pariwisata	138
	• Taksi	5
	• Antar jemput antarprovinsi	13
2	Jumlah izin trayek	82

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2021

Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Kebumen mengalami tren peningkatan dari tahun 2016-2020. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat Kebumen meningkat. Secara umum, penumpang angkutan umum didominasi oleh penumpang bus.

Tabel 2.124
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penumpang Bus	289.931	298.687	304.661	310.661	316.969
2	Total Jumlah Penumpang	289.931	298.687	304.661	310.661	316.969

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2021

c) Uji Kir Angkutan Umum

Dalam rangka menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang, maka dilakukan uji kir pada kendaraan umum untuk menjamin persyaratan dan kelayakan kendaraan. Kinerja pelayanan untuk pengujian transportasi umum di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan pada tahun 2016-2019 dari 6.678 menjadi 7.206, namun pada tahun 2020 jumlahnya menurun menjadi 4.748. Hal ini disebabkan adanya pemberlakuan pembatasan aktivitas dan mobilitas untuk menekan penyebaran Covid-19.

Tabel 2.125
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Angkutan umum	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil penumpang umum	343	349	349	349	201
2	Mobil bus	1265	1328	1348	1352	662
3	Mobil barang	5070	5135	5320	5504	3861
4	Kereta tempelan	Na	Na	3	3	3
5	Kereta Gandengan	Na	Na	1	1	1
	Jumlah	6678	6812	7021	7206	4748

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2021

d) Jenis terminal

Jenis terminal terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Mayoritas terminal bus di Kabupaten Kebumen merupakan terminal Tipe C. Terminal Tipe C merupakan terminal yang berfungsi untuk melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan. Jumlah terminal Kebumen dari tahun 2016-2020 mengalami perubahan. Pada tahun 2016, terminal tipe C Karanganyar dan Kutowinangun tidak beroperasi karena pelayanan angkutan pedesaan telah dapat dicukupi oleh terminal lain di sekitarnya. Pada tahun 2019 terminal tipe C Prembun juga tidak beroperasi yang disebabkan oleh administrasi kepemilikan tanah terminal, sementara di tahun yang sama terminal tipe C Karanggayam dibangun dengan pertimbangan kebutuhan konektivitas angkutan umum untuk masyarakat di wilayah utara Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.126
Jumlah Terminal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Jenis Kegiatan	Jumlah Terminal				
	2016	2017	2018	2019	2020
TNB Type C Kebumen	1	1	1	1	1
TNB Type C Gombong	1	1	1	1	1
TNB Type C Karanganyar	-	-	-	-	-
Terminal Bus Gombong	1	1	1	1	1
TNB Type C Prembun	1	1	1	-	-
Terminal Bus Kebumen	1	1	1	1	1
TNB Type C Kutowinangun	-	-	-	-	-
TNB Type C Karanggayam	-	-	-	1	1
Total	5	5	5	5	5

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2021

10) Komunikasi dan Informatika

Kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari indikator nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengalami peningkatan dari 2,11 pada tahun 2018 menjadi 3,42 pada tahun 2020. Penilaian SPBE mulai dilakukan pada tahun 2018. Berdasarkan laporan hasil evaluasi SPBE Tahun 2020 Kabupaten Kebumen menempati peringkat ke 6 dari 10 Kabupaten/Kota dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik terbaik di Indonesia. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, Kehandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Capaian nilai SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2016`-2020 secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.127
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tidak ada	Tidak ada	2,11	2,64	3,42

Sumber: Diskominfo Kab. Kebumen, 2021

Pada tahun 2020, dari 3 (tiga) domain pembentuk indeks SPBE Kabupaten Kebumen pada tahun 2020, domain tata kelola menjadi domain yang nilainya paling rendah. Keunggulan Kabupaten Kebumen antara lain telah adanya koordinasi secara menyeluruh baik internal instansi maupun lintas instansi pada kebijakan internal tata Kelola dan layanan. Kebijakan internal juga diiringi dengan pengintegrasian layanan naskah dinas, manajemen kepegawaian, perencanaan, penganggaran pengaduan publik dan pelayanan lainnya. Keseluruhan keunggulan saling terkait dan membuat pelaksanaan sistem pemerintahan menjadi efektif dan efisien baik dari anggaran maupun kinerja yang optimal. Kelemahan Kabupaten Kebumen antara lain adanya layanan pada layanan manajemen kinerja, dokumentasi dan informasi hukum yang sudah direncanakan dan dianggarkan namun belum terlaksana. Pada aspek kebijakan internal tata Kelola, masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta ditingkatkan. Selain itu pada penggunaan aplikasi umum berbagi pakai pada aspek tata Kelola belum ada integrasi, serta belum memiliki rencana induk SPBE.

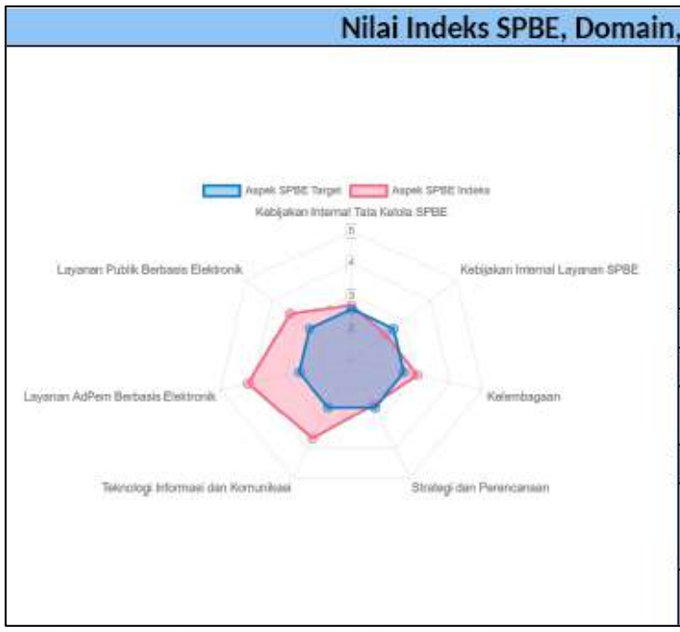

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Nama Indeks	Nilai
SPBE	3,42
Domain Kebijakan SPBE	2,47
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,71
Kebijakan Internal Layanan SPBE	2,30
Domain Tata Kelola SPBE	3,14
Kelembagaan	3,00
Strategi dan Perencanaan	2,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,67
Domain Layanan SPBE	3,85
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,14
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33

Sumber: Portal SPBE Nasional (spbe.go.id), 2021

Gambar 2.51
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Kabupaten Kebumen telah menerapkan *e-government* melalui aplikasi-aplikasi yang diterapkan di perangkat daerah. Penerapan *e-government* ini diharapkan dapat mendukung efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, mendukung reformasi birokrasi, mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya praktik KKN karena keberadaan TIK mampu memfasilitasi pemerintah untuk memecahkan berbagai kelemahan birokrasi di dalam menjalankan tugasnya yang menyangkut perencanaan, penganggaran, koordinasi dan pengawasan.

Sampai dengan tahun 2020 terdapat 106 aplikasi *e-government* yang telah diterapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dari 106 aplikasi tersebut, 94 aplikasi berbasis web dan sisanya 12 aplikasi berbasis desktop. Namun, dari sedemikian banyak aplikasi yang ada tersebut, mayoritas

dari masing-masing aplikasi tersebut masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi satu dengan lainnya, sehingga OPD masih harus menginput data di masing-masing aplikasi.

Gambaran kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Kebumen juga dapat dilihat dari ketersediaan prasarana pendukung teknologi, komunikasi dan informatika. Sampai dengan tahun 2020, prasarana TIK yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.128
Kondisi Infrastruktur Digital
Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2020

No	Komponen	Nilai Kondisi
1.	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	100% area telah tercover jaringan internet minimal 3G
2.	Tersedianya jaringan *broadband acces* untuk masyarakat	Tersedia
3.	Jumlah lokasi *wireless* untuk publik	Di setiap OPD/Kantor/kecamatan/ kelurahan terdapat hotspot baik untuk internal pemerintah maupun publik, di samping itu juga terdapat hotspot di area publik seperti Pasar Tumenggungan dan Taman Kota
4.	Akses internet terpusat (didistribusikan)	Kapasitas 370 + 400 (770) Mbps akses internasional
5.	Jaringan antar-SKPD	a. 43 OPD terkoneksi *Fiber Optic* (FO) b. 8 Kantor Camat terkoneksi FO c. 18 Kantor Camat terkoneksi *wireless* d. 10 Puskesmas terkoneksi FO e. 5 Puskesmas terkoneksi *wireless* f. 6 Kantor Kelurahan terkoneksi dengan FO g. 29 Kantor Desa terkoneksi FO h. 6 Kantor Desa terkoneksi *wireless* i. 4 Pasar terkoneksi FO j. 1 Pasar terkoneksi *wireless* k. 2 SMP terkoneksi FO l. 3 SMP terkoneksi *wireless* m. 2 Tempat wisata terkoneksi *wireless* n. 1 Pendopo Bupati terkoneksi FO o. 1 Rumdin Wakil BUpati terkoneksi FO p. POLRES Kebumen Terkoneksi FO q. KODIM Kebumen Terkoneksi FO r. PRAMUKA terkoneksi *wireless* s. Rumah Dhuafa terkoneksi FO t. PKK Terkoneksi FO u. Bawaslu Terkoneksi FO v. UPTD Metrologi Legal Terkoneksi *wireless* w. KPU Terkoneksi FO

Sumber: Masterplan Smartcity Kabupaten Kebumen, 2019 dan Diskominfo Kab. Kebumen, 2020

Sampai dengan tahun 2020, infrastruktur digital di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi dimana tidak ada daerah/wilayah di Kabupaten Kebumen yang sama sekali tidak terkoneksi dengan jaringan internet (*blank spot area*), seluruh OPD dan kecamatan telah terkoneksi jaringan internet. Namun demikian masih ada permasalahan ketersediaan jaringan internet di kantor desa/kelurahan, dimana dari 460 desa/kelurahan yang ada, baru 41 kantor desa/kelurahan (atau 9,13%) yang terkoneksi jaringan *Fiber Optic* dan wireless namun sebagian besar desa sudah terkoneksi internet secara mandiri menggunakan dana APBDes. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang ditempuh diantaranya;

fasilitasi penyediaan server dan domain website desa; fasilitasi sistem informasi desa; pelatihan desa online; penguatan kelembagaan keamanan data berupa Tim Penanganan Insiden Keamanan Siber atau *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT); fasilitasi pelaksanaan eletter surat OPD dan desa.

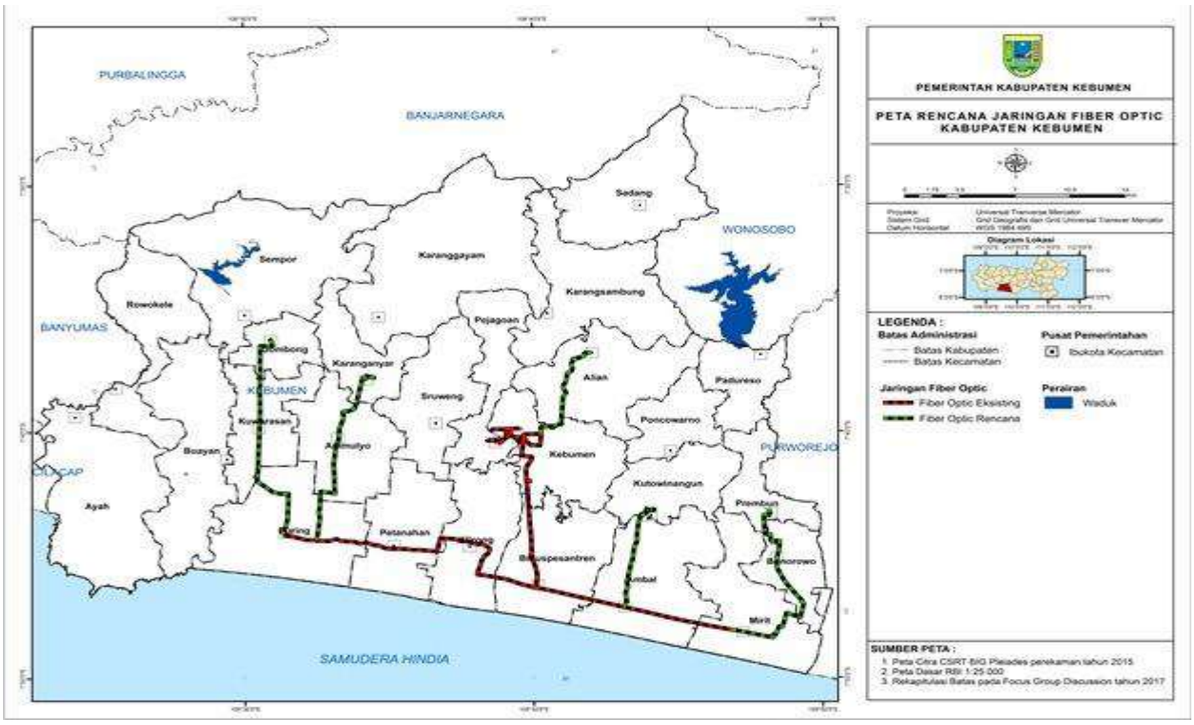

Sumber : Diskominfo Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.52
Peta Rencana Jaringan Fiber Optik Kabupaten Kebumen

Sementara itu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguasai teknologi dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen masih sangat terbatas, hanya sekitar 0,43% (47 orang) dari seluruh ASN yang berjumlah 11.000 orang, dengan persebaran belum merata ke seluruh perangkat daerah. Perangkat daerah yang memiliki SDM TIK baru sekitar 62% (16 PD) dari 26 PD yang ada. Beberapa perangkat daerah yang menangani langsung pelayanan publik kepada masyarakat seperti Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan kecamatan belum memiliki SDM TIK. Berikut persebaran ASN yang memiliki kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten.

Tabel 2.129
Persebaran ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

No	Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi TIK
1	BKPPD	5
2	BPPD	1
3	Bappeda	1
4	Setda	7
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2
10	Dinas Pendidikan	14
11	Dinas Perhubungan	1
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1

No	Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi TIK
13	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, UMKM	2
14	Inspektorat	3
15	Bakesbangpol	1
16	RSUD	1

Sumber: BKPPD Kabupaten Kebumen, 2021

Kebijakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan penguasaan TIK diantaranya adalah pengadaan Tim Pengembang dan Pengelola Aplikasi Daerah di Bidang PDE Diskominfo (9 orang programmer dan 1 orang Analis Sistem); Pelatihan rutin pengelola website OPD; penguatan dan pelatihan pejabat fungsional Pranata Komputer; pengiriman ke Lembaga pelatihan TIK; Kerjasama pengelolaan TIK dengan Pihak Ketiga (praktisi dan akademisi).

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja daerah di bidang koperasi menunjukkan perkembangan yang relatif positif. Indikator berupa persentase jumlah koperasi aktif terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, kenaikan persentase koperasi aktif tampaknya tidak linier dengan nilai omsetnya. Nilai omset per koperasi menunjukkan fluktuasi. Kinerja koperasi ini sangat berkaitan dengan masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan koperasi yang bersumber dari kurangnya jiwa kewirausahaan para pengurus koperasi. Permasalahan lain yang dihadapi oleh koperasi adalah rumitnya mekanisme pembubaran koperasi sehingga sekalipun terdapat koperasi yang secara fisik tidak ditemukan alamat, baik kantor maupun pengurus dan pengawasnya, namun tetap tercatat ada koperasi dan tidak dapat dibubarkan.

Tabel 2.130
Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif (%)	77	80	80	84	87,11
2	Omset Koperasi (Rp 000)	*n/a*	461.095.191	373.460.829	461.458.055	507.951.289
3	Omset per koperasi (Rp 000)	*n/a*	1.046.913	1.581.382	1.675.719	1.455.703
4	Usaha Mikro dan Kecil (unit)	43.134	44.017	44.467	45.715	46.460
5	Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina (unit)	*n/a*	2.894	2.357	2.744	5.500
6	Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas (unit)	*n/a*	17	25	31	76

Sumber: Disnaker-KUKM Kab. Kebumen, 2021

Jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, namun demikian kemampuan untuk melakukan pembinaan masih sangat rendah (kurang dari 10%) dan menunjukkan kemampuan yang terus menurun. Sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan adalah meningkatnya status usaha, terlihat bahwa jumlah usaha mikro dan kecil yang naik kelas meningkat, walaupun secara proporsi masih sangat kecil (sekitar 1% dari usaha mikro dan kecil yang dibina).

Kurangnya permodalan dan jiwa kewirausahaan sebagai akibat dari rendahnya kapasitas dan pendidikan pelaku usaha selalu menjadi masalah dalam pengembangan

usaha mikro dan kecil. Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan belum memenuhi standar, kurangnya inovasi produk serta lemahnya jaringan pemasaran. Kondisi tersebut menimbulkan akibat lebih lanjut yaitu sulitnya membuka akses pasar.

Berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), ketersediaan data series berkaitan dengan LKM dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Kebumen masih sangat terbatas. Pada tahun 2020, terdapat 8 (delapan) LKM, enam di antaranya sudah mendapatkan ijin dari OJK sedangkan dua lainnya masih dalam proses pengurusan ijin. Sedangkan jumlah BPR sebanyak 7 (tujuh) dengan status kepemilikan 2 (dua) BPR merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen, 1 (satu) BPR milik Pemerintah Provinsi dan 4 (empat) BPR dimiliki oleh swasta.

12) Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kunci pengungkit pembangunan ekonomi. Dalam perekonomian nasional besaran investasi yang muncul dalam sebuah wilayah tercatat dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sementara itu dalam pemerintahan yang tercatat dalam data investasi adalah investasi yang dilakukan oleh penanam modal nasional maupun asing tanpa melibatkan investasi yang dilakukan oleh masyarakat banyak.

Tabel 2.131
Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	PMTB (Rp juta)	4.709.037,99	5.109.008,51	5.511.028,64	6.001.726,67	6.001.726,67
2	Pertumbuhan PMTB	8,65	5,93	5,52	4,37	4,37
3	Jumlah nilai investasi Dalam Negeri (PMDN) (Rp juta)	406.971,63	332.629,15	487.967,82	887.552,60	388.644,29
4	Persentase PMDN terhadap PMTB	8,64	6,51	8,85	14.78	14.78
5	Pertumbuhan PMDN	23,37	-18,26	46,70	81,88	-55,70
6	Jumlah nilai investasi Luar Negeri (PMA)	0	0	0	0	0
7	Jumlah Investor Dalam Negeri (PMDN)	656	576	705	895	892
8	Jumlah Investor Luar Negeri (PMA)	0	0	0	0	0
9	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	5.206	3.423	5.790	9.257	6.092

Sumber: Kebumen Dalam Angka dan DPMPTSP Kab. Kebumen, 2021

Realisasi investasi PMDN di Kabupaten Kebumen pada periode tahun 2016-2019 menunjukkan tren yang meningkat meskipun sempat mengalami penurunan. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2019 merupakan dampak positif adanya penyelenggaraan pelayanan investasi melalui pelayanan izin secara online *by system OSS (Online Single Submission)* dan implementasi penyelenggaraan kemudahan berusaha di daerah. Investasi mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2017 dan tahun 2020. Pertumbuhan negatif yang terjadi pada tahun 2017 salah satunya disebabkan karena adanya pencatatan dan pelaporan realisasi investasi yang menyesuaikan dengan aturan/surat edaran yang diterbitkan saat itu, diantaranya penyelenggaraan izin prinsip melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), pencabutan HO/izin gangguan, pencabutan SIUP dan aturan sektoral lainnya. Sehingga mengakibatkan sumber data yang didapat dan yang dilaporkan menjadi berbeda. Sedangkan investasi mengalami pertumbuhan negatif hingga sekitar -55,70% pada tahun

2020, salah satu di antaranya dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menimpa mulai Triwulan II tahun 2020. Selain itu dapat juga dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN tidak berbanding lurus dengan jumlah investornya.

Dalam meningkatkan nilai investasi, Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan diantaranya yaitu, penataan kembali infrastruktur pelayanan perizinan/kemudahan berusaha guna pengembangan iklim investasi daerah, sinkronisasi peraturan lokal dengan peraturan lainnya terkait investasi dan Undang-Undang Cipta Kerja, penyelenggaraan MPP, penguatan instrumen perencanaan, pelayanan, pengendalian penanaman modal serta pengembangan sistem dan pendukung sistem berbasis teknologi terkait pelayanan dan pengembangan penanaman modal daerah.

Adanya investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kebumen. Penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 disebabkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat serta menurunnya produktivitas karena permintaan pasar yang menurun yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Kurangnya penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa kuantitas investasi di Kabupaten Kebumen belum seperti yang diharapkan. Selain itu dari sisi kualitas investasi, masih banyak terdapat investasi yang berupa proyek infrastruktur dan bukan investasi yang bersifat usaha kontinu. Investasi tersebut masih dapat menyerap tenaga kerja tapi tidak ada kontinuitas karena setelah proyek selesai maka tenaga kerja akan kembali menganggur.

Nilai investasi yang tercatat dalam bidang penanaman modal dan investasi nilainya berkisar pada angka 10%, yang menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan masyarakat dan tidak tercatat jumlahnya jauh lebih tinggi. Sektor tersier menjadi sektor yang memiliki nilai investasi dan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dua sektor lainnya. Pada sektor tersier, sub-sektor yang memiliki nilai investasi paling tinggi dari tahun 2015-2020 adalah sub-sektor perdagangan dan reparasi.

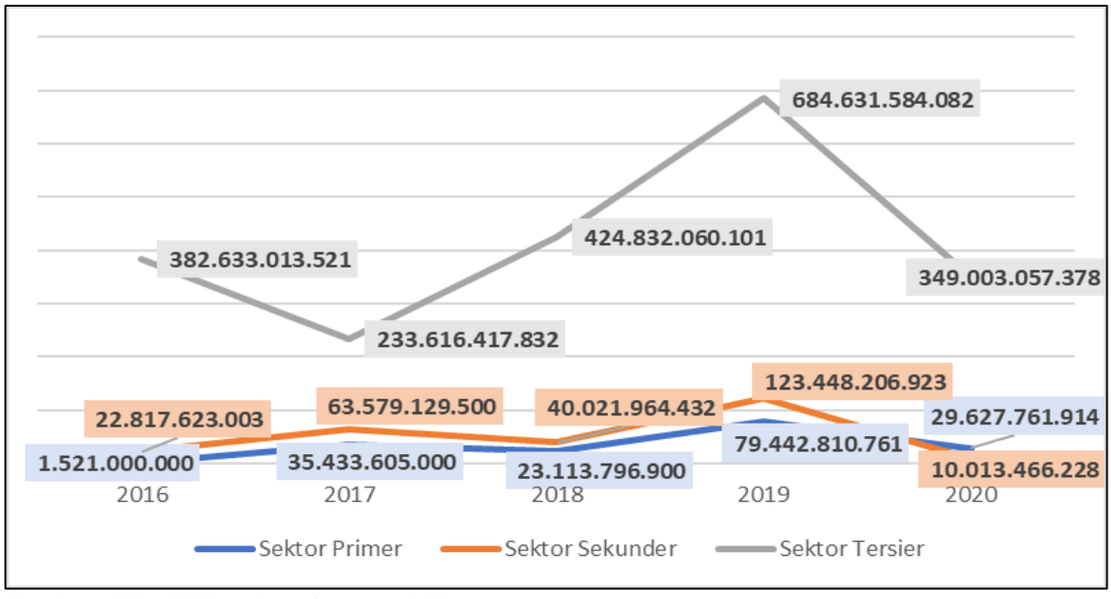

Sumber: DPMPTSP Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.53
Perkembangan Nilai Investasi Per Sektor Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Tabel 2.132
Nilai Investasi Sektor Tersier Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Sub-sektor Tersier	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
Listrik, Gas, dan Air	Na	Na	Na	350.000.000	Na	70.000.000
Konstruksi	58.441.906.345	42.904.710.000	45.470.821.552	78.230.155.564	57.137.675.103	56.437.053.713
Perdagangan & Reparasi	200.174.472.124	128.814.587.570	216.721.704.046	96.456.851.277	167.992.345.744	162.031.992.152
Hotel dan Restoran	12.728.667.042	18.055.548.575	17.998.710.000	19.150.442.735	4.815.000.000	14.549.673.670
Transportasi, Gudang & Komunikasi	2.394.100.000	8.806.350.000	16.684.710.000	9.432.100.000	23.945.568.579	12.252.565.716
Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	78.965.000.000	895.000.000	13.043.146.000	Na	4.200.000.000	19.420.629.200
Jasa Lainnya	29.928.868.010	34.140.221.687	114.912.968.503	281.012.034.506	90.912.467.952	110.181.312.132
Persentase Listrik, Gas, dan Air	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0	0,00014 %
Persentase Konstruksi	15,27%	18,37%	10,70%	16,14%	14,70 %	3,06%
Persentase Perdagangan & Reparasi	52,32%	55,14%	51,01%	19,90%	43,23%	9,00%
Persentase Hotel dan Restoran	3,33%	7,73%	4,24%	3,95%	1,24%	0,29%
Persentase Transportasi, Gudang & Komunikasi	0,63%	3,77%	3,93%	1,95%	6,16%	1,25%
Persentase Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	20,64%	0,38%	3,07%	0,00%	1,08%	0,26%
Persentase Jasa Lainnya	7,82%	14,61%	27,05%	57,98%	23,39 %	4,89%

Sumber: DPMPTSP Kab. Kebumen, 2021

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kebumen masih belum optimal dimana jumlah organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2020 berjumlah 42 organisasi pemuda. Akan tetapi, peningkatan jumlah wirausaha muda yang cukup signifikan pada tahun 2019 mengindikasikan bahwa pemuda Kabupaten Kebumen mulai mencoba memanfaatkan peluang di tengah perkembangan teknologi informasi, dan industri kreatif yang cukup pesat. Peningkatan jumlah wirausaha muda ini diharapkan akan dapat mengurangi angka pengangguran usia muda di Kabupaten Kebumen, dan secara lebih luas mampu menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Kebumen. Prestasi olahraga Kabupaten Kebumen cenderung stagnan bahkan tidak ada prestasi yang diraih pada tahun 2020 karena tidak ada even olahraga yang dilaksanakan karena pandemi Covid-19.

Tabel 2.133
Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	86	42	42	42	42
2.	Jumlah wirausaha muda	77	35	80	310	45
3.	Jumlah organisasi olahraga	39	40	40	35	35
4.	Jumlah prestasi olahraga	19	20	20	19	0

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen, 2021

14) Statistik

Data/informasi statistik (dokumen statistik) adalah salah satu instrumen analisis yang sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan dokumen statistik yang baik akan memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pemerintah telah menginisiasi program Satu Data Indonesia dengan di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata Kelola data administrasi, Lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan upaya mengintegrasikan beragam data yang ada di setiap kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Kinerja urusan statistik pada tahun 2016-2020 meliputi tersusunnya Buku Daerah Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto, Buku Profil Daerah, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, Buku Studi Nilai Tukar Petani dan Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen. Kinerja lainnya adalah mampu mewujudkan kemudahan mengakses data statistik melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah, seperti SIM Pengentasan Kemiskinan, Sistem Informasi Profil Daerah, SIM Keuangan Daerah, SIM Perencanaan, SIM Pengendalian, SIM Pelaporan, SIMBADA, dan lain-lain. Kegiatan lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas data statistik diantara verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (oleh Dinsos); desk data dengan BPS dan OPD; penataan tata kelola/SOP website satu data.

Tabel 2.134
Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan	4	4	4	4	6
a. Kebumen Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
b. PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Profil Daerah (SIPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
d. Studi Ketimpangan Pendapatan	Na	Ada	Na	Ada	Ada
e. Studi Nilai Tukar Petani	Ada	Na	Ada	Na	Ada
f. Statistik Sektoral Kab. Kebumen	Na	Na	Na	Na	Ada

Sumber: Diskominfo dan Bappeda Kab. Kebumen, 2021

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan statistik ini adalah belum optimalnya penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan *up to date*. Koordinasi antarlembaga dan antar-OPD terkait data statistik ini juga belum berjalan secara optimal. Meskipun kewenangan terkait pengelolaan data statistik ini sudah dibagi dan diatur melalui peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja serta peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala, misalnya pada implementasi satu data Indonesia, sehingga penyediaan data statistik yang dimutakhirkan belum tersedia secara optimal.

15) Persandian

Capaian urusan persandian Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi (dalam hal ini *digital signature*) dalam komunikasi antar perangkat daerah. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sampai dengan tahun 2020, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kebumen telah menggunakan *digital signature* dalam komunikasi antarperangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen sangat memperhatikan keamanan dokumen dari pemalsuan. Akan tetapi, di level pemerintah desa belum ada desa yang menerapkan *digital signature.* Permasalahan tersebut disebabkan tidak stabilnya kondisi jaringan internet di wilayah kecamatan khususnya yang berada di daerah pegunungan serta budaya pemakaian *e-letter* dalam komunikasi kedinasan belum optimal. Berikut merupakan data penggunaan *digital signature* di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.135
Penggunaan Digital Signature di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
OPD	-*	-*	-*	26	26
Kecamatan	-*	-*	-*	26	26
Kelurahan	-*	-*	-*	11	11

**data belum terisi karena digital signature baru mulai diterapkan tahun 2021*
Sumber : Diskominfo, 2021

16) Kebudayaan

Kebudayaan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal atau pikiran manusia, sehingga dapat menunjuk pada pola pikir, perilaku serta karya fisik sekelompok manusia. Dalam hal ini budaya juga merupakan suatu pola hidup menyeluruh bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Mengacu pada konsep kebudayaan, maka dalam pergaulan hidup termasuk pergaulan hidup masyarakat Kebumen tentunya diperlukan sekali suatu keadaan yang dapat melahirkan harmonisasi dengan mengedepankan cara-cara dialogis dan toleransi yang saling menghargai.

Keharmonisan nilai budaya dimaksud merupakan bentuk kondisi terpeliharanya eksistensi agama atau ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat, terpelihara dan terjaminnya keamanan, ketertiban dan keselamatan, tegaknya kebenaran berpikir yang jernih dan sehat, terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tentram dengan penuh toleransi dan tenggang rasa, terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab serta bermoral tinggi dan terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Selain dalam wujud keharmonisan nilai, budaya juga ada dalam wujud situs dan kesenian. Situs warisan budaya di Kebumen cukup banyak mengingat Kebumen merupakan bekas dari sebuah pemerintahan setingkat kabupaten di masa sebelum penjajahan Belanda. Sebagian besar situs warisan budaya yang ada bercorak Kerajaan Yogyakarta. Penggalian dan pelestarian situs peninggalan purbakala mulai dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Tahun 2015 jumlah situs cagar budaya yang ditemukan dan didata serta dikelola sebanyak 46 situs cagar budaya, jumlah ini berkembang sampai tahun 2020 jumlah situs cagar budaya yang dipelihara sebanyak 92 situs cagar budaya. Penggalian situs peninggalan budaya terus dilakukan sebagai upaya melindungi warisan budaya daerah.

Adapun warisan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Kebumen antara lain jamjaneng, tari cepetan, tari lawet, kirab budaya, tari pongkor, kirab tosan aji, ritual pengunduhan sarang burung lawet, festival bocah angon dan warisan seni dan budaya lainnya. Kegiatan festival seni dan budaya secara rutin diselenggarakan di Kabupaten Kebumen, setidaknya pada tahun 2019 diselenggarakan 15 festival seni dan budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Festival seni budaya tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Kegiatan revitalisasi seni budaya juga dilakukan di Kebumen dalam rangka mengembangkan kesenian rakyat. Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya juga dilaksanakan dalam rangka pelestarian seni budaya daerah yang ada di Kabupaten Kebumen salah satunya dengan pembentukan Kampung Jawa.

Tabel 2.136
Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	11	11	15	15	0
2.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	47	53	60	82	92
3.	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	47	53	60	82	92

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen, 2021

17) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wahana penyediaan bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Kualitas bahan pustaka dan kuantitas perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna. Hal ini juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Selama 5 tahun terakhir, kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan tren kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah koleksi buku di perpustakaan yang meningkat dari 19.958 buku pada tahun 2016 menjadi 26.636 buku di tahun 2020. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama satu tahun juga meningkat dari 114.714 orang di tahun 2016 menjadi 142.833 orang pada tahun 2019. Capaian kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.137
Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	114.714	137.771	139.165	142.833	59.073
2	Rasio perpustakaan per 1.000 jumlah penduduk	0,59	0,54	0,60	0,58	0,99
3	Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan Daerah	19.958	21.923	23.278	25.735	26.636
4	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0%	0%	0%	33,4%	33,4%

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen, 2021

Kinerja urusan perpustakaan pada tahun 2020 terdampak pandemi Covid-19. Sampai dengan semester I tahun 2020, capaian kunjungan perpustakaan menurun sebanyak 59.073 pengunjung. Hal ini disebabkan pelayanan pengunjung selama 3 bulan (sampai dengan Maret). Setelah itu perpustakaan tidak melayani kunjungan maupun melaksanakan perpustakaan keliling karena adanya pandemi Covid-19. Persentase pustakawan yang bersertifikat rendah karena sesuai dengan ketentuan yang dapat mengikuti sertifikasi hanya pustakawan, sedangkan pustakawan yang tersedia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan tahun 2020 hanya 1 orang.

18) Kearsipan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengertian mengenai arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip sangat berbeda dengan bahan pustaka yang terdapat dalam perpustakaan. Arsip mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan bahan pustaka di antaranya adalah arsip harus otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, informasinya utuh, dan berdasarkan asas asal usul (*principle of provenance*) dan aturan asli (*principle of original order*).

Pelayanan urusan kearsipan mempunyai tujuan meningkatkan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Manajemen kearsipan yang tertata dengan baik akan memudahkan penyimpanan maupun pengambilan data, sehingga data dapat dikelola dengan lebih efektif, efisien dan aman.

Kinerja pengelolaan arsip di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016-2020. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku yang meningkat dari 16,09% pada tahun 2016 menjadi 64,55% di tahun 2020. Perkembangan capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2020 secara lengkap disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.138
Kinerja Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	16,09%	22,61%	29,31%	47,50%	64,55%

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen, 2021

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sehingga kinerja pengelolaan arsip di Kabupaten Kebumen meningkat yaitu dengan membuka layanan konsultasi bagi pengelola arsip dan peningkatan kapasitas SDM kearsipan sehingga mendorong OPD dan pencipta arsip aktif dalam pengelolaan arsip. Selama pandemi, Disarpus aktif melaksanakan pendampingan pengelolaan kearsipan desa, kecamatan melalui media *zoom meeting* serta mendorong OPD untuk mempersiapkan penilaian pengawasan kearsipan.

Meskipun persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku terus meningkat, namun jumlahnya belum optimal (masih di bawah 65%). Beberapa hal menjadi penyebabnya antara lain:

a) Kurangnya pengertian terhadap pentingnya arsip. Dengan belum atau kurang dipahaminya pengertian terhadap pentingnya arsip, mengakibatkan berfungsinya arsip sebagai pusat ingatan organisasi tidak tercapai, dan akhirnya tugas-tugas di bidang kearsipan dipandang rendah;
b) Kualifikasi persyaratan pegawai tidak dipenuhi. Hal ini terbukti dengan adanya penempatan pegawai yang diserahi tugas tanggung jawab mengelola arsip tidak didasarkan pada persyaratan yang diperlukan, bahkan banyak yang beranggapan cukup dipenuhi pegawai yang berpendidikan rendah. Pegawai kearsipan yang kurang cakap dan kurang terbimbing mengakibatkan tidak dapat mengimbangi perkembangan dalam pengarsipan dokumen aset; dan
c) Bertambahnya volume arsip secara terus-menerus mengakibatkan prasarana dan sarana yang tersedia tidak dapat menampung arsip lagi untuk memfasilitasi 522 unit kerja yang terdiri dari 32 OPD, 26 kecamatan, 449 desa, 11 kelurahan, dan 4 BUMD.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kinerja produksi dan konsumsi perikanan serta kaitannya dengan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan. Berikut disajikan kinerja urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kebumen yang meliputi produksi ikan dan produksi garam serta kesejahteraan nelayan yang diwakili oleh Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kinerja urusan kelautan dan perikanan secara makro dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.139
Kinerja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Sub-sektor Perikanan atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	94.996,77	114.976,08	125.135,20	135.987,12	139.360,76
2	PDRB Sub-sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)	71.679,57	83.894,19	87.796,10	92.696,10	93.038,60
3	Pertumbuhan (Persen)	-12,81	17,04	4,65	5,58	2,48
4	Produksi Ikan Tangkap (Ton)	5.585,09	9.068,46	17.987,36	8.915,8	9.068,53
5	Nilai Produksi Ikan Tangkap (Juta Rupiah)	121.354,09	128.210,83	110.051,42	208.409,45	208.139,20
6	Produksi Ikan Budidaya (Ton)	2.933,59	2.572,80	2.607,41	2.876,10	3.139,32
7	Nilai Tukar Nelayan	84,22	113,40	144,53	150,94	102,24
8	Jumlah Nelayan (Orang)	3,905	3,361	3,050	4.833	4.833
9	Konsumsi Ikan (Kilogram/ Kapita/ Tahun)	15,10	19,63	21,12	22,17	22,46

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
10	Produksi Garam (Ton)	0	0	26	61,22	144,62
11	Nilai Produksi Garam (Juta Rupiah)	0	0	65	244,86	578,48

Sumber: Dinlutkan Kab. Kebumen, 2021

Dilihat dari pertumbuhan PDRB, capaian kinerja perikanan menunjukkan fluktuasi dan tren kinerjanya cenderung menurun, demikian juga dengan produksi perikanan secara umum menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Dilihat dari pertumbuhan produksi dan nilai PDRB, terlihat kecenderungan bahwa ketika produksi meningkat tinggi, justru nilainya turun. Angka ini menunjukkan bahwa ketika produksi meningkat, justru terjadi penurunan harga. Hal ini dapat diartikan bahwa permintaan atas perikanan ini relatif tetap, karena permintaan baru muncul dari konsumen akhir, artinya belum terdapat industri pengolahan ikan yang memadai yang mampu menyerap produksi yang melimpah. Namun demikian dilihat dari NTN yang dihasilkan nelayan, data menunjukkan nelayan masih menikmati kesejahteraan dengan menggunakan kriteria NTN sampai dengan Tahun 2019 sedangkan pada Tahun 2020 NTN turun cukup signifikan.

Kabupaten Kebumen memiliki panjang pantai 57,5 km mulai dari Kecamatan Ayah sampai dengan Kecamatan Mirit. Perikanan laut wilayah Kebumen termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 573, yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat. Mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPP RI 573 memiliki potensi perikanan sebesar 1.267.540 ton, namun masih ada beberapa komoditas yang tingkat pemanfaatannya belum optimal.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap di laut antara lain disebabkan oleh belum tersedianya sarana penangkapan ikan yang dapat menjangkau sumberdaya ikan yang jauh dari pantai. Dari sisi kompetensi nelayan, jumlah nelayan laut belum satu pun yang memiliki sertifikat kompetensi kapal perikanan baik Surat Keterangan Kecakapan Kapal (SKK) maupun Sertifikat Nautika dan Teknika Kapal Perikanan. Selain itu, baru ada 100 nelayan yang memiliki dasar keselamatan berlayar (*Basic Safety Training*/BST). Di Kabupaten Kebumen juga terdapat SMK Kelautan (Nautika dan Teknika), akan tetapi lulusannya belum ada yang bekerja sebagai nelayan di Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya terkait dengan tata kelola pelelangan ikan, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan saat ini belum mampu melayani nelayan secara optimal. Sebagai contoh, pada saat produksi melimpah harga ikan masih mengalami penurunan drastis dan pembayaran oleh pedagang ikan tersendat dikarenakan kemampuan keuangan pedagang yang masih terbatas. Kendala ini diatasi melalui pengadaan dana talangan bagi pedagang ikan yang baru dimulai pada tahun terakhir RPJMD yaitu tahun 2021. Selain itu, TPI juga belum memiliki gudang penyimpanan beku (*cold storage*) yang memadai. Pemerintah daerah selalu melakukan perbaikan sarana dan prasarana TPI meskipun harus dilakukan secara bergantian di beberapa TPI sehingga penanganannya belum dapat dituntaskan. Selain itu, pengadaan *cold storage* juga selalu diupayakan meskipun melalui mekanisme pengusulan ke APBN.

Selain perairan laut, Kabupaten Kebumen juga memiliki Perairan Umum Daratan (PUD) berupa waduk, rawa, sungai dan genangan yang luas seluruhnya mencapai 2.374,89 Ha. Rincian luasan per jenis perairan umum sebagai berikut:

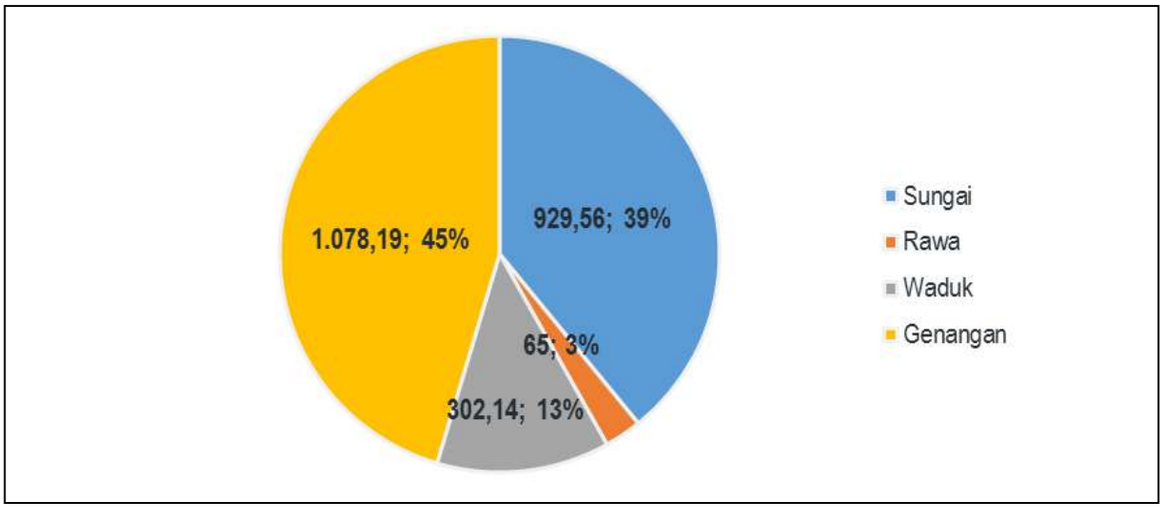

Sumber: Dinlutkan Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.54
Luas Perairan Umum Daratan Kabupaten Kebumen (Ha)

Terkait dengan sumberdaya ikan dan ikan lokal di PUD, terjadi penurunan yang disebabkan adanya sedimentasi dari hulu dan pencemaran limbah pertanian dan rumah tangga serta adanya penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan sumberdaya ikan, menyebabkan punahnya beberapa ikan lokal/endemik.

Kabupaten Kebumen memiliki potensi budidaya perikanan darat yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari lahan yang sudah dikelola khususnya lahan tambak, masih terjadi ketidaktertiban dimana masih banyak terdapat di sempadan pantai, belum memiliki pengolahan limbah yang benar, belum memiliki perijinan/pendaftaran, belum memiliki saluran yang baik serta belum menunjukkan kawasan yang terintegrasi yang mengakibatkan produktivitasnya rendah dan rawan gagal panen. Dari 497 petak tambak yang ada saat ini, baru 25 petak yang telah tertata sehingga masih ada 472 petak tambak yang belum tertata.

Produksi perikanan budidaya juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Beberapa tahun terakhir curah hujan di Kabupaten Kebumen tidak terlalu tinggi sehingga menyebakan berkurangnya ketersediaan air ketika musim kemarau, terlebih lagi kemarau pada tahun 2019 dan 2020 terjadi cukup lama. Selain itu, cuaca yang cukup ekstrim juga sering terjadi dan menjadi kendala karena suhu air yang berubah-ubah sangat berdampak pada produksi benih maupun pembesaran. Faktor iklim dan cuaca tersebut juga sangat erat kaitannya dengan tingginya ancaman hama dan penyakit pada ikan. Tingkat kematian ikan dapat mencapai 40% dari jumlah benih yang ditebar. Penyediaan benih juga perlu menjadi perhatian, dimana pada saat ini tingkat kebutuhan benih ikan belum dapat dipenuhi oleh pembenih lokal, baik oleh Balai Benih Ikan (BBI) maupun Unit Perbenihan Rakyat (UPR). Tingkat penyediaan benih ikan saat ini baru mencapai kisaran 70% dari kebutuhan.

Selain faktor iklim dan cuaca, kondisi sarana dan prasarana serta kualitas sumberdaya manusia juga memegang peranan penting dalam budidaya perikanan. Dilihat dari kondisi kualitas sarana dan prasarana budidaya, dari 43 Ha kolam ikan air tawar sebagian besar adalah kolam ikan tradisional yang secara teknis kurang layak untuk budidaya ikan baik jenis kolamnya maupun luasannya. Minimnya luasan kolam akan menentukan apakah usaha budidaya memenuhi skala ekonomis atau tidak. Minimnya

skala usaha ini disebabkan salah satunya oleh kurangnya permodalan yang dimiliki oleh pembudidaya skala kecil. Dari sisi kapasitas SDM, dari total 8.415 pembudidaya ikan di Kabupaten Kebumen baru 90 pembudidaya ikan yang memiliki sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain aspek produksi yang merupakan variabel penawaran, sisi permintaan yaitu tingkat konsumsi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Produksi akan menjadi nilai tambah bagi nelayan dan pembudidaya hanya jika hasil produksinya dibeli oleh konsumen. Dilihat dari permintaan, masyarakat Kabupaten Kebumen cenderung tidak banyak mengonsumsi ikan, baik karena faktor kebiasaan maupun kurangnya daya beli. Hal ini dapat dilihat dari Angka Konsumsi Ikan (AKI) yang selalu lebih rendah dari rata-rata provinsi maupun nasional. Selain sebagai variabel permintaan bagi produksi perikanan, konsumsi daging/ikan juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi vital terutama di Kabupaten Kebumen yang saat ini merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Selain angka konsumsi ikan yang rendah, potensi pasar di luar daerah juga belum dapat dioptimalkan karena sulitnya akses pemasaran.

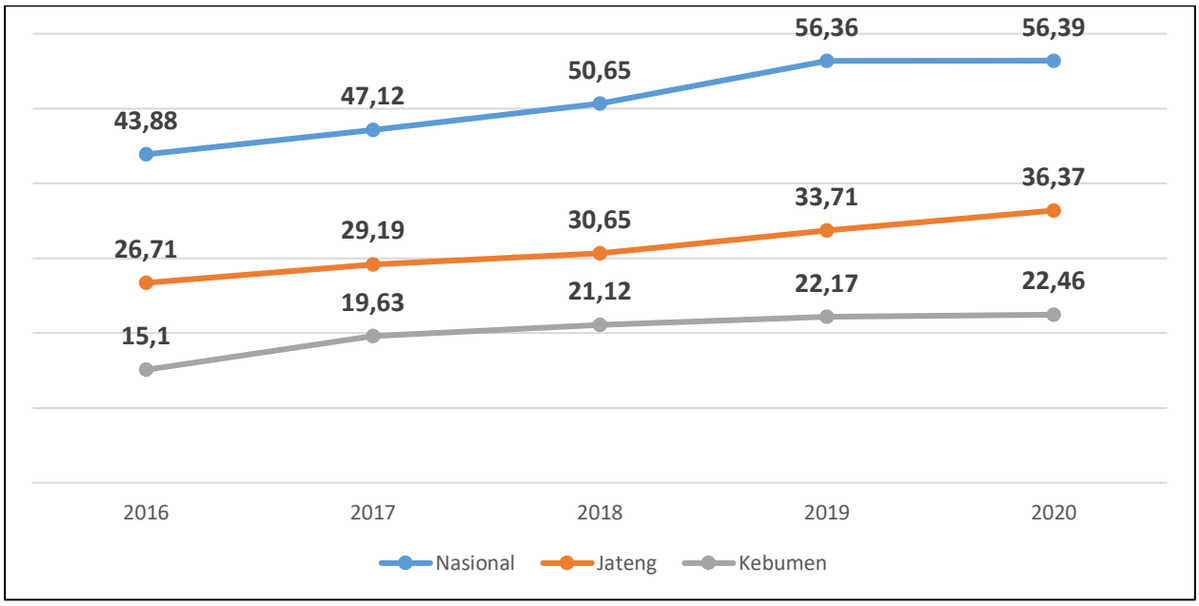

Sumber: Dinlutkan Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.55
Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (kg per kapita)

Selain produk perikanan, garam juga menjadi komoditas yang dikembangkan pada sektor kelautan. Pengembangan garam di Kabupaten Kebumen baru dilakukan pada tahun 2018, dengan cakupan wilayah yang masih terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha garam adalah keterbatasan lahan, dimana sebagian wilayah pantai di Kabupaten Kebumen merupakan wilayah karst, dan ada sebagian wilayah yang menjadi zona pertahanan yang dikelola oleh militer. Pengembangan usaha masih bisa dilakukan di luar batas wilayah pertahanan, namun dengan konsekuensi adanya penambahan biaya produksi. Selain kendala tersebut, teknologi dan metode yang digunakan saat ini juga belum menerapkan teknologi terbaru, mengingat bahwa usaha garam ini masih bersifat rintisan.

Pengembangan kapasitas SDM dan penyediaan sarana pendukung menjadi faktor yang harus diperhatikan agar dapat meningkatkan produktivitas yang saat ini belum optimal. Meskipun ada beberapa kendala yang harus dihadapi, namun garam menjadi salah satu komoditas yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, selain karena nilai

ekonomisnya yang tinggi, juga dari potensi pasar dimana tingkat produksi saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan lokal tahun 2020 yang diperkirakan mencapai 1.000-3.000 ton per tahun dan masih didatangkan dari luar daerah. Selain itu, kualitas garam di Kabupaten Kebumen juga berada di atas rata-rata, dan dapat dipasarkan pada segmen yang lebih tinggi daripada garam konsumsi, digunakan sebagai garam kesehatan dan garam industri.

Sebagaimana dijelaskan di atas, lemahnya industri perikanan membawa pada fluktuasi harga yang sangat tinggi. Tingkat pemenuhan kebutuhan yang disangga dari produksi olahan ikan pada Tahun 2020 justru menurun dari tahun tahun sebelumnya.

Tabel 2.140
Produksi dan Kebutuhan Ikan Olahan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Tahun	Kebutuhan	Produksi	Produksi/ Kebutuhan
2016	661.458	240.150	36,31%
2017	692.175	247.350	35,74%
2018	773.283	257.450	33,29%
2019	802.125	283.390	35,33%
2020	898.380	288.070	32,07%

Sumber: Dinlutkan Kab. Kebumen, 2021

Dilihat dari kapasitas SDM pengolah ikan, dari jumlah 121 Unit Pengolah Ikan yang ada tahun 2020 belum ada satu pun yang memiliki ijin edar dari Badan POM Provinsi Jawa Tengah, dan baru ada 35 Unit Pengolah Ikan yang memiliki Produk Industri Rumah Tangga. Kemudian dari jumlah 1.327 pengolah ikan di Kabupaten Kebumen, baru 90 pengolah ikan yang memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP. Di Kabupaten Kebumen juga terdapat SMK Kelautan (Pengolahan Ikan), akan tetapi belum ada lulusan yang bekerja sebagai pengolah ikan di Kabupaten Kebumen.

2) Pariwisata

Kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen hingga Tahun 2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Angka kunjungan wisata meningkat secara signifikan, baik kunjungan ke objek pariwisata yang dikelola Pemerintah Daerah maupun non-Pemerintah Daerah. Akan tetapi, akibat Pandemi Covid-19 yang menuntut pembatasan sosial termasuk penutupan tempat wisata menyebabkan pertumbuhan kunjungan wisata di Kabupaten Kebumen tahun 2020 menurun drastis sebesar -88,43% dari tahun 2019 begitu juga dengan lama kunjungan wisata yang tumbuh negatif sebesar -77,67% di tahun 2020.

Tabel 2.141
Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata	1.486.939	1.770.136	2.020.878	2.927.444	338.687
2	Pertumbuhan kunjungan wisata (%)	NA	14,16	19,04	44,86	-88,43
3	Lama kunjungan wisata	0,41	0,51	0,57	1,03	0,23
4	Perumbuhan lama kunjungan wisata (%)	NA	24,39	11,76	80,70	-77,67

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen, 2021

Capaian kinerja pariwisata dipengaruhi oleh kondisi 4 pilar pariwisata yaitu: Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan.

a) Industri Pariwisata

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Terjadinya pergeseran paradigma pada kehidupan dunia ekonomi dan bisnis, yaitu dari ekonomi berbasis sumber daya ke paradigma ekonomi berbasis pengetahuan atau kreativitas, membawa pada satu realita bahwa ekonomi kreatif berpengaruh terhadap industri pariwisata. Peran nyata ekonomi kreatif mampu memberi nilai tambah pada daya tarik dan daya saing pariwisata. Sektor ekonomi kreatif memiliki 17 sub sektor yaitu : 1. Aplikasi; 2. Arsitektur; 3. Desain Interior; 4. Desain Komunikasi Visual (DKV); 5. Desain Produk; 6. Fashion; 7. Film Animasi dan Video; 8. Fotografi; 9. Kerajinan Tangan (Kriya); 10. Kuliner; 11. Musik; 12. Penerbitan; 13. Pengembangan Permainan; 14. Periklanan; 15. Seni Pertunjukkan; 16. Seni Rupa dan; 17. TV dan Radio

Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen cukup banyak dan potensial. Namun demikian, baru 60 pelaku ekonomi kreatif yang masuk data di provinsi, yang meliputi sub sektor kriya, musik, desain produk, desain komunikasi visual, penerbitan, fotografi, fashion, film, seni pertunjukan, kuliner, dan periklanan. Dari sekian banyak pelaku ekonomi kreatif, sudah terbentuk komunitas ekonomi kreatif sebanyak 14 komunitas, yang meliputi sub sektor fotografi, desain komunikasi visual, musik, kriya, film, dan fashion.

Pengembangan ekonomi kreatif agar mampu memberikan peran nyata dalam memberikan nilai tambah pada daya tarik dan daya saing pariwisata, perlu dilakukan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, organisasi perangkat daerah yang mengampu urusan pariwisata menjadi *leading sector* pengembangan ekonomi kreatif. Organisasi perangkat daerah tersebut diharapkan mampu menjadi koordinator dalam mewujudkan kolaborasi harmonis berbagai pemangku kepentingan dalam mengmebangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen.

Berbicara industri pariwisata, seringkali dikaitkan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). TDUP adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan Pertemuan, dan beberapa usaha lainnya. Saat ini, terdapat 85 usaha sudah mendapatkan TDUP dan 2 usaha yang sudah mendapatkan Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, sehingga dapat dikatakan kualitas Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata masih rendah dan kurang berdaya saing karena rendahnya usaha yang terakreditasi oleh asesor yang berkompeten.

b) Destinasi Pariwisata

Secara topografi Kabupaten Kebumen memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Wilayah pantai sebelah timur berpasir besi, pantai sebelah barat berupa gunung karst berpasir putih yang memiliki banyak goa serta daerah utara berupa pegunungan. Dari 103 potensi wisata yang ada, sejumlah 62 destinasi sudah mulai dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Sebanyak 25 destinasi wisata pengelolaannya bekerja sama dengan Perhutani, sebagiamana tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 2.142
Destinasi Wisata di Kabupaten Kebumen yang Dikelola Bersama Perhutani

No	Destinasi Wisata	Lokasi
1	Pantai Karangagung	Desa Argopeni, Kecamatan Ayah
2	Pantai Lampon	Desa Pasir, Kecamatan Ayah
3	Pantai Patemon	Desa Pasir, Kecamatan Ayah
4	Pantai Surumanis	Desa Pasir, Kecamatan Ayah
5	Pantai Watubale	Desa Pasir, Kecamatan Ayah
6	Pantai Pecaron	Desa Srati, Kecamatan Ayah
7	Bukit Hud	Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan
8	Bukit Silangit	Desa Giripurno, Kecamatan Karanggayam
9	Pentulu Indah	Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung
10	Curug Sudimoro	Desa Donorojo, Kecamatan Sempor
11	Pesona Sanggrahan	Desa Penusupan, Kecamatan Sruweng
12	Pesona Kayangan	Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam
13	Bukit Pranji	Desa Watulawang, Kecamatan Pejagoan
14	Pantai Menganti	Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah
15	Sawangan Adventure	Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah
16	Brujul Adventure Park	Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan
17	Pedalen	Desa Argopeni, Kecamatan Ayah
18	Pantai Logending	Desa Ayah, Kecamatan Ayah
19	Wanalela	Desa Argopeni, Kecamatan Ayah
20	Pesona Gunung Tugel	Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan
21	Bukit Cinta Gunung Duwur	Desa Watukelir, Kecamatan Ayah
22	Eka Panca Warna	Desa Tugu, Kecamatan Buayan
23	Tampo Mas	Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam
24	Bukit Dewa	Desa Wonoharjo, Kecamatan Rowokele
25	Bukit Seanco	Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, 2021

Terkait sarana dan prasarana, akses dan amenitas yang ada di destinasi masih banyak yang harus dibenahi untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Dengan kenyamanan wisatawan diharapkan lama tinggal wisatawan akan semakin lama dan semakin banyak mengeluarkan anggaran di destinasi wisata. Selain itu, di masa sekarang kebutuhan akan jaringan seluler menjadi salah satu kebutuhan utama dari wisatawan, dimana hal tersebut juga berpengaruh pada pemasaran wisata yang dikunjungi. Dengan adanya sinyal telekomunikasi akan membuat wisatawan semakin cepat dalam menyebarkan foto ataupun gambar mengenai destinasi yang dikunjungi. Pada kenyataannya di Kabupaten Kebumen terdapat juga destinasi yang mempunyai masalah jaringan telekomunikasi dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain sarana prasarana di dalam destinasi persoalan lain yang dihadapi adalah kurangnya kualitas jalan menuju destinasi serta papan rambu penunjuk jalan yang kurang memadai sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan menuju destinasi wisata.

Selain itu permasalahan sarana dan prasarana, untuk menyambut wisatawan diperlukan *story teller* yang mampu membuat wisatawan terkenang dan terkesan dengan destinasi yang dikunjungi. Saat ini, di Kabupaten Kebumen baru tercatat 61 orang pramuwisata/pemandu di destinasi yang telah mendapat pelatihan dan disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata. Jumlah tersebut tentu saja belum sebanding dengan jumlah destinasi yang telah dikelola.

Dari sisi pelayanan pariwisata belum ada pemesanan tiket, pembayaran tiket masuk ataupun penjualan paket wisata yang menggunakan media *online*. Kegiatan pembelian tiket masih menggunakan metode manual baik di objek wisata yang dikelola pemerintah daerah ataupun yang dikelola masyarakat. Hal ini menjadi risiko tersendiri di

tengah pandemi Covid-19 saat ini, karena sangat rentan terjadi penyebaran virus melalui mata uang. Hal lain yang menjadi masalah dalam pengelolaan destinasi di Kabupaten Kebumen adalah masalah keamanan pengelola dan wisatawan. Keamanan adalah hal mendasar dalam Sapta Pesona yang harus ada dalam pengelolaan destinasi. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada obyek wisata khususnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan aparat Pemerintah Desa, Forkompincam, Satpol PP dan Kepolisian untuk membantu menangani permasalahan keamanan dan ketertiban di destinasi wisata. Hal ini terutama dilakukan pada even-even liburan hari raya dan libur Tahun Baru.

c) Pemasaran Pariwisata

Kegiatan pemasaran pariwisata di Kabupaten Kebumen dilaksanakan secara *online* dan *offline*. Pemasaran *online* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan komunitas-komunitas, sedangkan metode *offline* dilaksanakan di dalam kota dan di luar kota. Even-even yang dilaksanakan masih berskala lokal sehingga yang hadir masih dari sekitar Kebumen. Papan promosi dan kegiatan promosi ke luar daerah masih minim dilakukan. Kegiatan promosi masih ditekankan pada promosi *mass tourism*, sedangkan untuk wisatawan dengan segmentasi tertentu belum banyak dilaksanakan.

Tabel 2.143
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Kebumen

No	Kegiatan	Keterangan	Jumlah
1	Situs/Web	Dikelola Dinas	2
2	Instagram	Dikelola Dinas	1
3	Facebook	fanpage	1
4	Youtube	Dikelola Dinas	1
5	Event	Tahun 2017	14 kegiatan
6		Tahun 2018	16 kegiatan
7		Tahun 2019	21 kegiatan
8		Tahun 2020	2 kegiatan
9.	Papan Reklame	Dalam Kota	10 titik
10	Papan Reklame	Luar Kota	2 titik
11	Travel Dialog dan Press Tour	Tahun 2017	2 kali
12		Tahun 2018	2 Kali
13		Tahun 2019	1 Kali

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen, 2021

d) Kelembagaan Kepariwisataan

Selain Destinasi, Industri, dan Pemasaran, ada satu lagi pilar kepariwisataan yaitu Kelembagaan. Secara pengelolaan ada 9 objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan sisanya dikelola oleh swasta dan masyarakat. Secara kelembagaan pengelola destinasi di luar pemerintah bisa berupa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), BUM Desa dan swasta. Tahun 2019 jumlah keseluruhan ada 35 Pokdarwis, dan desa wisata yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata sejumlah 19 desa dari 60 desa yang memiliki potensi wisata. Sehingga perlu peningkatan kesadaran pengelola Desa Wisata untuk mengajukan Permohonan Penetapan Desa Wisata ke Disporawisata Kabupaten Kebumen agar desa wisata yang ada di Kabupaten Kebumen memiliki standar yang sama dengan semua desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan kerjasama antar pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen baru mengadakan kerjasama dengan Kabupaten Wonosobo tentang pengelolaan objek

wisata Wadaslintang, dan dengan PERHUTANI tentang pengelolaan pantai Logending, serta kerjasama dengan Bandara Yogyakarta International Airport untuk promosi pariwisata Kebumen. Media informasi yang digunakan berupa papan yang berisi konten penampilan kesenian khas Kebumen dan pentas kesenian di Bandara YIA. Kerjasama yg lain yang sedang disusun adalah kemungkinan kerjasama pengembangan Pariwisata dengan PT Kereta Api Indonesia untuk pengembangan Kereta Api Wisata.

Untuk menjaga ketahanan dan keberlanjutan para pengelola wisata khususnya kelembagaan kepariwisataan dari masyarakat/desa selama kondisi pandemi COVID-19 agar dapat bertahan Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya mangajukan usulan bantuan untuk para pelaku usaha pariwisata kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga tetap menyelenggarakan kegiatan dan even-even yang masih memungkinkan untuk mempromosikan dan mengenalkan destinasi wisata Kebumen juga tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan/peraturan yang berlaku.

3) Pertanian

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, struktur perekonomian Kabupaten Kebumen sampai dengan saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Bila dilihat lebih dalam ke masing-masing sub-sektor, terlihat bahwa pertanian Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura. Sub-sektor tanaman perkebunan dan peternakan yang secara ekonomi memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani justru belum banyak dibudidayakan oleh petani. Hal ini sedikit banyak berkorelasi dengan tingginya tingkat kemiskinan petani di Kabupaten Kebumen. Akan tetapi jika dilihat dari tren pertumbuhan sub-sektor, terlihat bahwa mulai ada sedikit pergeseran dari sub-sektor tanaman pangan. Dengan adanya pergeseran ke komoditas bernilai tinggi, diharapkan nantinya kesejahteraan petani akan meningkat.

Tabel 2.144
PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Sub-sektor Tanaman Pangan (Juta Rupiah)	2.440.960,12	2.420.105,63	2.535.626,17	2.374.249,50	2.383.022,10
2	Pertumbuhan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)	-6,74	-2,25	2,75	-7,25	0,37%
3	PDRB Sub-sektor Tanaman Hortikultura (Juta Rupiah)	1.641.877,99	1.634.889,49	1.729.440,34	1.834.989,58	1.841.769,70
4	Pertumbuhan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)	-9,57	0,22	3,21	3,78	0,37%
5	PDRB Sub-sektor Tanaman Perkebunan (Juta Rupiah)	663.143,57	684.379,66	702.033,18	741.976,30	744.717,82

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Pertumbuhan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)	-2,28	2,34	0,03	5,07	0,37
7	PDRB Sub-sektor Peternakan (Juta Rupiah)	496.464,96	535.242,77	582.002,26	639.343,09	641.705,39
8	Pertumbuhan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)	2,96	6,64	5,12	6,70	0,37
9	PDRB Sub-sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu (Juta Rupiah)	110.318,95	116.276,16	122.017,28	126.939,00	127.408,03
10	Pertumbuhan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)	0,67	4,17	1,34	1,69	0,37

Sumber: BPS 2021, data diolah

Faktor utama dalam sektor pertanian adalah ketersediaan lahan. Di Kabupaten Kebumen, luas lahan pertanian khususnya padi dan palawija, senantiasa mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi tingginya alih fungsi lahan dari fungsi pertanian ke non-pertanian. Hal ini tentu saja menjadi kendala karena berpengaruh kepada tingkat produksi. Menurunnya luas areal pertanian diikuti dengan tingkat produksi yang cenderung menurun.

Selain alih fungsi lahan, tingkat kepemilikan lahan pertanian juga menjadi kendala dimana usaha pertanian menjadi tidak memenuhi skala ekonomis. Luas lahan sawah di Kabupaten Kebumen 40.073,20 Ha dikelola oleh petani sebanyak 177.936 orang. Dengan demikian, maka tingkat kepemilikan lahan pertanian hanya sebesar 0,23 Ha per orang. Luasan ini jauh dari memadai karena untuk memenuhi kebutuhannya secara layak, minimal setiap petani memiliki sawah sebesar 2 Ha. Keterbatasan skala ekonomis coba ditangani dengan program percontohan pertanian berbasis korporasi (*corporate farming*) di beberapa lokasi serta pengembangan pertanian berbasis kawasan.

Menurunnya tingkat kesuburan tanah juga menjadi faktor penyebab kurang optimalnya tingkat produktivitas lahan. Praktik penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan mengakibatkan rusaknya struktur, tekstur, kimia dan biologi tanah. Hal ini menyebabkan fungsi tanah untuk mengikat air dan unsur hara tersedia menjadi berkurang. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang mendukung penggunaan pupuk organik semakin diperbanyak, dari pelatihan dan pemberian sarana pembuatan pupuk organik sampai dengan pemberian paket sarana produksi pertanian yang menyertakan pupuk organik.

Tabel 2.145
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Panen (Ha)	73,683.00	73,924.10	74,103.50	68,933.60	70.933,60
2.	Produksi (ton)	446,946.03	411,401.80	422,389.95	438,900.23	402.562,16
3.	Produktivitas (ton/Ha)	6.07	5.57	5.7	6.37	5,72

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Tabel 2.146
Luas Panen dan Produksi Padi Ladang Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Panen (Ha)	4,522.00	4,595.00	4,979.50	4,280.00	3,558.60
2.	Produksi (ton)	24,379.00	24,882.50	28,183.97	25,234.88	20,711.05
3.	Produktivitas (ton/Ha)	5.39	5.41	5.66	5.90	5.82

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Tabel 2.147
Luas Panen dan Produksi Palawija Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Panen (Ha)	11.523,10	25.660,80	29.231,40	19.594,00	15.974,90
2.	Produksi (ton)	118.127,79	131.455,71	110.320,71	79.820,68	88.364,08
3.	Produktivitas (ton/Ha)	10,25	5,12	3,77	4,07	5,53

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Dengan adanya ketersediaan lahan yang semakin terbatas, maka perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas lahan maupun pemilihan komoditas bernilai tambah tinggi. Tanaman hortikultura dan perkebunan merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi, terutama jika dibandingkan dengan komoditas tanaman pangan. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2020, luas areal pertanian yang dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura maupun komoditas perkebunan masih relatif rendah dan perkembangannya cenderung stagnan. Rendahnya pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya komoditas-komoditas bernilai tinggi tersebut tentu saja menjadi kendala tersendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya peningkatan nilai tambah melalui budidaya komoditas bernilai tinggi dilakukan melalui berbagai pelatihan dan penyediaan sarana produksi serta pembuatan demplot-demplot khususnya pada komoditas hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.148
Luas Lahan Panen Perkebunan Dibanding Luas Lahan Pertanian (Ha)
Tahun 2016-2020

Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
Total Luas Perkebunan	37.789,27	42.031,42	41.983,16	41.799,30	39.077,80
Luas Lahan Pertanian	94.706,70	92.107,30	93.585,15	93.500,48	93.448,63
Persentase Luas Lahan Perkebuna terhadap Luas Lahan Pertanian	39,90	45,63	44,86	44,70	41,82

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Tabel 2.149
Luas Lahan Panen Hortikultura Dibanding Luas Lahan Pertanian (Ha)
Tahun 2016-2020

Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Panen Hortikultura	3.848,61	4.503,80	4.644,60	4.391,20	4.505,72
Luas Lahan Pertanian	94.706,70	92.107,30	93.585,15	93.585,15	93.448,63
Persentase Luas Lahan Hortikultura terhadap Luas Lahan Pertanian	4,06	4,89	4,96	4,70	4,82

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Pada komoditas buah dan sayuran terlihat adanya fluktuasi yang sangat tinggi pada beberapa komoditas. Hal ini dimungkinkan terjadi salah satunya karena adanya perilaku petani yang belum bisa konsisten dalam menanam suatu komoditas dan cenderung berubah-ubah mengikuti komoditas yang sedang laku di pasar demi memperoleh keuntungan jangka pendek. Padahal di sisi lain, kontinuitas merupakan salah satu faktor penting yang akan menguntungkan petani dalam jangka panjang. Selain itu, inkonsistensi tersebut sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap perkembangan harga komoditas yang seringkali berdampak pada inflasi. Pembinaan kepada petani selalu dilakukan tidak hanya dalam teknis budidaya, tapi juga dalam rangka meningkatkan pemahaman petani terhadap aspek-aspek penting pengelolaan usaha tani termasuk kontinuitas usaha.

Tabel 2.150
Produksi Buah-Buahan Kabupaten Kebumen (Ton) Tahun 2016-2020

Jenis Buah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sawo	247.60	370.00	308.80	268.200	528.200
Pepaya	12,398.20	7,027.90	5,257.60	6,372.60	8,410.50
Pisang	15,230.20	12,292.80	9,804.10	13,191.20	9,359.70
Nanas	47.00	50.30	45.40	37.10	33.70
Salak	186.10	176.40	167.50	134.00	126.00
Nangka	2,242.70	2,500.70	2,189.10	3,119.30	3,840.00
Rambutan	631.20	1,364.70	1,060.60	1,136.20	796.00
Duku/Langsat	98.90	38.90	72.00	115.40	94.80
Jeruk	320.33	361.86	372.20	4,570.80	3,967.60
Durian	187.20	356.10	560.50	1,640.10	6874
Jambu	122.60	153.23	227.21	5,929.20	6,035.60
Alpukat	105.80	308.70	911.20	388.40	234.04
Semangka	1,452.8	4,585.2	4,585.2	6,270.9	4,994.5
Buah lainnya	3,903.60	15,281.80	16,477.80	16,385.60	16,623

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Tabel 2.151
Produksi Sayur-Sayuran Kabupaten Kebumen (Ton) Tahun 2016-2020

Jenis Sayuran	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tomat	470.40	317,40	298.50	471.50	675.20
Lombok	1,357.90	1,437.90	1,925.40	3,107.30	2,971.20
Terong	522.20	701,80	1,390.00	1,201.90	2,402.90
Sawi	91.70	86,80	127.30	215.50	302,00
Kacang panjang	523.20	1,562.10	828.40	730.30	1,020.40
Ketimun	245.30	1,155.40	443.60	646.20	866.60
Bayam	84.40	29.40	24.90	177.20	146.00
Kangkung	2,304.80	2,200.50	2,733.20	3,231.90	2,304.80
Sayuran lainnya	5,652.70	6,011.50	6,735.50	5,812.00	6,006.99

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Faktor iklim menjadi variabel yang sangat berpengaruh pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Selama tahun 2016-2020 jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan semakin menurun sebagaimana data pada klimatologi. Hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi dan produktivitas pertanian. Adanya perubahan dan anomali iklim yang tidak menentu akan mempengaruhi produksi pertanian.

Selain faktor iklim, adanya serangan penyakit maupun Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) juga sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi pertanian, yang berdampak terhadap penurunan kuantitas produksi, adanya serangan penyakit dan OPT tersebut juga dapat menurunkan kualitas produksi. Serangan ini terjadi pada semua komoditas baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan.

Upaya peningkatan produktivitas pertanian ditunjang oleh banyak faktor mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, akses terhadap permodalan serta kapasitas sumberdaya manusia. Ditinjau dari penyediaan sarana dan prasarana, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana dibandingkan kebutuhan petani masih sangat rendah, terutama untuk traktor (tingkat pemenuhan 38,89%) dan handsprayer (tingkat pemenuhan 6,07%). Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam upaya peningkatan produktivitas petani melalui mekanisasi pertanian. Kurangnya ketersediaan sarana pendukung ikut menghambat penerapan teknologi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Meskipun belum dapat memenuhi kebutuhan, namun upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian telah dilakukan setiap tahun melalui pembangunan jaringan irigasi serta penyediaan alat dan mesin pertanian.

Dilihat dari aksesibilitas permodalan secara umum, akses petani terhadap permodalan relatif masih rendah, termasuk di Kabupaten Kebumen. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang memiliki rekening di bank hanya 330 Gapoktan (71,74%) dan 992 kelompok tani (55,29%). Rendahnya persentase kelompok tani yang *bankable* ini disebabkan adanya pemahaman petani bahwa persyaratan kredit yang sulit untuk dipenuhi, sehingga menimbulkan keengganan petani untuk berurusan dengan perbankan. Hal ini menjadi satu hal yang perlu didorong agar petani dapat mengembangkan usahanya. Hal ini ditangani melalui kegiatan pembinaan manajemen usaha agar semakin banyak kelompok tani yang memenuhi persyaratan kredit. Selain itu, adanya dana talangan pangan juga sedikit banyak ikut mendukung permodalan petani meskipun kapasitasnya masih sangat terbatas.

Untuk melihat kapasitas SDM petani, salah satu data proksi yang dapat digunakan adalah jumlah kelompok tani maupun kelompok tani ternak yang telah mendapatkan pembinaan. Sampai tahun 2020, kelompok tani ternak yang telah memperoleh pembinaan sejumlah 25 kelompok tani ternak dari 595 kelompok tani ternak atau 4,20% dari keseluruhan kelompok yang ada. Upaya peningkatan kapasitas SDM petani selalu dilakukan setiap tahun, baik pada komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan. Pembinaan yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, namun juga mencakup manajemen usaha pertanian.

Selain penanganan pra panen, tahap pasca panen pertanian juga menjadi hal yang perlu diperbaiki. Kesulitan pemasaran menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga jual produknya, dan cenderung tunduk pada tengkulak. Hal ini dimungkinkan terjadi karena beberapa hal seperti keterdesakan karena kurangnya modal maupun kurangnya kualitas produk. Selain itu, hasil produksi pertanian yang melimpah juga belum ditunjang fasilitas penjualan produk yang memadai seperti pasar agro ataupun toko tani. Saat ini kendala pemasaran produk pertanian diintervensi melalui beberapa kegiatan pameran maupun pasar tani.

4) Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berkembang cukup pesat di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data pada tahun 2020 sektor perdagangan menyumbang kontribusi sebesar 14,84% PDRB di Kabupaten Kebumen, dan akibat Pandemi Covid-19 mengalami konstraksi sebesar -3,8%. Peningkatan jumlah pedagang menunjukkan bahwa perdagangan merupakan salah satu sektor yang cukup memberikan hasil sehingga diminati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga dapat menyebabkan semakin panjangnya rantai distribusi perdagangan yang berdampak pada meningkatnya harga di tingkat konsumen. Oleh karena itu diperlukan pengendalian harga serta pemantauan pasokan dan ketersediaan barang.

Tabel 2.152
Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB	14.57	14.88	15.03	15.35	14.84
2.	Jumlah Pedagang	20.928	21.000	21.284	21.284	21.868

Sumber: Disperindag Kab. Kebumen, 2021

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Distribusi barang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap harga akhir yang harus dibayar oleh konsumen. Salah satu yang menjadi kendala dalam distribusi perdagangan di Kabupaten Kebumen adalah tidak adanya produsen maupun distributor untuk beberapa komoditas kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan terjadinya volatilitas (tidak stabil) harga beberapa komoditas. Selain harga yang mudah berfluktuasi, juga terjadi disparitas harga di beberapa wilayah. Berikut ini disajikan contoh volatilitas dan disparitas harga beberapa komoditas di Kabupaten Kebumen.

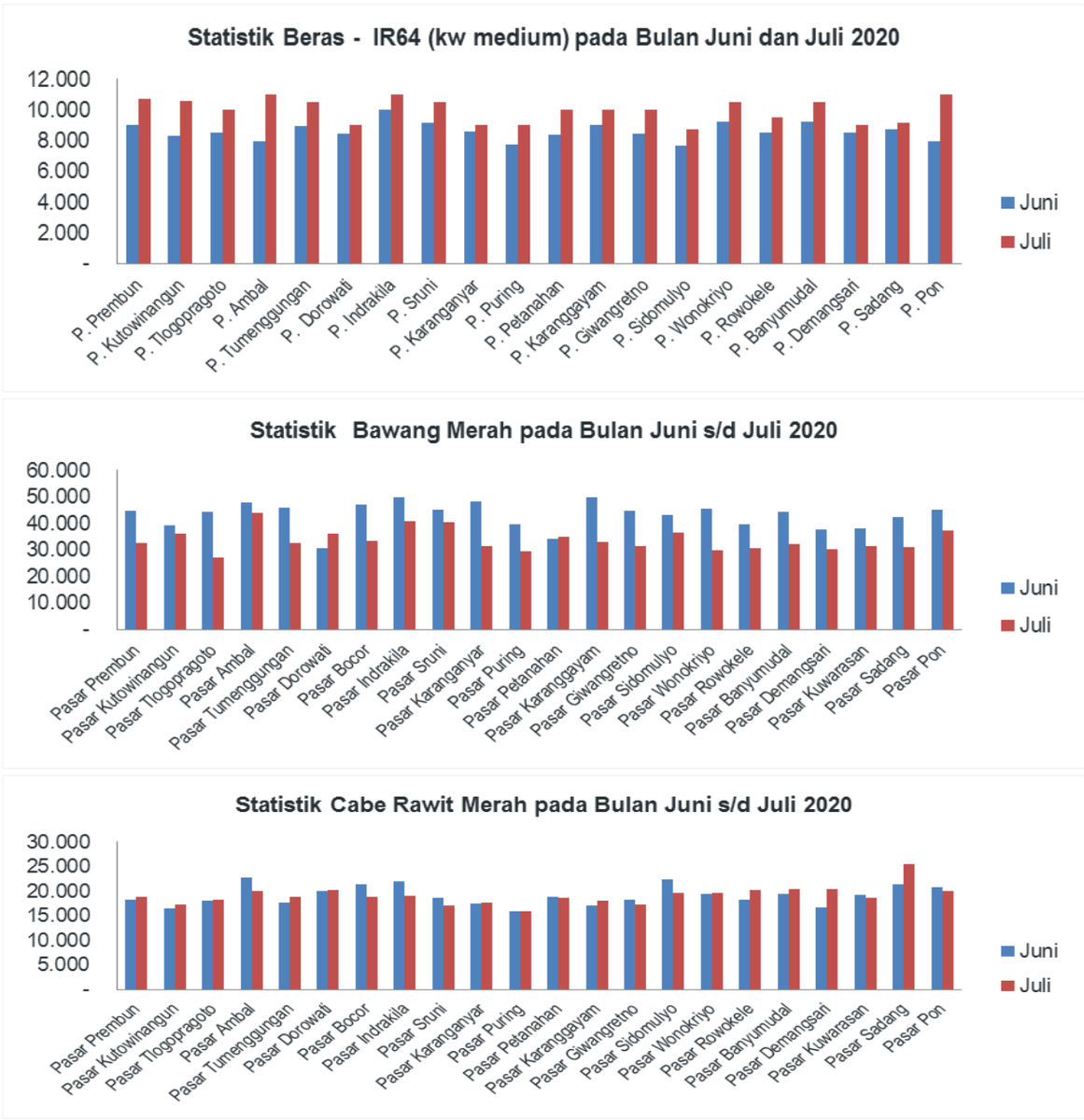

Sumber: Disperindag Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.56
Volatilitas dan Disparitas Harga Beberapa Komoditas di Kabupaten Kebumen

Guna menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan mengurangi disparitas harga komoditas antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta menjaga kelancaran distribusi barang dengan melibatkan pelaku usaha perdagangan barang kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Kebumen. Selain itu melakukan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perdagangan RI guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Kebumen, dengan memanfaatkan sistem informasi perdagangan yakni Sihati (Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi) , SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) dan SIMBOK (Sistem Informasi Kebutuhan Pokok).

Pasar merupakan urat nadi perekonomian di Kabupaten Kebumen, karena hampir setiap hari para penjual dan pembeli bertransaksi di dalamnya. Pasar yang dikelola oleh Disperindag Kabupaten Kebumen sebanyak 40 (empat puluh) unit yang biasa disebut pasar rakyat, sedangkan ada pasar lain yang tidak dikelola oleh Disperindag yang biasa disebut sebagai pasar desa karena dikelola oleh pemerintah desa setempat. Pada tahun 2020 terdapat 32 pasar dalam kondisi baik, 2 pasar dalam kondisi rusak dan 6 pasar

kondisi rusak berat. Dilihat secara umum, kondisi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik. Akan tetapi daya saing pasar tradisional belum cukup kuat jika dibandingkan dengan pasar modern seperti supermarket maupun minimarket yang semakin banyak. Kurangnya daya saing tersebut dapat dilihat dari timpangnya sarana prasarana, kualitas sumberdaya manusia serta tata kelola dan pelayanan di pasar tradisional dan pasar modern. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memberikan proteksi kepada pedagang pasar tradisional seiring tumbuh suburnya minimarket dan pasar modern adalah melalui pemeliharan dan rehabilitasi pasar tradisional agar penjual dan pembeli nyaman dalam melakukan transaksi.

Kurangnya daya saing pedagang tradisional juga dipengaruhi oleh rendahnya akses permodalan yang dimiliki oleh pedagang. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur kredit menjadikan para pedagang kurang berminat mengakses kredit perbankan. Karena kendala tersebut, para pedagang tradisional lebih memilih untuk mengakses modal dari rentenir yang menawarkan persyaratan lebih mudah meskipun dengan bunga yang jauh lebih tinggi.

5) Perindustrian

Sejalan dengan tren perekonomian secara umum, terjadi peralihan sektoral dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kebumen, dimana sektor sekunder yaitu industri mengalami peningkatan kontribusi setiap tahun. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang menyumbang angka pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dengan kontribusi mencapai 20,30% hingga Tahun 2020.

Tabel 2.153
Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	19.85	20.06	20.39	20.77	20.30
2.	Pertumbuhan Industri (Unit Usaha)	54,912	56,378	56,402	56,405	56,411
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin	220	150	240	270	280

Sumber: Disperindag Kab. Kebumen, 2021

Tahun 2020 jumlah industri yang ada di Kabupaten Kebumen sebanyak 56.411 buah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 126.843 orang. Dari jumlah industri tersebut untuk industri besar sebanyak 3 buah, industri menengah sebanyak 63 buah, dan industri kecil sebanyak 56.345 buah.

Data lengkap tentang jumlah industri dan jumlah tenaga kerja disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.154
Jumlah Industri di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Industri	Jumlah Tenaga Kerja
2016	54.912	125.241
2017	56.378	126.708
2018	56.402	126.821
2019	56.405	126.831
2020	56.411	126.843

Sumber: Disperindag Kab. Kebumen, 2021

Industri yang ada di Kabupaten Kebumen didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). IKM yang banyak berkembang antara lain industri makanan, kriya dan genteng. Mayoritas IKM yang ada masih menggunakan metode dan sarana sederhana dalam pengolahan produknya. Hal ini tentu akan mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil yang diperoleh. Kurangnya penggunaan teknologi dipengaruhi oleh kurangnya modal dan kemampuan sumberdaya manusia dalam penggunaan teknologi.

Dari sisi kelembagaan, pelaku IKM di Kabupaten Kebumen juga belum memiliki kelembagaan yang tertata dengan baik. Hal ini menyebabkan kurangnya daya saing karena kurang adanya kekompakan antar pelaku IKM. Sebagai contoh, tidak adanya kesepakatan harga antar pelaku IKM menyebabkan harga akan mudah dipermainkan oleh pengepul.

Terkait dengan aspek pemasaran, belum banyak produk IKM Kabupaten Kebumen yang mampu menembus pasar luar negeri. Pasar luar negeri menjadi pasar yang sangat potensial, apalagi di era sekarang dengan semakin terbukanya arus informasi pasar. Belum optimalnya pemanfaatan pasar tersebut disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas produk yang dihasilkan, serta kontinuitas dan kapasitas produksi yang belum mampu memenuhi permintaan ekspor. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman pelaku IKM terhadap prosedur ekspor juga menjadi kendala pemasaran produk yang perlu diselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan upaya untuk memperkuat kelembagaan IKM melalui pembinaan kepada IKM untuk membentuk kelembagaan dalam bentuk kelompok maupun badan hukum sebagai bentuk proteksi terhadap usaha serta membentuk jiwa IKM yang solid dan siap bersaing. Selain itu, diberikan pula fasilitasi bagi IKM untuk perlindungan produknya melalui izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), Merk, Halal, MD dan SNI.

Tahun 2020 Kabupaten Kebumen sedang dalam proses pembangunan kawasan industri yang terdapat di Kecamatan Petanahan. Maksud dan tujuan pembangunan kawasan industri tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen, membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Kebumen agar lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal. Adapun dampak positif yang diharapkan dari adanya kawasan industri tersebut nantinya untuk membuka lapangan kerja, menumbuhkan berbagai peluang usaha baru, meningkatkan ekspor dan pendapatan daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Inti dari dampak positif kawasan industri tesebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen, sehingga diharapkan akan mengurangi masyarakat miskin yang ada dan Kabupaten Kebumen terlepas dari status kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah.

6) Transmigrasi

Kinerja urusan transmigrasi di Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Namun dalam kurun waktu tahun 2018-2019 menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang difasilitasi untuk bertransmigrasi yang meningkat dari 4 KK di tahun 2018 menjadi 10 KK pada tahun 2019. Akibat Pandemi Covid-19 tidak ada KK yang difasilitasi untuk bertransmigrasi. Capaian kinerja urusan transmigrasi bergantung dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan target jumlah transmigrasi di kabupaten. Capaian kinerja urusan transmigrasi Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.155
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KK yang difasilitasi untuk bertranmigrasi	13 KK	5 KK	4KK	10 KK	0 KK

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kab. Kebumen, 2021

Penyelenggaraan program transmigrasi memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga transmigran melalui kepemilikan rumah, diberikannya lahan pekarangan dan lahan industri untuk dapat diolah dan dikembangkan sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan pengembangan ekonomi daerah. Meskipun demikian etos kerja, keuletan dan motivasi kuat dari transmigran sangat menentukan keberhasilan transmigran dalam melakukan pengelolaan lahan yang ada.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan daerah tujuan transmigrasi, sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah yaitu agar ada warga Jawa Tengah termasuk Kabupaten Kebumen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai pejuang NKRI untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain dalam hal melakukan sinkronisasi dan kesepakatan bersama penyelenggaraan transmigrasi agar dapat terkirim transmigran yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dan transmigran mendapat kepastian hak sesuai yang tertuang dalam naskah Kerja Sama Antar Daerah (KSAD).

2.3.4 Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Kinerja tata kelola pemerintahan secara keseluruhan dapat dilihat dari capaian beberapa indikator antara lain Indeks Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP, Opini BPK atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Indeks Integritas Jabatan, Indeks Integritas Organisasi, Indeks Kualitas Pelayanan, dan Indeks Persepsi Korupsi.

a) Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia yang ada di pemerintah dan dilaksanakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks reformasi birokrasi merupakan alat atau *tools* untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan birokrasi diberikan kategori berjenjang yaitu kategori AA (istimewa) dengan nilai >90-100, kategori A (sangat baik) dengan nilai >80-90, kategori BB (baik) dengan nilai >70-80, kategori B (cukup baik) dengan nilai >60-70, kategori CC (cukup) dengan nilai >50-60, kategori C (buruk) dengan nilai >30-50, dan kategori D (sangat buruk) dengan nilai 0-30. Untuk nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 58,40 dengan kategori "CC" (cukup). Nilai komponen tertinggi pembentuk indeks reformasi birokrasi diperoleh dari komponen hasil antara area perubahan 5,22 dari bobot

10,00 (porsi 52,2%). Di sisi yang lain, dua area dengan nilai yang terendah yaitu reform dengan nilai 11,68 dari bobot 30,00 (porsi 38,90%) dan pemenuhan dengan nilai 9,12 dari bobot 20,00 (porsi 45,6%).

Tabel 2.156
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A	**Komponen Pengungkit**		
	I. Pemenuhan	20,00	9,12
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,22
	III. Reform	30,00	11,68
	Total Komponen Pengungkit	60,00	26,02
B	**Komponen Hasil**		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,33
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,08
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,35
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,62
	Total Komponen Hasil	40,00	32,38
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	58,40

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2021

Sementara itu, rekomendasi Kemenpan-RB pada area penataan dan penguatan organisasi adalah evaluasi kelembagaan belum fokus pada kinerja yang akan dihasilkan. Struktur kelembagaan daerah harus disusun berdasarkan pada pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Saat ini beberapa struktur kelembagaan pada perangkat daerah belum mendukung sepenuhnya terhadap prioritas pembangunan daerah. Kelembagaan Perangkat Daerah yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari tipe-tipe perangkat daerah (PD) yang ada yaitu 7 dari 26 (atau 26,92%) tipe PD di Kabupaten Kebumen belum sesuai dengan urusan/proses bisnis yang diampu.

Evaluasi dari Kemenpan-RB terhadap kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sudah mulai berjalan di Pemerintah Kabupaten Kebumen, namun masih lebih fokus dilaksanakan di tingkat Pemda, belum menyeluruh di tingkat Perangkat Daerah;
2. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi reformasi birokrasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Kabupaten Kebumen;
3. Identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta monitoring dan evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara optimal;
4. Tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan menyeluruh.
5. Peta proses bisnis yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada kinerja utama baik di tingkat Pemda maupun di tingkat Perangkat Daerah, sehingga struktur organisasi yang terbentuk belum sepenuhnya ideal dan belum menunjukkan bentuk penyederhanaan organisasi yang berbasis kinerja;
6. Penerapan *e-Gov* di lingkungan Pemerintah Kabupaten sudah mulai dilakukan, namun belum sepenuhnya terintegrasi, mengingat belum adanya *Grand Design* pengembangan aplikasi antar Perangkat Daerah, sehingga belum optimal

pemanfaatannya. Salah satu diantaranya adalah penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaporan maupun sebagai sarana penilaian capaian kinerja individu;

7. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM antara lain mengenai tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plant* (HCDP) belum menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi;
8. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih perlu dilakukan;
9. Implementasi kebijakan pengawasan internal juga masih perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas terdapatnya kebijakan akan pengawasan serta sosialisasinya, namun lebih harus ditingkatkan pemanfaatannya dan harus dilakukan monitoring serta evaluasi atas kebijakan tersebut;
10. Pembangunan zona integritas belum cukup masif dan intensif dilakukan pada unit kerja yang memberikan layanan utama dan strategis, sehingga belum dapat mewujudkan unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBMM);
11. Upaya-upaya peningkatan pada pelayanan publik sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, mulai dari perbaikan sarana prasarana maupun fasilitas lainnya, termasuk juga menerapkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian besar Perangkat Daerah. Namun, yang menjadi catatan adalah hasil dari survei tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijadikan dasar perbaikan pelayanan publik yang baik.

Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kebumen masih tertinggal dari kabupaten tetangga. Nilai IRB Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 berada di posisi paling rendah sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Hal ini mengindikasikan kualitas pelayanan publik Kabupaten Kebumen masih di bawah kabupaten tetangga. Perlu usaha peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Kebumen agar Kabupaten Kebumen dapat setara dengan kabupaten disekitarnya dalam hal pelayanan publik.

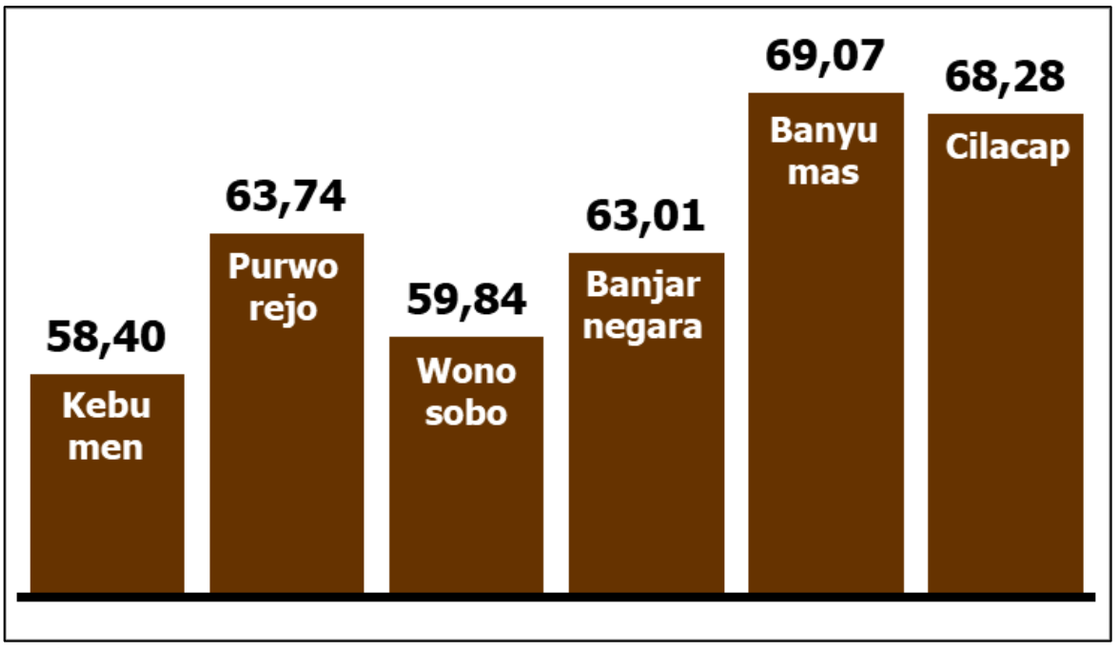

Sumber: KemenPAN-RB, 2021

Gambar 2.57
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen
dan 5 Kabupaten Tetangga Tahun 2020

b) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi terhadap implementasi SAKIP bertujuan menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh nilai 61,85 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.157
Penilaian SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perencanaan Kinerja	30	16.91	19.41	20.29	21,13	21,77
2.	Pengukuran Kinerja	25	13.44	13.90	13.78	14,19	15,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	9.77	9.00	9.66	9,83	9,90
4.	Evaluasi Kinerja	10	4.86	4.90	5.88	6,06	6,06
5.	Capaian Kinerja	20	9.37	10.05	9.11	10,64	11,01
	Nilai Hasil Evaluasi	100	54.35	57.26	58.73	61,85	63,84
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**CC**	**CC**	**CC**	**B**	**B**

Sumber: Kemenpan-RB, 2021

Dari Tabel diatas, secara proporsi pembentuk penilaian SAKIP, capaian kinerja dan pengukuran kinerja menjadi komponen dengan proporsi nilai paling rendah. Hal ini menunjukkan penjabaran kinerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat penanggungjawab program dan kegiatan, dan juga belum dilakukan sampai dengan tingkat individu pegawai. Sehingga keselarasan pengukuran antara kinerja individu dan kinerja organisasi belum terkawal dengan baik yang berpotensi pada

pemberian *reward and punishment* pada individu pegawai yang kurang berorientasi pada kinerja. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baru sebatas monitoring capaian program dan kegiatan secara fisik, serapan anggaran dan belum digunakan mengukur capaian hasil (*outcome*) program serta keselarasan program dan kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi.

Dari tabel dan gambar di atas, nilai SAKIP Kabupaten Kebumen pada tahun 2020, dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, masih cukup rendah, dengan berada pada peringkat ke-26 dari 35 kabupaten/kota (Gambar 2.59).

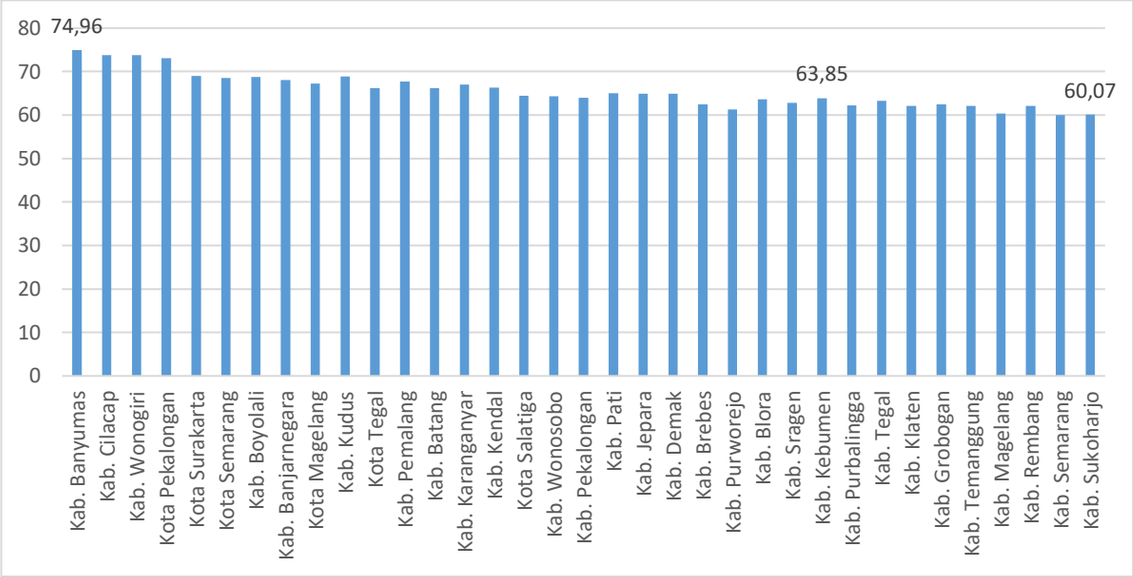

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.58
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

c) Survei Internal Indeks Integritas Jabatan dan Organisasi

Hasil Survei Integritas Jabatan terhadap responden pegawai Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 menunjukkan indeks 3,53 dari skala 5. Secara keseluruhan, hanya 41% responden yang memahami kinerjanya, ukuran kinerja, dan kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Sedangkan 59% responden belum sepenuhnya memahami kinerjanya, ukuran kinerja, atau kontribusi terhadap organisasi.



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.59
Hasil Survei Integritas Jabatan

Survei Indeks Integritas Organisasi menunjukkan persepsi para pegawai/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Survei ini mulai dilaksanakan oleh Kemen PAN-RB pada tahun 2020 untuk penilaian pelaksanaan tahun 2019. Survei internal terhadap integritas organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2019 menunjukkan indeks 3,42 dalam skala 0-4.

Tabel 2.158
Indeks Integritas Organisasi
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Komponen	Indeks 2019
1.	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,32
2.	Integritas Kinerja terkait Pengelolaan SDM	3,57
3.	Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran	3,40
4.	Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma	3,38
Indeks Integritas Organisasi		3,42

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Kemenpan-RB

d) Survei Eksternal Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi

Hasil survei persepsi pelayanan pada tahun 2020 mengalami penurunan di indeks 3,23. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen masih perlu untuk di tingkatkan.

Respon pelayanan menjadi unsur yang terendah, berdasar hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kebumen tahun 2020, respon pelayanan sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur perilaku pelaksana lekat kaitannya dengan *attitude* (sikap) dan *behave* (perilaku). Masyarakat pada umumnya menginginkan perilaku pelaksana yang mampu melayani dan memberikan perhatian terhadap pertanyaan serta mempunyai empati sehingga mampu memberikan kenyamanan. Unsur perilaku menuntut pelaksana untuk dapat menyajikan pelayanan yang ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik serta respon yang memadai dalam menghadapi masyarakat pada saat proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Perilaku pelaksana dalam pelayanan publik di Kabupaten Kebumen belum optimal. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerapkan budaya kerja "PRIMA" (Profesional, Religius, Inovatif, Komitmen dan Akuntabel), kaidah perilaku merupakan unsur tidak hanya memperhatikan masalah etika saja, tetapi kemampuan komunikasi dan *responsiveness* menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kepuasan pada masyarakat.

Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 mengalami penurunan. Hasil Survei eksternal terhadap masyarakat Kabupaten Kebumen menunjukkan indeks 3,34 atau turun 0,06 dari tahun 2019 dari skala 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan sistem integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kebumen belum mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi.

Tabel 2.159
Survei Eksternal Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

No	Komponen	2019	2020
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,38	3,23
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,40	3,34

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Kemenpan-RB

a) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Realisasi kinerja berdasarkan formula Indikator Kinerja Kunci untuk Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Nilai EKPPD Target yang ingin dicapai adalah nilai B atau Tinggi. Nilai EKPPD disampaikan setelah penilaian oleh Tim Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya. Nilai EKPPD dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Status dan Kinerja Pemerintahan Daerah.

Realisasi capaian Nilai EKPPD Kabupaten Kebumen tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.160
Nilai EKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai EKPPD	3.2232	3.2174	2.5236	3.3226	3.3158

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data di atas, nilai EKPPD periode 2016-2018, meskipun fluktuatif, cenderung mengalami peningkatan dari 3,2 pada 2016 menjadi 3,3 pada 2018. Upaya peningkatan Nilai EKPPD dilaksanakan dengan adanya dukungan dari Kepala Daerah dalam pelaksanaan desk data dan evaluasi mandiri serta adanya koordinasi intensif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kemendagri.

Kendala dalam evaluasi nilai EKPPD adalah keterlambatan hasil kinerja tahun n yang selalu diterbitkan Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun n+1, contohnya nilai EKPPD tahun 2018 disampaikan pada tahun 2020. Sehingga perhitungan capaian kinerja tahun 2018 masih merupakan angka sementara. Pada tahun 2018, target nilai yang ingin dicapai adalah Baik/Tinggi, namun sampai dengan disusunnya laporan ini masih belum diterbitkan SK Mendagri tentang Penetapan dan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional Tahun 2018. Sementara berdasarkan hasil evaluasi sementara yang disampaikan oleh Tim EKPPD Provinsi Jawa Tengah, bahwa nilai EKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 mencapai 3,3198.

Capaian nilai EKPPD mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 terjadi kasus temuan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kebumen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2017, pada Ketentuan Kesepuluh, bagi daerah yang masuk peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional pada tahun 2017 mendapat pengurangan skor dikarenakan salah satunya pada huruf (a) "Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerahnya ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi per tanggal 1 April 2017 baik yang sudah maupun belum mendapat putusan pengadilan tetap (*inkracht*)".

Sedangkan nilai EKPPD tahun 2019 belum ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan dan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional Tahun 2019 dan nilai EKPPD tahun 2020, penilaiannya akan dilaksanakan di bulan Juli Tahun 2021.

2) Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat dari fasilitasi terhadap pembahasan peraturan daerah yang dilaksanakan Lembaga DPRD. Selama lima tahun terakhir kinerja Sekretariat DPRD cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase peraturan daerah yang ditetapkan dan tepat waktu dari 62,50% pada tahun 2016

menjadi 90% pada tahun 2020. Selain itu kinerja Sekretariat DPRD juga dilihat dari jumlah kegiatan reses yang difasilitasi, yaitu setiap anggota DPRD mempunyai hak reses sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Adapun kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161
Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Raperda yang Dibahas	32	15	16	11	20
2.	Raperda yang Disetujui/ Ditetapkan	20	13	16	10	18
3.	Persentase peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu	62,50%	86,67%	100%	90,91%	90,00%
4.	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi (kali)	150	150	150	150	150

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh *stakeholder* untuk mengelola sumberdaya daerah guna peningkatan kesejahteraan daerah. Perencanaan pembangunan daerah berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan daerah dan pembinaan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2019 telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengatur secara detail pembagian berdasarkan urusan dan kewenangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program antarperangkat daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah dilakukan pemetaan perubahan nomenklatur sub-kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dan mensinkronkan indikator maupun sub indikator kegiatan dengan tetap mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Selain itu, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya. Adanya peraturan tersebut maka proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pertanggungjawaban terintegrasi dalam satu sistem yang terhubung. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, telah dilakukan interoprobabilitas antara e-Planning (SIM Perencanaan), SIM KUA-PPAS, dan e-Budgeting (SIMDA). Langkah yang sedang dilakukan adalah pengintegrasian aplikasi SIMPER dengan SIPD walaupun belum optimal tetapi diharapkan pada proses perencanaan penganggaran tahun 2021 telah dapat terintegrasi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Perangkat Daerah juga telah membangun dan mengimplementasikan sistem perencanaan kinerja berbasis teknologi informasi yaitu SIM perencanaan, SIM KUA PPAS, SIMDA keuangan dan aplikasi *e*-SAKIP, namun aplikasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah pada beberapa perangkat daerah masih perlu penyempurnaan rumusan sasaran strategis, indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran terkait dengan relevansi, formulasi pengukuran, dan kecukupan indikator seperti pada Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, serta Dinas Perhubungan. Namun demikian, pada tataran pelaksanaan perencanaan, konsistensi antara dokumen masih menjadi permasalahan. Hal ini terlihat dari adanya program, kegiatan dalam dokumen RKPD dan APBD yang tidak tercantum pada dokumen RPJMD. Berikut Persentase Kesesuaian program antara RPJMD dan RKPD serta RKPD dengan ABPD Tahun 2018 sampai dengan 2020.

Tabel 2.162
Kesesuaian Program antara RPJMD dan RKPD
serta RKPD dengan APBD Tahun 2016 sampai dengan 2020

Tahun	RPJMD-RKPD				RKPD-APBD			
	RPJMD	RKPD	Kesesuaian RPJMD dan RKPD	%	RKPD	APBD	Kesesuaian RKPD dan APBD	%
2016	165	152	Semua program di RKPD terdapat di RPJMD	100%	152	152	Semua Program di RPKD terdapat di APBD	100%
2017	165	165	16 Program di RKPD tidak terdapat di RPJMD	90,30%	165	154	NA	NA
2018	165	163	14 Program di RKPD tidak terdapat di RPJMD	91,52%	163	156	Semua Program di RPKD terdapat di APBD	100%
2019	165	148	5 Program di RKPD tidak terdapat di RPJMD	96,97%	148	151	Semua Program di RPKD terdapat di APBD	100%
2020	165	146	5 Program di RKPD tidak terdapat di RPJMD	96,97%	146	146	Semua Program di RPKD terdapat di APBD	100%

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2021, data diolah

Meskipun capaian komponen perencanaan kinerja dalam penilaian SAKIP Kabupaten pada tahun 2018 sampai dengan 2020 menjadi komponen dengan nilai dan porsi tertinggi, namun masih terdapat permasalahan mendasar apabila dilihat dari konsistensi antar dokumen perencanaan yang masih belum optimal. Meskipun persentase kesesuaian antara jumlah program di RPJMD dengan RKPD meningkat, namun masih terdapatnya program dalam RKPD yang tidak tertuang dalam RPJMD mengindikasikan masih terdapatnya masalah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

a) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya konsistensi antar dokumen perencanaan;
b) Belum adanya mekanisme untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran serta mekanisme pembangunan yang lain (integrasi SIM Perencanaan dengan Penganggaran dan sistem manajemen pemerintah yang lain belum optimal); dan

c) Pengendalian dan evaluasi kegiatan kurang mendapat perhatian, termasuk penganggarannya.

2) Keuangan

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja urusan keuangan Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah yang meningkat dari Rp 2,606 triliun pada 2016 menjadi Rp 2,797 triliun di 2019 dan sedikit menurun pada Tahun 2020 sebesar 2.762 triliun. Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kebumen selalu mendapat opini BPK dengan predikat WTP sejak tahun 2017. Perkembangan capaian kinerja urusan keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 secara lebih detail tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.163
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi pendapatan daerah (triliun rupiah)	2,606	2,713	2,639	2,797	2.762
2	Opini BPK atas LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen, 2021

Pada tahun 2019 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. PP tersebut mengamanatkan perubahan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Kinerja urusan keuangan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan aset daerah. Sampai dengan tahun 2020, masih terdapat 1.073 bidang atau 47,10% dari total 2.278 bidang tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Dari 1.073 bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut, 60% atau 644 bidang tanah merupakan aset dalam bentuk tanah bidang jalan dan tanah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Beberapa aset pemerintah daerah sampai dengan saat ini belum sepenuhnya optimal pemanfaatannya, seperti tanah kebun dinas dan beberapa bidang tanah yang belum dimanfaatkan, seperti diantaranya tanah untuk evakuasi bencana, tanah untuk SMA Alian, tanah untuk rencana pembangunan Terminal Karangsambung.

Terkait aset dalam bentuk gedung, sampai dengan tahun 2020, 80% gedung yang digunakan untuk sekolah dasar merupakan tanah milik desa. Kemudian, terdapat beberapa aset gedung yang belum jelas rencana pemanfaatannya di antaranya eks Gedung RSUD Soedirman, TIC, eks gedung Kantor Kecamatan Karangsambung, gedung Sekretariat Bersama, dan eks Gedung Pramuka. Permasalahan terkait aset ini disebabkan beberapa hal di antaranya pengelolaan aset daerah yang tidak jelas status hukumnya atau bersengketa, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur, serta tukar-menukar aset. Sehingga pemerintah daerah dalam kurun waktu 2016-2020 sebagai Langkah penyelesaian permasalahan aset berkonsentrasi penuh pada penelusuran, penatausahaan aset dan penertiban aset daerah.

3) Kepegawaian

Penataan sumberdaya manusia aparatur menjadi komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini. Di sisi yang lain, saat ini terjadi permasalahan yang sangat kompleks dan sistematik dalam sistem manajemen SDM aparatur pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi pada seluruh subsistem manajemen SDM aparatur mulai dari sistem rekrutmen, sistem penggajian,

dan peningkatan upaya kesejahteraan, penilaian kinerja, sistem mutasi serta sistem pengawasan.

Secara kuantitas, jumlah ASN di Pemerintah Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir terus mengalami tren yang menurun. Hal tersebut dapat diamati dari jumlah ASN pada tahun 2016 sebanyak 12.276 personil berkurang menjadi 10.573 personil pada tahun 2020. Berkurangnya jumlah ASN tersebut berakibat pada meningkatnya beban kerja ASN yang ada sehingga perlu penambahan personil ASN baik melalui rekrutmen CPNS atau yang lainnya agar ASN dapat melayani masyarakat dengan baik.

Tabel 2.164
Jumlah ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2016	6,264	6,012	12,276
2017	5,990	6,089	12,079
2018	5,565	5,817	11,382
2019	5,341	5,908	11,249
2020	4,913	5,660	10,573

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2021

Meskipun jumlahnya terbatas, kualitas ASN Kabupaten Kebumen terus meningkat selama kurun waktu 2016-2020. Hal ini terlihat dari persentase ASN berpendidikan DIV-S1 yang meningkat dari 54,27% di 2016 menjadi 56,41% pada tahun 2019 dan sebesar 56,99% pada 2020, sementara ASN berpendidikan SD-SLTA menurun dari 25,08% pada 2016 menjadi 21,76 pada tahun 2019 dan terakhir menjadi 19,91% pada tahun 2020. Jumlah dan tingkat pendidikan ASN di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut:

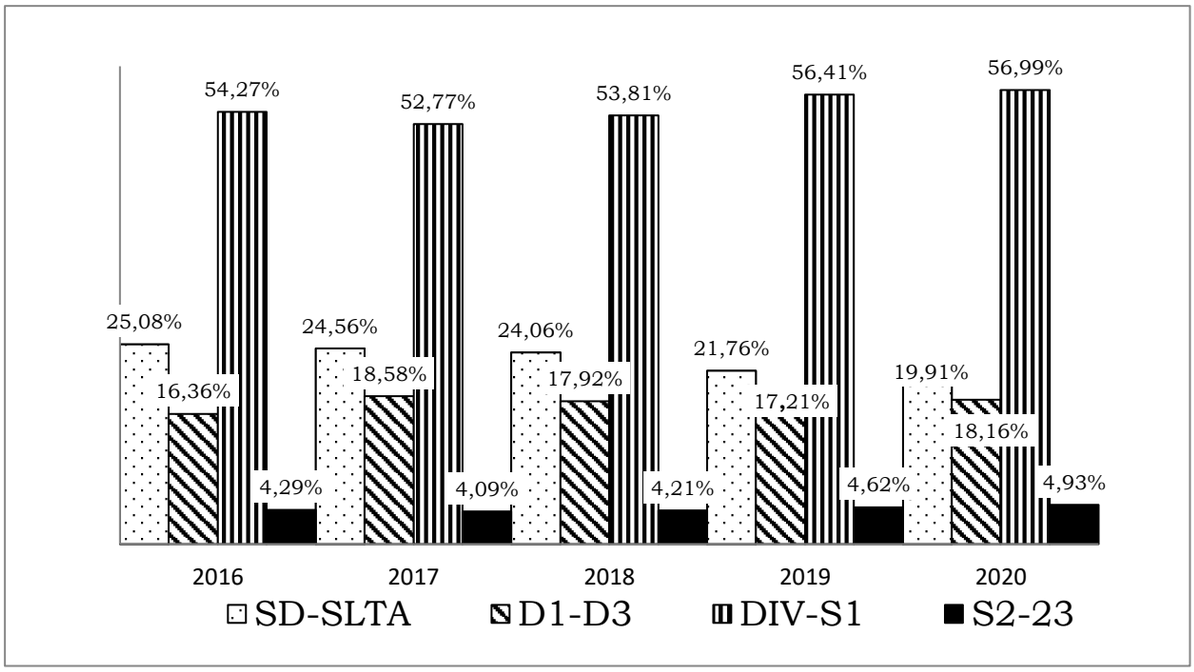

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.60
Persentase Tingkat Pendidikan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Berdasarkan data pejabat struktural dan fungsional tahun 2020 menunjukkan bahwa untuk penataan dan penempatan SDM aparatur di Kabupaten Kebumen masih belum optimal. Data terkait kesesuaian penempatan SDM dengan Anjab, ABK dan standar kompetensi jabatan sampai saat ini belum tersusun dan dari segi komposisi ASN yang menempati jabatan pengawas (Eselon IV) terdapat ketidaksesuaian antara penempatan SDM dengan standar kompetensi jabatan. Untuk jabatan pengawas (Eselon IV),

dipersyaratkan tingkat pendidikan minimal sarjana muda (D3). Sampai dengan tahun 2020, masih terdapat 50 orang dari 532 (9,39%) pejabat pengawas (Eselon IV) yang tingkat pendidikannya SMA.

Tabel 2.165
Pejabat Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

TK DIK	Eselon II (Pimpinan Tinggi)			Eselon III (Administrator)			Eselon IV (Pengawas)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SLTA	0	0	0	0	0	0	35	15	50
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	0	0	0	0	1	1	10	16	26
D4	0	0	0	4		4	11	6	17
S1	3	2	5	59	13	72	183	133	316
S2 & S3	17	3	20	57	34	91	82	41	123
Jumlah	20	5	25	120	48	168	321	211	532

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2021

Tabel 2.166
Pejabat Fungsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

TK DIK	Rumpun Pendidikan			Rumpun Kesehatan			Rumpun Teknis Lainnya		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SLTA	61	39	100	7	24	31	16	4	20
D1	4	4	8	0	8	8	0	0	0
D2	123	107	230	0	0	0	3	1	4
D3	14	13	27	151	859	1010	21	13	34
D4	0	0	0	10	44	54	3		3
S1	1859	2937	4796	56	145	201	56	56	112
S2 & S3	149	86	235	47	65	112	8	6	14
Jumlah	2210	3186	5396	271	1145	1416	107	80	187

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2021

Tabel 2.167
Pejabat Fungsional Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

TK DIK	Gol. I			Gol. II			Gol. III			Gol. IV		
	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
SD	66	10	76	5	0	5	0	0	0	0	0	0
SLTP	62	1	63	187	10	197	0	0	0	0	0	0
SLTA	8	2	10	835	211	1046	233	174	407	0	0	0
D1	0	0	0	2	0	2	2	3	5	0	0	0
D2	0	0	0	30	9	39	4	1	5	1		1
D3	0	0	0	21	64	85	36	31	67	0	0	0
D4	0	0	0				8	3	11	0	0	0
S1	0	0	0	31	13	44	306	441	747	9	1	10
S2 & S3	0	0	0	0	0	0	12	10	22	6	2	8
Jumlah	136	13	149	1111	307	1418	601	663	1264	16	3	19

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2021

4) Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan kualitas aparat ASN-nya agar kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peningkatan kapasitas ASN yang meningkat dari 672 diklat pada tahun 2015 menjadi 1.486 diklat di tahun 2019. Perkembangan peningkatan kapasitas ASN Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.168
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Jenis Diklat	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Teknis	77	83	160	179	121	300	89	71	160	452	340	792	452	383	835
Fungsional	10	20	30	17	13	30	28	52	80	18	42	60	5	2	7
Kepemimpinan	50	21	71	28	18	46	33	28	61	19	10	29	23	3	26
Prajabatan/ Latsar	3	1	4	0	0	0	10	240	250	155	342	497	0	0	0
Pengiriman PNS ke Lembaga Diklat	62	49	111	137	75	212	57	45	102	58	49	107	8	5	13
Jumlah	202	174	376	361	227	588	217	436	653	702	783	1.486	488	393	881

Sumber: BKPPD, 2021

5) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Hal ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan antara lain penyusunan kajian, Riset Unggulan Daerah (RUD) serta Lomba Kreasi dan Inovasi Masyarakat (Krenova).

Tabel 2.169
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Penelitian	6	6	6	5	5
2	Hasil Peserta Krenova	16	8	19	23	21
3	Jumlah peserta Krenova yang difasilitasi provinsi/Pemda dalam pameran dan pembinaan	6	7	7	5	5

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2021

Pemerintah Kabupaten Kebumen mendorong masyarakat dalam pengembangan inovasi masyarakat melalui kompetisi. Seleksi dan penetapan pemenang peserta Krenova pada tahun 2020 yang pada tahap selanjutnya menjadi peserta di tingkat Provinsi mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2020 terdapat 6 pemenang yang mewakili Kabupaten Kebumen di Tingkat Provinsi. Ajang Krenova diharapkan mampu mendorong kreativitas masyarakat dalam pengembangan dan perekayasaan teknologi guna menyelesaikan permasalahan sehari-hari maupun sebagai langkah merintis usaha melalui komersialisasi produk hasil Krenova.

Bidang kelitbangan juga dilaksanakan penyusunan kajian pendukung perencanaan dengan tema yang dipilih berdasarkan isu dan permasalahan daerah sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan daerah. Kajian yang dilaksanakan disesuaikan dengan isu-isu strategis daerah maupun isu aktual yang hasilnya dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan daerah dan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dewan Riset Daerah (DRD) pada tahun 2020 bertindak sebagai supervisor yang mempunyai tugas mendampingi tim penyusun kajian Rencana Induk Kelitbangan (RIK) tahun 2021-2025 sebagai dokumen induk bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kebumen.

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja urusan pengawasan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan nilai *levelling* Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten yang meningkat dari level 2 di tahun 2016 menjadi level 3 pada tahun 2020. Sedangkan nilai maturitas SPIP juga meningkat dari 2 pada tahun 2016 menjadi 3 pada tahun 2020. Selain itu, persentase penyelesaian tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu juga meningkat dari 90,00% pada tahun 2016 menjadi 96,35% di tahun 2020. Perkembangan capaian kinerja pengawasan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.170
Perkembangan Capaian Kinerja Pengawasan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	90,00	92,00	92,00	94,26	96,35
2	Nilai leveling APIP kabupaten	2	2	2,5	3	3
3	Nilai Maturitas SPIP	2	2,55	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kab. Kebumen, 2021

Dalam pembangunan daerah, pengawasan merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga proses pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan secara optimal. Salah satu penyebab terhambat atau melencengnya proses pembangunan disebabkan kurang efektifnya sistem dan lembaga pengawasan yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan mengamanahkan bahwa daerah melaksanakan SPIP. SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ada 5 (lima) unsur dalam SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Penilaian SPIP Kabupaten Kebumen tahun 2019 secara lengkap pada Tabel berikut:

Tabel 2.171
Hasil Penilaian SPIP Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil SA		Hasil QA		Perubahan Nilai
			Skor	Nilai	Skor	Nilai	
1	Lingkungan Pengendalian	30,00	3,1250	0,9375	3,0000	0,9000	(0,0375)
2	Penilaian Risiko	20,00	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	-
3	Kegiatan Pengendalian	25,00	3,0909	0,7727	3,0000	0,7500	(0,0227)
4	Informasi dan Komunikasi	10,00	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	-
5	Pemantauan	15,00	3,0000	0,4500	3,0000	0,4500	-
	Jumlah	100,00	-	30.602	-	30.000	(0,0602)
	Keterangan	Level 3 (terdefinisi)					

Sumber: Inspektorat Kab. Kebumen, 2020

Beberapa permasalahan yang disarankan untuk menjadi prioritas tindak lanjut evaluasi BPKP atas nilai SPIP Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2020 di antaranya:

a) Infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub-unsur SPIP yang menjadi *Area of Improvement (AoI)*, antara lain melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi dan kebijakan pada seluruh sub-unsur, serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi tersebut; dan
b) Pemantauan yang berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasinya pada masing-masing sub-unsur termasuk perubahan lingkungan strategis yang didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi, *online*, *real time* sehingga dapat memberikan informasi bagi pimpinan (*dashboard* pimpinan) secara *update* dan efektif untuk pengambilan keputusan.

Dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa, APIP berperan sebagai Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan oleh APIP dilakukan dalam bentuk a. reviu b. monitoring c. evaluasi d. pemeriksaan e. pengawasan lainnya. Selama tahun 2020, APIP telah merencanakan 32 terhadap pemeriksaan APBDes dengan realisasi pemeriksaan sebanyak 30 kali.

2.3.7 Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Capaian kinerja pelayanan publik kecamatan masyarakat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mendapatkan nilai B (baik). Perkembangan capaian kinerja pelayanan publik di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.172
Capaian Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	B	B	B	B	B
2	Capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kelurahan	B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Kebumen, 2021

Upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat ditempuh melalui beberapa hal antara lain dengan perbaikan mutu SDM, peningkatan sarana dan prasarana layanan termasuk memperhatikan pelayanan yang ramah anak atau bersifat inklusif, serta perbaikan prosedur pelayanan.

2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Dari aspek Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan baik berdasarkan profesi, agama maupun umum. Jumlah total LSM pada tahun 2016 yaitu 216 Ormas bertambah menjadi 240 Ormas pada tahun 2020. Perkembangan jumlah Ormas di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.173
Jumlah Ormas Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ormas Berdasarkan Profesi	25	0	26	26	26
2.	Ormas Berdasarkan Agama	40	42	44	44	44
3.	Ormas Umum	151	160	164	170	170
Jumlah Total Ormas		216	202	234	240	240

Sumber: Bakesbangpol Kab. Kebumen, 2021

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 nilainya mencapai 64,84% menurun menjadi 64,00% di tahun 2020. Capaian tahun 2020 ini juga masih dibawah partisipasi pemilih Provinsi Jawa Tengah sebesar 80%. Rendahnya partisipasi pemilihan umum di Kabupaten Kebumen disebabkan oleh banyaknya pekerja migran dan anak sekolah yang ada di luar Kebumen dan masih rendahnya kesadaran warga yang mempunyai hak pilih untuk memberikan suaranya. Adapun cara penghitungan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu dan Pilkada dengan rumus :

$$\text{Rumus : } \frac{\text{jumlah kehadiran/pengguna suara}}{\text{jumlah pemilih yang masuk dalam DPT/DPTb}} \text{ x } 100\%$$

Peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat pada tahun melalui sosialisasi wawasan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat yang melibatkan perwakilan pengurus organisasi dan tokoh masyarakat desa dari 460 desa. Capaian kinerja Peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat pada tahun 2016 sebesar 52,80% mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 15,3% dikarenakan tidak boleh mengumpulkan banyak orang pada masa pandemi covid-19 yang dilaksanakan hanya sosialisasi wawasan kebangsaan sedangkan untuk pendidikan politik tidak dilaksanakan karena anggarannya terefokusing untuk penanganan Covid-19. Adapun cara penghitungannya adalah P

$$\text{Rumus : } \frac{\text{peserta perwakilan pengurus organisasi + tokoh masyarakat}}{460} \text{ x } 100\%$$

Sementara itu, cakupan penanganan kasus pelanggaran norma keagamaan di Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 29,00% meningkat menjadi 32,00% di tahun 2020. Cakupan penanganan kasus pelanggaran norma keagamaan dihitung dari Jumlah masyarakat yang dibina dibagi jumlah kelompok sasaran dikali 100 %

$$\text{Rumus : } \frac{\text{jumlah masyarakat yang dibina}}{\text{jumlah kelompok sasaran}} \text{ x } 100\%$$

Pada Tahun 2020 terdapat kasus pelanggaran keagamaan berupa kasus pertikaian keagamaan dengan adanya kelompok pengajian Majelis Tafsir Al Quran yang berada di Desa Meles Kecamatan Adimulyo dianggap tidak sesuai pada tempatnya dan tidak disetujui oleh warga setempat. Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha mengatasi kasus tersebut dengan mengadakan mediasi antara pengurus penganut MTA dengan dipertemukan dengan FORKOPIMDA untuk membahas permasalahan yang ada. FORKOPIMDA menyarankan untuk menjaga kondusifitas diminta mengadakan pengajian di kantor pusat MTA Kebumen dijalan Arungbinang. Pengurus pengajian MTA menerima dan bersedia mengadakan pengajian dikantor pusat.

Perkembangan persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat dan cakupan penanganan kasus pelanggaran norma keagamaan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.174
Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Partisipasi warga dalam pemilu	0	0	64,84%	70,6%	64,00%
2.	Peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	52,80%	64,60%	70,00%	79,00%	15,3%
3.	Cakupan penanganan kasus pelanggaran norma keagamaan	29%	31,44%	33,36%	32,00%	32,00%*

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Kebumen, 2021 (Diolah)

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Nilai konsumsi rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka konsumsi perkapita penduduk Kabupaten Kebumen masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Tabel 2.175
Angka Konsumsi RT Perkapita Sebulan
Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebumen	631.390	729.732	704.294	781.578	883.891
2	Jawa Tengah	756.720	827.223	938.581	956.403	1.018.487

Sumber: BPS, 2021

2) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Selama lima tahun terakhir, NTP Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang fluktuatif namun ada kecenderungan menurun. Pada level regional, angka kabupaten yang semula ada di atas rata-rata provinsi, bergeser menjadi di bawah rata-rata dengan adanya penurunan tersebut. Dilihat dari nilainya, NTP yang

hanya berkisar di angka 100 menunjukkan bahwa usaha pertanian yang ada di Kabupaten Kebumen saat ini cenderung tidak menguntungkan bagi petani. NTP merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan oleh petani dengan hasil yang diperolehnya. Dengan demikian, semua program/ kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanian maupun urusan lain yang mendukung pertanian pasti mengarah kepada peningkatan NTP, baik melalui efisiensi biaya produksi maupun peningkatan nilai produksi. Peningkatan efisiensi produksi dilakukan antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pembinaan teknis serta pengembangan pertanian berbasis kawasan. Peningkatan nilai produksi pertanian dilakukan antara lain melalui pembinaan dan penyediaan sarana pengolahan produk pertanian serta pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi.

Tabel 2.176
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	NTP	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebumen	100,49	100,32	100,77	104,26	101,79
2	Jawa Tengah	100,02	100,02	102,24	102,19	101,49

Sumber: BPS, 2021

3) Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Selain dilihat dari nilainya, pola konsumsi rumah tangga juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Persentase pengeluaran untuk pangan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk non-pangan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian masyarakat. Dilihat dari nilainya, pengeluaran non-pangan penduduk Kabupaten Kebumen masih berada di bawah rata-rata provinsi, pun bila dilihat dari persentase pengeluaran non-pangan dibandingkan total pengeluaran yang masih sedikit di bawah angka provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.177
Rata-rata Konsumsi RT Non-Pangan Perkapita Sebulan Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Kab. Kebumen	300.023	48%	332.950	46%	323.790	46%	362.440	46%	430.292	49%
2	Prov. Jawa Tengah	385.115	51%	405.708	49%	477.690	51%	486.982	51%	522.314	51%

Sumber: BPS 2021, data diolah

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

Luas Wilayah Produktif

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non-pertanian. Kawasan peruntukan budidaya meliputi:

a. kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu
b. kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat; meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara
c. kawasan pertanian adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya pertanian tanaman pangan ataupun pertanian pangan berkelanjutan.

d. kawasan perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan dan diarahkan pada perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
e. kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya pertambangan dan energi (berupa mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi)
f. kawasan peruntukkan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, didalamnya dapat terdapat kawasan industri dan sentra industri kecil menengah
g. kawasan pariwisata adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi pariwisata dengan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia
h. kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
i. kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan wilayah produktif adalah lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wilayah produktif terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan perikanan. Dalam analisis citra satelit tahun 2020, luasan budidaya seluas 120.695,42 Ha, dengan luas lahan produktif 59.723,48 Ha, dan tersebar di 26 kecamatan. Kecamatan Adimulyo, Puring, dan Bonorowo memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling besar, karena topografi wilayahnya terletak di daerah datar yang banyak memiliki sawah atau ladang. Sedangkan Kecamatan Rowokele, Sadang, dan Padureso memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling kecil, dikarenakan topografis wilayahnya pegunungan yang jarang sawah atau ladang, namun banyak hutan.

Tabel 2.178
Persentase Luas Wilayah Produktif (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	Rasio
1	Adimulyo	3.136,82	4.484,44	69,95%
2	Alian	2.253,67	5.494,66	41,02%
3	Ambal	4.227,48	6.173,14	68,48%
4	Ayah	1.671,40	5.302,52	31,52%
5	Bonorowo	1.587,24	2.297,17	69,10%
6	Buayan	1.898,94	5.223,25	36,36%
7	Buluspesantren	3.387,46	5.138,76	65,92%
8	Gombong	953,97	1.896,49	50,30%
9	Karanganyar	1.116,76	2.947,44	37,89%
10	Karanggayam	4.993,21	9.893,61	50,47%
11	Karangsambung	3.581,66	6.700,35	53,45%
12	Kebumen	2.420,43	4.579,79	52,85%
13	Klirong	2.547,44	4.260,44	59,79%
14	Kutowinangun	1.709,54	3.317,85	51,53%
15	Kuwarasan	2.348,31	3.622,63	64,82%
16	Mirit	3.391,52	5.083,99	66,71%
17	Padureso	794,79	2.657,01	29,91%
18	Pejagoan	1.113,47	3.472,51	32,07%
19	Petanahan	2.931,23	4.505,15	65,06%
20	Poncowarno	1.283,48	2.675,91	47,96%
21	Prembun	1.362,83	2.310,77	58,98%

No	Kecamatan	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	Rasio
22	Puring	4.348,04	6.217,96	69,93%
23	Rowokele	1.236,54	5.024,05	24,61%
24	Sadang	1.605,10	5.770,79	27,81%
25	Sempor	2.180,99	7.126,09	30,61%
26	Sruweng	1.641,14	4.518,64	36,32%
	Jumlah	59.723,48	120.695,42	49,48%

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2021

Tabel 2.179
Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

No	Jenis Data	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Luas Alih Fungsi Lahan (m^2)	85.996 m^2	28.573 m^2

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Faktor utama dalam sektor pertanian adalah ketersediaan lahan. Di Kabupaten Kebumen, luas lahan pertanian khususnya padi dan palawija, senantiasa mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini dipengaruhi tingginya alih fungsi lahan dari fungsi pertanian ke non-pertanian. Hal ini tentu saja menjadi kendala karena berpengaruh kepada tingkat produksi. Menurunnya luas areal pertanian diikuti dengan tingkat produksi yang cenderung menurun.

Selain alih fungsi lahan, tingkat kepemilikan lahan pertanian juga menjadi kendala dimana usaha pertanian menjadi tidak memenuhi skala ekonomis. Luas lahan sawah di Kabupaten Kebumen 40.073,20 Ha dikelola oleh petani sebanyak 177.936 orang. Dengan demikian, maka tingkat kepemilikan lahan pertanian hanya seluas 0,23 Ha per orang. Luasan ini jauh dari memadai karena untuk memenuhi kebutuhannya secara layak, minimal setiap petani memiliki sawah seluas 2 Ha.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1) Jumlah Kasus Demonstrasi

Jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 masih tergolong cukup tinggi walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya, namun juga fluktuatif, dimana tahun 2017 dan 2018 sempat mengalami kenaikan. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik, kemudian aspirasi-aspirasi yang diperjuangkan para pendemo berkorelasi dengan isu-isu yang berkala nasional. Berbagai unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Kebumen relatif dapat berjalan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian dan tidak berdampak negatif terhadap iklim investasi yang ada di Kabupaten Kebumen, terlebih dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja yg membentuk ekosistem kemudahan berusaha bagi investor, pelaku UMKM, tenaga kerja dan masyarakat.

Tabel 2.180
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Bidang Politik	5	6	13	11	Na
Ekonomi	0	9	5	3	Na
Kasus Pemogokan Kerja	0	0	0	0	0
Jumlah	5	15	18	14	Na

Sumber: Bakesbangpol Kab. Kebumen, 2020

2) Rata-Rata Lama Perijinan

Di Kabupaten Kebumen terdapat 26 jenis perijinan yang dilayani dengan waktu rata-rata lama perijinan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi standar pelayanan perijinan tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.181
Rata-rata Lama Perijinan di Kabupaten Kebumen

No	Jenis Perijinan	Standar	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
1	IUJK	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	- Semua izin akan diproses petugas setelah berkas lengkap - Apabila ada izin yang melebihi standar waktu, bisa dikarena-kan belum adanya rekomen-dasi dari dinas terkait
2	IMB	10 hr	10 hr	10 hr	10 hr	10 hr	10 hr	
3	Izin pemasangan reklame	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	
4	PIRT	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
5	Izin mendirikan rumah sakit umum	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
6	Izin mendirikan rumah sakit khusus	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
7	Surat tanda pengobatan tradisional	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	
8	Izin apotek	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
9	Izin toko obat	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
10	Izin optik	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
11	Izin depot air minum	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
12	Izin lembaga pelatihan kerja	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	
13	Izin operasional pendirian bursa kerja khusus	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	
14	Izin lokasi	7 hr	Sudah tidak ada					
15	Izin operasional rumah sakit	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
16	Izin operasional klinik pratama	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
17	Izin laboratorium klinik pratama	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
18	Izin penggunaan Gedung Juang	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	
19	Izin menempati kios/loos/toko	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	
20	Izin pendirian klinik pratama	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
21	Izin lingkungan	14 hr	14 hr	14 hr	14 hr	14 hr	14 hr	
22	Izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3	45 hr	45 hr	45 hr	45 hr	45 hr	45 hr	
23	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	90 hr	90 hr	90 hr	90 hr	90 hr	90 hr	
24	Kartu penanggung-jawab teknik badan usaha	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	
25	Izin Penggunaan alun-alun	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	
26	Izin perubahan penggunaan tanah	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	

Sumber: DPMPTSP, 2021

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata waktu tingkat penyelesaian perizinan di Kabupaten Kebumen masih cukup panjang (50% waktu penyelesaian 7 hari). Beberapa hal yang menyebabkan cukup lamanya waktu penyelesaian perizinan di antaranya:

a. Rekomendasi yang masih memakan waktu.
b. Pemanfaatan IT dalam pelayanan belum optimal.
c. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga.

Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya optimal untuk meningkatkan iklim investasi melalui pelayanan perizinan yang lebih baik. Pada tahun 2019, diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dalam Perda ini diatur Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun luar negeri atau Penanaman Modal Asing (PMA). Pemberian insentif berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan atau pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. Kemudian, kemudahan investasi berbentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, percepatan pelayanan perizinan, dan pemberian advokasi. Meskipun demikian, implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 belum efektif, perlu dilakukan penyelarasan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan lainnya, yang kemudian perlu disusun Raperbup yang mengatur secara teknis.

Selain itu, pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP). MPP merupakan salah satu perwujudan komitmen percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha di daerah. Kabupaten Kebumen menyelenggarakan MPP sesuai aturan yang ada dengan mewadahi aktivitas dan pelayanan publik yang memungkinkan dan mendukung iklim investasi secara kondusif pada satu tempat layanan dengan maksud mempercepat alur dan prosedur, memudahkan koordinasi teknis dan administratif serta memusatkan layanan perizinan dan sistem pendukungnya baik secara *online* maupun *offline.* MPP menyediakan 251 layanan dari 26 instansi dengan 21 loket yang tersedia, termasuk layanan dokumen dan perizinan investasi dan usaha. Pendirian MPP ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian pelayanan perizinan sehingga masyarakat khususnya para investor nyaman dan diuntungkan. Diharapkan pada akhirnya nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Kebumen akan semakin meningkat.

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Fokus sumberdaya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung daya saing daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan sumberdaya manusia merupakan sektor strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Analisis kinerja atas sumberdaya manunsia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3 untuk mengetahui potensi sumberdaya manusia yang dimiliki.

1) Kualitas tenaga kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Kebumen tahun 2020 penduduk Kabupaten Kebumen baru terdapat 2,58% penduduk yang mengenyam jenjang pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan kualitas SDM di Kabupaten Kebumen ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan masih tergolong rendah.

Tabel 2.182
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Jenis Perijinan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1	26.694	28.901	31.725	33.815	34.644
2.	Jumlah lulusan S2	828	958	1.086	1.204	1.253
3.	Jumlah lulusan S3	60	62	57	61	60
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	27.582	29.921	32.868	35.080	35.957
5.	Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.388.490	1.394.038
6.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)	2,03	2,19	2,39	2,53	2,58

Sumber: DDA Kabupaten Kebumen, Disdukcapil, 2021

2) Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ini menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Struktur penduduk dapat memberikan kontribusi ekonomi pada suatu daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah harus tetap mengendalikan laju pertumbuhannya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, termasuk pada ketersediaan pangan dan daya dukung alam serta lingkungan. Kabupaten Kebumen jika dilihat dari struktur penduduk usia produktifnya cukup besar sekitar 68,76%, hal ini jika tidak didukung dengan kebijakan yang berwawasan kependudukan akan memicu tingginya angka pengangguran, serta kemungkinan munculnya masalah pangan dan lingkungan. Selain itu karena sumber-sumber ekonomi di Kabupaten Kebumen yang didominasi oleh sektor pertanian yang kurang diminati kaum muda, dan tidak adanya industri manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar menyebabkan angka migrasi di Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Penduduk usia muda cenderung memilih untuk merantau baik ke kota-kota besar maupun ke luar negeri.

Tabel 2.183
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Usia <15 thn	302.376	297.703	317.028	315.694	317.928
Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	110.617	112.042	115.309	123.813	119.254
Jumlah Penduduk usia tidak produktif (1 & 2)	412.993	409.745	432.337	439.507	437.182
Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64	945.455	955.160	942.884	948.983	962.794
Rasio Ketergantungan	43,68	42,90	45,85	46,31	45,41

Sumber: Disdukcapil Kab. Kebumen, 2021

Secara demografis, penuaan penduduk dapat dilihat dari beberapa ukuran (Mundiharno, dalam Heryanah, 2015) yaitu rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10% atau lebih, atau jika ketergantungan penduduk muda sebesar 30% atau kurang, proporsi penduduk berumur 65 tahun ke atas telah di atas 7% dan umur median penduduk berumur 20 tahun ke bawah dan berumur 20 tahun ke atas masing-masing 50%. Jika dilihat dari proporsi jumlah penduduk usia tua dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk Kebumen telah mengalami penuaan penduduk. Proporsi penduduk yang berusia lanjut atau berumur 65 tahun ke atas telah mencapai 8,50%. Angka ketergantungan penduduk usia tua Kabupaten Kebumen mencapai 12,37%. Artinya,

Kabupaten Kebumen memenuhi dua dari tiga kriteria untuk dikategorikan sebagai *ageing population*.

Kondisi ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyusun kebijakan strategis untuk memperhatikan penduduk usia tua seperti kebijakan pemberdayaan ekonomi produktif bagi lansia, bantuan permakanan atau jaminan sosial lain termasuk jaminan kesehatan bagi lansia. Perlu disusun kebijakan menyeluruh berwawasan kependudukan mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, pendidikan anak usia dini, pola asuh, pendidikan karakter, penyiapan menuju dunia usaha, hingga kebijakan bagi lansia. Selain itu, segera melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang memuat kebijakan menyangkut pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui aspek layanan dasar seperti peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kompetensi dan daya saing penduduk baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.

2.5 Evaluasi capaian RPJMD Periode Sebelumnya (RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021) sampai dengan Tahun 2020

Evaluasi Realisasi RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021 dapat ditelisik dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan IKU Perangkat Daerah. Kabupaten Kebumen memiliki 26 IKU Daerah dan 103 IKU Perangkat Daerah. Capaian IKU Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.184
Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah sampai dengan Tahun 2020

No	IKU Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020	Ket.
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,20	13,04	13,34	102,3	●
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,20	7,16	7,54	105,3	●
3	Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	63,39	61,47	61,49	100,03	●
4	Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	65,38	58,65	21	35,80	▲
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01	72,97	73,40	100,59	●
6	Angka Kematian Ibu	Angka	68	75	76,73	97,74	●
7	Angka Kematian Bayi	Angka	10,50	10,75	6,95	154,68	●
8	Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100	100	100	●
9	Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	37,65	35,13	33,36	94,96	●

No	IKU Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020	Ket.
10	Kasus pelanggaran hukum	Kasus	500	600	255	235,29	●
11	Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	%	6,00	5,97	-1,46	-124,46	▲
12	Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	Rp (ribuan)	25.179,48	23.813,51	21.780,00	91,46	●
13	Rasio/Indeks Gini	Point	0,21	0,21	0,22	95,45	●
14	Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Unit	6	5	5	100,00	●
15	Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	6,0	6,0	-56,21	-1.036,8	▲
16	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	19,69	18,80	-76,33	-506,01	▲
17	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	62,88	61,88	71,45	115,46	●
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	77,5	76	72,26	95,08	●
19	Angka Kemiskinan	%	15,45	16,22	17,59	92,21	●
20	Angka Pengangguran	%	1,97	1,99	6,07	32,78	▲
21	Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	83,87	82,73	81	97,90	●
22	Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	99,00	99,00	100	101,01	●
23	Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B	B	B	100	●
24	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B	B	100	●
25	Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP	WTP	WTP	100	●
26	Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	80,00	80,00	70,00	87,5	●

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2021

Keterangan :

● : Tercapai (tingkat capaian 80% ke atas)

■ : Akan Tercapai (tingkat capaian 60% keatas sampai dengan 79,99%)

▲ : Perlu Usaha Keras (tingkat capaian dibawah 60%)

IKU Daerah adalah indikator untuk mengukur prestasi Kepala Daerah selama periode kepemimpinan tertentu. Dari tabel di atas IKU Daerah Kabupaten Kebumen yang berjumlah 26 Indikator sebagian besar telah mencapai target yang tetapkan di dalam RPJMD 2016-2021. Indikator IKU Daerah yang tercapai sebanyak 21 indikator. Sedangkan indikator yang memerlukan kerja keras untuk mencapai sebanyak 5 indikator yaitu Capaian prestasi pemuda dan olahraga, Pertumbuhan ekonomi (ADHK), Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN, Persentase peningkatan kunjungan wisata, dan Angka Pengangguran.

Ketidaktercapaian IKU Daerah tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang menyerang awal tahun 2020, pemerintah pusat mengambil kebijakan *social distancing* dan penutupan tempat-tempat wisata, perbelanjaan, dan aktivitas ekonomi lainnya berdampak berhentinya aktivitas ekonomi masyarakat dan konsentrasi pendanaan pemerintah untuk penanganan bidang kesehatan dan pemberian jaringan pengaman sosial akibat tidak bisa bekerja atau diberhentikan dari pekerjaan.

Tabel 2.185
Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten KebumenTahun 2016-2021
Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
sampai dengan Tahun 2020

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020	Ket.
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,20	13,04	13,34	102,30	●
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,20	7,16	7,54	105,30	●
3	Angka Kelulusan	%	99,92	99,91	99,99	100,08	●
4	Persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (S1 ke atas)	%	2,20	2,14	1,95	91,12	●
5	Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	Angka	B	B	B+	100,00	●
6	Angka Partisipasi Sekolah	%	93,36	92,86	80,47	86,65	●
7	Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	33,42	30,08	33,31	110,74	●
8	Capaian kunjungan perpustakaan	%	19,27	16,63	14,15	85,08	●
9	Capaian prestasi cabang olahraga	%	64,10	58,97	35,94	60,95	■

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020	Ket.
10	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	%	66,67	58,33	47,00	80,57	●
11	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	%	100	100	85	85,00	●
12	Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	Angka	84,00/ A	83,00/ A	83,18 A	100,22	●
13	Nilai kinerja kesehatan BLUD	Angka	A	A	A	100,00	●
14	Cakupan penanganan ibu hamil resiko tinggi	%	100	100	100	100,00	●
15	Persentase Kasus Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,01	300,00	●
16	Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SD	%	100	100	100	100,00	●
17	Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SMP	%	100	100	100	100,00	●
18	Cakupan rehabilitasi kasus narkoba	%	17,95	15,38	10,71	69,63	■
19	Cakupan Penemuan Kasus Baru HIV	%	95	90	95,6	106,22	●
20	Cakupan Penanganan Kasus Pertikaian Antar Agama	%	100	100	100	100,00	●
21	Persentase masjid dan mushola dalam kondisi baik	%	90	85	82	96,47	●
22	Persentase Ponpes dan TPQ dalam kondisi baik	%	92,5	87,5	75	85,71	●
23	Persentase gereja dalam kondisi baik	%	100	100	95	95,00	●
24	Persentase wihara dalam kondisi baik	%	100	100	93	93,00	●

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020	Ket.
25	Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Kasus	300	400	544	73,53	■
26	Presentase cakupan penerbitan Akta Kelahiran	%	90	89,50	97,41	108,83	●
27	Persentase cakupan penerbitan akta kematian	%	52,00	50,00	100	200	●
28	Persentase desa Siaga/ Tangguh Bencana	%	45,71	38,57	16,6	43,04	▲
29	Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	%	90,00	85,00	15,3	18,00	▲
30	Capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam proses pemilihan umum	%	70,00	0	64	∞	●
31	Capaian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan nilai budaya	%	70,00	69,23	64,51	93,18	●
32	Produktivitas padi	Ton/ha	6,57	6,56	5,90	89,93	●
33	Produktivitas jagung	Ton/ha	7,48	7,48	6,75	90,24	●
34	Produktivitas kedelai	Ton/ha	1,23	1,23	1,09	88,61	●
35	Kenaikan Angka Nilai Tukar Petani (NTP)	%	103,20	103	100,8	97,86	●
36	Produksi kelapa	Buah	190.225,42	189.945,13	198.523,00	104,51	●
37	Produksi tembakau	Ton	415,35	408,68	445,7	109,05	●
38	Produksi daging	Kg	11.102.580	11.102.470	11.136.909	100,31	●
39	Produksi telur	Kg	3.836.510	3.836.470	3.838.154	100,04	●
40	Produksi ikan	Ton	12.826	12.220	11.425	93,49	●
41	Beroperasinya PPI yang bisa menampung kapal berbobot	Unit	1	1	Kewenangan Provinsi		

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020	Ket.
	30 GT ke atas (provinsi)						
42	Produksi kayu bulat (PROPINSI)	m3	18.204,27	18.024,03	Kewenangan Provinsi		
43	Presentase Koperasi Aktif	%	92	90	87,11	96,78	●
44	Peningkatan Jumlah UMKM	Unit	46.057	45.457	46.460	102,20	●
45	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	70,23	63,36	80,91	127,69	●
46	Persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya	%	69,35	59,57	59,57	100,00	●
47	Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	%	60,00	54,35	61,08	112,38	●
48	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	%	100	77,78	82,5	106,06	●
49	Jumlah usaha perdagangan berizin	Unit	2.413	2.380	3.718	156,21	●
50	Jumlah industri kecil menengah	Unit	54.959	54.949	56,399	102,63	●
51	Terbangunnya kawasan industri	Unit	1	-	-	∞	●
52	Terbentuknya Kawasan Perdesaan	Unit	6	1	5	500,00	●
53	Terbentuknya Unit Usaha Syariah pada BUMD	unit	1	-	-	∞	●
54	Nilai investasi PMA/PMDN	Rp. Juta	405. 729	382.763	388.640	101,53	●
55	Presentase BUMD dengan predikat sehat	%	100, 00	100,00	100,00	100,00	●
56	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	Angka	82,50/ A	82,25/ A	81,97/A	99,66	●
57	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	3.006.422	2.511.841	692.926	27,59	▲

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020	Ket.
58	Lama tinggal wisatawan	Hari	0,70	0,60	0,50	83,33	●
59	Capaian jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	60,00	60,00	71,45	119,08	●
60	Capaian jaringan irigasi kewenangan kab. dalam kondisi baik	%	80,00	77,00	73,70	95,71	●
61	Persentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	100,00	83,33	15,25	18,30	▲
62	Cakupan pelayanan air bersih	%	16,53	16,53	19,74	119,41	●
63	Cakupan lahan bersertifikat	%	26,53	25,53	41,97	164,39	●
64	Cakupan kualitas layanan transportasi	%	83,33	72,96	80,56	110,41	●
65	Capaian layanan komunikasi	%	100,00	90,38	100,00	110,64	●
66	Rasio elektrifikasi (PROPINSI)	%	95,00	94,00	Kewenangan Provinsi		
67	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	60,00	59,00	62,80	106,44	●
68	Penanganan lahan kritis (PROPINSI)	Ha	375, 00	375, 00	Kewenangan Provinsi		
69	Capaian luas RTH Perkotaan	%	17,45	17,45	17,18	98,45	●
70	Angka Indeks kualitas udara	Indeks	79,00	78,00	93,3	119,61	●
71	Angka Indeks kualitas air	Indeks	76,00	74,00	56,67	76,58	■
72	Cakupan pelayanan sampah	%	42,94	42,94	48,5	112,95	●
73	Persentase usaha pertambangan yang menerapkan good practice minning (PROPINSI)	%	84,00	71,00	Kewenangan Provinsi		
74	Cakupan penanganan PMKS	%	16,20	16,18	96,12	594,91	●
75	Cakupan rumah layak huni	%	100,00	100,00	97,67	97,67	●
76	Cakupan Pembinaan	%	32,37	32,31	44,04	136,30	●

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020	Ket.
	Keluarga Sejahtera						
77	Cakupan Peserta KB Aktif	%	85,50	85,10	85,5	100,47	●
78	Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja	%	21,59	21,39	15,76	73,67	■
79	Persentase Gedung PAUD/sederajat dalam kondisi baik	%	90,24	87,43	87,88	100,51	●
80	Persentase Gedung SD/sederajat dalam kondisi baik	%	66,22	66,22	79,3	119,75	●
81	Persentase Gedung SMP/ sederajat dalam kondisi baik	%	87,60	86,48	78,28	90,51	●
82	Persentase Gedung SMA/ sederajat dalam kondisi baik	%	91,43	90,79	Kewenangan Provinsi		
83	Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	%	90	90	100	111,11	●
84	Tingkat pelayanan kegawatdarurata n	%	100	100	100	100,00	●
85	Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan	%	98	98	100	102,04	●
86	Nilai kinerja kesehatan BLUD	Angka	A	A	A	100,00	●
87	Peningkatan Persentase Akses Sanitasi	%	85	80	79,51	99,38	●
88	Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	96,52	94,80	91,68	96,70	●
89	Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	%	70,00	65,00	45,00	69,23	■

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020	Ket.
90	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	%	100	100	83,83	83,83	●
91	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	%	A	A	B	90,00	●
92	Capaian peningkatan pelayanan kelurahan	%	100	100	83,78	83,78	●
93	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	%	A	A	B	90,00	●
94	Capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa	%	48,95	45,79	73,71	160,97	●
95	Persentase jumlah Perangkat Daerah menerapkan arsip baku	%	49,43	42,72	64,55	151,10	●
96	Capaian kinerja program	%	90,00	90,00	90,00	100,00	●
97	Capaian akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	%	79,52	74,90	89,29	119,21	●
98	Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	%	14,00	14,00	14,28	102,00	●
99	Persentase Perangkat Daerah yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	%	95,00	95,00	99,43	104,66	●
100	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	%	92,00	92,00	92,00	100,00	●
101	Nilai Leveling APIP Kabupaten	Angka	3,00	3,00	3,00	100,00	●

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2020	Ket.
102	Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan asset	%	95,00	93,25	93,48	100,24	●
103	Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	80,00	80,00	82,55	103,18	●

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2021

Keterangan :

● : Tercapai (tingkat capaian 80% ke atas)

■ : Akan Tercapai (tingkat capaian 60% keatas sampai dengan 79,99%)

▲ : Perlu Usaha Keras (tingkat capaian dibawah 60%)

Capaian IKU perangkat daerah Kabupaten Kebumen, dari 87 IKU yang ditetapkan, sebanyak 74 target IKU di tahun 2020 telah tercapai, sebanyak 6 IKU kemungkinan masih bisa tercapai, sebanyak 4 IKU perlu bekerja keras untuk mencapai sampai dengan akhir RPJMD, dan 6 IKU yang beralih kewenangan menjadi kewenangan provinsi. IKU yang akan tercapai di tahun 2021 sebanyak 6 (enam) IKU antara lain: Capaian prestasi cabang olahraga, Cakupan rehabilitasi kasus narkoba, Penurunan Kasus Pelanggaran Perda, Angka Indeks kualitas air, Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja, dan Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Sedangkan 4 (empat) IKU OPD yang kemungkinan pada akhir RPJMD perlu perjuangan keras untuk mencapai yaitu : Persentase desa Siaga/ Tangguh Bencana, Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat, Persentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan, dan Jumlah kunjungan wisatawan. IKU Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang berubah menjadi kewenangan provinsi sebanyak enam (6) IKU yaitu; beroperasinya PPI yang bisa menampung kapal berbobot 30 GT ke atas, produksi kayu bulat, rasio elektrifikasi, penanganan lahan kritis, persentase usaha pertambangan yang menerapkan good practice mining dan persentase Gedung SMA/sederajat dalam kondisi baik.

2.6 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, definisi SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), penerapan SPM dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas Pendidikan, Kesehatan,

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan sosial.

Perubahan paradigma baru tentang SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama tetapi prioritas utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Tabel 2.186
Integrasi SPM Dalam Arah Kebijakan Pembangunan
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal
			2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	Perluasan akses pendidikan formal
		2. Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
		3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
			2. Angka Kematian Ibu	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar	Peningkatan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
			3. Angka Kematian Bayi	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar	Peningkatan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar
Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Kasus pelanggaran hukum	meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
				berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	Kabupaten Kebumen
Pemantapan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas Dan Kawasan Unggulan Daerah Didukung Oleh Pembangunan Pertanian Dan Pariwisata	1. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
				2. Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA
	2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Pemantapan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesem-patan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Angka Pengangguran	Meningkatkan keterampilan masyarakat	
Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan	Peningkataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	Peningkataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan

Sumber : Bappeda Kab. Kebumen, 2020

1) Bidang Urusan Pendidikan

Capaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai 100% yaitu layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan capaian 84%, layanan Pendidikan Dasar dengan capaian 85%, layanan Pendidikan Menengah Pertama dengan capaian 85%, hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa target SPM harus mencapai 100%. Adapun layanan dasar yang telah mencapai 100% yaitu layanan dasar Pendidikan kesetaraan. Untuk melihat secara keseluruhan keterlaksanaan SPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.187
Realisasi Capaian SPM Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM (%)
			Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	41.284	8.823.906.000	34.609	8.610.233.864	84%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	132.244	113.163.020.000	137.775	110.474.083.232	85%
3.	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah anak 12-15 tahun yang tahun yang sudah atau sedang belajar pada pendidikan Sekolah menengah Pertama	85.106	6.517.709.000	72.637	6.281.102.334	85%
4.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	671	1.500.453.000	671	1.482.307.625	100%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2020

2) Bidang Urusan Kesehatan

Pelaksanaan urusan kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.188
Realisasi Capaian SPM Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM (%)
			Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	19.526	47.875.800	19.513	44.352.141	99%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	19.526	1.432.872.300	19.473	521.083.236	99%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	19.548	301.801.300	19.372	159.229.540	99%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	93.524	2.815.585.200	90.512	2.453.350.613	97%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	151.320	124.165.250	100.263	114.232.030	66%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining	827.256	319.295.000	380.551	310.841.355	46%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM (%)
			Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	
		kesehatan sesuai standar					
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standard	176.156	56.588.150	120.996	52.457.215	69%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	108.911	81.501.000	76.363	79.821.000	70%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.005	13.501.000	12.704	13.501.000	98%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	3.464	96.913.800	3.372	90.371.600	97%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	12.923	2.563.167.000	5.656	2.446.871.152	44%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV Mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	22.502	2.563.167.000	20.702	2.446.871.152	92%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 12 (dua belas) indikator SPM Kesehatan belum dapat mencapai 100%. Indikator yang masih memerlukan perhatian karena capaian masih rendah adalah Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 46% dan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis tercapai 44%. Tidak tercapainya target SPM dikarenakan penduduk yang menjadi target penerima layanan merupakan penduduk yang rentan terpapar menyebarkan virus Covid-19.

3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri atas:

a) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten
b) Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.189
Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM (%)
			Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	348.510	3.006.975.000	301.109	2.985.274.768	86%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	343.209	643.148.000	298.215	608.787.250	87%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab. Kebumen, 2021

Target dan realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen belum mencapai 100%. Capaian Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 86% dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar 87%. Penyebab belum tercapainya SPM adalah kondisi geografis sebagian besar masyarakat di pedesaan dan banyaknya keluarga yang harus mendapatkan layanan.

4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota

Tabel 2.190
Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM (%)
			Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	9	270.000.000	9	270.000.000	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	NA	-	NA	-	NA

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa 2 (dua) target SPM bidang Perumahan Rakyat satu indikator telah mencapai 100% yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, dan capaian indikator pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten belum ada data (NA). Tidak adanya angka capaian SPM disebabkan karena tidak terdapat anggaran dan program pemerintah untuk merelokasi rumah penduduk dan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid 19.

5) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Tabel 2.191
Realisasi Capaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM (%)
			Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1	4.692.999.000	1	4.622.059.024	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	669.909	394.750.000	213.342	389.134.000	32%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	669.909	1.433.843.000	53.212	1.226.067.300	8%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	646	3.955.357.000	646	3.903.160.378	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	65	1.111.630.000	65	978.277.936	100%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab. Kebumen, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis layanan dasar Trantibumlinmas yang telah mencapai 100% sebanyak 3 jenis layanan yaitu Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sementara capaian SPM yang belum

tercapai yaitu Pelayanan informasi rawan bencana dengan capaian 32%, dan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 8%.

6) Bidang Sosial

Mendasari Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial sebagai berikut :

1. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
3. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
4. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
5. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial

Berdasarkan tabel realisasi capaian SPM Sosial Tahun 2020 jenis pelayanan dasar yang mencapai 100% yaitu Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten. Sementara empat indikator lainnya belum mencapai 100% yaitu Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial dengan capaian 19%, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial dengan capaian 32%, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial dengan capaian 53% dan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan capaian 30%.

Tabel 2.192
Realisasi Capaian SPM Sosial Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM (%)
			Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	
1.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase %) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	1.000	1.541.078.000	1.000	1.535.497.324	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3.171	298.590.000	618	294.518.237	19%
3.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.228	154.178.000	395	154.167.968	32%
4.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi	11.674	137.801.000	6.222	129.760.950	53%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM (%)
			Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	Jumlah Orang yang Akan Terlayani	APBD	
	luar panti sosial	kebutuhan dasarnya di luar panti					
5.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	443	376.148.000	131	370.361.642	30%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab. Kebumen, 2021

SPM yang merupakan hak konstitusional warga negara menekankan pendataan yang sifatnya sensus. Hal ini mempengaruhi daerah dalam menentukan target dan rencana keuangan dalam pelaksanaan SPM. Selain itu Regulasi penerapan SPM lahir setelah proses penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021 sehingga belum adanya sinkronisasi antara Dokumen Perencanaan RPJMD dengan rencana capaian SPM khususnya pada Dinas Sosial.

Secara keseluruhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

SPM Pendidikan dengan 3 (tiga) jenis layanan dasar dengan capaian mendekati 100% diprediksi tahun 2021 SPM Pendidikan dapat tercapai. SPM Bidang Kesehatan sebanyak 12 (dua belas) layanan sebanyak 7 (tujuh) layanan akan dapat terpenuhi sedangkan 5 (lima) layanan masih membutuhkan kerja keras untuk mencapainya. SPM Bidang Pekerjaan Umum terdapat 2 (dua) jenis layanan dan diprediksi layanan ini dapat tercapai di tahun 2021. SPM Bidang Perumahan rakyat sebanyak 2 (dua) jenis layanan terdapat 1 (satu) jenis layanan sudah terealiasi dan satu layanan belum tersedia data. SPM Bidang Trantibumlinmas sebanyak 5 (lima) jenis layanan terdapat 3 (tiga) jenis layanan sudah terealisasi dan 2 (dua) layanan masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya. SPM Bidang Sosial sebanyak 5 (lima) jenis layanan terdapat 1 (satu) jenis layanan sudah terealisasi dan 4 (empat) layanan masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Gambaran keuangan daerah Kabupaten Kebumen sebagai kebijakan fiskal daerah merupakan sinkronisasi dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran prioritas pembangunan. Keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bab ini akan dijelaskan kinerja keuangan masa lalu yang terdiri dari kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan PP APBD Tahun 2016-2020, neraca daerah sesuai dengan LKPD (*audited*) Tahun 2016-2020, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu daerah sesuai dengan PP APBD Tahun 2016-2020, dan kerangka pendanaan Tahun 2021 hingga Tahun 2026 dimana untuk Tahun 2021 menggunakan APBD Murni Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

Gambaran keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta analisis kinerja keuangan masa lalu maupun proyeksinya ke depan. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016-2020 terjadi perubahan regulasi. yakni dari PP 58/2005 dan turunannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya. sedangkan mulai tahun anggaran 2021 pengelolaan keuangan Daerah sudah PP 12/2019 dan turunannya, yaitu Permendagri 77/2019. Secara umum pada bab ini menjelaskan gambaran kinerja keuangan daerah Tahun 2016–2020 dan proyeksi keuangan daerah Tahun 2021–2026.

Sebagai salah satu pertimbangan untuk memproyeksikan target keuangan daerah ke depan, pada Bab III ini juga akan didahului dengan analisis kondisi perekonomian baik global, nasional maupun daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kebumen. Analisis akan membahas tantangan, peluang serta strategi dalam mewujudkan kondisi perekonomian yang diharapkan ke depan yang akan mempengaruhi kondisi keuangan ke depan.

3.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Pandemi Covid-19 memberikan syok pada perekonomian global pada Tahun 2020 dimana berdasarkan data Bank Dunia pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi sebesar -3,59%. Perekonomian dunia mengalami disrupsi karena pembatasan sosial hingga *lockdown* harus dilakukan setiap negara untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Pembatasan sosial dan *lockdown* menyebabkan konsumsi di masyarakat menurun, investasi tertunda sebagai antisipasi ketidakpastian, *output* industri menurun menyebabkan banyak industri yang mengurangi aktivitasnya bahkan tutup sehingga pemutusan hubungan kerja dan pengangguran meningkat dan pada akhirnya akan menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta meningkatkan angka kemiskinan.

Pembatasan sosial dan *lockdown* bahkan dilakukan beberapa kali sejak Covid-19 dinyatakan sebagai Pandemi Dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Tanggal 11 Maret 2020. Walaupun program vaksinasi sudah mulai dilakukan di hampir

seluruh negara pada Tahun 2021, perkembangan penyebaran virus Covid-19 masih terus terjadi terutama dengan munculnya berbagai varian yang memiliki tingkat penyebaran tinggi seperti varian Delta. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Worldometers hingga 23 Agustus 2021 menunjukkan kasus positif di seluruh dunia sebanyak 213.274.999 orang sedangkan kasus meninggal dunia sebanyak 4.453.113 jiwa.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan Juli Tahun 2021 memproyeksikan pemulihan pertumbuhan ekonomi global pada Tahun 2021 sebesar 6,1% dan pada Tahun 2022 sebesar 4,9%. Kemungkinan tercapainya target pertumbuhan ekonomi dunia ini akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengendalian penyebaran Covid-19 dengan ketaatan penerapan protokol kesehatan dan kesuksesan program vaksinasi. Dengan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi diharapkan rantai penyebaran Covid-19 dapat terputus dan kemungkinan munculnya varian baru dapat berhenti.

Hal yang relatif sama juga terjadi di perekonomian nasional. Untuk pertama kali sejak krisis moneter pada Tahun 1998, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yaitu sebesar -2,07%. Pada Tahun 2021 berdasarkan rilis BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkontraksi sebesar -0,74% pada triwulan I dan berhasil kembali ke zona positif pada triwulan II yaitu sebesar 7,07%. Akan tetapi kasus positif dan kematian akibat Covid-19 mengalami peningkatan signifikan sejak akhir Juni 2021 dikarenakan penyebaran varian Delta di tanah air. Menurut data yang dihimpun oleh Worldometers hingga 23 Agustus 2021 menunjukkan kasus positif di Indonesia mencapai 3.989.060 orang sedangkan kasus meninggal dunia sebanyak 127.214 jiwa.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun 2022, pemerintah pusat memproyeksikan pemulihan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 secara kumulatif sebesar 3,7%-4,5% sedangkan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 5,0%-5,5%. Pemulihan perekonomian nasional juga sangat dipengaruhi peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi. Selain pada sisi kebijakan fiskal, pada sisi kebijakan moneter juga dilakukan Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan untuk memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi.

3.2. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi dan situasi perekonomian daerah juga tidak berbeda dengan kondisi perekonomian nasional maupun global dikarenakan semakin terbukanya perekonomian dan disrupsi akibat Pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,65% sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen mengalami kontraksi sebesar -1,46% pada Tahun 2020. Sementara itu berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan sebesar 3,8%-4,8 % pada Tahun 2021 dan sebesar 3,93%-5,2% pada Tahun 2022. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah memproyeksikan sebesar 3,91% pada Tahun 2021 dan 4,05%-5,36% pada Tahun 2022 sebagai target kontribusi Kabupaten Kebumen terhadap target capaian makro Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data Tahun 2020 telah menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang buruk baik bagi perekonomian di daerah, nasional maupun global. Dampak pandemi inipun diperkirakan akan berlangsung lama sehingga

perlu proses pemulihan ekonomi selama beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, hal ini jelas sangat berdampak pada tantangan dan prospek perekonomian daerah ke depan. Dampak pandemi Covid-19 diperkirakan dapat berlangsung hingga beberapa tahun ke depan dengan merebaknya varian Covid-19 terbaru yaitu varian delta yang menyebabkan diberlakukannya PPKM Darurat sejak Tanggal 3 Juli 2021. Untuk itu diperlukan arah kebijakan ekonomi daerah yang memfokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang tangguh terhadap krisis yang kemungkinan berkelanjutan. Untuk itu, perekonomian Kabupaten Kebumen akan diarahkan dalam rangka pemulihan ekonomi dengan memfokuskan kepada penciptaan lapangan kerja untuk penurunan angka pengangguran, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan serta dengan prioritisasi dan optimalisasi sektor unggulan dan sektor pendukungnya yang tangguh terhadap berbagai ancaman disrupsi di kemudian hari. Penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upayaupaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk pangan yang kompetitif serta tangguh;
4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk pangan unggulan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal maupun non formal;
6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8. Peningkatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
9. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
10. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
11. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik melalui upaya padat karya dan penggunaan tenaga kerja lokal pada proyek infrastruktur; serta
12. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

3.3. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah masa lalu merupakan gambaran tentang realisasi kinerja keuangan daerah periode 2016-2020. Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan di masa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri dari realisasi pendapatan, belanja,

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan daerah pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2016-2021). Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen meliputi kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Kinerja Pendapatan Daerah merupakan capaian realisasi pendapatan diukur dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

NO	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi APBD				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Total Pendapatan Daerah	**2.606.209.824.034**	**2.713.113.397.677**	**2.639.814.864.398**	**2.818.494.983.541**	**2.763.229.307.230**
A.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**291.016.321.703**	**443.608.862.461**	**352.047.092.282**	**409.163.433.330**	**403.025.963.784**
1.	Pajak daerah	62.838.508.061	79.479.454.753	96.775.593.102	110.614.568.810	100.877.584.517
2.	Retribusi daerah	25.432.356.619	22.655.157.693	37.339.858.915	27.141.726.792	22.068.306.403
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.895.862.950	21.901.327.127	9.734.494.832	14.210.376.188	15.727.758.649
4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	195.849.594.073	319.572.922.888	208.197.145.433	257.196.761.540	264.352.314.215
B.	**Dana Perimbangan**	**1.779.771.732.786**	**1.712.419.381.173**	**1.654.135.303.906**	**1.688.387.155.843**	**1.624.225.405.094**
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	43.287.944.721	40.008.376.950	29.627.426.379	22.159.108.400	35.146.538.958
2.	Dana Alokasi Umum	1.256.068.249.000	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	1.279.681.428.000	1.197.504.293.000
3.	Dana Alokasi Khusus	480.415.539.065	438.407.835.223	390.504.708.527	386.546.619.443	391.574.573.136
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**535.421.769.545**	**557.085.154.043**	**633.632.468.210**	**720.944.394.368**	**735.977.938.352**
1.	Hibah	3.030.221.000	5.214.000.000	126.590.219.464	137.498.110.012	136.750.269.161
2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	110.771.445.545	129.121.770.243	133.143.854.746	143.529.063.756	130.966.524.602
4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	36.876.802.000	51.141.752.000	0	34.569.662.000	45.243.665.000
5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	102.341.755.000	11.868.380.000	23.874.757.000	9.936.200.000	17.991.610.589
6.	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	282.401.546.000	359.739.251.800	350.023.637.000	395.411.358.600	405.025.869.000

Sumber: PP APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas PAD capaian realisasi fluktuatif, tahun 2017 naik dibandingkan tahun 2016 dan turun di tahun 2018, kemudian naik di tahun 2019 dan kembali turun di tahun 2020. Kenaikan PAD di tahun 2017 dipengaruhi oleh kebijakan penganggaran BOS masuk pada APBD. Kenaikan PAD tahun 2019 dipengaruhi adanya penyesuaian tarif pajak daerah.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020
	Total Pendapatan Daerah	**-1,51%**	**2,85%**	**6,77%**	**-1,97%**	**1,53%**
A.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**2,16%**	**18,43%**	**16,25%**	**-1,50%**	**8,83%**
1.	Pajak daerah	26,48%	21,76%	14,30%	-8,80%	13,44%
2.	Retribusi daerah	-11,53%	65,09%	-27,31%	-18,69%	1,89%
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	217,60%	-55,55%	45,98%	10,68%	54,68%
4.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-11,46%	20,16%	23,58%	2,78%	8,77%
B.	**Dana Perimbangan**	**-3,78%**	**-3,40%**	**2,07%**	**-3,80%**	**-2,23%**
1.	Dana Bagi Hasil	-7,58%	-25,95%	-25,21%	58,61%	-0,03%
2.	Dana Alokasi Umum	-1,76%	-0,32%	4,04%	-6,42%	-1,12%
3.	Dana Alokasi Khusus	-8,74%	-10,93%	-1,01%	1,30%	-4,85%
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**4,05%**	**13,74%**	**13,78%**	**2,05%**	**8,40%**
1.	Hibah	72,07%	2327,89%	8,62%	-0,72%	601,96%
2.	Dana Darurat	16,57%				16,57%
3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota	38,68%	160,34%	7,80%	-8,75%	49,52%
4.	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	38,68%			30,88%	34,78%
5.	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	-88,40%	101,16%	-58,38%	81,07%	8,86%
6.	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	27,39%	-2,70%	12,97%	2,43%	10,02%

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 seperti terlihat pada Tabel 3.2. pertumbuhan PAD menunjukkan kinerja paling tinggi. PAD mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 11,63 %lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu sebesar 8,41%dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang justru turun sebesar -2,23%.

Tabel 3.3
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020	Rata-rata Proporsi Tahun 2016-2020	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi Tahun 2016-2020
1	PENDAPATAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11,17%	16,35%	13,34%	14,52%	14,59%	13,99%	9,33%
1.2	Pendapatan Perimbangan	68,29%	63,12%	62,66%	59,90%	58,78%	62,55%	-3,64%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20,54%	20,53%	24,00%	25,58%	26,63%	23,46%	6,88%

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Jika dilihat dari proporsi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3, Kabupaten Kebumen tergolong daerah dengan tingkat kemandirian yang rendah. Hal ini terlihat dari proporsi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen yang didominasi oleh Pendapatan Perimbangan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, proporsi Pendapatan Perimbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kebumen rata-rata mencapai 62,55%. Hal ini mengindikasikan sumber utama pendapatan daerah Kabupaten Kebumen berasal dari Pendapatan Perimbangan, sehingga pembangunan daerah Kabupaten Kebumen masih sangat tergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. Meskipun pendapatan daerah Kabupaten Kebumen sebagian besar berasal dari Pendapatan Perimbangan, nilainya terus mengalami penurunan. Proporsi Pendapatan Perimbangan rata-rata berkurang sebesar -3,64% selama kurun waktu tahun 2016-2020 diantaranya diakibatkan rasionalisasi pendapatan Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagai dampak Pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan proporsi PAD selama Tahun 2016-2020 justru menunjukkan kinerja yang baik yaitu tumbuh sebesar 9,33% yang menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Kebumen ke depan masih potensial untuk terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah.

3.3.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yang dimaksud terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Kinerja Belanja Daerah merupakan capaian realisasi belanjan diukur dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3.4
Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020
	Total Belanja Daerah	**2.707.059.847.131**	**2.630.271.307.685**	**2.652.047.980.376**	**2.809.549.444.627**	**2.737.861.916.080**
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**1.654.943.619.445**	**1.683.743.287.955**	**1.676.515.529.592**	**1.707.700.081.835**	**1.791.269.566.564**
1.	Belanja Pegawai	1.169.925.785.288	1.074.305.059.229	1.094.190.721.143	1.092.633.851.935	1.069.722.845.778
2.	Belanja Hibah	21.262.696.023	45.614.321.177	30.763.259.199	31.299.036.000	81.112.633.737
3.	Belanja Bantuan Sosial	39.154.052.260	45.284.336.762	45.356.182.000	20.742.420.000	30.833.250.000
4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	8.659.246.150	9.742.465.800	14.048.213.950	15.502.510.500	13.527.756.700
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	414.868.804.350	507.396.377.600	492.152.153.300	547.521.693.400	585.884.255.100
6.	Belanja Tidak Terduga	1.073.035.374	1.400.727.387	5.000.000	570.000	10.188.825.249
B.	**Belanja Langsung**	**1.052.116.227.686**	**946.528.019.730**	**975.532.450.784**	**1.101.849.362.792**	**946.592.349.516**
1.	Belanja Pegawai	47.386.274.339	60.185.422.856	61.887.511.251	94.148.451.471	99.973.754.872
2.	Belanja Barang dan Jasa	355.027.242.203	452.644.541.214	543.640.563.009	641.860.117.293	557.817.545.626
3.	Belanja Modal	649.702.711.144	433.698.055.660	370.004.376.524	365.840.794.028	288.801.049.018

Sumber: PP APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Berdasarkan realisasi belanja daerah selama Tahun 2016-2020 seperti pada Tabel 3.4 menunjukkan secara nominal realisasi belanja fluktuatif mengikuti kemampuan keuangan daerah pada tahun berkenaan. Realisasi belanja tidak langsung cenderung meningkat kecuali pada tahun 2018 yang lebih kecil dibandingkan tahun 2017. Penurunan pada Tahun 2018 tersebut dikarenakan adanya penurunan belanja hibah dan belanja bantuan keuangan dari provinsi. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung cenderung menurun dari Rp.1.169.925.785.288,- pada Tahun 2016 menjadi Rp.1.069.722.845.778,- pada Tahun 2020. Penurunan belanja gaji ini dikarenakan semakin banyaknya PNS yang memasuki purna tugas tidak sebanding jumlah CPNS yang diterima. Sementara belanja hibah menunjukkan peningkatan signifikan pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.81.112.633.737,- dari tahun sebelumnya sebesar Rp.31.299.036.000. Secara umum komponen belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan provinsi cenderung fluktuatif selama tahun 2016-2020. Sedangkan realisasi belanja tidak terduga cenderung fluktuatif berdasarkan realisasi penggunaannya untuk pembiayaan dalam hal kedaruratan serta dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan drastis untuk penanganan

Pandemi Covid-19.

Sementara itu realisasi belanja langsung juga fluktuatif akan tetapi belanja pegawai dan belanja barang jasa semakin meningkat. Sedangkan kinerja belanja modal selama Tahun 2016-2020 terus menurun dikarenakan semakin menurunnya pendanaan infrastruktur dari DAK maupun bantuan keuangan dari provinsi yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendanaan infrastruktur yang sebagian besar berbentuk belanja modal.

Tabel 3.5
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Total Belanja Daerah	**-2,84%**	**0,83%**	**5,94%**	**-2,55%**	**0,35%**
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**1,74%**	**-0,43%**	**1,86%**	**4,89%**	**2,02%**
1.	Belanja Pegawai	-8,17%	1,85%	-0,14%	-2,10%	-2,14%
2.	Belanja Hibah	114,53%	-32,56%	1,74%	159,15%	60,72%
3.	Belanja Bantuan Sosial	15,66%	0,16%	-54,27%	48,65%	2,55%
4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	12,51%	44,20%	10,35%	-12,74%	13,58%
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	22,30%	-3,00%	11,25%	7,01%	9,39%
6.	Belanja Tidak Terduga	30,54%	-99,64%	-88,60%	1.787.413,20%	446.813,87%
B.	**Belanja Langsung**	**-10,04%**	**3,06%**	**12,95%**	**-14,09%**	**-2,03%**
1.	Belanja Pegawai	27,01%	2,83%	52,13%	6,19%	22,04%
2.	Belanja Barang dan Jasa	27,50%	20,10%	18,07%	-13,09%	13,14%
3.	Belanja Modal	-33,25%	-14,69%	-1,13%	-21,06%	-17,53%

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama Tahun 2016-2020 seperti pada Tabel 3.5 menunjukkan belanja daerah fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan cenderung naik sebesar 0,35%. Sementara itu, pertumbuhan belanja tidak langsung cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,02%. Belanja pegawai menunjukkan kienrja yang cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,14%.

Sementara komponen belanja langsung lainnya yaitu belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan positif. Belanja tidak terduga mengalami rata-rata pertumbuhan yang meningkat drastis dikarenakan adanya peningkatan drastis pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 yang digunakan untuk mengatasi Pandemi Covid-19.

Belanja langsung cenderung menurun selama periode 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,03% lebih dikarenakan kecenderungan penurunan belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -17,53%. Sementara itu, belanja pegawai dan belanja barang jasa selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan yang juga positif.

Tabel 3.6
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020	Rata-rata Proporsi Tahun 2016-2020	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi Tahun 2016-2020
	Total Belanja Daerah	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**61,13%**	**64,01%**	**63,22%**	**60,78%**	**65,43%**	**62,91%**	**1,81%**
1.	Belanja Pegawai	43,22%	40,84%	41,26%	38,89%	39,07%	40,66%	-2,44%
2.	Belanja Hibah	0,79%	1,73%	1,16%	1,11%	2,96%	1,55%	62,41%
3.	Belanja Bantuan Sosial	1,45%	1,72%	1,71%	0,74%	1,13%	1,35%	3,52%
4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,32%	0,37%	0,53%	0,55%	0,49%	0,45%	13,13%
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	15,33%	19,29%	18,56%	19,49%	21,40%	18,81%	9,22%
6.	Belanja Tidak Terduga	0,04%	0,05%	0,00019%	0,00002%	0,37%	0,09%	458.515,62%
B.	**Belanja Langsung**	**38,87%**	**35,99%**	**36,78%**	**39,22%**	**34,57%**	**37,09%**	**-2,60%**
1.	Belanja Pegawai	1,75%	2,29%	2,33%	3,35%	3,65%	2,67%	21,32%
2.	Belanja Barang dan Jasa	13,11%	17,21%	20,50%	22,85%	20,37%	18,81%	12,74%
3.	Belanja Modal	24,00%	16,49%	13,95%	13,02%	10,55%	15,60%	-18,09%

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Proporsi belanja daerah mengukur besarnya kontribusi masing-masing belanja terhadap total belanja daerah pada tahun yang sama. Jika melihat berdasarkan rata-rata proporsi Belanja Daerah selama Tahun 2016-2020 seperti tercantum pada Tabel 3.6. menunjukkan proporsi belanja tidak langsung masih lebih besar dibandingkan belanja langsung. Rata-rata proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah adalah sebesar 62,91% dan proprosinya juga cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan proporsinya sebesar 1,81%. Komponen belanja tidak langsung dengan proporsi terbesar adalah belanja pegawai dengan proporsi terhadap total belanja sebesar 40,66% akan tetapi proporsinya cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan proporsinya sebesar -2,44%. Untuk komponen belanja lainnya yaitu belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga menunjukkan rata-rata pertumbuhan proporsi yang semakin meningkat. Belanja tidak terduga mengalami rata-rata pertumbuhan proporsi yang meningkat drastis dikarenakan adanya peningkatan drastis pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 yang digunakan untuk mengatasi Pandemi Covid-19.

Untuk proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan proporsi sebesar -2,60%. Hal ini lebih dikarenakan semakin menurunnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah dengan rata-rata pertumbuhan proporsinya sebesar -18,09%. Untuk itu ke depan perlu dilakukan peningkatan belanja modal yang dianggap memiliki efek multiplier yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Sedangkan proporsi belanja pegawai pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan proporsi yang masih positif.

3.3.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang secara lengkap tercantum pada Tabel 3.7. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Tabel 3.8. berikutnya.

Tabel 3.7
Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**162.412.405.000,00**	**162.392.405.488,94**	**225.675.495.480,00**	**203.192.379.502,50**	**204.132.918.416,18**
3.1.1.	Penggunaan SiLPA	160.912.405.000,00	160.912.405.489	224.135.495.480	201.692.379.503	202.667.918.416
3.1.2.	Penerimaan Kembali Piutang	1.500.000.000,00	1.480.000.000	1.540.000.000	1.500.000.000	1.465.000.000
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**21.099.000.000,00**	**21.099.000.000,00**	**11.750.000.000,00**	**9.470.000.000,00**	**9.550.000.000,00**
3.2.1.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	19.599.000.000,00	19.599.000.000	10.250.000.000	7.970.000.000	8.050.000.000
3.2.2.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Pembiayaan Netto (3.1. – 3.2.)	**141.313.405.000,00**	**141.293.405.488,94**	**213.925.495.480,00**	**193.722.379.502,50**	**194.582.918.416,18**

Sumber: PP APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tabel 3.8
Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019- 2020	Rata-Rata
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**-0,01**	**38,97**	**-9,96**	**0,46**	**7,36**
3.1.1.	Penggunaan SiLPA	0,00	39,29	-10,01	0,48	7,44
3.1.2.	Penerimaan Kembali Piutang	-1,33	4,05	-2,60	-2,33	-0,55
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**-44,31**	**-19,40**	**0,84**	**-15,72**
3.2.1.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	-47,70	-22,24	1,00	-17,24
3.2.2.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto (3.1. – 3.2.)	**-0,01**	**51,41**	**-9,44**	**0,44**	**10,60**

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

1) Kinerja Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah selama Tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung naik utamanya dipengaruhi oleh SiLPA. Penerimaan Pembiayaan terbesar terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.225.675.495.480,- akibat SiLPA Tahun 2018 yang juga terbesar yaitu sebesar Rp.224.135.495.480,-. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan sebesar 7,36% sedangkan rata-rata pertumbuhan SiLPA yaitu sebesar 7,44%. Penerimaan Pembiayaan Daerah lainnya berasal dari penerimaan kembali piutang yang berasal dari Pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan yang dialokasikan setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan pengembalian -0,55%.

2) Kinerja Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2016 s/d 2020 direalisasikan untuk penyertaan modal daerah dan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan. Penyertaan modal merupakan penempatan dana daerah untuk investasi pada BUMD yang direalisasikan sesuai Perda tentang Penyertaan Modal, dengan rata-rata pertumbuhan -17,24%. Sedangkan Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan yang dialokasikan setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan 0% karena investasinya sama setiap tahun.

3.3.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

3.3.2.1. Perkembangan Neraca Daerah

Perkembangan Neraca Daerah Tahun 2016-2020 menggambarkan posisi kekayaan daerah berupa aset, kewajiban dan ekuitas pada tahun tersebut, seperti tercantum dalam tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	**ASET**					
1.1	**ASET LANCAR**	**213.922.651.095,84**	**304.056.718.154,88**	**296.960.356.916,30**	**298.354.393.076,63**	**319.990.472.248,96**
1.1.1	Kas	161.848.532.938,94	223.121.658.575,60	202.091.148.192,50	202.798.793.055,18	219.984.624.515,98
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
1.1.3	Piutang	20.914.529.385,00	36.802.226.975,00	38.265.165.588,00	24.932.358.986,00	68.296.171.915,00
1.1.4	Piutang Lain-lain	21.528.639.215,12	25.401.693.103,00	36.111.786.775,20	42.118.746.399,00	0,00
1.1.5	Persediaan	21.501.881.946,08	31.636.545.270,18	35.024.950.533,60	35.653.398.103,45	39.833.217.851,73
1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	-	66.936.388,00	91.565.399,00	72.036.588,00	65.598.889,00
1.1.7	Penyisihan Piutang	-11.870.932.389,30	-12.972.342.156,90	-14.624.259.572,00	-7.220.940.055,00	-8.189.140.922,75
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**92.013.406.088,00**	**113.533.920.633,54**	**126.335.036.385,72**	**138.846.162.484,71**	**150.432.666.979,57**
1.2.1	Investasi Non Permanen	111.608.000,00	131.608.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.2.2	Investasi Permanen	91.901.798.088,00	113.402.312.633,54	126.335.036.385,72	138.846.162.484,71	150.397.666.979,57
1.3	**ASET TETAP**	**3.708.978.732.467,10**	**3.794.078.229.589,10**	**3.844.748.357.518,27**	**3.928.360.648.411,66**	**3.931.529.890.869,50**
1.3.1	Tanah	794.498.833.026,29	794.000.205.255,90	740.069.826.489,55	777.250.679.277,55	777.646.197.820,55
1.3.2	Peralatan dan Mesin	601.232.586.558,00	602.997.235.774,00	659.408.299.708,00	765.195.323.365,00	870.303.689.719,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.506.638.846.118,00	1.351.882.484.939,00	1.420.934.740.781,00	1.490.101.861.928,00	1.519.382.588.544,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.725.937.141.232,07	2.100.211.798.233,20	2.300.264.078.380,25	2.430.068.733.183,25	2.559.955.132.444,25
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	101.622.272.261,00	115.377.715.000,00	120.843.823.216,00	133.561.451.585,00	132.900.631.859,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	3.566.340.900,00	556.338.000,00	0,00	12276936657
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.020.950.946.728,26	-1.173.957.550.513,00	-1.397.328.749.056,53	-1.667.817.400.927,14	-1.940.935.286.174,30
1.4	**ASET LAINNYA**	**75.429.121.096,90**	**198.233.686.880,50**	**280.644.532.092,80**	**116.762.634.581,00**	**123.785.142.584,00**
1.4.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Daerah					
1.4.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	18.307.584.000,00	18.307.584.000,00	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00
1.4.4	Aset Tidak Berwujud	6.288.096.773,25	7.864.935.621,25	6.886.664.535,80	8.741.274.141,00	2.243.798.380,00
1.4.5	Aset Lain-lain	50.833.440.323,65	172.061.167.259,25	257.623.304.869,00	91.886.797.752,00	105.406.781.516,00
	JUMLAH ASET DAERAH	**4.090.343.910.747,84**	**4.409.902.555.258,02**	**4.548.688.282.913,09**	**4.482.323.838.554,00**	**4.525.738.172.682,03**
2	**KEWAJIBAN**	**11.088.304.990,00**	**15.408.491.439,00**	**19.470.388.884,17**	**28.013.032.839,83**	**41.790.047.964,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**11.088.304.990,00**	**15.408.491.439,00**	**19.470.388.884,17**	**28.013.032.839,83**	**41.790.047.964,00**
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	132.725.711,00	1.992.992,00	398.768.690,00	130.874.639,00	34.314.950,00
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-		
2.1.3	Utang Pajak	-	-			
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	751.179.015,00	906.264.119,00	857.079.886,17	981.745.192,83	1.248.346.951,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.521.027.295,00	9.090.040.359,00	12.402.338.594,00	13.310.369.182,00	0,00
2.1.7	Utang Beban	3.683.372.969,00	5.410.193.969,00	5.812.201.714,00	13.590.043.826,00	40.507.386.063,00
3	**EKUITAS**	**4.079.255.605.757,84**	**4.394.494.063.819,02**	**4.529.217.894.028,92**	**4.454.310.805.714,17**	**4.483.948.124.718,03**
3.1	Ekuitas	4.079.255.605.757,84	4.394.494.063.819,02	4.529.217.894.028,92	4.454.310.805.714,17	4.483.948.124.718,03
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**4.090.343.910.747,84**	**4.409.902.555.258,02**	**4.548.688.282.913,09**	**4.482.323.838.554,00**	**4.525.738.172.682,03**

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen (LKPD Audited 2016-2020)

Berdasarkan data pada tabel 3.9 di atas menunjukkan perkembangan aset lancar nampak fluktuatif, dimana tahun 2017 naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2016, yang disebabkan adanya kenaikan saldo piutang dan persediaan pada tahun 2017. Di tahun 2018 aset lancar mengalami penurunan dan naik tidak signifikan di Tahun 2019. Dan di tahun 2020 aset lancar kembali meningkat seiring tingginya saldo Kas sebesar Rp.219.984.624.515,98. Perkembangan aset lancar ini menunjukkan likuiditas keuangan daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah daerah. Berdasarkan data aset lancar tersebut masih terdapat pencatatan piutang dimana ke depan penarikan/pencairan piutang bisa terus ditingkatkan untuk dapat digunakan dalam pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu data neraca daerah menunjukkan tidak adanya pencatatan investasi jangka panjang non permanen pada Tahun 2018 dan 2019, sedangkan di tahun 2020 inventasi jangka panjang non permanen hanya tercatat sebesar Rp35.000.000,00. Sedangkan investasi jangka panjang permanen yang merupakan nilai penyertaan modal pada BUMD selama tahun 2016-2020 nampak fluktuatif dimana hal ini dipengaruhi nilai ekuitas BUMD. Sementara itu, Aset Tetap setiap tahun mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan,. Aset tetap tanah mengalami penurunan pada Tahun 2017 dan 2018, di mana pencatatan aset tanah dilakukan koreksi penyajian karena dobel catat pada obyek Tanah Jalan Kabupaten.

Dari sisi kewajiban khususnya Utang Perhitungan Fihak Ketiga menunjukkan menunjukkan pertumbuhan negatif, kecuali pada tahun 2017-2018 meningkat tajam yang disebabkan keterlambatan penyetoran pajak atas Dana BOS yang cukup besar di Tahun 2018. Kewajiban daerah didominasi oleh utang beban yang setiap tahun meningkat dan puncaknya di tahun 2020 mencapai sebesar Rp40.507.386.063,00 disebabkan reklasifikasi utang BLUD ke Utang Beban, di mana pada tahun-tahun sebelumnya disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Sementara itu ekuitas selama Tahun 2016-2020 sempat mengalami penurunan di Tahun 2019, hal tersebut dampak dari proses P3D (Pelimpahan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen) ke Pemerintah Provinsi yang baru terselesaikan di tahun 2019.

Tabel 3.10
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016-2017 (%)	2017-2018 (%)	2018-2019 (%)	2019-2020 (%)	Rata Rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**					
1.1	**ASET LANCAR**	**42,13**	**(2,33)**	**0,47**	**7,25**	**11,88**
1.1.1	Kas	37,86	(9,43)	0,35	8,47	9,31
1.1.2	Investasi Jangka Pendek					
1.1.3	Piutang Pendapatan	75,96	3,98	(34,84)	173,93	54,76
1.1.4	Piutang Lainnya	17,99	42,16	16,63	(100,00)	(5,80)
1.1.5	Persediaan	47,13	10,71	1,79	11,72	17,84
1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	100,00	36,79	(21,33)	(8,94)	26,63
1.1.7	Penyisihan Piutang	9,28	12,73	(50,62)	13,41	(3,80)
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**23,39**	**11,28**	**9,90**	**8,34**	**13,23**
1.2.1	Investasi Non Permanen	17,92	(100,00)	0,00	100,00	4,48
1.2.2	Investasi Permanen	23,40	11,40	9,90	8,32	13,26
1.3	**ASET TETAP**	**2,29**	**1,34**	**2,17**	**0,08**	**1,47**

No	Uraian	2016-2017 (%)	2017-2018 (%)	2018-2019 (%)	2019-2020 (%)	Rata Rata Pertumbuhan (%)
1.3.1	Tanah	(0,06)	(6,79)	5,02	0,05	(0,45)
1.3.2	Peralatan dan Mesin	0,29	9,36	16,04	13,74	9,86
1.3.3	Gedung dan Bangunan	(10,27)	5,11	4,87	1,97	0,42
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	21,69	9,53	5,64	5,34	10,55
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	13,54	4,74	10,52	(0,49)	7,08
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	100,00	(84,40)	(100,00)	100,00	3,90
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	14,99	19,03	19,36	16,38	17,44
1.4	**ASET LAINNYA**	**162,81**	**41,57**	**(58,39)**	**6,01**	**38,00**
1.4.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-
1.4.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	(11,87)	0,00	0,00	(2,97)
1.4.4	Aset Tidak Berwujud	25,08	(12,44)	26,93	(74,33)	(8,69)
1.4.5	Aset Lain-lain	238,48	49,73	(64,33)	14,71	59,65
	JUMLAH ASET DAERAH	**7,81**	**3,15**	**(1,46)**	**0,97**	**2,62**
2	**KEWAJIBAN**	**38,96**	**26,36**	**43,88**	**49,18**	**39,59**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**38,96**	**26,36**	**43,88**	**49,18**	**39,59**
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	(98,50)	19.908,54	(67,18)	(73,78)	4.917,27
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Utang Pajak	-	-	-	-	-
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	20,65	(5,43)	14,55	27,16	14,23
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	39,40	36,44	7,32	(100,00)	(4,21)
2.1.7	Utang Beban	46,88	7,43	133,82	198,07	96,55
3	**EKUITAS**	**7,73**	**3,07**	**(1,65)**	**0,67**	**2,45**
	Ekuitas	7,73	3,07	(1,65)	0,67	2,45
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,81	3,15	(1,46)	0,97	**2,62**

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Untuk melihat fluktuasi pergerakan pertumbuhan neraca daerah tahun 2016-2020 tersaji pada tabel 3.10 yang menunjukkan aset lancar hampir selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2018 dbandingkan tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan cenderung naik sebesar 11,88%. Fluktuasi aset lancar ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kas yang hampir selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2018 dbandingkan tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan cenderung naik sebesar 9,31%. Sedangkan untuk investasi jangka panjang cenderung terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,23% yang sangat dipengaruhi oleh investasi permanen yang terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,26%.

Aset tetap juga menunjukkan kinerja terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,47% utamanya dikarenakan terus meningkatnya aset tetap dalam bentuk Jalan, Jaringan dan Instalasi yang terus meningkat dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 10,55% dan dalam bentuk gedung dan bangunan walaupun sempat menurun pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 akan tetapi rata-rata pertumbuhan cenderung meningkat sebesar 0,42%. Di sisi lain, akumulasi penyusutan aset tetap juga terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,44% akan tetapi secara umum penambahan aset tetap lainnya masih lebih besar dibandingkan penyusutannya sehingga aset tetap tetap meningkat.

Sementara itu untuk aset lainnya cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,00% sangat dipengaruhi oleh aset lain-lain yang juga cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 59,65%. Dengan semakin meningkatnya kinerja aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya maka secara umum jumlah aset daerah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,62%.

Sedangkan untuk pencatatan kewajiban hanya terdapat kewajiban jangka pendek yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 39,59%. Sementara untuk kinerja ekuitas sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 akan tetapi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,45% menunjukkan ekuitas secara umum cenderung naik. Dengan semakin meningkatnya kewajiban maupun ekuitas maka jumlah kewajiban dan ekuitas cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,62%.

3.3.2.2. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio *quick*.

a) Rasio Lancar

Rasio Lancar adalah perhitungan rasio likuiditas dengan membagi total aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Rasio Lancar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Aktiva Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
1	2016	213.922.651.095,84	11.088.304.990,00	19,29
2	2017	304.056.718.154,88	15.408.491.439,00	19,73
3	2018	296.960.356.916,30	19.470.388.884,17	15,25
4	2019	298.354.393.076,63	28.013.032.839,83	10,65
5	2020	319.990.472.248,96	41.790.047.964,00	7,66
Rata-rata				**14,52**

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data LKPD audited

Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio lancar kondisinya meningkat dari Tahun 2016 sampai 2017, namun menurun sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2020. Dengan menurunnya rasio lancar menunjukkan menurunnya kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seiring dengan peningkatan utang jangka pendek selama tahun 2016-2020.

b) Rasio *Quick*

Rasio *Quick* adalah rasio likuiditas dengan membagi total aktiva lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Rasio Quick Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12
Rasio *Quick* Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Aktiva Lancar – Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
1	2016	192.420.769.149,76	11.088.304.990,00	17,35
2	2017	272.420.172.884,70	15.408.491.439,00	17,68
3	2018	261.935.406.382,70	19.470.388.884,17	13,45
4	2019	262.700.994.973,18	28.013.032.839,83	9,38
5	2020	280.157.254.397,23	41.790.047.964,00	6,70
Rata-rata				**12,91**

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data LKPD audited

Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio *quick* kondisinya sempat meningkat pada Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 akan tetapi terus menurun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Kebumen masih memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kewajiban jangka pendek karena angka rasio masih menunjukkan angka positif.

3.3.2.3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal.

a) Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya. Rumusnya adalah total hutang dibagi total aset. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset disajikan dalam tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13
Rasio Total Hutang terhadap Aset Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Hutang	Total Aset	Rasio (%)
1	2016	11.088.304.990,00	4.090.343.910.747,84	0,27
2	2017	15.408.491.439,00	4.409.902.555.258,02	0,35
3	2018	19.470.388.884,17	4.548.688.282.913,09	0,43
4	2019	28.013.032.839,83	4.482.323.838.554,00	0,62
5	2020	41.790.047.964,00	4.525.738.172.682,03	0,92
Rata-rata				**0,52**

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data LKPD audited

Rasio total hutang terhadap total aset Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2016-2020 terus meningkat dari 0,27 persen di tahun 2016 menjadi 0,92 persen pada tahun 2020. Walaupun cenderung terus meningkat, masih rendahnya rasio dengan angka di bawah 1 persen menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen masih cukup kuat untuk membayar jika melakukan pinjaman ke kreditur dengan kemampuan pembayaran yang meningkat.

b) Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal mengukur seberapa jauh aset Pemerintah Kabupaten Kebumen dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri. Rumusnya adalah total hutang dibagi total modal. Rasio ini menunjukkan tingkat dana yang diambil dari luar

Pemerintah Kabupaten Kebumen. Rasio Hutang terhadap Modal disajikan dalam tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Hutang	Total Ekuitas	Rasio (%)
1	2016	11.088.304.990,00	4.079.255.605.757,84	0,27
2	2017	15.408.491.439,00	4.394.494.063.819,02	0,35
3	2018	19.470.388.884,17	4.529.217.894.028,92	0,43
4	2019	28.013.032.839,83	4.454.310.805.714,17	0,63
5	2020	41.790.047.964,00	4.483.948.124.718,03	0,93
Rata-rata				**0,52**

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data LKPD audited

Rasio hutang terhadap modal Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016- 2020, dari sebesar 0,27 persen di tahun 2016 menjadi 0,93 persen di tahun 2020. Rasio hutang terhadap modal pada periode tahun 2016-2020 masih di bawah 100 persen yang berarti modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen masih lebih besar daripada hutang yang harus ditanggung.

3.3.2.4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Jenis rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

a) Rata-rata Umur Piutang

Rata-rata umur piutang digunakan untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Rumusnya adalah 365 dibagi dengan perputaran piutang. Perputaran piutang didapat dari pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Rata-rata piutang pendapatan daerah dihitung dari penjumlahan saldo awal piutang dan saldo akhir piutang dibagi dua. Rata-rata umur piutang Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15
Rata-rata Umur Piutang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Saldo Awal Piutang	Saldo Akhir Piutang	Pendapatan Daerah	Perputaran Piutang	Rata-rata Umur Piutang
1	2016	12.787.447.606,00	20.914.529.385,00	2.606.209.824.034,00	154,66	2,36
2	2017	20.914.529.385,00	36.802.226.975,00	2.713.113.397.677,00	94,01	3,88
3	2018	36.802.226.975,00	38.265.165.588,00	2.639.814.864.397,90	70,33	5,19
4	2019	38.265.165.588,00	24.932.358.986,00	2.818.494.983.540,68	89,20	4,09
5	2020	24.932.358.986,00	68.296.171.915,00	2.763.229.307.229,80	59,28	6,16
Rata-rata						**3,86**

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data LKPD audited

Dari Tabel 3.15 menunjukkan perputaran piutang pada Tahun 2020 menurun dibandingkan Tahun 2019 menunjukkan piutang yang dapat ditagih oleh Pemerintah Daerah makin menurun sehingga piutang yang tidak tertagih akan meningkat dan mengurangi kelancaran arus kas. Sedangkan berdasarkan rata-rata umur piutang juga naik di Tahun 2020 menunjukkan pencairan piutang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan Tahun 2019.

b) Rata-rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan digunakan untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Rumusnya adalah 365 dibagi dengan perputaran persediaan. Perputaran persediaan didapat dari nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata nilai persediaan. Rata-rata nilai persediaan dihitung dari penjumlahan saldo awal persediaan dan saldo akhir persediaan dibagi dua. Rata-rata Umur Persediaan disajikan dalam tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16
Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Saldo Awal Persediaan	Saldo Akhir Persediaan	Nilai Persediaan	Perputaran Persediaan	Rata-rata Umur Persediaan
1	2016	97.667.208.499,57	21.501.881.946,08	21.501.881.946,08	0,36	1.011,46
2	2017	21.501.881.946,08	31.636.545.270,18	31.636.545.270,18	1,19	306,54
3	2018	31.636.545.270,18	35.024.950.533,60	35.024.950.533,60	1,05	347,34
4	2019	35.024.950.533,60	35.653.398.103,45	35.653.398.103,45	1,01	361,78
5	2020	35.653.398.103,45	39.833.217.851,73	39.833.217.851,73	1,06	345,85
					Rata-rata	**272,30**

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data LKPD audited

Berdasarkan Tabel 3.16 menunjukkan perputaran persediaan meningkat pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 yang berarti persediaan dalam bentuk peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah meningkat nilai pemanfaatannya. Rata-rata umur persediaan yang menurun di tahun 2020 menunjukkan umur peralatan dan perlengkapan tersebut semakin optimal dimanfaatkan atau digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2016-2020 mengacu kepada kebijakan umum APBD yang disusun per Tahun Anggaran sesuai kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk pendanaan daerah. Kebijakan ini bermuatan tentang proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Kebijakan ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proporsi penggunaan anggaran dilakukan analisis terhadap proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, dan Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

3.4.1.1. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Proporsi penggunaan anggaran Tahun 2016-2020 dibedakan menjadi 2 (dua) pos belanja Daerah yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020	Rata-rata Proporsi Tahun 2016-2020
1	Belanja Tidak Langsung	61,13%	64,01%	63,22%	60,78%	65,43%	62,91%
2	Belanja Langsung	38,87%	35,99%	36,78%	39,22%	34,57%	37,09%
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PP APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 (data diolah)

Berdasarkan data tabel di atas, Belanja daerah didominasi oleh Belanja Tidak langsung dengan rata-rata 62,91% per tahun. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk mendanai Belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan keuangan dan Belanja Tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk mendanai Belanja pegawai, belanja Barang dan jasa dan belanja Modal, dengan rata-rata 37,09% per tahun.

3.4.1.2. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Berdasarkan total nominal belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 seperti pada Tabel 3.18 cukup fluktuatif dengan mengalami penurunan pada Tahun 2016-2018 kemudian sempat mengalami kenaikan pada Tahun 2019 dan menurun kembali di Tahun 2020. Secara rinci Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	843.364.620.192	757.528.982.418	739.369.742.590	750.002.656.516	980.692.202.618
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	318.590.442.778	304.615.353.767	334.632.341.322	320.200.014.934	70.978.554.505
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.368.400.000	8.136.550.000	14.651.000.000	16.942.960.000	17.483.700.000
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.889.762.443	3.451.314.209	4.408.727.932	4.849.915.600	530.796.717
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	712.559.875	572.858.835	1.128.909.299	638.304.885	37.591.938
6	Honorarium PNS	20.253.057.150	18.603.526.750	17.368.561.600	19.350.749.498	12.094.026.450
7	Honorarium Non PNS	15.290.602.000	12.736.166.800	7.991.059.200	32.685.600.167	34.780.956.527
8	Uang Lembur	4.772.369.836	5.031.715.300	5.512.211.926	5.425.585.403	3.567.742.814
9	Belanja Pegawai Dana BOS	-	14.737.081.971	16.186.909.935	15.619.803.199	24.471.297.371
10	Belanja Pegawai BLUD	7.070.245.353	9.090.687.035	14.828.768.590	21.066.713.204	25.059.731.710
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	679.545.710	514.663.265	358.724.250	682.236.650	452.284.800
12	Belanja Pakaian Kerja	574.776.350	646.191.000	1.025.718.751	1.247.022.000	1.014.863.400
13	Belanja Pakaian khusus dan hari hari tertentu	303.601.300	427.976.000	408.742.500	510.998.000	234.407.500
14	Belanja Perjalanan Dinas	35.082.545.739	37.546.732.878	43.253.158.201	47.099.396.526	25.802.705.996
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	512.100.000	34.650.000	20.460.000	35.500.000	20.500.000
16	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.011.593.000	2.318.636.259	5.069.137.332	8.263.096.363	2.292.755.854
17	Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	649.702.711.144	433.698.055.660	370.004.376.524	365.833.554.028	188.095.520.000
	Total Belanja	**1.907.178.932.870**	**1.609.691.142.147**	**1.576.218.549.952**	**1.610.454.106.973**	**1.387.609.638.200**

Sumber: PP APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur selama tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.19
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2016	1.907.178.932.870	2.707.059.847.131	70,45%
2	2017	1.609.691.142.147	2.630.271.307.685	61,20%
3	2018	1.576.218.549.952	2.652.047.980.376	59,43%
4	2019	1.610.454.106.973	2.809.549.444.627	57,32%
5	2020	1.387.609.638.200	2.737.732.727.980	50,68%

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Namun demikian, berdasarkan Tabel 3.19 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kebumen terhadap total pengeluaran yaitu total belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan laju pertumbuhan yang terus menurun. Walaupun secara persentase masih cukup tinggi yaitu masih di atas angka 50% akan tetapi penurunan proporsi yang cukup signifikan setiap tahunnya menunjukkan semakin efisiennya belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Ke depan efisiensi belanja ini masih harus terus dilakukan namun dengan tetap terus meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai, mengoptimalkan kapasitas dan profesionalisme pegawai serta memberlakukan sistem *reward* yang adil dan terukur berdasarkan kinerja pegawai.

Perlu diketahui mulai Tahun 2020 untuk tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru yang bersumber dana dari DAK Non Fisik masuk pada rekening belanja gaji dan tunjangan berpindah dari tahun-tahun sebelumnya yang masuk pada rekening belanja tambahan penghasilan PNS. Sementara itu, penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2020 adalah perjalanan dinas akibat Pandemi Covid-19 yang membatasi perjalanan dinas. Selain itu juga belanja modal dalam bentuk pembangunan gedung kantor, pengadaan mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan yang banyak mengalami rasionalisasi akibat menurunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2020.

3.4.1.3. Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Secara rinci belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat disajikan dalam tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020	Rata-rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
A	**Belanja Tidak Langsung**	**856.392.266.342,00**	**775.408.927.868,00**	**768.068.956.540,00**	**1.042.983.557.865,00**	**1.011.703.659.318,00**	**5,60**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	843.364.620.192,00	757.529.912.068,00	739.369.742.590,00	1.010.538.087.365,00	980.692.202.618,00	5,29
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.368.400.000,00	8.136.550.000,00	14.651.000.000,00	16.942.960.000,00	17.483.700.000,00	46,29
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja bagi Hasil	8.659.246.150,00	9.742.465.800,00	14.048.213.950,00	15.502.510.500,00	13.527.756.700,00	13,58
B	**Pembiayaan Pengeluaran**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (A+B)	**856.392.266.342,00**	**775.408.927.868,00**	**768.068.956.540,00**	**1.042.983.557.865,00**	**1.011.703.659.318,00**	

Sumber: PP APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2016-2020 fluktuatif, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembayaran gaji pegawai. Belanja penerimaan Anggota dan pimpingan DPRD serta Operasional KDH/WKDH meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 46,29%. Sedangkan Belanja Bagi hasil naik sejak 2016 -2019, dan turun di tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan 13,58%.

3.4.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan sisa belanja dana alokasi khusus. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis pembiayaan daerah dilakukan terhadap:

3.4.2.1. Analisis Sumber Penutup Defisit

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.21
Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.606.209.824.034,00	2.713.113.397.677,00	2.639.814.864.397,90	2.818.494.983.540,68	2.763.229.307.229,80
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.707.059.847.131,00	2.630.271.307.685,34	2.652.047.980.376,00	2.809.549.444.627,00	2.737.861.916.080,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.900.000.000,00	21.099.000.000,00	11.750.000.000,00	9.470.000.000,00	9.550.000.000,00
A	Defisit riil	-112.750.023.097,00	61.743.089.991,66	-23.983.115.978,10	-524.461.086,32	15.817.391.149,80
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	272.180.428.585,94	160.912.405.488,94	224.135.495.480,60	201.692.379.502,50	202.667.918.416,18
5	Pencairan Dana Cadangan					
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
7	Penerimaan Pinjaman Daerah					
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.482.000.000,00	1.480.000.000,00	1.540.000.000,00	1.500.000.000,00	1.465.000.000,00
9	Penerimaan Piutang Daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	273.662.428.585,94	162.392.405.488,94	225.675.495.480,60	203.192.379.502,50	204.132.918.416,18
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	160.912.405.488,94	224.135.495.480,60	201.692.379.502,50	202.667.918.416,18	219.950.309.565,98

Sumber: PP APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Dari data pada tabel 3.21 menunjukkan terdapat defisit riil pada tahun 2016, 2018 dan 2019, dikarenakan realisasi pendapatan tidak mencukupi untuk mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Defisit riil tersebut ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Sementara itu pada tahun 2017 dan tahun 2020 justru mengalami netto riil sehingga akan menambahkan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Selanjutnya Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya yang digunakan untuk mendanai anggaran tahun berikutnya.

Komposisi penutup defisit riil Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.22
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Defisit riil	-112.750.023.097,00	61.743.089.991,66	-23.983.115.978,10	-524.461.086,32	15.817.391.149,80
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	272.180.428.585,94	160.912.405.488,94	224.135.495.480,60	201.692.379.502,50	202.667.918.416,18
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.482.000.000,00	1.480.000.000,00	1.540.000.000,00	1.500.000.000,00	1.465.000.000,00
6	Penerimaan Piutang Daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	273.662.428.585,94	162.392.405.488,94	225.675.495.480,60	203.192.379.502,50	204.132.918.416,18
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	160.912.405.488,94	224.135.495.480,60	201.692.379.502,50	202.667.918.416,18	219.950.309.565,98

Sumber: PP APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Dari tabel 3.22 dapat dilihat komposisi terbesar penutup defisit riil anggaran Tahun 2016-2020 adalah dari Pos SILPA Tahun Anggaran sebelumnya yang relatif fluktuatif. Selain dari Pos SILPA Tahun Anggaran sebelumnya, juga terdapat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang diperoleh dari pengembalian pemberian dana talangan kepada kelompok tani. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dijumlahkan menjadi Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah. Setelah Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah dikurangi defisit riil maka diperoleh Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang secara nominal selama tahun 2016-2020 cenderung meningkat kecuali pada tahun 2018 yang menurun dibandingkan tahun 2017.

3.4.2.2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.23
Realisasi SILPA Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		RP	% dari SILPA	RP	% dari SILPA	RP	% dari SILPA	RP	% dari SILPA	RP	% dari SILPA
	Jumlah SILPA	160.912.405.488,94		224.135.495.480,60		201.692.379.502,50		202.667.918.416,18		219.950.309.565,98	
1	Pelampauan penerimaan PAD	17.787.742.703,00	11,05	6.265.638.461,00	2,80		-	2.167.451.329,68	1,07	76.205.384.783,80	34,65
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	-
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	13.954.346.545,00	8,67	6.859.300.043,00	3,06	10.620.367.210,00	5,27	10.455.341.368,00	5,16		-
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	129.170.316.240,94	80,27	211.010.556.976,60	94,14	191.072.012.292,50	94,73	190.045.125.718,50	93,77	143.744.924.782,18	65,35
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	Kegiatan lanjutan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Sumber: PP APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Dari tabel 3.23 dapat dilihat komposisi terbesar SiLPA berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya bahkan dengan proporsi melebihi 90% pada tahun 2017-2019. Sementara itu proporsi terbesar kedua berasal dari pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah walaupun tidak terdapat pelampauan penerimaan pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid yang menurunkan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan proprosi terbesar ketiga berasal dari pelampauan penerimaan PAD kecuali pada tahun 2018 tidak terdapat pelampuan penerimaan PAD. Pelampauan penerimaan PAD menunjukkan realisasi PAD yang melebihi target yang ditetapkan pada APBD berkenaan.

3.4.2.3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan disajikan analisisnya dalam tabel berikut:

Tabel 3.24
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	161.848.532.938,94	223.121.658.575,60	202.091.148.192,50	202.798.793.055,18	219.984.624.515,98
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	161.848.532.938,94	223.121.658.575,60	202.091.148.192,50	202.798.793.055,18	219.984.624.515,98

Sumber: PP APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Dari tabel 3.24 menunjukkan saldo kas neraca daerah cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2018 yang secara nominal menurun dibandingkan tahun 2017. Dengan tidak adanya kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan maka nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran sama dengan saldo kas neraca daerah. Selanjutnya Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran akan menambah kapasitas pendanaan pembangunan daerah tahun berikutnya selain yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah tahun berikutnya dalam rangka untuk mendanai belanja maupun pengeluaran pembiayaan daerah tahun berikutnya.

3.5. Kerangka Pendanaan

3.5.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan untuk memproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada lima tahun mendatang yaitu Tahun 2021-2026. Proyeksi didasarkan pada realisasi capaian kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan selama Tahun 2016-2020 yang telah disampaikan pada sub bab – sub bab sebelumnya. Secara umum kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan bergerak cukup fluktuatif selama Tahun 2016-2020. Khususnya pada Tahun 2020 dimana terjadi Pandemi COVID-19 yang menyebabkan syok pada seluruh sendi kehidupan, tidak terkecuali nilai pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.5.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi Pendapatan Daerah mendasarkan pada realisasi capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020. Walaupun terjadi penurunan secara drastis khususnya pada Tahun 2020 dengan adanya rasionalisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan menurunnya sumber-sumber pendapatan lainnya sebagai dampak Pandemi Covid-19, proyeksi nominal Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 tetap diupayakan meningkat walaupun tidak terlalu optimis seperti tercantum pada Tabel 3.19. Pada Angka proyeksi Pendapatan Daerah adalah untuk Tahun 2022-2026 sedangkan Pendapatan Daerah Tahun 2021 adalah berdasarkan Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun 2021. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.2.752.338.008.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 diharapkan terus meningkat 5

tahun kedepan menjadi sebesar Rp.3.199.794.061.000,- pada Tahun 2026.

PAD selama Tahun 2021-2026 juga diproyeksikan terus meningkat termasuk untuk masing-masing unsurnya yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada APBD Murni Tahun 2021, PAD ditargetkan sebesar Rp.354.421.071.000,- dan kemudian meningkat menjadi Rp.407.243.602.000,- pada RKPD Tahun 2022. PAD pada Tahun 2023-2026 diproyeksikan terus meningkat hingga pada Tahun 2026 yaitu sebesar Rp.499.977.727.000,- dengan harapan perekonomian daerah terus pulih ke depan pasca Pandemi Covid-19. Untuk masing-masing komponen PAD, Pajak Daerah diasumsikan meningkat dari Rp.95.534.500.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi Rp.126.500.000.000,- pada Tahun 2026, untuk Retribusi Daerah juga diasumsikan meningkat dari Rp.30.211.764.000 pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi Rp.41.537.900.000,- pada Tahun 2026. Sementara itu, untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan meningkat dari Rp.12.484.000.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi Rp.18.096.388.000,- pada Tahun 2026 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga diasumsikan meningkat dari Rp.216.190.807.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi Rp.313.843.439.000,- pada Tahun 2026. Dalam upaya pencapaian target PAD tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya optimalisasi PAD ke depan diantaranya melalui:

a. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Ekstensifikasi utamanya pada sektor Pajak Daerah dimana seiring dengan pergerakan ekonomi yang diproyeksikan semakin meningkat ke depan, akan memunculkan Wajib Pajak Baru dan selanjutnya akan dilakukan pendataan Wajib Pajak baru;
d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomi sesuai aturan yang berlaku;
f. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
g. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
h. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
i. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
j. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;
k. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
l. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan
m. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi diasumsikan sama dengan Tahun 2021 dikarenakan pendapatan transfer hanya mengikuti kebijakan pusat atau provinsi. Asumsi komponen pendapatan transfer yang sama terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa yang merupakan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota yang merupakan pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022-2026 tidak diasumsikan pada RPJMD ini sesuai ketentuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga secara total, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp.2.262.776.437.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022-2026 yaitu diasumsikan selalu sama setiap tahunnya sebesar Rp.2.250.403.437.000,- dikarenakan pada Tahun 2021 terdapat bantuan keuangan (dari pemerintah provinsi) sebesar Rp.12.373.000.000,-. Untuk pengalokasian Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari hibah yang bersifat *reimburse* dan Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Seperti halnya PAD dan Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya khususnya dari BOS. Untuk Pendapatan Hibah yang bersifat *reimburse* sempat menurun pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dikarenakan berakhirnya hibah IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program*) pada tahun 2022 sehingga Pendapatan Hibah ke depan tersisa hibah air minum dan hibah jamban. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.135.140.500.000,- pada APBD Murni Tahun 2021, sedangkan untuk RKPD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.139.472.038.000,- dan untuk Tahun 2023 hingga Tahun 2026 juga diproyeksikan terus meningkat hingga pada Tahun 2026 sebesar Rp.150.307.159.000,-.

Dalam upaya pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut, maka perlu dilakukan upaya optimalisasi ke depan dengan peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu perlu juga dilakukan pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru. Secara rinci proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 3.25. berikut.

Tabel 3.25
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
	TOTAL PENDAPATAN	**2.752.338.008.000**	**2.797.119.077.000**	**2.841.004.405.000**	**2.862.419.273.000**	**2.895.595.578.000**	**2.900.688.323.000**
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**354.421.071.000**	**407.243.602.000**	**446.509.021.000**	**466.710.500.000**	**496.247.131.000**	**499.977.727.000**
A.1.	Pajak daerah	95.534.500.000	107.380.000.000	113.760.000.000	120.090.000.000	125.455.000.000	126.500.000.000
A.2.	Retribusi daerah	30.211.764.000	31.990.213.000	34.663.500.000	36.887.450.000	39.074.170.000	41.537.900.000
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.484.000.000	13.729.815.000	15.309.934.000	16.928.340.000	17.953.812.000	18.096.388.000
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	216.190.807.000	254.143.574.000	282.775.587.000	292.804.710.000	313.764.149.000	313.843.439.000
B	**Pendapatan Transfer**	**2.262.776.437.000**	**2.250.403.437.000**	**2.250.403.437.000**	**2.250.403.437.000**	**2.250.403.437.000**	**2.250.403.437.000**
B.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.106.071.310.000**	**2.106.071.310.000**	**2.106.071.310.000**	**2.106.071.310.000**	**2.106.071.310.000**	**2.106.071.310.000**
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.654.376.997.000	1.654.376.997.000	1.654.376.997.000	1.654.376.997.000	1.654.376.997.000	1.654.376.997.000
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.867.666.000	29.867.666.000	29.867.666.000	29.867.666.000	29.867.666.000	29.867.666.000
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.218.308.093.000	1.218.308.093.000	1.218.308.093.000	1.218.308.093.000	1.218.308.093.000	1.218.308.093.000
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.860.834.000	80.860.834.000	80.860.834.000	80.860.834.000	80.860.834.000	80.860.834.000
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	325.340.404.000	325.340.404.000	325.340.404.000	325.340.404.000	325.340.404.000	325.340.404.000

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
B.1.2.	Dana Insentif Daerah (DID)	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000
B.1.3.	Dana Desa	405.260.453.000	405.260.453.000	405.260.453.000	405.260.453.000	405.260.453.000	405.260.453.000
B.2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**156.705.127.000**	**144.332.127.000**	**144.332.127.000**	**144.332.127.000**	**144.332.127.000**	**144.332.127.000**
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	144.332.127.000	144.332.127.000	144.332.127.000	144.332.127.000	144.332.127.000	144.332.127.000
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	12.373.000.000	Tidak diasumsikan sesuai ketentuan Provinsi				
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**135.140.500.000**	**139.472.038.000**	**144.091.947.000**	**145.305.336.000**	**148.945.010.000**	**150.307.159.000**
C.1.	Pendapatan Hibah	3.795.000.000	8.126.538.000	6.790.000.000	7.780.000.000	7.780.000.000	7.780.000.000
C.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	131.345.500.000	131.345.500.000	137.301.947.000	137.525.336.000	141.165.010.000	142.527.159.000

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Keterangan: Tahun 2021 adalah angka APBD Murni Tahun 2021

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan selama Tahun 2021-2026, Pendapatan Daerah diharapkan akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,06% selama 5 tahun ke depan. PAD diharapkan mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi pada 5 tahun ke depan dibandingkan Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,23%. Pada tahun 2026, pertumbuhan PAD diproyeksikan hanya meningkat sekitar 0,75% dibandingkan tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan pada Undang-Undang Perpajakan sebagai tindak lanjut dan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang pada kerangkanya terdapat beberapa perubahan pada jenis dan tarif sehingga diproyeksikan akan mempengaruhi optimalisasi pada pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum sumber-sumber perpajakan sudah dioptimalkan dan dimaksimalkan berdasarkan potensi riil yang ada. Sementara itu rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer selama 5 tahun ke depan adalah sebesar diasumsikan menurun sebesar -0,11% karena pada Tahun 2021 terdapat bantuan keuangan provinsi sedangkan pada Tahun 2022-2026 tidak diasumsikan sesuai ketentuan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama 5 tahun ke depan adalah sebesar 2,16%. Secara rinci proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 3.26. berikut.

Tabel 3.26
Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan 2021-2026
	TOTAL PENDAPATAN	**1,63%**	**1,57%**	**0,75%**	**1,16%**	**0,18%**	**1,06%**
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**14,90%**	**9,64%**	**4,52%**	**6,33%**	**0,75%**	**7,23%**
A.1.	Pajak daerah	12,40%	5,94%	5,56%	4,47%	0,83%	5,84%
A.2.	Retribusi daerah	5,89%	8,36%	6,42%	5,93%	6,31%	6,58%
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9,98%	11,51%	10,57%	6,06%	0,79%	7,78%
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	17,56%	11,27%	3,55%	7,16%	0,03%	7,91%
B	**Pendapatan Transfer**	**-0,55%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,11%**
B.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
B.1.1.	Dana Perimbangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

No	Uraian	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan 2021-2026
	(DAK) Fisik						
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.1.2.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.1.3.	Dana Desa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**-7,90%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-1,58%**
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	Tidak diasumsikan sesuai ketentuan Provinsi					
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**3,21%**	**3,31%**	**0,84%**	**2,50%**	**0,91%**	**2,16%**
C.1.	Pendapatan Hibah	114,14%	-16,45%	14,58%	0,00%	0,00%	22,45%
C.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00%	4,53%	0,16%	2,65%	0,96%	1,66%

Sumber : Analisis Penyusun, 2021
Keterangan: Tahun 2021 adalah angka APBD Murni Tahun 2021

Proyeksi pertumbuhan PAD 5 tahun ke depan yang lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan proyeksi proporsi selama Tahun 2021-2026 menunjukkan proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah diharapkan terus meningkat dari 12,88% pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi sebesar 17,24% pada Tahun 2026. Rata-rata proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama 5 tahun ke depan adalah sebesar 15,64% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata proporsinya sebesar 6,09%.

Sementara itu, proporsi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah diproyeksikan terus menurun selama 5 tahun ke depan. Proporsi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun 2021 sebesar 82,21% diproyeksikan terus menurun menjadi 77,58% pada Tahun 2026. Rata-rata proporsi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah selama 5 tahun ke depan adalah sebesar 79,30% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata proporsinya yang terus menurun sebesar -1,15%.

Untuk Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun 2021 adalah sebesar 4,91% dan diproyeksikan terus menurun menjadi 5,18% pada Tahun 2026. Rata-rata proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah selama 5 tahun ke depan adalah sebesar 5,06% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata proporsinya yang terus menurun sebesar 1,08%. Secara rinci proyeksi proporsi

Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 3.27. berikut.

Tabel 3.27
Proyeksi Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Rata-Rata Proporsi Pendapatan 2021-2026	Pertumbuhan Rata-rata Proporsi Pendapatan 2021-2026
1	**Pendapatan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12,88%	14,56%	15,72%	16,30%	17,14%	17,24%	15,64%	6,09%
1.2	Pendapatan Transfer	82,21%	80,45%	79,21%	78,62%	77,72%	77,58%	79,30%	-1,15%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4,91%	4,99%	5,07%	5,08%	5,14%	5,18%	5,06%	1,08%

Sumber : Analisis Penyusun, 2021
Keterangan: Tahun 2021 adalah angka APBD Murni Tahun 2021

3.5.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah berdasarkan perkiraan situasi dan kondisi di masa depan serta dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berkeadilan. Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024, akan tetapi akan menurun pada Tahun 2025 dan kembali meningkat pada Tahun 2026 seperti tercantum pada Tabel 3.28. Belanja daerah pada Tahun 2024 diproyeksikan lebih besar dibandingkan pada Tahun 2025 karena adanya pencairan dana cadangan yang digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang direncanakan akan diselenggarakan secara serentak pada Tahun 2024. Pada APBD Murni Tahun 2021, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.2.818.415.166.000,- dan pada RKPD Tahun 2022 belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.2.964.098.462.000,- serta diproyeksikan akan terus meningkat mencapai Rp.3.066.172.441.000,- pada Tahun 2026. Mulai tahun 2021, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Struktur Belanja Daerah terbesar adalah Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari 5 komponen belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi pada APBD Murni Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.932.804.072.000,- dan diproyeksikan terus meningkat menjadi Rp. 2.038.696.415.000,- pada Tahun 2026.

Belanja Pegawai sebagai struktur belanja terbesar pada Belanja Operasi secara nominal diproyeksikan terus meningkat dari Rp.1.187.836.875.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi Rp.1.146.855.572.000,- pada Tahun 2026. Belanja Pegawai terdiri dari komponen belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (digunakan diantaranya untuk belanja insentif PAD serta tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru yang bersumber dari DAK Non Fisik dan sebagainya). Pada Belanja Pegawai ini juga termasuk di dalamnya yaitu belanja gaji dan tunjangan DPRD serta belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Selain dikarenakan adanya inflasi, peningkatan Belanja Barang dan Jasa juga diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah khususnya jika barang dan jasa tersebut berasal dari penyedia lokal. Belanja Barang dan Jasa diasumsikan terus meningkat dari Rp. 630.206.760.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi Rp.753.425.881.000,- pada Tahun 2026. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas dan manfaat.

Sementara itu, Belanja Subsidi yang mulai dilaksanakan pada APBD Murni Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,- dan pada tahun berikutnya mulai Tahun 2023 hingga Tahun 2026 direncanakan dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,-. Belanja Subsidi ini digunakan dalam bentuk subsidi bunga bagi para pelaku usaha UMKM sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Seperti telah disampaikan di atas, Belanja Hibah mengalami peningkatan secara drastis pada Tahun 2024 dikarenakan adanya pencairan dana cadangan sekitar Rp.60.000.000.000,- untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024. Pencairan dana cadangan ini sebagian besar dalam bentuk hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 84.160.160.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 diproyeksikan meningkat dengan nominal tertinggi pada Tahun 2024 sebesar Rp. 153.523.710.000,- kemudian menurun pada Tahun 2025 dan kembali meningkat pada Tahun 2026 menjadi Rp. 98.668.957.000,-.

Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan terus meningkat selama Tahun 2021 hingga Tahun 2026 yang diperuntukkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.30.100.277.000 pada APBD Murni dan diproyeksikan terus meningkat menjadi Rp.38.746.005.000,- pada Tahun 2026. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Sebagai unsur belanja pemerintah yang mampu memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah, Belanja Modal diproyeksikan untuk terus meningkat selama 5 tahun ke depan. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.273.065.757.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 dan diharapkan terus meningkat menjadi Rp.393.574.955.000,- pada Tahun 2026. Belanja Modal digunakan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

Untuk belanja tidak terduga diproyeksikan sama setiap tahunnya untuk Tahun 2022 hingga Tahun 2026 yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- lebih tinggi dibandingkan pada APBD Murni 2021 sebesar Rp.1.445.000.000,-. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

serta keadaan yang mendesak yang meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Sementara Belanja Transfer juga diproyeksikan terus meningkat dari Rp.611.100.337.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi sebesar Rp.631.901.071.000,- pada Tahun 2026. Belanja Transfer terdiri dari Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Kebumen serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 3.28. berikut.

Tabel 3.28
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
	BELANJA	**2.818.415.166.000**	**2.964.098.462.000**	**2.997.416.803.000**	**3.100.365.258.000**	**3.054.001.724.000**	**3.066.172.441.000**
A.	**Belanja Operasi**	**1.932.804.072.000**	**1.978.511.415.000**	**2.004.615.497.000**	**2.102.099.392.000**	**2.032.942.793.000**	**2.038.696.415.000**
A.1.	Belanja Pegawai	1.187.836.875.000	1.191.560.395.000	1.177.068.995.000	1.176.731.335.000	1.147.054.208.000	1.146.855.572.000
A.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.206.760.000	660.770.473.000	699.890.099.000	733.816.274.000	749.616.959.000	753.425.881.000
A.3.	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
A.4.	Belanja Hibah	84.160.160.000	89.679.291.000	90.098.028.000	153.523.710.000	97.411.927.000	98.668.957.000
A.5.	Belanja Bantuan Sosial	30.100.277.000	36.001.256.000	36.558.375.000	37.028.073.000	37.859.699.000	38.746.005.000
B.	**Belanja Modal**	**273.065.757.000**	**363.867.708.000**	**370.448.195.000**	**370.865.750.000**	**387.678.803.000**	**393.574.955.000**
C.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.445.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
D.	**Belanja Transfer**	**611.100.337.000**	**619.719.339.000**	**620.353.111.000**	**625.400.116.000**	**631.380.128.000**	**631.901.071.000**

Sumber: Analisis Penyusun, 2021
Keterangan: Tahun 2021 adalah angka APBD Murni Tahun 2021

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan selama Tahun 2021-2026 seperti tercantum pada Tabel 3.23 menunjukkan Belanja Daerah terus mengalami tingkat pertumbuhan positif dari Tahun 2021 hingga 2024. Seperti telah disampaikan di atas, Belanja Daerah pada Tahun 2025 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan adanya pencairan dana cadangan untuk Pilkada. Belanja Daerah diproyeksikan kembali meningkat pada Tahun 2026 dengan asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,73% selama 5 tahun ke depan.

Pola pertumbuhan Belanja Operasi sama dengan Belanja Daerah yaitu diproyeksikan mengalami tingkat pertumbuhan positif dari Tahun 2021 hingga 2024. Belanja Operasi pada Tahun 2025 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan adanya pencairan dana cadangan untuk Pilkada berupa Belanja Hibah kepada KPUD dan Bawaslu. Belanja Operasi diproyeksikan kembali meningkat pada Tahun 2026 dengan asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,11% selama 5 tahun ke depan.

Untuk masing-masing komponen Belanja Operasi menunjukkan Belanja Pegawai terus mengalami tingkat pertumbuhan negatif selama Tahun 2021-2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,69%. Hal yang sama juga terjadi pada Belanja Barang dan Jasa yang terus mengalami tingkat pertumbuhan positif selama Tahun 2021-2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,66%. Belanja Subsidi mencatatkan proyeksi meningkat sebesar 100% hanya pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 20%.

Belanja Hibah diproyeksikan meningkat drastis pada Tahun 2024 sebesar 70,40% akibat adanya pencairan dana cadangan untuk Pilkada. Pada Tahun 2025 diproyeksikan menurun drastis sebesar -36,55% sebelum kembali meningkat pada Tahun 2026 sehingga rata-rata pertumbuhannya diproyeksikan sebesar 8,43% selama 5 tahun ke depan. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial terus mengalami tingkat pertumbuhan positif selama Tahun 2021-2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,40%.

Sementara itu, Belanja Modal diharapkan terus mengalami tingkat pertumbuhan positif selama Tahun 2021-2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,25%. Tingkat pertumbuhan Belanja Modal diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun ke depan dibandingkan Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Hal ini sebagai upaya pemerintah daerah memprioritaskan pada belanja yang diharapkan mampu memberikan efek multiplier terhadap perekonomian daerah.

Tingkat pertumbuhan Belanja Tidak Terduga mencatatkan proyeksi meningkat sebesar 38,41% hanya pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,68%. Sedangkan untuk Belanja Transfer diproyeksikan terus mengalami tingkat pertumbuhan positif selama Tahun 2021-2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,67%. Secara rinci proyeksi pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 3.29 berikut.

Tabel 3.29
Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	BELANJA	**5,17%**	**1,12%**	**3,43%**	**-1,50%**	**0,40%**	**1,73%**
A.	**Belanja Operasi**	**2,36%**	**1,32%**	**4,86%**	**-3,29%**	**0,28%**	**1,11%**
A.1.	Belanja Pegawai	0,31%	-1,22%	-0,03%	-2,52%	-0,02%	-0,69%
A.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,85%	5,92%	4,85%	2,15%	0,51%	3,66%
A.3.	Belanja Subsidi	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
A.4.	Belanja Hibah	6,56%	0,47%	70,40%	-36,55%	1,29%	8,43%
A.5.	Belanja Bantuan Sosial	19,60%	1,55%	1,28%	2,25%	2,34%	5,40%
B.	**Belanja Modal**	**33,25%**	**1,81%**	**0,11%**	**4,53%**	**1,52%**	**8,25%**
C.	**Belanja Tidak Terduga**	**38,41%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**7,68%**
D.	**Belanja Transfer**	**1,41%**	**0,10%**	**0,81%**	**0,96%**	**0,08%**	**0,67%**

Sumber : Analisis Penyusun, 2021
Keterangan: Tahun 2021 adalah angka APBD Murni Tahun 2021

Berdasarkan proyeksi proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menunjukkan Belanja Operasi memiliki proporsi tertinggi dengan rata-rata proporsi sebesar 67,18%. Walaupun demikian, Proporsi Belanja Operasi selama 5 tahun ke depan dpiropyeksikan terus menurun dari 68,58% pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi 66,49% pada Tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan proporsi sebesar -0,61%. Penurunan proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah dipengaruhi oleh menurunnya proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah.

Proyeksi proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menunjukkan proporsi tertinggi diantara seluruh komponen Belanja Operasi, bahkan lebih besar dibandingkan proporsi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 39,09%. Akan tetapi sebagai upaya efisiensi, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah diproyeksikan terus menurun dari 42,15% pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi 37,40% pada Tahun 2026 dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah selama Tahun 2021-2026 sebesar -2,35%. Efisiensi Belanja Pegawai ke depan dimungkinkan dengan akan diberlakukannya *Merit System* dimana tambahan penghasilan bagi ASN serta pembayaran sertifikasi bagi guru akan dibayarkan berdasarkan kinerja individu ASN serta insentif PAD juga dibayarkan berdasarkan kinerja pencapaian target PAD. Proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah yang diproyeksikan terus menurun selama 5 tahun ke depan sebagai upaya memperbaiki struktur Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Sementara itu, proporsi Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan meningkat setiap tahun selama Tahun 2021-2026 dengan rata-rata proporsi sebesar 23,46%. Proporsi Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Daerah sebesar 22,36% pada APBD Murni Tahun 2021 diproyeksikan terus meningkat menjadi 24,57% pada Tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan proporsi sebesar 1,92%. Seperti telah disebutkan sebelumnya, peningkatan ini diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah khususnya jika barang dan jasa tersebut berasal dari penyedia lokal.

Proporsi Belanja Subsidi terhadap Belanja Daerah diproyeksikan stabil pada Tahun 2021 dan 2022 sebesar 0,02% dan sebesar 0,03% pada Tahun 2023 hingga Tahun 2026. Rata-rata proporsi Belanja Subsidi terhadap Belanja Daerah sebesar

0,03% dengan rata-rata pertumbuhan proporsinya sebesar 18,13% selama 5 tahun ke depan.

Sedangkan untuk Proporsi Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah diproyeksikan terus meningkat dari 2,99% pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi mencapai proporsi tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 4,95% dikarenakan adanya pencairan dana cadangan untuk Pilkada. Proporsi Belanja Hibah terhadap Belanja daerah kemudian menurun menjadi 3,19% pada Tahun 2025 dan meningkat kembali pada Tahun 2026 sebesar 3,22%. Rata-rata proporsi Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 3,40% dengan rata-rata pertumbuhan proporsi sebesar 6,14% selama 5 tahun ke depan.

Proporsi Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah selama 5 tahun ke depan diproyeksikan cukup fluktuatif. Rata-rata proporsi Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 1,20% dengan rata-rata pertumbuhan proprosinya sebesar 3,56% pada Tahun 2021-2026.

Seperti halnya Belanja Barang dan Jasa dimana diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah. proporsi Belanja Modal diproyeksikan meningkat setiap tahun selama Tahun 2021-2026 dengan rata-rata proporsi sebesar 11,97%. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah sebesar 9,69% pada APBD Murni Tahun 2021 diproyeksikan terus meningkat menjadi 12,84% pada Tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan proporsi sebesar 6,28%. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang diproyeksikan terus meningkat selama 5 tahun ke depan sebagai upaya memperbaiki struktur Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah diproyeksikan sebesar 0,05% pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi 0,07% pada Tahun 2026 dengan rata-rata proporsi sebesar 0,06% dan rata-rata pertumbuhan proporsinya sebesar 5,66% untuk 5 tahun ke depan. Sedangkan untuk proporsi Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah diproyeksikan fluktuatif menurun dengan rata-rata proporsi sebesar 20,79% dan rata-rata pertumbuhan proporsinya sebesar -0,99%. Secara rinci proyeksi proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 3.30 berikut.

Tabel 3.30
Proyeksi Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Rata-rata Proporsi Tahun 2021-2026	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi Tahun 2021-2026
	BELANJA	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	
A.	**Belanja Operasi**	**68,58%**	**66,75%**	**66,88%**	**67,80%**	**66,57%**	**66,49%**	**67,18%**	**-0,61%**
A.1.	Belanja Pegawai	42,15%	40,20%	39,27%	37,95%	37,56%	37,40%	39,09%	-2,35%
A.2.	Belanja Barang dan Jasa	22,36%	22,29%	23,35%	23,67%	24,55%	24,57%	23,46%	1,92%
A.3.	Belanja Subsidi	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	18,13%
A.4.	Belanja Hibah	2,99%	3,03%	3,01%	4,95%	3,19%	3,22%	3,40%	6,14%
A.5.	Belanja Bantuan Sosial	1,07%	1,21%	1,22%	1,19%	1,24%	1,26%	1,20%	3,56%
B.	**Belanja Modal**	**9,69%**	**12,28%**	**12,36%**	**11,96%**	**12,69%**	**12,84%**	**11,97%**	**6,28%**
C.	**Belanja Tidak Terduga**	**0,05%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,06%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,06%**	**5,66%**
D.	**Belanja Transfer**	**21,68%**	**20,91%**	**20,70%**	**20,17%**	**20,67%**	**20,61%**	**20,79%**	**-0,99%**

Sumber : Analisis Penyusun, 2021
Keterangan: Tahun 2021 adalah angka APBD Murni Tahun 2021

3.5.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah terdiri dari proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama 5 tahun ke depan seperti tercantum pada Tabel 3.25. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 fluktuatif terutama dipengaruhi oleh proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Penerimaan Pembiayaan pada APBD Murni Tahun 2021 tercatat hanya sebesar Rp.70.577.158.000,- dikarenakan belum mencatat SiLPA berdasarkan catatan realisasi APBD Tahun 2020. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.208.279.385.000,- dan menurun di Tahun 2023 akan tetapi kembali naik di Tahun 2024 akibat adanya pencairan dana cadangan sebesar Rp.60.000.000.000,-. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025-2026 kembali diproyeksikan semakin menurun hingga mencapai Rp.206.584.118.000,- pada Tahun 2026.

SiLPA pada APBD Murni Tahun 2021 baru tercatat sebesar Rp.69.077.158.000,- dan belum mencatat SiLPA berdasarkan catatan realisasi APBD Tahun 2020. SiLPA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.206.179.385.000,- dan diharapkan akan terus menurun hingga mencapai Rp.204.484.118.000,- pada Tahun 2026. Berbeda dengan pendapatan dan belanja daerah, SiLPA ke depan justru diproyeksikan semakin menurun setiap tahunnya sebagai indikasi bahwa perencanaan dan pelaksanaan lebih konsisten.

Sedangkan untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman tercatat sebesar Rp.1.500.000.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 Penerimaan kembali pemberian pinjaman adalah sebagai pengembalian atas diberikannya dana talangan pangan kepada kelompok tani untuk menjaga kestabilan harga gabah/beras, jagung dan kedelai petani pada saat panen raya sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Tahun 2022-2026 diasumsikan sebesar Rp.2.100.000.000,- karena selain diproyeksikan sebagai pengembalian dana talangan pangan juga adanya pengembalian dana talangan keterlambatan pembayaran lelang ikan sebesar Rp.600.000.000,- yang akan dimulai pemberiannya pada Perubahan APBD Tahun 2021. Sementara itu pada Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 diasumsikan pencairan dana cadangan untuk Pilkada sebesar Rp.60.000.000.000,-.

Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan selama 5 tahun ke depan cenderung fluktuatif sesuai dengan proyeksi masing-masing komponen pembentuknya yaitu pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah dan pemberian pinjaman daerah. Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan sebesar Rp.20.000.000.000,- setiap tahunnya. Pembentukan dana cadangan Tahun 2022-2024 akan dicairkan sebesar Rp.60.000.000.000,- pada Tahun 2024 untuk pembiayaan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 sedangkan pembentukan dana cadangan Tahun 2025-2026 akan digunakan untuk Pilkada Tahun 2029 sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proyeksi penyertaan modal disesuaikan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2020 serta rencana penyertaan modal untuk BUMD Aneka Usaha yang diharapkan mulai menjalankan usaha pada Tahun 2022. Untuk penyertaan modal pada BUMD Aneka Usaha dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,- pada Tahun 2022 dan masing-masing sebesar Rp.7.000.000.000,- pada Tahun 2023-2026.

Untuk pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan penerimaan kembali pinjaman daerah selama 5 tahun ke depan. Pemberian pinjaman tercatat sebesar Rp.1.500.000.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 dimana digunakan sebagai dana talangan pangan. Sedangkan pemberian pinjaman pada Tahun 2022-2026 diasumsikan sebesar Rp.2.100.000.000,- karena selain diproyeksikan untuk dana talangan pangan sebesar Rp.1.500.000.000,- juga akan digunakan sebagai dana talangan keterlambatan pembayaran lelang ikan sebesar Rp.600.000.000,- yang akan

dimulai pemberiannya pada Perubahan APBD Tahun 2021.

Dari perhitungan proyeksi Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Daerah selama 5 tahun ke depan didapatkan Pembiayaan Netto yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan Netto cukup fluktuatif sebagai selisih besaran proyeksi Pembiayaan Daerah terhadap Pengeluaran Daerah. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 secara rinci tersaji pada Tabel 3.31 berikut.

Tabel 3.31
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
	PEMBIAYAAN						
A.	**Penerimaan Pembiayaan**	**70.577.158.000**	**208.279.385.000**	**207.243.398.000**	**267.045.985.000**	**207.027.146.000**	**206.584.118.000**
A.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	69.077.158.000	206.179.385.000	205.143.398.000	204.945.985.000	204.927.146.000	204.484.118.000
A.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.500.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
A.3	Pencairan Dana Cadangan				60.000.000.000		
B.	**Pengeluaran pembiayaan**	**4.500.000.000**	**41.300.000.000**	**50.831.000.000**	**29.100.000.000**	**48.621.000.000**	**41.100.000.000**
B.1	Pembentukan dana cadangan		20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
B.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	3.000.000.000	19.200.000.000	28.731.000.000	7.000.000.000	26.521.000.000	19.000.000.000
B.3	Pemberian pinjaman daerah	1.500.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
	Pembiayaan Netto (A-B)	**66.077.158.000**	**166.979.385.000**	**156.412.398.000**	**237.945.985.000**	**158.406.146.000**	**165.484.118.000**

Sumber: Analisis Penyusun, 2021
Keterangan: Tahun 2021 adalah angka APBD Murni Tahun 2021

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026 seperti tercantum pada Tabel 3.32 menunjukkan tingkat pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan fluktuatif dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,42%. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan meningkat hanya pada Tahun 2024 karena adanya pencairan dana cadangan. Selama Tahun 2022-2026, pertumbuhan SiLPA diproyeksikan menurun setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,21% sedangkan penerimaan kembali pemberian pinjaman diproyeksikan tetap.

Proyeksi pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022-2026 fluktuatif dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5,11%. Sementara proyeksi pertumbuhan pembentukan dana cadangan cenderung sama sedangkan pertumbuhan penyertaan modal (investasi) daerah diproyeksikan fluktuatif dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 56,13%. Sementara untuk pertumbuhan pemberian pinjaman daerah diproyeksikan tetap, sama dengan proyeksi pertumbuhan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dalam hal ini pada akhirnya menghasilkan proyeksi pertumbuhan Pembiayaan Netto yang fluktuatif dan cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan -31,82%. Proyeksi pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 secara rinci tersaji pada Tabel 3.32 berikut.

Tabel 3.32
Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026

No	Uraian	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Pembiayaan					
A.	**Penerimaan Pembiayaan**	**-0,50%**	**28,86%**	**-22,48%**	**-0,21%**	**1,42%**
A.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	-0,50%	-0,10%	-0,01%	-0,22%	-0,21%
A.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.3	Pencairan Dana Cadangan		100,00%	-100,00%		0,00%
B.	**Pengeluaran pembiayaan**	**47,29%**	**-35,72%**	**24,35%**	**-15,47%**	**5,11%**
B.1	Pembentukan dana cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	49,64%	-75,64%	278,87%	-28,36%	56,13%
B.3	Pemberian pinjaman daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Pembiayaan Netto (A-B)	**-16,49%**	**38,09%**	**-73,62%**	**-75,25%**	**-31,82%**

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

3.5.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan selama 5 tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.27. Kapasitas riil diperoleh dari total penerimaan dikurangi total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat. Total penerimaan diperoleh dari Pendapatan, pencairan dana cadangan, SiLPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang diproyeksikan meningkat dari Rp.2.822.915.166.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 menjadi Rp.3.107.272.441.000,- pada Tahun 2026. Sementara itu, belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat diperoleh dari Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan sehingga diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang secara rinci terdapat pada Tabel 3.33 berikut.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diperoleh setiap tahunnya selanjutnya akan digunakan untuk membiayai prioritas utama seperti tercantum pada Tabel 3.28 dimana prioritas utama terbagi menjadi Prioritas I dan II. Prioritas I terdiri

dari belanja DAK Fisik dan Non Fisik, DID, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan Hibah (*reimburse*), BOS, BLUD, Subsidi Bunga, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) dan BPJS Perangkat Desa serta Belanja Pilkada (khusus pada Tahun 2024). Untuk prioritas II rencananya akan dialokasikan untuk pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan belanja program lainnya. Secara rinci rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 3.34 berikut.

Tabel 3.33
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
1	Pendapatan	2.752.338.008.000	2.797.119.077.000	2.841.004.405.000	2.862.419.273.000	2.895.595.578.000	2.900.688.323.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)				60.000.000.000		
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	69.077.158.000	206.179.385.000	205.143.398.000	204.945.985.000	204.927.146.000	204.484.118.000
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
	Total penerimaan	2.822.915.166.000	3.005.398.462.000	3.048.247.803.000	3.129.465.258.000	3.102.622.724.000	3.107.272.441.000
	Dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat yaitu:						
1	Belanja Pegawai	1.187.836.875.000	1.191.560.395.000	1.177.068.995.000	1.176.731.335.000	1.147.054.208.000	1.146.855.572.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000	41.300.000.000	50.831.000.000	29.100.000.000	48.621.000.000	41.100.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1.630.578.291.000**	**1.772.538.067.000**	**1.820.347.808.000**	**1.923.633.923.000**	**1.906.947.516.000**	**1.919.316.869.000**

Sumber: Analisis Penyusun, 2021
Keterangan: Tahun 2021 adalah angka APBD Murni Tahun 2021

Tabel 3.34
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.630.578.291.000	1.772.538.067.000	1.820.347.808.000	1.923.633.923.000	1.906.947.516.000	1.919.316.869.000
	Prioritas I						
1	Belanja DAK Fisik	80.860.834.000	80.860.834.000	80.860.834.000	80.860.834.000	80.860.834.000	80.860.834.000
2	Belanja DAK Non Fisik	325.340.404.000	325.340.404.000	325.340.404.000	325.340.404.000	325.340.404.000	325.340.404.000
3	Belanja DID	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000	46.433.860.000
4	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	12.373.000.000					
5	Belanja dari Pendapatan Hibah	3.795.000.000	3.795.000.000	8.126.538.000	6.790.000.000	7.780.000.000	7.780.000.000
6	Belanja BOS	131.345.500.000	131.345.500.000	131.345.500.000	137.301.947.000	137.525.336.000	141.165.010.000
7	Belanja BLUD	196.966.425.000	244.671.271.000	254.623.796.000	262.162.690.000	268.889.626.000	277.468.528.000
8	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
9	Belanja Tidak Terduga	1.445.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
10	Belanja Transfer dan BPJS Perangkat Desa	611.100.337.000	619.719.339.000	620.353.111.000	625.400.116.000	631.380.128.000	631.901.071.000
11	Belanja Pilkada				60.000.000.000		
	Prioritas II						
1	Dialokasikan untuk pemenuhan mandatory spending sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan belanja program lainnya	220.417.931.000	317.871.859.000	350.263.765.000	376.344.072.000	405.737.328.000	405.367.162.000
	Surplus anggaran riil atau Berimbang	0	0	0	0	0	0

Sumber: Analisis Penyusun, 2021 (Keterangan : Tahun 2021 adalah angka APBD Murni Tahun 2021)

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang cermat agar dapat melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan menentukan isu strategis yang tepat. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah adalah upaya untuk memetakan permasalahan pembangunan berdasarkan data yang ada sehingga dapat diketahui masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Sementara itu, Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristiknya bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang di masa datang. Terdapat hubungan yang erat antara isu strategis dan identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu aspek yang menentukan rumusan isu strategis. Tujuan perumusan isu strategis adalah untuk menentukan fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen lima tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah permasalahan prioritas dari beberapa permasalahan pembangunan yang ada di daerah. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah bersifat multi sektor yang berarti untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan cara menangani permasalahan pada sektor yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah tersebut.

Permasalahan pembangunan daerah didapatkan dengan cara mengindentifikasi permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan merumuskan permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan kinerja pembangunan yang dicapai saat ini. Rumusan permasalahan pembangunan tersebut kemudian dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Permasalahan pembangunan yang akan diselesaikan adalah permasalahan sektor/urusan pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kebumen, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    a. Pendidikan
    b. Kesehatan
    c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
    e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
    f. Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    a. Tenaga kerja

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Pangan
d. Pertanahan
e. Lingkungan hidup
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
i. Perhubungan
j. Komunikasi dan Informatika
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
l. Penanaman Modal
m. Kepemudaan dan Olahraga
n. Statistik
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaan
r. Kearsipan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
   a. Kelautan dan Perikanan
   b. Pariwisata
   c. Pertanian
   d. Perdagangan
   e. Perindustrian
   f. Transmigrasi
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
   a. Sekretariat Daerah
   b. Sekretariat DPRD
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
   a. Perencanaan
   b. Keuangan
   c. Kepegawaian
   d. Pendidikan dan Pelatihan
   e. Penelitian dan Pengembangan
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)
7. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
8. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kebumen dikelompokkan berdasarkan kemiripan tema permasalahan pembangunan daerah. Selain itu, pengelompokkan tema permasalahan pembangunan daerah juga diselaraskan dengan Visi-Misi Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, sehingga dikelompokkan menjadi 4 (empat) tema permasalahan pembangunan daerah, yaitu: 1) Pembangunan Sumberdaya Manusia, 2) Pembangunan Ekonomi, 3) Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan 4) Tata Kelola Pemerintahan.

Selanjutnya, dalam merumuskan permasalahan pembangunan daerah, masing-masing tema tersebut dianalisis menggunakan analisis pohon masalah. Langkah pertama analisis pohon masalah adalah mengidentifikasi masalah dalam setiap urusan pemerintahan dalam suatu tema yang kemudian disebut serabut masalah. Serabut

masalah diidentifikasi penyebabnya secara umum yang kemudian disebut masalah yang kemudian disimpulkan penyebab timbulnya masalah. Penyebab inilah yang dinamakan pokok masalah. Pokok masalah, masalah dan akar masalah kemudian dibuat bagan pohon masalah.

Berdasarkan analisis menggunakan pohon masalah atas keempat tema permasalahan pembangunan daerah tersebut, didapatkan uraian permasalahan pembangunan daerah secara lebih rinci sebagai berikut.

4.1.1. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Konsep pembangunan sumberdaya manusia menurut BPS adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan sumberdaya manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Pada aspek pembangunan sumberdaya manusia sebagai motor utama penggerak pembangunan daerah, kualitas sumberdaya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Adapun ruang lingkup aspek pembangunan manusia adalah pada bidang kesehatan, pendidikan maupun aspek-aspek lainnya yang mendukung dalam pembangunan sumber daya manusia meliputi pembangunan kependudukan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pembangunan di berbagai sektor tersebut merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia guna mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Untuk mencapai kualitas hidup manusia yang baik memerlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas-sektor, serta kapasitas untuk melaksanakannya.

Sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah, Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menempatkan peningkatan kualitas manusia Indonesia pada misi pertamanya. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai IPTEK didukung kerjasama industri dan talenta global melalui layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Strategi yang dilakukan guna mencapai SDM yang berkualitas dan berdaya saing diantaranya melalui pengendalian penduduk, penguatan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas serta daya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen 2005-2025. Secara umum sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2025 dalam pembangunan sumberdaya manusia, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, dan terbentuknya karakter budaya (jati diri) masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Arah kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen 2020-2025 dalam pencapaian visi daerah akan dicapai melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan, peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kemampuan dalam pemberantasan penyakit melalui

upaya preventif dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk.

Sementara itu dalam tahap terakhir RPJPD 2020-2025 fokus pembangunan SDM antara lain:

1. Peningkatan kerjasama yang harmonis dari semua pihak dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan;
2. Peningkatan peran serta masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal agar masyarakat memiliki profesionalisme yang memadai;
4. Peningkatan kerjasama yang harmonis dalam pembinaan olahraga bagi generasi muda;
5. Mempertahankan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan;
6. Menjaga keberlangsungan penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat luas;
7. Peningkatan angka harapan hidup dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
8. Pemantapan kesehatan reproduksi remaja;
9. Pelestarian pengembangan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta perlindungan anak; dan
10. Pemantapan sistem perlindungan perempuan dan anak serta pelestarian kerukunan hidup beragama.

Hasil identifikasi permasalahan pembangunan sumber daya manusia berdasarkan data gambaran umum kondisi daerah sekaligus hasil evaluasi RPJMD 2016-2021 adalah dalam rentang waktu lima tahun terakhir IPM Kabupaten Kebumen terus menunjukkan peningkatan, namun angka IPM Kabupaten Kebumen masih berada pada kategori menengah ke bawah. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Kabumen sebesar 69,81 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen menempati urutan ke-11 kabupaten/kota dengan IPM terendah. Dengan demikian, dalam perencanaan pembangunan manusia perlu terus berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga memiliki daya saing yang tinggi, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM yang berada pada kategori menengah ke bawah ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen masih memiliki permasalahan pokok yang mendasar. Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap of expectation* atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Untuk dapat memetakan permasalahan dalam pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen dalam mencapai perluasan pilihan dan kesejahteraan seluruh penduduk, maka analisis ini berfokus pada disparitas pembangunan manusia. Konsep disparitas digunakan untuk memastikan pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen membuka kesempatan yang sama untuk semua individu dalam memperluas pilihan-pilihannya, baik laki-laki maupun perempuan. Pembangunan manusia yang merata pada bidang pendidikan, kesehatan, peluang untuk menjadi sejahtera. Dari analisis disparitas, diketahui bahwa masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan bagi pembangunan manusia di Kabupaten

Kebumen. Beberapa komponen pembangunan masih belum seperti yang diharapkan terkait pemerataan.

Dalam kerangka disparitas, maka diperoleh permasalahan yang masih perlu diselesaikan. Secara umum, permasalahan-permasalahan pembangunan sumber daya manusia yang ditemukan di Kabupaten Kebumen adalah kesejahteraan yang tidak dirasakan oleh semua individu dan terdapat kesenjangan pembangunan manusia antargender, sebagaimana dapat terlihat pada berikut.

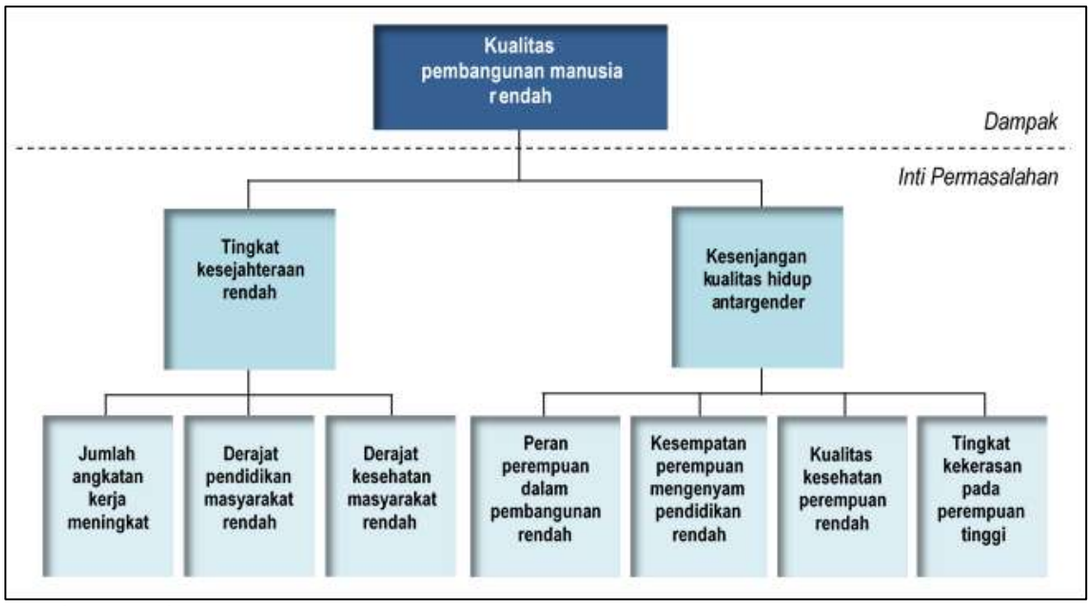

Sumber : Analisis Penyusun, 2021

Gambar 4.1
Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen

Berikut akan dijelaskan masing-masing permasalahan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Kebumen.

1) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Rendah

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari masih rendahnya IPM Kabupaten Kebumen. Beberapa akar masalah yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen diantaranya disebabkan angka pengangguran Kabupaten Kebumen cukup tinggi karena tenaga kerja yang terserap oleh pasar kerja memiliki daya saing rendah, hal ini disebabkan karena kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki tenaga kerja rendah. Akar-akar masalah akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Jumlah angkatan kerja meningkat

Cepatnya laju pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan berbagai implikasi dan tekanan dalam berbagai bidang pembangunan, salah satu di antaranya adalah penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang ada, karena bila penduduk bertambah maka jumlah angkatan kerja bertambah yang berarti masalah bagi penyediaan lapangan kerja baru untuk meminimalkan jumlah pengangguran terbuka. Tahun 2020, TPAK meningkat menjadi 69,63 persen dari 68,48 persen pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang tenaga kerja terdapat 69-70 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, menganggur, dan sedang mencari kerja. TPAK yang tinggi berkontribusi pada rendahnya kesejahteraan disebabkan oleh beberapa alasan antara lain tingginya angka pengangguran dan kualitas tenaga kerja yang terserap rendah.

Berdasarkan evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan tren menurun dengan angka terendah tahun 2019 sebesar 4,76 persen kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,07 persen. Namun, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,14 persen. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen berada dibawah TPT Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana terjadi penurunan produktivitas pada industri yang mengakibatkan PHK atau merumahkan tenaga kerjanya. Selain itu pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi turut berdampak pada meningkatnya angka pengangguran terbuka. Angka pengangguran yang tinggi menyebabkan daya beli penduduk menjadi rendah.

Penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Komposisi TPT Kabupaten Kebumen berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk tingkat Pendidikan SMA/SMK sebanyak 62,79 persen dari total pengangguran terbuka atau 24.163 penduduk, dengan jumlah pengangguran SMA sebanyak 10,20 persen atau sejumlah 3.926 orang, SMK sebanyak 52,59 persen atau 20.237 orang. Padahal tingkat kesempatan kerja tahun 2019 lebih tinggi (95,24 persen) dibandingkan tahun 2017 dan 2018, namun berkurang drastis pada tahun 2020 menjadi 93,93 persen dikarenakan pandemi. Data ini mengindikasikan bahwa terdapat *missmatch* antara lowongan pekerjaan dengan ketersediaan tenaga kerja atau kualitas lulusan SMA/SMK masih rendah.

Menteri Tenaga Kerja menyampaikan setidaknya ada tiga isu utama dalam masalah sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pertama adalah kualitas, kedua kuantitas, dan ketiga adalah persebaran. Kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat. Hasil dari pendidikan yang kurang berkualitas menyebabkan pengangguran karena memengaruhi kompetensi, penguasaan ketrampilan non teknis maupun ketrampilan teknis yang dimiliki lulusan pada jenjang tertentu. Banyaknya perguruan tinggi dan sekolah belum dapat menjamin kualitas pendidikan.

Era globalisasi bahkan revolusi Industri 4.0 menuntut kompetensi sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademis namun mampu menguasai teknologi informasi, bahasa asing, ketrampilan, perilaku, dan ketrampilan non teknis lainnya yang sesuai dengan kebutuhan industri. Perubahan inilah yang seharusnya diikuti oleh sistem pendidikan di Indonesia termasuk kurikulum dalam sekolah-sekolah vokasi agar lulusan Indonesia dapat terserap oleh pasar kerja baik nasional maupun internasional.

Tatanan dunia pada era globalisasi mendorong keterbukaan pasar baik barang, jasa, modal bahkan tenaga kerja. Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Kebumen kedepan. Kebutuhan tenaga terampil dan berdaya saing, lalu lintas barang, jasa dan modal yang sangat cepat dan tidak terbatas ruang maupun waktu merupakan sebuah peluang besar jika daerah mampu menyiapkan sumber daya yang berdaya saing. Jumlah penduduk yang besar dan suplai angkatan kerja yang besar tidak akan berarti apapun jika tidak mampu bersaing. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, kecepatan arus informasi dan ekonomi digital, serta era Industri 4.0 perlu disikapi Pemerintah Daerah dalam penyiapan sumber daya manusianya agar mampu berkontribusi, berkompetisi, dan tidak hanya menjadi target pasar.

Angkatan kerja yang tinggi jika tidak disertai dengan pembangunan kualitas manusianya akan menjadi beban bagi daerah dalam sektor ketenagakerjaan. Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir didominansi pekerja dengan tingkat pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajat.

Komposisi tenaga kerja seperti ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja yang terserap adalah pekerja yang tidak memiliki keahlian yang memadai. Pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang semakin meningkat mengakibatkan pekerja dengan tingkat pendidikan seperti ini akan bekerja pada level terendah dari manajemen, yaitu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Penduduk bekerja menurut status pekerjaan selama kurun waktu 2016-2020 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha sendiri, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Status pekerjaan ini memengaruhi besaran pendapatan yang akan diterima oleh pekerja. Status pekerjaan sebagai buruh dan pekerja keluarga/tidak dibayar memiliki upah yang kurang layak atau di bawah UMK, selain itu pekerjaan tersebut seperti pekerjaan paruh waktu atau musiman seperti di sektor pertanian. Akibatnya pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja yang bekerja tidak cukup untuk memenuhi standar hidup layak.

Pengeluaran perkapita Kabupaten Kebumen sebesar Rp 8,90 juta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sementara UMK Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah Rp 1.835.000, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 1.686.000. Namun jika melihat pada karakteristik tenaga kerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 32,4 persen dan sektor perdagangan sebesar 25,32 persen, memiliki tingkat pendidikan mayoritas SD/SMP dan bahkan tidak tamat SD sebesar 69,59 persen, dengan status pekerjaan terbesar adalah buruh, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, berusaha sendiri dan pekerja kelaurga/tidak dibayar menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Kabupaten Kebumen tidak mendapatkan upah sesuai dengan standar minimal kabupaten.

Dengan demikian, struktur kependudukan dengan jumlah usia produktif dominan, perlu disikapi dengan kebijakan pembangunan yang tepat. Angka pengangguran semakin tinggi karena keterbatasan penyerapan tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja. Selain pengendalian jumlah penduduk, mobilitas penduduk, pemerintah daerah harus menyiapkan tenaga kerja yang trampil dan kompeten di tengah keterbukaan perdagangan dan pasar tenaga kerja.

b) Derajat Pendidikan Masyarakat Rendah

Kualitas hidup manusia sangat ditentukan oleh pendidikan. Pengetahuan menjadi salah satu unsur penting dari modal manusia yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya saing suatu bangsa dalam kehidupan global. Tenaga kerja yang terdidik dan terampil sebagai *output* dari proses pendidikan formal dan non formal adalah komponen yang memengaruhi kelangsungan proses produksi barang dan jasa, serta secara tidak langsung hal ini akan memberi pengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk secara umum. Banyak fakta yang menunjukkan semakin baik kualitas pengetahuan penduduk di suatu wilayah maka akan diikuti oleh perbaikan kesejahteraan, sehingga pendidikan seringkali dianggap sebagai variabel antara bagi penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Manusia yang berkualitas seharusnya dapat memberikan keuntungan yang besar dalam mengurangi disparitas antarindividu karena berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah sebesar 13,34 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari HLS di Jawa Tengah maupun nasional. Kinerja peningkatan HLS di Kabupaten Kebumen mengindikasikan kondisi pembangunan sistem pendidikan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang

diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak di Kabupaten Kebumen selama 13,34 tahun. Kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana HLS Kebumen sempat lebih rendah dibanding Nasional. Perkembangan Harapan Lama Sekolah menjadi indikasi positif dalam sektor pendidikan, sebab semakin lama seseorang mengenyam sekolah, artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilaluinya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Angka HLS yang baik tidak diikuti dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang baik. RLS Kabupaten Kebumen tahun 2020 adalah sebesar 7,54 tahun. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan RLS Provinsi Jawa Tengah dan nasional, masih lebih rendah karena RLS Provinsi Jawa Tengah dan nasional mencapai angka masing-masing 7,69 tahun dan 8,48 tahun. Artinya penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,54 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). RLS yang rendah ini mengurangi kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen. Hal ini ditunjukkan pula dengan data pada jenjang pendidikan dasar tren Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang fluktuatif, serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang cenderung menurun. APS rendah menjadi potensi tingginya angka putus sekolah dan anak tidak sekolah. Sehingga, meskipun akses dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan maupun tenaga kependidikan yang ada cukup baik di wilayah Kabupaten Kebumen, namun APS terus mengalami penurunan. Sementara itu APS pada jenjang SD di tahun 2020 sebesar 99,58 persen, jenjang SMP 99,03 persen. Artinya terdapat potensi anak tidak sekolah yang disebabkan oleh ketidakmampuan orangtua secara ekonomi sehingga putus sekolah, atau karena faktor sosial di keluarga dan lingkungannya.

c) Derajat kesehatan masyarakat rendah

Aspek penting kesejahteraan yang lain adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. AHH saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan. AHH merupakan standar suatu negara maupun daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen dalam lima tahun memang menunjukkan tren positif meski peningkatannya tidak signifikan dan berada di bawah AHH Jawa Tengah namun di atas AHH nasional. Tahun 2020, AHH Kabupaten Kebumen sebesar 73,40 tahun, sehingga diperkirakan anak yang lahir dapat hidup rata-rata sampai usia 73,40 tahun. Namun, capaian indikator utama bidang kesehatan menunjukkan masih tingginya angka stunting pada anak, tingginya kasus kematian ibu dan bayi, serta tingginya angka kesakitan baik yang disebabkan oleh penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Pada tahun 2020 terdapat kasus kematian bayi sebesar 6,95/1.000 kelahiran hidup, dan kasus kematian ibu sebanyak 76,73/1.000 kelahiran hidup.

Penyakit penyerta, keterlambatan penanganan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat menjadi penyebab kasus kematian ibu maupun bayi. Selain itu ketersediaan layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial/Emergensi Komprehensif) dalam rangka penyelamatan ibu dan anak baru lahir melalui program rujukan berencana dalam satu wilayah masih terbatas. Kabupaten Kebumen baru memiliki 2 fasilitas

layanan PONEK yaitu RSU dr. Soedirman dan RSU PKU Gombong. Di sisi lain persentase bayi dengan status gizi kurang dan buruk memiliki tren yang meningkat. Angka Kesakitan penyakit menular maupun tidak menular masih cukup tinggi. Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 21,52 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 20,19 persen. Tiga penyakit menular utama yang cukup signifikan adalah temuan kasus baru HIV, TB, dan DBD, sedangkan penyakit tidak menular utama dengan kasus yang cukup tinggi adalah Diabetes Melitus, Hipertensi, Asma, dan Kanker yang cenderung meningkat kasusnya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

2) Kesenjangan Kualitas Hidup Antar gender

Konsep gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan, sebab ketidakadilan yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan (Indeks Pembangunan Manusia). Kesetaraan gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan yang juga menjadi fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Disparitas capaian antargender tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang menggambarkan ukuran pembangunan manusia namun dengan pilah gender. Capaian kinerja IPG Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan meski relatif lambat. Pada tahun 2019 IPG Kabupaten Kebumen sebesar 93,34 kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 93,05. Pembangunan manusia yang dicapai laki-laki di Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibanding perempuan selama lima tahun terakhir. Tahun 2020, tercatat bahwa IPM laki-laki mencapai 73,39 dan perempuan sebesar 68,29. Secara konseptual, capaian ini merefleksikan masih adanya disparitas pembangunan manusia antargender di Kabupaten Kebumen.

Kualitas hidup perempuan yang relatif lebih rendah dibanding laki-laki pada dasarnya mengindikasikan lebih terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, lebih lemahnya kontrol perempuan terhadap sumberdaya pembangunan, dan lebih minimnya manfaat yang diperoleh perempuan dari pembangunan. Beberapa akar masalah yang diidentifikasi menyebabkan kualitas hidup perempuan lebih rendah dari laki-laki adalah:

a) Peran perempuan dalam pembangunan rendah

Kesempatan dan kesetaraan perempuan sangat penting untuk dapat mendorong perempuan berkontribusi dalam pembangunan. Kemiskinan, isolasi geografis, status minoritas, kecacatan, pernikahan dini dan kehamilan, kekerasan berbasis gender, dan kepercayaan tradisional tentang status dan peran perempuan merupakan beberapa hambatan yang menghalangi hak perempuan dan anak perempuan untuk menjalankan hak mereka berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam segala bidang. Salah satu hal yang memengaruhi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adalah pemberdayaan perempuan yang rendah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kebumen menurun dari 70,13 pada tahun 2017 menjadi 68,09 pada tahun 2018 dan terus menurun menjadi 66,89 pada tahun 2020. Komposit pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan

dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Keterlibatan perempuan di parlemen cenderung menurun dari 28 persen pada tahun 2017 menjadi 24 persen pada 2018 dan 22 persen pada tahun 2020. Sementara perempuan sebagai tenaga profesional juga menurun dari 46,71 persen pada tahun 2017 menjadi 45,53 persen pada tahun 2018 namun meningkat pada tahun 2020 menjadi 54,20 persen. Persentase perempuan yang menjadi PNS dan menduduki jabatan penting dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Kebumen cukup baik.

Sumbangan pendapatan perempuan juga sangat kecil yaitu 25,79 persen pada tahun 2020. Pada sektor ekonomi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat besar selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pengeluaran perkapita laki-laki pada tahun 2019 sebesar RP 11.904.000 dan perempuan sebesar Rp 8.305.000 dan menurun pada tahun 2020 pengeluaran per kapita laki-laki sebesar RP 11.636.000 dan perempuan sebesar Rp. 8.205.000 . Artinya daya saing tenaga kerja perempuan sangat rendah, upah yang diberikan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, serta kesempatan menduduki posisi penting dalam pekerjaan relatif rendah. Dengan demikian, disparitas gender sangat terlihat dari rendahnya kesempatan partisipasi perempuan dalam keputusan penting dan pembangunan daerah, serta daya saing dalam mendapatkan upah yang layak.

b) Kesempatan perempuan mengenyam pendidikan rendah

Disparitas antargender dari sisi pendidikan memang masih terjadi. Hal ini dapat dilihat dari komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pendidikan yaitu HLS dan RLS pilah gender. HLS perempuan sebesar 13,53 lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sebesar 13,33, namun untuk RLS perempuan sebesar 7,10 lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu 7,98 tahun. Artinya meskipun perempuan memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki namun rata-rata hanya mengenyam pendidikan selama 7,10 tahun atau setara SMP Kelas VII. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh persepsi orangtua tentang pendidikan. Khususnya bagi anak perempuan, persepsi orangtua sangat penting karena akan menentukan dukungan capaian pendidikan anak perempuan tersebut. Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi orangtua adalah umur, kemampuan ekonomi, dan tingkat pendidikan (Widyaningsih, 2010).

c) Kualitas kesehatan perempuan lebih rendah

Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan memang lebih tinggi dibanding AHH laki-laki. Namun, hal ini sangat terkait dengan *female advantages* (FA), terutama faktor biologis dan tingkah laku atau kebiasaan dari setiap gender. Lemaire (2002) menyatakan bahwa secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan dari segi gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena stres, kebiasaan merokok, dan pekerjaan berat. Namun demikian, secara praktik di beberapa wilayah, *female advantages* lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Disparitas antargender dari sisi kesehatan di Kabupaten Kebumen masih terjadi. Meskipun Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan lebih besar dari laki-laki, namun dari aspek kesehatan yang lain seperti keluhan kesehatan perempuan masih di atas laki-laki. Angka kesakitan perempuan meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi 23,17 pada tahun 2020 dari 19,50 persen pada tahun 2019. Sebaliknya angka kesakitan penduduk

laki-laki menurun dari 20,86 persen pada tahun 2019 menjadi 19,85 persen pada tahun 2020. Sehingga, dapat dikatakan bahwa meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang, tetapi perempuan lebih rentan mengalami sakit. Hal ini terkait dengan karakter fisik perempuan yang secara umum lebih lemah dibandingkan laki-laki.

d) Tingkat kekerasan pada perempuan tinggi

Aspek perlindungan terhadap kekerasan tidak dapat diasumsikan terefleksikan secara langsung maupun tidak langsung melalui pengukuran kualitas hidup. Fenomena kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diasumsikan berkorelasi secara negatif dengan kualitas hidup perempuan. Kualitas hidup perempuan yang meningkat tidak selalu diikuti dengan tindak kekerasan yang menurun. Banyak kajian menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban kekerasan tanpa memperhatikan tingkat pendidikan, ekonomi, dan status sosialnya. Sehingga, selain berfokus pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, pengukuran atas tindak kekerasan yang dialami perempuan perlu juga mendapat perhatian khusus.

Meskipun sistem perlindungan perempuan dan anak telah dibangun melalui P2TP2A KARTIKA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan) yang terdiri dari Tim Koordinator dan Tim Pelaksana Harian dari lintas sektor termasuk di dalamnya pelibatan instansi vertikal (TNI, POLRI) dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun, selama kurun waktu lima tahun terakhir kasus kekerasan yang terjadi baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen berfluktuatif namun relatif tinggi.

Berdasarkan analisa permasalahan pembangunan sumber daya manusia dapat dikelompokkan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1	Pendidikan	Belum meratanya akses dan kualitas layanan Pendidikan yang dapat dilihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah, dan APK, APM dan APS yang cenderung menurun
		Masih terdapatnya anak Putus Sekolah pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs
2	Kesehatan	Masih ditemukannya kasus gizi buruk dan tingginya angka stunting
		Masih tingginya AKI dan AKB
		Masih tingginya angka kesakitan baik yang disebabkan penyakit menular maupun penyakit tidak menular
		Belum tercapainya *Universal Health Coverage*
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih terdapatnya kesenjangan kualitas hidup antar gender pada sektor pendidikan, kesehatan, politik maupun ekonomi
		Peran perempuan dalam pembangunan rendah
		Masih tingginya tingkat kekerasan berbasis gender dan anak
4	Tenaga Kerja	Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
		Kualitas tenaga kerja rendah

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

4.1.2. Pembangunan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan layanan dasar dan hidup secara layak. Salah satu aspek yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan adalah tingkat kesejahteraan ekonomi, terutama pada masyarakat miskin. Meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin dalam periode 2016-2020 cenderung mengalami penurunan, yaitu 19,86% di 2016 menjadi 17,59% pada 2020, namun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,62% dari tahun 2019 sebesar 2,58%. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,65% menjadi sebesar 0,55% pada tahun 2020. Artinya jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin jauh, dan jarak rata-rata pengeluaran antar-penduduk miskin semakin dekat namun belum optimal. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2020 sebagai salah satu akibat dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin, serta kedalaman dan keparahan kemiskinan yang semakin jauh.

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. BPS menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Kemiskinan yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kemampuan yang mereka miliki serta faktor eksternal seperti ketiadaan kesempatan kerja yang disediakan pemerintah, kurangnya lapangan pekerjaan dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka.

Sebagaimana dijelaskan di atas, permasalahan pembangunan ekonomi adalah permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, khususnya yang bermuara pada rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui analisis yang telah dilakukan dapat diketahui beberapa permasalahan pembangunan ekonomi Kabupaten Kebumen yang secara rinci digambarkan pada Gambar berikut.

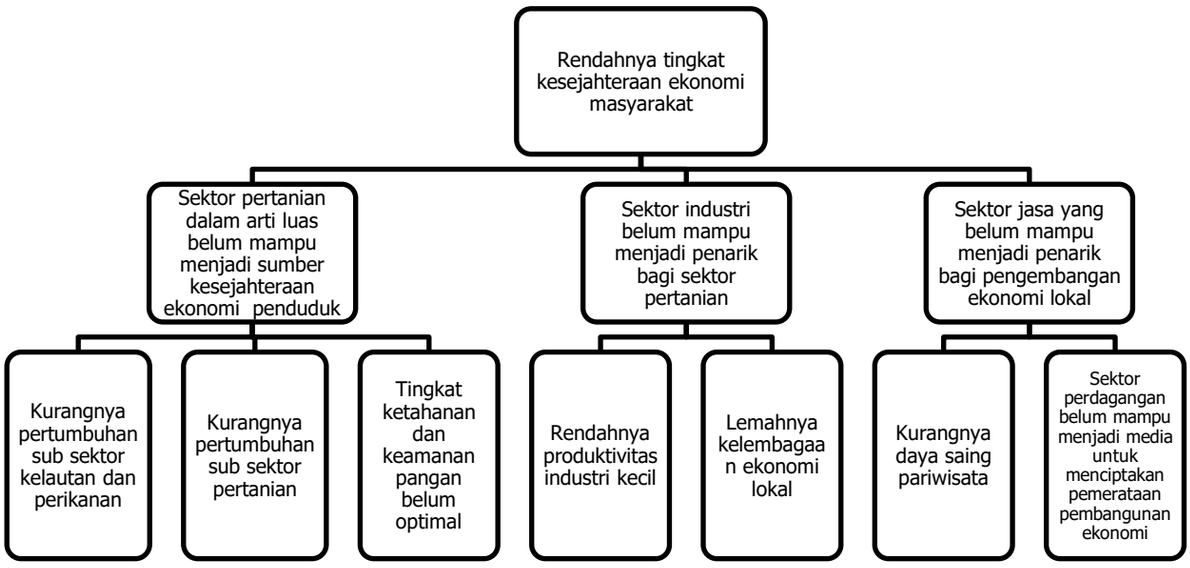

Sumber : Analisis Penyusun, 2021

Gambar 4.2
Permasalahan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kebumen

Secara umum, penyebab rendahnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dibagi ke dalam tiga sektor yaitu sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri serta sektor jasa. Permasalahan pada masing-masing sektor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sektor pertanian dalam arti luas belum mampu menjadi sumber kesejahteraan ekonomi penduduk

Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan ciri khas agraris dimana mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Pada tahun 2020, proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam arti luas mencapai 32,4%, tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Meskipun sektor pertanian menjadi sektor pekerjaan dominan, namun sektor ini belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi bagi penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa sektor pertanian belum bisa memberikan kesejahteraan ekonomi bagi petani adalah rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang hanya berkisar pada angka 100. Angka yang mendekati impas dapat diartikan bahwa sektor pertanian relatif belum bisa memberikan keuntungan bagi petani.

Secara struktur, meskipun perekonomian masih sedikit didominasi oleh sektor pertanian, namun setiap tahun peranannya cenderung menurun yang menunjukkan terjadinya peralihan baik ke sektor sekunder maupun tersier. Penurunan peranan ini dipengaruhi adanya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas yaitu subsektor pertanian maupun subsektor kelautan dan perikanan yang cenderung stagnan, melambat atau bahkan negatif.

a) Kurangnya pertumbuhan subsektor pertanian

Kurangnya pertumbuhan subsektor pertanian dipengaruhi adanya beberapa permasalahan seperti skala usaha yang tidak memenuhi skala ekonomis, rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah produk serta kurangnya manajemen usaha dan akses pemasaran. Saat ini, tingkat kepemilikan lahan pertanian di Kabupaten Kebumen hanya mencapai 0,23 ha per petani, masih sangat jauh dari kriteria dimana untuk memenuhi kebutuhannya secara layak, minimal setiap petani mengelola lahan seluas 2 ha. Permasalahan kurangnya kepemilikan lahan pertanian masih ditambah dengan masih rendahnya produktivitas jika dibandingkan dengan potensi lahan. Rendahnya produktivitas dipengaruhi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna, pengaruh iklim dan cuaca serta menurunnya kualitas lahan.

Kondisi keterbatasan lahan dan produktivitas lahan yang kurang optimal, masih diperparah dengan rendahnya nilai tambah produk pertanian yang ada. Mayoritas petani di Kabupaten Kebumen menanam komoditas tanaman pangan yang memiliki nilai tambah paling rendah dibandingkan komoditas pertanian lainnya. Selain itu, perilaku petani yang belum terbiasa mengolah produknya dan hanya menjual dalam bentuk dasar/mentah menyebabkan hilangnya potensi pendapatan petani atas produk tersebut. Hal ini sangat terkait dengan kurangnya manajemen usaha serta sulitnya akses pemasaran produk petani.

b) Kurangnya pertumbuhan subsektor kelautan dan perikanan

Pada sektor perikanan dan kelautan, nilai tambah tidak menjadi masalah utama, khususnya pada komoditas perikanan tangkap. Hal ini dibuktikan dengan tingginya Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang meskipun berfluktuasi namun lebih tinggi dari NTP. Nilai Tukar Nelayan tahun 2020 sebesar 102,24 dan Nilai tukar Petani tahun 2020 sebesar 101,79. Kurangnya pertumbuhan pada subsektor ini lebih banyak dipengaruhi kurangnya pemanfaatan potensi yang ada, dimana produksi saat ini masih lebih rendah daripada potensi tangkapan di laut maupun luasan lahan budidaya yang tersedia. Mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Kabupaten Kebumen masuk dalam WPP RI 573. WPP RI 573 ini memiliki potensi sebesar 1.267.540 ton, namun masih ada beberapa komoditas yang tingkat pemanfaatannya belum optimal. Pada sektor perikanan budidaya, tingkat pemanfaatan baru mencapai 4,27% dimana dari potensi seluas 6.788,85 Ha baru dimanfaatkan sebesar 289,61 Ha. Kemudian dari lahan yang sudah dikelola khususnya lahan tambak, masih terjadi ketidaktertiban dimana dari 497 petak tambak yang ada saat ini, baru 25 petak yang telah tertata sehingga masih ada 472 petak tambak yang belum tertata.

Sebagaimana penyebab masalah di sektor pertanian, kurangnya pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan juga dipengaruhi kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, terutama pada perikanan tangkap yang cenderung padat modal. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna, pengaruh iklim dan cuaca, skala budidaya yang kecil, adanya komoditas perikanan budidaya juga belum cukup memiliki nilai tambah serta manajemen usaha yang kurang baik juga menjadi beberapa hal yang perlu diselesaikan (data permasalahan kelautan dan perikanan pada Bab II).

c) Tingkat ketahanan dan keamanan pangan belum optimal

Belum optimalnya pertumbuhan sektor pertanian sedikit banyak akan berhubungan dengan ketahanan pangan, yang juga menjadi aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi ketersediaan pangan utama, saat ini tidak menjadi masalah daerah karena Kabupaten Kebumen merupakan wilayah lumbung pangan dengan surplus produksi beras. Akan tetapi, tingkat kerawanan pangan merupakan indikator yang sangat mudah berubah baik karena faktor internal maupun eksternal, terbukti dengan tingginya fluktuasi jumlah desa rawan pangan setiap tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, fluktuasi harga pangan juga menjadi permasalahan tersendiri, terutama pada komoditas pangan yang belum bisa diproduksi sendiri oleh daerah. Selain dari sisi kuantitas, kualitas konsumsi pangan juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan keamanan produk pangan serta pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang yang masih perlu didorong. Kurangnya tingkat keamanan produk pangan ditandai dengan masih ditemukannya peredaran bahan pangan segar yang mengandung bahan berbahaya (pestisida).

2) Sektor industri belum mampu menjadi penarik bagi sektor pertanian

Sektor industri di Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada lima tahun terakhir, peranan sektor ini mengalami peningkatan peranan hampir 1,42%, tertinggi di antara sektor lainnya. Sebagai perbandingan, sektor pertanian yang merupakan sektor dengan peranan terbesar justru mengalami penurunan kontribusi hingga 2,88%. Idealnya, pertumbuhan sektor industri diharapkan mampu menjadi sektor penarik bagi sektor pertanian. Sebagai sektor hilir, sektor industri diharapkan mampu menyerap output yang dihasilkan oleh sektor-sektor hulu yaitu sektor pertanian. Namun tingginya perkembangan sektor industri tidak diikuti penyerapan output pada sektor primer.

a) Rendahnya produktivitas industri kecil

Industri Kabupaten Kebumen yang masih didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM), mayoritas masih menggunakan metode dan sarana sederhana dalam pengolahan produknya yang berakibat pada rendahnya produktivitas industri. IKM yang banyak berkembang adalah industri makanan dan kriya di mana sebagian bahan bakunya merupakan output dari sektor pertanian. Namum demikian sektor industri agro khususnya yang merancang dan menyediakan peralatan untuk mendukung kegiatan proses industri tersebut belum berkembang dengan baik. Industri yang berkembang masih dalam skala industri kecil, yang memerlukan bahan baku dari sektor pertanian dalam jumlah yang sedikit. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha pada sektor pertanian masih kesulitan melakukan pemasaran produknya. Oleh karena itu Pemerintah perlu mendorong pengembangan agroindustri menjadi sesuatu yang strategis mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Kebumen masih bergantung pada sektor pertanian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah sehingga sangat perlu didukung oleh sektor-sektor lainnya.

b) Lemahnya kelembagaan ekonomi lokal

Selain itu, rendahnya produktivitas juga dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas kelembagaan ekonomi lokal yang berakibat pada manajemen usaha yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kekompakan antar pelaku IKM, misalnya tidak adanya kesepakatan harga antar pelaku IKM sehingga harganya mudah dipermainkan oleh pengepul. Di sisi lain kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha industri, koperasi maupun UMKM juga masih sangat rendah. Kurang dari 1 persen usaha yang sudah mendapatkan pembinaan, sementara itu hasil pembinaan juga masih kurang memuaskan dilihat dari kinerja peningkatan kelas UMKM maupun omset koperasi yang telah mendapatkan pembinaan.

Peran BUMDesa sebagai penggerak ekonomi masyarakat khususnya industri kecil dan menengah (IKM) masih belum optimal, dari 449 desa terdapat 389 BUMDesa namun baru hanya 2 BUMDesa yang masuk dalam klasifikasi maju, ada 17 BUMDesa yang masuk klasifikasi berkembang, dan sisanya masih dalam tahap dasar dan tumbuh. Sebagian besar BUMDesa yang sudah terbentuk belum bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. BUMDesa yang dibentuk masih dalam tahap awal, belum mempunyai perencanaan bisnis, dan belum sepenuhnya mampu menggali potensi yang dimiliki oleh desa. Disisi lain sebagian besar jenis usaha BUMDesa yang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa, justru terkadang menjadi pesaing usaha yang dikelola oleh masyarakat.

3) Sektor jasa yang belum mampu menjadi penarik bagi pengembangan ekonomi lokal

Sama halnya dengan sektor industri, sektor jasa juga mengalami pertumbuhan positif, namun belum mampu menjadi penarik pengembangan ekonomi lokal. Sektor jasa utama yang berkembang di Kabupaten Kebumen berasal dari aktivitas perdagangan dan pariwisata.

a) Kurangnya daya saing pariwisata

Kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen pada lima tahun terakhir, secara umum menunjukkan masih kurangnya daya saing pariwisata. Meskipun angka kunjungan wisata selalu mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019, tetapi lama kunjungan wisata pada tahun 2019 baru mencapai angka 1,03. Lama kunjungan wisata berpengaruh pada jumlah uang yang dibelanjakan di destinasi wisata. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan didaerah tujuan wisata tersebut paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Demikian pula sebaliknya. Sehingga masih kurangnya lama kunjungan wisata di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi penarik bagi pengembangan ekonomi lokal.

Pada aspek industri pariwisata, sudah cukup banyak lembaga pariwisata, namun yang memiliki sertifikasi masih terbatas. Dari 670 Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang terdata di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen 85 usaha sudah mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan 2 usaha yang sudah mendapatkan Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, sehingga dapat dikatakan kualitas usaha jasa dan sarana pariwisata masih rendah dan kurang berdaya saing karena rendahnya usaha yang terakreditasi oleh Asesor yang berkompeten. Destinasi pariwisata di Kabupaten Kebumen cukup banyak, namun demikian, akses ke lokasi wisata dan kondisi destinasi yang kurang terawat menciptakan keengganan wisatawan untuk berkunjung. Pemanfaatan teknologi dinformasi untuk pemasaran pariwisata juga masih harus ditingkatkan. Pokdarwis mewakili kelembagaan pariwisata telah banyak terbentuk, namun demikian kemampuan kelembagaan pariwisata saat ini belum mampu mengungkit aktivitas pariwisata yang menciptakan multiplier bagi perekonomian lokal.

b) Sektor perdagangan belum mampu menjadi media untuk menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi

Dalam aktivitas perdagangan, di Kabupaten Kebumen masih banyak ditemui komoditas yang berasal dari luar daerah. Hal ini didukung dengan adanya data *net* ekspor yang selalu berada pada posisi negatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Angka negatif tersebut menunjukkan bahwa nilai komoditas yang diimpor dari daerah lain jauh lebih besar daripada nilai komoditas yang diekspor ke daerah lain.

Permasalahan sektor perdagangan yang belum mampu menjadi penarik bagi pengembangan ekonomi lokal disebabkan karena belum optimalnya kondisi sarana perdagangan. Masih terdapat 20% pasar dalam kondisi rusak maupun rusak berat. Disisi lain, inflasi sebagai indikator dari efisiensi perdagangan cukup baik, namun demikian hal ini tidak tercermin di wilayah pedesaan. Harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi, di sisi lain harga produk pertanian yang dihasilkan petani tidak stabil. Selain itu tidak adanya produsen maupun distributor untuk beberapa komoditas kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan terjadinya volatilitas harga beberapa

komoditas. Selain harga yang mudah berfluktuasi, juga terjadi disparitas harga di beberapa wilayah.

Perkembangan sektor ekonomi pada akhirnya sangat bergantung pada investasi masing-masing sektor. Dari analisis pada BAB II dapat diketahui bahwa investasi terbesar mengalir ke sektor perdagangan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, investasi di sektor perdagangan rata-rata sebesar 44,92% dari total investasi yang masuk ke Kabupaten Kebumen. Investasi hanya akan hadir jika sektor bersangkutan menjanjikan cukup insentif. Arah investasi ini memberikan informasi tidak menariknya sektor sekunder apalagi sektor primer. Tidak mengherankan jika kemudian sektor primer tidak mampu tumbuh dan berkembang, dan akhirnya menjadi lingkaran setan.

Berdasarkan analisa permasalahan pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Permasalahan Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Kebumen

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1	Sosial	Pengelolaan (verifikasi dan validasi) data kemiskinan belum optimal
		Kinerja potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) masih belum optimal dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial
		Pencapaian SPM Sosial belum maksimal
2	Pangan	Masih adanya desa rawan pangan yang jumlahnya fluktuatif setiap tahun
		Masih adanya fluktuasi harga pangan terutama pada komoditas pangan yang belum bisa diproduksi sendiri oleh daerah
		Kualitas konsumsi pangan terutama terkait dengan keamanan produk pangan serta pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang belum optimal
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kontribusi BUMDes terhadap perekonomian desa masih belum optimal maka perlu peningkatan status klasifikasi BUMDes
		Masih rendahnya indeks desa membangun sebagai salah satu indikator kemandirian desa
4	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha industri, koperasi maupun UMKM belum optimal
		Hasil pembinaan yang dilakukan masih kurang memuaskan dilihat dari peningkatan kelas UMKM maupun omset koperasi yang telah mendapatkan pembinaan
		Rendahnya kapasitas dan pendidikan pelaku usaha yang berakibat pada permasalahan permodalan dan kurangnya jiwa kewirausahaan
		Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan belum memenuhi standar, kurangnya inovasi produk serta lemahnya jaringan pemasaran
		Pelaku UMKM masih kesulitan membuka akses pasar
6	Penanaman Modal	Investasi di Kabupaten Kebumen belum mampu menyerap tenaga kerja dengan optimal
		Sebagian besar investasi yang masuk berupa proyek infrastruktur dan bukan investasi yang bersifat usaha kontinyu
7	Kelautan dan Perikanan	Masih rendahnya nilai tambah produk kelautan dan perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
		Masih kurang optimalnya manajemen usaha dan akses pemasaran
		Skala usaha yang tidak memenuhi skala ekonomis
		Kurangnya tingkat produktivitas usaha kelautan dan perikanan
8	Pariwisata	Masih rendahnya daya saing pariwisata
		Masih rendahnya kualitas dan daya saing usaha jasa dan sarana pariwisata karena rendahnya usaha yang terakreditasi
		Akses ke lokasi wisata dan kondisi destinasi yang kurang terawat menciptakan keengganan wisatawan untuk berkunjung
		Inovasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran pariwisata kurang optimal
		Kemampuan kelembagaan pariwisata saat ini belum mampu mengungkit aktivitas pariwisata yang menciptakan multiplier bagi perekonomian lokal
9	Pertanian	Masih rendahnya nilai tambah produk pertanian
		Masih kurang optimalnya manajemen usaha dan akses pemasaran
		skala usaha yang tidak memenuhi skala ekonomis
		Kurangnya tingkat produktivitas usaha pertanian
10	Perdagangan	Belum optimalnya pengendalian harga komoditas di pasar
		Panjangnya rantai distribusi perdagangan
		Masih terdapat disparitas harga di beberapa wilayah
		Masih rendahnya akses permodalan yang dimiliki oleh pedagang
11	Perindustrian	Masih rendahnya produktivitas industri, mayoritas masih menggunakan teknologi dan sarana sederhana dalam pengolahan produknya
		Lemahnya kapasitas kelembagaan ekonomi lokal yang berakibat pada manajemen usaha yang kurang baik

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

4.1.3 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta perhubungan di Kabupaten Kebumen masih banyak kekurangan dan memerlukan penanganan. Banyaknya beban infrastruktur yang harus ditangani tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya dan anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan koordinasi dan pembahasan perencanaan yang baik secara teknis dan pembiayaan sesuai skala prioritas. Rencana pembangunan infrastruktur harus dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat agar dapat tepat sasaran, menimbulkan rasa memiliki dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat. Selain itu, infrastruktur yang sudah ada, juga harus dirawat dengan baik agar dapat digunakan untuk kepentingan umum dengan lebih optimal.

Lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan mutu dan kerusakan. Kerusakan lingkungan hidup ada berbagai bentuk, di antaranya kerusakan ekosistem, pencemaran air, tanah, udara, hutan gundul (lahan kritis), hingga tanah tandus. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan dua faktor, yakni akibat ulah manusia tak bertanggungjawab dan akibat peristiwa alam. Lingkungan hidup perlu kita lestarikan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia. Aktivitas manusia, eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup Kabupaten Kebumen secara skematis dapat dilihat pada Gambar berikut.

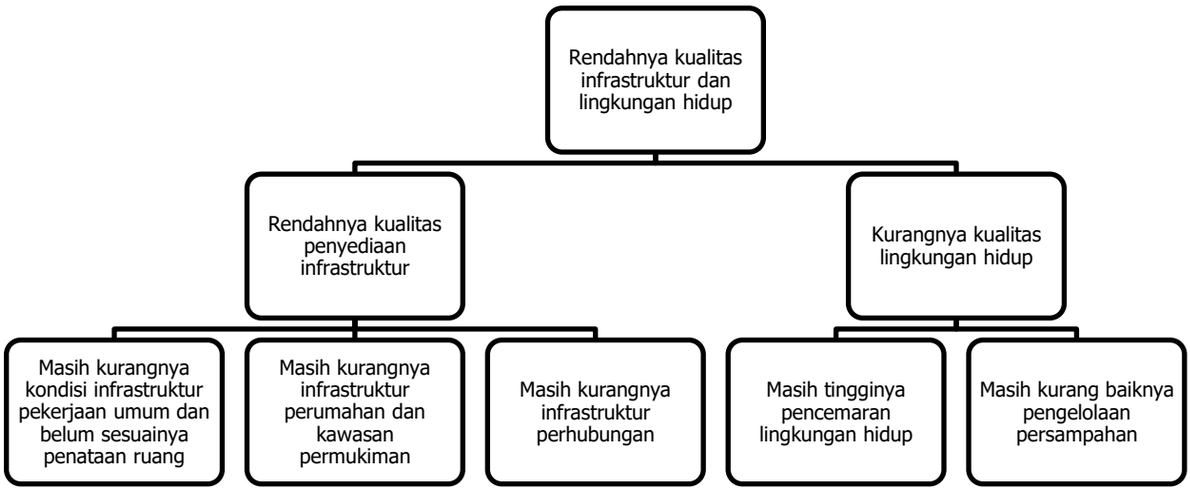

Sumber : Analisis Penyusun, 2021

Gambar 4.3
Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen

Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang tergambar pada Gambar 4.3 di atas, diperoleh penyebab rendahnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, yaitu:

1) Rendahnya kualitas penyediaan infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu pendukung perekonomian daerah. Rendahnya kualitas penyediaan infrastruktur dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Jaringan prasarana jalan, sumber daya air dan transportasi/perhubungan masih belum tertangani dengan baik dan perlu ditingkatkan kualitasnya.

Infrastruktur jalan kewenangan kabupaten yang masih belum mantap dapat mengganggu akses transportasi. Infrastruktur jalan nasional dan provinsi juga perlu dikoordinasikan dan dimanfaatkan dengan baik, agar dapat digunakan sebagai peluang pendorong aktivitas ekonomi Kabupaten Kebumen. Kemudahan akses Kabupaten Kebumen melalui jaringan prasarana jalan nasional dari Prembun s.d. Rowokele, jalan prioritas nasional Pantai Selatan Jawa (JJLS) dan jalur ganda (*double track*) kereta api diharapkan dapat mendorong meningkatnya investasi industri strategis, memperkuat konektivitas dan sistem logistik di selatan Pulau Jawa dan pengembangan sektor kepariwisataan.

Jaringan sistem sumber daya air untuk irigasi pertanian juga perlu ditingkatkan. Daerah irigasi kewenangan kabupaten yang rusak perlu dibangun, direhab dan diperbaiki. Daerah irigasi kewenangan pusat yaitu Sempor dan Wadaslintang melalui tugas pembantuan layanan konkuren perlu dikelola dengan baik agar irigasi lancar dan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Jaringan transportasi/perhubungan kewenangan kabupaten, terminal, alat kelengkapan jalan yang rusak perlu diperbaiki dan ditingkatkan tata kelolanya. Konektivitas wilayah kabuaten juga harus memaksimalkan sarana prasarana transportasi kewenangan pusat seperti Terminal Tipe A Kebumen, Stasiun Kereta Api dan Bandara. Bandara *Yogyakarta International Airport* (*YIA*) di Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY harus dimanfaatkan potensinya untuk mendorong kelancaran transportasi

barang dan jasa serta pendorong sektor pariwisata melalui program promosi pariwisata guna menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Rendahnya kualitas penyediaan infrastruktur di Kabupaten Kebumen disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu:

a) Masih kurangnya kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan belum sesuainya penataan ruang

Infrastruktur pekerjaan umum merupakan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, maupun sarana dan prasarana penunjang. Kualitas infrastruktur pekerjaan umum di Kebumen masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi infrastruktur pekerjaan umum seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase yang belum mantap, serta akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang rendah.

Pada tahun 2020, masih terdapat 46,49% jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat). Adapun kondisi sebesar 6,56% jembatan rusak berat, daerah irigasi kewenangan kabupaten sebesar 23,69% dalam kondisi rusak berat, drainase kewenangan kabupaten 85% tidak berfungsi dengan baik, serta akses air minum perpipaan masih rendah di angka 15,36%. Penanganan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilakukan dengan bijaksana sesuai dengan skala prioritas antara lain karena penting dan mendesak, banyak digunakan untuk masyarakat umum (seperti jalan yang sudah padat kendaraan), serta yang dapat memberikan dampak luas terhadap perekonomian (seperti irigasi sawah produktif, jalan yang menghubungkan pusat aktivitas ekonomi dan menuju obyek wisata) dan pemenuhan infrastruktur dasar yang terkait dengan derajat kesehatan masyarakat (air bersih untuk daerah rawan air dan lokus stunting).

Kondisi penataan ruang di Kabupaten Kebumen juga masih kurang baik. Peraturan daerah Revisi RTRW belum selesai ditetapkan, masih dalam proses dan butuh percepatan. Dokumen tata ruang seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis masih banyak yang sampai pada tahapan dokumen materi teknis. Kabupaten Kebumen tengah dalam proses Revisi RTRW dalam rangka mewadahi perkembangan yang ada. Proses revisi RTRW dan KLHS RTRW telah mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Tengah dan selanjutnya akan diajukan ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan akan disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. RDTR perkotaan dan RDTR kawasan strategis kabupaten sangat mendesak untuk dikaji dan ditetapkan menjadi Perda/Perbup, dalam rangka kemudahan berusaha dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada Ruang Terbuka Hijau perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Selain itu juga diperlukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik.

b) Masih kurangnya infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan dan Kawasan permukiman tahun 2020 adalah terdapatnya *backlog* (selisih kepemilikan rumah dengan kebutuhan rumah) yang tinggi yaitu 64.093 unit, masih banyak rumah dalam kondisi tidak layak huni (RTLH) yang berdasarkan SK Bupati Kebumen Tahun 2014 masih terdapat 5.412 unit di tahun 2020, dan masih terdapat Kawasan kumuh perkotaan sebesar 290,92 hektar. Namun berdasarkan hasil pemutakhiran database perumahan Tahun 2020 terdapat

penambahan kebutuhan penanganan RTLH sebanyak 39.680 rumah atau sekitar 11,2%.

Angka *backlog* yang tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kepala keluarga akibat terbentuknya keluarga baru. Adapun RTLH yang tertangani di Kabupaten Kebumen masih berada di bawah target nasional. Penanganan kebutuhan rumah layak huni perlu diprioritaskan dalam rangka pemenuhan SPM bidang perumahan terutama untuk pembangunan rumah akibat bencana dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan kawasan kumuh perlu diprioritaskan untuk memenuhi target nasional, yaitu 0% kumuh.

c) Masih kurangnya infrastruktur perhubungan

Infrastruktur perhubungan di Kabupaten Kebumen masih perlu peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2020, jumlah rambu yang terpasang baru mencapai 30,08%, jumlah LPJU baru mencapai 35,03%, dan nilai cakupan rambu lalu-lintas dalam kondisi baik rata-rata sebesar 87,39%. Infrastruktur perhubungan yang baik diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas, menjaga ketertiban di jalan raya, dan mencegah terjadinya kemacetan.

Aksesibilitas lalu lintas antar ibukota Kecamatan yang telah dilalui trayek angkutan umum didominasi angkutan perdesaan yaitu sebesar 50,2%. Selain itu masih terdapat 3 kecamatan perkotaan yang belum tersedia terminal yaitu Karanganyar, Prembun dan Kutowinangun. Sektor perhubungan juga menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak penurunan ekonomi paling parah akibat pandemi Covid-19 dan terjadinya perubahan trend moda transportasi masa kini (penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan *online*).

Urusan perhubungan juga memiliki masalah beban kerja pelayanan dalam pengujian transportasi umum (angkutan barang dan angkutan umum penumpang) yang terus meningkat yaitu sebanyak 6.678 unit kendaraan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 7.206 unit kendaraan pada tahun, sehingga membutuhkan pemeliharaan alat uji kir agar selalu bekerja dengan optimal. Pelayanan ini perlu diprioritaskan penanganannya karena menjamin keamanan moda transportasi dan dapat memberikan pendapatan asli daerah.

2) Kurangnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang kinerjanya cenderung meningkat pada kurun waktu 2016-2019, namun indeks kualitas lingkungan hidup menurun pada tahun 2020. Penurunan dikarenakan kerusakan alam akibat perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab dalam mengolah sumber daya alam. Untuk itu perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup untuk meminimalisir dan mencegah serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

Masih kurangnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu:

a) Masih tingginya pencemaran lingkungan hidup

Tingginya pencemaran lingkungan hidup dapat dilihat dari indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Indeks kualitas air semakin meningkat pada tahun 2016 sebesar 51,25 menjadi 63,33, namun menurun pada tahun 2020 menjadi 57,69. Penurunan kualitas air dikarenakan terjadi penurunan curah hujan pada tahun 2020, sehingga cadangan air baku dalam tanah berkurang. Perlu upaya peningkatan indeks kualitas air. Kualitas air permukaan yang menurun meski masih berada di jangkauan target

berkaitan juga dengan kondisi lahan kritis yang belum tertangani. Banyak terdapat industri kecil yang belum memiliki IPAL sehingga limbahnya langsung dibuang ke tanah atau mengalir ke sungai menyebabkan pencemaran, termasuk juga limbah domestik rumah tangga.

Kualitas udara Kabupaten Kebumen cukup baik pada tahun 2016 kualitas udara sebesar 75 dan menjadi 90,72 pada tahun 2020. Namun upaya pengendalian pencemaran udara perlu terus dioptimalkan mengingat semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi mencemari udara melalui penataan ruang terbuka hijau, hutan kota, dan kampanye lingkungan hidup melalui ajang *car free day*. Sedimentasi sebagian besar sungai dapat meningkatkan risiko banjir. Daya dukung lingkungan yang semakin menurun, sangat membutuhkan perbaikan lingkungan/hutan. Adanya indikasi rendahnya kualitas lingkungan terbukti dari kualitas lingkungan yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan (meningkatnya pencemaran air dan udara). Hal tersebut diindikasikan dari sejumlah sungai di Kabupaten Kebumen yang dipantau kualitas airnya didapatkan 50% dari sungai yang dipantau tersebut dalam keadaan tercemar.

b) Masih kurang baiknya pengelolaan persampahan

Belum optimalnya pengelolaan persampahan disebabkan oleh berbagai faktor. Terbatasnya infrastruktur persampahan (kapasitas TPA dan armada pengangkutan) menjadi salah satu aspek utama dalam pengelolaan persampahan. Selain itu kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam upaya pengurangan dan pengolahan sampah menjadi hal yang paling berimbas pada upaya-upaya pengurangan sampah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah volume sampah di Kabupaten Kebumen meningkat menjadi 633,42 m3 dari tahun sebelumnya sebesar 610,84 m3.

Berdasarkan analisa permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup dapat dikelompokkan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kualitas infrastruktur pekerjaan umum di Kebumen masih terbilang rendah dilihat dari adanya kondisi infrastruktur pekerjaan umum seperti jalan, jembatan dan irigasi yang belum mantap
		Perlunya menuntaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perkotaan
		Perlunya penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis kabupaten
		Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada Ruang Terbuka Hijau perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
		Keterbatasan aksesibilitas air minum perpipaan dengan standar aman belum mencapai 30%
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Masih banyaknya rumah tidak layak huni terutama masyarakat berpenghasilan rendah
		Masih terdapatnya kawasan kumuh
		Keterbatasan aksesibilitas sanitasi aman belum mencapai

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
		20%
3	Lingkungan Hidup	Masih tingginya pencemaran lingkungan hidup
		Persentase pengurangan sampah belum mencapai 30%
4	Perhubungan	Masih diperlukan peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan transportasi di Kabupaten Kebumen khususnya prasarana dalam mendukung keselamatan transportasi

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

4.1.4 Tata Kelola Pemerintahan

Tatakelola Pemerintahan yang baik menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) atau yang dikenal dengan istilah *Good Governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus selalu diupayakan agar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) terwujud. Salah satu strategi yang telah dilakukan untuk mewujudkan *clean and good governance* adalah reformasi birokrasi. Menurut Eddy Cahyono Sugiarto (2020), perjalanan panjang reformasi birokrasi di Indonesia kini telah memasuki fase ketiga atau fase terakhir dari peta jalan reformasi birokrasi, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Fase terakhir ini akan sangat menentukan keberhasilan peta jalan perubahan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju negara adil dan makmur serta sejahtera, dengan prakondisi terbangunnya birokrasi yang berkelas dunia, yaitu birokrasi yang baik dan bersih (*good and clean bureaucracy*).

Reformasi Birokrasi merupakan suatu keniscayaan dalam upaya membangun birokrasi kelas dunia, utamanya dalam mempersiapkan langkah strategis yang terukur guna memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka menopang jalannya pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Dengan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, maka diyakini akan mampu berperan menjadi faktor pengungkit dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Dengan kata lain, semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam peta jalan (*roadmap)* reformasi birokrasi fase ketiga ini, pengelolaan reformasi birokrasi sejatinya dirancang dengan lebih mengutamakan empat asas utama yaitu fokus, prioritas, implementatif, dan kolaboratif.

Berbagai upaya terobosan telah dilakukan sebagai upaya meningkatkan adaptasi kontekstual masing-masing instansi pemerintah, yang terus berlomba-lomba menciptakan *value* baru di lingkungan instansinya masing-masing, kesemuanya diarahkan untuk tetap kondusif mendukung internalisasi perubahan *mind-set* (pemikiran) dan *cultural set* (budaya) dengan mengedepankan "*demand-based reform.*" Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mengembangkan/ membangun sistem pelayanan terintegrasi (Mal Pelayanan Publik), Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (*e-Services*), dan juga inovasi pelayanan publik lainnya.

Sementara itu dari sisi kelembagaan dan struktur juga telah dilakukan berbagai langkah reformasi agar birokrasi kita lebih cepat bergerak dan cepat dalam mengambil

keputusan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi yang diarahkan oleh pemerintah pusat antara lain menata ulang eselonisasi dengan penyederhanaan eselonisasi menjadi dua level saja, memperbanyak jabatan fungsional, serta lebih mengedepankan fungsi daripada struktur. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang lincah dan adaptif terhadap perubahan.

Reformasi birokrasi menjadi faktor pengungkit yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Daerah-daerah yang cenderung lebih cepat berkembang dan maju adalah daerah-daerah yang telah menerapkan dengan baik pelaksanaan reformasi birokrasi. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, serta dinamika masyarakat, dan peningkatan daya saing menjadi pendorong penerapan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi terbukti berdampak langsung kepada perbaikan kualitas kebijakan publik, transparansi untuk kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi mendorong terlaksananya pembangunan secara menyeluruh. Terwujudnya reformasi birokrasi juga dapat meyakinkan para investor untuk terus berinvestasi dan menanamkan modal di suatu daerah.

Kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat menggambarkan bagaimana kinerja tatakelola pemerintahan di daerah. Berdasarkan data yang tersaji pada Bab II, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 baru mencapai sebesar 58,40 dengan kategori CC. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tatakelola pemerintahan di Kabupaten Kebumen masih rendah. Ada beberapa aspek yang menyebabkan kondisi tersebut yaitu rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal, penerapan *e-government* yang belum optimal, kualitas pelayanan publik belum optimal serta stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum terjaga secara optimal.

Secara detail kerangka permasalahan tatakelola pemerintahan Kabupaten Kebumen terangkum dalam bagan berikut.

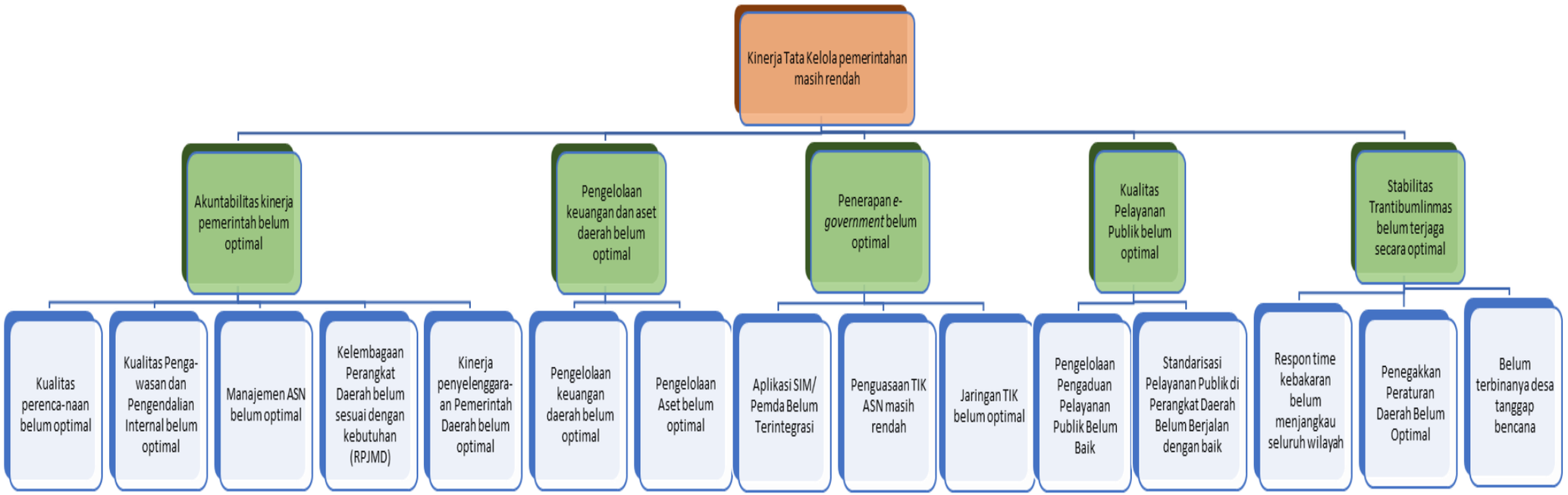

Sumber : Analisis Penyusun, 2021

Gambar 4.4
Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kebumen

1) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Belum Optimal

Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat direpresentasikan dengan hasil evaluasi SAKIP. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP tahun 2020 yang tersaji pada Bab II menunjukkan bahwa nilai SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kebumen masih rendah yaitu 61,85. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik namun masih perlu banyak perbaikan baik pada perencanaan, pengukuran kinerja, capaian kinerja, evaluasi maupun pelaporan.

Ada beberapa aspek yang menyebabkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Kebumen masih rendah. Pertama, kualitas perencanaan yang belum optimal, merujuk pada data yang ada di Bab II terlihat bahwa persentase konsistensi program pembangunan RPJMD terhadap RKPD masih sebesar 96,97 persen artinya masih ada inkonsistensi sebesar 3,03 persen. Di samping itu masih perlu penyempurnaan rumusan sasaran strategis, indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran terkait dengan relevansi, formulasi pengukuran, dan kecukupan indikator. Penjabaran kinerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat penanggungjawab program dan kegiatan, dan juga belum dilakukan sampai dengan tingkat individu pegawai sehingga keselarasan pengukuran antara kinerja individu dan kinerja organisasi belum terkawal dengan baik. Artinya pengukuran kinerja belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan. Perencanaan dalam tingkat perangkat daerah beberapa masih perlu disempurnakan terkait relevansi rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja. Pelaporan informasi kinerja masih perlu ditingkatkan terutama mengenai analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian target kinerja sebagai masukan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Kedua, kualitas pengawasan dan pengendalian internal belum optimal. Berdasarkan data pada Bab II terlihat bahwa nilai maturitas SPIP Kabupaten Kebumen sebesar 3. Di samping itu nilai unsur Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi juga masih cukup rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa rekomendasi hasil evaluasi belum ditindaklanjuti, belum adanya tindak lanjut terhadap evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan serta pemantauan belum didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi, *online*, dan *real time*. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baru sebatas monitoring capaian program dan kegiatan secara fisik dan serapan anggaran, belum berbasis capaian hasil (*outcome*) program serta keselarasan program dan kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi.

Ketiga, Manajemen Pengelolaan ASN belum optimal, merujuk data di bab II terlihat bahwa penempatan pejabat belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan ASN khususnya analisis kebutuhan dan penempatan SDM. Begitu pula evaluasi jabatan juga belum berdasarkan standar kompetensi jabatan dan ukuran kinerja belum sepenuhnya mengacu pada kinerja organisasi. Proses pengelolaan SDM tersebut sangat memengaruhi dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Keempat, Kelembagaan perangkat daerah belum sesuai dengan kebutuhan (RPJMD), masih ada sekitar 26,92 persen struktur kelembagaan yang belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa arsitektur kelembagaan belum sesuai dengan arsitektur perencanaan pembangunan daerah. Pembentukan struktur kelembagaan di Kabupaten

Kebumen belum sesuai dengan proses bisnis pembangunan daerah dalam RPJMD. Struktur kelembagaan merupakan sebuah kendaraan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proses pembangunan. Struktur kelembagaan yang tidak sesuai dengan proses bisnis pembangunan daerah mengakibatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menjadi belum optimal.

Kelima, Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum optimal yang dapat dilihat dari nilai EKPPD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 dari 3,22 pada tahun 2016 menjadi 3,31 pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah cenderung fluktuatif. Adanya temuan kasus tindak korupsi di Kabupaten Kebumen tahun 2018 memengaruhi proses kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Akibatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menjadi rendah.

2) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum optimal

Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan salah satu pendorong pencapaian kinerja tata kelola Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kinerja reformasi birokrasi maupun kinerja akuntabilitas pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan data yang ada di Bab II, kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah menunjukkan hasil yang positif walaupun belum optimal. Sejak tahun 2017 Kabupaten Kebumen berhasil mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Begitu pula realisasi pendapatan daerah yang terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan menurun pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Walaupun BPK memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan diantaranya dalam pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Temuan BPK juga menyampaikan bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini yang menyebabkan pengelolaan keuangan daerah belum optimal.

Pada sisi yang lain, manajemen pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kebumen masih memiliki berbagai kendala yaitu 47,10 persen aset pemerintah belum memiliki sertifikat dan beberapa aset pemerintah daerah juga belum jelas pemanfaatannya. Permasalahan aset ini disebabkan beberapa hal di antaranya pengelolaan aset daerah yang tidak jelas status hukumnya atau bersengketa, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur, serta adanya tukar-menukar aset. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Kebumen belum optimal. Akibatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset juga menjadi tidak optimal.

3) Penerapan *e-government* belum optimal

Di era keterbukaan tata kelola pemerintahan saat ini tidak hanya *good governance* yang ingin diwujudkan namun *smart governance*, maka dibutuhkan dukungan teknologi dan informasi beserta kecepatannya. Disrupsi teknologi dan digitalisasi data dalam tata kelola pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan. Namun sampai saat ini penerapan *e-government* di Kabupaten Kabumen yang belum optimal mengakibatkan kinerta tata kelola pemerintahan menjadi tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Evaluasi

SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit *(enabler)* dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pada tahun 2020, dari 3 (tiga) domain pembentuk indeks SPBE Kabupaten Kebumen, domain tata kelola menjadi domain yang nilainya paling rendah. Kelemahan Kabupaten Kebumen antara lain adanya layanan pada layanan manajemen kinerja, dokumentasi dan informasi hukum yang sudah direncanakan dan dianggarkan namun belum terlaksana. Pada aspek kebijakan internal tata Kelola, masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta ditingkatkan. Selain itu pada penggunaan aplikasi *open source* pada aspek tata Kelola belum ada integrasi, serta belum memiliki rencana induk SPBE.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini yaitu pertama, aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah belum terintegrasi. Sampai tahun 2020 telah banyak aplikasi *e-government* yang telah diterapkan pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Namun hampir sebagian besar aplikasi tersebut belum terintegrasi sehingga perangkat daerah masih harus menginput data di masing-masing aplikasi. Kedua, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Kebumen masih rendah. Hal ini terlihat dari data ASN yang memiliki kompetensi TIK baru sekitar 0,43 persen dari keseluruhan jumlah ASN yang ada. Persebarannya pun belum merata di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Ketiga, Jaringan TIK belum optimal. Berdasarkan data kondisi infrastruktur digital Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2020 terlihat baru terdapat 9,13% persen desa/kelurahan yang terkoneksi jaringan *fiber optic* dan *wireless*. Kondisi ini tentu saja akan menghambat penerapan *e-government* di Kabupaten Kebumen meskipun sebagia besar desa telah mengupayakan koneksi internet secara mandiri.

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan statistik ini adalah belum optimalnya penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan *update*. Koordinasi antarlembaga dan antar-OPD terkait data statistik ini juga belum berjalan secara optimal. Meskipun kewenangan terkait pengelolaan data statistik ini sudah dibagi dan diatur melalui peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja serta peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala.

4) Kualitas Pelayanan Publik yang Belum Optimal

Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut. Berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui media massa dan jejaring sosial dapat segera diproses, ditindaklanjuti dan diselesaikan. Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kinerja tata kelola pemerintahan.

Secara umum kondisi pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini terlihat bahwa masih ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Kabupaten Kebumen belum optimal diantaranya standarisasi pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen belum berjalan dengan baik. Beberapa perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik belum melaksanakan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari kinerja waktu penyelesaian sebagai unsur pembentuk pelayanan yang masih rendah. Begitu pula rata-rata tingkat penyelesaian pelayanan perizinan pada perangkat daerah di Kabupaten Kebumen relatif masih cukup panjang). Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Waktu pelayanan merupakan suatu unsur yang menjadi tolak ukur dari konsep pelayanan prima yang memprioritaskan kepuasan dalam pelayanan. Semakin pendek waktu yang diperlukan dalam pelayanan merupakan indikator utama dalam kepuasan masyarakat atas pelayanan. Rata-rata sistem pelayanan masih dilaksanakan secara manual dan seringkali pajabat pengampu memiliki banyak kepentingan sehingga tidak dapat menyelesaikan berkas administrasi pelayanan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini yang mengakibatkan standarisasi pelayanan publik belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Faktor kedua penyebab kualitas pelayanan publik belum optimal adalah pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang belum baik. Hasil survei persepsi pelayanan pada Bab II menunjukkan bahwa unsur respon memiliki nilai paling rendah. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Kebumen belum optimal. Respon pelayanan yang rendah di Kabupaten Kebumen lebih disebabkan karena kompetensi petugas pelayanan yang terbatas khususnya kemampuan komunikasi dan *responsiveness* dalam melayani pengaduan masyarakat.

5) Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Terjaga secara Optimal

Faktor eksternal yang memengaruhi kinerja tatakelola pemerintahan adalah kondisi stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat suatu daerah. Berdasarkan data yang tersaji pada Bab II, terlihat bahwa stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kebumen belum kondusif, karena masih terdapat angka kriminalitas. Bahkan jenis kasus narkoba cenderung tinggi. Sementara itu jumlah demonstrasi di Kabupaten Kebumen juga sangat fluktuatif, bahkan tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. Kondisi seperti ini secara tidak langsung akan memengaruhi proses kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Ada beberapa aspek yang menyebabkan stabilitas keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen belum terjaga secara optimal diantaranya penegakan peraturan daerah yang belum optimal. Adanya beberapa penolakan dari masyarakat merupakan salah satu penyebab peraturan daerah tersebut belum bisa dilaksanakan. Salah satu contoh konkritnya adalah Peraturan Daerah terkait retribusi pelayanan pasar, yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2019 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati pelaksanaannya pada akhir 2019, namun pada implementasinya di tahun 2020, terkendala karena adanya penolakan dari obyek sasaran retribusi pelayanan pasar tersebut. Terjadi tarik ulur dan negosiasi terhadap penerapan besaran tarif retribusi tersebut, sehingga potensi pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan tidak tercapai.

Aspek kedua adalah kualitas penyusunan produk hukum daerah yang belum optimal. Hal ini tercermin dari nilai unsur penataan perundang-undangan yang memiliki nilai terendah pada komponen Indeks Reformasi Birokrasi. Masih terdapatnya tumpang tindih peraturan perundangan-undangan di Organisasi Perangkat Daerah dan belum dilaksanakan evaluasi atas sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen menyebabkan kualitas penyusunan produk hukum daerah belum optimal. Akibat lebih lanjut seringkali muncul berbagai demontrasi terkait politik dan produk hukum tersebut. Kondisi yang belum stabil ini menyebabkan kinerja tata kelola pemerintahan menjadi tidak optimal.

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Trantibum, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama *respond time* kebakaran selama 15 menit khususnya untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun. Namun demikian, terdapat wilayah lain yaitu Ayah dan Sadang yang belum dapat memenuhi SPM *respond time* karena belum adanya pos damkar. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di dua tempat tersebut untuk memenuhi SPM *respond time* kebakaran 15 menit.

Pada aspek penanggulangan bencana dibentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Indikator kunci Desa Tangguh Bencana yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Berdasarkan analisa permasalahan tata Kelola pemerintahan dapat dikelompokkan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kebumen

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penegakan peraturan daerah yang belum optimal
		Masih adanya beberapa wilayah yang belum dapat memenuhi SPM *respond time* karena belum adanya pos damkar
		Belum terbinanya desa tangguh bencana
2	Komunikasi dan informatika	Aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah belum terintegrasi
		Masih rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Kebumen
		Jaringan TIK belum optimal
		Belum optimalnya pejabat pengelola informasi daerah
3	Persandian	Belum optimalnya pemanfaatan *digital signature* oleh perangkat daerah dan desa
4	Unsur Pendukung	Masih rendahnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Permasalahan
	Urusan Pemerintahan	
		Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
5	Keuangan	Belum optimalnya penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD)
		Belum optimalnya manajemen pengelolaan aset daerah
6	Kepegawaian	Belum optimalnya manajemen pengelolaan ASN
7	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
		Hiliriasasi hasil pengembangan dan perekayasaan dan inovasi belum optimal
8	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Belum optimalnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baru sebatas monitoring capaian program dan kegiatan secara fisik dan serapan anggaran, belum berbasis capaian hasil (outcome) program serta keselarasan program dan kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi
9	Unsur Pemerintahan Umum	stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum belum sepenuhnya kondusif

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

4.2. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis dapat diartikan sebagai situasi internal dan eksternal baik yang statis maupun dinamis yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Analisis lingkungan strategis bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya dan proses bisnis internal yang dimiliki suatu daerah dan mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang mungkin akan dihadapi suatu daerah terhadap perubahan lingkungan eksternal sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat dari berbagai peluang tersebut dan menghindar atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial yang muncul. Ruang lingkup lingkungan strategis mencakup lingkungan strategis internal dan eksternal.

Lingkungan internal daerah adalah lingkungan yang berada di dalam Kabupaten Kebumen, dimana Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadapnya. Lingkungan internal daerah terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah segala hal yang dimiliki Kabupaten Kebumen yang dapat meningkatkan pembangunan daerah, antara lain: geografis, demografi, sosial budaya Kabupaten Kebumen; kelembagaan yang ada di dalam Kabupaten Kebumen, seperti desa dan organisasi masyarakat; tata kelola pemerintahan; serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen, misalnya RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). Adapun kelemahan adalah segala hal yang dimiliki Kabupaten Kebumen yang dapat melemahkan pembangunan daerah. Kelemahan didapatkan dari hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Sementara itu, lingkungan eksternal daerah adalah lingkungan yang berada di luar Kabupaten Kebumen, dimana Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadapnya. Lingkungan eksternal daerah terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang adalah segala hal di luar kewenangan Kabupaten Kebumen yang dapat meningkatkan pembangunan Kabupaten Kebumen. Peluang dapat terdiri dari kebijakan di luar Kabupaten Kebumen baik kebijakan regional (misalnya: RPJMD Provinsi Jawa Tengah), nasional (misalnya: Visi Indonesia 2025,

RPJMN) maupun internasional (misalnya: *New Urban Agenda/ NUA, Sustainable Development Goals/ SDGs*). Adapun ancaman adalah segala hal di luar Kabupaten Kebumen yang dapat melemahkan pembangunan Kabupaten Kebumen, misalnya kondisi global yang melemahkan perekonomian dunia seperti adanya pandemi.

4.2.1 Lingkungan Internal

Konsep pembangunan suatu daerah dikembangkan melalui berbagai bidang seperti ekonomi, geografi, sosial dan politik. Pembangunan daerah pada umumnya mencakup berbagai dimensi pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap. Pembangunan daerah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan suatu proses perbaikan tatanan sosial, ekonomi, hukum, politik, lingkungan, yang bermuara pada kesejahteraan rakyat (*social welfare*). Tujuan tersebut dapat dicapai apabila daerah mempunyai kondisi yang dinamis untuk menghadapi persaingan sehingga konsep pembangunan pada suatu daerah harus tetap mengacu pada kondisi daerah itu sendiri. Untuk kepentingan tersebut, maka analisis internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki daerah sebagai modal pembangunan, serta kelemahan yang dapat menjadi penghambat pembangunan. Beberapa lingkungan internal yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pembangunan Kabupaten Kebumen ke depan adalah:

1) Posisi geografis dan geo-ekonomi daerah

Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 1.281,11 km dan terdiri dari 26 kecamatan. Dari luas wilayah tersebut, sebesar 31,09 persen luas wilayah merupakan lahan pertanian. Jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dibedakan atas tanah alluvial, latosol, podsolik, regosol, glei humus, alluvial kelabu dan mediteran coklat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen pada sebagian wilayahnya tergolong cukup subur, sehingga dapat difungsikan sebagai lahan pertanian, walaupun terdapat pula wilayah yang kurang subur untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian seperti yang terdapat di Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang, dan Alian (Bappeda Kab. Kebumen, 2004). Kecamatan-kecamatan ini terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Kebumen dan sebagian besar lahannya berupa pengunungan. Selain itu, Kabupaten Kebumen mempunyai sumberdaya yang besar untuk mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor unggulan, karena mempunyai 2 (dua) waduk yang cukup besar guna mengatasi masalah air. Kemampuan kedua waduk itu mampu mengairi areal persawahan seluas 38.000 ha. Dengan suplai air tersebut akan banyak komoditi pertanian yang bisa dikembangkan.

Pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar penduduk negara-negara berkembang berada di daerah pedesaan. Oleh karena itu harus segera dicarikan langkah-langkah penyelesaiannya guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah pedesaan. Perlu diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif, maka pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar. Meskipun pertumbuhan industri bisa berjalan, tetapi pertumbuhan tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian.

Menurut Sukirno (2002) di dalam perekomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali artinya. Sebagian besar produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Perkembangan ekonomi sedikit demi sedikit akan mengurangi

peranan sektor pertanian. Kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian antara lain disebabkan oleh permintaan terhadap hasil pertanian yang lambat perkembangannya.

Pertumbuhan pada lima sektor terbesar Kabupaten Kebumen dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa justru sektor pertanian perkembangannya tertinggal dibanding sektor lain seperti sektor pendidikan, industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa konstruksi. Sampai dengan tahun 2020, luas areal pertanian yang dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura maupun komoditas perkebunan masih relatif rendah dan perkembangannya cenderung stagnan. Faktor rendahnya pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya komoditas-komoditas bernilai tinggi tersebut tentu saja juga menjadi penghambat tumbuhnya sektor pertanian di Kabupaten Kebumen karena faktor yang memengaruhi produktivitas pertanian tidak saja letak geografis, luas wilayah, cuaca, dan iklim, tetapi juga sumberdaya manusia (petani, nelayan, peternak, dan lain-lain), tingkat pengetahun dan lain sebagainya. Ditinjau dari penyediaan sarana dan prasarana, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan petani masih sangat rendah, terutama untuk traktor (tingkat pemenuhan 38,89 persen) dan *handsprayer* (tingkat pemenuhan 6,07 persen). Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam upaya peningkatan produktivitas petani melalui mekanisasi pertanian.

Selain itu, Kabupaten Kebumen memiliki beberapa situs geosite di kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong yang telah menjadi objek edukasi (*geoeducation*) dan wisata (*geotourism*). Pada awalnya, sebagian besar *geosite* di bagian utara kawasan geopark tepatnya di Karangsambung, Sadang, dan Karanggayam, mempunyai fungsi untuk pembelajaran dan pengembangan edukasi kebumian khususnya bagi mahasiswa dan pelajar. Tetapi dengan semakin berkembangnya wisata alam, fungsi geosite bertambah menjadi fungsi wisata kebumian (geowisata). Bentang alam, jenis dan kelangkaan batuan menjadi daya tarik geowisata untuk masyarakat umum. Berbeda halnya dengan *geosite* yang berada di bagian selatan kawasan Geopark Karangsambung- Karangbolong, fungsinya lebih berkembang sebagai objek wisata alam. Hal ini tercermin dengan banyaknya kunjungan wisata dari berbagai kalangan, tidak hanya mahasiswa dan pelajar saja, tetapi masyarakat umum jauh lebih banyak berkunjung ketempat ini.

Situs budaya di Kabupaten Kebumen terbagi dalam budaya *tangible* (kasat mata) dan *intangible* (tak kasat mata). Situs budaya *tangible* di Kabupaten Kebumen sebagian merupakan benda cagar budaya yang dilindungi, sebagian lagi merupakan benda yang diakui memiliki nilai sejarah. Potensi situs budaya *intangible* (tak kasat mata) berupa kesenian, tarian khas Kebumen, dan lain-lain. Selain memiliki potensi pariwisata yang tinggi, aktivitas geologi di Karangsambung menyimpan beberapa permasalahan karena belum semua pemangku kepentingan yang berada dalam ranah ini memiliki *sense of belonging*. Aktivitas geologi masih bersifat elitis. Terlihat masyarakat lokal acuh terhadap praktik geologi yang berlangsung.

Dari analisis yang telah dilakukan atas data dan permasalahan pembangunan ekonomi, dapat diketahui bahwa masalah krusial yang masih dihadapi oleh kabupaten Kebumen adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sumber dari rendahnya kesejahteraan itu adalah karena belum terhubungnya sektor sekunder dan tersier dengan sektor primer. Keterputusan itu menyebabkan sektor sekunder dan tersier tidak mampu menarik sektor primer dimana penduduk banyak menggantungkan hidupnya.

Isu keterputusan antar sektor menjadi sangat strategis untuk dikemukakan. Untuk itu upaya untuk mencitakan keterkaitan antara sektor primer (pertanian) sekunder (industri) dan tersier (perdagangan dan jasa) harus menjadi arus utama kebijakan pembangunan ekonomi Kebumen. Perdagangan sebagai urat nadi dari arus barang dan jasa harus menjadi kunci untuk dilancarkan. Lancarnya arus perdagangan akan dengan cepat meningkatkan nilai tambah, baik produk konsumsi maupun produksi. Sejalan dengan itu maka pada sisi suplai penguatan kapasitas masing masing sektor, utamanya yang bergerak pada pengembangan ekonomi lokal juga menjadi strategis untuk dikemukakan. Penguatan kelembagaan ekonomi lokal diikuti dengan penguatan kapasitas kewirausahaan diharapkan akan menjadi pendorong bagi masing masing sektor untuk tumbuh dan menciptakan saling keterhubungan. Untuk membangun kekuatan kelembagaan ekonomi lokal, maka arus investasi juga diarahkan secara merata pada semua sektor. Adalah investasi yang menjadi sumber dari pertumbuhan yang terjadi. Namun investasi tidak akan hadir ketika sektor yang bersangkutan tidak menjanjikan insentif yang memadai.

2) Kondisi Demografi

Dinamika kependudukan (demografi), tidak hanya ditentukan dari sisi jumlah tetapi yang sangat menentukan adalah sisi kualitasnya/capaian tingkat pendidikan berdasar kelompok jenjang pendidikan tertentu. Struktur kependudukan Kabupaten Kebumen yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Namun angka putus sekolah mengalami peningkatan selama tahun 2016-2019 di jenjang SD/MI. Sementara pada jenjang SMP/MTs kembali mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, meskipun keduanya menurun pada tahun 2020, namun angkat putus sekolah masih ditemukan di Kabupaten Kebumen. Pasar tenaga kerja kemudian diisi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan tingkat kompetensi yang tidak memadai. Rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap angka sengketa pengusaha-pekerja karena tidak memiliki *bargaining position* (posisi tawar) yang baik.

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi didominasi oleh pekerja tidak sekolah/tidak tamat SD, SD, dan SMP sebesar 69,59 persen. Sedangkan 24,25 persen memiliki kualifikasi pendidikan menengah dan tinggi. Jika dipilah pada jenjang Pendidikan menengah maka penduduk bekerja dengan tingkat Pendidikan SMA sebesar 8,39%, dan SMK 15,86%. Jumlah sengketa pengusaha-pekerja meskipun jumlahnya tidak banyak namun kasusnya cenderung meningkat. Penduduk Bekerja menurut lapangan kerja utama masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan 32,4 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan restoran dan perhotelan 25,32 persen, serta sektor manufaktur 20,1 persen. Sektor-sektor tersebut berkarakter padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, namun kelemahannya sektor-sektor tersebut tidak memberikan upah yang layak. Kepatuhan penerapan UMK belum dapat terpenuhi.

Di sisi yang lain, ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator penting dalam menekan tingkat pengangguran terbuka. Beberapa permasalahan yang memengaruhi tingkat pengangguran adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Angkatan kerja yang ada sebagian besar tidak menguasai teknologi informasi, *mismatch* kompetensi dan kualifikasi jurusan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, sebagian besar angkatan kerja bekerja pada sektor informal, serta tingkat urbanisasi yang tinggi karena keterbatasan lapangan kerja dan masalah upah. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan

SMA/SMK sebanyak 62,79 persen dari total pengangguran terbuka atau 24.163 penduduk. Jika dipilah jumlah pengangguran SMA sebanyak 10,20 persen atau sejumlah 3.926 orang, SMK sebanyak 52,59 persen atau 20.237 orang. Hal ini menunjukkan kondisi pengangguran di Kabupaten Kebumen adalah pengangguran yang berpendidikan. Jika dilihat pada komposisi Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kelompok usia dapat dilihat jika di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu lima tahun rata-rata didominasi pada rentang usia 20-24 tahun sebesar 30,47%, 25-29 tahun sebesar 6,44%, dan 15-19 tahun sebesar 23,41%.

Pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Kebumen secara umum progres peningkatannya cukup baik, namun jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional masih jauh tertinggal. Peningkatan IPM yang cukup lambat pada komponen Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah menggambarkan pembangunan sumberdaya manusia belum optimal. Di sisi lain meskipun pertumbuhan komponen pengeluaran perkapita cukup bagus rata-rata pertumbuhannya namun angkanya masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, pengeluaran perkapita Kabupaten Kebumen masih sangat rendah sebesar Rp 8,9 juta /tahun.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen mencapai 73,40 tahun lebih baik jika dibandingkan dengan angka nasional walaupun berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah. Namun angka kesakitan baik penyakit menular utama maupun penyakit tidak menular di Kabupaten Kebumen tinggi. Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 21,52 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 20,19 persen. Tiga penyakit menular utama yang cukup signifikan adalah temuan kasus baru HIV, TB dan DBD, sedangkan penyakit tidak menular utama dengan kasus yang cukup tinggi adalah Diabetes Melitus, hipertensi, asma, dan kanker yang cenderung meningkat kasusnya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Selain itu kinerja AKI, AKB dan penanganan stunting memengaruhi lambatnya peningkatan angka harapan hidup. Beberapa isu peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat adalah pada sektor kesehatan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu pencapaian *universal health coverage* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Persentase kepemilikan jaminan kesehatan di Kabupaten Kebumen sebesar 82,62 persen pada tahun 2020. Namun berdasarkan data Susenas tahun 2020 sebesar 47,97 persen penduduk yang mengalami kesulitan kesehatan justru tidak menggunakan jaminan kesehatan yang dimiliki.

Secara umum fasilitas pelayanan kesehatan yang ada cukup memadai, namun rasio sumberdaya manusia kesehatan, sarana/prasarana pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum memenuhi standar ideal. Tantangannya kemudian adalah optimalisasi pelayanan kesehatan dasar dengan jaringan yang telah terbangun hingga level desa seperti bidan desa, PKD untuk meningkatkan promosi kesehatan, penggalakan GERMAS dan PHBS, penerapan pola asuh dan edukasi pemenuhan gizi mulai dari 1000 HPK menjadi titik awal penyiapan SDM berkualitas perlu dioptimalkan mengingat kesadaran masyarakat akan penerapan pola hidup bersih dan sehat masih kurang.

3) Lingkungan Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya di Kabupaten Kebumen, antara lain juga masih ditunjukkan oleh tingginya persentase penduduk miskin. Kemiskinan di Kebumen sampai tahun 2020 sebesar 17,59 persen, bila dibandingkan dengan angka kemiskinan di kabupaten-kabupaten tetangga, Jawa Tengah dan Nasional angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen tercatat paling tinggi se-Jawa Tengah. Beberapa upaya telah dilakukan Kabupaten Kebumen untuk menekan angka kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, bantuan sosial, maupun pemberian stimulus ekonomi. Namun demikian akselerasi penurunan tingkat kemiskinan masih belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah.

Karakteristik penduduk dengan 40 persen penduduk pendapatan terbawah antara lain sebagian besar angkatan kerja bekerja tidak penuh atau paruh waktu, bekerja pada sektor pertanian, perikanan, petani dengan lahan garapan yang sempit bahkan sebagai petani penggarap yang tidak punya lahan, serta bekerja pada sektor informal. Rendahnya akses pelayanan dasar baik pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan, serta rendahnya akses permodalan dan kesempatan berusaha menjadikan masyarakat tidak memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang layak. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang dominan PDRB Kabupaten Kebumen. Sektor ini memiliki karakteristik padat karya, namun upah yang rendah atau lahan yang tidak cukup luas dan nilai tukar petani yang kecil mengakibatkan sebagian penduduk miskin Kabupaten Kebumen adalah petani. Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian menjadi penting dalam upaya peningkatan pendapatan petani Kabupaten Kebumen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami tren positif, namun pada tahun 2019-2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat menjadi 2,58 pada tahun 2019 dan 2,62 pada tahun 2020. Artinya jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin jauh, peningkatan garis kemiskinan tidak diikuti peningkatan pendapatan secara linier. Demikian halnya dengan ketimpangan pendapatan antara masyarakat miskin dalam 3 tahun terakhir mengalami tren positif namun ketimpangan kembali meningkat pada tahun 0,65 persen pada tahun 2019 meskipun menurun pada tahun 2020 menjadi 0,55 namun masih menunjukkan ketimpangan antara masyarakat miskin. Pandemi COVID-19 diasumsikan akan memperparah kondisi kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan data struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga yang dirilis oleh BPS pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Kebumen 48,05 persen konsumsinya adalah untuk makanan dan minuman, 20,56 persen untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya, serta 10,9 persen untuk perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan.

Berdasarkan data penanganan PMKS tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja pelayanan yang positif. Pada tahun 2018 persentase PMKS yang tertangani sebesar 60,99 persen dan meningkat menjadi 70,65 persen pada tahun 2019 dan Kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 96,12%. Jumlah PMKS yang meningkat antara lain perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan keluarga bermasalah sosial psikologis.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial diharapkan dapat membantu menangani masalah kesejahteraan sosial. Namun, jika dibandingkan dengan penyandang masalah kesejahteraan yang cukup besar jumlah PSKS yang dimiliki di

Kabupaten Kebumen belum cukup memadai. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dimiliki sebesar 93 orang, tagana 50 orang, pendamping PKH 257 orang.

Persoalan ketimpangan gender terdapat dalam setiap apek kehidupan bermasyarakat, mulai dari struktur sosial, politik, ekonomi, dan kultur masyarakat. Realita kondisi sosial-budaya, interpretasi agama dan kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan di masyarakat selama ini tidak menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki. Tingkat kekerasan pada perempuan dan anak cenderung di Kabupaten Kebumen meningkat. Sistem perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan anak telah dirintis di Kabupaten Kebumen melalui P2TP2A yang jaringannya dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait sampai level desa. Namun, rendahnya keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus yang terjadi di sekitarnya menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es.

4) Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen adalah kinerja tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal tersebut yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah masih rendah, kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, penerapan e-government belum optimal, kualitas pelayanan publik belum optimal serta stabilitas keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum terjaga secara optimal.

Pada sisi yang lain, saat ini tata kelola pemerintahan dan juga seluruh aspek kehidupan masyarakat, menghadapi isu global berbentuk pandemi COVID-19. Ada hikmah di balik pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia bahkan Kabupaten Kebumen, utamanya dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi, pemberlakuan sistem *work from home* bagi ASN menandakan babak baru *shifting* cara kerja atau memasuki situasi yang "tidak normal" dalam pelaksanaan tugas ASN sehari-hari. Pemanfaatan informasi teknologi dan *internet of thing* menjadi "keterpaksaan" baru, telah terjadi perubahan secara masif budaya kerja dan cara berpikir ASN. Beberapa ahli meramalkan pasca pandemi COVID-19, seluruh dunia akan menghadapi apa yang disebut sebagai *the new normal*. Suatu kondisi global yang merupakan akumulasi bagaimana umat manusia berperilaku menuju kondisi normal yang baru. Salah satu kondisi *the new normal* adalah percepatan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik tatakelola pemerintahan, yang lebih berorientasi pada hasil dengan mengedepankan pemanfaatan informasi teknologi dan kecepatannya.

Kondisi Pandemi COVID-19 telah mengubah paradigma bekerja ASN Kabupaten Kebumen menjadi lebih efektif dan efisien, lebih berorientasi pada hasil daripada prosedural, serta percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi kebutuhan pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kebumen sekarang sudah umum melakukan *tele-meeting* atau *tele-conference* dan pengadaan rapat-rapat koordinasi yang menggunakan teknologi digital tanpa dibatasi ruang dan waktu dan lokasi sehingga lebih efektif efisien dari sisi waktu dan biaya. Hal ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahannya.

Penerapan *e-governance* yang terintegratif merupakan tantangan kedepan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan. Berbagai aplikasi *e-government* (*e-planning*, *e-budgeting*, *system delivery*,

penatausahaan, *e-controlling*, *e-reporting*, *e-monev* serta aplikasi lainnya) yang saat ini sudah diterapkan di Kabupaten Kebumen walaupun belum terintegrasi juga merupakan potensi tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan *smart governance*. Kedepan, paradigma orientasi bekerja dalam tata kelola pemerintahan telah berubah dari *network government* menjadi *collaborative governance*. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah publik sendirian. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kebumen diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mampu menggerakkan investasi, menciptakan lapangan kerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

5) Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merubah kedudukan Desa yang sebelumnya diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan karena Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, berhak menyusun perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa, mempunyai kemampuan keuangan, dan memiliki mandat mewujudkan tujuan Undang-Undang Desa, antara lain:

a. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
b. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
c. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
d. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
e. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Keberhasilan pembangunan desa dapat diukur melalui capaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang memotret perkembangan kemandirian berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Capaian IDM Kabupaten Kebumen tahun 2020, dari 449 desa di Kabupaten Kebumen, sebanyak 348 desa kategori berkembang, 90 desa kategori maju dan 1 desa kategori mandiri pada tahun 2020. Sehingga jika dibandingkan dengan periode awal RPJMD Tahun 2016-2021, maka ada peningkatan secara signifikan. Namun demikian, masih terdapat 10 desa di Kabupaten Kebumen yang kategorinya masih tertinggal.

Masih adanya desa yang tertinggal di Kabupaten Kebumen salah satunya disebabkan oleh faktor topografis wilayah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari wilayah pegunungan, pesisir pantai, pesisir gunung, dan perkotaan. Hal ini berpengaruh terhadap kesenjangan atau disparitas antar desa, baik secara pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan juga infrastruktur. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan kemandirian dan pemerataan pembangunan desa perlu dilakukan kerjasama antar desa dalam satu kawasan pedesaan atau lintas desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha melalui BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Melalui kerjasama antar desa ini diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Selain mendorong terwujudnya kemandirian desa, desa memiliki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tertuang dalam tujuan dan sasaran

pembangunan melalui SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya. Ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa yaitu : 1. Desa tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3. Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa berkualitas, 5. Desa berkesetaraan gender, 6. Desa layak air bersih dan sanitasi, 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9. Inovasi dan infrastruktur desa, 10. Desa tanpa kesenjangan, 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, 14. Ekosistem laut desa, 15. Ekosistem daratan desa, 16.Desa damai dan berkeadilan, 17. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dukungan Pemerintah untuk mendorong terwujudnya kemandirian desa dan pencapaian SDGs Desa dapat dilihat dari besaran anggaran desa yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten, seperti terlihat pada gambar berikut.

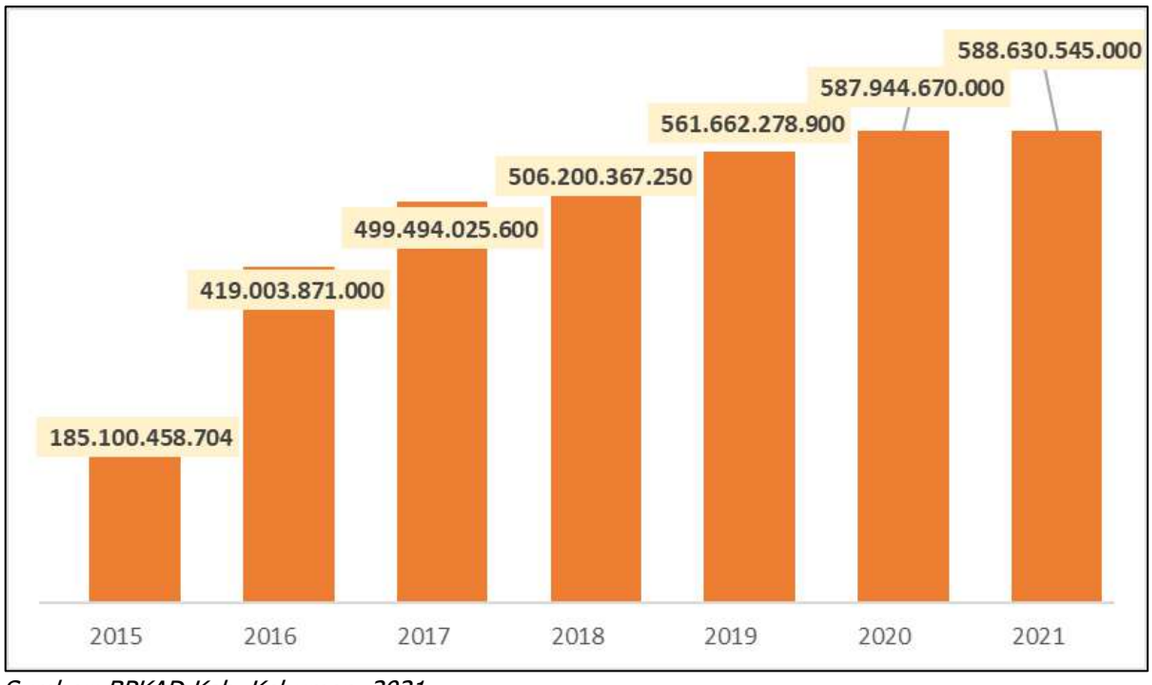

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen, 2021

Gambar 4.5
Perkembangan Total Anggaran Desa
(Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa)
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021

Arah kebijakan pembangunan desa pada periode RPJMD Tahun 2016-2021 ditujukan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Kebijakan tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarannya dari tahun ke tahun selalu meningkat. ADD tersebut digunakan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Melihat potensi yang ada di Kabupaten Kebumen dan mempertimbangkan besaran alokasi dana transfer pemerintah kepada desa yang cukup besar, maka desa dapat berkontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa. Dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mendorong pemerintah desa agar lebih

mengoptimalkan BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagai motor penggerak ekonomi desa.

6) Penyebaran Covid-19

Pada awal tahun 2020 muncul Covid-19 yang menjadi pandemi yang meresahkan dunia, tidak terkecuali di Kabupaten Kebumen. Pada tanggal 10 Maret 2020 muncul kasus Pasien Dalam Pemantauan (PDP) pertama kali, kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 muncul kasus pertama Orang Dalam Pengawasan (ODP), selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020 kasus positif Covid-19 mulai muncul pertama kali di Kabupaten Kebumen. Seiring dengan mulai munculnya kasus PDP, ODP dan positif Covid-19 di Kabupaten Kebumen, terjadi peningkatan jumlah kasus yang signifikan. Sampai tanggal 15 Juni 2020 terjadi 245 kasus PDP, 3.150 kasus ODP dan 35 kasus positif Covid-19.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan perlu mengambil kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kebumen dengan menerapkan karantina, pembatasan perjalanan dan pembatasan aktivitas masyarakat Kabupaten Kebumen. Namun, kebijakan tersebut mempunyai dampak yang negatif pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat miskin. Masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen yang sebagian besar aktivitas ekonominya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berhenti menjalankan usahanya karena pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat berhenti bekerja karena terbatasnya lahan pekerjaan bagi mereka atau dikarenakan pemutusan hubungan kerja.

Jika kebijakan pembatasan perjalanan dan fisik tersebut tetap diberlakukan karena penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Kebumen belum dapat dihentikan, maka akan berdampak pula pada ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen. Pemberlakuan kebijakan tersebut diperkirakan dapat menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pangan di Kabupaten Kebumen yang mengakibatkan masyarakat Kabupaten Kebumen mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan. Pada kondisi yang sangat parah, kesulitan masyarakat untuk mengakses bahan pangan dapat menimbulkan bencana kelaparan.

4.2.2 Lingkungan Eksternal

Dinamika eksternal yang akan datang harus dapat diidentifikasi dengan baik agar pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Beberapa lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dalam pembangunan Kabupaten Kebumen ke depan adalah:

1) Kondisi Geo-ekonomi Global

Kondisi geoekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Kondisi geoekonomi ke depan tentunya perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat, agar peluang yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan bidang ekonomi perlu diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada transformasi industri yang berkelanjutan, sehingga perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Perkiraan pelemahan harga komoditas di pasar internasional menjadi tantangan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor Indonesia ke arah produk manufaktur. Sementara itu, peningkatan jaringan rantai pasok global dan regional pun perlu dimanfaatkan oleh Indonesia melalui kebijakan kondusif, yang dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pengusaha domestik termasuk usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dalam rantai pasok internasional.

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan daya saing perekonomian ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah di Indonesia.

Selain itu, pembangunan manusia Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global. Secara geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan timur Asia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia. Ketika tren pertumbuhan ekonomi dunia jangka panjang (1970–2000) mengalami penurunan, tren pertumbuhan ekonomi kawasan timur Asia menunjukkan peningkatan pusat gravitasi perekonomian global. Secara geografis, kedudukan Indonesia berada di tengah-tengah kawasan timur Asia yang mempunyai potensi ekonomi sangat besar. Kawasan timur Asia (termasuk Asia Tenggara) memiliki jumlah penduduk sekitar 50 persen dari penduduk dunia. Cina memiliki sekitar 1,3 miliar penduduk, sementara India menyumbang sekitar 1,2 miliar orang, dan ASEAN dihuni oleh sekitar 600 juta jiwa (MP3EI, 2011). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN maupun internasional.

Di sisi hubungan internasional, diplomasi ekonomi internasional diarahkan untuk mengedepankan kepentingan nasional yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas maupun kemitraan ekonomi akan dilakukan secara selektif, yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2) *New Urban Agenda* (NUA)

New Urban Agenda (NUA) merupakan komitmen global, sesuai dengan kesepakatan yang disusun oleh delegasi dari 140 negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*Sustainable Urbanization*). NUA berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. Komitmen global ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan perkotaan di tingkat

nasional dan lokal, agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Secara garis besar, NUA menawarkan pendekatan baru dalam membangun, mengelola, dan menata suatu kota. Sesuai dengan tujuan utamanya, *Cities for All*, NUA berkomitmen untuk mendorong pembangunan kota dan permukiman yang lebih inklusif, non-diskriminatif, serta berkelanjutan. Hal ini memiliki implikasi lanjutan terhadap cara pandang dari urbanisasi itu sendiri, terutama dalam konteks migrasi penduduk desa ke kota. Migrasi penduduk tersebut tidak bisa dicegah, bahkan dilarang, karena sama artinya dengan melarang pendatang untuk mencari kesempatan yang lebih baik di kota. Oleh karenanya, semangat inklusivitas dalam pembangunan kota perlu diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan kota untuk semua, termasuk bagi para pendatang.

Dalam mengimplementasikan NUA di Indonesia, perlu diperhatikan bahwa kondisi perkotaan di Indonesia sangat beragam. Dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa terdapat tiga kategori kawasan perkotaan: kecil, sedang, besar, dan metropolitan. Sampai dengan tahun 2011, Bappenas mencatat bahwa terdapat 11 kota kecil, 56 kota sedang, 17 kota besar, dan 14 metropolitan di Indonesia. Walaupun NUA tidak memberikan penekanan khusus terhadap berbagai ukuran kota, baik dari segi besaran, lokasi, dan jumlah penduduk, namun perlu memahami adanya perbedaan dan klasifikasi perkotaan tersebut.

3) Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs)

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai target dan indikator SDGs melalui pengintegrasian target tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur berkontribusi dalam pencapaian Tujuan 2 "Tanpa Kelaparan" melalui pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Tujuan 6 "Air Bersih dan Sanitasi Layak" diwujudkan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi. Kemudian, Tujuan 7 "Energi Bersih dan Terjangkau" diwujudkan dengan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Tujuan 9 "Industri, Inovasi dan Infrastruktur" dan Tujuan 11 "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan" diwujudkan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, serta pengembangan konektivitas dan transportasi umum massal.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025 adalah mencapai pendapatan perkapita Indonesia setara dengan *middle income* negara-negara di dunia dengan tingkat pengangguran di bawah 5 persen, jumlah rakyat miskin di bawah 5 persen penduduk, serta melakukan peningkatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG) negara. Hal ini menjadi beberapa agenda yang memerlukan perhatian di dalam proses perumusan kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan bidang transportasi, mengingat target pertumbuhan ekonomi negara akan sangat berkorelasi dengan peningkatan aksesibilitas antarnegara, antarpulau, maupun antarwilayah.

Secara khusus, isu mengenai pembangunan manusia menjadi salah satu poin penting dalam agenda pemerintah. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam strategi pembangunan nasional. Komitmen positif pemerintah juga ditunjukkan dengan menjadikan TPB

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyelarasan target-target TPB di tingkat nasional tersebut mencakup: (1) program, (2) kegiatan dan indikator yang dapat mengukur dan mengevaluasi, dan (3) indikasi dukungan pembiayaannya.

Dukungan terhadap pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia diwujudkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 mengenai Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres ini menetapkan 17 tujuan, 169 target dan 316 indikator yang selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Secara eksplisit, dari 319 indikator TPB nasional, pembangunan manusia tidak langsung menjadi tujuan. Namun, selanjutnya terdapat beberapa target yang terkait pembangunan manusia yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan.

Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Pada target 3.1, tertulis komitmen bahwa pada tahun 2030, rasio Angka Kematian Ibu akan menurun hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Target ini bertujuan mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, Umur Harapan Hidup Saat Lahir akan menjadi salah satu indikator TPB. Umur harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator TPB yaitu angka kematian neonatal dapat ditekan.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4.1, terdapat komitmen untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada target ini, beberapa indikator yang menjadi sasaran antara lain:

- Proporsi anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat; dan
- Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur ≥25 tahun.

Apabila target 4.1 dapat dicapai, maka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang termasuk indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat, sebab angka kelulusan pendidikan dasar dan menengah berdampak terhadap Harapan Lama Sekolah. Dalam jangka panjang, Rata-rata Lama Sekolah juga akan meningkat karena peningkatan kapasitas pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Secara lebih spesifik, pada dasarnya arah kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mengarah pada upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Tentunya ketiga bidang pembangunan harus dilaksanakan secara holistik agar tidak terjadi kesenjangan antarbidang pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, pendapatan nasional perkapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD 5.550–5.930 perkapita pada 2024. Kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan perbaikan kualitas pertumbuhan. Tingkat

kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,5-7,0 persen dan 4,0-4,6 persen pada 2024. Tingkat Rasio Gini menurun menjadi 0,370-0,374 pada 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumberdaya manusia.

Tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Secara khusus, agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang menyinggung bidang sosial berkonsentrasi pada pembangunan manusia pada agenda ketiga, yaitu meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap pengembangan permukiman saat ini adalah mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, percepatan pencapaian target MDGs 2020 yaitu penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan, perlunya dukungan terhadap pelaksanaan program-program direktif Presiden yang tertuang dalam MP3EI dan MP3KI, Meminimalkan penyebab dan dampak bencana sekecil mungkin, meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan, dan bertambahnya kawasan kumuh, belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur permukiman yang sudah dibangun, perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman, belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan permukiman. Ditopang oleh belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Kegiatan pengembangan permukiman terdiri dari pengembangan permukiman kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Pengembangan permukiman kawasan perkotaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sedangkan untuk pengembangan kawasan perdesaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman perdesaan, kawasan pusat pertumbuhan, serta desa tertinggal.

4) Dampak *COVID*-19

Penyebaran COVID-19 yang sudah dapat dikendalikan di beberapa negara, termasuk Tiongkok, berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di saat kurva mulai melandai yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan pasien COVID-19, kondisi di Indonesia memperlihatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan pasien COVID-19 yang cukup signifikan. Secara umum, dampak COVID-19 memang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Perlambatan kinerja industri manufaktur yang diiringi oleh masih melambatnya ekonomi secara global yang berimbas pada penurunan permintaan, secara otomatis akan menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Tiongkok untuk beberapa kuartal ke depan tampaknya akan mengalami kontraksi ekonomi dimana kegiatan produksi dan produktivitasnya kemungkinan menurun hingga 20-25 persen. Sehingga ekonomi Tiongkok kemungkinan hanya tumbuh di kisaran 5 persen (Damuri dan Herawan, 2020).

Ada ketidakpastian tentang epidemiologis perkembangan virus, selama berapa lama dan sejauh mana ini akan berpengaruh pada rutinitas, limpahan ke ekonomi global, dan tentang bagaimana pasar keuangan mencerna berita, rumor, dan data. Hubungan timbal balik antara tanggapan otoritas, bisnis, konsumen, dan pasar menjadi rumit dan sulit untuk dimodelkan (Man, 2020), akan terjadi evolusi data dan prospek ke depan. Pandemi ini tidak saja menjadi kejutan pada pasokan, tetapi juga bisa menjadi goncangan pada permintaan sehingga dapat memukul sektor-sektor tertentu, ini semua tergantung pada bagaimana konsumen berperilaku. Banyak konsumsi saat ini dapat disebut "konsumsi sosial"—hal-hal yang membuat konsumen berhubungan dengan orang lain—seperti pergi ke kafe, ke restoran, berwisata, dan lain sebagainya. Selain itu, sektor lain yang terpengaruh adalah yang menyediakan layanan konsumsi yang melibatkan kontak pribadi (misalnya, potong rambut) dan dapat dengan mudah ditunda, juga mungkin akan terkena. Kekhawatiran orang akan tertular COVID-19 yang hanya dapat diatasi dengan mengurangi aktivitas konsumsi sosial ini, membuat dampak ekonomi akan lebih parah daripada angka yang dibahas sebelumnya. Salah satu alasan keparahan tersebut adalah karena sebagian merupakan kerugian permanen (Wern-Lewis, 2020).

Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (*global supply chain*). Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran COVID-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang (Damuri dan Herawan, 2020).

Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran COVID-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas industri manufaktur di Indonesia masih bergantung pada impor, yang salah satunya berasal dari Tiongkok. Kegiatan produksi di Tiongkok pun terganggu akibat kasus virus ini. Perlu diketahui bahwa struktur impor Indonesia memang didominasi bahan baku/penolong yang angkanya mencapai di atas 70 persen. Buah simalakama antara struktur ekspor dan impor inilah yang kemungkinan besar akan berdampak besar pada kinerja industri manufaktur di Indonesia (Damuri dan Herawan, 2020).

Untuk menghadapi situasi ini, kita harus belajar dari perpecahan kecil yang saat ini menjangkiti Amerika Serikat. Perpecahan tidak boleh terjadi, perlu untuk menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk bertindak bersama dan untuk menunjukkan solidaritas. Selain menggunakan fleksibilitas peraturan fiskal untuk menambah ruang bagi pengeluaran, juga harus mempertimbangkan dana pereda bencana umum untuk membantu wilayah dan masyarakat yang terkena dampak.

Semangat gotong royong menjadi modal sosial dapat menjadi strategi terbaik dalam menghadapi ketidakpastian akibat COVID-19. Dalam nada yang sama, pemerintah dan pembuat kebijakan harus sangat berhati-hati untuk mengirim pesan kohesi, tanggung jawab dan kepemimpinan untuk mencegah rasa takut dan panik. Kita dapat belajar dari Singapura dalam hal ini. Singapura telah berjuang melawan penyakit ini sejak Tahun Baru Imlek; itu sangat terhubung dengan Cina dan memiliki lonjakan kasus sejak awal, dan berhasil menekan penyebarannya. Sejak awal, pemerintah Singapura berkomunikasi secara luas dan menyerukan agar warga berperilaku secara bertanggung jawab dan saling menghormati. Pada saat yang sama, transparan dan jujur tentang tindakan yang harus diambil jika eskalasi tingkat ancaman lebih lanjut.

Secara keseluruhan, banyak yang akan bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola kondisi ini. Pandemi ini bisa menjadi krisis ekonomi dalam dimensi global dan ancaman bagi globalisasi, atau juga bisa jadi momen agar pembuat kebijakan mampu mengelola respons krisis bersama dan bahkan berhasil membangun kembali kepercayaan (*Centre for Economic Policy Research* (CEPR), 2020)

5) Visi Indonesia 2045

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga "Pemerataan Pembangunan" tersebut diimplementasikan salah satunya melalui "Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi", dimana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

6) RPJPN 2005-2025

Sejalan dengan tahapan yang diamanatkan RPJPN tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada periode ini struktur perekonomian diharapkan sudah semakin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, sumberdaya alam (seperti kelautan, pertanian, dan pertambangan), dan sektor jasa. Kondisi berbangsa dan bernegara juga sudah semakin maju dan sejahtera yang didukung oleh diselenggarakannya jaringan transportasi, telekomunikasi dan informatika, elektrifikasi, sanitasi dan air bersih serta irigasi yang andal bagi seluruh masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dengan demikian, kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung dapat terpenuhi dan kota tanpa permukiman kumuh dapat diwujudkan.

7) RPJMN 2020-2024

Visi Indonesia tertuang pada dokumen RPJMN 2020-2025 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yang diupayakan melalui 9 (Sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu (i) peningkatan kualitas manusia Indonesia, (ii) struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, (iii) pembangunan yang merata dan berkeadilan, (iv) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (v) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (vi) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (vii) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (viii) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dan (ix) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Strategi pencapaian visi dan misi mencakup pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Pembangunan SDM diarahkan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global. Pembangunan infrastruktur difokuskan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan birokrasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan UMKM. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dalam rangka memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Sedangkan transformasi ekonomi diarahkan melakukan transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun isu strategis RPJMN Tahun 2020-2024 antara lain meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah, meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa), meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dan meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

8) Posisi Kabupaten Kebumen dalam Arah Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Kebumen telah memasukkan:

a. Kawasan Industri Kebumen dimana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kebumen merespon dengan upaya pengembangan Kawasan Industri di wilayah Kecamatan Petanahan untuk pengembangan agroindustri perikanan sesuai dengan potensi daerah yang ada.
b. Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu Kawasan Borobudur-Kebumen-Dieng dan sekitarnya dimana Kabupaten Kebumen merespon melalui pengembangan sektor pariwisata termasuk pengembangan Kawasan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong dengan konsep *green tourism.*

Berdasarkan arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen masuk dalam Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb bersama dengan Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara sebagai kawasan pendukung Wilayah Pengembangan Bregasmalang (Kawasan Industri Brebes). Respon

Kabupaten Kebumen adalah dengan akan terus mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat terserap oleh industri yang nantinya akan dibangun di Kawasan Industri Brebes.

Dalam pengembangan wilayah Barlingmascakeb, Kabupaten Kebumen secara spesifik pada dokumen perencanaan di Jawa Tengah disebutkan:

a. Kecamatan Kebumen sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sedangkan Kecamatan Gombong, Karanganyar dan Prembun sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW adalah kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKW memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup provinsi atau beberapa kabupaten sedangkan PKL ditujukan untuk melayani satuan ruang yang efektif sesuai dengan kemampuan dan potensi setempat (lokal) yang ada, terutama kawasan pedalaman, perdesaan, dan perbatasan. Pengembangan pusat kegiatan ini telah sesuai dengan rencana pengembangan wilayah pada RPJMD Kabupaten Kebumen yang juga telah selaras dengan rencana pengembangan wilayah pada draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.
b. Untuk peningkatan konektivitas dan aksesibilitas akan dilaksanakan pembangunan jalur Banjar Kebuka (Banjarnegara-Kebumen) oleh Provinsi Jawa Tengah dimana Kabupaten Kebumen juga merencanakan pengembangan konektivitas dengan wilayah kabupaten tetangga.
c. Guna pemenuhan kebutuhan air baku akan dilaksanakan pembangunan SPAM Keburejo di wilayah Kebumen dan Purworejo dimana hal ini diharapkan akan meningkatkan akses layanan dasar air bersih yang juga akan terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen menggunakan sumber pendanaan lainnya baik APBD Kabupaten Kebumen, APBN maupun penyertaan modal pada Perumda Air Minum Kabupaten Kebumen; serta
d. Pengembangan kegiatan perekonomian Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmascakeb diutamakan pada fasilitasi pengembangan kawasan industri Cilacap dan Kebumen.

4.3. Isu Strategis

Isu strategis adalah hal yang harus dikedepankan dalam pembangunan Kabupaten Kebumen lima tahun mendatang, yang didapatkan dari analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Isu strategis dirumuskan dengan menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal daerah. Perumusan isu strategis Kabupaten Kebumen secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Analisis Penyusun, 2021

Gambar 4.6
Komponen Pembentuk Rumusan Isu Strategis Kabupaten Kebumen

Dari analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut didapatkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1) Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas

Tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah guna mencetak sumberdaya manusia unggul yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka diperlukan peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan manusia antargender di segala bidang dan memperhatikan prinsip pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan disabilitas menjadi penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan dan menciptakan generasi penerus yang dapat tumbuh dengan optimal. Capaian indikator keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan penting cukup rendah, derajat kesehatan perempuan tidak lebih baik jika dibandingkan dengan laki-laki. Tingkat partisipasi kerja perempuan pun rendah, kalaupun bekerja kontribusi pendapatan perempuan jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, termasuk dalam kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif belum dapat terpenuhi. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum dapat merespon kebutuhan pasar kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. Perlu upaya sistematis dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan peran dan kerja sama industri/swasta dalam penyelarasan program studi pada pendidikan tinggi maupun sekolah vokasi dengan kebutuhan pasar. Selain itu kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.

Selain dalam rangka membentuk SDM kompeten dan unggul, peningkatan derajat pendidikan dan ketrampilan dapat meningkatkan peluang keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja. Secara umum fasilitas pelayanan pendidikan yang dimiliki cukup memadai, ketersediaan tenaga pendidik maupun sarpras pendukung pembelajaran cukup memadai termasuk layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Tantangannya kemudian adalah menekan angka putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali belajar. Selain itu peningkatan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Kabupaten Kebumen mempunyai peluang emas dengan ditetapkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung dan Bregasmalang. Berdasarkan perpres tersebut Kabupaten Kebumen berperan sebagai kawasan yang dapat meningkatkan nilai tambah pada Kawasan Bregasmalang yang diprioritaskan pada Kawasan Industri Brebes dalam bingkai Kawasan Barlingmascakeb. Kabupaten Kebumen dapat berperan sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang dalam aspek industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian dan tenaga kerja.

Dalam rangka optimalisasi peran Kabupaten Kebumen sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang, pemerintah pusat merencanakan program di Kabupaten Kebumen yaitu kawasan industri, industri gula semut, industri garam, industri perikanan dan ekonomi rakyat. Peluang tersebut harus diantisipasi dengan penyiapan tenaga kerja yang trampil, kompeten, menguasai teknologi informasi dan ketrampilan non teknis yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan mencetak SDM unggul, produktif dan berdaya saing maka Kabupaten Kebumen dapat menangkap peluang dari Perpres 79 tahun 2019 untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana pasar tenaga kerja menjadi *borderless*. Tingkat persaingan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen tidak lagi pada lingkup regional maupun nasional namun global.

2) Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan permasalahan bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan daerah. Salah satu aspek yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kesejahteraan ekonomi, yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Pengukuran kemiskinan secara makro menekankan pada kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara layak yang diukur dengan garis kemiskinan. Rendahnya tingkat pendapatan perkapita yang linier dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen menunjukkan eratnya hubungan kedua isu tersebut. Kedua isu ini menjadi semakin strategis dengan adanya dampak pandemi Covid-19 yang sangat memukul sendi-sendi perekonomian.

Isu kesejahteraan ekonomi dan kemiskinan muncul sebagai akibat dari belum optimalnya kinerja perekonomian baik di sektor primer, sekunder maupun tersier. Sektor primer diwakili oleh pertanian secara luas yang mencakup juga aktivitas perikanan dan kelautan. Sektor ini merupakan sumber penghidupan utama bagi 32,4% penduduk, namun nilai output yang dihasilkan pada sektor ini hanya mencapai 21,79% dari total PDRB. Dengan demikian, maka output yang diterima oleh setiap penduduk pada sektor ini tidak sebanding dengan yang diterima penduduk pada sektor lain. Dengan kata lain, sektor ini belum cukup mampu memberikan kesejahteraan ekonomi pada pelaku di dalamnya.

Sektor sekunder yaitu industri pengolahan merupakan sektor yang sangat berkembang dan saat ini semakin mendekati sektor pertanian dengan kontribusi PDRB sebesar 21,27%. Sangat dimungkinkan bahwa dalam waktu dekat sektor ini akan menjadi penyumbang terbesar output perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan kondisi lingkungan eksternal dimana peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dititikberatkan pada transformasi industri yang berkelanjutan, sehingga perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Meskipun kinerja sektor ini cukup baik, namun dalam lingkup yang lebih luas seharusnya perkembangan sektor ini bisa ikut mendongkrak kinerja di sektor primer sebagai sektor hulu. Saat ini, dampak tersebut belum bisa dirasakan dimana perkembangan pesat sektor industri belum diikuti peningkatan kinerja sektor pertanian.

Sektor tersier yang mencakup sektor jasa termasuk di dalamnya perdagangan merupakan sektor paling hilir yang seharusnya paling berperan dalam menarik kinerja sektor hulu, baik itu sektor primer maupun sekunder. Sebagai contoh pada aktivitas pariwisata yang diharapkan dapat menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi lokal baik pertanian maupun industri, namun masih banyak ditemui produk-produk yang justru berasal dari luar daerah. Jika saja produk luar daerah tersebut dapat digantikan oleh produk lokal tentu saja akan bisa memberikan dampak positif secara agregat.

Peran pemerintah desa dalam pembangunan daerah selain penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan fasilitasi BUM Desa/BUMDESMA dalam bentuk penyertaan modal, serta memastikan jenis usaha BUM Desa/BUMDESMA bisa menjadi penggerak kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat sesuai dengan potensi dan dituangkan dalam bentuk rencana bisnis. Kewenangan yang sudah diberikan kepada desa beserta alokasi anggaran harus bisa menempatkan desa sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Sehingga jumlah desa dengan kategori mandiri dan maju akan semakin meningkat lima tahun ke depan.

3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Dalam ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002)[1]. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989; Munnell, 1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60 persen (Suyono Dikun, 2003). Bahkan studi dari World Bank (1994) menyebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7

[1] Gie,2002. Pembiayaan Pemnbangunan Infrastruktur dan Permukiman, Materi Kuliah pada Stadium General Institut Teknologi Bandung 20 September 2002.

persen sampai dengan 44 persen, variasi angka yang cukup signifikan. Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen saat ini menghadapi masalah yang sama dengan banyak daerah bahkan masalah nasional, yaitu "kesenjangan wilayah" (*regional imbalances*). Penyebab ketimpangan wilayah bersifat multi-faktor, dari hal yang bersifat alamiah, seperti perbedaan kandungan sumberdaya alam, kualitas sumberdaya manusia, sampai kepada kurangnya infrastruktur wilayah yang menyebabkan rendahnya minat dan realisasi investasi. Infrastruktur jelas merupakan faktor utama yang signifikan untuk merapatkan atau merenggangkan ketimpangan wilayah tersebut. Pada umumnya, wilayah-wilayah miskin tidak memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, jauh kontras dibandingkan dengan wilayah yang tidak miskin. Hal ini mengisyaratkan bahwa infrastruktur menjadi prasyarat utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin kompleksnya persoalan pembangunan tersebut 'mendorong' lahirnya pendekatan-pendekatan baru untuk mengatasi masalah ketimpangan. Diperlukan inovasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Kebumen ke depan, agar isu ketimpangan yang selama ini belum mampu diatasi dapat teratasi dengan baik. Peningkatan infrastruktur dalam hal ini termasuk infrastruktur di desa yang dapat didorong dengan peningkatan partisipasi masyarakat berupa material atau tenaga kerja dalam setiap proyek pembangunan, hal ini diperkuat adanya Dana Desa yang di kucurkan pemerintah pusat untuk meminimalisir ketimpangan antar wilayah.

Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, hal tersebut sejalan dengan TPB ke 9 yaitu Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi. Oleh karena itu Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen juga harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah disesuaikan dengan pengintegrasian KLHS RPJMD ke dalam RPJMD Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan analisis dalam dokumen KLHS, isu infrastruktur dasar air minum dan sanitasi masih memiliki permasalahan dalam ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan di Kabupaten Kebumen masih fokus pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Selain penilaian prioritas, terdapat beberapa usulan isu tambahan yang dimasukkan dalam pembahasan KLHS RPJMD terkait infrastruktur berkelanjutan yaitu bencana, alih fungsi lahan pertanian, dan penurunan kualitas lingkungan.

4) Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Optimal

Kabupaten Kebumen juga harus turut berperan dalam penyempurnaan kebijakan nasional di bidang aparatur, sehingga mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda, manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda akan mendorong perubahan pola pikir dan budaya pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.

Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktik KKN, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program

pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pelayan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan sistem penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu perlu didorong optimalisasi peranan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Transformasi digital memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Pada akhirnya transformasi digital dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN.

Penentuan isu strategis Kabupaten Kebumen telah selaras dengan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024

Isu Strategis		
RPJMD Kabupaten/Kota	**RPJMD Provinsi**	**RPJMN**
(subbab IV.2.)	**(subbab IV.2.)**	**(Lampiran 1 SEB)**
Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas	Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa)
	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah
	Kedaulatan pangan dan energi	
Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah.
	Kesenjangan wilayah	
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Optimal	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2021-2026 yang diajukan pada saat pencalonan, harus memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global, nasional, regional, dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan atau diupayakan melalui Misi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

5.1. Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Visi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dirumuskan dari permasalahan (masalah) utama yang akan dihadapi lima tahun ke depan berdasarkan isu strategis yang telah dicantumkan pada Bab IV. Masalah utama tersebut kemudian dibuat menjadi pokok-pokok visi yang selanjutnya dirumuskan pernyataan visi, seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Perumusan Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Tingginya angka kemiskinan, Rendahnya Tingkat pendidikan, masih kurangnya akses sarana Kesehatan, kualitas pelayanan, tingginya ketimpangan ekonomi, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan masih rendahnya lapangan kerja	Sejahtera	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
2	Belum optimalnya pengelolaan potensi lokal dan sumber daya yang ada melalui kegiatan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier serta belum optimalnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Mandiri	
3	Masih perlunya meningkatkan nilai-nilai toleransi, sikap dan perilaku dalam masyarakat	Berakhlak	
4	Masih perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Bersama Rakyat	

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Tabel 5.2
Penyusunan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat	Sejahtera	Sejahtera merupakan suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
	Mandiri	Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.
	Berakhlak	Berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama
	Bersama Rakyat	Masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

"**Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat"**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera

yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perkonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Bersama Rakyat

Bersama Rakyat diterjemahkan sebagai peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Keterlibatan peran masyarakat dalam pembangunan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki (handarbeni).

Untuk memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 5 tahun ke depan, maka kami menggelorakan slogan "KEBUMEN SEMARAK". Slogan ini merupakan akronim dari Visi kami yaitu :

KEBUMEN SEMARAK

"Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat"

5.2. Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tabel 5.3
Perumusan Penjelasan Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat	**Misi Pertama** : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi	Misi Pertama menekankan pada : 1. **Tingkatan Sistem** (koneksitas/ integrasi sistem dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi) 2. **Tingkatan Institusional** (birokrasi yang efektif dan efisien dengan digitalisasi birokrasi) 3. **Tingkatan Individu**, (profesionalitas pegawai, *skill, innovative, futuristic* dan *attitude* ASN)
2		**Misi kedua :** Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Misi kedua menekankan pada produktivitas sumberdaya manusia baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, serta kebutuhan dasar lainnya.
		Misi ketiga : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;	Misi Ketiga menekankan pada : - peningkatan maupun pengembangan usaha-usaha ekonomi kerakyatan serta kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta pertanian dalam mengakses sumber daya produktif (lahan, modal, pasar, teknologi dan informasi. - Pengembangan usaha investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehingga ekonomi daerah benar-benar dapat menjadi lebih produktif, memiliki nilai tambah dan berdaya saing
		Misi keempat : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Misi Keempat menekankan pada peningkatan aksesibilitas antar wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana sosial dasar masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi, investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi serta kelancaran transportasi yang selaras dengan lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.
5		**Misi kelima :** Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat	Misi Kelima menekankan pada perwujudan tatanan kehidupan masyarakat Kebumen yang tenteram, damai yang ditunjang dengan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, dimana penduduk berada dalam kondisi bebas konflik tanpa pertikaian, berbudaya dan bermartabat.

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah antara lain :

1. **Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi**;

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), diperlukan dalam upaya untuk pengembangan kapasitas pemerintahan yang mantap dan sebagai faktor penentu bahkan menjadi prasyarat bagi kinerja dan keberhasilan implementasi penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui pembangunan kapasitas pemerintahan daerah yang pertama pada tingkatan sistem, yaitu perlu dikembangkan kebijakan dan kerangka regulasi dan deregulasi yang dapat meningkatkan kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi seperti pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat dengan didukung profesionalitas pelayanan publik serta berbagai regulasi yang berpihak pada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas sistem dan mekanisme perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua pada tingkatan institusional, perlu dikembangkan struktur organisasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan didukung analisis beban kerja, kemudian proses pengambilan keputusan dan prosedur birokrasi atau hubungan antar organisasi yang efektif dan efisien, serta penguatan sistem manajemen pemerintahan berbasis kinerja yang mendukung tugas pokok dan fungsi. Yang Ketiga pada tingkatan individu, akan dikembangkan dan ditingkatkan kompetensi dan profesionalitas individu aparatur pemerintahan (ketrampilan/*skill*, pengetahuan/*knowledge* dan sikap/*attitude*) dan motivasi serta kreativitas personil yang berkerja pada setiap unit kerja atau organisasi. Sehingga masing-masing aparatur dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Pelayanan responsif kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan akhir dari Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menekankan pada perbaikan tingkatan sistem, tingkatan institusional dan tingkatan individu dilakukan secara terintegrasi, sehingga pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pelayanan berbasis *e-gov* dan *open-gov* senantiasa akan ditingkatkan dengan memaksimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.

2. **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya**;

Produktivitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya (rumah layak huni, air bersih dan sanitasi lingkungan, serta kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat). Sebab sumber daya manusia yang berpendidikan dan sehat yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemenuhan terhadap bidang pendidikan dan kesehatan harus dilakukan sejak dini dan berkesinambungan. Pendidikan usia dini dan pemberian gizi yang cukup serta perilaku sehat sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan balita. Anak yang sehat akan lebih berkonsentrasi dalam belajar, pekerja yang sehat akan lebih produktif dalam pekerjaannya, serta ibu-ibu yang sehat akan melahirkan

anak-anak yang sehat pula, dan angka kematian bayi pun dapat ditekan. Tingkat kesehatan juga dipengaruhi tingkat pendapatan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi, dan tingkat konsumsi berkaitan dengan kesehatan.

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

Menurut *World Economic Forum* (WEF) daya saing diartikan sebagai kemampuan ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan demikian, daya saing ekonomi daerah dapat diartikan sebagai kemampuan ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing daerah dapat diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah. Potensi sumber daya alam meliputi berbagai potensi yang melekat secara alamiah di daerah. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dapat dilakukan secara langsung di sektor primer (pertanian dalam arti luas) maupun diolah lebih lanjut di sektor sekunder (industri pengolahan). Selain itu, Kabupaten Kebumen juga memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai sumber ekonomi tersier, termasuk di dalamnya pariwisata. Pengembangan sektor primer, sekunder maupun tersier diharapkan dapat saling mengungkit satu sama lain sehingga output secara agregat akan lebih optimal. Sesuai dengan visi jangka panjang daerah yang tercantum dalam RPJPD, pengembangan potensi-potensi tersebut harus dilakukan dalam kerangka pembangunan agrobisnis. Pembangunan agrobisnis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi kerakyatan maupun kearifan lokal dimana pelaksanaanya untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kebumen serta disesuaikan dengan prinsip kolektif yang ada di masyarakat.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat, merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana sosial dasar masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi, investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi serta kelancaran transportasi.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan tanpa mengurangi kapasitas perlindungan dan pengelolaan serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang selaras dengan tata ruang wilayah. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana, efisien dan efektif serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Alat ukur peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan diantaranya yaitu akses dan ketersediaan air minum dan sanitasi layak (TPB 1, TPB 6); jumlah pembangunan IPAL komunal (TPB 6); persentase penanganan sampah perkotaan (TPB 11). Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (TPB 1), dan menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (TBP 11).

5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Pada hakikatnya kerukunan sosial sebagai bentuk aktualisasi dari pilar iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang rukun ditandai dengan terjaganya tatanan masyarakat, memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia. Sehingga tercipta peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradat, dan keharmonisan dalam hidup yang majemuk serta ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Harapannya masyarakat Kabupaten Kebumen mampu menghasilkan karya-karya budaya yang luhur. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Kebumen yang tenteram dan damai perlu ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam masyarakat, di mana penduduk berada dalam kondisi bebas konflik tanpa pertikaian.

Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat, merupakan suatu hal yang mutlak dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan memiliki akhlak serta berkepribadian yang santun sesuai dengan norma-norma agama maupun kearifan lokal serta budaya Kebumen. Masyarakat yang berbudaya dan bermartabat ditandai dengan tercipta kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan beragama, saling menghormati, saling mengasihi dan berketuhanan menuju *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Tujuan dan sasaran RPJMD menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra seluruh Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dalam RPJMD merupakan suatu kondisi yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan secara teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, melalui penelaahan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional maupun Provinsi Jawa Tengah dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2026. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegaiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

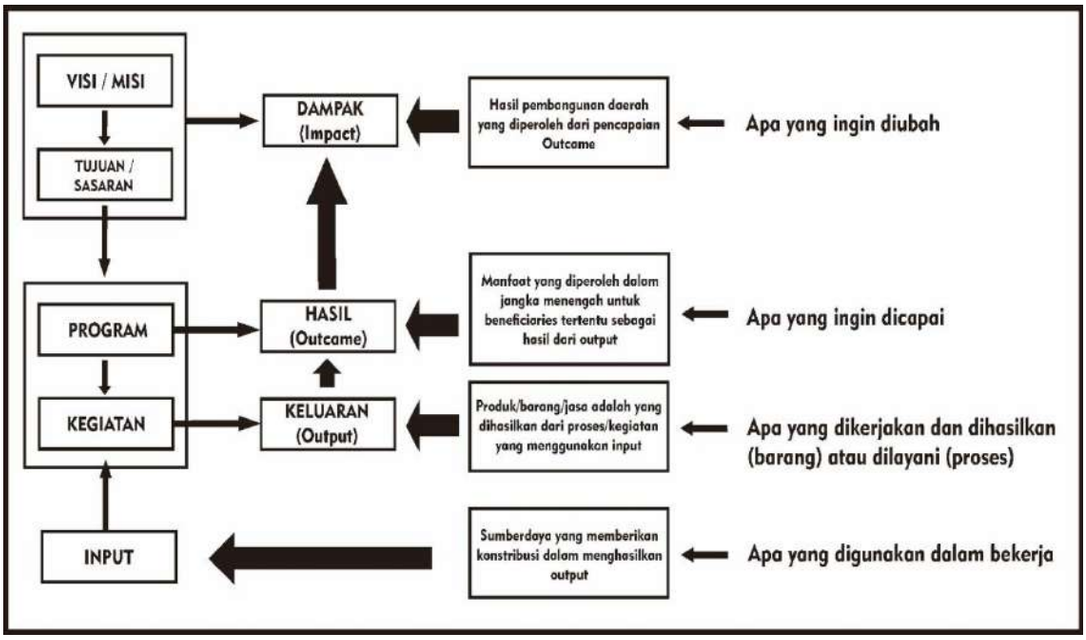

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 5.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Tabel 5.4
Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	
	Dokumen Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan ke KPU	**Hasil Perumusan**
1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.	a. Meningkatnya kapasitas kemampuan perangkat daerah dalam pengelolaan pemerintah daerah secara transparan, partisipatif dan akuntabel; b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat; c. Mewujudkan pengembangan *e-government* untuk mendorong pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan.	1. Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik
2. Peningkatan aksesibilitas dan **kualitas pelayanan** pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	a. Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitasnya dengan biaya terjangkau, serta didukung partisipasi masyarakat. b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan; c. Menuntaskan pembangunan rumah tidak layak huni untuk masyarakat tidak mampu; d. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan masyarakat. e. Terciptanya kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat.	2. Meningkatkan aksesibiitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan	a. Meningkatnya produksi, produktivitas, kualitas, pengolahan dan pemasaran sektor pertanian dengan dukungan teknologi tepat guna (agribisnis-agroindustri). b. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun manca negara dengan pengembangan sektor pariwisata berbasiskan potensi lokal serta peran serta aktif masyarakat. c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku UMKM dan koperasi yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap permodalan dan pasar.	3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan

MISI	TUJUAN	
	Dokumen Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan ke KPU	**Hasil Perumusan**
	d. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja; e. Meningkatnya kemandirian desa melalui penguatan kapasitas kelembagaan desa dan menjadikan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi.	
4. Peningkatan kualitas dan **kuantitas infrastruktur** yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	a. Tersedianya sarana/prasarana publik untuk menunjang pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi serta mendukung peningkatan kualitas kehidupan. b. Meningkatnya ketahanan pemerintah daerah dan masyarakat yang menghadapi resiko bencana dan tantangan global melalui sinergitas modal sosial dan ekonomi. c. Terwujudnya pembangunan daerah yang tetap memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.	5. Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat	a. Terciptanya kerukunan di masyarakat, saling menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; b. Terciptanya peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan keharmonisan dalam hidup yang majemuk serta ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Sehingga diharapkan tercipta tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang saling menghormati dan menghargai. c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan memiliki kepribadian yang santun sesuai dengan norma-norma agama maupun kearifan lokal yang berbudaya serta tercukupi kehidupan sosial ekonomi.	6. Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat 7. Mewujudkan kondusivitas wilayah

Sumber : Analisis Penyusun, 2021

Tabel 5.5
Cascading Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat

No	Misi		Tujuan		Sasaran	
1	MISI 1 :	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Tujuan 1.1 :	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sasaran 1.1.1 :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
					Sasaran 1.1.2 :	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel
					Sasaran 1.1.3 :	Terwujudnya birokrasi yang kapabel
2	MISI 2 :	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Tujuan 2.1 :	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sasaran 2.1.1 :	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
					Sasaran 2.1.2 :	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
					Sasaran 2.1.3 :	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
3	MISI 3 :	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan	Tujuan 3.1 :	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Sasaran 3.1.1 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer
					Sasaran 3.1.2 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder
					Sasaran 3.1.3 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier

No	Misi		Tujuan		Sasaran	
					Sasaran 3.1.4 :	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah
			Tujuan 3.2 :	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Sasaran 3.2.1 :	Berkurangnya penduduk miskin
					Sasaran 3.2.2 :	Berkurangnya pengangguran
4	MISI 4 :	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Tujuan 4.1 :	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Sasaran 4.1.1 :	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
					Sasaran 4.1.2 :	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat
5	MISI 5 :	Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat	Tujuan 5.1 :	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Sasaran 5.1.1 :	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan
					Sasaran 5.1.2 :	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
			Tujuan 5.2 :	Mewujudkan kondusitivas wilayah	Sasaran 5.2.1 :	Meningkatnya ketertiban masyarakat
					Sasaran 5.2.2 :	Terwujudnya wilayah tangguh bencana

Sumber : Analisis Penyusun, 2021

Tabel 5.6
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir 2026
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	**MISI 1 :**	**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi**										
	Tujuan 1.1 :	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
	Sasaran 1.1.1 :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81,97	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00
	Sasaran 1.1.2 :	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	63,85	64,00	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00	77,00
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran 1.1.3 :	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,42	3,42	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60
2	**MISI 2 :**	**Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya**										
	Tujuan 2.1 :	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	69,81	70,00	70,57	71,00	71,50	72,00	72,50	72,50
	Sasaran 2.1.1 :	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,40	73,50	73,60	73,70	73,80	73,90	74,00	74,00
	Sasaran 2.1.2 :	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,54	7,64	7,74	7,84	7,94	8,04	8,14	8,14
			Harapan Lama Sekolah	tahun	13,34	13,44	13,54	13,64	13,74	13,84	13,94	13,94
	Sasaran 2.1.3 :	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,15	93,25	93,35	93,45	93,55	93,65	93,65
			Cakupan Perlindungan Anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir 2026
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	**MISI 3 :**	**Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan**										
	Tujuan 3.1 :	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,46	3,91	4,05-5,36	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50
	Sasaran 3.1.1 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	4.898,56	5.090,09	5.362,92	5.657,88	5.969,07	6.297,37	6.643,72	6.643,72
	Sasaran 3.1.2 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	3.963,95	4.118,94	4.339,72	4.578,40	4.830,22	5.095,88	5.376,15	5.376,15
	Sasaran 3.1.3 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	10.663,85	11.080,81	11.674,74	12.316,85	12.994,28	13.708,96	14.462,95	14.462,95
	Sasaran 3.1.4 :	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	3.822,25	3.971,70	4.184,58	4.414,73	4.657,54	4.913,71	5.183,96	5.183,96
	Tujuan 3.2 :	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	20,02	20,45	20,50-21,00	21,00	21,00-21,50	21,50-22,00	22,00	22,00
	Sasaran 3.2.1 :	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	17,59	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00	13,50-14,00	13,00-13,50	13,00-13,50
	Sasaran 3.2.2 :	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,07	5,80	5,51-5,58	5,40-5,50	5,30-5,40	5,20-5,30	5,10-5,20	5,10-5,20
4	**MISI 4 :**	**Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**										
	Tujuan 4.1 :	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	54,75	58,50	59,90	63,75	66,46	69,13	71,82	71,82
	Sasaran 4.1.1 :	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	46,53	51,86	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69	70,69
	Sasaran 4.1.2 :	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	73,92	74,01	74,10	74,19	74,28	74,36	74,45	74,45
5	**MISI 5 :**	**Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat**										

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir 2026
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 5.1 :	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	-	75,70	76,00-76,50	77,00-77,50	78,00-78,50	79,00-79,50	80,00-80,50	80,00-80,50
	Sasaran 5.1.1 :	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	57,14	60,71	64,29	71,43	75,00	78,57	78,57
	Sasaran 5.1.2 :	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase Budaya yang Dilestarikan	%	18,16	20,82	25,05	29,82	34,05	38,82	43,04	43,04
	Tujuan 5.2 :	Mewujudkan kondusitivas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	%	63,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sasaran 5.2.1 :	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sasaran 5.2.2 :	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	26,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Analisis Penyusun, 2021

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan di capai dan kemudian dijabarkan dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi bertujuan untuk mendapatkan cara terbaik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan dalam perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran atau satu strategi dengan beberapa sasaran yang *inherent* (berkaitan erat) dalam satu tema. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan. Pemilihan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis pohon tujuan.

Rumusan strategi mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Jadi arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di laksanakan dengan penyusunan program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dipilih secara prioritas bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas pembangunan. Program prioritas bertujuan untuk memilih program-program yang harus didahulukan menyesuaikan kemampuan sumber daya keuangan dan daya manusia yang terbatas. Program yang dilaksanakan di RPJMD 2021-2026 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dimana jenis program, kegiatan dan sub kegiatan telah disediakan dalam peraturan tersebut.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah adalah rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan perumusan strategi pembangunan daerah adalah memberikan langkah yang sistematis dan efisien. Langkah perumusan strategi pembangunan daerah menggunakan analisis pohon tujuan.

Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai, untuk itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Strategi pembangunan di Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dapat dijelaskan secara rinci melalui analisis strategi berdasarkan isu strategis daerah dan analisis strategi berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut.

6.1.1. Analisis Strategi Berdasarkan Isu Strategis Daerah

Analisis strategi berdasarkan isu strategis daerah adalah analisis untuk merumuskan strategi yang didasarkan dari isu strategis daerah. Penentuan strategi pembangunan daerah didasarkan isu strategis daerah karena isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan mengingat karakteristiknya yang mendasar dan mendesak. Rujukan dasar untuk menganalisis strategi berdasarkan isu strategis daerah adalah isu strategis daerah yang telah dirumuskan dan tercantum pada Bab IV dokumen ini. Strategi yang didapatkan melalui analisis strategi berdasarkan isu strategis daerah secara rinci dijelaskan berikut ini.

1. Strategi Reformasi Birokrasi

Strategi reformasi birokrasi pemerintah daerah adalah salah satu cara untuk memperkuat daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalankan konsep desentralisasi sesuai dengan amanat otonomi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagai daerah otonom, berhak dan berwenang mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan urusan pemerintahan dalam upaya mengelola sumber-sumber keuangan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah, kongkritnya berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, daerah harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan, meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan serta keunggulan yang dikelola secara demokratis dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab telah dilakukan berbagai upaya reformasi birokrasi publik dan akan tetap dilanjutkan di tahun-tahun mendatang yang secara garis besar mencakup aspek-aspek *rethinking*, restrukturisasi, revitalisasi, dan *renewal*.

Aspek *rethinking* sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam reformasi harus ada hijrah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dari pola sentralistik ke desentralisasi, dari pola otoritarian kepada demokratisasi, dari pola lama yang selalu berorientasi dan berpihak kepada pusat menjadi berpihak kepada rakyat; dari pola lama pejabat harus dilayani menjadi harus melayani rakyat.

Demikian pula paradigma lama pemerintah sebagai motor penggerak dan pelaku utama pembangunan harus bergeser menjadi fasilitator.

Dalam aspek restrukturisasi, terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan mendasar dari undang-undang tersebut adalah bahwa urusan kabupaten/kota menjadi semakin luas karena Pemerintah (Pusat) menyerahkan seluruh urusan bidang pemerintahan kepada kabupaten/kota, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, agama, serta bidang moneter dan fiskal. Dalam rangka Restrukturisasi, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut, antara lain dengan menetapkan berbagai Peraturan Daerah bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kebumen.

Sedangkan aspek revitalisasi sangat diperlukan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memacu percepatan pembangunan daerah yang diharapkan mampun mendorong dan mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat. Sementara aspek renewal sangat diperlukan dalam pembangunan daerah agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan pembangunan yang selalu berkembang dalam era globalisasi.

Untuk mencapai hasil yang maksimal Pemerintah Daerah harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan *good governance* dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak baik itu aparatur pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Dalam pelaksanaannya menuntut adanya koordinasi yang baik dari berbagai pihak, memiliki sifat profesionalisme yang tinggi dan memiliki etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam strategi reformasi birokrasi ini juga perlu adanya perubahan perilaku yang sesuai dengan dimensi-dimensi etika pemerintahan, penegak hukum yang efektif serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan konsep *good governance* tersebut. Melalui strategi reformasi birokrasi ini pada dasarnya merupakan transformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi, hubungannya adalah strategi reformasi birokrasi merupakan jawaban atas tuntutan terhadap pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dan bertanggungung jawab serta menciptakan pemerintahan yang bersih.

Misi pertama Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-government* dan *open government* terintegrasi. Pencapaian visi dan misi daerah terkait dengan tata Kelola pemerintahan harus didukung dengan rencana aksi reformasi birokrasi yang memuat secara rigid rencana aksi pencapaian birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima serta optimalisasi penerapan *open government*. Adapun strategi untuk mewujudkan reformasi birokrasi sebagai berikut :

1. Strategi Pembenahan Struktur dan Prosedur Birokrasi adalah prioritas pertama yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi. Pembenahan birokrasi merupakan penggunaan wewenang untuk menerapkan ketentuan/ peraturan baru terhadap sistem pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur, maupun standar prosedur yang ada dengan maksud

untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penataan birokrasi atau restrukturisasi organisasi pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sangat penting dan sangat diperlukan dalam pencapaian visi dan misi daerah Tahun 2021-2026. Pembenahan struktur birokrasi berorientasi pada perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari keluaran (*output*) tetapi juga hasil (*outcome*) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi. Selain itu, Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu, termasuk sistem pengawasannya.

2. Strategi Perbaikan sistem dan manajemen sumber daya aparatur serta peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur menjadi prioritas kedua dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel, profesional, berintegritas, responsif, inovatif menuju pemerintahan kelas dunia.
3. Strategi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Hal ini dilaksanakan melalui integrasi pelayanan perizinan melalui *one stop service* di Mal Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Selain itu pelayanan didukung dengan peningkatan *e-government* yang terintegrasi dan *open government* sehingga selain cepat, mudah namun akuntabel.

Ketiga sasaran di atas merupakan satu kesatuan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah-langkah yang akan ditempuh melalui program-program unggulan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2021-2026 antara lain Go-Lak, Satu Data untuk Semua, Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli, Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP), Festival anggaran sebagai bentu keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Adapun komitmen reformasi birokrasi dapat dilihat dari penentuan indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja perangkat daerah yang selaras dengan indikator capaian reformasi birokrasi, sehingga evaluasi kinerja dan pencapaian reformasi birokrasi dapat dilaksanakan dengan lebih tepat dan terukur sehingga dapat segera disusun rencana perbaikan pencapaian reformasi birokrasi.

2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu strategis daerah yang perlu menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah selain tingginya angka pengangguran terbuka, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia termasuk kondisi mental pola pikir masyarakat miskin. Beberapa kendala dalam penanggulangan kemiskinan antara lain validitas data kemiskinan, kelembagaan penanggulangan kemiskinan belum optimal dan kurang optimalnya sinergitas dan kolaborasi peran serta masyarakat, swasta dan dunia usaha termasuk kelembagaan kemiskinan yang telah dibentuk mulai dari TKPK tingkat daerah, kecamatan dan desa. Kebijakan Pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan antara lain Program Sembako, Program Keluarga harapan, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Sedangkan beberapa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan antara lain program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan program mengurangi kemiskinan melalui sektor agrobisnis, pendidikan , peningkatan daya saing UMKM dan koperasi cukup efektif dilaksanakan.

Strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen semula mendasari Perda Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012, namun sudah tidak selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan

Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan revisi terhadap perda tersebut. Permendagri tersebut mengamanatkan daerah untuk membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota (TKPK) dan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang perlu dintegrasikan dalam dokumen RPJMD dengan memuat antara lain strategi penanggulangan kemiskinan daerah selama lima tahun. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen yaitu:

a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Kabupaten Kebumen menggunakan beberapa pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan antara lain:

a. Pendekatan kebutuhan dasar : kebijakan difokuskan pada masyarakat miskin guna pemenuhan kebutuhan dasar antara lain makanan, air, tempat tinggal, Kesehatan, Pendidikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
b. Pendekatan pendapatan: kebijakan fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraannya
c. Pendekatan subyektif dan obyektif : fokus pada pendekatan penilaian normatif dan subyektif menilai kemiskinan. Kemiskinan tidak dapat didefinisikan sederhana karena bukan hanya pemenuhan kebutuhan material, namun berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Penanggulangan kemiskinan harus menggunakan pendekatan multidimensi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan, analisa regulasi, evaluasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, evaluasi efektivitas penganggaran penanggulangan kemiskinan dan evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan, program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui:
    1) Satu Data Untuk Semua: Integrasi data kependudukan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (atau sebutan lain) sebagai dasar penentuan satu data sasaran program. Integrasi data dan pelayanan diimplementasikan dalam Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Kartu Kebumen Sejahtera juga dapat digunakan untuk mengontrol masyarakat yang belum tercakup atau yang seharusnya sudah tidak layak mendapatkan program penanggulangan kemiskinan. Implementasi program ini adalah "Kartu Kebumen Sejahtera" yang mengintegrasikan pengelolaan data dengan pelayanannya pada sembilan sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, bantuan sosial, sektor transportasi, UMKM, kelautan perikanan, pertanian dan peternakan
    2) Pemenuhan pelayanan sosial warga miskin : kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup dasar warga miskin.
    3) Program peningkatkan Ketahanan pangan: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan warga miskin dan mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan berdasarkan kalori yang dibutuhkan

4) Program Pelayanan pendidikan warga miskin: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan warga miskin, mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan tingkat pendidikan warga miskin. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan program unggulan daerah antara lain SIS SUSANA (Program beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan anak yatim), dan penguatan sekolah inklusi melalui peningkatan sarpras dan kualitas SDM sekolah inklusi.
5) Pelayanan Kesehatan warga miskin: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit kronis. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan program unggulan daerah antara lain BUMEN SEHATI dalam rangka peningkatan derajad kesehatan bagi masyarakat, SIBUSAH dalam rangka mewujudkan santri kebumen sehat dan berkah dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
6) Program Peningkatkan kesehatan lingkungan dan permukiman masyarakat miskin: kegiatan ini diarahkan untuk menyediakan rumah yang layak dan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.

b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan melalui:
1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin: kegiatan ini diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan melalui:
a) pemberdayaan petani dan nelayan miskin dalam upaya peningkatan pendapatan petani dan nelayan miskin. Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui program unggulan daerah antara lain Tani Mulyo dalam rangka peningkatan produksi pertanian melalui pemenuhan sarpras pertanian, dan pengembangan potensi lokal perikanan darat, perikanan tangkap dan kampung garam.
b) Pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran melalui program unggulan daerah antara lain Kebumen Ekonomi Handal melalui Lawet Muda Kretif dan inkubasi pemuda wirausaha, KAPOK PAK EKO (Peningkatan kelompok ekonomi di pedesaan), ANDALAN PAS (bantuan permodalan UMKM dan Koperasi), KUMPUL BAKUL (Promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobismis dan produk lokal kebumen melalui dropshipper, marketplace dan katalog lokal) dan DEMEN MBUMEN (Gerakan cinta produk kebumen dan pengembangan pariwisata berbasis potensi desa). Produk unggulan yang dapat dikembangkan sebagai katalisator antara lain: gula semut, Genjah Entog, garam, Sapi PO serta produk hortikultura bernilai ekonomi tinggi (jambu kristal, Belimbing Madu, semangka, pepaya, pisang).
c) Pembentukan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan yang diharapkan dapat membantu para penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi dan peningkatan keterampilan untuk bersaing dalam dunia kerja.
2) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan melalui:
a) Penanggulangan Bencana: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan menurunkan indeks resiko bencana. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program unggulan daerah MEN TAMBENG: Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

b) Pembangunan Desa: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan inovasi dalam penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan dan desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program unggulan daerah antara lain DESMELI (Desa Melek Internet) dan DEMEN MBUMEN (Gerakan cinta produk kebumen dan pengembangan pariwisata berbasis potensi desa).
c) Pemenuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya bagi masyarakat miskin. Dilaksanakan melalui program GO – LAK : Jemput ke rumah Layanan Adminitrasi Kependudukan Program pelayanan adminitrasi kependudukan jemput bola ke rumah "ora antri, ora suwe, cepet dadi"
d) Memperkuat kelembagaan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan: Kegiatan ini diarahkan untuk Peningkatan kinerja dan optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan ditingkat kabupaten.
e) Infrastruktur pendukung penanggulangan kemiskinan: kegiatan ini diarahkan untuk tersedianya infrastruktur pendukung penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program unggulan daerah antara lain JAMU SEGER (Jalan Mulus Ekonomi Bergerak) dan BANYU MILI (air irigasi tersedia terus).

Strategi penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan untuk lima tahun kedepan dilakukan dengan pendekatan **"Sinergitas Seluruh Stakeholder dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Serta Optimalisasi Sumber Daya Berbasis Kearifan Lokal"**. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan praktek-praktek baik (*best practices*) penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki dan berhasil baik dalam pemberdayaan masyarakat terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Contoh program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi masyarakat dan berhasil baik antara lain:

a. Desa Jatijajar Kecamatan Ayah

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan Pemerintah Desa Jatijajar melalui DEWAJATI dengan memanfaatkan potensi wisata. DEWAJATI merupakan unit BUM Desa yang diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Jatijajar (Dari Masyarakat Untuk Masyarakat). DEWAJATI memberikan peluang kepada warga miskin atau masyarakat desa untuk menjadi pemilik saham. Pada akhir tahun pendapatan akan diberikan kepada pemilik saham sebagai penghasilan akhir tahun. Selain itu pengelolaan DEWAJATI melibatkan masyarakat desa termasuk masyarakat miskin.

b. Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan Pemerintah Desa Jatimulyo adalah melalui Gerakan menanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam melalui program 'Mana Kebunmu?'. Program tersebut dilaksanakan melalui pembangunan rumah bibit tanaman 'Sekar Taji' yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatimulyo merupakan salah satu keberhasilan untuk mewujudkan kemandirian atau ketahanan pangan dan mengentaskan kemiskinan yang ada di desa. Selain menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan program ini berhasil menjadi sumber pedapatan bagi masyarakat desa.

c. Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan Pemerintah Desa Sidomulyo adalah program 'Tanah Kas Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan'. Beberapa langkah yang digagas oleh Pemerintah Desa Sidomulyo dan disepakati bersama seluruh masyarakat antara lain:

1) melakukan pembatasan akumulasi kepemilikan tanah melalui kesepatan informal dengan warga,
2) menyediakan akses lahan pertanian bagi rumah tangga petani miskin dengan lahan sempit dan buruh tani memanfaatkan tanah kas desa berupa kemakmuran dan bengkok desa
3) mencari solusi stimulus permodalan untuk rumah tangga petani miskin melalui kemudahan akses permodalan melalui bank kredit desa atau BUM Desa dengan skema kredit lunak, dan
4) meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat pada sektor usaha kerajinan bambu sebagai alternatif penambahan penghasilan.

3. Pengembangan Agrobisnis

Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan ciri khas agraris dimana mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Secara struktur, aktivitas perekonomian juga masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar dalam PDRB, meskipun setiap tahun peranannya semakin menurun yang artinya mulai terjadi pergeseran baik ke sektor sekunder maupun tersier.

Disisi lain, meskipun sektor pertanian masih menjadi sektor dominan, namun sektor ini belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk dalam kategori miskin. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada sektor ini antara lain meliputi kurangnya skala usaha sehingga tidak memenuhi skala ekonomis, kurangnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah produk serta kurangnya manajemen usaha dan akses pemasaran. Saat ini, tingkat kepemilikan lahan pertanian di Kabupaten Kebumen hanya mencapai 0,23 Ha per petani, masih sangat jauh dari kriteria layak dimana untuk memenuhi kebutuhannya minimal, paling tidak setiap petani mengelola lahan seluas 2Ha. Kurangnya produktivitas dipengaruhi oleh luas kepemilikan lahan, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna, pengaruh iklim dan cuaca serta menurunnya kualitas lahan.

Kondisi keterbatasan lahan dan produktivitas lahan yang kurang optimal, masih diperparah dengan rendahnya nilai tambah produk pertanian yang ada. Mayoritas petani di Kabupaten Kebumen menanam komoditas tanaman pangan yang memiliki nilai tambah paling rendah dibandingkan komoditas pertanian lainnya. Selain itu, perilaku petani yang belum terbiasa mengolah produknya dan hanya menjual dalam bentuk dasar/ mentah menyebabkan hilangnya potensi pendapatan petani atas produk tersebut. Hal ini sangat terkait dengan kurangnya manajemen usaha serta sulitnya akses pemasaran produk pertanian.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, perlu dirancang strategi yang berfokus pada upaya peningkatan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dalam arti luas. Kebijakan-kebijakan

pengembangan pertanian yang sudah dilakukan saat ini sudah selaras dengan upaya penyelesaian permasalahan kesejahteraan di sektor pertanian. Oleh karena itu, maka kebijakan yang sudah ada saat ini masih perlu dilanjutkan, meskipun perlu dilakukan beberapa pergeseran prioritas di dalamnya. Salah satu yang yang perlu ditekankan adalah perlunya fokus pengembangan yang diarahkan bukan hanya pada jumlah produksi, tapi lebih kepada peningkatan nilai produksi. Beberapa hal yang perlu mendapatkan prioritas lebih dalam pengembangan pertanian selama lima tahun ke depan antara lain:

a. Penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan pertanian

Keberhasilan dari suatu kebijakan akan sangat bergantung pada kapasitas sumberdaya manusia yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian menjadi hal yang sangat mudah ditemui, mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor marjinal yang banyak diisi oleh para pekerja yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja di sektor lainnya. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari rendahnya kapasitas teknis maupun kelembagaan petani menjadi hal yang pertama perlu diselesaikan. Sasaran peningkatan kapasitas selain meliputi para petani dalam arti luas juga mencakup aparatur pemerintah yang terkait dengan pengembangan agrobisnis dari pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan sampai dengan petugas lapangan yang berinteraksi langsung dengan para petani.

b. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan/ atau korporasi

Dalam rangka menjawab permasalahan keterbatasan lahan dan kurangnya produktivitas, perlu dilakukan pengembangan pertanian dengan konsep kawasan. Pengembangan komoditas diarahkan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Salah satu penerapan dari kebijakan ini adalah adanya Program Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (Program DAPAT) yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Selain itu, pengelolaan pertanian yang berbasis korporasi juga perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan perbaikan pengelolaan yang berdampak pada efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas.

c. Pengembangan komoditas bernilai tinggi

Kebijakan yang tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dalam arti luas adalah upaya peningkatan nilai tambah, salah satunya melalui pengembangan komoditas bernilai tinggi. Lahan yang ditanami komoditas yang bernilai rendah dapat dialihkan untuk penanaman komoditas dengan nilai yang lebih tinggi. Beberapa komoditas tentu saja tidak dapat dihilangkan terkait dengan kebutuhan pangan, namun masih dapat dikurangi selama ketahanan pangan daerah masih dapat terpenuhi.

d. Pengembangan produk olahan pertanian

Ketika keterbatasan lahan menjadi hal yang tidak dapat dihindari, maka upaya peningkatan nilai produksi harus ditempuh melalui peningkatan harga jual produk. Selain melalui pemilihan jenis komoditas, peningkatan harga produk juga dapat diupayakan melalui pengembangan produk olahan. Dengan adanya pengolahan lanjutan, diharapkan potensi keuntungan yang ada akan dapat dinikmati oleh petani sendiri.

Selain terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan agrobisnis juga sangat erat kaitannya dengan isu ketahanan pangan. Sektor pertanian dalam arti luas merupakan penyedia utama dari kebutuhan pangan masyarakat. Pada urusan pertanian, meskipun memiliki nilai tambah yang relatif lebih rendah dibandingkan komoditas lainnya seperti peternakan, hortikultura maupun perkebunan, komoditas tanaman pangan tetap perlu dikembangkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah. Hal yang sama juga masih perlu dilakukan pada urusan perikanan, dimana komoditas perikanan dengan nilai tambah yang relatif rendah seperti lele masih akan dikembangkan sebagai pendukung upaya peningkatan konsumsi ikan, meskipun prioritas utamanya adalah pengembangan komoditas perikanan bernilai tinggi.

Isu ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan ketersediaan, namun juga aksesibilitas maupun pemanfaatan pangan. Dua isu terakhir inilah yang lebih menjadi prioritas urusan pangan di Kabupaten Kebumen. Meskipun Kabupaten Kebumen selalu mengalami surplus ketersediaan pangan utama, namun ternyata belum semua wilayah dapat dengan mudah menjangkau sumber-sumber pangan utama. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan menjadi hal yang sangat penting, karena dapat memudahkan jalur distribusi pangan bahkan sampai ke wilayah terpencil. Selain itu, pembangunan infrastruktur pangan juga diperlukan dalam mengatasi terjadinya fluktuasi harga pangan. Pemanfaatan lahan pekarangan juga menjadi solusi yang sangat potensial dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan daya beli yang terbatas.

Kemudian terkait dengan aspek pemanfaatan pangan, masalah keamanan dan kualitas konsumsi pangan juga menjadi pekerjaan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah. Penguatan pengawasan keamanan pangan perlu dilakukan karena masih sering ditemui adanya produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kualitas konsumsi pangan juga belum berada dalam kondisi ideal dan diharapkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain dari sisi pendapatan, kualitas konsumsi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi yang bergizi seimbang sehingga upaya-upaya yang terkait dengan hal ini masih perlu dipertahankan.

Strategi pengembangan agrobisnis baik yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani maupun yang terkait dengan peningkatan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang mengampu urusan tersebut (urusan pangan, urusan pertanian serta urusan kelautan dan perikanan), namun harus didukung oleh urusan yang lain seperti pekerjaan umum, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM, pariwisata, kesehatan serta urusan terkait lainnya.

Strategi pengembangan agrobisnis ini selaras dengan misi ke 3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. Pencapaian visi tersebut akan ditempuh melalui program-program unggulan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2021-2026 yang fokus pada pengembangan agribisnis yaitu antara lain Tani Mulyo dalam rangka peningkatan produksi pertanian dengan pemenuhan sarpras pertanian, Banyu Mili, Rumah Pompa dan Penanganan terpadu pasca panen. Selain itu pengembangan potensi lokal perikanan darat, perikanan tangkap dan kampung garam.

4. Pengembangan inkubasi kewirausahaan

Inkubasi kewirausahaan adalah suatu proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan dan pengembangan yang diberikan kepada wirausahawan, calon wirausahawan atau peserta inkubasi (*tenant*) dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula. Pengembangan inkubasi kewirausahaan dalam rangka mendukung misi ke-3 "Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan." Untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah Kabupaten Kebumen, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan wirausaha yang telah ada. Adapun salah satu program unggulan guna mewujudkan misi tersebut adalah Kebumen Ekonomi Handal, dengan program inkubasi wirausaha. Kegiatan Inkubasi ini diharapkan dapat menstimulasi iklim yang kondusif dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah menuju kemandirian masyarakat Kabupaten Kebumen yang sejahtera. Peranan Inkubator Wirausaha menjadi sangat penting dan strategis untuk melahirkan wirausaha yang kreatif dan inovatif, karena melalui inkubator calon-calon wirausaha baru berbasis IPTEK dapat kita kembangkan.

Kewirausahaan dewasa ini dinilai efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kontribusinya pada peningkatan pertumbuhan perekonomian sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Meskipun disisi lain wirausaha saat ini tidak bisa lagi menghindar dari situasi dan kondisi perdagangan bebas dunia agar mampu bertahan dan berkembang. Wirausaha perlu akses pasar sebesar-besarnya ke pasar dunia, dan sebaliknya juga dituntut untuk mampu membuka pasar domestik, oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kapabiltas wirausaha dalam peningkatan kemampuan kewirausahaan dengan peningkatan pengembangan ide-ide kreatif, kemandirian, kemampuan bisnis dan jiwa kepemimpinan dalam sektor kewirausahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas kewirausahaan.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada pengurangan lapangan kerja, peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah perlu upaya meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pembangunan ekonomi berbasis kewirausahaan sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi. Peningkatan daya saing wirausaha dapat ditempuh dengan mewujudkan ruang bagi wirausaha muda untuk dapat meningkatkan ketrampilan dan pengetahuannya serta mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha muda yang tangguh, kreatif dan professional yang berdaya saing di daerah, maka pendampingan kepada wirausaha dipandang perlu untuk mengoptimalkan perkembangan wirausaha – wirausaha yang ada di Kabupaten Kebumen.

Inkubasi kewirausahaan akan dilaksanakan sebagai fokus utama revitalisasi dan optimalisasi fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Kebumen. Adapun fokus pelaksanaan program kepada peserta inkubasi (*Tenant)* yang diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitas pembinaan wirausaha melalui Inkubator Wirausaha Kabupaten Kebumen, diprioritaskan pada 7 (tujuh) bidang fokus yang meliputi :

a. Agribisnis dan Ketahanan Pangan
b. Rekayasa Teknologi
c. Kehutanan
d. Informasi dan Komunikasi
e. Kesehatan
f. Kelautan dan Perikanan
g. Industri Kreatif

Pelaksanaan Inkubasi Bisnis terbagi dalam beberapa sub proses sebagai berikut:

1. Sub Proses Bisnis Pra Inkubasi: Kegiatan yang dijalankan membangun sinergi kemitraan antara tenant dan pasar serta faktor pendukung (Pemerintah, Perguruan Tinggi dll). Adapun proses yang dilaksanakan antara lain:
    a. *talent scouting* (inventarisasi dan penggalian hasil-hasil teknologi dengan tingkat kematangan teknologi lebih besar dari 7, ide bisnis yang prospektif untuk kemudian menjadi calon tenant.
    b. Pelatihan: pelatihan *business plan*, pengembangan bisnis, pendampingan teknologi dan bisnis
2. Sub Proses Bisnis Inkubasi Bisnis: tahapan kegiatan alih teknologi dan bisnis untuk merealisasikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan tenant sesuai proposal pengembangan bisnis. Output proses ini adalah status bisnis mulai berkembang dan status produk sudah tersertifikasi dan dapat diterima pasar. Proses yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
    a. Persiapan inkubasi: penyiapan roadmap rencana bisnis
    b. Uji produksi: fasilitasi pengembangan produk, pengembangan tenant untuk persiapan peralatan dan proses produksi
    c. Training dan Mentoring: pelatihan pengembangan bisnis, mentoring teknologi, pemasaran, keuangan dan penyusunan rencana bisnis
    d. Pendampingan sertifikasi: pendampingan pelaksanaan pengujian produk yang diperlukan sesuai ketentuan Lembaga berwenang untuk mendukung komersialisasi produk.
    e. Uji jual: promosi produk tenant
    f. Monev akan dilaksanakan secara periodik oleh tim seleksi/panitia
3. Sub proses pasca inovasi: tahapan kegiatan ini adalah tahapan proses bisnis berupa aksesibilitas produksi masal, tenant sudah mempersiapkan produksi masal dan peningkatan kemampuan untuk membangun jaringan bisnis dan produksi masal. Proses yang dilaksanakan antara lain:
    a. Pelatihan lanjutan pengembangan bisnis seperti manajemen keuangan, pemasaran, peningkatan kapasitas SDM, pendampingan teknologi dan bisnis, aksesibilitas teknologi, aksesibilitas permodalan dan pasar.
    b. Promosi produk, temu bisnis dalam rangka aksesibilitas bisnis.

Sedangkan fasilitas yang diperoleh *tenant* saat mengikuti kegiatan inkubasi wirausaha adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas fisik penunjang inkubator bisnis:
    a. Ruang usaha tenant/ruang pamer
    b. Ruang kantor dan perlengkapan pendukung
    c. Ruang rapat atau pertemuan bisnis
    d. Akses internet
2. Pendampingan Bisnis (Layanan pengembangan bisnis bagi tenant) antara lain:
    a. Pengembangan bisnis
    b. Pengembangan teknologi dan proses produksi
    c. Konsultasi Bisnis (Bimbingan bisnis, manajemen bisnis)
    d. Pembuatan Bussiness Plan atau Studi Kelayakan Usaha
    e. Pendirian Legalitas usaha (ijin usaha bagi yang belum memiliki)
    f. Standarisasi Produk
    g. Sertifikasi Produk
    h. Penyediaan Pendamping dan/atau Mentoring Bisnis

i. Pengujian Produk
j. Promosi Produk dan Usaha
k. Pelatihan Bisnis

3. Akses Permodalan Bisnis

Dalam pelaksanaan inkubasi Bappeda tidak memberikan bantuan finansial (keuangan) namun membantu tenan untuk pendampingan dalam akses kredit modal usaha melalui:

a. Fasilitasi untuk akses modal ke Lembaga perbankan dan Non Bank
b. Fasilitasi untuk akses modal ke Lembaga Pemerintahan

4. Jejaring dan Kolaborasi

Memberikan sarana untuk membangun jejaring bisnis dan kolaborasi bisnis bagi tenan, diantaranya melalui:

a. Temu Bisnis
b. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan atau Lembaga Alih Teknologi
c. Kemitraan Bisnis dengan Pengusaha
d. Kegiatan dengan inkubator dan forum inkubator nasional dan internasional.

5. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha

Sebagai salah satu strategi untuk menggerakkan perekonomian daerah, pemerintah daerah dapat membentuk BUMD. Berdasarkan aspek regulasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 331 yang mengamanatkan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Tujuan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD pasal 7 dimana tujuan pendirian BUMD adalah :

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; serta
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kebumen dari usaha-usaha yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah sekaligus dapat menjadi sumber pendapatan daerah cukup beragam. Oleh karena itu, pembentukan BUMD Aneka Usaha Kabupaten Kebumen yang tidak hanya mengelola satu jenis usaha, merupakan strategi yang tepat. Langkah tersebut juga telah didukung melalui hasil Kajian Kelayakan Bidang Usaha Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan aspek kebijakan pemerintah daerah, pembentukan BUMD Aneka Usaha dalam rangka mendukung pencapaian Misi ketiga pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan untuk unit-unit usaha di sektor perekonomian. Selain itu juga mendukung Misi keempat pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Hal ini juga sesuai dengan aspek potensi dimana BUMD Aneka Usaha rencananya akan bergerak pada beberapa unit usaha berdasarkan potensi pengembangannya, yaitu:

a. perdagangan umum, diharapkan dapat membantu upaya pemerintah daerah dalam pengendalian peredaran barang pokok sekaligus pengendalian harga agar masyarakat bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau;
b. pergudangan, sangat penting dilakukan terutama untuk produk-produk agrikultur agar produk yang dihasilkan tetap dalam kondisi baik sebelum dipasarkan. Hal ini mendukung program unggulan seperti KUMPUL BAKUL maupun DEMEN MBUMEN agar produk lokal tetap berkualitas dan berdaya saing di pasaran;
c. pengembangan pariwisata, dalam rangka mendukung program unggulan DEMEN MBUMEN dari sisi pengembangan pariwisata lokal sesuai dengan potensi yang ada dengan unit bisnis agen perjalanan wisata dan *MICE* (*Meeting Incentive Convention Exhibition*);
d. industri pengolahan, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian, perikanan dan kelautan, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen; dan
e. bidang usaha lainnya sesuai dengan potensi pengembangan usaha.

Selain itu, pembentukan BUMD Aneka Usaha ini juga akan menjadi bagian optimalisasi PAD baik dari penerimaan deviden, potensi pajak serta peningkatan pemanfaatan aset pemerintah daerah.

Potensi di atas menunjukkan bahwa pembentukan BUMD Aneka Usaha dalam rangka pemenuhan aspek pelayananan umum dan aspek kebutuhan masyarakat yaitu pengembangan ekonomi masyarakat, pemenuhan barang pokok yang terjangkau bagi masyarakat umum hingga terciptanya lapangan kerja. Sedangkan berdasarkan aspek pasar dengan kemudahan akses konektivitas ke seluruh wilayah Pulau Jawa, Indonesia bahkan dunia sehingga memungkinan pembentukan BUMD Aneka Usaha ini akan meningkatkan ekspor (baik ke daerah lain ataupun ke luar negeri) hingga meningkatkan kunjungan wisata.

Berdasarkan aspek pendukung lainnya, Kabupaten Kebumen juga memiliki akses koneksi Teknologi Informasi yang relatif baik seperti halnya di wilayah Pulau Jawa pada umumnya. Hal ini sangat memungkinkan dalam pengembangan promosi dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan BUMD melalui *e-commerce* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen seluruh unit usahanya. Berdasarkan aspek sumber daya manusia, Kabupaten Kebumen juga memiliki berbagai potensi SDM yang baik. Pembentukan BUMD Aneka Usaha ini diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja dengan berbagai jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

6. Pembangunan Kawasan Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri menjelaskan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Kawasan Peruntukan Industri didefinisikan sebagai bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi

dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pembentukan Kawasan industri di Kabupaten Kebumen menjadi harapan bagi banyak pihak dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran, dan ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Masuknya program Pengembangan Kawasan Industri Petanahan Kabupaten Kebumen dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp.2 Triliun, merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah terhadap pembentukan kawasan industri di Kabupaten Kebumen. Pembanguan kawasan industri ini juga mendukung misi ketiga pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan rencana pola ruang kabupaten, lokasi Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen masuk dalam rencana Kawasan Peruntukan Industri yang memilliki luas 1229,47 hektar, sehingga sudah sesuai secara tata ruang untuk pembangunan kawasan industri. Pada tahap awal, diprioritaskan untuk membangun kawasan industri sesuai dengan lokasi yang sudah direncanakan dalam Studi Pengembangan Zona Industri Kabupaten Kebumen yaitu di Kecamatan Petanahan khususnya di Desa Karangrejo, Desa Karanggadung dan Desa Tegalretno dengan total luas kawasan kurang lebih mencapai 315 Hektar. Lokasi tersebut berada di dalam delineasi RTR Kawasan Industri Provinsi Jawa Tengah, tepatnya berada pada delineasi kawasan industri bagian selatan.

Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarananya pada Tabel 6.1. kawasan industri Kebumen berada di tepi jalan arteri primer, terlayani jaringan kereta api, terlayani pelabuhan dari Pelabuhan Cilacap, terkoneksi dengan bandara Kulonprogo dan Purbalingga serta tersedia jaringan listrik dari PLN.

Tabel 6.1
Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri Kebumen

Kriteria	Kondisi Eksisting
Jarak ke pusat kota	Jarak ke Pusat Kota Kebumen 17 km
Jarak terhadap permukiman	Jarak ke permukiman terdekat 0,5 km
Jaringan transportasi darat	Di tepi jalan arteri primer (JJLS); jaringan kereta api
Jaringan energi dan kelistrikan	PLN
Jaringan telekomunikasi	Jaringan telepon kabel dan nirkabel
Prasarana angkutan	Pelabuhan terdekat di Cilacap dan terkoneksi dengan bandara YIA Kulonprogo dan JB Soedirman Purbalingga
Sumber air baku	Jarak sungai terdekat 5 km; Terdapat sungai di sekitar lokasi yaitu Luk Ulo

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2019 (Executive Summary: Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037, jenis industri potensial khusus di Kawasan Industri Kebumen adalah industri gula berbasis tebu, aren dan kelapa, industri pengolahan tembakau, industri kulit, barang dari kulit

dan alas kaki, industri barang anyaman bambu, rotan dan sejenisnya, dan industri barang galian bukan logam seperti industri genteng dan industri batu mulia (akik).

Sedangkan hasil kajian Masterplan Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen, didapatkan jenis industri yang direncanakan di kawasan industri Kebumen yaitu Aneka Industri yang *low polutan* dan Industri Kecil. Aneka Industri adalah industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan sehari-hari, seperti industri kimia, industri pangan, dan industri bahan bangunan dan umum. Sedangkan Industri Kecil merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit dan teknologi sederhana. Oleh karena itu kawasan industri yang dikembangkan di Kabupaten Kebumen adalah industri pangan yang terkait dengan perikanan dan garam.

Beberapa dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembentukan Kawasan Industri Kebumen saat ini sudah tersusun, di antaranya yaitu *masterplan, feasibility study, Basic Engineering Design (BED)*, dan ijin prinsip dari Dinas dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen. Dokumen RTRW Kabupaten Kebumen sendiri masih dalam proses revisi, meskipun demikian Kawasan Industri Kebumen sudah masuk Perda revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah. Ijin HPL dan sertifikat Hak Pengelola (HPL) juga sudah turun dari Kementerian ATR/BPN dan sudah diproses oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen. Meskipun demikian masih banyak tahapan yang harus dilakukan guna mewujudkan Kawasan Industri Kebumen.

7. Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen termuat dalam Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan pengembangan tata ruang yang terwujud dalam struktur ruang dan pola ruang untuk jangka waktu 20 tahun. Struktur ruang tergambar dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sitem jaringan prasarana, sementara pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi peruntukan fungsi lindung dan budidaya.

Pada saat penyusunan Perda RPJMD 2021-2026 Perda RTRW dalam proses revisi, dalam rangka mewadahi perkembangan dinamika pembangunan yang ada. Proses revisi RTRW dan KLHS RTRW sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur. Selanjutnya akan mengajukan permohonan subtansi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan sinkronisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam RTRW adalah mewujudkan wilayah kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan, aman, nyaman, dan produktif.

Dalam rencana struktur ruang terdapat rencana sistem perkotaan berupa pusat-pusat permukiman; terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kawasan Perkotaan Kebumen; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kawasan Perkotaan Gombong, Karanganyar, dan Prembun; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di setiap ibukota kecamatan; dan Pusat Pelayanan Lingkungan yang tersebar di 18 desa pada 13 kecamatan. Selain itu terdapat pula rencana system jaringan prasarana meliputi:

a. rencana sistem jaringan transportasi;
b. rencana sistem jaringan energi;
c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;

d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Beberapa rencana pembangunan yang signifikan dalam struktur ruang adalah pengembangan PKW di Kawasan Perkotaan Kebumen serta PKL di 3 kawasan perkotaan lainnya (Gombong, Karanganyar, Prembun). Selain itu pembangunan sistem jaringan prasarana jalan di antaranya berupa:

a. Pengembangan jalan tol berupa pengembangan ruas jalan tol Cilacap – Yogyakarta
b. Pengembangan jaringan jalan lintas selatan (JJLS) dari Wawar – Tambak Mulyo – Jladri – Ayah – Bodo;
c. Pengembangan Rencana Jalan Lintas Kabupaten Banjarnegara (Banjarnegara – Kebumen – Batang dan Pekalongan)
d. Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong;
e. Penyediaan jalan menuju kawasan industri;
f. Pengembangan Terminal Tipe A dan Terminal Barang.

Pengembangan pada sistem jaringan prasarana lain di antaranya yang cukup signifikan berupa:

a. Sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Keburejo;
b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri dan fasilitas kesehatan;
c. Pengembangan Tempat Penampungan Sampah Sementara 3R (TPS3R) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
d. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di Kecamatan Prembun dan Petanahan;
e. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.

Dalam rencana pola ruang terdapat kawasan peruntukan lindung berupa:

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan konservasi;
d. kawasan lindung geologi;
e. kawasan rawan bencanayang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi;
f. kawasan cagar budaya; dan/atau
g. kawasan ekosistem mangrove.

Selain itu terdapat pula kawasan peruntukan budidaya meliputi:

a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan pertanian;
d. kawasan perikanan;
e. kawasan pertambangan dan energi;
f. kawasan peruntukkan industri;
g. kawasan pariwisata;
h. kawasan permukiman;
i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Di antara seluruh kawasan lindung terdapat kawasan lindung geologi yang menjadi salah satu keunikan di Kabupaten Kebumen. Di dalam kawasan lindung tersebut terdapat Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) Karangsambung sesuai Kepmen ESDM Nomor 2817K/40/MEM/2006 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung; serta Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong sesuai Kepmen ESDM Nomor: 3873K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst

Gombong. Selain itu terdapat pula Kawasan Ekosistem Mangrove dengan pengembangan pantai berhutan mangrove di kawasan pesisir di Kecamatan Ayah, Puring, dan Petanahan, serta pelestarian mangrove yang telah ada di Muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan Muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong.

Pada kawasan budidaya, terdapat kawasan tanaman pangan berupa lahan pertanian lahan basah dan lahan kering dengan luas kurang lebih 43.154,48 ha yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). Selain itu terdapat pula Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Petanahan, Klirong, dan Puring sebelah selatan yang bisa dikembangkan menjadi Kawasan Industri Petanahan Kabupaten Kebumen sesuai arahan dalam Perpres 79 tahun 2019 dan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas RTRW Provinsi Jawa Tengah.

8. Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen

Perda 23 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen menyebutkan bahwa Perkotaan Kebumen berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, sehingga ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Perkotaan Kebumen memiliki berbagai fasilitas pelayanan umum, memiliki kompleks pasar dan pertokoan terbesar di Kabupaten Kebumen, selain itu juga serta memiliki beragam sarana transportasi, sehingga dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun Naskah Akademik Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kebumen (berupa materi teknis, raperda dan album peta) pada tahun 2014. Naskah Akademik tersebut masih relevan digunakan walaupun akan ada revisi RTRW karena telah disinkronkan dan diakomodir ke dalam Dokumen teknis Revisi RTRW. Sesuai Naskah Akademik RDTR Perkotaan Kebumen, penataan Perkotaan Kebumen menekankan pada optimalisasi sektor agribisnis, perdagangan dan jasa, dan pertanian. Agribisnis merupakan sektor basis di kawasan perkotaan Kebumen karena didukung dengan kondisi kelerengan yang datar dan sarana prasarana agribisnis yang memadai. Perdagangan dan jasa juga merupakan sektor penting karena letak kawasan perkotaan Kebumen yang strategis yakni dilalui oleh jalan nasional. Sesuai Dokumen RDTR Perkotaan Kebumen, Sub Bagian Wilayah Perencanaan (SBWP) yang diprioritaskan penanganannya di kawasan Perkotaan Kebumen, yaitu:

1. Koridor jalan arteri primer yang melewati wilayah Kelurahan Panjer, Kebumen, dan Kutosari.
2. Koridor jalan arteri sekunder yang melewati Kelurahan Tamanwinangun, Panjer, Kebumen, Bumirejo, dan Kutosari.

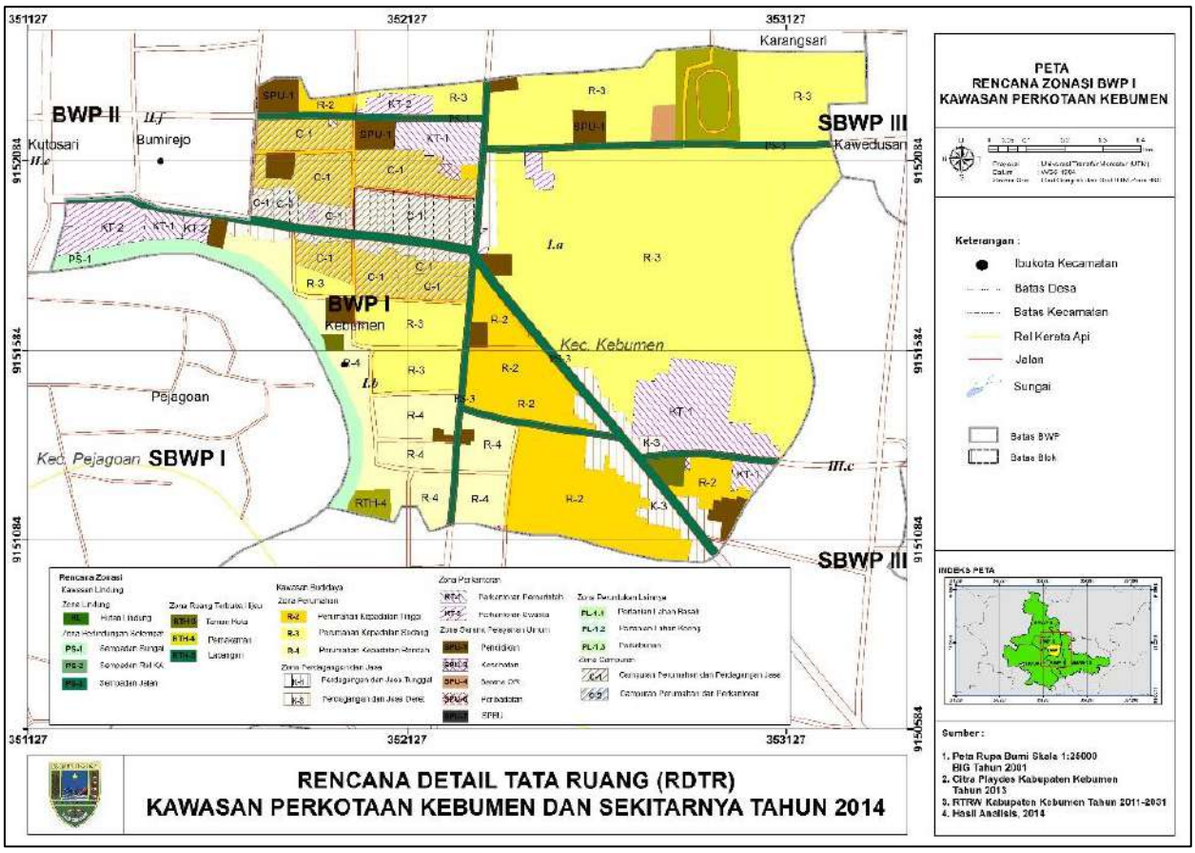

Sumber: Naskah Akademik Rencana Detail Tata Ruang, 2014

Gambar 6.1
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan Kebumen dan Sekitarnya Tahun 2014

Prioritas pengembangan Perkotaan Kebumen pada Koridor Jalan Arteri Primer secara rinci dapat difokuskan pada koridor Jalan Pahlawan, Jalan Mayjen Sutoyo dan Jalan Kusuma, karena pada daerah tersebut merupakan wilayah kunci yang bernilai penting dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya. Ruas jalan yang termasuk dalam koridor Perkotaan Kebumen terbagi dalam 4 sesi yaitu :

- Sesi 1 : Jalan Pahlawan dari Tugu Lawet ke barat sampai dengan Tugu PKK
- Sesi 2 : Jalan Pahlawan dan Sutoyo yang memutari pada 3 sisi kompleks alun-alun Kebumen
- Sesi 3 : Jalan Sutoyo dari depan SMAN 1 Kebumen ke timur sampai dengan Pasar Koplak
- Sesi 4 : Jalan Kusuma dari Pasar Koplak ke selatan sampai dengan Tugu Lawet



Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2021

Gambar 6.2.
Rencana Penataan Koridor Perkotaan Kebumen

Penataan koridor perkotaan Kebumen dianggap perlu diperbaiki, dikembangkan, dilestarikan, dan direvitalisasi berdasarkan pertimbangan kondisi lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi. Program kegiatan penataan koridor dapat diwujudkan dalam bentuk penataan jalan, drainase, listrik, transportasi, ruang terbuka hijau, revitalisasi kompleks pasar dan pertokoan, dan pemberdayaan UMKM lokal. Penataan koridor ini mendukung misi ketiga pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan untuk unit-unit usaha di sektor perekonomian sekaligus mendukung Misi keempat yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Penataan koridor perkotaan Kebumen diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku pasar, pertokoan, dan UMKM serta dapat meningkatkan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan perkotaan. Penataan koridor perkotaan Kebumen mendukung program unggulan KUMPUL BAKUL dan JAMU SEGER (Jalan Mulus Ekonomi Bergerak) dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak Pandemi Covid-19.

9. Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong

Pada tahun 2018, Geopark Karangsambung-Karangbolong telah ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Dengan ditetapkan menjadi Geopark Nasional, maka keberadaan kekayaan geologi yang didukung keragaman hayati dan budaya di Kebumen diakui di taraf nasional. Hal ini juga sebagai wujud komitmen Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penetapan ini sangat strategis, sebagai lokomotif perekonomian Kabupaten Kebumen yang berbasiskan potensi lokal.

Di wilayah utara, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan yang telah menjadi rujukan bagi para geolog yaitu Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Sementara di wilayah selatan, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan karst Gombong selatan dengan topografi pegunungan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Keindahan alam yang ada di kawasan karst ini sudah tidak perlu diragukan lagi, sehingga kawasan ini lekat dengan wisata alam goa, bukit, dan pantai.

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung memiliki 30 lokasi bentukan geologi (geodiversity) yang terdiri dari 28 situs batuan dan 2 situs mata air panas. Kawasan ini merupakan laboratorium alam dan monumen geologi karena menghadirkan variasi struktur dan jenis batuan di kawasan yang relatif tidak luas. Nilai ilmiahnya bertambah penting setelah lahir teori tektonik lempeng, karena menurut para ahli geologi daerah ini pernah menjadi batas lempeng konvergen berupa jalur subduksi pada Jaman Kapur yang berlanjut hingga Pegunungan Meratus, Kalimantan. Batuan-batuan hasil tumbukan tersebut kini terangkat ke permukaan dan dapat diamati dalam kondisi yang relatif segar. Oleh karena itu, penting untuk terus melindungi batuan-batuan langka yang terdapat di Karangsambung dari kerusakan akibat aktivitas penambangan dengan konsep geopark yang berkesinambungan antara aspek konservasi, edukasi, dan peningkatan perekonomian lokal.

Sementara itu, Kawasan Bentang Alam Karst Gombong merupakan sebuah rangkaian pegunungan atau perbukitan karst yang berada di barat daya Kebumen yang mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ayah, Buayan, dan Rowokele. Kawasan ini memiliki luas 4.894 hektar dengan panjang perbukitan kapur 8 km dan lebar 3 km serta memiliki 182 gua, 2 telaga karst, sungai bawah tanah, ponor, air terjun, dan mata air.

Salah satu tujuan pokok membangun dan mengembangkan geopark adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut. Konsep geopark mengupayakan suatu perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari eksploitasi menjadi konservasi dengan diambil manfaatnya. Dengan terwujudnya Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbong penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka.

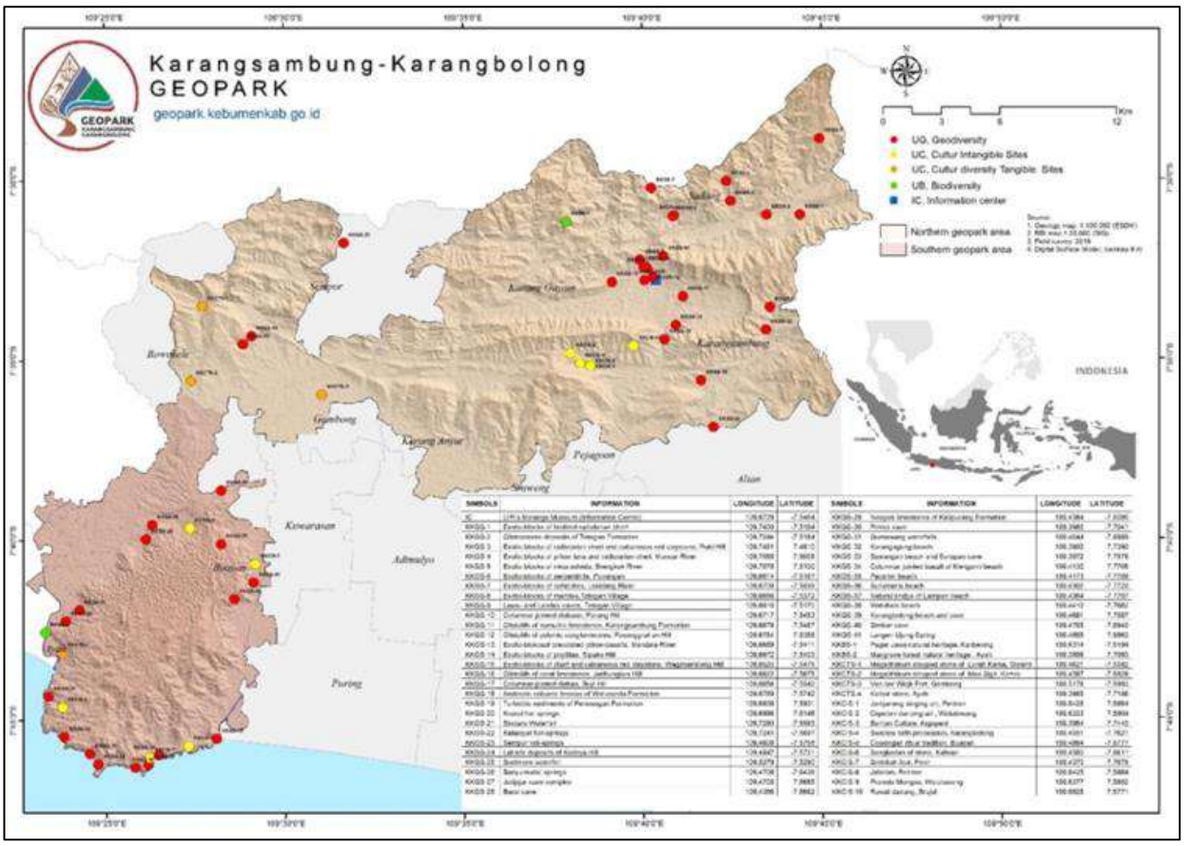

Sumber: Dossier Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong, 2020

Gambar 6.3
Peta Delineasi Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong

Berkenaan dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026, khususnya pada misi ke tiga yaitu "Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan" maka pengembangan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong khususnya sebagai destinasi wisata berkelanjutan, memiliki konsep yang selaras, yaitu pengembangan potensi sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan.

Kondisi global dengan adanya pandemi covid-19 cukup memukul sektor pariwisata dunia. Prinsip wisata berkelanjutan dengan peminatan khusus yang dimiliki oleh Geopark menjadi salah satu solusi untuk pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi. Untuk semakin meningkatkan nilai Kabupaten Kebumen di hingga ke tingkat dunia, saat ini GNKK sedang berupaya untuk dapat meningkatkan status menjadi Geopark Nasional menjadi Unesco Global geopark, yang tentunya akan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan di Kabupaten Kebumen.



Sumber: Dossier Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong, 2020

Gambar 6.4
Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Tahun 2019-2021 sebagai tahun tahun awal penetapan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong lebih ditekankan pada penguatan internal Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong, baik dari aspek SDM, kelembagaan, ataupun Infrastruktur dasar, dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Regulasi (Penetapan Badan Pengelola, Penyusunan masterplan/ Rencana Induk)
2. Sosialisasi serta internalisasi nilai-nilai geopark ke seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen
3. Kemitraan dengan seluruh stakeholder geopark termasuk aspek pembiayaannya.
4. Evaluasi terhadap kinerja Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong
5. Pengusulan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong menjadi Unesco Global geopark

Dukungan pemerintah pusat diantaranya dengan dibangunnya Kawasan geodiversitas Indonesia di Karangsambung yang sepenuhnya dibiayai oleh Pusat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Diharapkan dapat menjadi destinasi bertaraf nasional bahkan internasional bagi masyarakat/ pelajar yang memerlukan informasi terkait geodiversitas khususnya di kawasan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Demikian pula masyarakat di sekitar juga akan dapat merasakan multiplier effect dari pembangunan kawasan tersebut, diantaranya dengan membuka homestay, pusat cinderamata, warung makan dsb.

Dalam upaya mewujudkan Geopark menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat yang memiliki daya saing dan tetap berwawasan lingkungan, maka strategi yang akan ditempuh yaitu:

1. Aspek Edukasi dan Promosi
    a. Penguatan edukasi dengan pelaksanaan *Geopark Goes to School* dan *School goes to geopark* untuk lebih memperkenalkan Geopark kepada siswa dari berbagai tingkatan, sehingga siswa lebih mengetahui dan potensi yang ada di daerahnya serta meningkatkan rasa memiliki dan melestarikan apa yang menjadi miliknya. Disamping meningkatkan pengetahuan siswa, pada program *School goes to geopark* dapat menjadi kesempatan untuk memantik aktifitas perekonomian dan perdagangan lokal melalui transaksi ekonomi wisatawan dengan tujuan peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat di kawasan yang dikunjungi.
    b. Meningkatkan promosi dan penyelenggaraan *event* dengan skala yang lebih luas. Target menjadi tuan rumah dalam agenda geopark berskala Nasional/ Global akan menjadi strategi yang cukup menarik pengunjung serta memperkenalkan potensi dan sumber daya Kabupaten Kebumen ke tingkat nasional/ global.
    c. Penyelenggaraan *event* dan lomba tematik untuk lebih memperkenalkan Geopark dan konsepnya kepada masyarakat Kabupaten Kebumen serta mendorong masyarakat Kabupaten Kebumen semakin mencintai daerahnya.
    d. Mengolaborasikan pendekatan digital dan sosial media dalam strategi komunikasi dan promosi geopark
    e. Promosi di tempat-tempat umum berskala regional, nasional/ global (Stasiun, Bandara, Terminal, Rumah Sakit, Sekolah, Kampus dan tempat strategis lainnya)

f. Pergelaran dan pelestarian Budaya khas Kabupaten Kebumen di lingkup yang lebih luas

2. Aspek Konservasi
   a. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian kawasan dengan tujuan merubah pola pikir masyarakat dari eksploitasi menjadi konservasi. Pada umumnya warga tidak tahu apabila kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong memiliki nilai geologi yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat hingga masa yang akan datang jika dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi salah satu titik lemah upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan yang kurang memperhatikan dampak lingkungan. Oleh karena itu, upaya penyadartahuan masyarakat penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya preventif untuk menahan meluasnya kerusakan ekosistem
   b. Pengendalian kerusakan fungsi lingkungan pada ekosistem melalui penataan dan penertiban kegiatan yang berpotensi memberikan dampak negatif akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, hilangnya vegetasi pada kawasan, erosi dan sedimentasi seta penurunan jumlah keanekaragaman hayati.
   c. Pelatihan Keterampilan untuk Mengembangkan Peluang Usaha. Kegiatan eksploitatif seringkali didorong oleh kebutuhan ekonomi. Meskipun merusak lingkungan, terkadang hasil yang diperoleh tidak seberapa, sangat tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan keterampilan untuk masyarakat sehingga memiliki peluang usaha lain yang lebih prospektif dan tidak membahayakan keselamatan diri sendiri maupun lingkungan. Dukungan lain yang bisa dilakukan untuk masyarakat untuk memperlancar peluang usaha dapat dilakukan dengan mengurangi atau menghentikan pasokan produk sejenis ke dalam daerah.Hal ini tentunya mengurangi tingkat persaingan produk sejenis di dalam wilayah. Selain itu, pembangunan jaringan internet untuk mempermudah akses informasi sekaligus media promosi.
   d. Pengembalian fungsi ekologi terhadap lingkungan yang sudah terlanjur dieksploitasi dengan reboisasi. Reboisasi tidak dapat mengembalikan secara utuh bentuk dan fisiografi lingkungan, akan tetapi melalui upaya menanam kembali vegetasi yang sesuai dengan lingkungan tersebut akan dapat membantu lahan untuk dikembalikan fungsi ekologinya. Terlebih kawasan karst sebagai penyimpan mata air bawah tanah, merupakan daerah penyimpan air, reklamasi penting dilakukan untuk mempertahankan fungsi kawasan sebagai daerah penyangga air. Reboisasi bukan hanya diberlakukan untuk lingkungan, akan tetapi juga termasuk resiko sosial diantaranya kesehatan masyarakat sebagai bentuk upaya kuratif dan kompensasi terhadap lingkungan dan masyarakat.
   e. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui penanaman pohon.

3. Pemberdayaan Masyarakat
   a. Kebijakan Pemanfaatan dana desa untuk mendukung pengembangan potensi di desanya dengan menuangkan pengembangan kawasan dalam dokumen perencanaan desa berdasarkan Pemetaan potensi wilayah.
   b. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui peningkatan kualitas kelembagaan di tingkat desa dengan strategi pemanfaatan potensi lokal melalui fasilitasi penyusunan studi dan perencanaan kawasan oleh pemerintah kabupaten

kepada desa, penggalian budaya khas setempat dan pengembangan ikon budaya kawasan.

c. Program Pelatihan baik untuk peningkatan kapasitas SDM dalam hal ekowisata/ geowisata, Peningkatan kapasitas Pokdarwis ataupun Pelatihan Geoproduk untuk masyarakat.
d. Dukungan terhadap inisiatif masyarakat dan komunitas.
e. Bantuan keuangan untuk pengembangan wisata (kompetisi).
f. Pengembangan Kawasan Pedesaaan yang meliputi kawasan Anyaman Pandan, Kawasan Pesisir Ayah, dan kawasan Gula Semut.
g. Kemitraan dan MoU dengan pihak-pihak diluar Pemda dalam upaya mendukung pengembangan Geopark.

4. Peningkatan Infrastruktur Pendukung
   a. Peningkatan amenitas di kawasan wisata baik berupa pembangunan tugu/ gapura dan penanda Geopark, panel interpetasi, rambu petunjuk arah, toilet, tempat sampah dan sebagainya.
   b. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Jalan menuju kawasan wisata di Kabupaten Kebumen.
   c. Kemudahan trayek kendaraan/ fasilitas kendaraan satelit untuk menghubungkan titik fasilitas umum dengan lokasi.

Menurut Kajian Pengembangan Geowisata oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, fase pengembangan Geopark merupakan fase yang panjang antara 10 – 25 tahun. Adapun beberapa fase dalam pengembangan Geopark, yaitu:

a) Fase 1: Periode Konsolidasi dan Harmonisasi
   1) Pembangunan infrastuktur dasar dan SDM
   2) Introduksi produk kepada konsumen/pasar. Berupa pemasaran, promosi atau kegiatan sejenis yang bertujuan agar produk – produk geowisata dapat dikenal luas oleh para konsumen
   3) Membangun image/Branding

b) Fase 2: Periode Optimasi Pembangunan

Pada fase ini GNKK melalui produk-produknya (dalam hal ini geowisata) dapat segera melakukan penetrasi pasar dengan target domestik maupun mancanegara dan pengelola memperoleh keuntungan secara finasial dan non finansial. Pada fase ini juga perlu memunculkan produk – produk turunan atau produk ikutan dari produk utama geowisata berupa geoproduk (kuliner, cinderamata, agro, dan sebagainya). Adapun strategi yang dilakukan yaitu dengan:

1) membangun pasar,
2) melengkapi dan memperkaya infrastruktur geowisata,
3) mendapatkan benefit finansial dan benefit lain (non finansial).

c). Fase 3: Periode Rejuvenasi Pembangunan
   1) harmonisasi kebutuhan pembangunan dan perkembangan pasar,
   2) penetrasi dan ekspansi pasar,
   3) optimasi benefit finansial dan benefit lainnya (non finansial).

Pada fase ketiga ini juga diperlukan adanya renovasi maupun rehabilitasi sarana infrastruktur serta inovasi produk – produk wisata mengikuti selera pasar.

Prinsip pengembangan geopark yang bersifat inklusif menjadi sinergis dan optimal, bersifat pentahelix dengan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan pakar, organisasi nonpemerintah, maupun filantropi. Dengan adanya prinsip gotong royong tersebut maka pembiayaan pengembangan

Geopark tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Adapun program-program pendukung pengembangan geopark tersebar di beberapa OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya, diantaranya Disporawisata, Dinas PerkimLH, Dinas Perhubungan, Disperindag, Dispermasdes P3A, Diskominfo, DPUPR, Dinas Pendidikan dll. Program-program yang ada di masing-masing OPD tersebut mendukung Geopark baik secara langsung ataupun tidak secara langsung.

10. Strategi Pembangunan Desa dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Perdesaan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan mampu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diharapkan mampu mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis perdesaan dan optimalisasi BUM Desa. BUM Desa maupun BUM Desa Bersama sebagai lembaga ekonomi desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. BUM Desa dapat optimal jika dilaksanakan melalui tahapan identifikasi potensi desa, pemetaan usaha unggulan desa untuk kemudian menghasilkan produk dan memasarkan produk unggulan desa. Lebih lanjut BUM Desa diharapkan mampu membangun sentra-sentra ekonomi baru di desa-desa yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Kewenangan desa telah diatur melalui Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai pembagian peran dan kewenangan pembangunan desa dan kabupaten, sehingga diharapkan ada keselarasan dan pembagian peran antara pemerintah kabupaten dan desa dalam pelaksanaan pembangunan. Disisi lain penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa diproyeksi mencapai Rp. 405.260.453.000, pada tahun 2026 harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan desa sesuai prioritas penggunaan dana desa adalah dalam rangka pencapaian SDGs Desa. SDGs (Sustainable Development Goals disingkat SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa yaitu : 1. Desa tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3. Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa berkualitas, 5. Desa berkesetaraan gender, 6. Desa layak air bersih dan sanitasi, 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9. Inovasi dan infrastruktur desa, 10. Desa tanpa kesenjangan, 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, 14. Ekosistem laut desa, 15. Ekosistem daratan desa, 16.Desa damai dan berkeadilan, 17. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Penentuan prioritas perencanaan Pembangunan desa dan pengembangan ekonomi berbasis perdesaan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa dan kearifan lokal desa. Strategi pembangunan desa untuk lima tahun kedepan

dilakukan melalui pengembangan ekonomi masyarakat desa, pemulihan ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan dampak covid-19, optimalisasi BUM Desa pendayagunaan asset desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, pengembangan kawasan pedesaaan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

11. Strategi Mewujudkan Kebumen Berakhlak

Kabupaten Kebumen menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Pembangunan akhlak tersebut juga menjadi salah satu Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, yaitu Misi Kelima 'Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat'. Beberapa Program Unggulan Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 juga mengarah pada pembangunan akhlak, antara lain:

a. **BASUH**, Program Bapak Asuh Untuk Santri
   Program ini untuk peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan askes pendidikan non formal/keagamaan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM melalui Pondok Pesantren.
b. **SIBUSAH**, Program Santri Kebumen Sehat dan Berkah
   Program ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan derajat kesehatan bagi warga Kebumen, dilakukan dengan peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar terutama bagi santri di Pondok Pesantren.
c. **TUPAT RUJI**, Program Tempat Ibadah dan Guru Ngaji

Selain pelaksanaan Program Unggulan Bupati tersebut, dalam rangka mewujudkan 'Kebumen Berakhlak' juga perlu diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pesantren untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

12. Strategi Peningkatan Sumberdaya Manusia

Salah satu tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah untuk memperluas berbagai pilihan bagi seluruh penduduk dalam mengakses dimensi pendidikan, kesehatan maupun penghidupan yang layak. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, pemerintah berkewajiban menjamin masyarakat agar memperoleh kesempatan yang adil. Kabupaten Kebumen dalam membangun sumberdaya manusia dengan strategi meningkatkan kualitas akses dan pelayanan kesehatan, pendidikan melalui pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan yang adaptif pandemi . Selain itu perlu meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak.

Pembangunan bidang pendidikan ditunjukkan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Kebumen yang meningkat. Sedangkan Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen yang semakin baik ditunjukan dengan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan standar suatu negara maupun daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya diwujudkan agar laki-laki dan perempuan Kabupaten Kebumen memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan melalui peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak. Kesetaraan gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi

dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan yang juga menjadi fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

6.1.2. Analisis Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Analisa Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah terdapat beberapa strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang selengkapnya disajikan pada **Tabel 6.2**.

Tabel 6.2
Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Strategi	
	VISI :	**Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**		
1	**MISI 1 :**	**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi**		
	Tujuan 1.1 :	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		
	Sasaran 1.1.1 :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi 1.1.1 :	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik
	Sasaran 1.1.2 :	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Strategi 1.1.2 :	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik
	Sasaran 1.1.3 :	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Strategi 1.1.3 :	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan penertiban administrasi aset daerah
2	**MISI 2 :**	**Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya**		
	Tujuan 2.1 :	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		
	Sasaran 2.1.1 :	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Strategi 2.1.1 :	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan kesehatan
	Sasaran 2.1.2 :	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Strategi 2.1.2 :	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
	Sasaran 2.1.3 :	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Strategi 2.1.3 :	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak
3	**MISI 3 :**	**Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan**		
	Tujuan 3.1 :	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah		
	Sasaran 3.1.1 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	Strategi 3.1.1 :	Peningkatan nilai tambah dan kualitas sarana-prasarana pertanian
	Sasaran 3.1.2 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	Strategi 3.1.2 :	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
	Sasaran 3.1.3 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	Strategi 3.1.3 :	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata
	Sasaran 3.1.4 :	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		
	Tujuan 3.2 :	Meningkatkan pemerataan pembangunan		
	Sasaran 3.2.1 :	Berkurangnya penduduk miskin	Strategi 3.2.1 :	Penurunan kemiskinan
	Sasaran 3.2.2 :	Berkurangnya pengangguran	Strategi 3.2.2 :	Penurunan pengangguran
4	**MISI 4 :**	**Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Strategi	
	Tujuan 4.1 :	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		
	Sasaran 4.1.1 :	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Strategi 4.1.1 :	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi
	Sasaran 4.1.2 :	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Strategi 4.1.2 :	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk pembangunan berkelanjutan
5	**MISI 5 :**	**Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat**		
	Tujuan 5.1 :	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat		
	Sasaran 5.1.1 :	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Strategi 5.1.1 :	Penjagaan kesatuan bangsa
	Sasaran 5.1.2 :	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Strategi 5.1.2 :	Pelestarian cagar budaya
	Tujuan 5.2 :	Mewujudkan kondusitivas wilayah		
	Sasaran 5.2.1 :	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Strategi 5.2.1 :	Penurunan tindakan kriminal masyarakat
	Sasaran 5.2.2 :	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Strategi 5.2.2 :	Peningkatan desa tangguh bencana

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan memberikan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan pembangunan merupakan keputusan dari semua pemangku kepentingan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan kertas kerja yang telah dibuat, dirumuskan arah kebijakan pembangunan yang selengkapnya disajikan pada **Tabel 6.3**.

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan open-gov dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana	Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia	Pemantapan sektor pertanian, industri dan jasa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta didukung sumber daya manusia yang berdaya saing

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

6.3. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 didukung beberapa program unggulan di antaranya :

1. Misi ke-1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.
   Program-program unggulan yang kami laksanakan antara lain :
   a. GO-LAK = Jemput ke rumah Layanan Adminitrasi Kependudukan Program pelayanan adminitrasi kependudukan jemput bola ke rumah "ora antri, ora suwe, cepet dadi".
   b. SATU DATA UNTUK SEMUA
      Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
   c. Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
   d. Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP)
   e. Festival Anggaran, Keterbukaan Informasi Publik
   f. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan
   g. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
2. Misi ke-2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
   Program-program unggulan yang akan dilaksanakan antara lain :
   a. SIS SUSANA, Program beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan anak yatim
   b. BASUH, Program bapak asuh untuk santri
   c. SIRUP, Program insentif guru PAUD, TK, SD, SMP
   d. Penguatan Sekolah Inklusi
   e. BUMEN SEHATi, Program peningkatan derajad kesehatan bagi warga Kebumen
   f. SIBUSAH, Program santri kebumen sehat dan berkah
   g. Jaminan Kesehatan bagi untuk masyarakat miskin
3. Misi ke-3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
   Program-program unggulan yang akan dilaksanakan antara lain :
   a. KEBUMEN EKONOMI HANDAL, melalui Program "LAWET MUDA KREATIF" pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha
   b. Program DESMELI (DESa MELek Internet)
   c. KAPOK PAK EKO, Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan
   d. ANDALAN PAS, Program bantuan permodalan UMKM dan koperasi
   e. KUMPUL BAKUL, Program promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobisnis dan produk lokal kebumen melalui *dropshipper*, *marketplace*, katalog lokal.
   f. TANI MULYO, Program Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Pemenuhan Sarpras Pertanian (Banyu Mili, Rumah Pompa dan Penanganan terpadu pasca panen)
   g. DEMEN MBUMEN, Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa

h. Pengembangan potensi lokal perikanan darat (kampung sidat, kampung gabus, kampung lele dll), perikanan tangkap dan kampung garam

4. Misi ke-4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
   Program-program unggulan yang akan dilaksanakan antara lain :
   a. Program JAMU SEGER (JAlan MUluS Ekonomi BerGERak)
   b. Program BANYU MILI (Air Irigasi tersedia terus)
   c. Nandur Wit go Anak Putu (Program 1 Anak 2 Pohon dan 1 Nikah 2 Pohon)
5. Misi ke-5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.
   Program-program unggulan yang akan dilaksanakan antara lain :
   a. TUPAT RUJI, Program Bantuan Tempat Ibadah dan Bantuan Guru Ngaji /TPQ
   b. Mesin Serbu, Program Membumikan dan mempromosikan Seni serta Budaya Khas Kebumen
   c. Men Tambeng, Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

6.4. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan pada **Tabel 6.4**.

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	**MISI 1 :**	**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi**																	
	Tujuan 1.1 :	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	58,40	59,33	61,33		63,33		65,33		67,33		69,33		69,33		
	Sasaran 1.1.1 :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81,97	82,50	83,00		84,00		85,00		85,50		86,00		86,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.568.839.000	100,00	5.062.399.000	100,00	5.008.689.000	100,00	4.102.434.000	100,00	4.172.571.000	100,00	22.914.932.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	%	100,00	100,00	100,00	3.419.323.000	100,00	3.455.369.000	100,00	3.456.914.000	100,00	3.458.505.000	100,00	3.460.144.000	100,00	17.250.255.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00	100,00	310.815.000	100,00	366.491.000	100,00	369.227.000	100,00	372.045.000	100,00	374.948.000	100,00	1.793.526.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	1.655.657.000	100,00	1.673.368.000	100,00	1.701.892.000	100,00	1.705.492.000	100,00	1.709.170.000	100,00	8.445.579.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	141.929.000	100,00	162.187.000	100,00	167.052.000	100,00	172.064.000	100,00	177.226.000	100,00	820.458.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Statistik
		Program Administrasi Umum (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Nilai IKM Sekretariat Daerah	nilai	81,97	82	83,00	23.889.294.000	84,00	23.685.244.000	85,00	24.202.662.000	85,50	23.353.756.000	86,00	23.577.832.000	86,00	118.708.788.000	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	nilai	3,32	3,32	2,61	10.795.591.000	2,78	10.338.871.000	2,95	10.640.042.000	3,12	10.950.248.000	3,29	11.269.759.000	3,29	53.994.511.000	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	%		5,48	87,00	2.966.554.000	88,00	3.574.943.000	89,00	3.673.195.000	90,00	3.774.395.000	91,00	3.878.631.000	91,00	17.867.718.000	Sekretariat Daerah
		Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	37.606.680.000	100,00	37.554.195.000	100,00	37.656.556.000	100,00	37.917.153.000	100,00	37.961.511.000	100,00	188.696.095.000	Sekretariat DPRD

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100,00	100,00	100,00	14.924.500.000	100,00	15.485.000.000	100,00	16.307.000.000	100,00	16.167.000.000	100,00	16.447.000.000	100,00	79.330.500.000	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	9.547.747.000	100,00	10.261.489.000	100,00	9.794.038.000	100,00	9.035.879.000	100,00	9.187.539.000	100,00	47.826.692.000	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	73,06	89,00	90,00	1.859.750.000	91,00	2.800.630.000	92,00	3.132.309.000	93,00	3.464.728.000	93,99	3.697.910.000	93,99	14.955.327.000	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya	%	65,66	68,09	70,04	3.499.000.000	72,08	5.200.000.000	73,18	5.395.000.000	75,09	5.565.000.000	77,21	5.755.000.000	77,21	25.414.000.000	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	52.332.407.000	100,00	54.721.123.000	100,00	54.721.123.000	100,00	54.721.123.000	100,00	54.721.123.000	100,00	271.216.899.000	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	83,92	84,00	85,00	1.642.660.000	86,00	1.642.660.000	87,00	1.642.660.000	88,00	1.642.660.000	89,00	1.642.660.000	89,00	8.213.300.000	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	%	83,70	83,00	84,00	14.083.656.000	85,00	9.131.656.000	86,00	9.131.656.000	87,00	9.131.656.000	88,00	9.131.656.000	88,00	50.610.280.000	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	480.910.000	100,00	480.910.000	100,00	480.910.000	100,00	480.910.000	100,00	480.910.000	100,00	2.404.550.000	Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	20,27	21,38	24,05	2.927.907.000	29,17	5.927.907.000	34,04	3.057.907.000	38,08	4.167.907.000	42,09	2.927.907.000	42,09	19.009.535.000	Kecamatan
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	400.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
	Sasaran 1.1.2 :	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	63,85	64,00	67,00		69,00		71,00		74,00		77,00		77,00		
			Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	%	10,00	16,74	38,91	337.210.000	61,30	347.326.000	83,48	357.746.000	100,00	368.478.000	100,00	379.533.000	100,00	1.790.293.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Persandian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	2.981.827.000	100,00	3.236.264.000	100,00	3.361.775.000	100,00	3.733.813.000	100,00	3.818.439.000	100,00	17.132.118.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku	%	64,56	68,95	71,57	519.349.000	74,31	534.928.000	76,27	550.975.000	78,24	567.504.000	80,20	584.530.000	80,20	2.757.286.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.753.034.000	100,00	5.092.682.000	100,00	5.119.041.000	100,00	4.422.435.000	100,00	4.218.011.000	100,00	23.605.203.000	PD Pengampu Urusan Perencanaan
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	90,00	90,00	90,00	1.120.991.000	90,00	1.230.811.000	90,00	1.451.085.000	90,00	1.877.331.000	90,00	1.619.270.000	90,00	7.299.488.000	PD Pengampu Urusan Perencanaan
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	1.117.000.000	100,00	737.173.000	100,00	759.290.000	100,00	962.069.000	100,00	1.666.131.000	100,00	5.241.663.000	PD Pengampu Urusan Perencanaan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	%	75,00	72,73	75,00	727.607.000	75,00	845.800.000	83,30	907.300.000	83,30	911.600.000	91,67	916.600.000	91,67	4.308.907.000	PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	5.469.519.000	100,00	9.680.919.000	100,00	9.173.566.000	100,00	11.354.860.000	100,00	10.460.652.000	100,00	46.139.516.000	PD Pengampu Urusan Pengawasan
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 1/ Level 2/ Level 3/ Level 4/ Level 5	Level 2	Level 3	Level 3	805.558.000	Level 3	2.115.000.000	Level 3	2.341.400.000	Level 3	2.409.042.000	Level 3	2.502.963.000	Level 3	10.173.963.000	PD Pengampu Urusan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	nilai	3,34	3,34	3,34	293.751.000	3,40	1.599.183.000	3,45	1.233.659.000	3,50	1.270.668.000	3,50	1.308.788.000	3,50	5.706.049.000	PD Pengampu Urusan Pengawasan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	32.164.245.000	100,00	26.507.144.000	100,00	29.453.595.000	100,00	26.404.370.000	100,00	26.212.148.000	100,00	140.741.502.000	PD Pengampu Urusan Keuangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,47	95,36	95,35	621.538.019.000	95,54	595.940.840.000	95,72	595.790.819.000	95,89	606.981.723.000	96,05	597.574.970.000	96,05	3.017.826.371.000	PD Pengampu Urusan Keuangan
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	83,00	84,00	86,79	1.727.363.000	87,73	1.779.184.000	88,67	1.932.559.000	89,62	1.340.089.000	90,56	1.380.292.000	90,56	8.159.487.000	PD Pengampu Urusan Keuangan
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	5.241.646.000	100,00	5.688.289.000	100,00	6.198.601.000	100,00	6.724.672.000	100,00	7.335.476.000	100,00	31.188.684.000	PD Pengampu Urusan Keuangan
	Sasaran 1.1.3 :	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,42	3,42	3,43		3,45		3,50		3,55		3,60		3,60		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.937.290.000	100,00	5.282.625.000	100,00	5.243.591.000	100,00	4.920.297.000	100,00	5.267.195.000	100,00	25.650.998.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	%	11,72	20,90	25,88	2.101.841.000	30,20	2.232.801.000	34,51	2.359.560.000	28,82	2.287.121.000	43,14	2.315.510.000	43,14	11.296.833.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan informatika

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	nilai	3,85	3,86	3,85	3.181.442.000	3,85	4.807.885.000	3,86	4.835.122.000	3,86	4.863.175.000	3,87	4.892.071.000	3,87	22.579.695.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan informatika
2	**MISI 2 :**	**Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya**																	
	Tujuan 2.1 :	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	69,81	70,00	70,57		71,00		71,50		72,00		72,50		72,50		
	Sasaran 2.1.1 :	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,40	73,50	73,60		73,70		73,80		73,90		74,00		74,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	367.123.495.000	100,00	382.778.211.000	100,00	392.298.105.000	100,00	398.746.271.000	100,00	409.344.435.000	100,00	1.950.290.517.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	124.120.614.000	100,00	131.829.123.000	100,00	133.656.178.000	100,00	133.781.273.000	100,00	130.389.266.000	100,00	653.776.454.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	%	99,00	100,00	100,00	117.500.000	100,00	121.025.000	100,00	122.521.000	100,00	128.206.000	100,00	130.920.000	100,00	620.172.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	%	100,00	100,00	100,00	553.882.000	100,00	561.382.000	100,00	568.382.000	100,00	568.382.000	100,00	568.382.000	100,00	2.820.410.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	%	58,04	68,04	71,52	7.062.523.000	74,35	7.075.323.000	77,17	7.088.180.000	80,00	7.100.750.000	81,96	7.108.487.000	81,96	35.435.263.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	1,70	2,56	3,07	770.124.000	3,58	380.624.000	3,92	391.439.000	4,43	402.579.000	4,60	414.053.000	4,60	2.358.819.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga	%	50,00	52,63	55,00	3.313.161.000	56,67	3.754.438.000	63,33	3.858.805.000	66,67	3.966.305.000	70,00	4.077.028.000	70,00	18.969.737.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Prestasi Kepramukaan	%	33,33	50,00	60,00	394.428.000	66,67	403.428.000	60,00	412.698.000	66,67	422.246.000	50,00	432.081.000	60,67	2.064.881.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sasaran 2.1.2 :	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,54	7,64	7,74		7,84		7,94		8,04		8,14		8,14		
			Harapan Lama Sekolah	tahun	13,34	13,44	13,54		13,64		13,74		13,84		13,94		13,94		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	914.740.863.000	100,00	913.796.692.000	100,00	924.232.136.000	100,00	914.708.037.000	100,00	931.702.701.000	100,00	4.599.180.429.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	80,31	81,38	82,45	211.046.235.000	83,51	210.537.776.000	84,58	209.706.966.000	85,65	212.415.373.000	86,71	212.527.032.000	86,71	1.056.233.382.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	12,39	12,85	12,89	921.072.000	12,93	993.120.000	12,97	1.027.601.000	13,02	1.045.315.000	13,06	1.073.346.000	13,06	5.060.454.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	%	0,00	20,00	40,00	17.624.000	60,00	19.386.000	80,00	21.324.000	100,00	23.456.000	100,00	25.800.000	100,00	107.590.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
	Sasaran 2.1.3 :	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,15	93,25		93,35		93,45		93,55		93,65		93,65		
			Cakupan Perlindungan Anak	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	12,11	13,48	14,31	312.531.000	15,69	218.907.000	17,06	225.473.000	18,43	232.238.000	19,80	239.205.000	19,80	1.228.354.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan	%	100,00	100,00	100,00	263.935.000	100,00	264.833.000	100,00	265.758.000	100,00	266.711.000	100,00	267.692.000	100,00	1.328.929.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	%	12,11	13,28	14,06	12.919.000	15,63	13.306.000	16,80	13.705.000	18,36	14.116.000	19,92	14.539.000	19,92	68.585.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	%	100,00	100,00	100,00	30.134.000	100,00	31.038.000	100,00	31.969.000	100,00	32.928.000	100,00	33.915.000	100,00	159.984.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	pratama/ madya/ nindya/ utama/ KLA	madya	madya	madya	198.739.000	madya	180.297.000	madya	185.216.000	madya	191.000.000	nindya	197.000.000	nindya	952.252.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	%	100,00	100,00	100,00	267.479.000	100,00	269.009.000	100,00	270.585.000	100,00	272.208.000	100,00	273.880.000	100,00	1.353.161.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	23,08	23,08	25,00	210.000.000	33,33	202.000.000	41,67	157.700.000	50,00	162.427.000	54,17	272.781.000	54,17	1.004.908.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	%	70,77	60,00	63,50	11.916.749.000	63,50	11.916.749.000	64,50	12.130.545.000	65,00	12.350.754.000	65,00	12.577.568.000	65,00	60.892.365.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	%	70,37	70,37	70,39	1.267.366.000	70,40	1.229.678.000	70,41	1.264.895.000	70,42	1.304.541.000	70,42	1.345.226.000	70,42	6.411.706.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	**MISI 3 :**	**Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan**																	
	Tujuan 3.1 :	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,46	3,91	4,05-5,36		5,00-5,50		5,00-5,50		5,00-5,50		5,00-5,50		5,00-5,50		
	Sasaran 3.1.1 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	4.898,56	5.090,09	5.362,92		5.657,88		5.969,07		6.297,37		6.643,72		6.643,72		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,00	1,25	2,50	6.182.990.000	3,75	5.381.325.000	5,00	5.539.953.000	6,25	3.831.071.000	7,50	3.807.084.000	7,50	24.742.423.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
		Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	%	0,00	5,00	10,00	7.758.696.000	15,00	5.027.168.000	20,00	4.722.781.000	25,00	5.343.053.000	30,00	5.717.198.000	30,00	28.568.896.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	%	57,14	64,29	71,43	280.000.000	78,57	294.000.000	85,71	308.700.000	92,86	324.135.000	100,00	340.340.000	100,00	1.547.175.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	0,00	12,50	25,00	1.570.000.000	32,50	1.668.361.000	40,00	1.730.925.000	47,50	2.517.470.000	55,00	2.608.330.000	55,00	10.095.086.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	13,00	9,24	11,20	14.768.800.000	12,62	13.179.151.000	12,70	11.593.629.000	12,79	13.513.858.000	12,91	12.905.061.000	12,91	65.960.499.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	%	14,50	18,00	20,00	17.452.217.000	22,00	19.332.133.000	24,00	20.766.710.000	26,00	20.585.438.000	28,00	21.061.577.000	28,00	99.198.075.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	26,12	2,73	2,81	1.305.788.000	2,89	1.349.927.000	2,98	1.399.179.000	3,07	1.450.565.000	3,17	1.505.460.000	3,17	7.010.919.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	9,54	8,82	8,83	565.000.000	9,42	1.559.275.000	10,01	1.398.375.000	10,59	1.398.375.000	11,18	1.398.375.000	11,18	6.319.400.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	%	100,00	100,00	100,00	100.000.000	100,00	103.000.000	100,00	106.090.000	100,00	109.272.000	100,00	112.550.000	100,00	530.912.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	%	54,00	55,00	56,00	4.939.552.000	57,00	3.352.929.000	58,00	3.662.090.000	59,00	3.878.657.000	60,00	4.179.119.000	60,00	20.012.347.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
	Sasaran 3.1.2 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	3.963,95	4.118,94	4.339,72		4.578,40		4.830,22		5.095,88		5.376,15		5.376,15		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.906.273.000	100,00	5.346.488.000	100,00	5.386.278.000	100,00	4.607.930.000	100,00	4.796.512.000	100,00	25.043.481.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertata	%	0,00	0,00	0,22	80.000.000	2,00	82.400.000	4,90	84.872.000	6,90	87.418.000	8,91	90.040.000	8,91	424.730.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100,00	100,00	100,00	1.201.904.000	100,00	1.219.960.000	100,00	1.338.557.000	100,00	1.352.712.000	100,00	1.377.442.000	100,00	6.490.575.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang Meningkat Klasifikasinya	BUM Desa	10	40	46	7.097.417.000	56	7.886.978.000	67	7.816.254.000	78	8.394.303.000	89	8.342.778.000	89	39.537.730.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	10,22	10,22	13,04	504.178.000	15,87	719.301.000	18,70	534.878.000	21,52	550.923.000	24,35	567.448.000	24,35	2.876.728.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	21,05	26,67	33,33	270.000.000	40,00	278.100.000	46,67	286.444.000	53,33	295.038.000	63,33	295.038.000	63,33	1.424.620.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	%	5,15	11,34	17,53	213.978.000	23,71	221.628.000	29,90	229.508.000	36,08	237.824.000	42,27	245.984.000	42,27	1.148.922.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi	%	7,40	14,79	22,19	377.834.000	29,59	321.189.000	36,98	330.825.000	44,38	340.750.000	51,78	350.973.000	51,78	1.721.571.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	4,23	4,06	8,75	1.958.714.000	10,27	3.306.246.000	10,89	3.709.826.000	11,74	4.088.462.000	12,59	4.900.252.000	12,59	17.963.500.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	unit usaha	25	30	35	2.377.725.000	40	1.092.920.000	45	1.128.194.000	50	1.163.248.000	55	1.199.353.000	55,00	6.961.440.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	%	0,00	4,92	9,96	3.212.997.000	15,13	3.166.639.000	20,43	3.176.960.000	25,90	3.187.591.000	31,50	3.137.041.000	31,50	15.881.228.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentasi Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	250.000.000	100,00	500.000.000	100,00	515.000.000	100,00	530.450.000	100,00	546.364.000	100,00	2.341.814.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi Industri	dokumen	1	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	5	600.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
	Sasaran 3.1.3 :	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	10.663,85	11.080,81	11.674,74		12.316,85		12.994,28		13.708,96		14.462,95		14.462,95		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	6.570.653.000	100,00	6.937.196.000	100,00	7.072.642.000	100,00	6.210.699.000	100,00	6.351.424.000	100,00	33.142.614.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	%	79,03	80,90	82,77	8.214.904.000	84,64	3.649.054.000	86,52	3.960.530.000	88,39	4.534.850.000	90,26	4.691.041.000	90,26	25.050.379.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-76,33	24,00	19,00	1.494.321.000	20,00	1.951.151.000	25,00	2.009.686.000	33,00	2.069.977.000	35,00	2.132.076.000	35,00	9.657.211.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	0,00	18,75	20,00	100.000.000	20,00	103.000.000	20,00	106.090.000	20,00	109.273.000	20,00	112.552.000	20,00	530.915.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	12.256.300.000	100,00	12.599.138.000	100,00	12.784.364.000	100,00	11.971.967.000	100,00	12.447.134.000	100,00	62.058.903.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	miliar rupiah	8,50	11,55	11,55	4.100.000.000	12,42	4.982.000.000	12,91	5.114.360.000	13,41	8.647.090.000	14,18	8.730.203.000	64	31.573.653.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	%	-1,31	3,00	2,50	370.000.000	1,50	400.000.000	1,50	425.000.000	1,50	450.000.000	1,50	475.000.000	1,70	2.120.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Perdagangan	juta rupiah	595,54	1.798,39	1.900,00	250.000.000	2.000,00	257.500.000	2.100,00	265.225.000	2.200,00	273.182.000	2.300,00	281.377.000	10.500,00	1.327.284.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang Tertera	%	37,29	49,07	53,97	350.000.000	58,88	360.500.000	63,79	371.315.000	68,69	382.455.000	73,60	393.928.000	73,60	1.858.198.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	%	63,91	67,27	68,77	400.000.000	70,27	540.750.000	71,77	556.972.000	73,27	573.682.000	74,77	590.892.000	74,77	2.662.296.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
	Sasaran 3.1.4 :	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	3.822,25	3.971,70	4.184,58		4.414,73		4.657,54		4.913,71		5.183,96		5.183,96		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	5.033.141.000	100,00	5.547.219.000	100,00	5.403.391.000	100,00	4.725.490.000	100,00	5.146.807.000	100,00	25.856.048.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	miliar rupiah	388,76	392,53	397,00	145.000.000	401,00	149.350.000	405,00	153.833.000	409,00	158.448.000	413,00	163.000.000	2.025,00	769.631.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	dokumen	0	40	45	240.000.000	50	247.200.000	55	254.626.000	60	262.265.000	65	270.134.000	65,00	1.274.225.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	%	100,00	100,00	100,00	373.330.000	100,00	385.280.000	100,00	396.122.000	100,00	408.875.000	100,00	420.190.000	100,00	1.983.797.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	%	0,00	26,33	27,44	422.462.000	28,56	476.337.000	29,67	490.628.000	30,78	505.347.000	31,89	520.507.000	31,89	2.415.281.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	40.000.000	100,00	41.200.000	100,00	42.436.000	100,00	43.710.000	100,00	45.021.000	100,00	212.367.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	%	100,00	100,00	100,00	30.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	90.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
	Tujuan 3.2 :	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	20,02	20,45	20,50-21,00		21,00		21,00-21,50		21,50-22,00		22,00		22,00		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sasaran 3.2.1 :	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	17,59	16,85	16,00-17,00		15,00-16,00		14,00-15,00		13,50-14,00		13,00-13,50		13,00-13,50		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.608.704.000	100,00	5.302.766.000	100,00	4.931.780.000	100,00	4.401.091.000	100,00	4.222.865.000	100,00	23.467.206.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	%	19,25	15,45	69,00	377.719.000	70,00	377.719.000	71,00	389.049.000	72,00	399.329.000	73,00	412.741.000	73,00	1.956.557.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	0,00	100,00	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	100.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	%	96,12	100,00	100,00	3.259.814.000	100,00	3.152.387.000	100,00	3.241.597.000	100,00	3.332.882.000	100,00	3.408.321.000	100,00	16.395.001.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	%	72,73	74,24	75,75	1.105.970.000	77,25	1.105.970.000	78,76	1.105.970.000	80,27	1.105.970.000	81,78	1.105.970.000	81,78	5.529.850.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	1.860.879.000	100,00	1.895.879.000	100,00	1.950.775.000	100,00	2.005.348.000	100,00	2.061.255.000	100,00	9.774.136.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang Dikelola	%	100,00	100,00	100,00	14.400.000	100,00	14.400.000	100,00	114.832.000	100,00	15.276.000	100,00	15.734.000	100,00	174.642.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	14.982.445.000	100,00	16.034.902.000	100,00	16.356.729.000	100,00	15.501.019.000	100,00	15.920.197.000	100,00	78.795.292.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	%	13,48	17,17	18,70	1.335.000.000	20,22	1.569.503.000	21,74	1.461.416.000	23,26	1.503.328.000	24,78	1.545.241.000	24,78	7.414.488.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	%	38,16	40,79	43,17	1.839.000.000	45,55	1.733.462.000	47,94	1.793.041.000	50,32	1.931.981.000	52,70	1.899.281.000	52,70	9.196.765.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	%	50,38	52,67	54,96	875.000.000	57,25	666.335.000	59,54	686.948.000	61,83	705.948.000	64,12	727.598.000	64,12	3.661.829.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Hasil Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	96,47	87,06	88,24	170.000.000	90,00	155.000.000	91,76	162.000.000	93,53	171.000.000	95,29	248.000.000	95,29	906.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sasaran 3.2.2 :	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,07	5,80	5,51-5,58		5,40-5,50		5,30-5,40		5,20-5,30		5,10-5,20		5,10-5,20		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	5.937.553.000	100,00	6.544.689.000	100,00	6.325.339.000	100,00	5.462.929.000	100,00	6.091.688.000	100,00	30.362.198.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A"	%	100,00	100,00	100,00	1.675.507.000	100,00	1.765.106.000	100,00	1.816.998.000	100,00	14.541.395.000	100,00	9.900.917.000	100,00	29.699.923.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	%	15,73	18,32	21,82	2.970.000.000	25,33	1.804.400.000	28,50	1.826.958.000	32,39	1.851.767.000	35,91	1.877.320.000	35,91	10.330.445.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100,00	100,00	100,00	139.731.000	100,00	144.052.000	100,00	148.374.000	100,00	152.826.000	100,00	157.411.000	100,00	742.394.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	%	0,00	0,00	20,00	250.000.000	20,00	260.000.000	20,00	270.000.000	20,00	280.000.000	20,00	290.000.000	100,00	1.350.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Transmigrasi
4	**MISI 4 :**	**Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**																	
	Tujuan 4.1 :	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	54,75	58,50	59,9		63,75		66,46		69,13		71,82		71,82		
	Sasaran 4.1.1 :	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	46,53	51,86	53,81		59,27		63,10		66,89		70,69		70,69		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	23.880.216.000	100,00	25.032.064.000	100,00	25.782.899.000	100,00	25.673.408.000	100,00	26.133.326.000	100,00	126.501.913.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80,00	80,00	77,80	24.842.323.000	80,00	25.000.000.000	82,50	25.000.000.000	85,00	25.000.000.000	87,50	25.000.000.000	87,50	124.842.323.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	%	17,54	18,75	20	9.239.754.000	21,25	9.046.845.000	22,5	9.048.250.000	23,75	9.049.697.000	25	9.051.188.000	25,00	45.435.734.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	15,98	15,98	15,98	7.038.000.000	17,04	7.000.000.000	18,01	7.000.000.000	19,98	4.787.176.000	20,04	5.212.824.000	20,04	31.038.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	80,13	80,13	81,14	900.000.000	81,14	1.463.455.000	82,15	1.272.019.000	83,16	4.880.874.000	83,84	4.390.029.000	83,84	12.906.377.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	%	13,04	13,04	13,91	3.061.000.000	13,91	579.481.000	15,00	593.455.000	15,00	608.127.000	15,00	623.533.000	15,00	5.465.596.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	70,94	70,94	74,23	104.063.300.000	76,23	104.908.977.000	79,48	122.036.029.000	82,23	100.000.000.000	85,18	100.000.000.000	85,18	531.008.306.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	%	44,92	44,92	44,92	387.224.000	50,15	498.840.000	55,08	510.805.000	60,00	523.130.000	64,92	535.824.000	64,92	2.455.823.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	75,00	75,00	91,15	1.540.800.000	91,25	835.691.000	91,35	866.984.000	91,45	899.603.000	91,55	933.605.000	91,55	5.076.683.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	1.815.000.000	100,00	840.000.000	100,00	845.000.000	100,00	850.000.000	100,00	855.000.000	100,00	5.205.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha	%	4,30	6,89	11,09	2.466.500.000	15,94	3.908.200.000	21,12	4.276.246.000	26,29	4.534.533.000	31,46	4.534.533.000	31,46	19.720.012.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	%	19,48	47,36	52,64	3.950.051.000	64,48	5.470.000.000	76,32	5.480.000.000	88,16	5.490.000.000	100,00	5.500.000.000	100,00	25.890.051.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman	%	1,16	1,16	1,17	6.442.493.000	1,17	7.050.561.000	1,17	7.223.435.000	1,17	7.807.098.000	1,17	7.546.836.000	1,17	36.070.423.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	6.503.215.000	100,00	6.830.508.000	100,00	6.874.026.000	100,00	6.046.229.000	100,00	6.236.545.000	100,00	32.490.522.999	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	71,56	71,89	72,22	18.608.271.000	78,44	22.615.553.000	79,11	24.876.892.000	79,78	31.466.778.000	80,44	23.645.482.000	80,44	121.212.976.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
	Sasaran 4.1.2 :	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	73,92	74,01	74,10		74,19		74,28		74,36		74,45		74,45		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	17.325.001.000	100,00	18.398.030.000	100,00	18.804.350.000	100,00	18.207.834.000	100,00	18.577.889.000	100,00	91.313.104.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	12,50	25,00	50,00	220.000.000	62,50	195.000.000	75,00	195.000.000	87,50	205.000.000	100,00	205.000.000	100,00	1.020.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	73,92	74,01	74,10	3.605.552.000	74,19	3.833.742.000	74,28	4.018.253.000	74,36	4.204.997.000	74,45	4.389.044.000	74,45	20.051.588.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah	%	13,33	20,00	26,67	3.244.490.000	33,33	13.768.879.000	40,00	6.537.939.000	46,67	11.107.239.000	53,33	3.100.188.000	53,33	37.758.735.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	%	25,00	30,00	35,00	110.000.000	40,00	113.300.000	45,00	116.699.000	50,00	120.199.000	55,00	120.199.000	55,00	580.397.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan	%	1,23	4,29	7,36	220.000.000	10,43	226.600.000	13,50	233.398.000	16,56	240.399.000	19,63	247.610.000	19,63	1.168.007.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	%	9,78	11,30	13,26	254.000.000	15,65	289.000.000	18,48	319.000.000	21,30	349.000.000	24,13	349.000.000	24,13	1.560.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup	%	15,69	16,67	33,33	175.000.000	50,00	180.000.000	66,67	185.000.000	83,33	200.000.000	100,00	225.000.000	100,00	965.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	80.000.000	100,00	91.200.000	100,00	102.436.000	100,00	113.709.000	100,00	113.709.000	100,00	501.054.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	%	22,00	24,00	26,00	9.846.578.000	27,00	13.547.027.000	28,00	14.588.459.000	30,00	15.551.464.000	30,00	16.600.427.000	30,00	70.133.955.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
5	**MISI 5 :**	**Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat**																	
	Tujuan 5.1 :	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	-	75,70	76,00-76,50		77,00-77,50		78,00-78,50		79,00-79,50		80,00-80,50		80,00-80,50		
	Sasaran 5.1.1 :	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	57,14	60,71		64,29		71,43		75,00		78,57		78,57		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	1.936.628.000	100,00	3.997.926.000	100,00	3.237.933.000	100,00	4.495.448.000	100,00	3.374.832.000	100,00	17.042.767.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah per 100.000 penduduk	0,00	12,21	24,50	483.247.000	41,64	695.875.000	55,93	716.751.000	87,79	738.253.000	133,79	760.400.000	133,79	3.394.526.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum	%	67,59	67,59	67,59	3.420.289.000	67,59	2.218.907.000	69,38	62.428.200.000	69,38	2.432.700.000	69,38	2.437.200.000	69,38	72.937.296.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100,00	100,00	100,00	76.764.000	100,00	84.532.000	100,00	87.069.000	100,00	89.680.000	100,00	92.370.000	100,00	430.415.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	jumlah per 100.000 penduduk	12,21	24,50	36,71	1.513.342.000	54,64	365.710.000	75,00	438.852.000	99,14	526.627.000	129,15	631.947.000	129,15	3.476.478.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	57,14	60,71	179.099.000	64,29	1.854.735.000	71,43	2.163.480.000	75,00	2.617.348.000	78,57	3.127.272.000	78,57	9.941.934.000	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sasaran 5.1.2 :	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	18,16	20,82	25,05		29,82		34,05		38,82		43,04		43,04		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	%	18,75	21,88	28,13	2.041.000.000	34,38	1.200.000.000	40,63	1.265.000.000	46,88	1.380.000.000	53,13	1.480.000.000	53,13	7.366.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	17,58	19,78	21,98	336.350.000	25,27	300.000.000	27,47	300.000.000	30,77	300.000.000	32,97	300.000.000	32,97	1.536.350.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
	Tujuan 5.2 :	Mewujudkan kondusitivas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	%	63,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Sasaran 5.2.1 :	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	6.656.922.000	100,00	9.918.400.000	100,00	8.609.161.000	100,00	7.366.153.000	100,00	13.174.985.000	100,00	45.725.621.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol-PP)

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100,00	100,00	4.020.931.000	100,00	4.331.256.000	100,00	8.413.397.000	100,00	4.618.007.000	100,00	4.765.893.000	100,00	26.149.484.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol-PP)
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	%	69,23	69,23	69,23	1.851.419.000	73,08	1.908.849.000	73,08	2.398.584.000	73,08	2.471.361.000	76,92	2.546.156.000	76,92	11.176.369.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol-PP)
	Sasaran 5.2.2 :	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	26,19	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.106.923.000	100,00	5.605.374.000	100,00	4.611.923.000	100,00	4.422.924.000	100,00	8.347.227.000	100,00	27.094.370.999	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	26,19	100,00	100,00	8.038.600.000	100,00	10.665.082.000	100,00	11.359.583.000	100,00	12.166.469.000	100,00	12.550.811.000	100,00	54.780.545.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

6.5. Pelaksanaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan inetgrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM dalam dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel 6.5
Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Pendidikan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100	100	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**224.143.414.000**	**228.395.531.000**	**227.564.721.000**	**230.324.212.000**	**230.373.048.000**	APBD Kabupaten Kebumen	Dinas Pendidikan
								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**224.143.414.000**	**228.395.531.000**	**227.564.721.000**	**230.324.212.000**	**230.373.048.000**		Dinas Pendidikan
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**224.143.414.000**	**228.395.531.000**	**227.564.721.000**	**230.324.212.000**	**230.373.048.000**		Dinas Pendidikan
								Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**30.217.720.000**	**30.928.898.000**	**30.928.898.000**	**31.128.898.000**	**31.128.898.000**		Dinas Pendidikan
								Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		Dinas Pendidikan
								Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	341.500.000	341.500.000	341.500.000	521.500.000	521.500.000		Dinas Pendidikan
								Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	280.000.000	280.000.000	280.000.000	300.000.000	300.000.000		Dinas Pendidikan
								Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	21.700.000	21.700.000	21.700.000	21.700.000	21.700.000		Dinas Pendidikan
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	8.300.000.000	8.300.000.000	8.300.000.000	8.300.000.000	8.300.000.000		Dinas Pendidikan
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	305.298.000	305.298.000	305.298.000	305.298.000	305.298.000		Dinas Pendidikan
								Pengelolaan dana BOP PAUD	20.469.222.000	21.180.400.000	21.180.400.000	21.180.400.000	21.180.400.000		Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	100	100	100	100	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**138.393.379.000**	**140.474.083.000**	**139.372.803.000**	**140.672.678.000**	**140.384.715.000**		Dinas Pendidikan
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.438.511.000	7.438.511.000	7.438.511.000	7.438.511.000	7.438.511.000		Dinas Pendidikan
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.573.124.000	7.573.124.000	7.573.124.000	7.573.124.000	7.573.124.000		Dinas Pendidikan
								Pengadaan Mebeluer Sekolah	190.000.000	195.000.000	195.000.000	200.000.000	200.000.000		Dinas Pendidikan
								Pengadaan Perlengkapan Sekolah	372.400.000	383.572.000	395.079.000	406.931.000	419.138.000		Dinas Pendidikan
								Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Dinas Pendidikan
								Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000		Dinas Pendidikan
								Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	415.000.000	415.000.000	415.000.000	415.000.000	415.000.000		Dinas Pendidikan
								Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	175.890.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000		Dinas Pendidikan
								Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	1.133.534.000	1.133.534.000	1.133.534.000	1.133.534.000	1.133.534.000		Dinas Pendidikan
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	24.944.420.000	22.686.620.000	21.366.620.000	20.046.620.000	18.726.620.000		Dinas Pendidikan
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200.000.000	200.000.000	200.000.000	145.000.000	145.000.000		Dinas Pendidikan
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600.000.000	650.000.000	700.000.000	750.000.000	800.000.000		Dinas Pendidikan
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	94.000.500.000	98.258.722.000	98.415.935.000	101.023.958.000	101.993.788.000		Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah anak 12-15 tahun yang tahun yang sudah atau sedang belajar pada pendidikan Sekolah menengah Pertama	100	100	100	100	100	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**52.250.278.000**	**53.851.347.000**	**54.035.986.000**	**55.208.915.000**	**55.545.214.000**		Dinas Pendidikan
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	475.828.000	275.828.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000		Dinas Pendidikan
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.778.012.000	5.778.012.000	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000		Dinas Pendidikan
								Pengadaan Mebeluer Sekolah	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000		Dinas Pendidikan
								Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah							Dinas Pendidikan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
								Menengah Pertama	1.170.000.000	1.170.000.000	1.173.000.000	1.176.000.000	1.180.000.000		
								Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.913.400.000	1.915.000.000	1.917.000.000	1.920.000.000	1.922.000.000		Dinas Pendidikan
								Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	267.000.000	328.825.000	338.700.000	348.800.000	348.800.000		Dinas Pendidikan
								Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.884.000	30.000.000	3.000.000	30.000.000	30.000.000		Dinas Pendidikan
								Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	640.154.000	640.154.000	659.300.000	679.000.000	679.000.000		Dinas Pendidikan
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.901.800.000	3.925.800.000	3.901.800.000	3.961.800.000	3.889.800.000		Dinas Pendidikan
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	132.200.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000		Dinas Pendidikan
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	423.000.000	436.000.000	449.000.000	463.000.000	480.000.000		Dinas Pendidikan
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	37.345.000.000	39.036.728.000	39.099.186.000	40.135.315.000	40.520.614.000		Dinas Pendidikan
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaika n pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**3.282.037.000**	**3.141.203.000**	**3.227.034.000**	**3.313.721.000**	**3.314.221.000**		Dinas Pendidikan
								Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000		Dinas Pendidikan
								Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		Dinas Pendidikan
								Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	182.283.000	182.283.000	182.283.000	182.283.000	182.283.000		Dinas Pendidikan
								Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	92.008.000	94.768.000	97.611.000	100.539.000	100.539.000		Dinas Pendidikan
								Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	87.747.000	87.747.000	87.747.000	87.747.000	87.747.000		Dinas Pendidikan
								Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	240.031.000	247.447.000	254.863.000	262.508.000	262.508.000		Dinas Pendidikan
								Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.202.000	103.208.000	106.304.000	109.493.000	109.493.000		Dinas Pendidikan
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	321.247.000	80.356.000	82.766.000	83.538.000	83.538.000		Dinas Pendidikan
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	207.819.000	214.053.000	220.474.000	227.088.000	227.088.000		Dinas Pendidikan
								Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.044.700.000	2.104.841.000	2.167.986.000	2.233.025.000	2.233.025.000		Dinas Pendidikan

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2021

Tabel 6.6
Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**23.304.474.000**	**23.443.635.000**	**23.573.270.000**	**23.692.664.000**	**23.810.359.000**	APBD Kabupaten Kebumen	DINAS KESEHATAN
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**23.304.474.000**	**23.443.635.000**	**23.573.270.000**	**23.692.664.000**	**23.810.359.000**		DINAS KESEHATAN
								Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**23.304.474.000**	**23.443.635.000**	**23.573.270.000**	**23.692.664.000**	**23.810.359.000**		DINAS KESEHATAN
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.697.737.000	1.705.203.000	1.715.203.000	1.720.203.000	1.720.203.000		DINAS KESEHATAN
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.661.272.000	3.662.778.000	3.676.278.000	3.686.278.000	3.701.278.000		DINAS KESEHATAN
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	789.304.000	794.304.000	799.304.000	801.304.000	804.304.000		DINAS KESEHATAN
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.785.688.000	4.790.688.000	4.795.840.000	4.805.340.000	4.805.340.000		DINAS KESEHATAN
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	1.032.215.000	1.036.423.000	1.036.423.000	1.036.423.000	1.036.423.000		DINAS KESEHATAN
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.177.894.000	4.217.894.000	4.259.094.000	4.301.594.000	4.345.294.000		DINAS KESEHATAN
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.618.705.000	1.623.705.000	1.628.705.000	1.628.705.000	1.638.705.000		DINAS KESEHATAN
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	309.089.000	313.289.000	322.689.000	332.389.000	342.369.000		DINAS KESEHATAN
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	336.019.000	346.100.000	356.483.000	367.177.000	378.192.000		DINAS KESEHATAN
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	1.232.752.000	1.255.252.000	1.260.252.000	1.270.252.000	1.275.252.000		DINAS KESEHATAN
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.834.028.000	2.853.228.000	2.863.228.000	2.883.228.000	2.883.228.000		DINAS KESEHATAN
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV Mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	829.771.000	844.771.000	859.771.000	859.771.000	879.771.000		DINAS KESEHATAN

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2021

Tabel 6.7
Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum seharihari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100	100	100	100	100	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**9.239.754.000**	**9.867.878.000**	**9.896.921.720**	**14.134.786.752**	**14.500.995.234**	APBD KABUPATEN KEBUMEN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**9.239.754.000**	**9.867.878.000**	**9.896.921.720**	**14.134.786.752**	**14.500.995.234**		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	340.000.000	350.200.000	360.706.000	371.527.180	382.672.995		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	-	250.000.000	257.500.000	265.225.000	273.181.750		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.399.754.000	6.399.754.000	6.399.754.000	6.399.754.000	6.399.754.000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	3.832.701.000	4.024.336.000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	-	-	1.447.031.000	1.519.382.000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	-	367.924.000	378.961.720	390.330.572	402.040.489		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	-	-	-	1.428.218.000	1.499.628.000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100	100	100	100	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**5.889.456.000**	**6.446.361.000**	**6.554.235.800**	**7.122.898.080**	**6.853.426.588**	APBD KABUPATEN KEBUMEN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**5.889.456.000**	**6.446.361.000**	**6.554.235.800**	**7.122.898.080**	**6.853.426.588**		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.938.776.000	5.367.613.000	5.367.613.000	5.817.613.000	5.417.613.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	950.680.000	1.078.748.000	1.186.622.800	1.305.285.080	1.435.813.588		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2021

Tabel 6.8
Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman						APBD KABUPATEN KEBUMEN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**1.440.000.000**	**775.000.000**	**775.000.000**	**775.000.000**	**775.000.000**		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.440.000.000	775.000.000	775.000.000	775.000.000	775.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**5.390.051.000**	**5.470.000.000**	**5.480.000.000**	**5.490.000.000**	**5.500.000.000**		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.390.051.000	5.470.000.000	5.480.000.000	5.490.000.000	5.500.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	5.330.051.000	5.400.000.000	5.400.000.000	5.400.000.000	5.400.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
								Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100	100	100	100	100	0	-	-	-	-	-	Tidak ada Program pemerintah yang mengakibatkan relokasi	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2021

Tabel 6.9
Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100	**Urusan Pemerintahan Bidang KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**16.139.684.000**	**20.828.242.920**	**22.212.057.578**	**23.820.535.605**	**24.583.303.343**	APBD KABUPATEN KEBUMEN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**437.410.000**	**640.231.000**	**668.838.000**	**698.003.000**	**727.744.000**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**180.000.000**	**185.400.000**	**190.962.000**	**196.691.000**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	-	180.000.000	185.400.000	190.962.000	196.691.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	**427.410.000**	**440.231.000**	**453.438.000**	**467.041.000**	**481.053.000**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	47.608.000	49.036.000	50.507.000	52.022.000	53.583.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	36.725.000	37.826.000	38.961.000	40.130.000	41.334.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	343.077.000	353.369.000	363.970.000	374.889.000	386.136.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**10.000.000**	**20.000.000**	**30.000.000**	**40.000.000**	**50.000.000**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	100	100	100	100	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**7.778.752.000**	**10.018.505.960**	**10.693.609.789**	**11.480.516.302**	**11.844.279.672**		BPBD
								Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**400.000.000**	**512.000.000**	**424.360.000**	**437.090.000**	**550.202.000**		BPBD
								Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	100.000.000	-	-	100.000.000		BPBD
								Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	400.000.000	412.000.000	424.360.000	437.090.000	450.202.000		BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana**	**5.403.752.000**	**5.956.505.960**	**6.494.249.789**	**7.243.426.302**	**7.469.077.672**		BPBD
								Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	150.000.000	-	150.000.000	-		BPBD
								Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		BPBD
								Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	350.000.000	360.500.000	371.314.000	382.453.000	393.926.000		BPBD
								Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	325.000.000	325.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000		BPBD
								Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		BPBD
								Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	695.152.000	707.005.960	718.945.789	731.792.102	744.745.386		BPBD
								Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.433.600.000	3.971.000.000	4.567.180.000	5.123.545.000	5.455.101.000		BPBD
								Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	112.000.000	124.630.000	137.090.800	150.203.524		BPBD
								Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	200.000.000	206.000.000	212.180.000	218.545.400	225.101.762		BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.800.000.000**	**3.375.000.000**	**3.500.000.000**	**3.625.000.000**	**3.625.000.000**		BPBD

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
								Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.300.000.000	2.725.000.000	2.775.000.000	2.825.000.000	2.825.000.000		BPBD
								Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000	400.000.000	425.000.000	450.000.000	450.000.000		BPBD
								Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000		BPBD
								Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**175.000.000**	**175.000.000**	**275.000.000**	**175.000.000**	**200.000.000**		BPBD
								Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	-	100.000.000	-	-		BPBD
								Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100.000.000		BPBD
								Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	**PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN**	**144.770.000**	**151.000.000**	**156.000.000**	**161.500.000**	**167.000.000**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**50.000.000**	**52.500.000**	**55.000.000**	**57.500.000**	**60.000.000**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	50.000.000	52.500.000	55.000.000	57.500.000	60.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**39.520.000**	**40.500.000**	**41.000.000**	**42.000.000**	**43.000.000**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	39.520.000	40.500.000	41.000.000	42.000.000	43.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**55.250.000**	**58.000.000**	**60.000.000**	**62.000.000**	**64.000.000**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	55.250.000	58.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2021

Tabel 6.10
Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Sosial

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**4.167.879.000**	**4.202.879.000**	**4.326.985.000**	**4.452.843.000**	**4.564.189.000**	APBD KABUPATEN KEBUMEN	DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.307.000.000**	**2.307.000.000**	**2.376.210.000**	**2.447.495.000**	**2.502.934.000**		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.307.000.000	2.307.000.000	2.376.210.000	2.447.495.000	2.502.934.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	Penyediaan Permakanan	1.695.000.000	1.695.000.000	1.745.850.000	1.798.225.000	1.834.189.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Penyediaan Sandang	100.000.000	100.000.000	103.000.000	106.090.000	109.272.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Penyediaan Alat Bantu	105.000.000	105.000.000	108.150.000	111.394.000	114.735.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	300.000.000	300.000.000	309.000.000	318.270.000	327.818.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	37.000.000	37.000.000	38.110.000	39.253.000	40.430.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Pemberian Layanan Kedaruratan	70.000.000	70.000.000	72.100.000	74.263.000	76.490.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase %) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**1.860.879.000**	**1.895.879.000**	**1.950.775.000**	**2.005.348.000**	**2.061.255.000**		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.492.500.000	1.452.500.000	1.494.775.000	1.538.168.000	1.582.710.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Penyediaan Makanan	200.000.000	210.000.000	215.000.000	220.000.000	225.000.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Penyediaan Sandang	92.500.000	92.500.000	95.275.000	98.133.000	101.076.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	850.000.000	850.000.000	875.500.000	901.765.000	928.817.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	250.000.000	200.000.000	206.000.000	212.180.000	218.545.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Pelayanan Dukungan Psikososial	100.000.000	100.000.000	103.000.000	106.090.000	109.272.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
								Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	368.379.000	443.379.000	456.000.000	467.180.000	478.545.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	200.000.000	200.000.000	206.000.000	212.180.000	218.545.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	168.379.000	243.379.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000		DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2021

6.6. Penjabaran Implementasi Program Unggulan

Program unggulan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen selama pemerintahan 5 (lima) tahun ke depan. Program-program unggulan tersebut telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada bab ini dijabarkan lebih lanjut dalam strategi rencana tindak sebagai berikut:

Tabel 6.11
Rencana Implementasi Program Unggulan Tahun 2021-2026

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
1	**GO - LAK**	Jemput ke rumah Layanan Adminitrasi Kependudukan Program pelayanan adminitrasi kependudukan jemput bola ke rumah "*ora antri, ora suwe, cepet dadi*"....	Dilaksanakan dengan 2 metode yaitu a. Pengadaan prasarana mobil jemput bola layanan administrasi kependudukan; b. Kerjasama dengan SMA/ SMK/ MA dalam pemberian e-KTP siswa masuk umur 17 tahun	Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk, SubKegiatan : a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk; b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dinas Dukcapil)	a. Penduduk dengan akses sulit dan berkebutuhan khusus b. Siswa SMA/ SMK/ MA yang berumur 17 tahun di Kebumen Tahun 2022 pengadaan 1 (satu) mobile unit pelayanan e-KTP Rp600juta	Asisten III Sekda OPD Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**Satu Data Untuk Semua**	Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.	a. Kartu Kebumen Sejahtera (KKS) perlu segera disiapkan aplikasi berbasis android/QR code, pengadaan kartu dan koordinasi Dinsos, Dukcapil, BPKAD dan Kominfo dengan OPD pengampu bansos miskin sumber dana APBD Kabupaten. b. Operasional ferivikasi dan validasi, pemeliharaan serta koordinasi pemanfaatan data DTKS	Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk, SubKegiatan: a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk; b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, SubKegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penduduk miskin (DTKS dan non DTKS)	ASSISTEN I DAN III, OPD Pengampu Urusan a. Pendidikan b. Kesehatan c. Permukiman dan Perumahan Rakyat d. Sosial e. Kependudukan dan Pencatatan Sipil f. Komunikasi dan Informatika g. Koperasi Usaha Kecil Menengah

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
3	**Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli**	Program ini diimplementasikan dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.	a. Percepatan dan peningkatan pelaporan LHKPN dan LHKASN b. Penyusunan Perbup Whistle Blower Sistem c. Sosialisasi dan upaya pencegahan korupsi	seluruh Kegiatan di Inspektorat	Seluruh Pejabat Pemerintah dan ASN	ASISTEN III OPD Pengampu Urusan Pengawasan
4	**Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP)**	Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan perijinan terpadu berbasis teknologi informasi yang mudah dan cepat dengan : a. Penerapan layanan digital sepanjang waktu b. penyederhanaan proses c. Penanganan pengaduan Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Kelurahan	Semua Kegiatan dan SubKegiatan pada program penunjang pemerintahan daerah seluruh OPD yang mempunyai pelayanan langsung kepada masyarakat	Seluruh Masyarakat Kabupaten Kebumen dan Investor	ASSISTEN III OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal, seluruh OPD Pelayanan, Kecamatan dan Kelurahan
5	**Festival Anggaran**	Merupakan bentuk komitmen peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dimana pelaksanaan fungsi pengawasan bersama-sama dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Melalui Festival Anggaran	a. Seluruh OPD dan Kecamatan mempresentasikan dan mempublikasikan penggunaan anggaran kepada Masyarakat melalui tampilan/menu utama di website OPD dan dipublikasikan di papan informasi	Semua Kegiatan dan SubKegiatan pada program penunjang pemerintahan daerah seluruh OPD	Seluruh OPD dan Kecamatan	ASSISTEN III Seluruh OPD dan Kecamatan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
		pemerintah kabupaten Kebumen mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran	masing-masing OPD; b. Event pameran penggunaan anggaran			
6	**Peningkatan Kapasitas SDM** Aparatur Pemerintahan	Program ini merupakan salah satu upaya strategis yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kapasitas ASN di seluruh OPD	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis SubKegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	ASN di seluruh OPD	ASSISTEN III OPD Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
7	**Peningkatan Kesejahteraan Pegawai**	Program ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kesejahteraan ASN	Peningkatan besaran Tambahan Penghasilan untuk ASN Non Guru Non BLUD	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Tamsil)	Tahun 2022-2026 @ Rp.130 Milyar untuk 3132 ASN	ASSISTEN III OPD Pengampu Urusan Keuangan dan Kepegawaian
8	**SIS SUSANA**	Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan askes pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin	Pemberian beasiswa/ subsidi biaya pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga miskin dan anak yatim di jenjang pendidikan SD dan SMP Menggunakan Kartu Kebumen Sejahtera (KKS)	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar SubKegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan SMP SubKegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	2.139 siswa SD/MI 1.000 siswa SMP/MTs (basos data DTKS)	ASSISTEN I OPD Pengampu Urusan Pendidikan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
9	**BASUH**	Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan askes pendidikan non formal/keagamaan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM melalui Pondok Pesantren	Pemberian beasiswa untuk biaya hidup dan/atau biaya pendidikan santri di pondok pesantren Menggunakan Kartu Kebumen Sejahtera (KKS)	Belanja Bantuan Sosial untuk Santri dari Keluarga Miskin	a. Tahun 2022 100 Santri b. Tahun 2023 200 santri c. Tahun 2024 300 santri Setiap santri mendapat bantuan biaya hidup @Rp250.000 per bulan	ASSISTEN I Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
10	**SIRUP**	Program ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kesejahteraan Guru, khususnya Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Pemberian insentif bagi GTT dan PTT tingkat sekolah SD dan SMP (GTT non sertifikasi)	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar SubKegiatan: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan SMP SubKegiatan: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	a. 3.516 orang GTT PPT SD b. 723 orang GTT PTT SMP	ASSISTEN I OPD Pengampu Urusan Pendidikan
11	**Penguatan Sekolah Inklusi**	Program ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas SDM tanpa diskriminasi, melalui peningkatan akses dan kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk bisa bersekolah di sekolah umum	Peningkatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia di rintisan sekolah inklusi	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar SubKegiatan: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	26 SD dan 26 SMP	ASSISTEN I OPD Pengampu Urusan Pendidikan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
				Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan SMP SubKegiatan: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
12	**BUMEN SEHATi**	Program ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan derajat kesehatan bagi warga Kebumen, dilakukan dengan peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kesakitan dan angka kematian tinggi	Peningkatan sarana dan prasranana serta mutu pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		ASSISTEN I OPD Pengampu Urusan Kesehatan
13	**SIBUSAH**	Program ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan derajat kesehatan bagi warga Kebumen, dilakukan dengan peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar terutama bagi santri di Pondok Pesantren	Pelayanan kesehatan dasar bagi santri dan warga pondok pesantren melalui layanan mobile unit ambulans puskemas keliling dan bantuan peningkatan prasarana kesehatan untuk pondok pesantren	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan: Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	9.943 Santri di 86 Pondok Pesantren	ASSISTEN I OPD Pengampu Urusan Kesehatan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
14	**Jaminan Kesehatan bagi untuk masyarakat miskin**	Program ini ditujukan untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin, melalui pemberian bantuan pembayaran iuran JKN-KIS	Menggunakan KKS dan sinkronisasi data JKN-KIS dengan DTKS	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SubKegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinkes)	Universal Health Coverage (UHC) 100%	ASSISTEN I OPD Pengampu Urusan Kesehatan OPD Pengampu Urusan Sosial
15	**KEBUMEN EKONOMI HANDAL**	Program "LAWET MUDA KREATIF" pengembangan kreativitas dan keterampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha	Mendorong program inkubasi bisnis melalui revitalisasi dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) serta sinergi kegiatan inovasi dan teknologi dengan pengembangan kewirausahaan, pembinaan kepemudaan dan perguruan tinggi	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, SubKegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi; Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi; Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Sub Kegiatan: Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	– 2021, 4 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi – 2022, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi – 2023, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi – 2024, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi – 2025, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi – 2026, 4 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja OPD Pengampu Urusan Pariwisata

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
16	Program **DESMELI (DESa MELek Internet)**	Jaringan komunikasi internet menjangkau seluruh desa agar pelayanan kepada masyarakat berbasis IT dapat berjalan optimal	1. Penyusunan Peraturan Bupati terkait penggunaan Dana Desa untuk penyiapan jaringan komunikasi internet 2. Penyiapan data base Desa belum tersambung dengan jaringan internet Kabupaten dan sarpras pendukung	1. Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Dana Desa (449 Desa) 3. Dana Pembangunan Kelurahan (11 Kelurahan)	Pada tahun 2024 449 Desa dan 11 Kelurahan telah memiliki dan menggunakan jaringan internet serta memanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat	ASSISTEN III OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	**KAPOK PAK EKO**	Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan	Pembinaan dan pengembangan BUM Desa dalam rangka memperkuat kegiatan perekonomian di desa	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, SubKegiatan: Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Tahun 2024, terdiri dari 7 BUM Desa maju, 41 BUM Desa berkembang, 273 BUM Desa tumbuh dan 138 BUM Desa dasar	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	**ANDALAN PAS**	Program bantuan permodalan UMKM	Subsidi bunga, bantuan modal dan bantuan belanja bahan produksi dan alat produksi	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	5.000 UMKM	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)
19	**KUMPUL BAKUL**	Program promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobisnis dan produk lokal kebumen melalui dropshipper, marketplace, katalog lokal.	Revitalisasi PLUT dengan fokus pendampingan pemasaran berbasis teknologi informasi, pembangunan terminal agrobisnis/sub terminal agrobisnis (STA), forum dan pameran bisnis, penataan dan pemanfaatan koridor Jalan Pahlawan	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, SubKegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi; Kegiatan: Pelaksanaan Promosi,	2.600 UMKM (26 kecamatan @100 UMKM)	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah OPD Pengampu Urusan Perdagangan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
20	**TANI MULYO**	Program Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Pemenuhan Sarpras Pertanian (Banyu Mili, Rumah Pompa dan Penanganan terpadu pasca panen)	a. Penanganan terpadu pasca panen/RMU b. Bantuan sarana dan prasarana pertanian c. Kekuatan Masyarakat Mbangun Kebon Pangan Lestari	Kegiatan: Pengembangan Prasarana Pertanian, SubKegiatan: 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya, 2. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B (Distanpang) Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Tahun 2021, operasional 1 unit Rice Milling Unit (RMU) di Kecamatan Kutowinangun dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Kecamatan Rowokele	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Pertanian OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang OPD Pengampu Urusan Perdagangan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
				Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah, Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		
21	**DEMEN MBUMEN**	Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa Dicanangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan perekonomian dan pemasaran produk unggulan UKM Kebumen	a. Gerakan moral ASN dan masyarakat Kebumen untuk memakai, mengkonsumsi dan mengenalkan produk-produk unggulan Kebumen b. Sinergi dengan Program Jamu Seger untuk mendukung amenitas pariwisata c. Promosi dan penyelenggaraan festival atraksi budaya lokal	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan; Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil; Keg:Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Seluruh ASN	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah OPD Pengampu Urusan Perdagangan OPD Pengampu Urusan Pariwisata
22	Pengembangan potensi lokal perikanan darat, perikanan tangkap dan kampung garam	Optimalisasi Pengembangan kampung sidat, kampung gabus, kampung lele, serta perikanan tangkap dan	Peningkatan pengelolaan kampung perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kampung garam	Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, SubKegiatan: 1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1	Sentra-sentra perikanan (4 sentra), 5 TPI kewenangan Kabupaten, dan 10 desa pengembangan	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
		kampung garam		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota, 2.Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota 4. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 5. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan: Peningkatan Ketersediaan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kampung garam	
23	Program **JAMU SEGER** (JAlan MUluS Ekonomi BerGERak)	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan sebagai upaya mendukung dan meningkatkan akses perekonomian dan pelayanan dasar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Operasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	798,62 km dari 960,38 km (84,66%) jalan kabupaten dalam kondisi mantap tercapai pada tahun 2024 Penataan koridor jalan Pahlawan, Alun-Alun,	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
		masyarakat			Jalan Sutoyo dan Jalan Kusuma Kebumen	
24	Program **BANYU MILI** (Air Irigasi tersedia terus)	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka menjamin ketersediaan pengairan untuk kegiatan pertanian	a. Penyediaan jaringan irigasi air tanah b. Konservasi DAS hulu/ sumber mata air	Kegiatan:Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan:Pembangunan Prasarana Pertanian, SubKegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tahun 2024 10.114,5 Ha dari 12.260 Ha daerah irigasi kewenangan kabupaten (82,50%) dalam kondisi baik	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang OPD Pengampu Urusan Pertanian
25	**Nandur wit nggo Anak Putu**	Program 1 Anak 2 Pohon dan 1 Nikah 2 Pohon	Optimalisasi Peraturan Desa dan Kelurahan yang mengatur Pelestarian Lingkungan Hidup di 449 Desa dan 11 Kelurahan	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	449 Desa dan 11 Kelurahan	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
26	**TUPAT RUJI**	Program Bantuan Tempat Ibadah dan Bantuan Guru Ngaji / TPQ	a. Pembangunan dan bantuan rehab masjid/ tempat ibadah b. Insentif bagi guru ngaji/TPQ	Kegiatan: Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, SubKegiatan:Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bantuan Keuangan Khusus	a. Pembangunan 3 Masjid Raya dengan desain khas Kebumen b. Guru ngaji/TPQ di 449 Desa	ASSISTEN I OPD Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) OPD Pengampu Urusan Keuangan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
27	**MESIN SERBU**	Program Membumikan dan mempromosikan Seni serta Budaya Khas Kebumen	a. Optimalisasi Geo-Culture pada Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong b. Bantuan alat-alat kesenian dan budaya Optimalisasi kegiatan-kegiatan masyarakat dan pemerintahan sebagai media promosi Budaya khas Kebumen	Kegiatan: Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota SubKegiatan: a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kegiatan: Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Seluruh kesenian dan budaya khas Kebumen	ASSISTEN II OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
28	**MEN TAMBENG**	Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Optimalisasi dan pengembangan Desa Tangguh Bencana	Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tahun 2024, 250 Desa Tangguh Bencana	ASSISTEN I OPD Pengampu Urusan Trantibum Linmas (BPBD)

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2021

Adapun indikator dan target Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen secara lengkap disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6.12
Indikator dan Target Program Unggulan
Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026

No	Program Unggulan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
1	GO - LAK	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Satu Data Untuk Semua	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	80,31	81,38	82,45	83,51	84,58	85,65	86,71	86,71
		Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	%	19,48	47,36	52,64	64,48	76,32	88,16	100,00	100,00
		Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	%	96,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	%	72,73	74,24	75,75	77,25	78,76	80,27	81,78	81,78
		Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	nilai	3,85	3,86	3,85	3,85	3,86	3,86	3,87	3,87
		Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	4,23	4,06	8,75	10,27	10,89	11,74	12,59	12,59
		Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	unit usaha	25	30	35	40	45	50	55	55,00
3	Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli	Level Kapabilitas APIP	Level 1/ Level 2/ Level 3/ Level 4/ Level 5	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai Persepsi Korupsi	nilai	3,34	3,34	3,34	3,40	3,45	3,50	3,50	3,50
4	Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP)	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Kesiapsiagaan Damkar	%	69,23	69,23	69,23	73,08	73,08	73,08	76,92	76,92
		Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	%	96,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	%	72,73	74,24	75,75	77,25	78,76	80,27	81,78	81,78
		Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	%	15,73	18,32	21,82	25,33	28,50	32,39	35,91	35,91

No	Program Unggulan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
		Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan	%	1,23	4,29	7,36	10,43	13,50	16,56	19,63	19,63
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	71,56	71,89	72,22	78,44	79,11	79,78	80,44	80,44
		Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	12,39	12,85	12,89	12,93	12,97	13,02	13,06	13,06
		Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	%	83,70	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00
5	Festival Anggaran	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,47	95,36	95,35	95,54	95,72	95,89	96,05	96,05
6	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan	Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya	%	65,66	68,09	70,04	72,08	73,18	75,09	77,21	77,21
7	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,47	95,36	95,35	95,54	95,72	95,89	96,05	96,05
		Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	73,06	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,99	93,99
8	SIS SUSANA	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	80,31	81,38	82,45	83,51	84,58	85,65	86,71	86,71
9	BASUH	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	nilai	3,32	3,32	2,61	2,78	2,95	3,12	3,29	3,29
10	SIRUP	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	80,31	81,38	82,45	83,51	84,58	85,65	86,71	86,71
11	Penguatan Sekolah Inklusi	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	80,31	81,38	82,45	83,51	84,58	85,65	86,71	86,71
12	BUMEN SEHATi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	SIBUSAH	Persentase Penunjang Urusan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program Unggulan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	nilai	3,32	3,32	2,61	2,78	2,95	3,12	3,29	3,29
14	Jaminan Kesehatan bagi untuk masyarakat miskin	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	%	72,73	74,24	75,75	77,25	78,76	80,27	81,78	81,78
15	KEBUMEN EKONOMI HANDAL	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A"	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	4,23	4,06	8,75	10,27	10,89	11,74	12,59	12,59
		Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	unit usaha	25	30	35	40	45	50	55	55,00
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	0,00	18,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
16	Program DESMELI (DESa MELek Internet)	Jumlah BUM Desa yang Meningkat Klasifikasinya	BUM Desa	10	40	46	56	67	78	89	89
		Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	nilai	3,85	3,86	3,85	3,85	3,86	3,86	3,87	3,87
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	%	83,70	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00
17	KAPOK PAK EKO	Jumlah BUM Desa yang Meningkat Klasifikasinya	BUM Desa	10	40	46	56	67	78	89	89
18	ANDALAN PAS	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	4,23	4,06	8,75	10,27	10,89	11,74	12,59	12,59
		Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	unit usaha	25	30	35	40	45	50	55	55,00
		Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,47	95,36	95,35	95,54	95,72	95,89	96,05	96,05
		Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	4,23	4,06	8,75	10,27	10,89	11,74	12,59	12,59
		Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	unit usaha	25	30	35	40	45	50	55	55,00
		Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,47	95,36	95,35	95,54	95,72	95,89	96,05	96,05
19	KUMPUL BAKUL	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	unit usaha	25	30	35	40	45	50	55	55,00
		Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	miliar rupiah	8,50	11,55	11,55	12,42	12,91	13,41	14,18	64
20	TANI MULYO	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi	%	80,00	80,00	77,80	80,00	82,50	85,00	87,50	87,50

No	Program Unggulan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
		Baik									
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	13,00	9,24	11,20	12,62	12,70	12,79	12,91	12,91
		Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	miliar rupiah	8,50	11,55	11,55	12,42	12,91	13,41	14,18	64
21	DEMEN MBUMEN	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	4,23	4,06	8,75	10,27	10,89	11,74	12,59	12,59
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-76,33	24,00	19,00	20,00	25,00	33,00	35,00	35,00
		Cakupan Pemasaran Produk UMKM	%	63,91	67,27	68,77	70,27	71,77	73,27	74,77	74,77
22	Pengembangan potensi lokal perikanan darat, perikanan tangkap dan kampung garam	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,00	1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50	7,50
		Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	%	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
		Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	0,00	12,50	25,00	32,50	40,00	47,50	55,00	55,00
23	JAMU SEGER (JAlan MUluS Ekonomi BerGERak)	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	70,94	70,94	74,23	76,23	79,48	82,23	85,18	85,18
24	BANYU MILI	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80,00	80,00	77,80	80,00	82,50	85,00	87,50	87,50
		Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	%	14,50	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	28,00
25	Nandur wit nggo Anak Putu	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	%	9,78	11,30	13,26	15,65	18,48	21,30	24,13	24,13
26	TUPAT RUJI	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	nilai	3,32	3,32	2,61	2,78	2,95	3,12	3,29	3,29
		Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,47	95,36	95,35	95,54	95,72	95,89	96,05	96,05
27	MESIN SERBU	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	%	18,75	21,88	28,13	34,38	40,63	46,88	53,13	53,13
28	MEN TAMBENG	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	26,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

6.7. Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan sesuai dengan amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3499/SJ dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 16 Juni Tahun 2021. Penyelarasan bertujuan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, penyelarasan juga dilakukan untuk menwujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN Tahun 2020-2024, menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 serta menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program dan target pembangunan nasional. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang dilakukan yaitu:

6.7.1. Penyelarasan Target Indikator Makro

Penyelarasan Target Indikator Makro Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Target Indikator Makro nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap daerah. Penyelarasan dilakukan dengan menyandingkan Target Indikator Makro Nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Target Indikator Makro Daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dimana untuk Tahun 2020 adalah data realisasi ke dalam tabel berikut.

Tabel 6.13
Penyelarasan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	RPJMN Tahun 2020-2024						RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023						RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026					
	Indikator Pembangunan	Target					Indikator Pembangunan	Target					Indikator Pembangunan	Realisasi	Target			
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,80	5,90	6,10	6,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-5,7	5,4-5,8	5,8-5,8	5,6-6,0		Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,46	3,91	4,05-5,36	5,00-5,50	5,00-5,50
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	9,43	9,00	8,55	8,15	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81-8,81	9,05-8,05	8,27-7,27	7,48-6,48		Tingkat Kemiskinan (%)	17,59	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,20	4,00	3,80	3,40	3,10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,33	4,23	4,13	4,00		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,07	5,80	5,58-5,51	5,50-5,40	5,40-5,30
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*					74,60-84,23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,00	72,50	72,70	73,00		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,81	70,00	70,57	71,00	71,50
5	Rasio Gini *					0,360-0,474	Indeks Gini	0,34	0,33	0,32	0,3		Ketimpangan Pendapatan Ukuran Bank Dunia (%)	20,02	20,45	20,50-21,00	21,00	21,00-21,50
6	Penurunan Emisi GRK (%)					27,3	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e)	49.481,00	74.027,00	98.587,00	123.401,00							

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

6.7.2. Penyelarasan Program Prioritas

Penyelarasan Program Prioritas Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk menjamin sinergi program prioritas pemerintah daerah yang selaras dengan program prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan program perangkat daerah dengan indikator kinerja program yang selaras dan/atau mendukung program prioritas nasional, serta dapat menuangkan menjadi indikator pembangunan di daerah. Penyelarasan dilakukan dengan menyandingkan Program dan Indikator Pembangunan Nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dimana untuk Tahun 2020 adalah data realisasi ke dalam tabel berikut.

Tabel 6.14
Penyelarasan Program Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	PN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas							urusan energi dan sumber daya mineral							**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**						
	PP	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	49.481,00	74.027,00	98.587,00	123.401,00		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan			100	100	100
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68,0	68,0	68,8	69,2	70,3	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
			Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang						**Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang**													
	PP	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US$/m³)	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku	Persentase Daerah Irigasi yang terpelihara di wilayah balai PDSA Progo, Bgowonto, Luk Ulo	100	100	100	100		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik			77,8	80	82,5
			Urusan Pangan						**Urusan Pangan**							**Urusan Pangan**						
	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	program pengembangan agrobisnis	presentase peningkatan produksi padi	0,70	0,70	0,70	0,70		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			18,69	20,22	21,74
									program pengembangan agrobisnis	presentase peningkatan produksi jagung dan serealia lainnya	0,30	0,30	0,30	0,30		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan			43,17	45,55	47,94
									program pengembangan agrobisnis	presentase peningkatan produksi padi	0,70	0,70	0,70	0,70		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya			54,96	57,25	59,54
									program	presentase	10,00	10,0	10,00	10,00		Program	Persentase			97,65	98,24	98,82

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
									peningkatan SDM dan penyuluh pertanian	jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya						Pengawasan Keamanan Pangan	Hasil Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan					
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Undernourishment/ PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
									Urusan Perikanan dan Kelautan							**Urusan Perikanan dan Kelautan**						
	PP	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9	Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	412.807,50	433.447,88	455.120,26	477.876,28		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			0	1,25	2,5
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen	<64	<67	<72	<76	≤80	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	8,00	6,00	4,00	2,00		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan			15	17,5	20
									Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
	PP	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah	Rasio kewirausahaan nasional (Persen	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0		-	-	-	-	-		-	-			-	-	-

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		(UMKM), dan koperasi																				
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	Program Peningkatan Produktivitas KUKM	Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina	23,02	25,22	27,52	29,92		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas			10,49	10,95	11,78
									Program Peningkatan Produktivitas KUKM	Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina	23,02	25,22	27,52	29,92		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil			2,94	3,9	4,85
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi sehat	23,41	24,86	25,90	27,15		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat			33,33	40	46,67
									Program Pendidikan Koperasi dan UKM	Persentase SDM Koperasi dan UKM yang terampil	78	80	82	83		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten			0,21	0,28	0,35
									Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif	84,52	84,83	85,03	85,19		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi			22,19	29,59	36,98
									Urusan Pertanian							**Urusan Pertanian**						
	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1	Program Pengembangan Agribisnis	Persentase penambahan alsintan	4,00	4,00	4,00	4,00		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			11,2	12,63	12,71
									Program Pengembangan Agribisnis	Persentase penambahan alsintan	4,00	4,00	4,00	4,00		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak			20	22	24
									Pengembangan Agribisnis Peternakan	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif	10,00	10,00	10,00	10,00		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular			2,81	2,89	2,98
																Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			8,83	9,42	10,01
																Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian			100	100	100
									Program Peningkatan SDM dan	Persentase jumlah SDM penyuluh	10,00	10,00	10,00	10,00		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase skor kinerja penyuluhan			56	57	58

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
									Penyuluhan Pertanian	yang ditingkatkan kapasitasnya							pertanian					
									Urusan Kelautan dan Perikanan							**Urusan Kelautan dan Perikanan**						
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	412.807,50	433.447,88	455.120,26	477.876,28		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			0	1,25	2,5
									Program Usaha dan Pengembangan Komoditas	Produksi perikanan budidaya	487.838,83	512.230,77	537.842,31	564.734,42		Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya			5	5	5
									Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	8,00	6,00	4,00	2,00		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan			15	17,5	20
									Penguatan daya saing dan logistik hasil kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	10	15	20	25		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan			0	12,5	25
									Usuran Perindutrian							**Usuran Perindutrian**						
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1	Program Penguatan dan Pengembangan Industri Agro	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	5,69	5,75	5,89	6,0		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT			4,35	5	6
																Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi			100	100	100
																Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi Industri			1	1	1
									Urusan Pariwisata							**Urusan Pariwisata**						
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)(Persen)	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	52,17	60,87	69,57	78,26		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata			86,66	89,99	93,32

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
									Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Nusantara	49.631.073,00	53.204.510,00	57.673.689,00	62.748.973,00		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan			19	20	25
									Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	25,53	31,91	35,11	38,30		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar			20	20	20
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689	Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	25,53	31,91	35,11	38,30		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar			20	20	20
									Urusan Penanaman Modal							**Urusan Penanaman Modal**						
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	Program pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Persentase realisasi proyek penanaman modal	15	15	15	15		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)			397	401	405
									Program promosi dan kerjasama penanaman modal	Rasio jumlah realisasi kemitraan usaha besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepemintaan kemitraan usaha besar (PMA/PMDN) dengan UKM	23	24	25	26		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah			45	50	55
									Program Pelayanan data informasi penanaman modal dan perijinan	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan	60	70	80	90		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			100	100	100
									Program pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Persentase realisasi proyek penanaman modal	15	15	15	15		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan			27,44	28,56	29,67

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																	Kegiatan Usaha yang Berlaku					
									Program Pelayanan data informasi penanaman modal dan perijinan	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan	60	70	80	90		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi			100	100	100
									Urusan Tenaga Kerja							**Urusan Tenaga Kerja**						
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	presentasi kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	1,25	1,50	2,00	2,25		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A"			100	100	100
									program peningkatan kesempatan kerja	presentase pencari kerja yang ditempatkan	69,54	70,09	70,47	71,01		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar			18,58	20,25	22,45
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	presentasi kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	1,25	1,50	2,00	2,25		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A"			100	100	100
									program peningkatan kesempatan kerja	presentase pencari kerja yang ditempatkan	69,54	70,09	70,47	71,01		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar			18,58	20,25	22,45
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
									Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	Program Peningkatan Produktivitas KUKM	Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina	23,02	25,22	27,52	29,92		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas			10,49	10,95	11,78
									Urusan Pariwisata							**Urusan Pariwisata**						
			(Juta orang))Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0	Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	25,53	31,91	35,11	38,30		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi			20	20	20

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																	tingkat dasar					
									Urusan Perdagangan													
	PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor	Nilai ekspor non migas	6.518,00	6.739,00	6.968,00	7.205,00		Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan			1900	2000	2100
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar	21,0	23,0	25,0	27,5	30,0	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
2	PN	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING							**Urusan Sosial**							**Urusan Sosial**						
	PP	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	Porsentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif	0,73	1,09	1,46	1,82		program perlindungan dan jaminan sosial	cakupan perlindungan jaminan sosial			75,75	77,25	78,76
									Urusan Keluarga Berencana							**Urusan Keluarga Berencana**						
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,10	program pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana	persentase penggunaan kontarsepsi jangka panjang (MKJB)	28,50	29,00	29,50	30,00		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif			63,5	63,5	64,5
									Urusan							**Urusan**						

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
									Sosial							**Sosial**						
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80	-	-	-	-	-	-		program rehabilitasi sosial	persentasi PMKS diluar panti kewenangan kabupaten yang tertangani			100	100	100
									program perlindungan dan jaminan sosial	Porsentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif	0,73	1,09	1,46	1,82		program perlindungan dan jaminan sosial	cakupan perlindungan jaminan sosial			75,75	77,25	78,76
	PP	PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98	program perlindungan dan jaminan sosial	Porsentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif	0,73	1,09	1,46	1,82		program perlindungan dan jaminan sosial	cakupan perlindungan jaminan sosial			75,75	77,25	78,76
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2				80	-	-	-	-	-	-		program rehabilitasi sosial	persentasi PMKS diluar panti kewenangan kabupaten yang tertangani			100	100	100
									Urusan Kesehatan							**Urusan Kesehatan**						
	PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,0	217,0	205,0	194,0	183,0	IKU Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu	85,5	84	88	87,5		Indikator Urusan Kesehatan	Angka Kematian Ibu			138,12	122,77	97,20
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0	IKU Dinas Kesehatan	Angka Kematian Bayi	8,1	8,0	7,9	7,8		Indikator Urusan Kesehatan	Angka Kematian Bayi			7,57	7,47	7,37
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11,0	10,0	IKU Dinas Kesehatan	Angka Kematian Balita	10,45	10,45	10,45	10,43		-	-			-	-	-
									Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	program pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan	persentase penggunaan kontarsepsi jangka panjang	28,50	29,00	29,50	30,00		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif			63,5	63,5	64,5

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)						Keluarga Berencana	(MKJB)												
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	program pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana	unmet need KB	12,25	11,75	11,25	10,75		-	-			-	-	-
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25,0	24,0	21,0	20,0	18,0		-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0														
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18														
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272,0	252,0	231,0	211,0	190,0														
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325,0	345,0	365,0	385,0	405,0														
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09														
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7														
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8														
			Persentase	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1														

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			tekanan darah tinggi																			
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65,0	70,0	80,0	90,0	100,0														
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0														
	PP	PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2														
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51														
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	aspek kesejahteraan rakyat	Rata - rata Lama Sekolah	7,24	7,37	7,41	7,45		ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Rata-Rata Lama Sekolah	7,54	7,64	7,74	7,84	7,94
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16		Harapan Lama Sekolah	12,92	13,00	13,08	13,17			Harapan Lama Sekolah	13,34	13,44	13,54	13,64	13,74
									Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
	PP	PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	rasio korban kekerasan terhadap anak	12,66	12,56	12,46	12,36		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	100	100	100	100	100
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	rasio korban kekerasan terhadap anak	12,66	12,56	12,46	12,36		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	100	100	100	100	100
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116475	91,27794284	91,27896233	91,33469578	91,38627023	Indikator Urusan	Indeks Pembangunan Gender	92,06	92,12	92,18	92,25		Program Pengarusutamaan Gender dan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan			14,26	15,63	16,99

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan					
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24481017	73,50050042	73,74051922	73,96592027	74,17747551	Indikator Urusan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,14	75,16	75,18	75,20		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			14,26	15,63	16,99
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756 5	4,378	55														
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Program perlindungan perempuan dan anak	Rasio korban kekerasan pada perempuan	5,81	5,76	5,70	5,64		Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan			100	100	100
									Urusan Kepemudaan dan Olahraga												
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan	39,68	59,78	79,89	100		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif			3,07	3,58	3,92
	PP	PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9				40														
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6				50														
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000														
			Bidang tanah yang diredistribusi	750.000				7.750.000														
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				56.286.087														
	PP	PENINGKATAN PRODUKTIVIT	Persentase angkatan kerja	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1														

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		AS DAN DAYA SAING	berpendidikan menengah ke atas																			
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University																			
			a. Top 200	0	0	0	0	1														
			b. Top 300	1	1	1	1	2														
			c. Top 500	2	2	2	2	3														
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0														
3	PN	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN																				
	PP	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER																				
	PP	MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	Indeks Kerukunan Umat Beragama													IKU Daerah	Indeks Kesalehan Sosial			74,00-75,00	75,00-76,00	76,00-77,00
									Urusan Perpustakaan							**Urusan Perpustakaan**						
	PP	PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETA							Pengelolaan Perpustakaan	Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	40	60,00	80,00	100,00		Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			12,89	12,93	12,97

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		HUAN, DAN BERKARAKTER																				
4	PN	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR																				
	PP	INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	Program Pembangunan Perumahan	Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani	10,35	19,31	28,28	37,24		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni		47,36	52,64	64,48	76,32
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	Program Pembangunan Perumahan	Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani	10,35	19,31	28,28	37,24		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni		47,36	52,64	64,48	76,32
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60														
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00														
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)								Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman			1,65	1,9	2,15
									Urusan Kesehatan							**Urusan Kesehatan**						
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatananan institusi pendidikan sehat 5%	14,28	22,85	28,57	37,14		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten			71,43	74,3	77,1
																Urusan						

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Lingkungan Hidup						
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92 % penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan								Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R			26	27	28
									Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang							**Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang**						
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6% , BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	presentase Akses Air Minum Perkotaan	88,15	90,15	92,15	94,15		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan			10,39	11,03	11,67
										Presentase Akses Air Minum Pedesaan	78,05	79,80	81,55	83,30								
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	presentase Akses Air Minum Perkotaan	88,15	90,15	92,15	94,15		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan			10,39	11,03	11,67
										Presentase Akses Air Minum Pedesaan	78,05	79,80	81,55	83,30								
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,50189621	55,18146289	57,05999842	58,10498273	58,49863205														
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku	Persentase Daerah Irigasi yang terpelihara di wilayah balai PDSA Progo, Bgowonto, Luk Ulo	100	100	100	100		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik			77,8	80	82,5
			Luas lahan pertanian padi dan non- padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229, 16667	115942,7083	116142,7083	116342,7083	116342,7083														
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah	20	20	20	20	20														

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			risiko bencana																			
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325														
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65														
	PP	INFRASTRUKTUR EKONOMI	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)																			
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)																			
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)																			
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)																			
	PP	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)						program pengembangan perhubungan darat	presentase fasilitas kelengkapan terpasang	21,42	29,14	42,85	53,14		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan			72,11	72,55	73,18
	PP	ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100														
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408														
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07														
	PP	TRANSFORMASI DIGITAL	Persentase pertumbuhan	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	program pengembanga	presentase ketersediaan	40,0	60	70,0	80,0		Program Pengelolaan	Nilai Domain Layanan SPBE			3,9	3,9	3,9

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			sektor TIK (rata-rata)						n infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi						Aplikasi Informatika	dalam Penilaian Indeks SPBE					
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3														
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100														
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7														
5	PN	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM																				
																Urusan Lingkungan Hidup						
	PP	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	IKU Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,87	67,02	67,52	67,57		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			74,1	74,19	74,28
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	IKU Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,87	67,02	67,52	67,57		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			74,1	74,19	74,28
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50														
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50	IKU Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,87	67,02	67,52	67,57		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			74,1	74,19	74,28
	PP	PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA	Persentase potensi kehilangan PDB akibat	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10														

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		DAN IKLIM	dampak bencana (persen)																			
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15														
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0								program penanggulangan bencana	presentase desa tangguh bencana			100,0	100,0	100
	PP	PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2														
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3														
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9,0	9,3	9,4	9,4														
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,0	2,3	2,5	2,6	2,9														
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3														
6	PN	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK																				
	PP	KONSOLIDASI DEMOKRASI																				

No	RPJMN Tahun 2020-2024			Target					RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		Target					RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026		Target				
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	PP	OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67														
	PP	PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73														
	PP	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85														
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85														
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70	IKU DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi	77	78	79	80		IKU Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			61	63	65
	PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	020														
			Global Terorism Index	444	439	434	429	424														
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%														
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4														

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam program-program prioritas dan disesuaikan dengan program yang dicantumkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Urusan atau program prioritas dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi urgensinya dalam pencapaian visi dan misi daerah dibanding program operasional sehingga dalam penganggarannya diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini mengingat urusan atau program prioritas ditetapkan karena pengaruhnya yang sangat luas dan sangat urgen untuk dilaksanakan. Pencantuman program penunjang (program rutin) dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 didasarkan bahwa program ini berfungsi sebagai belanja rutin yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Sebagai tahapan awal dalam pembangunan, perencanaan pembangunan perlu disinergikan dengan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitasnya. Dalam sistem perencanaan pembangunan, perencanaan jangka menengah perlu didukung dengan kebijakan program pembangunan untuk implementasinya. Kebijakan yang dirumuskan dalam bab ini merupakan kebijakan umum dan program pembangunan, meskipun di dalam tindak lanjut penjabaran visi dan misi telah diuraikan strategi dan arah kebijakannya, kemudian dilanjutkan dengan pembagian materi tersebut dalam bidang urusan yang dikaitkan dengan Program Unggulan Bupati Kebumen. Oleh karena itu dalam bab ini secara umum akan dibahas kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan pembangunan daerah adalah kemampuan fiskal daerah dalam mendanai seluruh program pembangunan daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diperoleh dari proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang telah disusun pada Bab III. Hasil proyeksi pendapatan merupakan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai proyeksi belanja daerah. Proyeksi belanja daerah telah dijabarkan sebagai program pembangunan daerah yang telah disusun pada Bab VI yang selanjutnya menjadi indikasi rencana program prioritas yang akan dijabarkan pada subbab 7.2. Selisih nilai belanja daerah yang lebih besar dibandingkan pendapatannya akan dibiayai dengan pembiayaan defisit yang diperoleh dari hasil proyeksi pembiayaan daerah.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
A.	**KEMAMPUAN PENDAPATAN**	**2.752.338.008.000**	**2.797.119.077.000**	**2.841.004.405.000**	**2.862.419.273.000**	**2.895.595.578.000**	**2.900.688.323.000**
B.	**BELANJA**	**2.818.415.166.000**	**2.964.098.462.000**	**2.997.416.803.000**	**3.100.365.258.000**	**3.054.001.724.000**	**3.066.172.441.000**
B.1	**Belanja Operasi**	**1.932.804.072.000**	**1.978.511.415.000**	**2.004.615.497.000**	**2.102.099.392.000**	**2.032.942.793.000**	**2.038.696.415.000**
B.1.1	Belanja Pegawai	1.187.836.875.000	1.191.560.395.000	1.177.068.995.000	1.176.731.335.000	1.147.054.208.000	1.146.855.572.000
B.1.2	Belanja Barang dan Jasa	630.206.760.000	660.770.473.000	699.890.099.000	733.816.274.000	749.616.959.000	753.425.881.000
B.1.3	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
B.1.4	Belanja Hibah	84.160.160.000	89.679.291.000	90.098.028.000	153.523.710.000	97.411.927.000	98.668.957.000
B.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.100.277.000	36.001.256.000	36.558.375.000	37.028.073.000	37.859.699.000	38.746.005.000
B.2	**Belanja Modal**	**273.065.757.000**	**363.867.708.000**	**370.448.195.000**	**370.865.750.000**	**387.678.803.000**	**393.574.955.000**
B.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.445.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
B.4	**Belanja Transfer**	**611.100.337.000**	**619.719.339.000**	**620.353.111.000**	**625.400.116.000**	**631.380.128.000**	**631.901.071.000**
C.	**SURPLUS/(DEFISIT)**	**(66.077.158.000)**	**(166.979.385.000)**	**(156.412.398.000)**	**(237.945.985.000)**	**(158.406.146.000)**	**(165.484.118.000)**

Sumber: Analisis Penyusun, 2021
Keterangan: Tahun 2021 adalah angka APBD Murni Tahun 2021

Pada Tabel 7.1. diperoleh kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Proyeksi pendapatan yang telah dibahas pada Bab III diperoleh kemampuan pendapatan daerah yang diasumsikan meningkat setiap tahun dari Rp.2.752.338.008.000,- pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp.2.900.688.323.000,- pada Tahun 2026. Kemampuan pendapatan daerah ini digunakan untuk membiayai belanja daerah yang juga diasumsikan cenderung meningkat dari Rp.2.818.415.166.000,- pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp.3.066.172.441.000,- pada Tahun 2026. Selisih belanja daerah yang lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah selanjutnya dibiayai dengan pembiayaan defisit berdasarkan proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2021-2026.

7.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan prioritas pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai visi dan misi daerah dan pencapaian SPM dan telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional, provinsi yang disusun dengan melibatkan Perangkat Daerah. Penentuan Program perangkat daerah memperhatikan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dibahas pada BAB VI dan selanjutnya menjadi indikasi rencana program prioritas yang akan dijabarkan pada Tabel 7.2.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 difokuskan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD dan mencapai visi dan misi daerah dan pencapaian SPM yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Secara garis besar fokus dan prioritas masing-masing program adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan yaitu program pengelolaan pendidikan. Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pendidikan difokuskan dalam rangka mendukung pencapaian SPM pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non kesetaraan. Selain itu program tersebut selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan antara lain SIS SUSANA (Program beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan anak yatim), SIRUP (Program Insentif guru PAUD, TK, SD dan SMP), serta penguatan sekolah inklusi.

Program ini diarahkan pada pembangunan, rehabilitasi sedang/berat dan pemeliharaan rutin sarana prasarana dan rutinitas sekolah (PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan), penyediaan biaya personil peserta didik bagi siswa kurang mampu bagi siswa SD, SMP dan peserta didik non formal/kesetaraan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan

Pendidikan PAUD dan Pendidikan non formal/kesetaraan. Selain itu pengelolaan dan pemberian biaya operasional sekolah untuk SD dan SMP, serta biaya operasional Pendidikan bagi PAUD dan Pendidikan non formal/kesetaraan dan penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar seperti perlengkapan sekolah, alat praktik dan peraga siswa, pembinaan minat bakat siswa dan pembinaan kelembagaan/ manajemen sekolah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian SPM Kesehatan. Selain itu program tersebut selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Peningkatan asksesibilitas pelayanan kesehatan pertama maupun rujukan dilaksanakan melalui 37 BLUD yaitu 35 puskesmas dan 2 Rumah Sakit dan UPT Dinas Kesehatan. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan antara lain BUMEN SEHATI (Program Peningkatan Derajad Kesehatan Bagi Warga Miskin), SIBUSAH (Program Santri Kebumen Sehat dan Berkah) dan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Selain berfokus pada pelayanan administrasi perkantoran dan perencanaan dan evaluasi, program ini fokus pada pelayanan kesehatan pada peningkatan pelayanan BLUD.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Program ini diarahkan dalam rangka pencapaian SPM kesehatan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pembangunan puskesmas; Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya; Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit; Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan; Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan; Pengadaan obat, vaksin; Pengadaan bahan habis pakai.

   Selain itu pada strata layanan kesehatan rujukan dilaksanakan melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan dengan Fokus pada Penanganan Covid-19. Peningkatan akses dan mutu pada layanan dasar maupun rujukan melalui pelaksanaan akreditasi dan operasional rumah sakit.

   Selain itu peningkatan akses dan mutu layanan yang berkait dengan SPM kesehatan yaitu pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir dan balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut. Deteksi dini penyakit tidak menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, diabetes melitus dan ODGJ, serta penyakit menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, orang dengan risiko terinveksi HIV. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainya, pengelolaan Surveillans kesehatan, dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase capaian SPM bidang Kesehatan.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan melalui Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi.

d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga serta pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT). Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase produk pangan PIRT yang tersertifikasi.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan untuk advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, pelaksana hidup sehat dalam rangka promotif preventif dan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase capaian PHBS tingkat Kabupaten.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air minum. Selain itu program tersebut selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan antara lain JAMU SEGER (Jalan Mulus Ekonomi Bergerak), dan BANYU MILI (Air Irigasi Tersedia Terus). Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA)

Program ini diarahkan pada Pembangunan embung dan penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya, dan Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder melalui rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, dan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sumber air yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase infrastruktur sumber daya air kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik.

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM di kawasan perdesaan, dan Peningkatan SPAM di kawasan perdesaan. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung persentase pelayanan air bersih dan pemenuhan SPM air minum yang diukur dengan indikator kinerja persentase pelayanan air bersih dan perpipaan.

c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Program ini diarahkan pada pembangunan sistem drainase lingkungan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan, operasi dan pemeliharaan sistem drainase. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase saluran drainase dalam kondisi baik.

d. Program penataan bangunan gedung

Program ini diarahkan pada perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan, rehabilitasi, renovasi, ubah suai serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota. Selain itu fokus pada penyelengaraan penerbitan ijin mendirikan bangunan, sertifikat laik fungsi, peran tenaga ahli bangunan gedung, pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik.

e. Program penataan bangunan dan lingkungannya

Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungannya untuk mendukung program TMMD. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase bangunan dan lingkungan yang tertangani.

f. Program penyelenggaraan jalan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan kabupaten/kota melalui penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan, pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan, survey kondisi jalan/jembatan, pembangunan jalan, pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan, pembangunan jembatan dan pemeliharaan berkala jembatan. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap.

g. Program pengembangan jasa konstruksi

Program ini diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja penyedia jasa konstruksi yang telah dibina dan nilainya baik.

h. Program penyelenggaraan tata ruang

Program ini diarahkan pada penetapan perda revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota, dan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian lahan dengan pola ruang RTRW.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air limbah dan SPM Perumahan Rakyat. Selain itu program tersebut selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Program ini untuk mendukung capaian indikator kinerja persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota dan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha melalui pembentukan/pembinaan

kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh. Selain itu perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh kewenangan kabupaten. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota melalui perbaikan rumah tidak layak huni untuk penegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilaur Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rumah tidak layak huni tertangani.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penyediaan prasarana,sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian antara lain sanitasi, angkutan lumpur tinja dan sarana prasarana akses jalan IPLT. Koordinasi sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan antara lain oemeliharaan IPAL/IPLT dan peayanan pengolahan air limbah. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan akses air limbah aman.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, SPM Pemadam Kebakaran dan SPM Penanggulangan Bencana. Selain itu program tersebut selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan antara lain Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam rangka penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas sdm satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu penegakkan perda dan peraturan bupati/walikota melalui penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan-peraturan Bupati/Walikota dan sosialisasi penegakan perda dan perkada. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penegakkan perda.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota melalui sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/Kota (per jenis bencana), pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan

dan kesiapsiagaan, penanganan pascabencana serta pengembangan kapasitas tim reaksi cepat/TRC bencana Kabupaten/Kota. Selain itu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui Respon Cepat Darurat Bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota, serta penyediaan logistik, penyelematan dan evakuasi korban bencana. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa tangguh bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung *respon time* terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran, kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kesiapsiagaan Damkar.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Sosial. Selain itu program tersebut selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan yaitu Satu Data Untuk Semua (Integrasi data kependudukan dengan semua sektor terkait urusan kesejahteraan) Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan untuk penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan melalui pada Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan warga negara korban tindak kekerasan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan, serta pemberian layanan kedaruratan. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti sosial melalui pemberian layanan data dan pengaduan, penyediaan permakanan, penyediaan sandang, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase PMKS diluar panti kewenangan Kabupaten yang tertangani.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan jaminan sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota melalui penyediaan makanan, penyediaan sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan pelayanan dukungan psikososial. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota.

f. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Program ini diarahkan pada pemeliharaan taman makam pahlawan nasional. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase taman makam pahlawan yang dikelola.

B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan antara lain Kebumen Ekonomi Handal melalui Prorgam Lawet Muda Kreatif sebagai wadah pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda Kebumen dalam rangka menekan angka pengangguran. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase tenaga kerja yang dilatih bernilai A.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/ Kota dan perluasan kesempatan kerja untuk mendukung persentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja yang terdaftar baik pencari kerja dalam daerah, Antar Lintas Daerah (AKAD) bahkan pencari kerja Antar Lintas Negara (AKAN). Selain itu perlindungan pmi (pra dan purna penempatan) di daerah Kabupaten/ Kota melalui peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran/pekerja migran, penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penempatan pencari kerja terdaftar.

c. Program hubungan industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah dan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Program ini diarahkan pada Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota melalui sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

b. Program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota dan koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu sebagai bentuk promosi difokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan perempuan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan program peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Program ini diarahkan pada pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten Kebumen serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kategori Kabupaten Layak Anak (KLA).

f. Program perlindungan khusus anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota dengan fokus pada penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan anak.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

   Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/ Kota dengan fokus pada Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

   Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan dan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota fokus pada pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase diversifikasi dan ketahanan pangan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

   Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/ Kota melalui penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa yang tertangani kerawanan pangannya.

d. Program Pengawasan Keamananan Pangan

   Program ini diarahkan pada pemberian jaminan keamanan bagi konsumen untuk penggunaan produk olahan dan barang pangan yang dijual dipasaran dengan kualitas tinggi melalui pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan penguatan kelembagaan keamanan pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah penyelesaian penanganan sengketa lahan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan sengketa lahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air limbah. Selain itu program tersebut selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan Nandur Wit Nggo Anak Putu. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

   Program ini diarahkan pada pembuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) di Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup

   Program ini diarahkan pada pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut dan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota melalui penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. Selain itu pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi, penghentian sumber pencemaran dan pelaksanaan restorasi. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)

   Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/ kota dengan fokus pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

   Program ini diarahkan pada penyimpanan sementara limbah B3 sebelum dilakukan pembuangan akhir ditempat yang ditentukan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja perentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

   Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen fokus pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban ijin

lingkungan dan/atau ijin PPLH dan pengawasa usaha atas ijin yang telah diterbitkan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Kebumen melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup dan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat di Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) fokus pada pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dan fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan hidup. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan pengaduan masyarakat.

i. Program pengelolaan persampahan

Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah dengan fokus pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan antara lain GO-LAK (Jemput ke rumah layanan administrasi kependudukan) dan Satu Data Untuk Semua (Integrasi data kependudukan dengan semua sektor terkait urusan kesejahteraan). Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada pelayanan pendaftaran penduduk dengan fokus pada pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pendaftaran penduduk serta peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk. Mendukung pendaftaran penduduk antara lain melalui penataan pendaftaran penduduk dalam hal pengadaan formulir dan dokumen pendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta sosialisasi pendaftaran penduduk. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan layanan pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan sipil

Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil dengan fokus pada peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, pencatatan, penatausahaan dokumen peristiwa penting, peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil serta koordinasi terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan institusi lainnya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan layanan pencatatan sipil.

c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program ini diarahkan pada pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan melalui pengolahan dan penyajian data kependudukan dan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan fokus pada Fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan dan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penggunaan data informasi administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa dengan fokus pada pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa tertata.

b. Program peningkatan kerjasama desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi kerjasama antar desa dengan fokus pada fasilitasi kerja sama antar desa, antara desa dengan pihak ketiga serta fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan fasilitasi kerjasama desa.

c. Program administrasi pemerintahan desa

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dengan fokus pada Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, fasilitasi produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pembinaan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, serta pelaksanaan penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa. Program ini untuk mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dan cakupan administrasi pemerintahan desa. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah BUM Desa yang meningkat klasifikasinya.

d. Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang msyarakat pelakunya hukum

adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Program ini untuk mendukung capaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat termasuk lembaga ekonomi desa dan mendukung pencapaian indikator kinerja persentase PKK desa/kelurahan tertib administrasi.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengendalian penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah melalui penyusunan profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta penyusunan kajian dampak kependudukan. Fokus pada implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal dan penyusunan profil kependudukan keluarga dan kajian dampak kependudukan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk.

b. Program pembinaan keluarga berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal fokus pada pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK dan promosi dan penyediaan sarana KIE program KKBPK. Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) fokus pada penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB dan Penggerakan Kader Institusi masyarakat pedesaan (IMP). Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah fokus pada pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan, peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB fokus pada Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan peserta KB aktif.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Program ini diarahkan pada pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dilaksanakan melalui orientasi bagi pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga, promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan dan mitra kerja. Program ini dilakukan

untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pemberdayaan keluarga sejahtera.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perhubungan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan untuk penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota melalui penyediaan dan rehabilitasi serta pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota dan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C fokus pada pengembangan sarana dan prasarana terminal. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir melalui pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Pengujian berkala kendaraan bermotor melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota melalui pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota fokus pada pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah melalui fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks infrastruktur perhubungan.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan yaitu Desmeli (Desa Melek Internet). Selain itu program tersebut mendukung program unggulan yaitu Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP) dan Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli melalui sistem e-Gov dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

   Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks PPID.

b. Program Aplikasi Informatika

   Program ini diarahkan pada pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah

Kabupaten/Kota yang berfokus pada pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan e-government di lingkup pemerintah daerah dan mewujudkan kebumen smart city. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai domain layanan SPBE dalam penilaian indeks SPBE.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan yaitu Kebumen Ekonomi Handal melalui Program SI DAWIR (Program Inkubasi Pemuda Wirausaha), dan DEMEN MBUMEN (Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi). Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada pengawasan terhadap koperasi aktif yang berada di Kabupaten Kebumen dalam kegiatan operasionalnya. Pengawasan dimaksudkan untuk menjaga opersional koperasian sesuai dengan Undang undang Koperasi dan AD/ART Koperasi. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Selain itu dilaksanakan penilaian koperasi setiap untuk mendata koperasi yang aktif dan mengadakan pengawasan, pembinaan terhadap koperasi yang kurang sehat dan memberikan penghargaan atas kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten. Penilaian dilakukan di wilayah Kabupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase koperasi sehat.

b. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota dengan fokus pada Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi untuk mendukung capaian persentase SDM koperasi yang kompeten. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase SDM Koperasi yang Kompeten.

c. Program Pemberdayan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada pemberdayaan koperasi dengan memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota koperasi yang bermasalah di wilayah Kabupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase advokasi kepada koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dan perlindungan

Progam ini diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan fokus pada Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Program ini dilakukan

untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan UMKM yang berkualitas.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan fokus pada fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, kemudahan akses modal, serta desain dan teknologi. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Program tersebut mendukung program unggulan yaitu Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP) dan Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli melalui sistem e-Gov dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah pembangunan pengembangan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), mempermudah dan meningkatkan pelayanan perizinan dalam rangka mendorong peningkatan PMDN/PMA ke Kebumen. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pemberian fasilitas/intensif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan penyusunan peta serta rencana umum penanaman modal. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada promosi kepada calon investor untuk dapat menanamkan modal ke Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen kepeminatan investasi daerah.

c. Program Pelayanan Penanam Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Kebumen. Peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan termasuk layanan konsultasi dan pemantauan pemenuhan atas komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengendalian terhadap penanaman modal sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dalam kewenangan Kabupaten Kebumen dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan non perizinan termasuk kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota dengan fokus pada koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase organisasi pemuda yang aktif.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi fokus pada pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*Sport Science*) dan pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota dan pemberian penghargaan olahraga Kabupaten/Kota serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga melalui pengembangan organisasi keolahragaan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase prestasi olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan dengan fokus pada partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja capaian perstasi kepramukaan.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Statistik selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melalui penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral. Program ini dilakukan untuk mendukung

pencapaian indikator kinerja persentase OPD yang mengisi website satu data sesuai SOP.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Persandian selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan pada penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan pada penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kebudayaan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat. Program tersebut mendukung program unggulan yaitu MESIN SERBU (Program Membumikan dan Mempromosikan Seni Serta Budaya Khas Kebumen). Program yang dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

   Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya, pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kesenian yang dikembangkan.
b. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

   Program ini diarahkan pada pengelolaan cagar budaya kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perpustakaan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

   Program ini diarahkan pada pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan serta Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks pembangunan literasi masyarakat.
b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada pelestarian koleksi naskah kuno yang ada di Kabupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kearsipan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip dengan fokus pada pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip baku.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan nelayan kecil melalui penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dan pengembangan kapasitas nelayan kecil, serta penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten fokus pada pembinaan KUB melalui pengembangan kapasitas nelayan kecil dan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil. Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai 10 GT melalui pelayanan penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Progam ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan fokus pada pelayanan tanda daftar usaha perikanan budidaya dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan, penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat, serta perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan sumber Daya Kelauatan dan Perikanan

Progam ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan diwilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air dari penangkapan yang dapat merusak ekosistem yang ada didalamnya. Pengawasan dilakukan di daerah Kebupaten

Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan wilayah perairan umum daratan yang mendapatkan pelestarian sumber daya perikanan.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Progam ini diarahkan pada pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan melalui pelaksanaan bimbingan penerapan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pariwisata mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Program tersebut mendukung program unggulan yaitu DEMEN MBUMEN (Gerakan Cinta Produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa). Program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada peningkatan daya tarik destinasi pariwisata melalui Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata. Pengelolaan destinasi pariwisata dimulai dari perencanaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah dengan fokus pada penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata dan pengelolaan investasi pariwisata. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penyediaan sarana prasarana pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada pemasaran daya tarik destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata dalam dan luar negeri melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan wisatawan.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia pengelola wisata, pelaku usaha sektor pariwisata dan pemberdayaan perekonomian kreatif pendukung pariwisata di Kabupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pertanian mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan

Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Program tersebut mendukung program unggulan yaitu TANI MULYO yaitu program peningkatan produksi pertanian melalui pemenuhan sarana dan prasarana pertanian dan penanganan pasca panen. Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian melalui pengawsan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/ kota dengan upaya peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan melalui pengawasan mutu benih/bibit ternak dengan pendampingan peningkatan kualiats gizi pakan ternak. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer dan pengendalian pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan yang fokus pada peningkatan kualitas bibit ternak sapi PO. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya. Pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, DAM parit, dan jalan usaha tani, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya, dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/ kota melalui pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak serta pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota fokus pada pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota fokus pada penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan dan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan fokus pada penyediaan jasa medik veteriner, pendampingan usaha produk hewan, uji laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan pendampingan penerapan kesejahteraan hewan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penurunan kejadian dan kasus penyakit hewan menular.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan fokus pada pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian dan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi izin usaha pertanian.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, pembentukan badan usaha milik petani, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani serta pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase skor evaluasi kinerja penyuluhan pertanian.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu program pengelolaan energi baru terbarukan yang diarahkan pada pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Kabupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengelolaan energi baru terbarukan.

5. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perdagangan mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya melalui pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai pendapatan retribusi pasar.

b. Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program ini diarahkan pada pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang akan dilaksanakan melalui upaya menjamin

ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota dengan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Selain itu pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja inflasi barang kebutuhan pokok pada pasar.

c. Program Pengembangan ekspor

Program ini diarahkan pada pengembangan ekspor produk komoditas Kebumen. Program ini difokuskan untuk mengadakan promosi dan misi dagang bagi produk eksport yang menjadi produk unggulan ekspor di Kabupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai ekspor perdagangan

d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera ulang dan pengawasan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase UTTP yang tertera.

e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan fokus pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri tingkat Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pemasaran produk UMKM.

6. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perindustrian mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program perencanaan dan pembangunan industri

Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota yang difokuskan pada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi gula kelapa dan rokok bercukai.

b. Program pengendalian ijin usaha industri

Program ini diarahkan pada penerbitan ijin usaha industri kecil dan menengah yang difokuskan pada koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase dokumen perizinan yang terfasilitasi.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi industri nasioanal

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi yang dipergunakan untuk kepentingan IPUI, LUI, LUKI dan IPKI yang menjadi kewenangan Kabupaten

Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen informasi industri.

7. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Transmigrasi mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasiskan Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang difokuskan pada Pemindahan Dan Penempatan Transmigran Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase transmigran yang ditempatkan.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretarat Daerah selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui pelaksanaan program unggulan TUPAT RUJI yaitu program bantuan tempat ibacah dan bantuan guru ngaji / TPQ dengan rincian program sbb:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada administrasi keuangan perangkat daerah dengan fokus pada pelayanan administrasi keuangan pada sekretariat daerah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan fokus pada pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Administrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan fokus pada penyediaan layanan umum sekretariat daerah. Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah dengan fokus pada penyediaan pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penataan organisasi dengan fokus pada pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Serta protokol dan komunikasi pimpinan dengan fokus pada fasilitasi keprotokolan, fasilitasi komunikasi pimpinan, dan pendokumentasian tugas pimpinan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai IKM Sekretariat Daerah.

b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada Administrasi Tata Pemerintahan dengan fokus pada penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan fokus pada fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual serta pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan fokus pada fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum, serta pengelolaan informasi hukum. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan fokus pada fasilitasi kerjasama daerah, dan evaluasi

kinerja perangkat daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD).

c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan kebijakan perekonomian melalui koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD Dan BLUD, serta pengendalian dan distribusi perekonomian. Pelaksanaan Administrasi pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi program pembangunan, serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam melalui koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup serta koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kualitas kebijakan pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretarat DPRD selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program yang dilaksanaan antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada layanan administrasi DPRD dan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan fokus pada penyelenggaraan administrasi, ketata usahaan dan kepegawaian DPRD, Fasilitasi Rapat DPRD, fasilitasi fraksi DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyediaan pakaian dinas DPRD, serta pelaksanaan *medical check up* DPRD. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada pembentukan perda dan peraturan DPRD dengan fokus pada penyusunan dan pembahasan program pembentukan perda, pembahasan rancangan perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan naskah akademik. Pembahasan kebijakan anggaran dengan fokus pada pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan pertanggungjawaban APBD dan pembahasan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan fokus pada pengawasan semua urusan pemerintahan dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan fokus pada bimbingan teknis DPRD, penyusunan program kerja DPRD, Penyediaan tenaga ahli fraksi dan Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tenaga Ahli. Penerapan penghimpunan aspirasi masyarakat dengan fokus pada kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan pelaksanaan reses. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan fokus pada pengawasan kode etik DPRD. Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan fokus pada fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah. Fasilitasi tugas pimpinan DPRD dengan fokus pada

koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Perencanaan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program pada urusan perencanaan bertujuan untuk mendukung capaian Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100%. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

   Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan pendanaan dengan fokus pada koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Kabupaten/ Kota dan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota serta monitoring program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada monev dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   Program ini diarahkan pada Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan fokus pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan fokus pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam. Koordinasi perencanaan bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan dengan fokus pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang infrastruktur. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Keuangan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program tersebut selaras dengan program unggulan Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem E-Gov dalam pengelolaan pemerintahan, dan Festival Anggaran. Program dan yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dengan fokus pada penyusunan regulasi bidang anggaran, koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah, penyusunan KUA dan PPAS, dan penyusunan perda APBD murni/perubahan dan Peraturan Bupati Penjabaran APBD murni/perubahan. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah dengan fokus pada koordinasi dan pengelolaan kas daerah, penyusunan laporan realisasi dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta penatausahaan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan. Koordinasi dan pelaksaan akutansi dan pelaporan keuangan daerah dengan fokus pada penyusunan perda pertanggungjawaban APBD, konsolidasi laporan keuangan dan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah sesuai sistem akutansi pemerintah daerah serta pembinaan pengelolaan BLUD. Kegiatan penunjang urusan dengan fokus pada pengelolaan cana cadangan pemerintah daerah, penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi, Pelaksanaan Alokasi, pengelolaan dana bagi hasil, pengelolaan dana darurat/mendesak, Dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase capaian pengelolaan keuangan daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada pengelolaan barang miik daerah dengan fokus pada penyusunan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengamanan, optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan, rekonsiliasi dan pelaporan Barang Miik Daerah dan koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan barang milik daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pengelolaan barang milik daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada pengelolaan pendapatan daerah fokus pada analisa dan pengembangan pajak daerah dan penyusunan kebijakan pajak daerah, penyuluhan kebijakan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran objek pajak, pengelolaan basis data pajak daerah dan penagihan pajak daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase capaian pendapatan daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Kepegawaian selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program tersebut selaras dengan program unggulan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang fokus pada penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan administrasi dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian melalui mutasi dan promosi ASN dan pengembangan kompetensi ASN dengan pendidikan lanjutan dan pengembangan karir dalam jabatan fungsional ASN. Dalam pelaksanaan evaluasi ASN dengan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan fokus pada pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penempatan PNS dalam jabatan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program tersebut selaras dengan program unggulan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan. Program pada urusan Pendidikan dan Pelatihan adalah program pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk penyelenggaraan diklat bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase ASN yang meningkat kapasitasnya.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dan pengembangan inovasi dan teknologi yang difokuskan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan bidang pemerintahan umum dan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program tersebut selaras dengan program unggulan Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem E-Gov dalam pengelolaan pemerintahan. Progam yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Progam Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang difokuskan pada pengawasan kinerja, keuangan pemerintah daerah, pengawasan desa, kerjasama pengawasan internal serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, serta pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja level Kapabilitas APIP.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawsan serta pendampingan dan asistensi. Fokus pada perumusan kebijakan bidang pengawasan, pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, penegakkan integritas dan Monev

dan verifikasi penegahan dan pemberantasan korupsi. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai persepsi korupsi.

G. Unsur Kewilayahan (kewilayahan)

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Unsur Kewilayahan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program tersebut selaras dengan program unggulan Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem E-Gov dalam pengelolaan pemerintahan, Festival Anggaran, dan Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP). Program pada urusan unsur kewilayahan bertujuan untuk mendukung capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat fokus pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait degan pelayanan perizinan dan non perizinan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan.

b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

   Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kegiatan pemberdayaan kelurahan fokus pada pelaksanaan padat karya dan swakelola pada pembangunan fisik lingkungan kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang desa/ kelurahan, pembangunan sarana dan prasaranakelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan evaluasi kelurahan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kelurahan.

c. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

   Program ini diarahkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan pemerintah daerah fokus pada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kondusivitas kecamatan.

d. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

   Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa fokus pada fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, fasilitasi kerjasama desa dan antar desa, fasilitasi penyelenggaraan dan ketertiban umum, fasilitasi penyusunan pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri.

H. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam fungsi pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik) selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat. Program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan fokus pada perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja rasio elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam proses pemilihan umum.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dibidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan fokus pada Pelaksanaan Kebijakan dan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja rasio elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan fokus pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta penanganan konflik di daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi.

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan pemerintah daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah yang diarahkan pada

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan fokus kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah. Administrasi Keuangan dengan fokus kegiatan pada pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan perangkat daerah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada lingkup perangkat daerah. Administrasi umum perangkat daerah dengan fokus kegiatan pada penyediaan barang/jasa pendukung administrasi perkantoran. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan fokus kegiatan pada kegiatan pengadaan barang/jasa pendukung operasional perangkat daerah. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan fokus pada penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah meliputi penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																		
1	**01**		**Pendidikan**						**1.125.787.098.000**		**1.124.334.468.000**		**1.133.939.102.000**		**1.127.123.410.000**		**1.144.229.733.000**		**5.655.413.811.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	914.740.863.000	100,00	913.796.692.000	100,00	924.232.136.000	100,00	914.708.037.000	100,00	931.702.701.000	100,00	4.599.180.429.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	80,31	81,38	82,45	211.046.235.000	83,51	210.537.776.000	84,58	209.706.966.000	85,65	212.415.373.000	86,71	212.527.032.000	86,71	1.056.233.382.000	Satu Data Untuk Semua, SIS SUSANA, SIRUP, Penguatan Sekolah Inklusi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
1	**02**		**Kesehatan**						**498.978.014.000**		**522.365.064.000**		**533.733.366.000**		**540.324.882.000**		**547.541.490.000**		**2.642.942.816.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	367.123.495.000	100,00	382.778.211.000	100,00	392.298.105.000	100,00	398.746.271.000	100,00	409.344.435.000	100,00	1.950.290.517.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan, BUMEN SEHATI, SIBUSAH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	124.120.614.000	100,00	131.829.123.000	100,00	133.656.178.000	100,00	133.781.273.000	100,00	130.389.266.000	100,00	653.776.454.000	Satu Data Untuk Semua, Tiada Hari Tanpa Pelayanan, BUMEN SEHATI, SIBUSAH, Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	%	99,00	100,00	100,00	117.500.000	100,00	121.025.000	100,00	122.521.000	100,00	128.206.000	100,00	130.920.000	100,00	620.172.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	%	100,00	100,00	100,00	553.882.000	100,00	561.382.000	100,00	568.382.000	100,00	568.382.000	100,00	568.382.000	100,00	2.820.410.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	%	58,04	68,04	71,52	7.062.523.000	74,35	7.075.323.000	77,17	7.088.180.000	80,00	7.100.750.000	81,96	7.108.487.000	81,96	35.435.263.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
1	**03**		**Pekerjaan umum dan penataan ruang**						**174.952.617.000**		**174.365.353.000**		**192.110.441.000**		**171.422.015.000**		**171.880.329.000**		**884.730.755.000**		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	23.880.216.000	100,00	25.032.064.000	100,00	25.782.899.000	100,00	25.673.408.000	100,00	26.133.326.000	100,00	126.501.913.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80,00	80,00	77,80	24.842.323.000	80,00	25.000.000.000	82,50	25.000.000.000	85,00	25.000.000.000	87,50	25.000.000.000	87,50	124.842.323.000	TANI MULYO, BANYU MILI	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	%	17,54	18,75	20	9.239.754.000	21,25	9.046.845.000	22,5	9.048.250.000	23,75	9.049.697.000	25	9.051.188.000	25,00	45.435.734.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	15,98	15,98	15,98	7.038.000.000	17,04	7.000.000.000	18,01	7.000.000.000	19,98	4.787.176.000	20,04	5.212.824.000	20,04	31.038.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	80,13	80,13	81,14	900.000.000	81,14	1.463.455.000	82,15	1.272.019.000	83,16	4.880.874.000	83,84	4.390.029.000	83,84	12.906.377.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	%	13,04	13,04	13,91	3.061.000.000	13,91	579.481.000	15,00	593.455.000	15,00	608.127.000	15,00	623.533.000	15,00	5.465.596.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	70,94	70,94	74,23	104.063.300.000	76,23	104.908.977.000	79,48	122.036.029.000	82,23	100.000.000.000	85,18	100.000.000.000	85,18	531.008.306.000	JAMU SEGER	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	%	44,92	44,92	44,92	387.224.000	50,15	498.840.000	55,08	510.805.000	60,00	523.130.000	64,92	535.824.000	64,92	2.455.823.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	75,00	75,00	91,15	1.540.800.000	91,25	835.691.000	91,35	866.984.000	91,45	899.603.000	91,55	933.605.000	91,55	5.076.683.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan umum dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					penataan ruang
1	**04**		**Perumahan dan Kawasan Permukiman**						**14.674.044.000**		**17.268.761.000**		**17.824.681.000**		**18.681.631.000**		**18.436.369.000**		**86.885.486.000**		
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	1.815.000.000	100,00	840.000.000	100,00	845.000.000	100,00	850.000.000	100,00	855.000.000	100,00	5.205.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha	%	4,30	6,89	11,09	2.466.500.000	15,94	3.908.200.000	21,12	4.276.246.000	26,29	4.534.533.000	31,46	4.534.533.000	31,46	19.720.012.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	%	19,48	47,36	52,64	3.950.051.000	64,48	5.470.000.000	76,32	5.480.000.000	88,16	5.490.000.000	100,00	5.500.000.000	100,00	25.890.051.000	Satu Data Untuk Semua	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman	%	1,16	1,16	1,17	6.442.493.000	1,17	7.050.561.000	1,17	7.223.435.000	1,17	7.807.098.000	1,17	7.546.836.000	1,17	36.070.423.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**05**		**Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						**24.674.795.000**		**32.428.961.000**		**35.392.648.000**		**31.044.914.000**		**41.385.072.000**		**164.926.390.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	10.763.845.000	100,00	15.523.774.000	100,00	13.221.084.000	100,00	11.789.077.000	100,00	21.522.212.000	100,00	72.819.992.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100,00	100,00	4.020.931.000	100,00	4.331.256.000	100,00	8.413.397.000	100,00	4.618.007.000	100,00	4.765.893.000	100,00	26.149.484.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	26,19	100,00	100,00	8.038.600.000	100,00	10.665.082.000	100,00	11.359.583.000	100,00	12.166.469.000	100,00	12.550.811.000	100,00	54.780.545.000	MEN TAMBENG	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	%	69,23	69,23	69,23	1.851.419.000	73,08	1.908.849.000	73,08	2.398.584.000	73,08	2.471.361.000	76,92	2.546.156.000	76,92	11.176.369.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	**06**		**Sosial**						**11.247.486.000**		**11.869.121.000**		**11.754.003.000**		**11.279.896.000**		**11.246.886.000**		**57.397.392.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.608.704.000	100,00	5.302.766.000	100,00	4.931.780.000	100,00	4.401.091.000	100,00	4.222.865.000	100,00	23.467.206.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	%	19,25	15,45	69,00	377.719.000	70,00	377.719.000	71,00	389.049.000	72,00	399.329.000	73,00	412.741.000	73,00	1.956.557.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	0,00	100,00	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	100.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	%	96,12	100,00	100,00	3.259.814.000	100,00	3.152.387.000	100,00	3.241.597.000	100,00	3.332.882.000	100,00	3.408.321.000	100,00	16.395.001.000	Satu Data Untuk Semua, Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	%	72,73	74,24	75,75	1.105.970.000	77,25	1.105.970.000	78,76	1.105.970.000	80,27	1.105.970.000	81,78	1.105.970.000	81,78	5.529.850.000	Satu Data Untuk Semua, Tiada Hari Tanpa Pelayanan, Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	1.860.879.000	100,00	1.895.879.000	100,00	1.950.775.000	100,00	2.005.348.000	100,00	2.061.255.000	100,00	9.774.136.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang Dikelola	%	100,00	100,00	100,00	14.400.000	100,00	14.400.000	100,00	114.832.000	100,00	15.276.000	100,00	15.734.000	100,00	174.642.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																		
2	**07**		**Tenaga Kerja**						**10.722.791.000**		**10.258.247.000**		**10.117.669.000**		**22.008.917.000**		**18.027.336.000**		**71.134.960.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	5.937.553.000	100,00	6.544.689.000	100,00	6.325.339.000	100,00	5.462.929.000	100,00	6.091.688.000	100,00	30.362.198.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A"	%	100,00	100,00	100,00	1.675.507.000	100,00	1.765.106.000	100,00	1.816.998.000	100,00	14.541.395.000	100,00	9.900.917.000	100,00	29.699.923.000	Kebumen Ekonomi Handal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	%	15,73	18,32	21,82	2.970.000.000	25,33	1.804.400.000	28,50	1.826.958.000	32,39	1.851.767.000	35,91	1.877.320.000	35,91	10.330.445.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100,00	100,00	100,00	139.731.000	100,00	144.052.000	100,00	148.374.000	100,00	152.826.000	100,00	157.411.000	100,00	742.394.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	**08**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						**1.085.737.000**		**977.390.000**		**992.706.000**		**1.009.201.000**		**1.026.231.000**		**5.091.265.000**		
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	12,11	13,48	14,31	312.531.000	15,69	218.907.000	17,06	225.473.000	18,43	232.238.000	19,80	239.205.000	19,80	1.228.354.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan	%	100,00	100,00	100,00	263.935.000	100,00	264.833.000	100,00	265.758.000	100,00	266.711.000	100,00	267.692.000	100,00	1.328.929.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	%	12,11	13,28	14,06	12.919.000	15,63	13.306.000	16,80	13.705.000	18,36	14.116.000	19,92	14.539.000	19,92	68.585.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	%	100,00	100,00	100,00	30.134.000	100,00	31.038.000	100,00	31.969.000	100,00	32.928.000	100,00	33.915.000	100,00	159.984.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	pratama/ madya/ nindya/ utama/ KLA	madya	madya	madya	198.739.000	madya	180.297.000	madya	185.216.000	madya	191.000.000	nindya	197.000.000	nindya	952.252.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	%	100,00	100,00	100,00	267.479.000	100,00	269.009.000	100,00	270.585.000	100,00	272.208.000	100,00	273.880.000	100,00	1.353.161.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**09**		**Pangan**						**19.201.445.000**		**20.159.202.000**		**20.460.134.000**		**19.813.276.000**		**20.340.317.000**		**99.974.374.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	14.982.445.000	100,00	16.034.902.000	100,00	16.356.729.000	100,00	15.501.019.000	100,00	15.920.197.000	100,00	78.795.292.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	%	13,48	17,17	18,70	1.335.000.000	20,22	1.569.503.000	21,74	1.461.416.000	23,26	1.503.328.000	24,78	1.545.241.000	24,78	7.414.488.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	%	38,16	40,79	43,17	1.839.000.000	45,55	1.733.462.000	47,94	1.793.041.000	50,32	1.931.981.000	52,70	1.899.281.000	52,70	9.196.765.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	%	50,38	52,67	54,96	875.000.000	57,25	666.335.000	59,54	686.948.000	61,83	705.948.000	64,12	727.598.000	64,12	3.661.829.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Hasil Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	96,47	87,06	88,24	170.000.000	90,00	155.000.000	91,76	162.000.000	93,53	171.000.000	95,29	248.000.000	95,29	906.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
2	**10**		**Pertanahan**								**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**400.000.000**		
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	400.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	**11**		**Lingkungan Hidup**						**35.080.621.000**		**50.642.778.000**		**45.100.534.000**		**50.299.841.000**		**43.928.066.000**		**225.051.840.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	17.325.001.000	100,00	18.398.030.000	100,00	18.804.350.000	100,00	18.207.834.000	100,00	18.577.889.000	100,00	91.313.104.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	12,50	25,00	50,00	220.000.000	62,50	195.000.000	75,00	195.000.000	87,50	205.000.000	100,00	205.000.000	100,00	1.020.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	73,92	74,01	74,10	3.605.552.000	74,19	3.833.742.000	74,28	4.018.253.000	74,36	4.204.997.000	74,45	4.389.044.000	74,45	20.051.588.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah	%	13,33	20,00	26,67	3.244.490.000	33,33	13.768.879.000	40,00	6.537.939.000	46,67	11.107.239.000	53,33	3.100.188.000	53,33	37.758.735.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	%	25,00	30,00	35,00	110.000.000	40,00	113.300.000	45,00	116.699.000	50,00	120.199.000	55,00	120.199.000	55,00	580.397.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan	%	1,23	4,29	7,36	220.000.000	10,43	226.600.000	13,50	233.398.000	16,56	240.399.000	19,63	247.610.000	19,63	1.168.007.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	%	9,78	11,30	13,26	254.000.000	15,65	289.000.000	18,48	319.000.000	21,30	349.000.000	24,13	349.000.000	24,13	1.560.000.000	Nandur Wit Nggo Anak Putu	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup	%	15,69	16,67	33,33	175.000.000	50,00	180.000.000	66,67	185.000.000	83,33	200.000.000	100,00	225.000.000	100,00	965.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	80.000.000	100,00	91.200.000	100,00	102.436.000	100,00	113.709.000	100,00	113.709.000	100,00	501.054.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	%	22,00	24,00	26,00	9.846.578.000	27,00	13.547.027.000	28,00	14.588.459.000	30,00	15.551.464.000	30,00	16.600.427.000	30,00	70.133.955.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Hidup
2	**12**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						**9.954.634.000**		**10.557.627.000**		**10.536.722.000**		**9.638.476.000**		**9.716.833.000**		**50.404.292.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.568.839.000	100,00	5.062.399.000	100,00	5.008.689.000	100,00	4.102.434.000	100,00	4.172.571.000	100,00	22.914.932.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	%	100,00	100,00	100,00	3.419.323.000	100,00	3.455.369.000	100,00	3.456.914.000	100,00	3.458.505.000	100,00	3.460.144.000	100,00	17.250.255.000	GO-LAK, Satu Data Untuk Semua, Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00	100,00	310.815.000	100,00	366.491.000	100,00	369.227.000	100,00	372.045.000	100,00	374.948.000	100,00	1.793.526.000	GO-LAK, Satu Data Untuk Semua, Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	1.655.657.000	100,00	1.673.368.000	100,00	1.701.892.000	100,00	1.705.492.000	100,00	1.709.170.000	100,00	8.445.579.000	Satu Data Untuk Semua	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						**13.789.772.000**		**15.255.127.000**		**15.160.839.000**		**14.993.286.000**		**15.174.220.000**		**74.373.244.000**		
2	13	XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.906.273.000	100,00	5.346.488.000	100,00	5.386.278.000	100,00	4.607.930.000	100,00	4.796.512.000	100,00	25.043.481.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertata	%	0,00	0,00	0,22	80.000.000	2,00	82.400.000	4,90	84.872.000	6,90	87.418.000	8,91	90.040.000	8,91	424.730.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100,00	100,00	100,00	1.201.904.000	100,00	1.219.960.000	100,00	1.338.557.000	100,00	1.352.712.000	100,00	1.377.442.000	100,00	6.490.575.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDes yang Meningkat Klasifikasinya	BUM Desa	10	40	46	7.097.417.000	56	7.886.978.000	67	7.816.254.000	78	8.394.303.000	89	8.342.778.000	89	39.537.730.000	DESMELI, KAPOK PAK EKO	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	10,22	10,22	13,04	504.178.000	15,87	719.301.000	18,70	534.878.000	21,52	550.923.000	24,35	567.448.000	24,35	2.876.728.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**14**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						**13.394.115.000**		**13.348.427.000**		**13.553.140.000**		**13.817.722.000**		**14.195.575.000**		**68.308.979.000**		
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	23,08	23,08	25,00	210.000.000	33,33	202.000.000	41,67	157.700.000	50,00	162.427.000	54,17	272.781.000	54,17	1.004.908.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	%	70,77	60,00	63,50	11.916.749.000	63,50	11.916.749.000	64,50	12.130.545.000	65,00	12.350.754.000	65,00	12.577.568.000	65,00	60.892.365.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	%	70,37	70,37	70,39	1.267.366.000	70,40	1.229.678.000	70,41	1.264.895.000	70,42	1.304.541.000	70,42	1.345.226.000	70,42	6.411.706.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**15**		**Perhubungan**						**25.111.486.000**		**29.446.061.000**		**31.750.918.000**		**37.513.007.000**		**29.882.027.000**		**153.703.498.999**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	6.503.215.000	100,00	6.830.508.000	100,00	6.874.026.000	100,00	6.046.229.000	100,00	6.236.545.000	100,00	32.490.522.999		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	71,56	71,89	72,22	18.608.271.000	78,44	22.615.553.000	79,11	24.876.892.000	79,78	31.466.778.000	80,44	23.645.482.000	80,44	121.212.976.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
2	**16**		**Komunikasi dan informatika**						**10.220.573.000**		**12.323.311.000**		**12.438.273.000**		**12.070.593.000**		**12.474.776.000**		**59.527.526.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.937.290.000	100,00	5.282.625.000	100,00	5.243.591.000	100,00	4.920.297.000	100,00	5.267.195.000	100,00	25.650.998.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan informatika
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	%	11,72	20,90	25,88	2.101.841.000	30,20	2.232.801.000	34,51	2.359.560.000	28,82	2.287.121.000	43,14	2.315.510.000	43,14	11.296.833.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan informatika
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	nilai	3,85	3,86	3,85	3.181.442.000	3,85	4.807.885.000	3,86	4.835.122.000	3,86	4.863.175.000	3,87	4.892.071.000	3,87	22.579.695.000	Satu Data Untuk Semua, DESMELI	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan informatika
2	**17**		**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						**5.198.251.000**		**5.220.083.000**		**5.684.797.000**		**6.125.322.000**		**6.991.600.000**		**29.220.053.000**		
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	21,05	26,67	33,33	270.000.000	40,00	278.100.000	46,67	286.444.000	53,33	295.038.000	63,33	295.038.000	63,33	1.424.620.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	%	5,15	11,34	17,53	213.978.000	23,71	221.628.000	29,90	229.508.000	36,08	237.824.000	42,27	245.984.000	42,27	1.148.922.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi	%	7,40	14,79	22,19	377.834.000	29,59	321.189.000	36,98	330.825.000	44,38	340.750.000	51,78	350.973.000	51,78	1.721.571.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	4,23	4,06	8,75	1.958.714.000	10,27	3.306.246.000	10,89	3.709.826.000	11,74	4.088.462.000	12,59	4.900.252.000	12,59	17.963.500.000	Satu Data Untuk Semua, Kebumen Ekonomi Handal, ANDALAN PAS, DEMEN MBUMEN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	unit usaha	25	30	35	2.377.725.000	40	1.092.920.000	45	1.128.194.000	50	1.163.248.000	55	1.199.353.000	55,00	6.961.440.000	Satu Data Untuk Semua, Kebumen Ekonomi Handal, ANDALAN PAS, KUMPUL BAKUL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**18**		**Penanaman Modal**						**6.253.933.000**		**6.846.586.000**		**6.741.036.000**		**6.104.135.000**		**6.565.659.000**		**32.511.349.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	5.033.141.000	100,00	5.547.219.000	100,00	5.403.391.000	100,00	4.725.490.000	100,00	5.146.807.000	100,00	25.856.048.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	miliar rupiah	388,76	392,53	397,00	145.000.000	401,00	149.350.000	405,00	153.833.000	409,00	158.448.000	413,00	163.000.000	2.025,00	769.631.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	dokumen	0	40	45	240.000.000	50	247.200.000	55	254.626.000	60	262.265.000	65	270.134.000	65,00	1.274.225.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	%	100,00	100,00	100,00	373.330.000	100,00	385.280.000	100,00	396.122.000	100,00	408.875.000	100,00	420.190.000	100,00	1.983.797.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	%	0,00	26,33	27,44	422.462.000	28,56	476.337.000	29,67	490.628.000	30,78	505.347.000	31,89	520.507.000	31,89	2.415.281.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	40.000.000	100,00	41.200.000	100,00	42.436.000	100,00	43.710.000	100,00	45.021.000	100,00	212.367.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	**19**		**Kepemudaan dan Olahraga**						**4.477.713.000**		**4.538.490.000**		**4.662.942.000**		**4.791.130.000**		**4.923.162.000**		**23.393.437.000**		
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	1,70	2,56	3,07	770.124.000	3,58	380.624.000	3,92	391.439.000	4,43	402.579.000	4,60	414.053.000	4,60	2.358.819.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga	%	50,00	52,63	55,00	3.313.161.000	56,67	3.754.438.000	63,33	3.858.805.000	66,67	3.966.305.000	70,00	4.077.028.000	70,00	18.969.737.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Prestasi Kepramukaan	%	33,33	50,00	60,00	394.428.000	66,67	403.428.000	60,00	412.698.000	66,67	422.246.000	50,00	432.081.000	60,67	2.064.881.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	**20**		**Statistik**						**141.929.000**		**162.187.000**		**167.052.000**		**172.064.000**		**177.226.000**		**820.458.000**		
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	141.929.000	100,00	162.187.000	100,00	167.052.000	100,00	172.064.000	100,00	177.226.000	100,00	820.458.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Statistik
2	**21**		**Persandian**						**337.210.000**		**347.326.000**		**357.746.000**		**368.478.000**		**379.533.000**		**1.790.293.000**		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	%	10,00	16,74	38,91	337.210.000	61,30	347.326.000	83,48	357.746.000	100,00	368.478.000	100,00	379.533.000	100,00	1.790.293.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Persandian
2	**22**		**Kebudayaan**						**2.377.350.000**		**1.500.000.000**		**1.565.000.000**		**1.680.000.000**		**1.780.000.000**		**8.902.350.000**		
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	%	18,75	21,88	28,13	2.041.000.000	34,38	1.200.000.000	40,63	1.265.000.000	46,88	1.380.000.000	53,13	1.480.000.000	53,13	7.366.000.000	MESIN SERBU	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	17,58	19,78	21,98	336.350.000	25,27	300.000.000	27,47	300.000.000	30,77	300.000.000	32,97	300.000.000	32,97	1.536.350.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
2	**23**		**Perpustakaan**						**938.696.000**		**1.012.506.000**		**1.048.925.000**		**1.068.771.000**		**1.099.146.000**		**5.168.044.000**		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	12,39	12,85	12,89	921.072.000	12,93	993.120.000	12,97	1.027.601.000	13,02	1.045.315.000	13,06	1.073.346.000	13,06	5.060.454.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	%	0,00	20,00	40,00	17.624.000	60,00	19.386.000	80,00	21.324.000	100,00	23.456.000	100,00	25.800.000	100,00	107.590.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
2	**24**		**Kearsipan**						**3.501.176.000**		**3.771.192.000**		**3.912.750.000**		**4.301.317.000**		**4.402.969.000**		**19.889.404.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	2.981.827.000	100,00	3.236.264.000	100,00	3.361.775.000	100,00	3.733.813.000	100,00	3.818.439.000	100,00	17.132.118.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku	%	64,56	68,95	71,57	519.349.000	74,31	534.928.000	76,27	550.975.000	78,24	567.504.000	80,20	584.530.000	80,20	2.757.286.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3			**Urusan Pemerintahan Pilihan**																		
3	**25**		**Kelautan dan Perikanan**						**15.791.686.000**		**12.370.854.000**		**12.302.359.000**		**12.015.729.000**		**12.472.952.000**		**64.953.580.000**		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,00	1,25	2,50	6.182.990.000	3,75	5.381.325.000	5,00	5.539.953.000	6,25	3.831.071.000	7,50	3.807.084.000	7,50	24.742.423.000	Pengembangan Potensi Lokal Perikanan Darat, Perikanan Tangkap dan Kampung Garam	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	%	0,00	5,00	10,00	7.758.696.000	15,00	5.027.168.000	20,00	4.722.781.000	25,00	5.343.053.000	30,00	5.717.198.000	30,00	28.568.896.000	Pengembangan Potensi Lokal Perikanan Darat, Perikanan Tangkap dan Kampung Garam	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	%	57,14	64,29	71,43	280.000.000	78,57	294.000.000	85,71	308.700.000	92,86	324.135.000	100,00	340.340.000	100,00	1.547.175.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	0,00	12,50	25,00	1.570.000.000	32,50	1.668.361.000	40,00	1.730.925.000	47,50	2.517.470.000	55,00	2.608.330.000	55,00	10.095.086.000	Pengembangan Potensi Lokal Perikanan Darat, Perikanan Tangkap dan Kampung Garam	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3	**26**		**Pariwisata**						**16.379.878.000**		**12.640.401.000**		**13.148.948.000**		**12.924.799.000**		**13.287.093.000**		**68.381.119.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	6.570.653.000	100,00	6.937.196.000	100,00	7.072.642.000	100,00	6.210.699.000	100,00	6.351.424.000	100,00	33.142.614.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	%	79,03	80,90	82,77	8.214.904.000	84,64	3.649.054.000	86,52	3.960.530.000	88,39	4.534.850.000	90,26	4.691.041.000	90,26	25.050.379.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-76,33	24,00	19,00	1.494.321.000	20,00	1.951.151.000	25,00	2.009.686.000	33,00	2.069.977.000	35,00	2.132.076.000	35,00	9.657.211.000	DEMEN MBUMEN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	0,00	18,75	20,00	100.000.000	20,00	103.000.000	20,00	106.090.000	20,00	109.273.000	20,00	112.552.000	20,00	530.915.000	Kebumen Ekonomi Handal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
3	**27**		**Pertanian**						**39.131.357.000**		**38.876.415.000**		**38.926.073.000**		**40.936.165.000**		**41.162.142.000**		**199.032.152.000**		
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	13,00	9,24	11,20	14.768.800.000	12,62	13.179.151.000	12,70	11.593.629.000	12,79	13.513.858.000	12,91	12.905.061.000	12,91	65.960.499.000	TANI MULYO	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	%	14,50	18,00	20,00	17.452.217.000	22,00	19.332.133.000	24,00	20.766.710.000	26,00	20.585.438.000	28,00	21.061.577.000	28,00	99.198.075.000	BANYU MILI	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	26,12	2,73	2,81	1.305.788.000	2,89	1.349.927.000	2,98	1.399.179.000	3,07	1.450.565.000	3,17	1.505.460.000	3,17	7.010.919.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	9,54	8,82	8,83	565.000.000	9,42	1.559.275.000	10,01	1.398.375.000	10,59	1.398.375.000	11,18	1.398.375.000	11,18	6.319.400.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	%	100,00	100,00	100,00	100.000.000	100,00	103.000.000	100,00	106.090.000	100,00	109.272.000	100,00	112.550.000	100,00	530.912.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	%	54,00	55,00	56,00	4.939.552.000	57,00	3.352.929.000	58,00	3.662.090.000	59,00	3.878.657.000	60,00	4.179.119.000	60,00	20.012.347.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
3	**29**		**Energi dan Sumber Daya Mineral**						**30.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**90.000.000**		
3	29	05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	%	100,00	100,00	100,00	30.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	90.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**30**		**Perdagangan**						**17.726.300.000**		**19.139.888.000**		**19.517.236.000**		**22.298.376.000**		**22.918.534.000**		**101.600.334.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	12.256.300.000	100,00	12.599.138.000	100,00	12.784.364.000	100,00	11.971.967.000	100,00	12.447.134.000	100,00	62.058.903.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	miliar rupiah	8,50	11,55	11,55	4.100.000.000	12,42	4.982.000.000	12,91	5.114.360.000	13,41	8.647.090.000	14,18	8.730.203.000	64	31.573.653.000	KUMPUL BAKUL, TANI MULYO (sistem resi gudang)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	%	-1,31	3,00	2,50	370.000.000	1,50	400.000.000	1,50	425.000.000	1,50	450.000.000	1,50	475.000.000	1,70	2.120.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Perdagangan	juta rupiah	595,54	1.798,39	1.900,00	250.000.000	2.000,00	257.500.000	2.100,00	265.225.000	2.200,00	273.182.000	2.300,00	281.377.000	10.500,00	1.327.284.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang Tertera	%	37,29	49,07	53,97	350.000.000	58,88	360.500.000	63,79	371.315.000	68,69	382.455.000	73,60	393.928.000	73,60	1.858.198.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	%	63,91	67,27	68,77	400.000.000	70,27	540.750.000	71,77	556.972.000	73,27	573.682.000	74,77	590.892.000	74,77	2.662.296.000	DEMEN MBUMEN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
3	**31**		**Perindustrian**						**3.562.997.000**		**3.776.639.000**		**3.811.960.000**		**3.848.041.000**		**3.823.405.000**		**18.823.042.000**		
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	%	0,00	4,92	9,96	3.212.997.000	15,13	3.166.639.000	20,43	3.176.960.000	25,90	3.187.591.000	31,50	3.137.041.000	31,50	15.881.228.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentasi Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	250.000.000	100,00	500.000.000	100,00	515.000.000	100,00	530.450.000	100,00	546.364.000	100,00	2.341.814.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi Industri	dokumen	1	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	5	600.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
3	**31**		**Transmigrasi**						**250.000.000**		**260.000.000**		**270.000.000**		**280.000.000**		**290.000.000**		**1.350.000.000**		
3	31	04	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	%	0,00	0,00	20,00	250.000.000	20,00	260.000.000	20,00	270.000.000	20,00	280.000.000	20,00	290.000.000	100,00	1.350.000.000		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Transmigrasi
4			**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**																		
4	**01**		**Sekretariat Daerah**						**37.651.439.000**		**37.599.058.000**		**38.515.899.000**		**38.078.399.000**		**38.726.222.000**		**190.571.017.000**		
4	01	01	Program Administrasi Umum (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Nilai IKM Sekretariat Daerah	nilai	81,97	82	83,00	23.889.294.000	84,00	23.685.244.000	85,00	24.202.662.000	85,50	23.353.756.000	86,00	23.577.832.000	86,00	118.708.788.000		Sekretariat Daerah
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	nilai	3,32	3,32	2,61	10.795.591.000	2,78	10.338.871.000	2,95	10.640.042.000	3,12	10.950.248.000	3,29	11.269.759.000	3,29	53.994.511.000	BASUH, SIBUSAH, TUPAT RUJI	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	%		5,48	87,00	2.966.554.000	88,00	3.574.943.000	89,00	3.673.195.000	90,00	3.774.395.000	91,00	3.878.631.000	91,00	17.867.718.000		Sekretariat Daerah
4	**02**		**Sekretariat DPRD**						**52.531.180.000**		**53.039.195.000**		**53.963.556.000**		**54.084.153.000**		**54.408.511.000**		**268.026.595.000**		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	02	01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	37.606.680.000	100,00	37.554.195.000	100,00	37.656.556.000	100,00	37.917.153.000	100,00	37.961.511.000	100,00	188.696.095.000		Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100,00	100,00	100,00	14.924.500.000	100,00	15.485.000.000	100,00	16.307.000.000	100,00	16.167.000.000	100,00	16.447.000.000	100,00	79.330.500.000		Sekretariat DPRD
5			**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**																		
5	**01**		**Perencanaan**						**6.991.025.000**		**7.060.666.000**		**7.329.416.000**		**7.261.835.000**		**7.503.412.000**		**36.146.354.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.753.034.000	100,00	5.092.682.000	100,00	5.119.041.000	100,00	4.422.435.000	100,00	4.218.011.000	100,00	23.605.203.000		PD Pengampu Urusan Perencanaan
5	01	02	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	90,00	90,00	90,00	1.120.991.000	90,00	1.230.811.000	90,00	1.451.085.000	90,00	1.877.331.000	90,00	1.619.270.000	90,00	7.299.488.000		PD Pengampu Urusan Perencanaan
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	1.117.000.000	100,00	737.173.000	100,00	759.290.000	100,00	962.069.000	100,00	1.666.131.000	100,00	5.241.663.000		PD Pengampu Urusan Perencanaan
5	**02**		**Keuangan**						**660.671.273.000**		**629.915.457.000**		**633.375.574.000**		**641.450.854.000**		**632.502.886.000**		**3.197.916.044.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	32.164.245.000	100,00	26.507.144.000	100,00	29.453.595.000	100,00	26.404.370.000	100,00	26.212.148.000	100,00	140.741.502.000		PD Pengampu Urusan Keuangan
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,47	95,36	95,35	621.538.019.000	95,54	595.940.840.000	95,72	595.790.819.000	95,89	606.981.723.000	96,05	597.574.970.000	96,05	3.017.826.371.000	Festival Anggaran, Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, ANDALAN PAS, TUPAT RUJI	PD Pengampu Urusan Keuangan
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	83,00	84,00	86,79	1.727.363.000	87,73	1.779.184.000	88,67	1.932.559.000	89,62	1.340.089.000	90,56	1.380.292.000	90,56	8.159.487.000		PD Pengampu Urusan Keuangan
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	5.241.646.000	100,00	5.688.289.000	100,00	6.198.601.000	100,00	6.724.672.000	100,00	7.335.476.000	100,00	31.188.684.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan	PD Pengampu Urusan Keuangan
5	**03**		**Kepegawaian**						**11.407.497.000**		**13.062.119.000**		**12.926.347.000**		**12.500.607.000**		**12.885.449.000**		**62.782.019.000**		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	9.547.747.000	100,00	10.261.489.000	100,00	9.794.038.000	100,00	9.035.879.000	100,00	9.187.539.000	100,00	47.826.692.000		PD Pengampu Urusan Kepegawaian
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	73,06	89,00	90,00	1.859.750.000	91,00	2.800.630.000	92,00	3.132.309.000	93,00	3.464.728.000	93,99	3.697.910.000	93,99	14.955.327.000	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
5	**04**		**Pendidikan dan Pelatihan**						**3.499.000.000**		**5.200.000.000**		**5.395.000.000**		**5.565.000.000**		**5.755.000.000**		**25.414.000.000**		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya	%	65,66	68,09	70,04	3.499.000.000	72,08	5.200.000.000	73,18	5.395.000.000	75,09	5.565.000.000	77,21	5.755.000.000	77,21	25.414.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan	PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
5	**05**		**Penelitian dan Pengembangan**						**727.607.000**		**845.800.000**		**907.300.000**		**911.600.000**		**916.600.000**		**4.308.907.000**		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	%	75,00	72,73	75,00	727.607.000	75,00	845.800.000	83,30	907.300.000	83,30	911.600.000	91,67	916.600.000	91,67	4.308.907.000		PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
6			**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**																		
6	**01**		**Inspektorat Daerah**						**6.568.828.000**		**13.395.102.000**		**12.748.625.000**		**15.034.570.000**		**14.272.403.000**		**62.019.528.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	5.469.519.000	100,00	9.680.919.000	100,00	9.173.566.000	100,00	11.354.860.000	100,00	10.460.652.000	100,00	46.139.516.000		PD Pengampu Urusan Pengawasan
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 1/ Level 2/ Level 3/ Level 4/ Level 5	Level 2	Level 3	Level 3	805.558.000	Level 3	2.115.000.000	Level 3	2.341.400.000	Level 3	2.409.042.000	Level 3	2.502.963.000	Level 3	10.173.963.000	Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli	PD Pengampu Urusan Pengawasan
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	nilai	3,34	3,34	3,34	293.751.000	3,40	1.599.183.000	3,45	1.233.659.000	3,50	1.270.668.000	3,50	1.308.788.000	3,50	5.706.049.000	Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli	PD Pengampu Urusan Pengawasan
7			**Unsur Kewilayahan**																		
7	**01**		**Kecamatan**						**71.467.540.000**		**71.904.256.000**		**69.034.256.000**		**70.144.256.000**		**68.904.256.000**		**351.454.564.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	52.332.407.000	100,00	54.721.123.000	100,00	54.721.123.000	100,00	54.721.123.000	100,00	54.721.123.000	100,00	271.216.899.000		Kecamatan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	83,92	84,00	85,00	1.642.660.000	86,00	1.642.660.000	87,00	1.642.660.000	88,00	1.642.660.000	89,00	1.642.660.000	89,00	8.213.300.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	%	83,70	83,00	84,00	14.083.656.000	85,00	9.131.656.000	86,00	9.131.656.000	87,00	9.131.656.000	88,00	9.131.656.000	88,00	50.610.280.000	Tiada Hari Tanpa Pelayanan, DESMELI	Kecamatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	480.910.000	100,00	480.910.000	100,00	480.910.000	100,00	480.910.000	100,00	480.910.000	100,00	2.404.550.000		Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	20,27	21,38	24,05	2.927.907.000	29,17	5.927.907.000	34,04	3.057.907.000	38,08	4.167.907.000	42,09	2.927.907.000	42,09	19.009.535.000		Kecamatan
8			**Unsur Pemerintahan Umum**																		
8	**01**		**Kesatuan Bangsa dan Politik**						**7.609.369.000**		**9.217.685.000**		**69.072.285.000**		**10.900.056.000**		**10.424.021.000**		**107.223.416.000**		
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	1.936.628.000	100,00	3.997.926.000	100,00	3.237.933.000	100,00	4.495.448.000	100,00	3.374.832.000	100,00	17.042.767.000		PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah per 100.000 penduduk	0,00	12,21	24,50	483.247.000	41,64	695.875.000	55,93	716.751.000	87,79	738.253.000	133,79	760.400.000	133,79	3.394.526.000		PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum	%	67,59	67,59	67,59	3.420.289.000	67,59	2.218.907.000	69,38	62.428.200.000	69,38	2.432.700.000	69,38	2.437.200.000	69,38	72.937.296.000		PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100,00	100,00	100,00	76.764.000	100,00	84.532.000	100,00	87.069.000	100,00	89.680.000	100,00	92.370.000	100,00	430.415.000		PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	jumlah per 100.000 penduduk	12,21	24,50	36,71	1.513.342.000	54,64	365.710.000	75,00	438.852.000	99,14	526.627.000	129,15	631.947.000	129,15	3.476.478.000		PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	57,14	60,71	179.099.000	64,29	1.854.735.000	71,43	2.163.480.000	75,00	2.617.348.000	78,57	3.127.272.000	78,57	9.941.934.000		PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
				TOTAL					**2.964.098.462.000**		**2.997.416.803.000**		**3.100.365.258.000**		**3.054.001.724.000**		**3.066.172.441.000**		**15.182.054.688.000**		

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Penetapan kinerja pemerintah tersebut untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Pemilihan dan penetapan IKU Daerah Kabupaten Kebumen mempertimbangkan ketercapaian visi misi daerah dan arah kebijakan strategis, kelaziman indikator makro pada bidang tertentu, kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja daerah dan bidang kewenangan, tugas, fungsi dan peran lainnya. Selengkapnya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ditampilkan pada **Tabel 8.1**, **Tabel 8.2** dan **Tabel 8.3**.

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	69,81	70,00	70,57	71,00	71,50	72,00	72,50
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,46	3,91	4,05-5,36	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50
5	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	20,02	20,45	20,50-21,00	21,00	21,00-21,50	21,50-22,00	22,00
6	Tingkat Kemiskinan	%	17,59	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00	13,50-14,00	13,00-13,50
7	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	53,98	57,86	59,11	61,56	64,15	67,94	70,43
8	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	-	75,70	76,00-76,50	77,00-77,50	78,00-78,50	79,00-79,50	80,00-80,50

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Urusan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pendidikan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
2	Kesehatan	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	56,15	56,55	57,35	59,16	61,48	63,67	65,89	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	11,89	27,12	31,87	40,21	48,72	57,23	65,73	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	26,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6	Sosial	Persentase Capaian SPM Sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
7	Tenaga Kerja	Persentase Keterserapan	%	15,76	18,11	21,52	23,40	25,32	27,43	28,75	Perangkat Daerah

No	Urusan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Tenaga Kerja									Pengampu Urusan Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
10	Pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	73,92	74,01	74,10	74,19	74,28	74,36	74,45	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95,00	94,75	94,85	95,00	95,15	95,30	95,45	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	20,27	21,38	24,05	29,18	34,08	38,08	42,09	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	70,77	60,00	63,50	63,50	64,50	65,00	65,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	71,56	71,89	72,22	78,44	79,11	79,78	80,44	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	indeks	3,42	3,42	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Sehat	%	21,05	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	63,33	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	%	4,06	8,75	10,27	10,89	11,76	12,61	13,22	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,00	1,00	2,15	3,18	4,21	5,24	6,27	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
19	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	1,70	2,56	3,07	3,58	3,92	4,43	4,60	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Prestasi	%	50,00	52,63	55,00	56,67	63,33	66,67	70,00	Perangkat Daerah

No	Urusan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Olahraga									Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
20	Statistik	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Statistik
21	Persandian	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	%	10,00	16,74	38,91	61,30	83,48	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Persandian
22	Kebudayaan	Persentase Budaya yang Dilestarikan	%	18,17	20,83	25,05	29,82	34,05	38,82	43,05	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
23	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	12,39	12,85	12,89	12,93	12,97	13,02	13,06	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
24	Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	%	64,56	68,95	71,57	74,31	76,27	78,24	80,20	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan	%	0,00	2,00	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
26	Pariwisata	Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD	%	0,84	1,84	1,90	1,91	2,03	2,11	2,24	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
27	Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
29	Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	-3,05	10,30	5,42	5,14	4,89	4,66	4,45	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
30	Perindustrian	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	2,92	8,31	6,15	5,79	5,47	5,19	4,93	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
31	Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	%	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Transmigrasi
32	Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81,97	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	Sekretariat Daerah (Sekretaris Daerah)
		Tingkat Kemiskinan	%	17,59	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00	13,50-14,00	13,00-13,50	Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
		Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,46	3,91	4,05-5,36	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	Sekretariat Daerah (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Daerah (Asisten

No	Urusan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pemerintah Daerah									Administrasi)
33	Sekretariat DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
34	Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	%	97,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
35	Keuangan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14,59	12,88	14,48	15,13	15,40	15,74	15,63	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
36	Kepegawaian	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	73,06	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,99	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
37	Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	65,66	68,09	70,04	72,08	73,18	75,09	77,21	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
38	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	%	75,00	72,73	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
39	Pengawasan (Inspektorat Daerah)	Nilai Maturitas SPIP	nilai	3,00	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	Inspektorat Daerah
40	Kewilayahan (Kecamatan)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	26 Kecamatan
41	Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	57,14	60,71	64,29	71,43	75,00	78,57	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Umum

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A			**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1			Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,46	3,91	4,05-5,36	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50
2			Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	20,02	20,45	20,50 - 21,00	21,00	21,00 - 21,50	21,50-22,00	22,00	22,00
3			Tingkat Kemiskinan	%	17,59	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00	13,50-14,00	13,00-13,50	13,00-13,50
4			Indeks Pembangunan Manusia	indeks	69,81	70,00	70,57	71,00	71,50	72,00	72,50	72,50
5			Angka Harapan Hidup	tahun	73,40	73,50	73,60	73,70	73,80	73,90	74,00	74,00
6			Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,54	7,64	7,74	7,84	7,94	8,04	8,14	8,14
7			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,07	5,80	5,51-5,58	5,40–5,50	5,30–5,40	5,20–5,30	5,10–5,20	5,10–5,20
8			Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81,97	82,00	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00
9			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B			**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
X	**XX**	**01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
1	**01**		**Pendidikan**									
1	01	02	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	80,31	81,38	82,45	83,51	84,58	85,65	86,71	86,71
1	**02**		**Kesehatan**									
1	02	02	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	02	03	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	%	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	02	04	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	02	05	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	%	58,04	68,04	71,52	74,35	77,17	80,00	81,96	81,96
1	**03**		**Pekerjaan umum dan penataan ruang**									
1	03	02	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80,00	80,00	77,80	80,00	82,50	85,00	87,50	87,50
1	03	03	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	%	17,54	18,75	20,00	21,25	22,50	23,75	25,00	25,00
1	03	06	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	15,98	15,98	15,98	17,04	18,01	19,98	20,04	20,04
1	03	08	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	80,13	80,13	81,14	81,14	82,15	83,16	83,84	83,84
1	03	09	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	%	13,04	13,04	13,91	13,91	15,00	15,00	15,00	15,00
1	03	10	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	70,94	70,94	74,23	76,23	79,48	82,23	85,18	85,18
1	03	11	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	%	44,92	44,92	44,92	50,15	55,08	60,00	64,92	64,92
1	03	12	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	75,00	75,00	91,15	91,25	91,35	91,45	91,55	91,55
1	**04**		**Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
1	04	02	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	04	03	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha	%	4,30	6,89	11,09	15,94	21,12	26,29	31,46	31,46
1	04	04	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	%	19,48	47,36	52,64	64,48	76,32	88,16	100,00	100,00
1	04	05	Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman	%	1,16	1,16	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
1	**05**		**Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**									
1	05	02	Persentase	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Penegakan Perda									
1	05	03	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	26,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	05	04	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	%	69,23	69,23	69,23	73,08	73,08	73,08	76,92	76,92
1	**06**		**Sosial**									
1	06	02	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	%	19,25	15,45	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	73,00
1	06	03	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	06	04	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	%	96,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	06	05	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	%	72,73	74,24	75,75	77,25	78,76	80,27	81,78	81,78
1	06	06	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	06	07	Persentase TMP yang Dikelola	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
2	**07**		**Tenaga Kerja**									
2	07	03	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A"	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	07	04	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	%	15,73	18,32	21,82	25,33	28,50	32,39	35,91	35,91
2	07	05	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	**08**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
2	08	02	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	12,11	13,48	14,31	15,69	17,06	18,43	19,80	19,80
2	08	03	Cakupan Perlindungan Perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	08	04	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	%	12,11	13,28	14,06	15,63	16,80	18,36	19,92	19,92
2	08	05	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	08	06	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	pratama/ madya/ nindya/ utama/ KLA	madya	madya	madya	madya	madya	madya	nindya	nindya
2	08	07	Cakupan Perlindungan Anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	**09**		**Pangan**									
2	09	02	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	%	13,48	17,17	18,70	20,22	21,74	23,26	24,78	24,78
2	09	03	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	%	38,16	40,79	43,17	45,55	47,94	50,32	52,70	52,70
2	09	04	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	%	50,38	52,67	54,96	57,25	59,54	61,83	64,12	64,12
2	09	05	Persentase Hasil	%	96,47	87,06	88,24	90,00	91,76	93,53	95,29	95,29

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan									
2	**10**		**Pertanahan**									
2	10	04	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	**11**		**Lingkungan Hidup**									
2	11	02	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	12,50	25,00	50,00	62,50	75,00	87,50	100,00	100,00
2	11	03	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	73,92	74,01	74,10	74,19	74,28	74,36	74,45	74,45
2	11	04	Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah	%	13,33	20,00	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	53,33
2	11	05	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	%	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
2	11	06	Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan	%	1,23	4,29	7,36	10,43	13,50	16,56	19,63	19,63
2	11	08	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	%	9,78	11,30	13,26	15,65	18,48	21,30	24,13	24,13
2	11	09	Persentase Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup	%	15,69	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
2	11	10	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	11	11	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	%	22,00	24,00	26,00	27,00	28,00	30,00	30,00	30,00
2	**12**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
2	12	02	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	12	03	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	12	04	Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	**13**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
2	13	02	Persentase Desa Tertata	%	0,00	0,00	0,22	2,00	4,90	6,90	8,91	8,91
2	13	03	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	13	04	Jumlah BUM Desa yang Meningkat Klasifikasinya	BUM Desa	10	40	46	56	67	78	89	89
2	13	05	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	10,22	10,22	13,04	15,87	18,70	21,52	24,35	24,35
2	**14**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
2	14	02	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	23,08	23,08	25,00	33,33	41,67	50,00	54,17	54,17
2	14	03	Cakupan Peserta KB Aktif	%	70,77	60,00	63,50	63,50	64,50	65,00	65,00	65,00
2	14	04	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	%	70,37	70,37	70,39	70,40	70,41	70,42	70,42	70,42
2	**15**		**Perhubungan**									
2	15	02	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	71,56	71,89	72,22	78,44	79,11	79,78	80,44	80,44
2	**16**		**Komunikasi dan informatika**									

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	16	02	Indeks PPID	%	11,72	20,90	25,88	30,20	34,51	28,82	43,14	43,14
2	16	03	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	nilai	3,85	3,86	3,85	3,85	3,86	3,86	3,87	3,87
2	**17**		**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
2	17	03	Persentase Koperasi Sehat	%	21,05	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	63,33	63,33
2	17	05	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	%	5,15	11,34	17,53	23,71	29,90	36,08	42,27	42,27
2	17	06	Persentase Advokasi kepada Koperasi	%	7,40	14,79	22,19	29,59	36,98	44,38	51,78	51,78
2	17	07	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	4,23	4,06	8,75	10,27	10,89	11,74	12,59	12,59
2	17	08	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	unit usaha	25	30	35	40	45	50	55	55
2	**18**		**Penanaman Modal**									
2	18	02	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	miliar rupiah	388,76	392,53	397,00	401,00	405,00	409,00	413,00	2.025,00
2	18	03	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	dokumen	0	40	45	50	55	60	65	65
2	18	04	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	18	05	Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	%	0,00	26,33	27,44	28,56	29,67	30,78	31,89	31,89
2	18	06	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	**19**		**Kepemudaan dan Olahraga**									
2	19	02	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	1,70	2,56	3,07	3,58	3,92	4,43	4,60	4,60
2	19	03	Persentase Prestasi Olahraga	%	50,00	52,63	55,00	56,67	63,33	66,67	70,00	70,00
2	19	04	Cakupan Prestasi Kepramukaan	%	33,33	50,00	60,00	66,67	60,00	66,67	50,00	60,67
2	**20**		**Statistik**									
2	20	02	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	**21**		**Persandian**									
2	21	02	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	%	10,00	16,74	38,91	61,30	83,48	100,00	100,00	100,00
2	**22**		**Kebudayaan**									
2	22	02	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	%	18,75	21,88	28,13	34,38	40,63	46,88	53,13	53,13
2	22	05	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	17,58	19,78	21,98	25,27	27,47	30,77	32,97	32,97
2	**23**		**Perpustakaan**									
2	23	02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	12,39	12,85	12,89	12,93	12,97	13,02	13,06	13,06
2	23	03	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00
2	**24**		**Kearsipan**									
2	24	02	Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku	%	64,56	68,95	71,57	74,31	76,27	78,24	80,20	80,20

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3			**Urusan Pemerintahan Pilihan**									
3	**25**		**Kelautan dan Perikanan**									
3	25	03	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,00	1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50	7,50
3	25	04	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	%	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
3	25	05	Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	%	57,14	64,29	71,43	78,57	85,71	92,86	100,00	100,00
3	25	06	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	0,00	12,50	25,00	32,50	40,00	47,50	55,00	55,00
3	**26**		**Pariwisata**									
3	26	02	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	%	79,03	80,90	82,77	84,64	86,52	88,39	90,26	90,26
3	26	03	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-76,33	24,00	19,00	20,00	25,00	33,00	35,00	35,00
3	26	05	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	0,00	18,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	**27**		**Pertanian**									
3	27	02	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	13,00	9,24	11,20	12,62	12,70	12,79	12,91	12,91
3	27	03	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	%	14,50	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	28,00
3	27	04	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	26,12	2,73	2,81	2,89	2,98	3,07	3,17	3,17
3	27	05	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	9,54	8,82	8,83	9,42	10,01	10,59	11,18	11,18
3	27	06	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	27	07	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	%	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	60,00
3	**29**		**Energi dan Sumber Daya Mineral**									
3	29	05	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	**30**		**Perdagangan**									
3	30	03	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	miliar rupiah	8,50	11,55	11,55	12,42	12,91	13,41	14,18	64
3	30	04	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	%	-1,31	3,00	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70
3	30	05	Nilai Ekspor Perdagangan	juta rupiah	595,54	1.798,39	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	10.500,00
3	30	06	Persentase UTTP yang Tertera	%	37,29	49,07	53,97	58,88	63,79	68,69	73,60	73,60
3	30	07	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	%	63,91	67,27	68,77	70,27	71,77	73,27	74,77	74,77
3	**31**		**Perindustrian**									
3	31	02	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	%	0,00	4,92	9,96	15,13	20,43	25,90	31,50	31,50
3	31	03	Persentasi Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	31	04	Jumlah Dokumen Informasi Industri	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5
3	**31**		**Transmigrasi**									
3	31	04	Persentase Transmigran yang	%	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Ditempatkan									
4			**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
4	**01**		**Sekretariat Daerah**									
4	01	01	Nilai IKM Sekretariat Daerah	nilai	81,97	82	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00
4	01	02	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	nilai	3,32	3,32	2,61	2,78	2,95	3,12	3,29	3,29
4	01	03	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	%		5,48	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00
4	**02**		**Sekretariat DPRD**									
4	02	01	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	02	02	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5			**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5	**01**		**Perencanaan**									
5	01	02	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5	01	03	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**02**		**Keuangan**									
5	02	02	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,47	95,36	95,35	95,54	95,72	95,89	96,05	96,05
5	02	03	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	83,00	84,00	86,79	87,73	88,67	89,62	90,56	90,56
5	02	04	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**03**		**Kepegawaian**									
5	03	02	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	73,06	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,99	93,99
5	**04**		**Pendidikan dan Pelatihan**									
5	04	02	Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya	%	65,66	68,09	70,04	72,08	73,18	75,09	77,21	77,21
5	**05**		**Penelitian dan Pengembangan**									
5	05	02	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	%	75,00	72,73	75,00	75,00	83,30	83,30	91,67	91,67
6			**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**									
6	**01**		**Inspektorat Daerah**									
6	01	02	Level Kapabilitas APIP	Level 1/ Level 2/ Level 3/ Level 4/ Level 5	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6	01	03	Nilai Persepsi Korupsi	nilai	3,34	3,34	3,34	3,40	3,45	3,50	3,50	3,50
7			**Unsur Kewilayahan**									
7	**01**		**Kecamatan**									
7	01	02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
7	01	03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	%	83,70	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00

No			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	01	05	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	06	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	20,27	21,38	24,05	29,17	34,04	38,08	42,09	42,09
8			**Unsur Pemerintahan Umum**									
8	**01**		**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
8	01	02	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah per 100.000 penduduk	0,00	12,21	24,50	41,64	55,93	87,79	133,79	133,79
8	01	03	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum	%	67,59	67,59	67,59	67,59	69,38	69,38	69,38	69,38
8	01	04	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	01	05	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	jumlah per 100.000 penduduk	12,21	24,50	36,71	54,64	75,00	99,14	129,15	129,15
8	01	06	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	57,14	60,71	64,29	71,43	75,00	78,57	78,57
C			**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1			Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00
2			Rasio Ketergantungan	%	45,41	45,46	45,51	45,61	45,71	45,81	45,81	45,81

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang proses penyusunannya telah menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas serta melalui beberapa tahapan proses dimulai dari penyusunan rancangan teknokratik, rancangan awal, rancangan, rancangan akhir hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pendekatan politis disamping disajikan dalam penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati, juga telah dilakukan pembahasan penajaman di DPRD sebagai representasi politik/strategis. Sedangkan pendekatan teknokratis telah dilakukan saat penyusunan rancangan teknokratis dan rancangan awal RPJMD, dan disempurnakan dengan pendekatan partisipasif publik melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan diskusi publik lain yang diperuntukkan mendapatkan masukan dari bawah.

Berdasarkan setiap tahapan proses diatas, maka pada akhir periode RPJMD 2021-2026 pembangunan di Kabupaten Kebumen akan mencapai kondisi yang diharapkan sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkeadilan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat karena kebutuhan dasarnya terpenuhi;
2. Kemiskinan turun dan lapangan kerja tersedia;
3. Infrastruktur yang mendukung perekonomian semakin baik;
4. Kapasitas fiskal pemerintah daerah meningkat;
5. Pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima;
6. Desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi (sentra ekonomi atau produksi);
7. Lingkungan hidup dan sumberdaya alam terkelola dengan lestari;
8. Peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah meningkat;
9. Terwujudnya keadilan dan penegakan hukum;
10. Kesetaraan gender dan inklusi sosial semakin baik berbasis satu data;
11. Tingkat kecukupan pangan semakin baik;
12. Berkembangnya dunia usaha, UMKM/IKM dan koperasi;
13. Berkembangnya sektor pariwisata.

RPJMD sebagai dokumen "cetak biru" kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, muatan materi yang disajikan sudah melalui proses analisis yang sistematis mulai dari analisa potensi, permasalahan, isu strategis hingga penyusunan kerangka program dan pendanaannya. Diharapkan Kebumen Semarak : **" Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat"** dapat terwujud, sehingga amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 pada tahapan terakhir menuju "Kebumen Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis" dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan produk hukum daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, karenanya harus menjadi tanggungjawab kolektif seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan secara konsisten mengawal implementasi tahunannya yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan yang selengkapnya dijelaskan dalam kaidah pelaksanaan. Sedangkan untuk mengatur periode transisi berakhirnya RPJMD 2026

dengan RKPD tahun 2027 dimana RPJMD belum disusun akan dijelaskan dalam pedoman transisi.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 merupakan dokumen yang harus dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta masyarakat dalam mengawal pelaksanaan RPJMD, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
4. Bupati berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Sebagaimana diketahui, tahun 2026 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan pada saat itu RPJMD periode berikutnya belum disusun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RKP Tahun 2027.

Pemerintah Kabupaten Kebumen akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan mengimplementasikan berbagai pendekatan proses perencanaan agar perencanaan yang berkualitas dapat terwujud. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2026, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

